BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan sebagai akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan. Disisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan terutama sumber daya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan pembangunan yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, sedangkan rencana pembangunan tahunan terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan *"RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif"*.

Selanjutnya, Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan *"Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD".* Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa *"dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional",* maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang dalam perjalanannya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 September 2018 bahwa Pemilukada Kota Cirebon harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 TPS. Selanjutnya, berdasarkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 telah ditetapkan pemenangnya yaitu pasangan Drs. H. Azis Nashrudin, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih periode 2018-2023 serta telah dilantik pada tanggal 12 Desember 2018.

RPJMD Kota Cirebon sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Cirebon 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Adapun muatan RPJMD meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, RPJMD yang telah disusun menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah,

dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional dan perkembangan di daerah yang mempengaruhi implementasi dari perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Evalusi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut perubahan RPJMD Kota Cirebon memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam

sistem perencanaan nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Kronologis terkait Covid-19 diawali oleh *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia diawali dengan ditemukannya kasus pertama yang terjadi di Kota Depok pada Tanggal 2 Maret 2020.

Sejak ditetapkannya penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam pada tingkat nasional, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Cirebon menunjukkan peningkatan jumlah kasus positif dan wilayah persebaran. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan juga oleh Pemerintah Kota Cirebon yaitu melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Hal ini diikuti dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dengan menambahkan prioritas pembangunan daerah yaitu Pemulihan Ekonomi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Covid-19.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kota Cirebon akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU Pemerintah Daerah), serta indikator IKK tingkat dampak *(impact)* dan tingkat hasil *(outcome)*. Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2020 ini.

Substansi RPJMD Kota Cirebon yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun 2020; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan yang mempedomani peraturan yang berlaku; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran disesuaikan dengan kondisi terkini serta menyesuaikan dengan indikator yang tepat; strategi dan arah kebijakan yang terbaru; program

pembangunan daerah, kegiatan, dan sub kegiatan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

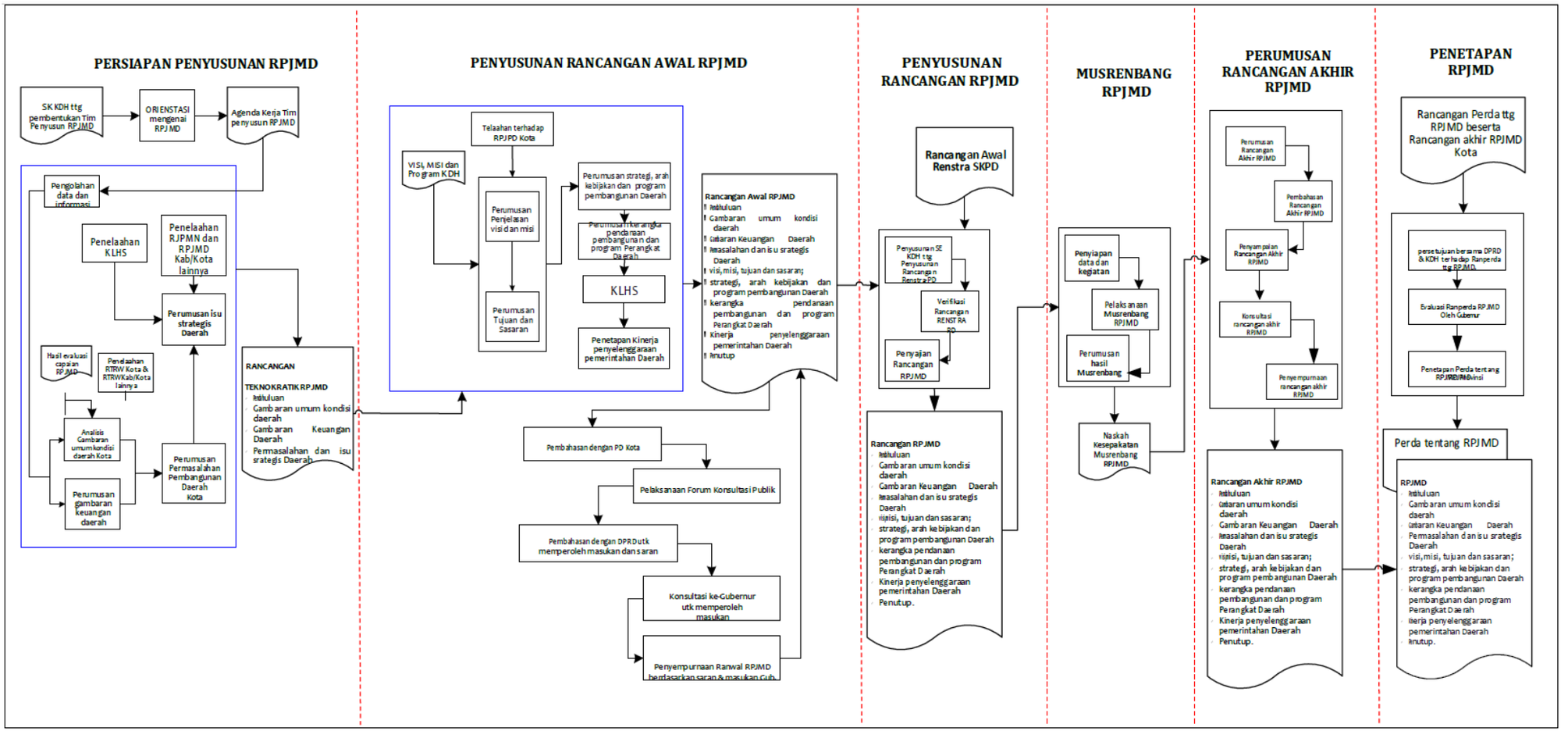
1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Kota Cirebon juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, yaitu:

a. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
b. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, pinjaman daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;
c. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. Pendekatan *Spasial dan a-Spasial* melalui 4 (empat) Wilayah Pengembangan (SWK);
e. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
f. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow programme*.

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Cirebon dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada halaman berikut:

Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023



Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 menjadi dokumen yang sangat strategis bagi Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, karena merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025, periode tahap ke-empat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;
4. Pedoman dan arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19;
5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2021-2023, untuk selanjutnya RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan Rancangan APBD 2022-2023. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan strategis pada Perubahan RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kota Cirebon.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJMD

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 93);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon .

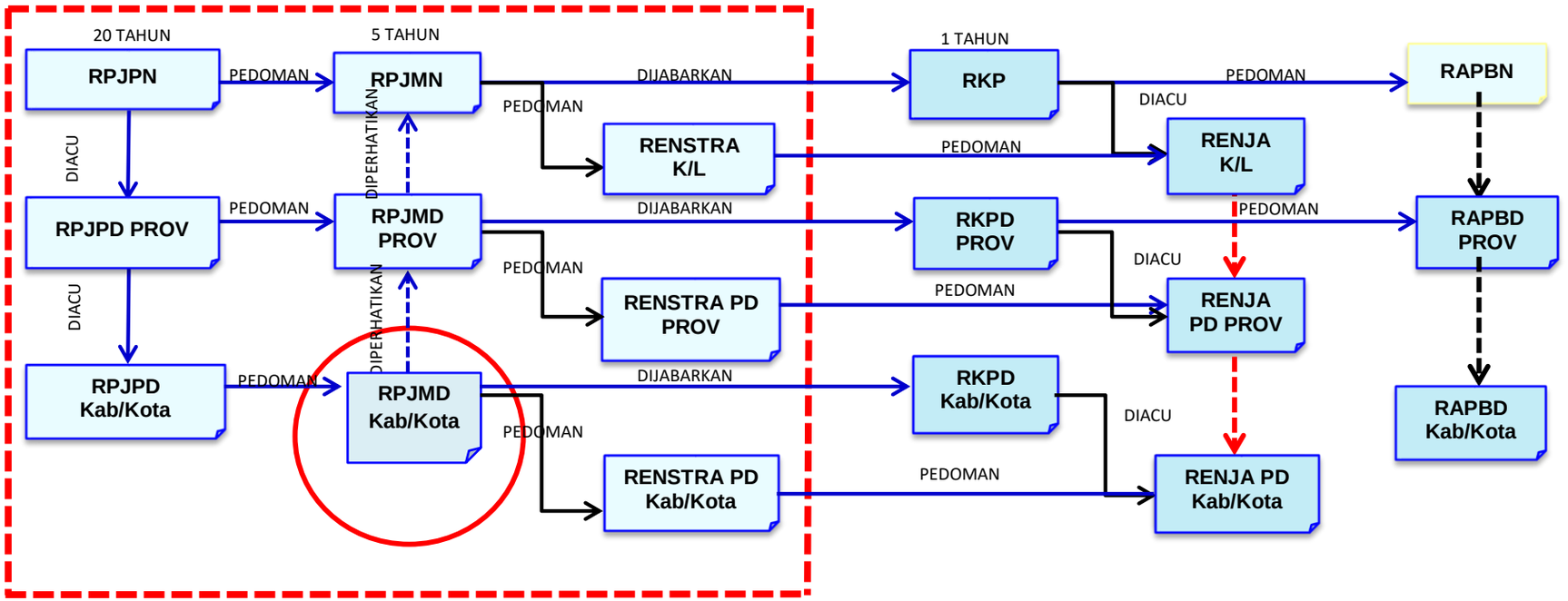
1.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018–2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025, dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar; dan (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.

Selanjutnya Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi dengan Gubernur Jawa Barat cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rancangan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyempurnaan tersebut diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan RPJMD (Musrenbang Perubahan RPJMD) untuk mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan.

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.1 Telaahan Terhadap Isu Global/Internasional dan Nasional

1.3.1.1 Isu Global/Internasional

Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 memberikan arahan tentang pentingnya 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. *SDGs* dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama *MDGs* yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi. Selain itu, *SDGs* juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak *MDGs* lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Adapun tujuan *SDGs* meliputi:

1. Penghapusan kemiskinan;
2. Penghapusan kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
9. Infrastruktur tangguh, industri inklusif, dan inovatif;
10. Penurunan kesenjangan;
11. Kota inklusif dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
14. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem bawah laut;
15. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh;
17. Kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Terkait dengan *SDGs,* Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.*

1.3.1.2 Isu Strategis Nasional

Secara umum, kebijakan pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Kebijakan pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025

tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, sumber daya manusia, dan kemampuan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang tinggi.

Selanjutnya, dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional untuk periode lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh prioritas pembangunan nasional tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyelarasan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan RPJPD Tahun 2005-2025, RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

1.3.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen

jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan RPJMD.

1.3.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan "*RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*". Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "*RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*".

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023.

1.3.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cirebon

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Perubahan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah). Pada tahun 2021, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan dilakukan perubahan, diharapkan dengan selesainya perubahan tersebut secara beriringan akan menyempurnakan Perubahan RPJMD Kota Cirebon.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018–2023 adalah:

1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Kota Cirebon untuk pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018–2023, khususnya untuk tahun 2022-2023 akan menjadi lebih fokus dalam mencapai target pembangunan Kota Cirebon;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cirebon dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 adalah:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu 2018-2020;
2. Memantapkan kembali penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakaan dan program yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pada pembangunan kewilayahan, *pro poor, pro job, pro growth,* dan *pro*

environment dengan memperhatikan potensi daerah;

4. Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara Kota Cirebon dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018–2023 terdiri dari 9 (sembilan) bab. Garis besar isi tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya, menambahkan peraturan yang terbarukan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Cirebon yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penyajian capaian situasi pembangunan sampai dengan tahun 2020. Kondisi terkait dampak Pandemi Covid 19 dan potensi dimasa yang akan datang.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang kinerja keuangan yaitu kinerja pelaksanaan APBD, kebijakan pengelolaan keuangan, kerangka pendanaan, penghitungan kapasitas keuangan daerah, dan proyeksi APBD dan alokasi penggunaannya pada tahun 2018-2023. Fokus perubahan pada Restrukturisasi penatakelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan

pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kota Cirebon. Khusus untuk Perubahan adalah Isu dan Permasalahan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi di masa yang akan datang.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD melalui perumusan program-program indikatif dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bab ini juga menguraikan adanya Restrukturisasi dari Program dan kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disempurnakan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Pemutahkhiran Data Program dan Kegiatan hingga Sub kegiatan. Penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang terbaru, serta penetapan indikator program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2020.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan berbagai program pembangunan daerah, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* beserta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang mencakup aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX : PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan RPJMD secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41^{o} Lintang Selatan dan 108,33^{o} Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter.

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan, 248 Rukun Warga, dan 1.369 Rukun Tetangga dengan luas wilayah administratif sekitar 37,36 km^{2} atau sekitar 3.736 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

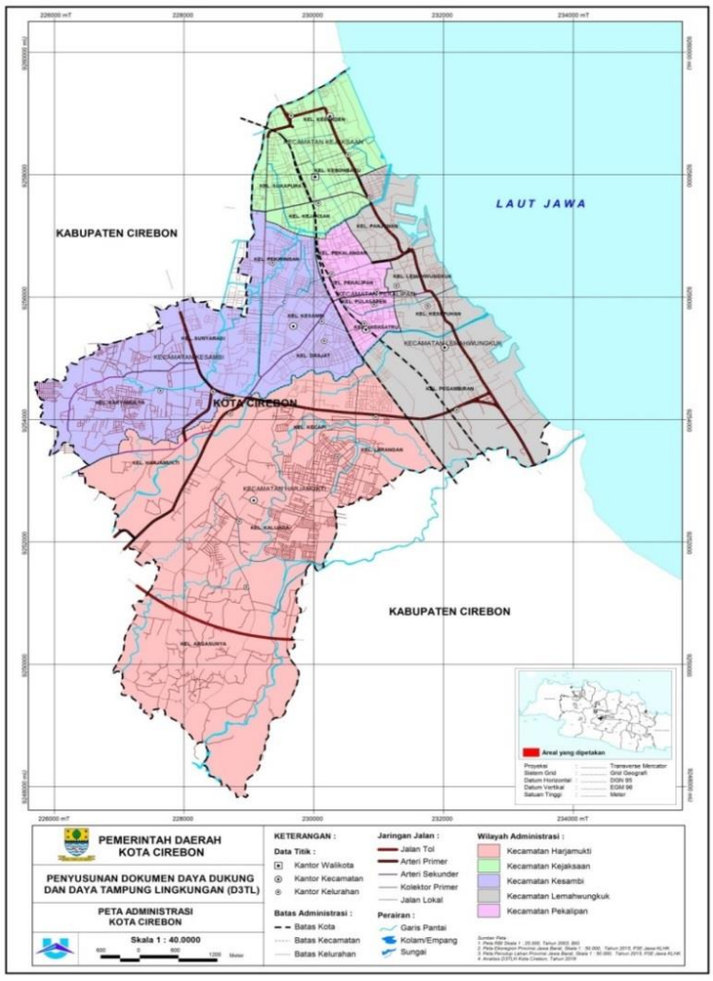
Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
Sebelah Timur : Laut Jawa

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2. Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat;
3. Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4. Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemawungkuk;
5. Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Kalijaga.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Cirebon berikut ini:

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administratif Kota Cirebon



Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, DLH Kota Cirebon, 2018

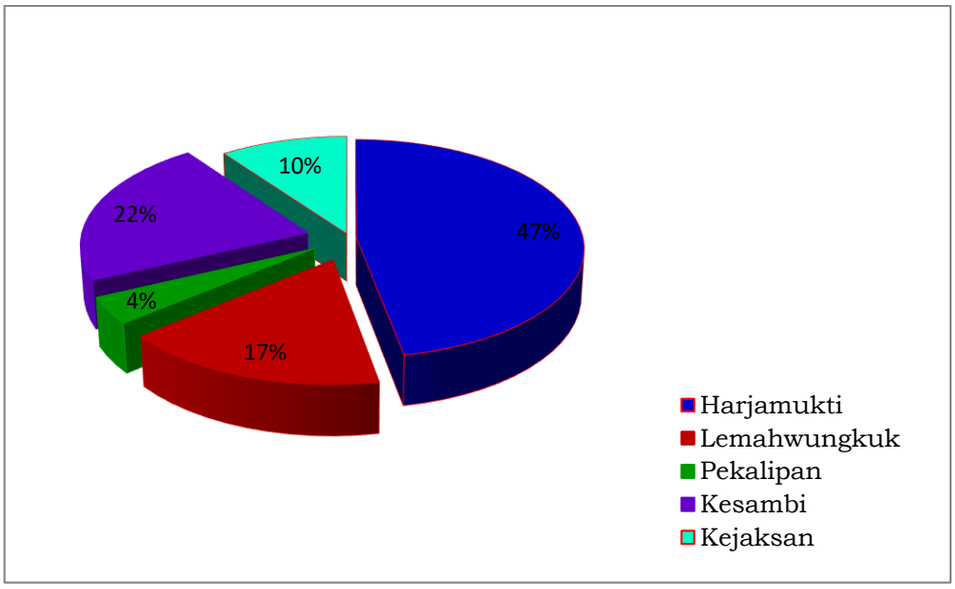
Tabel 2.1
Banyaknya Kelurahan, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan	RW	RT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Harjamukti	17.615	5	76	454
2.	Lemahwungkuk	6.507	4	42	232
3.	Pekalipan	1.561	4	39	186
4.	Kesambi	8.059	5	55	307
5.	Kejaksan	3.616	4	35	183
Jumlah		37.358	22	248	1.369

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2020, BPS, yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2021

Jika dilihat pada tabel diatas, dari 5 kecamatan, 22 kelurahan, 248 RW dan 1.369 RT, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas (17.615 hektar) dan Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil (1.561 hektar). Berikut digambarkan luas wilayah per kecamatan di Kota Cirebon pada diagram dibawah ini:

Gambar 2.2
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon
Tahun 2020



Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.1.1.1 Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang kelaut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya dibeberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan persimpangan jalan yang padat lalu lintas yaitu di sekitar area Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Rajawali, Terminal Bus, dan Jalan Pemuda-By Pass. Selain itu ada beberapa aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui ambang batas (*Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli*) yaitu diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong.

Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal

200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;
2. Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
3. Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
4. Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

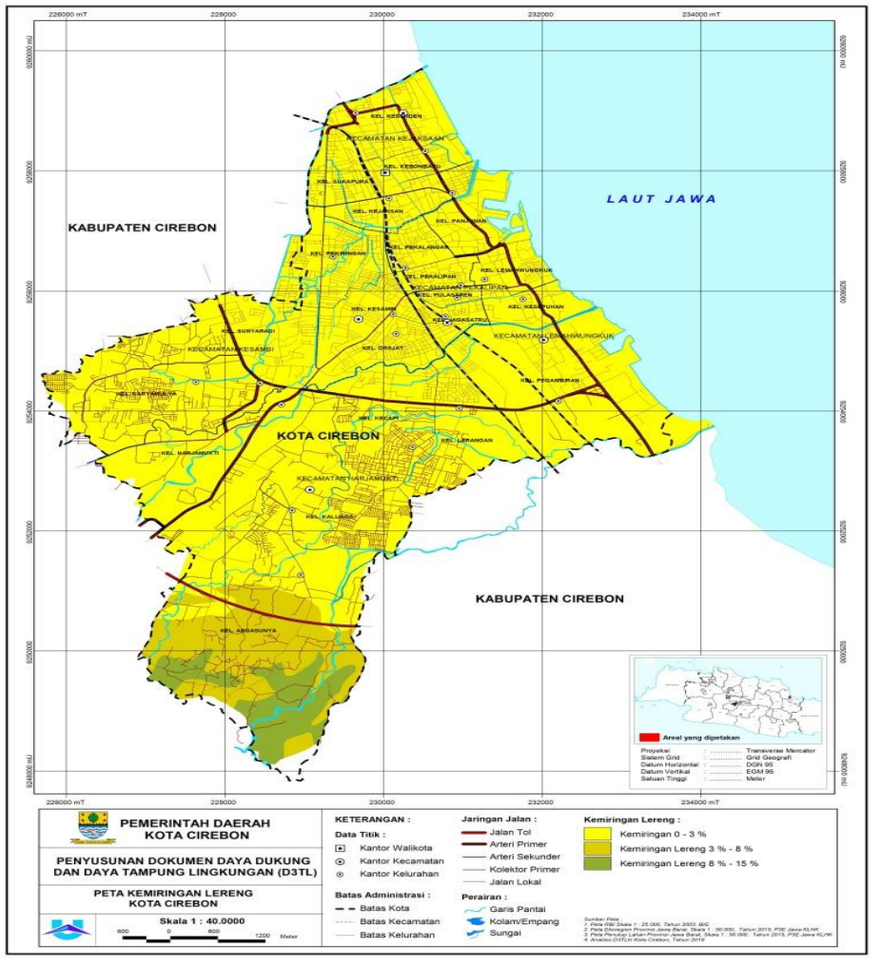
Tabel 2.2
Kemiringan Wilayah Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon Tahun 2016

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Persentase
1	***2***	***3***	***4***
1.	Harjamukti	Kalijaga	18,00
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	3,00
3.	Pekalipan	Pekalipan	3,00
4.	Kesambi	Kesambi	3,00
5.	Kejaksan	Kejaksan	6,00

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikeloladalam SIPD, Tahun 2020

Adapun kemiringan lereng tersebut digambarkan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon



Sumber: DLH Kota Cirebon, Tahun 2020

2.1.1.2 Geologi

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokan menjadi 2 (dua) kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material *alluvial* endapan *quarter* (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 hektar dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen *pliosen-plistosen* dengan luas total 1.061,24 hektar. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah *alluvial* dengan luas lahan 2.509,27 hektar, tanah *latosol* dengan luas 322,84 hektar dan jenis tanah *grumosol* dengan luas lahan 1.106,91 hektar.

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah *tipe argosol* yang berasal dari endapan lava dan *piroklastik* (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas:

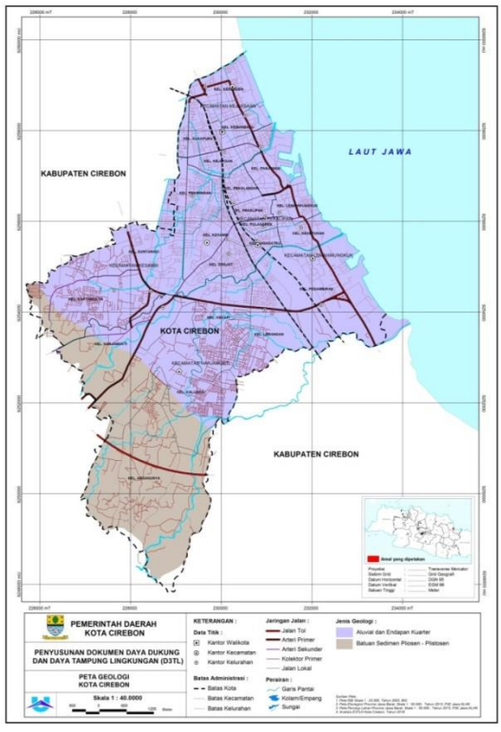
1. Regosol cokelat kelabu, asosiasi regosol kelabu;
2. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu;
3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu;
4. Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu, dan latosol;
5. Asosiasi mediteran cokelat dan litosol; dan
6. Latosol cokelat kemerahan.

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

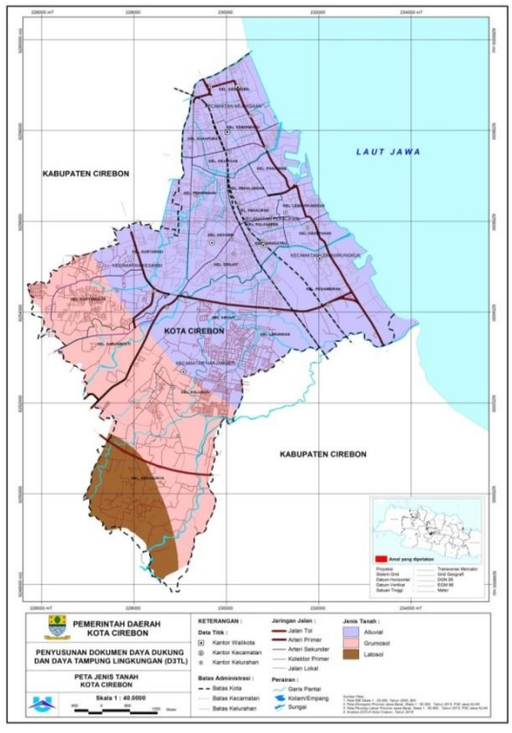
1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
3. Kedalaman lebih dari 60 meter: terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas.

Sebaran terkait jenis geologi dan jenis tanah yang ada di Kota Cirebon disajikan pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Cirebon



Gambar 2.5
Peta Jenis Tanah Kota Cirebon



Sumber: DLH Kota Cirebon, 2018

2.1.1.3 Klimatologi

Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara minimum rata–rata tahun 2019 sebesar 22,46° C dan maksimum rata-rata 35,65° C serta jumlah curah hujan per tahun 1.776,3 mm per tahun dengan hari hujan 118 hari, atau rata-rata 13,11 hari per bulan. Suhu udara dan curah hujan rata-rata di Kota Cirebon tahun 2017-2019 dapat disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kota Cirebon Tahun 2017-2019

No.	Bulan	2017			2018			2019		
		Suhu Udara/Temperatur (°C)			Suhu Udara/Temperatur (°C)			Suhu Udara/Temperatur (°C)		
		Min.	Rata-rata	Maks.	Min.	Rata-rata	Maks.	Min.	Rata-rata	Maks.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Januari	22,6	27,6	34,4	23,4	27,3	33,8	23,0	27,5	34,4
2.	Februari	n.a	n.a	n.a	22,4	26,4	33,2	23,0	27,2	34,2
3.	Maret	23,2	28,0	33,6	23,0	27,2	34,2	22,8	27,1	34,2
4.	April	24,8	27,6	33,4	23,4	27,7	34,6	23,8	28,2	34,6
5.	M e i	22,8	29,2	35,0	22,8	28,2	35,2	22,6	28,3	34,8
6.	Juni	23,8	28,6	34,2	22,2	28,3	35,4	19,0	27,8	34,2
7.	Juli	22,4	28,8	34,6	29,0	27,1	35,0	20,6	27,7	34,8
8.	Agustus	23,4	28,9	34,2	21,1	27,7	34,6	21,6	27,8	36,4
9.	September	22,0	28,2	35,4	20,4	29,3	37,0	21,6	28,3	36,4
10.	Oktober	24,2	29,9	36,0	24,0	30,2	37,8	23,2	30,3	38,6
11.	Nopember	6,0	28,5	34,0	23,2	29,5	37,8	24,8	30,5	38,2
12.	Desember	23,6	28,2	35,0	23,0	28,2	35,4	23,6	29,0	37,0
Rata-rata		21,70	28,5	34,52	23,15	28,09	35,33	22,46	28,30	35,65

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, pada tahun 2019 suhu maksimum tertinggi di Kota Cirebon terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai 38.6^{o} C. Jika dibandingkan antara tahun 2017-2019, suhu rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan suhu mencapai 35.65 ^{o}C.

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kota Cirebon Tahun 2016-2019

No.	Bulan	2016		2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	*2*	*7*	*8*	*7*	*8*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Januari	375,4	16	550	n.a	412,7	16	229,8	22
2.	Pebruari	413,3	23	n.a	n.a	890,9	27	465,9	23
3.	Maret	426,0	17	318	n.a	896,6	21	305,0	23
4.	April	80,0	15	124	n.a	274,9	14	285,4	17
5.	Mei	162,3	14	48	n.a	15,1	5	162,0	11
6.	Juni	158,2	8	134	n.a	13,6	6	3,0	1
7.	Juli	56,1	4	5	n.a	0	0	0,0	1
8.	Agustus	24,6	3	14	n.a	TTU	1	-	-
9.	September	130,6	12	23	n.a	8,0	3	-	-
10.	Oktober	304,0	18	59	n.a	1,0	2	-	-
11.	Nopember	219,2	14	538	n.a	118,0	12	5,7	3
12.	Desember	224,3	17	210	n.a	238,4	22	319,5	17
Jumlah		2574	161	2023	n.a	2869,2	129	1776,3	118
Rata-rata Per Bulan		214,5	13,41	183,90	n.a	260,83	10,75	197,36	13,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari 2.869,2 mm tahun 2018 menjadi 1.776,3 mm atau menurun sebanyak 1.092,9 mm per tahun. Kondisi tersebut berbanding lurus

dengan jumlah hari hujan pada tahun 2019 yang mencapai 118 hari, 11 hari lebih sedikit dibandingkan tahun 2018.

2.1.1.4 Hidrologi

Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5-10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20-30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut.

Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan untuk masa selanjutnya adalah perlu ada penyelesaian melalui kerja sama antar daerah atau kerjasama *amalgamasi* atau pengelolaan air laut melalui teknologi pengelolaan air bersih yang mutakhir. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter, di samping itu ada beberapa daerah/wilayah yang kondisi air tanahnya relatif sangat rendah dan memiliki rasa yang asin karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk keperluan air minum. Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Di Kota Cirebon terdapat 4 (empat) sistem sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu). Sungai berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dan sebagai saluran pembuangan air.

Tabel 2.5
Nama-nama Sungai yang Melintasi Kota Cirebon

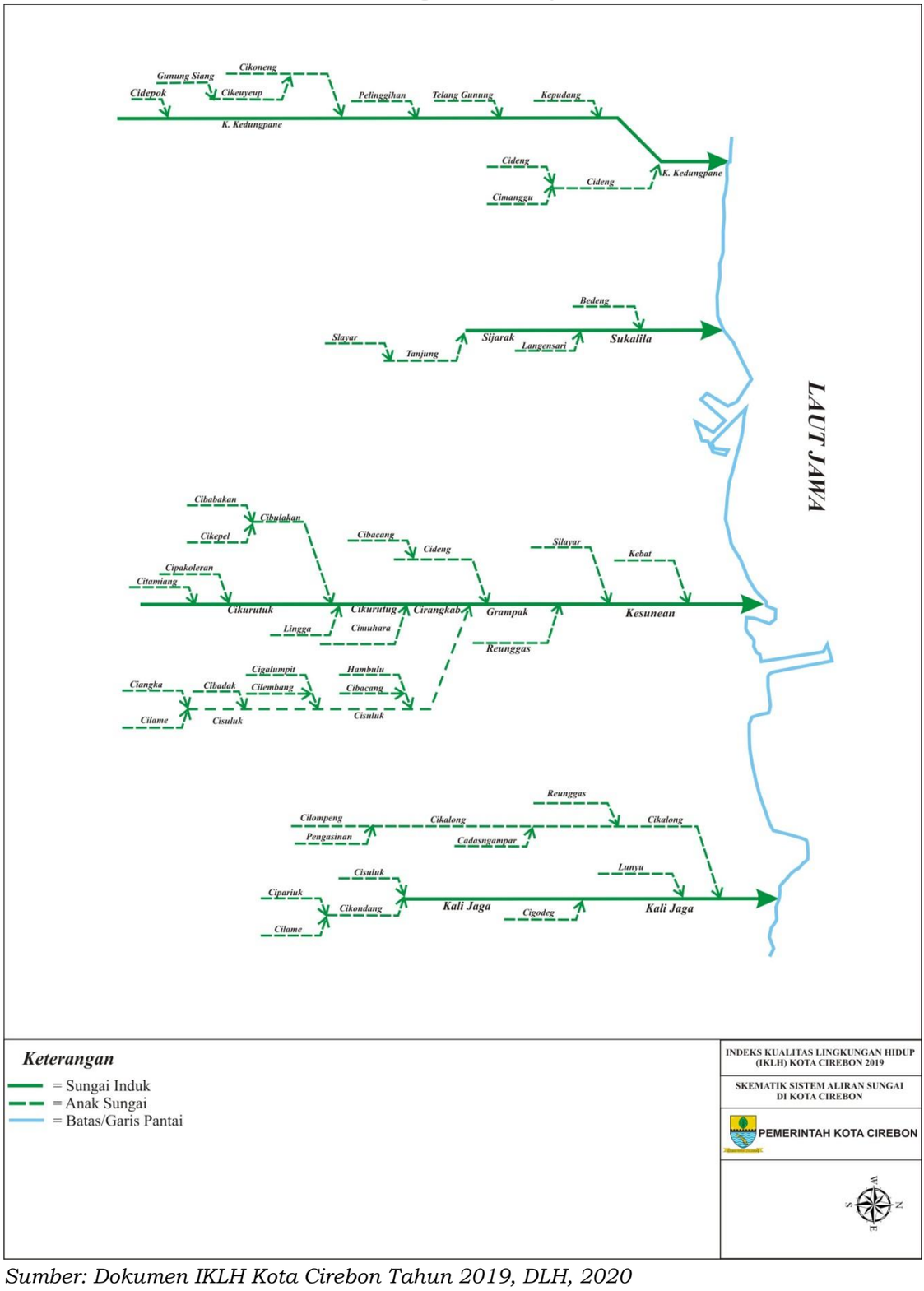
No.	Nama Sungai	Ukuran			Lokasi
		Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Sistem Kedung Pane/ Tangkil.**				
1.	Kali Tangkil	1.600	35/20	5,50	Perbatasan
2.	Kali Kemlaka	4.900	15/10	3,20	Kota
3.	Kali Cideng	5.900	25/11	3	Kota
4.	Kedung Bima	9.000	10	3	Kota
5.	Kedung Pane	9.000	10	3	Perbatasan
6.	Banjir Kanal	1.650	25/17	4	Perbatasan
7.	Kali Kijing	4.800	25/16	3	Kota
8.	Kali Kramat	2.000	13/6	1,5	Ex. CUDP
9.	Anak Pane	3.500	5	2	Kabupaten
10.	Anak Bima	4.000	5	2	Kabupaten
11.	Kayu Walang	3.000	6	3	Kota
12.	Kali Koa	2.500	5	2	Kabupaten
II.	**Sistem Sukalila**				
1.	Kali Sukalila	1.800	20	3	Kota
2.	Kali Sigujeg	1.200	5,5	1,25	Kota

No.	Nama Sungai	Ukuran			Lokasi
		Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	
3.	Kali Bedeng	800	5,5	1	Kota
4.	Kali Sijarak I	2.750	8,5	1,5	Ex CUDP
5.	Kali Sijarak II	3.300	5	1,25	Ex CUDP
6.	Kali Langensari	1.450	2	1	Ex CUDP
7.	Kali Sirabun	1.100	11,5	3	Kota
8.	Kali Penyuken	3.500	4	3	Kota
9.	Kali Saladara	4.500	3	2	Kota
III.	**Sistem Kesunean**				
1.	Kali Kesunean	4.600	47/32	5,6	Kota
2.	Kali Suba	8.200	34	9	Kota
3.	Kali Cirongkob	3.600	23	6,5	Kabupaten
4.	Kali Cisiluk	6.300	26	6,5	Kabupaten
5.	Kali Reungas	3.000	25	5	Kabupaten
6.	Kali Cibacang	5.400	26	5	Kabupaten
7.	Kali Cikurutug	2.600	23	4	Kabupaten
8.	Kali Cikijing	1.300	4	1,5	Kota
9.	Kali Sigemblo	1.500	6	2	Kota
IV.	**Sistem Kalijaga**				
1.	Kalijaga	4.500	40/24	5,5	Perbatasan
2.	Kali Lunyu	3.400	35/15	5	Kab & Kota
3.	Cikalong	3.800	35/17	5,2	Kota
4.	Cikenis Barat	4.400	36/20	7	Kota
5.	Cikenis Timur	2.500	15	2,5	Kota
6.	Cikenis Tampomas	1.400	6	2	Kota
7.	Kedung Menjangan	4.500	10	5	Kota
8.	Kedung Jumbleng	2.500	11	4	Kota
9.	Kedung Mendeng	2.600	10	4	Kota
10.	Pengasinan	3.600	10	4	Kabupaten
11.	Cigedeg	4.400	10	4	Kabupaten
12.	Anak Lunyu	1.200	6	3	Kabupaten
13.	Surapandan	1.700	9	4	Kota
14.	Cigambay	1.300	9	3,5	Kabupaten
15.	Cadas Ngampar	3.900	10	3,5	Kota
16.	Cilombang	3.800	10	3,5	Kabupaten

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

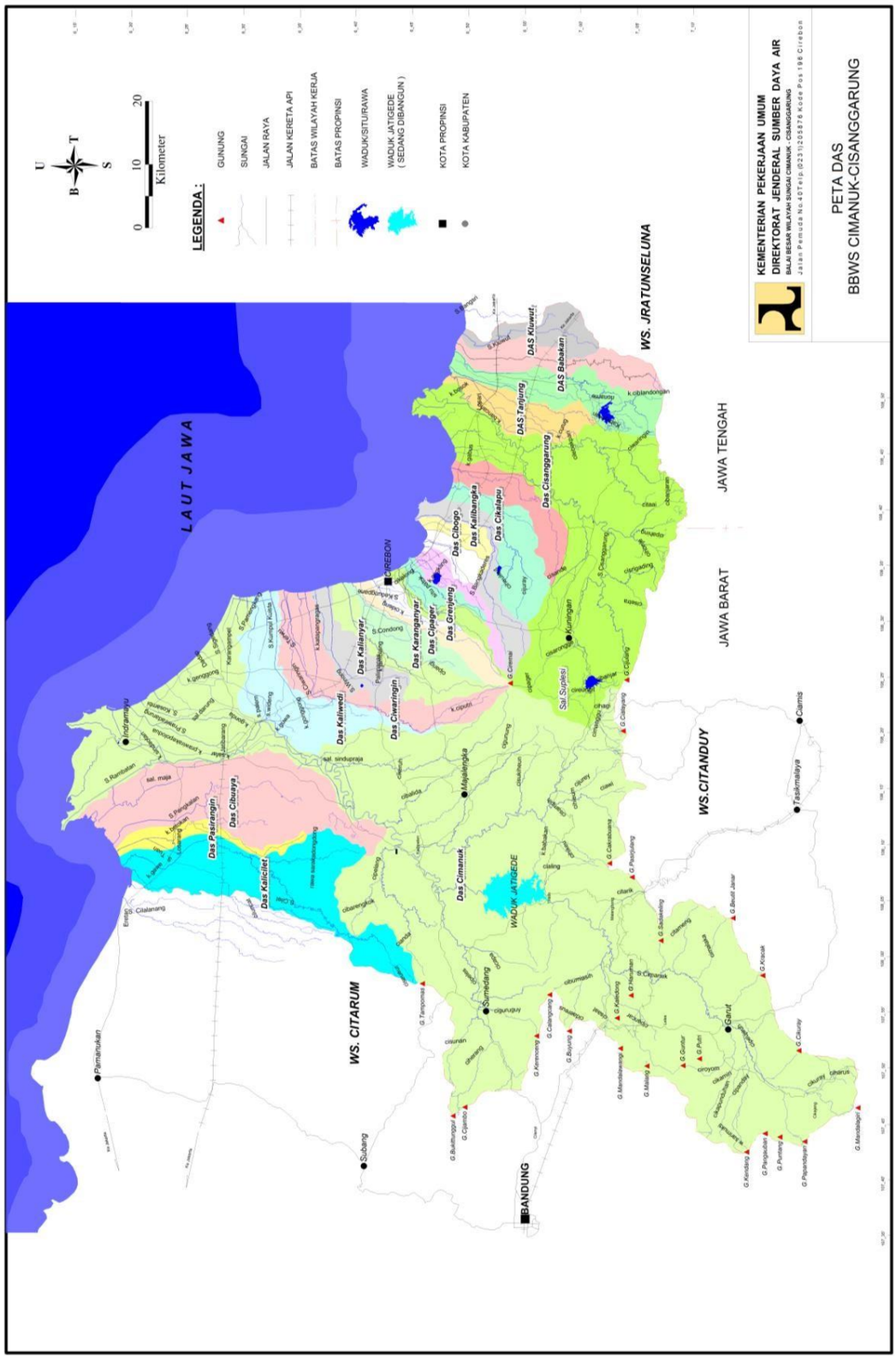
Adapun kondisi air laut, khususnya di kawasan pantai berwarna coklat karena pengaruh pendangkalan lumpur yang dibawa oleh 4 sistem sungai dan sungai-sungai dari wilayah Kabupaten Cirebon. Sungai-sungai primer yang melewati Kota Cirebon termasuk dalam Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat. Berikut gambar wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung.

Gambar 2.6
Skematik Aliran Sungai di Wilayah Kota Cirebon



Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH, 2020

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Sungai
Cimanuk Cisanggarung



Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH, 2020

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan aktivitas menyebabkan perubahan penggunaan lahan sulit dikontrol khususnya di daerah perkotaan, untuk Kota Cirebon perubahan penggunaan lahan banyak terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dari beberapa kejadian perubahan penggunaan lahan, terdapat 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Harjamukti dan 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Kesambi yang mengalami perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian.

Sebagian besar lahan di Kota Cirebon merupakan lahan non pertanian, yaitu mencapai 2.712 hektar atau 72,21 persen dari lahan keseluruhan. Penggunaan lahan untuk pertanian hanya mencapai 1.044 hektar atau 27,79 persen, yang digunakan sebagai lahan pertanian sawah sebanyak 272 hektar atau 7,24 persen dan lahan pertanian non sawah 772 hektar atau 20,55 persen.

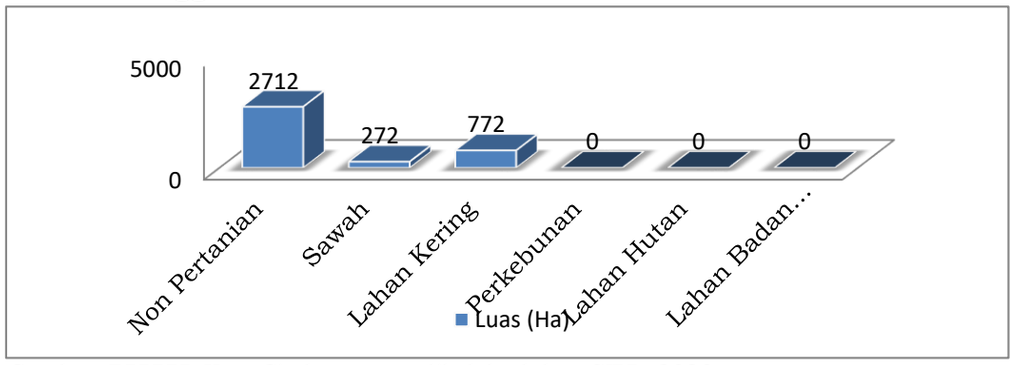
Tabel 2.6
Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Tahun 2017

No.	Uraian	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian (%)	Jumlah
		Lahan Sawah (%)	Lahan Bukan Sawah (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Penggunaan Lahan (Hektar)	272	772	2.712	3.756
2.	Persentase	7,24	20,55	72,21	100

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Daerah terbangun di Kota Cirebon didominasi oleh penggunaan lahan permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, pelabuhan, keraton, rumah sakit, mall, kawasan militer, bandara, dan lain-lain. Selain lahan terbangun, lahan di Kota Cirebon juga dimanfaatkan untuk lahan tidak terbangun yang terbagi menjadi pemanfaatan kebun, kolam, mangrove, sawah, semak, TPU, dan tanah kosong. Berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2017, luas Kota Cirebon sekitar ± 3.756 Ha yang terdiri dari penggunaan lahan terbangun seluas 2.712 Ha atau sekitar 72,21 persen dan lahan tidak terbangun sekitar 1.044 Ha atau sekitar 27,79 persen.

Gambar 2.8
Penggunaan Lahan Utama Kota Cirebon Tahun 2017



Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Perkembangan suatu wilayah akan terus terjadi dari waktu ke waktu secara dinamis bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk didalamnya akan mengakibatkan meningkatnya permintaan lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan, sehingga saat ini lahan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Terdapat hubungan yang erat antara pergerakan masyarakat kota, infrastruktur dan *trend* ekonomi kota terhadap perubahan struktur morfologi ruang kota terkait aspek tata guna lahan maupun fisik perkotaan (Chapin, 1985).

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017 menyebutkan adanya perubahan penggunaan lahan produktif, yaitu lahan sawah yang semakin berkurang dari luas lahan lama sebesar 272 Ha berkurang menjadi 202 Ha. Di sisi lain menunjukan adanya penambahan luasan lahan non pertanian sebesar 70 Ha. Kondisi demikian berakibat negatif terhadap usaha masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, peruntukan lahan di Kota Cirebon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Peruntukan Lahan di Kota Cirebon Berdasarkan RTRW
Kota Cirebon Tahun 2011-2031

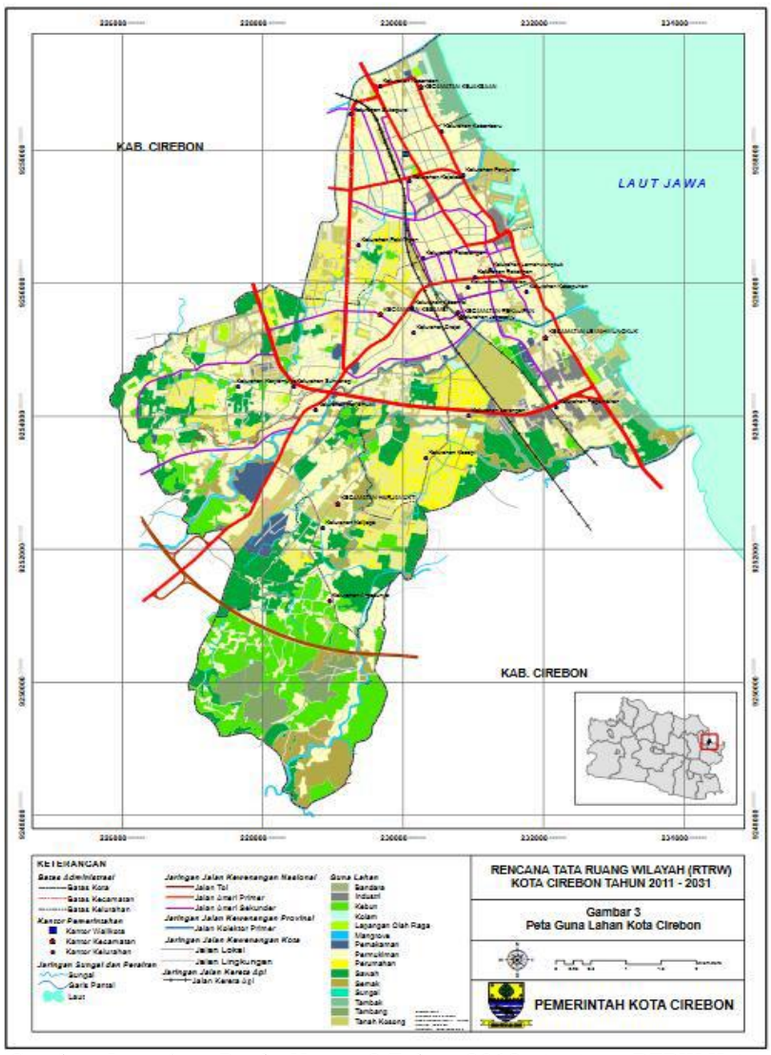
No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
1.	Lain-lain	7,68	0,20
2.	Bandara	4,64	0,12
3.	Industri	70,38	1,80
4.	Kebun	379,90	9,74
5.	Keraton	3,03	0,08
6.	Kesehatan	7,05	0,18
7.	Kolam	17,40	0,45
8.	Lapangan Olahraga	22,56	0,58
9.	Mall	4,20	0,11
10.	Mangrove	3,17	0,08
11.	Militer	9,09	0,23
12.	PLTG	5,62	0,14
13.	Pasar	7,07	0,18
14.	Pendidikan	81,68	2,09
15.	Pengolahan ikan	1,40	0,04
16.	Penjara	2,35	0,06
17.	Perdagangan dan Jasa	123,66	3,17
18.	Peribadatan	1,15	0,03
19.	Perkantoran	49,06	1,26
20.	Permukiman	1.195,71	31,38
21.	Perumahan	419,23	10,75
22.	Rumah Sakit	6,62	0,17
23.	SPBU	1,23	0,03
24.	Sawah	438,97	11,52
25.	Semak	178,35	4,68
26.	Stasiun Kereta Api	1,16	0,03
27.	Sungai	33,78	0,89
28.	T P U	62,93	1,65
29.	Tambak	71,74	1,88
30.	Tambang	79,68	2,28

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
31.	Tanah Kosong	397,79	10,44
32.	Terminal	4,85	0,12
33.	T P A	9,12	0,23
34.	Pelabuhan	77,52	1,98
TOTAL		3.810,0	100,00

Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, tutupan lahan tertinggi adalah berupa kawasan permukiman dengan luas lahan mencapai 1195,71 Ha dengan persentase mencapai 31,38 persen. dan tutupan lahan dengan luas paling sedikit adalah berupa sarana peribadatan dengan luas 1,15 Ha atau 0,03 persen. Untuk lebih jelas mengenai gambaran tutupan lahan di Kota Cirebon, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.9
Peta Guna Lahan Kota Cirebon



Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

Arahan penggunaan lahan berdasarkan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031 diuraikan sebagai berikut:

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Cirebon terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan perumahan;
2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
3) Kawasan peruntukan perkantoran;
4) Kawasan peruntukan industri;
5) Kawasan peruntukan pariwisata;
6) Kawasan peruntukan pertanian;
7) Kawasan peruntukan perikanan;
8) Kawasan peruntukan evakuasi bencana;
9) Ruang bagi kegiatan sektor informal;
10) Ruang terbuka non hijau;
11) Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
12) Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
13) Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan; dan
14) Kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Cirebon terdiri dari:

1) Kawasan perlindungan setempat;
2) Kawasan rawan bencana;
3) Kawasan suaka dan cagarbudaya; dan
4) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

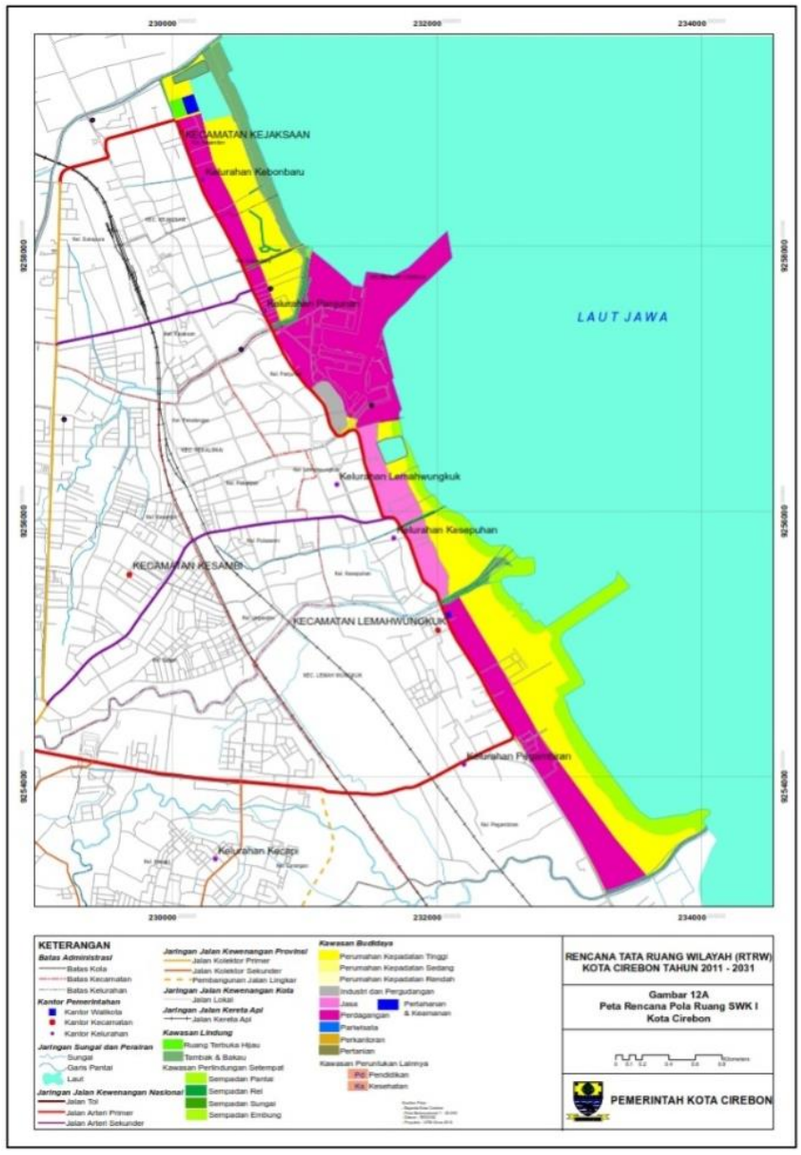
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cirebon adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 (empat) sub wilayah kota sebagai berikut:

1. Sub Wilayah Kota (SWK) I merupakan kawasan dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dengan struktur ruang yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Sub Pusat Pelayanan Kota (S-PPK) yaitu Kawasan Pelabuhan Cirebon yang berada di Kelurahan Panjunan;
b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melayani skala lingkungan wilayah kota sebagai fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Pegambiran, Panjunan, Kebon Baru, Kesenden, dan Lemahwungkuk, sedangkan sebagai fungsi pariwisata dan budaya meliputi Kelurahan Lemahwungkuk dan Kesepuhan.

Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang SWK I Kota Cirebon

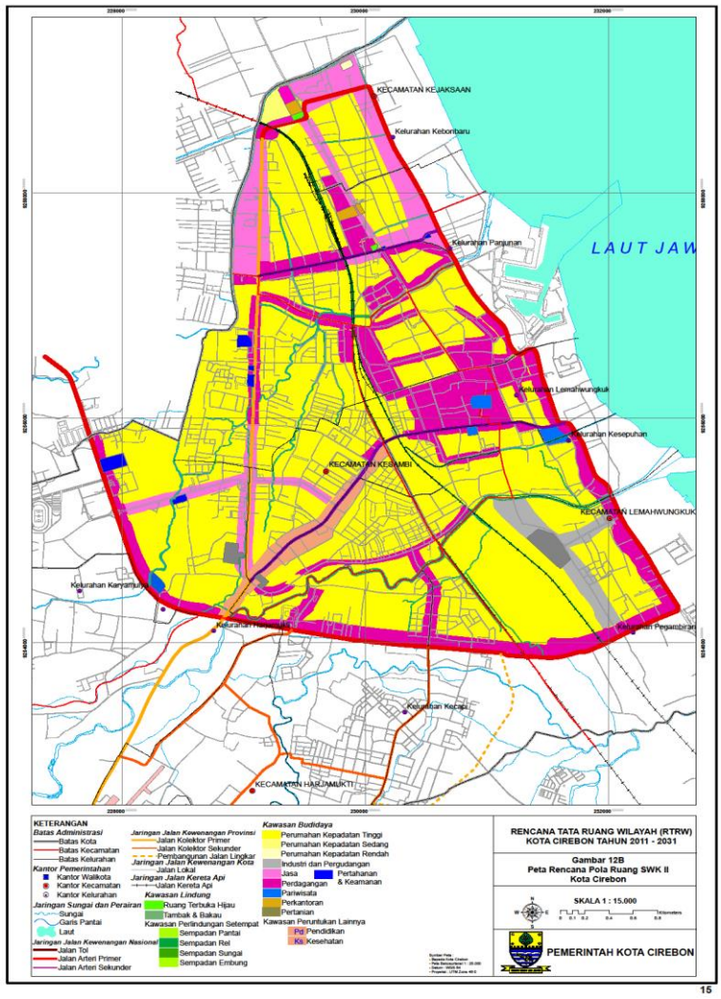


Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

2. Sub Wilayah Kota (SWK) II dengan prioritas penanganan meliputi:
a) Kawasan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yaitu Gunung Sari – Cipto Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, Kawasan *Grage Mall* 2 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
b) Kawasan Prioritas Sosial Budaya adalah kawasan Keraton Cirebon yang terletak di Kelurahan Kesepuhan, Lemahwungkuk, dan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;

c) Kawasan Prioritas Sarana Umum adalah kawasan sekitar Goa Sunyaragi dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, dan wisata, kawasan sekitar Rumah Sakit Ciremai sebagai fungsi kesehatan dan mitigasi bencana.

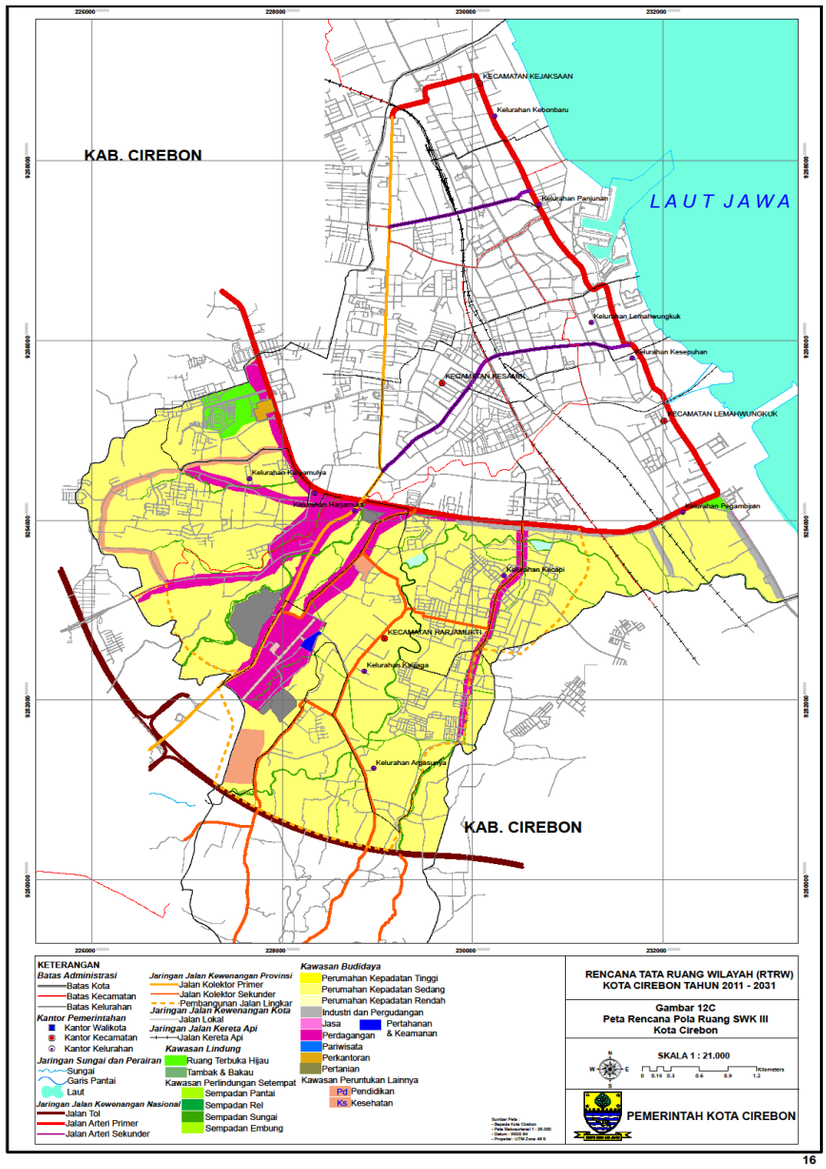
Gambar 2.11
Peta Rencana Pola Ruang SWK II Kota Cirebon



Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

3. Sub Wilayah Kota (SWK) III merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya meliputi kawasan strategis Ciremai Raya sebagai fungsi perumahan, kawasan strategis Majasem, Kalijaga, dan Argasunya sebagai fungsi pendidikan.

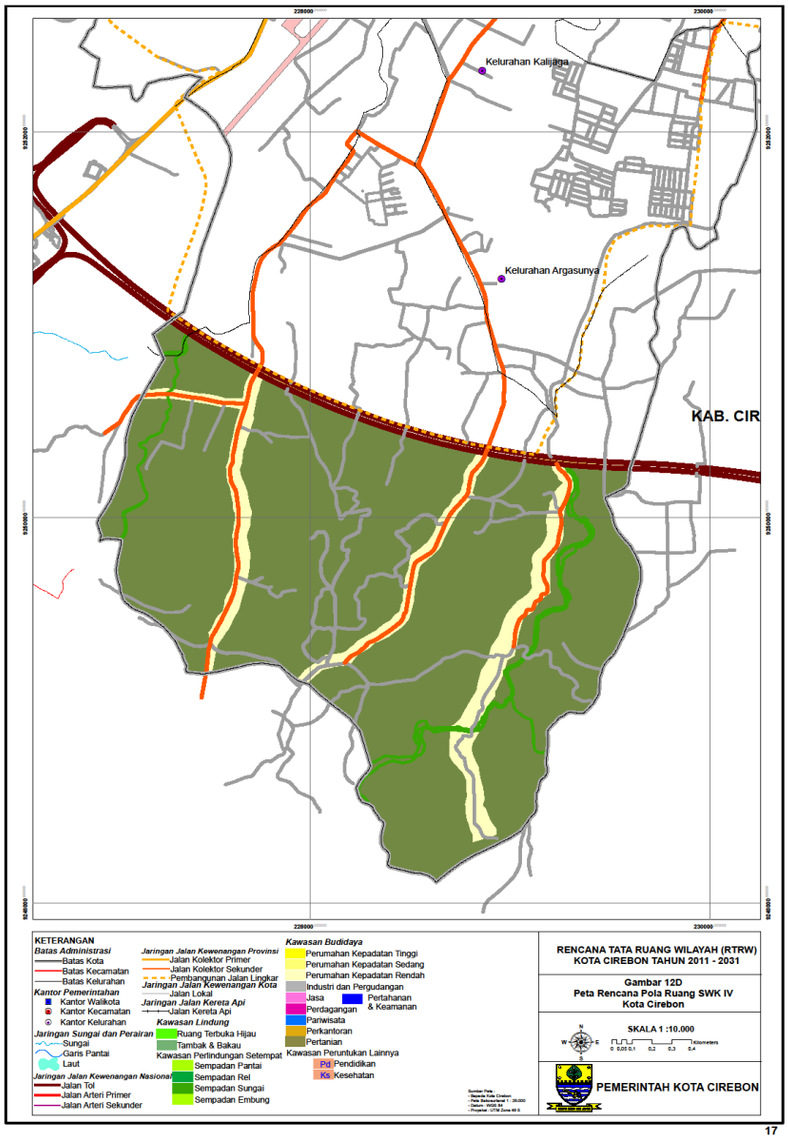
Gambar 2.12
Peta Rencana Pola Ruang SWK III Kota Cirebon



Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

4. Sub Wilayah Kota (SWK) IV sebagai pelayanan pertanian campuran, pendukung wisata, area pemakaman, agrobisnis, wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, dan hankam.

Gambar 2.13
Peta Rencana Pola Ruang SWK IV Kota Cirebon



Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

2.1.2.1 Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan meliputi kawasan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi seluas kurang/lebih 869 hektar dengan KDB 60-75 persen, KLB maksimum 1,2 diarahkan di SWK I meliputi Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Drajat, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi;
B. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang seluas kurang/lebih 848 hektar dengan KDB 45-60 persen, KLB maksimum 1 diarahkan di

Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Larangan, dan Kelurahan Kecapi;

C. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah seluas kurang/lebih 217 hektar dengan KDB 30-45 persen, KLB maksimum 0,6 diarahkan di Kelurahan Argasunya.

2.1.2.2 Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan seluas kurang/lebih 568 hektar meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Pengembangan pasar tradisional terdiri atas:

1) Pengembangan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya terdapat di Pasar Kanoman Kelurahan Lemahwungkuk, Pasar Pagi Kelurahan Kejaksan, dan Pasar Jagastru Kelurahan Jagasatru; dan
2) Pengembangan kegiatan perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah terdapat di Pasar Kramat di Kelurahan Kesenden, Pasar Drajat di Kelurahan Drajat, Pasar Perumnas di Kelurahan Kecapi, Pasar Kalitanjung di Kelurahan Harjamukti, Pasar Balong di Kelurahan Pekalipan, dan Pasar Gunung Sari di Kelurahan Pekiringan;

Pengembangan pusat perbelanjaan terdiri atas:

1) Pengembangan pasar swalayan atau *plaza* diarahkan pada kawasan yang baru berkembang, khususnya pada Sub Pusat Pelayanan Kota di Kawasan Ciremai Raya terletak di Kelurahan Kecapi dan Kawasan Majasem terletak di Kelurahan Karyamulya; dan
2) Pengembangan kegiatan perdagangan skala besar (grosir) di sekitar pusat kota yaitu di sekitar Jalan Karanggetas, Jalan Pasuketan, dan Jalan Pekiringan.

Pengembangan toko modern terdiri atas:

1) Pengembangan toko modern (mini market) di Jalan Kesunean, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Rajawali Raya, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Kapten Samadikun, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusudo, Jalan Pemuda, Jalan Nyi Mas Gandasari, Jalan Sunyaragi, Jalan Gunung Galunggung, Pelabuhan, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Pekalipan, Jalan Kalitanjung, Jalan Kalijaga, Jalan Perjuangan, Jalan Evakuasi, Pegambiran *Residence*, Jalan Kartini, Jalan Kesambi, dan Jalan Ciremai Raya; dan
2) Perdagangan modern *(supermarket)* lokasinya tersebar di Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Rajawali, Jalan Ciremai Raya, Jalan By Pass Brigjen Dharsono, dan Jalan By Pass Ahmad Yani.

2.1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkantoran

Rencana kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan seluas kurang/lebih 11 hektar meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengembangan perkantoran pemerintahan meliputi penataan perkantoran pemerintah terutama yang terletak di Jalan Siliwangi, diperuntukan

mempertahankan fungsi dan bentuk penampilan bangunan dan pengembangan perkantoran pemerintah dengan skala pelayanan kota di Kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan Kawasan Kebon Pelok di Kelurahan Kalijaga;

2) Pengembangan perkantoran swasta meliputi Jalan Siliwangi di Kelurahan Kejaksan, Jalan Kartini, Jalan Pemuda dan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo di Kelurahan Pekiringan, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kelurahan Sukapura, dan Jalan Yos Sudarso di Kelurahan Lemahwungkuk.

2.1.2.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan

Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan seluas kurang/ lebih 68 hektar meliputi industri kecil dan mikro serta industri menengah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengembangan industri kecil dan mikro meliputi:
   a) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Drajat, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, dan Kelurahan Pekalangan;
   b) industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki diarahkan di Kelurahan Harjamukti; dan
   c) industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk mebeler), barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya diarahkan di Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Sunyaragi, dan Kelurahan Kalijaga.
2) Pengembangan industri menengah meliputi:
   a) industri pengolahan tembakau diarahkan di Kelurahan Panjunan;
   b) industri tekstil diarahkan di Kelurahan Pegambiran;
   c) industri pakaian jadi diarahkan di Kelurahan Pekalangan; dan
   d) industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman diarahkan di Kelurahan Harjamukti.

Sedangkan rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi pembatasan pengembangan peruntukan industri dan pergudangan di Kawasan Pegambiran; dan pemindahan kawasan pergudangan di Jalan Pekalipan dan Jalan Parujakan diarahkan ke Kawasan Harjamukti.

2.1.2.5 Pengembangan Kawasan Wisata

Rencana kawasan peruntukan pariwisata dikembangkan seluas kurang/lebih 23 hektar meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pariwisata alam yang dikembangkan meliputi obyek wisata Pantai Kejawanan di Kelurahan Pegambiran dan Taman Kera di Kelurahan Kalijaga;
2) Pengembangan pariwisata budaya meliputi obyek wisata Keraton Kesepuhan di Kelurahan Kasepuhan, Keraton Kanoman di Kelurahan Lemahwungkuk, Keraton Kacirebonan di Kelurahan Pulasaren, dan Taman Gua Sunyaragi di Kelurahan Sunyaragi;
3) Pariwisata buatan dikembangkan di Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kesenden, dan Taman Ade Irma Suryani di Kelurahan Lemahwungkuk.

2.1.2.6 Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Rencana pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau seluas kurang/lebih 3 hektar terdiri atas kawasan perkantoran pemerintah di Kawasan Bima Kelurahan Sunyaragi dan Kawasan Kebon Pelok di Kelurahan Kalijaga dan perkantoran swasta di Kelurahan Kejaksan.

2.1.2.7 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan di pusat kota, yaitu di Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, dan Jalan Karanggetas, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran, yaitu di Jalan Kartini, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Siliwangi, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, Jalan Brigjen Dharsono, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Ciremai Raya, Jalan Kalijaga Permai, dan Jalan Rajawali;
2) Penyediaan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal berada di Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Pekiringan.Arahan pengelolaan sektor informal meliputi:
   a) pengaturan sektor informal pada malam hari pada ruas Jalan Pasuketan, Jalan Pekiringan dan Jalan Karanggetas;
   b) pengembangan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan;
   c) mengembangkan ciri khas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi sektor informal; dan
   d) memberikan bantuan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan sektor informal.

2.1.2.8 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi ruang evakuasi bencana skala kota, ruang evakuasi bencana banjir, ruang evakuasi bencana gelombang pasang dan ruang evakuasi bencana kebakaran, dengan rincian sebagai berikut:

1) Ruang evakuasi bencana skala kota terletak di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi dan Lapangan Kebon Pelok Kelurahan Kalijaga;
2) Ruang evakuasi bencana banjir terdapat di Stadion Bima Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi;
3) Ruang evakuasi bencana gelombang pasang terletak di Alun-alun Kejaksan di Kelurahan Kebonbaru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Pegambiran;
4) Ruang evakuasi bencana kebakaran terdapat di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan Kecapi, diarahkan di Kantor Pemerintahan dengan memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana serta memanfaatkan ruang terbuka dalam bentuk lapangan olahraga.

2.1.2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Cirebon terdiri dari kawasan pertanian, peternakan dan perikanan, kawasan pendidikan tinggi, pusat kesehatan, fasilitas peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan pendidikan tinggi seluas kurang/lebih 34 hektar di sekitar Majasem Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Kesambi dan pengembangan perguruan tinggi seluas kurang/lebih 30 hektar di Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti.
2) Kawasan peruntukan pusat kesehatan berupa pengembangan pusat kawasan kesehatan seluas kurang/lebih 31 hektar di Kawasan Kesambi yaitu Kelurahan Kesambi dan Kecamatan Kesambi.
3) Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan meliputi pengembangan *Islamic Center* seluas kurang/lebih 3 hektar di Kelurahan Kejaksan.
4) Kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi Korem-063/Gunung Jati, Kodim 0614 Kota Cirebon dan, Lanal Cirebon.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana *(hazard region)* adalah suatu kawasan permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat proses alam maupun non alami. Sementara kerawanan bencana *(hazard vulnerability)* diartikan sebagai tingkat kemungkinan suatu obyek bencana untuk mengalami gangguan akibat bencana alam. Salah satu upaya untuk menanggulangi bencana alam adalah dengan mengidentifikasi wilayah rawan bencana alam dengan cara memetakan wilayah rawan bencana dan risiko bencana. Berdasarkan RTRW Kota Cirebon, kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi rawan gelombang pasang, genangan banjir, dan rawan kebakaran.

2.1.3.1 Genangan Banjir

Kawasan rawan genangan banjir berada di kawasan Jalan Pemuda dan Jalan Terusan Pemuda, kawasan Kampung Sukasari, Kawasan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kawasan Gunungsari-Jalan Ampera, Kawasan Perumnas Burung, Kawasan Perumnas Gunung, Kawasan Kali Tanjung, dan Kawasan Majasem. Saluran drainase di Kota Cirebon pada umumnya memanfaatkan sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran primer/sekunder yang mengalir secara gravitasi dengan sistem gabungan antara air hujan dan air limbah rumah tangga. Seiring dengan perkembangan kota yang semakin maju yang disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap penggunaan lahan secara langsung, sehingga terjadinya banjir dan genangan air merupakan konsekwensi logis yang harus dihadapi Kota Cirebon. Genangan banjir yang terjadi, secara umum disebabkan oleh:

1) Genangan di ruas jalan protokol karena merupakan cekungan terutama di jembatan di atas sungai yang memotong jalan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas jembatan dan saluran yang lebih kecil dari debit air/banjir yang terjadi;
2) Genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi, atau disebabkan karena gorong-gorong jalan

yang tertutup (tersumbat) endapan, atau belum adanya saluran drainase jalan.

3) Bangunan dibangun di atas saluran drainase sehingga mempersempit penampang saluran;
4) Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase *eksisiting*, banyak endapan sampah di saluran yang menyebabkan tersumbatnya aliran air.

Berdasarkan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2016, sebaran genangan banjir dan genangan yang ada di Kota Cirebon disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Sebaran Lokasi Banjir dan Genangan di Kota Cirebon

No.	Lokasi	Besar Genangan				Penyebab Genangan/ Banjir
		Tinggi (m)	Luas (Ha)	Lama (Jam)	Frekwensi (Per Tahun)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Perum Taman Nuansa Majasem	0,3	1	2	13	Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
2.	Perum GSP Majasem	1	0,2	2	15	Tidak ada drain inlet ke saluran, saluran outlet tertutup oleh endapan sedimen dan sampah
3.	Jln. Terusan Pemuda-Jln. Pemuda	0,4	2,29	3	13	Kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi. Gorong-gorong terhambat oleh pipa-pipa kabel sehingga menghambat aliran air.
4.	Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo	0,5	4,32	2	13	90 persen saluran tertutup oleh endapan sedimen. Saluran berada dibawah bangunan, sehingga menyulitkan pemeliharaannya. Pintu air di bangunan pengatur rusak (Kali Kebat).
5.	Jln. Gunungsari	0,3	0,2	3	10	Air tidak masuk ke saluran *(Grill/ Manhole).* Kapasitas saluran drainase di Jalan Kartini lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.

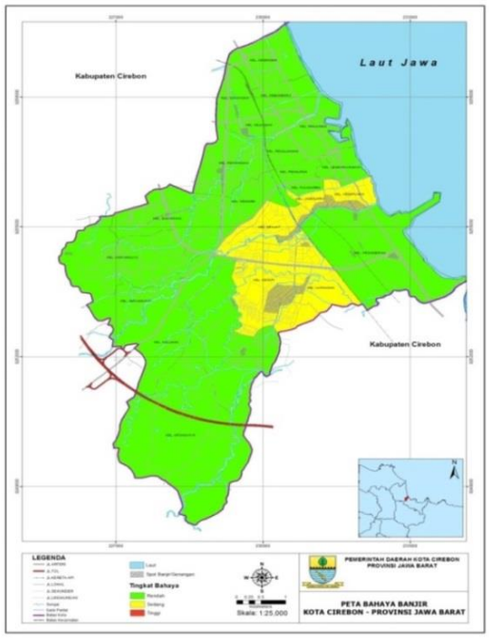
No.	Lokasi	Besar Genangan				Penyebab Genangan/ Banjir
		Tinggi (m)	Luas (Ha)	Lama (Jam)	Frekwensi (Per Tahun)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6.	Perumahan Sukasari	0,5	1,76	2	12	Banyaknya sedimen di saluran, mengakibatkan meluapnya air dari saluran
7.	Perumahan Cangkring	0,5	3	4	12	Banyaknya endapan sedimen dan sampah di saluran pembuangan
8.	Jln. Merdeka	0,3	0,3	4	13	Saluran berada dibawah jalan dan tertutup oleh sedimen. Air mengalir di atas permukaan jalan karena tidak ada drain inlet dan manhole.
9.	Kesunean, Kriyan	0,5	1,5	3	3	Melimpasnya air dari Kali Kesunean melalui pintu air. Pada saat banjir datang bersamaan air yang dari permukiman warga tidak bisa mengalir ke Kali Kesunean.
10.	Jln. Buyut	0,3	0,54	1	9	Kurang besar dan kurang banyaknya kapasitas *drain inlet*; Saluran berada dibawah trotoar.
11.	Pertigaan Tiga Berlian	0,3	2,2	5	16	Permukiman warga berada dibawah cekungan; Rusaknya pintu air; Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.
12.	Kerta Semboja	0,3	1,2	2	10	Banyaknya endapan sedimen di saluran; Saluran ke arah *outlet* masih alami, tertutup oleh sampah dan rerumputan.

No.	Lokasi	Besar Genangan				Penyebab Genangan/ Banjir
		Tinggi (m)	Luas (Ha)	Lama (Jam)	Frekwensi (Per Tahun)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
13.	Perumnas Burung	0,3	1,52	3	16	Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi
14.	Perumnas Gunung	1	12	3	17	Banyaknya endapan sedimen dan sampah di saluran; Melimpasnya air dari Sungai Cikalong
15.	Perumnas Permata	0,5	1,6	1	18	Melimpasnya air dari Sungai Cikalong
16.	Perum Griya Ciremai	1	0,96	3	13	Melimpasnya air dari Sungai Cikalong
17.	Jln. Katiyasa - Penggung	0,3	0,42	1	6	Saluran tertutup oleh rerumputan dan pohon pisang; Masuknya air ke permukiman warga melalui saluran *outlet*.
18.	Jln. Kali Tanjung	0,3	0,35	0,5	3	Melimpasnya air dari saluran drainase; Rusaknya pintu air; Banyaknya endapan sedimen sampah dan rerumputan di saluran.

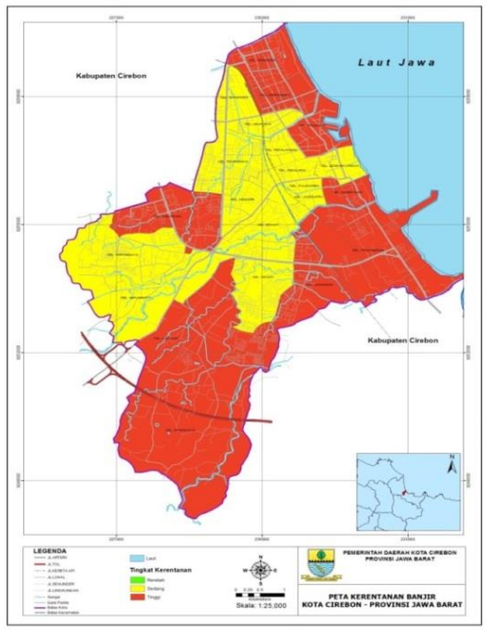
Sumber: Dokumen Rencana Induk Drainase Kota Cirebon, 2011

Dilihat dari tabel di atas, daerah yang mengalami banjir dengan ketinggian air paling tinggi adalah Perum GSP Majasem, Perumnas Gunung dan Perum Griya Ciremai yang mencapai tinggi genangan hingga 1 meter. Jika dilihat berdasarkan luas genangannya, adalah kawasan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan luas genangan mencapai 4.32 hektar. Jika dilihat berdasarkan durasi banjir, daerah yang mengalami genangan paling lama adalah kawasan pertigaan Tiga Berlian mencapai durasi selama 5 jam. Sedangkan jika dilihat berdasarkan frekuensinya, daerah yang paling sering mengalami banjir dan genangan di Kota Cirebon adalah kawasan Perumnas Permata yang rata-rata mengalami banjir sebanyak 18 kali dalam setahun. Berikut adalah peta sebaran lokasi rawan banjir dan kerentanan banjir.

Gambar 2.14
Peta Kawasan Rawan Banjir
Kota Cirebon



Gambar 2.15
Peta Kerentanan Banjir
Kota Cirebon

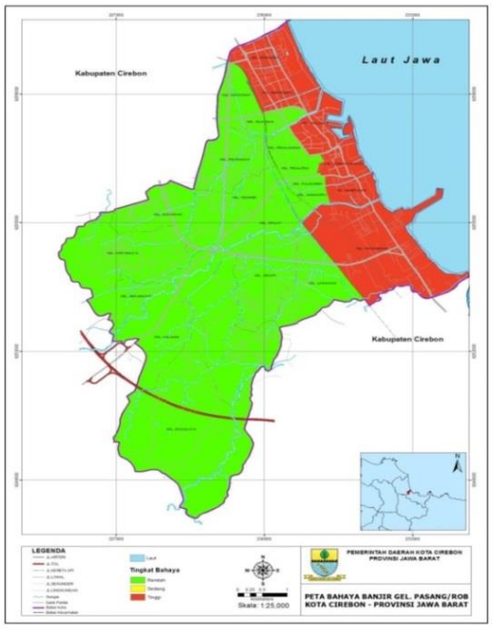


Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota CirebonTahun 2011-2023

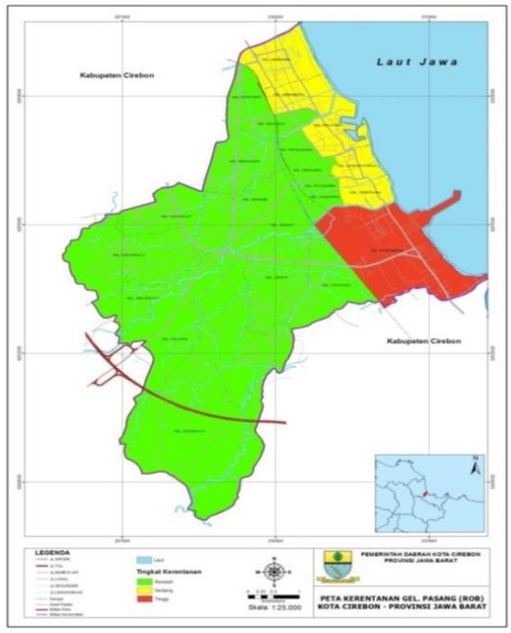
2.1.3.2 Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang berlokasi di Kelurahan Kesenden, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan, sebagaimana terlihat pada peta berikut. Kawasan sepanjang pesisir pantai Kota Cirebon memiliki potensi bahaya rob.

Gambar 2.16
Peta Bahaya Rob



Gambar 2.17
Peta Kerentanan Rob

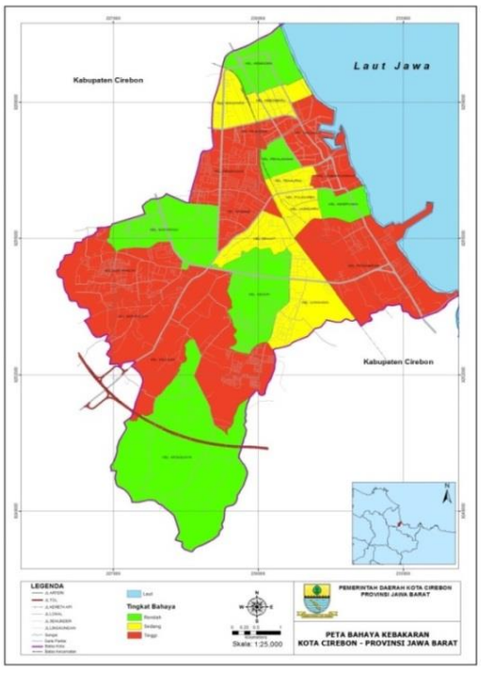


Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

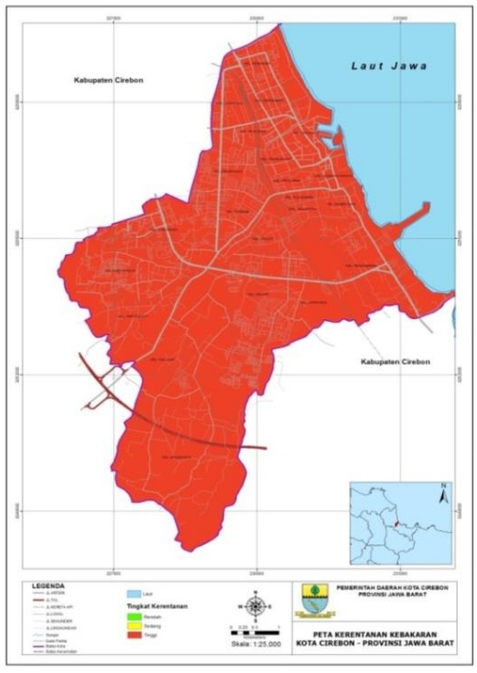
2.1.3.3 Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan Rawan Kebakaran meliputi kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi, sebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan kebakaran dibawah ini:

Gambar 2.18
Peta Bahaya Kebakaran
Kota Cirebon



Gambar 2.19
Peta Kerentanan Kebakaran
Kota Cirebon



Sumber: Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031

2.1.4 Demografi

Penduduk (sumber daya manusia) merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya *(input)* produksi sekaligus menciptakan *demand* dan pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan (pengangguran, kemiskinan, dan lain- lain) serta perlu adanya peningkatan kualitas terutama menyongsong era Indonesia Emas Tahun 2045.

Jumlah penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Berdasarkan hasil proyeksi BPS, jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 sebanyak 319.312 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,96 persen. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan populasi penduduk, kepadatan penduduk Kota Cirebon rata-rata sekitar 9.110 orang per/km².

2.1.4.1 Komposisi Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, komposisi penduduk Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

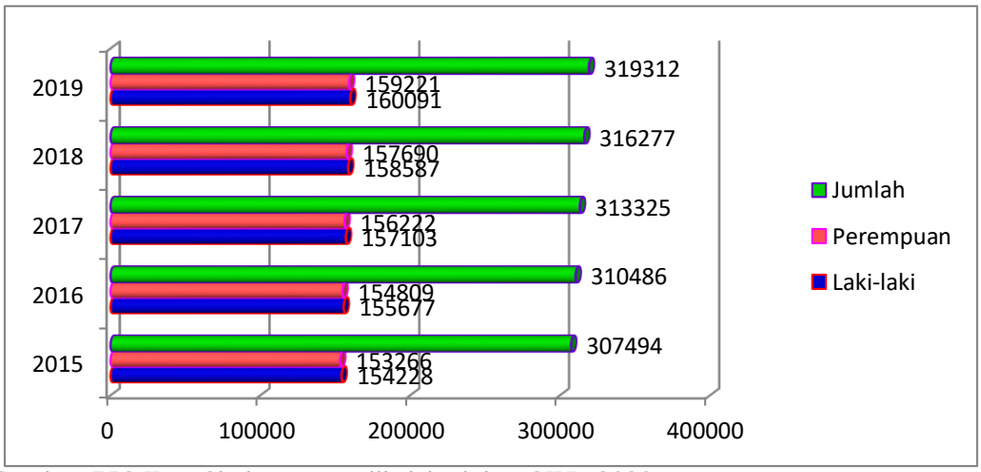
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	307.494	310.486	313.325	316.277	319.312
	a. Laki-laki	154.228	155.677	157.103	158.587	159.221
	b. Perempuan	153.266	154.809	156.222	157.690	160.091
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,95	0,98	0,91	0,94	0,96
3.	Kepadatan penduduk (jiwa/km²)	8.231	8.311	8.387	8.387	9.110

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kota Cirebon selalu mengalami peningkatan yang linier sejak tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 307.494 jiwa hingga tahun 2019 dengan jumlah penduduk mencapai 319.312 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat, dari 8.321 jiwa per km² pada tahun 2015 menjadi 9.110 jiwa per km² pada tahun 2019. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Pekalipan sebesar 20.250 jiwa per km² dan yang terendah di Kecamatan Harjamukti sebesar 6.917 jiwa per km².

Gambar 2.20
Struktur Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2015-2019

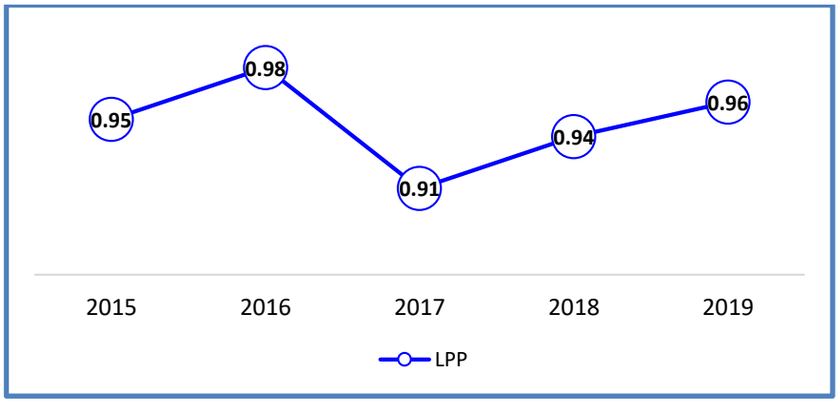


Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Bedasarkan grafik diatas, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat bahwa selama 5 (lima) tahun, jumlah penduduk Kota Cirebon bertambah sebanyak 11.818 jiwa dengan laju pertumbuhan meningkat dari

0,95 persen pada tahun 2015 menjadi 0.96 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 tersebut digambarkan pada gambar 2.20 mengenai grafik laju pertumbuhan penduduk berikut ini:

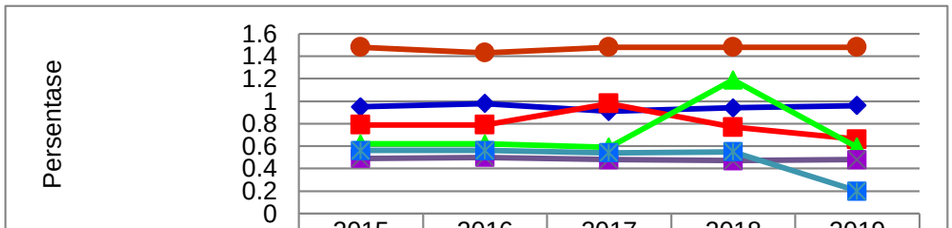
Gambar 2.21
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dilihat pada grafik di atas, bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi secara fluktuatif, dari tahun 2015 sampai 2017 Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 0,95 persen menjadi 0,91 persen, dan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dari 0,91 persen pada tahun 2017 menjadi 0,96 persen pada tahun 2019.

Gambar 2.22
Perbandingan LPP Kota Cirebon dengan Jawa Barat
dan Daerah Sekitar Tahun 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Cirebon	0.95	0.98	0.91	0.94	0.96
Kab Cirebon	0.79	0.79	0.98	0.77	0.66
Kab Kuningan	0.62	0.62	0.59	1.19	0.59
Kab Majalengka	0.49	0.5	0.48	0.47	0.48
Kab Indramayu	0.56	0.56	0.54	0.55	0.2
Jawa Barat	1.48	1.43	1.48	1.48	1.48

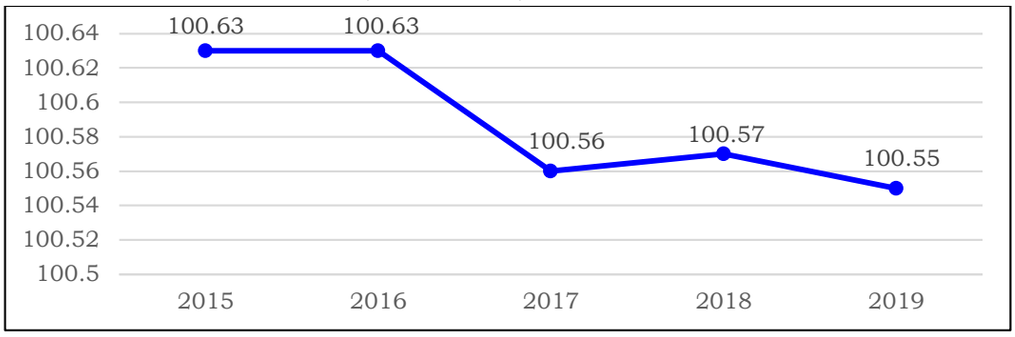
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Grafik di atas menggambarkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Cirebon Tahun 2019 paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten sekitar, namun masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat. Tingginya pertumbuhan penduduk Kota

Cirebon, tidak hanya terjadi karena pertumbuhan alami, tetapi juga adanya migrasi masuk untuk menetap dan menjadi penduduk Kota Cirebon. Hal ini bisa dimaklumi karena pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Cirebon, sehingga menjadi salah satu faktor daya tarik masyarakat sekitar untuk pindah dan menetap di Kota Cirebon.

Selain data diatas, pertumbuhan penduduk dapat diperbandingkan berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan *(sex ratio)* di Kota Cirebon hampir seimbang yaitu 100,55 artinya diantara 100 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang sampai 101 orang penduduk perempuan.

Gambar 2.23
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk, Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan grafik diatas, *sex ratio* Kota Cirebon paling tinggi ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 100,63. Secara keseluruhan, *sex ratio* Kota Cirebon terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dengan nilai sebesar 100,55 walaupun pada tahun 2018 mengalami kenaikan namun tidak signifikan yaitu naik hanya sebesar 0,1.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	0 – 4	27.548	27.801	22.644	28.286	51.899
2.	5 – 9	25.886	26.135	25.564	26.615	
3.	10 – 14	26.617	26.885	27.096	27.405	53.466
4.	15 – 19	28.827	29.104	27.847	29.643	
5.	20 – 24	26.153	26.382	25.467	26.820	51.230
6.	25 – 29	25.514	25.734	25.752	26.158	
7.	30 – 34	25.901	26.124	28.893	26.552	48.135
8.	35 – 39	23.348	23.560	27.525	23.967	
9.	40 – 44	22.675	22.892	23.726	23.313	46.257
10.	45 – 49	19.654	19.858	20.159	20.253	
11.	50 – 54	17.380	17.567	16.314	17.933	38.225
12.	55 – 59	14.478	14.642	14.112	14.963	
13.	60 – 64	9.264	9.374	10.674	9.589	30.086
14.	65 – 69	6.026	14.428	6.662	14.780	
15.	70 – 74	4.129	-	4.817	-	
16.	>75	4.094	-	6.073	-	
Total		307.494	310.486	313.325	316.277	319.312

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jika diklasifikasikan berdasarkan usia, jumlah penduduk terbanyak di Kota Cirebon pada tahun 2019 ada pada rentang usia 10 – 19 tahun yaitu sebanyak 53.466 jiwa. Berdasarkan data di atas, dapat diklasifikasikan menjadi usia produktif dan tidak produktif, dimana usia produktif adalah usia 15 – 64 tahun. Tabel 2.11 di bawah ini menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.11
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2015-2019

Kelompok Umur	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
0 – 14	41.364	38.867	41.750	41.364	41.750	38.867	42.522	39.784	40.402	38.430
15 – 64	106.843	106.351	107.834	106.843	107.834	106.351	109.816	109.375	109.600	110.828
65 +	6.021	8.228	6.093	6.021	6.093	8.228	6.249	8.531	9.219	10.833
Jumlah	154.228	153.266	155.677	154.228	155.677	153.266	158.587	157.690	159.221	160.091
L + P	307.494		310.486		313.325		316.277		319.312	

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa penduduk Kota Cirebon lebih didominasi oleh kelompok umur produktif (15-64 tahun) pada tahun 2019, yaitu sebanyak 220.428 orang atau 69,03 persen dan kelompok umur yang tergolong tidak produktif sebanyak 98.884 orang atau 30,97 persen. Dengan adanya bonus demografi ini, Kota Cirebon diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang *(window of opportunity)* yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Walaupun data menunjukan 69,3 persen dari total jumlah penduduk Kota Cirebon adalah usia angkatan kerja (usia produktif), namun kualitasnya perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu bersaing dengan pasar kerja di Kota Cirebon.

Terdapat kesamaan pencatatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon yaitu dalam kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas.

2.1.4.2 Sebaran Penduduk

Penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Di tingkat kecamatan terlihat bahwa Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk paling besar pada tahun 2017 yaitu 107.991 jiwa atau 35,00 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan Kecamatan Pekalipan memiliki penduduk paling kecil yaitu 30.588 jiwa atau 9,76 persen dari total jumlah penduduk Kota Cirebon. Data terkait sebaran penduduk Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Sebaran Penduduk Kota Cirebon Menurut Kecamatan
Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan (jiwa/km²)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Harjamukti	121,89	17.615	6.917,48
2.	Lemahwungkuk	59,30	6.507	9.109,52
3.	Pekalipan	31,59	1.561	20.250,64
4.	Kesambi	77,93	8.059	9.668,36
5.	Kejaksan	49,66	3.616	13.757,06
	Kota Cirebon 2019	319.312	37.358	8.546,90
	2018	316.277	37.358	8.387
	2017	313.325	37.358	8,387
	2016	310.486	37.358	8,31
	2015	307.494	37.358	8,231

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, yang dkelola dalam SIPD, 2020

Dari sebaran penduduk di atas diketahui Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk yang paling besar, tetapi karena memiliki luas wilayah yang cukup besar, maka tingkat kepadatan di Kecamatan Harjamukti paling rendah dibanding Kecamatan lain di Kota Cirebon dengan tingkat kepadatan 6.917,48 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Pekalipan dengan jumlah penduduk paling sedikit namun memiliki luas wilayah yang paling kecil, maka Kecamatan Pekalipan tercatat sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Cirebon dengan kepadatan penduduk mencapai 20.250,64 jiwa/km² pada tahun 2019.

Tabel 2.13
Angka Ketergantungan *(Dependency Ratio)* Penduduk
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	0 – 14	40.402	38.430	78.832
2.	15 – 64	109.600	110.828	220.428
3.	65 +	9.219	10.833	20.052
Total		159.221	160.091	319.312
Dependency ratio	*2019*	*44,86*		
	2018	*44,29*		
	2017	*42,12*		
	2016	*44,24*		
	2015	*44,32*		

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2018

Angka beban tanggungan *(dependency ratio)* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan

ekonomi suatu wilayah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2019 sebesar 44,86 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 sampai 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,86 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun) sebesar 35,76 persen, dan rasio ketergantungan penduduk usia tua (diatas 65 tahun) sebesar 9,10 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kota Cirebon masih dibebani tanggung jawab menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk usia tua.

Hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Cirebon tahun 2017-2025 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2017-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	2017	154,6	157,4	312,0	0,61
2.	2018	157,4	156,5	313,9	0,61
3.	2019	158,3	157,5	315,8	0,61
4.	2020	159,1	158,4	317,5	0,54
5.	2021	159,8	159,3	319,1	0,50
6.	2022	160,6	160,2	320,7	0,50
7.	2023	161,3	161,0	322,2	0,47
8.	2024	161,9	161,8	323,7	0,47
9	2025	162,5	162,5	325,1	0,43

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025, BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Cirebon, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2017 berjumlah 76,9 ribu jiwa dan akan terus menurun menjadi 71,2 ribu jiwa pada tahun 2025. Disisi lain, kelompok usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan dari 69,78 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 70,44 ribu jiwa pada tahun 2025. Sementara itu kelompok penduduk usia tua (65 tahun keatas) juga akan mengalami peningkatan dari 5,64 ribu jiwa menjadi 7,63 ribu jiwa.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara lain Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi, PDRB per kapita, Indeks Gini, Indeks Ketimpangan *Williamson* (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kota Cirebon berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp16,81 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp14,88 triliun. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2015 ke tahun 2019 mencapai Rp3,54 triliun. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2019, dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Cirebon, sektor yang paling besar memberikan kontribusi adalah sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor tersebut berkontribusi sebesar Rp. 7.397.160.000.000,- atau 31,54 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 578.000.000,-. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan dari sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 2.723.970.000.000,- atau 11,61 persen. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, dan Persentase PDRB Aras Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	42.132,86	43.817,59	44.453,17	45.370	46.320
B	Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri pengolahan	1.381.191,23	1.442.001,10	1.507.112,34	5.592.320	1.672.020
D	Pengadaan listrik dan gas	128.774,86	128.395,30	128.122,66	121.600	117.440
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	36.246,81	38.189,32	39.573,91	42.890	44.670
F	Konstruksi	1.385.934,80	1.448.557,16	1.512.987,04	1.601.550	1.675.130
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.345.967,41	4.590.626,35	4.852.013,28	5.138.440	5.440.750
H	Transportasi dan pergudangan	1.374.937,99	1.439.103,96	1.512.468,66	1.599.590	1.726.720
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	647.941,69	699.309,34	751.460,76	807.460	856.170
J	Informasi dan komunikasi	762.120,06	865.765,10	961.310,02	1.053.030	1.155.120
K	Jasa keuangan dan asuransi	1.398.222,82	1.481.143,91	1.560.624,53	1.679.870	1.794.510
L	Real estate	124.545,44	131.975,14	139.619,02	157.490	173.440
MN	Jasa perusahaan	112.689,07	120.427,37	128.773,74	137.080	149.230
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.	493.758,97	516.120,59	531.776,36	543.810	556.350
P	Jasa pendidikan	445.971,08	479.679,31	517.693,99	556.230	597.270

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	292.709,13	315.916,00	339.253,31	366.450	397.940
RSTU	Jasa lainnya.	296.099,18	321.768,61	349.852,20	374.470	409.830
Produk Domestik Regional Bruto		13.269.243,42	14.062.796,14	14.877.095,00	15.817.650,00	16.812.910,00

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta)Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pertanian, kehutanan dan Perikanan	57.419,42	62.778,11	64.957,14	71.210	73.980
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Industri pengolahan	1.762.892,02	1.902.030,65	2.032.061,04	2.198.060	2.343.850
Pengadaan listrik dan gas	161.420,05	163.502,80	169.814,65	162.790	161.000
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	41.406,98	47.454,96	50.226,81	63.110	69.000
Konstruksi	1.764.717,44	1.881.969,72	2.009.191,76	2.192.980	2.342.530
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	5.319.098,55	5.730.657,94	6.264.887,71	6.819,100	7.397.160
Transportasi dan pergudangan	1.973.944,89	2.118.832,83	2.302.347,37	2.492.79	2.723.970
Penyediaan akomodasi dan makan minum	858.892,19	948.709,22	1.047.870,53	1.158.900	1.239.940

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Informasi dan komunikasi	750.511,80	853.508,63	965.006,84	1.026.030	1.104.720
Jas keuangan dan asuransi	1.764.990,47	1.936.123,28	2.133.561,37	2.394.300	2.652.450
Real estate	149.045,36	159.994,90	172.159,19	195.540	217.440
Jasa perusahaan	142.574,74	153.954,98	167.472,68	182.930	219.130
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	670.852,61	728.537,11	760.780,70	892.480	923.400
Jasa pendidikan	576.333,36	634.340,62	703.664,47	790.470	885.210
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	353.891,64	397.156,45	439.181,35	484.040	541.440
Jasa lainnya	355.888,62	403.812,00	456.499,34	507.510	561.610
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	16.703.880,15	18.123.364,19	19.739.682,96	21.634.240	23.456.830

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel 2.17
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,34	0,35	0,33	0,33	0,32
2.	Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri pengolahan	10,55	10,49	10,25	10,16	9,99
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,97	0,90	0,82	0,75	0,69
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,25	0,26	0,28	0,29	0,29
6.	Konstruksi	10,56	10,38	10,14	10,14	9,99
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	31,84	31,58	31,61	31,52	31,54
8.	Transportasi dan pergudangan	11,82	11,68	11,64	11,53	11,61
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,14	5,23	5,29	5,36	5,29
10.	Informasi dan komunikasi	4,49	4,71	4,79	4,74	4,71
11.	Jasa keuangan dan asuransi	10,57	10,77	10,89	11,07	11,31
12.	Real estate	0,89	0,88	0,89	0,90	0,93
13.	Jasa perusahaan	0,85	0,85	0,84	0,85	0,93
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,02	4,02	4,16	4,13	3,94
15.	Jasa pendidikan	3,45	3,50	3,55	3,65	3,77
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,12	2,19	2,22	2,24	2,31
17.	Jasa lainnya	2,13	2,23	2,30	2,35	2,39
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

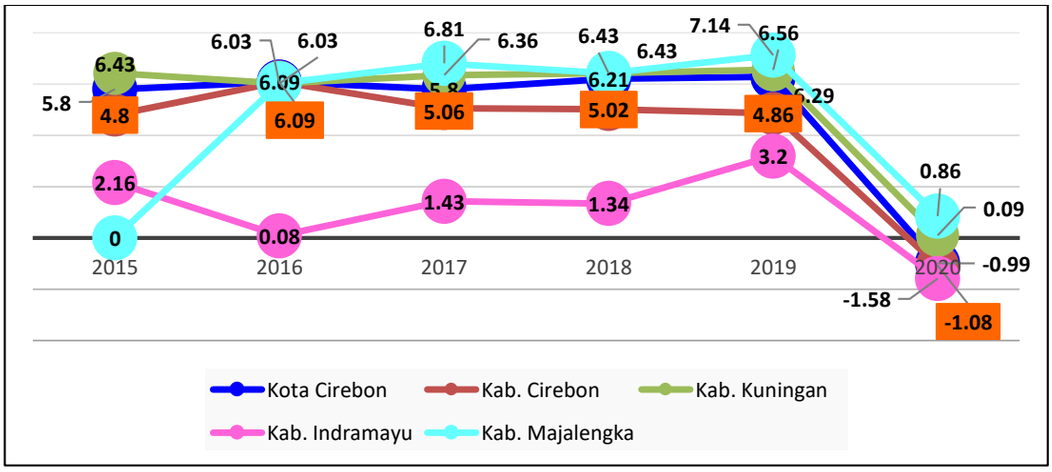
Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah kurang bermakna (Meier,1995).

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota Ciayumajakuning terlihat cukup bervariasi. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2019 di Kawasan Ciayumajakuning adalah Kabupaten Majalengka dengan LPE mencapai 7,14 persen. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon ada pada urutan ke-3 teratas setelah Kabupaten Kuningan di urutan ke-2. Berikut grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi daerah Ciayumajakuning.

Gambar 2.24
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Ciayumajakuning
Tahun 2015-2020



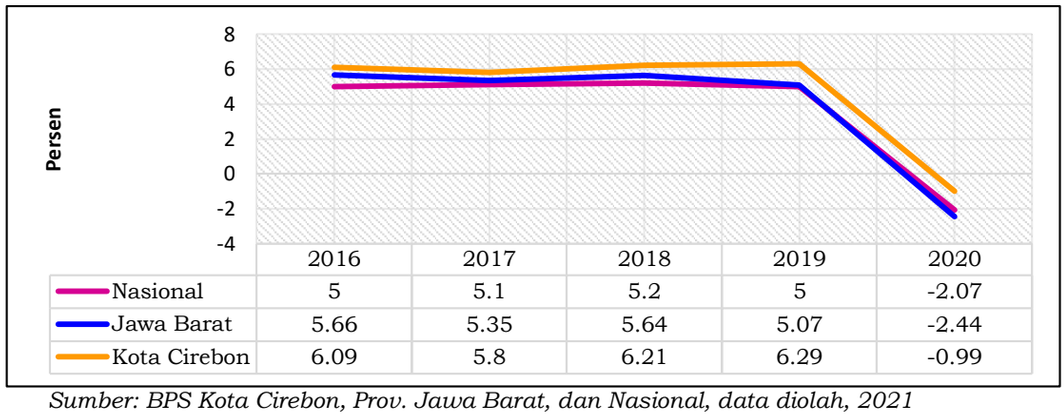
Sumber : BPS Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka, 2021

Tabel di aats, memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Untuk wilayah Ciayumajakuning yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif hanya terjadi di 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka tumbuh sebesar 0,86 persen dan Kabupaten Kuningan tumbuh 0,09 persen. Sementara, Kota Cirebon pertumbuhan ekonominya negatif menjadi -0,99 persen, Kabupaten Cirebon -1,08, dan Kabupaten Indramayu -1,58 persen.

Perekonomian Kota Cirebon tahun 2017 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon tahun 2017 menurut lapangan usaha sebesar 5,80 persen mengalami perlambatan dibandingtahun 2016 yang mencapai 6.09 persen, sedangkan angka tertinggi dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.29 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 6,09 persen turun menjadi 5.80

persen pada tahun 2017. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai 6,21 persen dan 6.29 persen. Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2016 sampai 2019 berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian seiring dengan mewabahnya pandemi virus corona pada awal tahun 2020 sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, regional maupun Kota Cirebon. Secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di tahun 2020 menjadi -2,07 persen, Provinsi Jawa Barat berkontraksi menjadi -2,44 persen dan Kota Cirebon menjadi -0,99 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Cirebon tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.25
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	5	5.1	5.2	5	-2.07
Jawa Barat	5.66	5.35	5.64	5.07	-2.44
Kota Cirebon	6.09	5.8	6.21	6.29	-0.99

Sumber: BPS Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat, dan Nasional, data diolah, 2021

Dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan kontribusi lapangan usaha dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Cirebon Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,00	1,45	2,76	2,83	0,30
2.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
3.	Industri pengolahan	4,40	4,53	6,13	5,62	-0,69
4.	Pengadaan listrik dan gas	- 0,29	-3,98	-7,99	-10,01	-4,26
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,36	7,03	4,93	4,14	3,01
6.	Konstruksi	4,52	4,45	5,85	4,59	-5,70
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi	5,58	5,75	5,90	5,86	-6,86

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	mobil dan sepeda motor					
8.	Transportasi dan pergudangan	4,67	5,10	5,76	7,77	-2,58
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,93	7,46	7,45	6,03	-8,11
10.	Informasi dan komunikasi	13,60	11,04	9,54	9,70	33,83
11.	Jasa keuangan dan asuransi	7,10	5,20	6,64	6,82	0,93
12.	Real estate	6,22	9,09	9,13	10,12	-0,52
13.	Jasa perusahaan	6,87	6,93	6,45	8,87	-12,19
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,53	3,03	2,26	2,31	-7,22
15.	Jasa pendidikan	7,56	7,93	7,44	7,38	6,83
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,93	7,39	8,02	8,59	10,89
17.	Jasa lainnya	8,67	8,73	7,04	9,44	-0,49
Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon		6,09	5,80	6,20	6,29	-0,99
Jawa Barat		5,66	5,35	5,64	5,07	-2,44
Nasional		5,00	5,01	5,02	5,00	-2,07

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

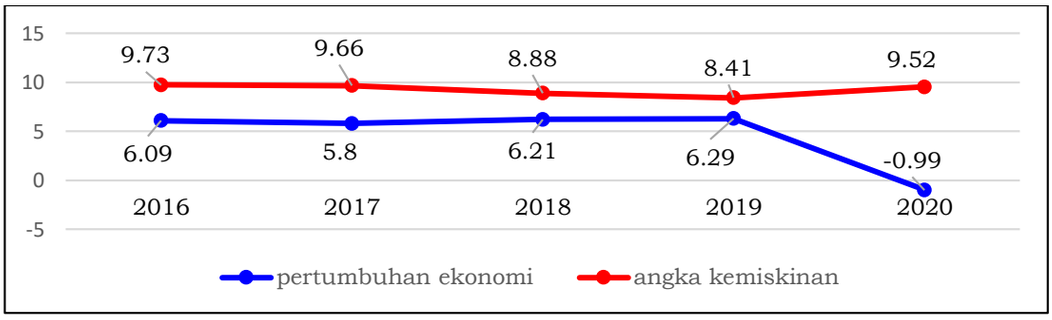
Bedasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 Pertumbuhan PDRB AdHk 2010 menurut lapangan usaha baik nasional, Jawa Barat maupun Kota Cirebon mengalami kontraksi sebagai akibat adanya wabah pandemi Covid-19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 menurut lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari sektor informasi dan komunikasi sebesar 33,83 persen. Kemudian peran terbesar kedua ialah lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,89 persen dan urutan ketiga adalah lapangan usaha jasa pendidikan dengan peran sebesar 6,83 persen, jasa keuangan dan asuransi 0,93 persen dan lapngan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,30 persen. Sementara lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu jasa perusahaan – 12,19 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum – 8,11 persen, administarsi pemerintahan, pertahanan dn jaminan sosial wajib – 7,22 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor – 6,86 persen, konstruksi – 5,70 persen. Sepuluh sektor yang mengalami pertumbuhan negatif sebagaimana disajikan pada tabel 2.19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya, mengingat Kota Cirebon menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning dan menjadi tolok ukur bagi wilayah disekitarnya. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi, Kota Cirebon memiliki optimisme untuk secara bertahap terus bergerak dan meningkat hampir di seluruh sektor. Hal itu menunjukan perkembangan ekonomi Kota Cirebon

yang bersifat progresif sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan perlu dengan tepat menerapkan sekaligus mengelola kebijakan dalam pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang diterapkan harus tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan perekonomian Kota Cirebon ke depan diperlukan kajian dan inovasi daerah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Kota Cirebon. Gambar berikut merupakan perbandingan atau komparasi antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.26
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon Tahun 2016-2020

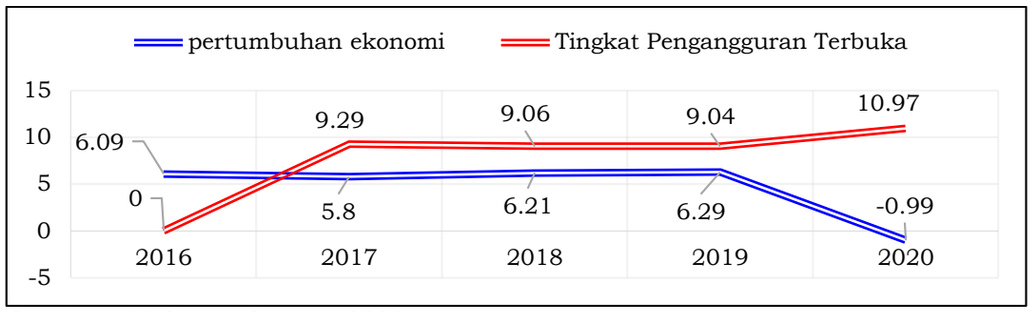


Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon mempunyai korelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Dengan adanya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2017-2019, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun seiring dengan wabah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon pada tahun 2020 mengalami kontraksi dan turun sampai pada angka -0,99 persen, begitu pula angka kemiskinan Kota Cirebon meningkat dari 8,41 persen pada tahun 2019 menjadi 9,52 persen di tahun 2020.

Selain dengan angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan pula dengan angka pengangguran terbuka karena kedua variabel tersebut memiliki korelasi, dimana jika laju pertumbuhan ekonomi naik maka kualitas ekonomi masyarakat akan meningkat. Kualitas ekonomi masyarakat dapat dilihat dari variabel angka pengangguran terbuka. Selanjutnya, pada gambar berikut disajikan komparasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terbuka di Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2.27
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terbuka di Kota Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Cirebon, 2020
**) TPT Tahun 2016 tidak tersedia data*

Berdasarkan grafik diatas, dapat diperoleh informasi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cirebon selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Namun akibat dampak pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon turun dari 6,29 persen pada tahun 2019 menjadi -0,99 persen di tahun 2020. Kondisi ini membawa dampak yang sangat besar terhadap peningkatan tingkat pengangguran Kota Cirebon pada tahun 2020 yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 9,04 persen menjadi 10,97 di tahun 2020.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukan kinerja perekonomian suatu daerah. Tinggi rendahnya tingkat harga belum tentu mencerminkan perekonomian yang memburuk atau membaik. Fluktuasi dari perubahan harga-harga yang tercermin dari besarnya nilai inflasi, dapat menjadi indikator apakah perekonomian sedang mengalami tekanan atau perbaikan. Inflasi yang moderat dan tidak berfluktuasi tinggi menunjukan perkembangan perekonomian yang membaik dan direspon secara wajar oleh pelaku ekonomi, sebaliknya inflasi yang berfluktuasi dalam skala yang tinggi dapat menjadi indikator perekonomian sedang menunjukan adanya permasalahan *(schok).* Berikut adalah tabel laju inflasi Kota Cirebon tahun 2016-2020.

Tabel 2.19
Laju Inflasi Bulanan Kota Cirebon Tahun 2016-2020

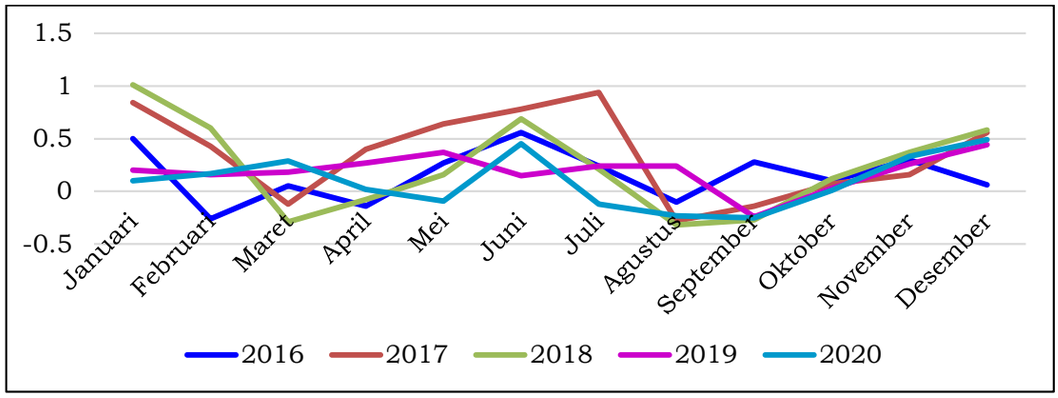
No.	Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Januari	0,50	0,84	1,01	0,20	0,10
2.	Pebruari	-0,26	0,43	0,60	0,16	0,17
3.	Maret	0,05	-0,12	-0,29	0,18	0,29
4.	April	-0,14	0,40	-0,08	0,27	0,02
5.	Mei	0,27	0,64	0,16	0,37	-0,09
6.	Juni	0,56	0,78	0,69	0,15	0,45
7.	Juli	0,24	0,94	0,21	0,24	-0,12
8.	Agustus	-0,10	-0,28	-0,32	0,24	-0,23
9.	September	0,28	-0,14	-0,27	-0,24	-0,25

No.	Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10.	Oktober	0,10	0,07	0,12	0,03	0,01
11.	Nopember	0,30	0,16	0,37	0,26	0,33
12.	Desember	0,06	0,56	0,58	0,44	0,49
Inflasi Tahunan		1,87	4,36	2,80	2,00	1,16

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa laju inflasi Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu 2016-2017, inflasi Kota Cirebon mengalami kenaikan dari 1,87 persen tahun 2016 menjadi 4,36 persen pada tahun 2017. Namun sejak tahun 2017, tingkat inflasi Kota Cirebon terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 4,36 persen pada tahun 2017 menjadi 1,16 persen di tahun 2020. Berikut adalah grafik yang menggambarkan fluktuasi tingkat inflasi Kota Cirebon setiap bulan pada tahun 2016-2020.

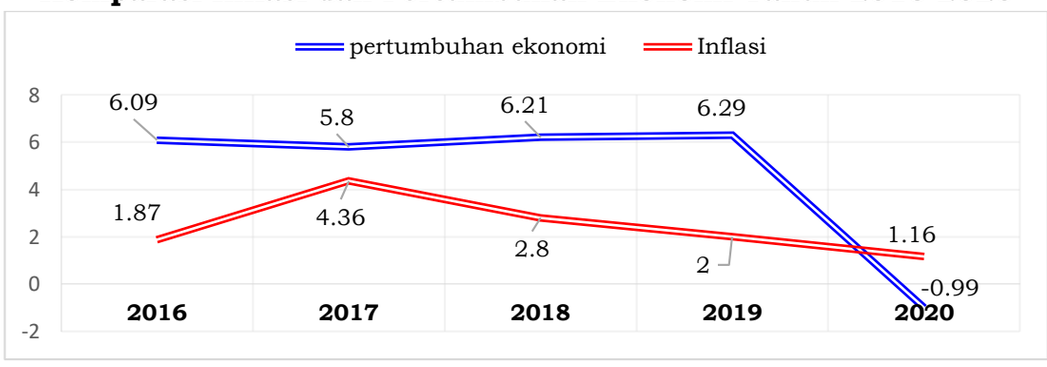
Gambar 2.28
Inflasi Bulanan Kota Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon, menunjukan adanya korelasi yang negatif. Hubungan negatif ini menunjukan kenaikan inflasi akan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya terdapat kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap kenaikan harga-harga. Berikut adalah grafik yang menggambarkan korelasi tersebut

Gambar 2.29
Komparasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Melihat pada grafik diatas, terlihat korelasi bahwa inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Selama tahun 2016 – 2020, Inflasi tertinggi mencapai 4,36 persen terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,80 persen dan pada tahun 2020, inflasi kembali turun menjadi 1,16 persen, dimana pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi dan turun menjadi -0,99 persen.

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku per satu orang penduduk yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, sehingga dengan penyajian secara berkala akan menunjukan adanya perubahan kemakmuran.

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Gambar berikut menunjukan pada periode tahun 2016-2019 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan dari Rp. 58,42 juta di tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 73,61 juta pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.72,72 juta.

Dengan meningkanya PDRB AdHb per kapita pada periode tahun 2016-2019, maka telah terjadi perubahan tingkat kemakmuran yang lebih baik bagi penduduk Kota Cirebon. Hal ini harus diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat, sehingga tingkat kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota Cirebon. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp. 0,89 juta.

Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Cirebon dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	58,42	63,26	68,42	73,61	72,72
2.	Perumbuhan PDRB Per Kapita	4,80	4,96	4,83	5,14	5,06

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan ukuran yang digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Menurut Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai *Gini Ratio* yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan

kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini Rasio terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan 2 (dua) hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian sosial maupun ekonomi. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Di Kota Cirebon masalah konsekuensi distribusi dari pertumbuhan ekonomi menjadi isu prioritas. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai dipertanyakan banyak kalangan, apakah hal itu dinikmati sebagian besar masyarakat atau hanya sekelompok masyarakat tertentu. Bahkan tidak sedikit orang yang mensinyalir bahwa pembangunan selama ini malah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat.

Indeks kesenjangan pendapatan Kota Cirebon walaupun menunjukkan kesenjangan yang sedang tetapi menunjukkan kecenderungan naik belakang ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan perlu memprioritaskan pengurangan kesenjangan pendapatan, karena jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan kesenjangan di masyakat akan lebih parah. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh oleh hasil-hasil pembangunan.

Mengurangi kesenjangan antar wilayah harus menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Cirebon. Potensi ekonomi, ketersedian infrasturktur, keuangan daerah dan sumber daya manusia harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan, sehingga tidak ada lagi aktifitas ekonomi yang hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, dan membiarkan daerah lainnya tertinggal. Perencanaan yang bersifat spasial dan mempertimbangkan dimensi wilayah sangat perlu diperhatikan.

Tabel 2.21
Indeks Gini Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Gini Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kota Cirebon	0,404	0,411	0,432	0,408	0,421
2.	Jawa Barat	0,402	0,393	0,405	0,400	0,403
3.	Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,381

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2020 indeks gini Kota Cirebon berada pada angka 0,421 dimana indeks ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Cirebon termasuk kategori sedang. Kondisi demikian memerlukan strategi pengembangan perekonomian yang tepat, sehingga akan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, begitu juga daya tarik bagi urbanisan, khususnya bagi tenaga kerja trampil dan terdidik.

Peningkatan indeks gini rasio tersebut memerlukan upaya penanganan yang lebih serius dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, sehingga efek negatif dari kenaikan indeks gini yaitu peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran dapat diminimalisir.

Menurut *Irma Adelman* dan *Cynthia Taft Morris* mengemukakan bahwa peningkatan indeks gini disebabkan oleh 8 (delapan) sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita;
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal *(capital intensive),* sehingga presentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
5. Rendahnya tingkat mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar *(term of trade)* bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara berkembang terhadap barang-barang ekspor;
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Ketimpangan Williamson merupakan indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Williamson mengemukakan model VW (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan VUW (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu tertentu. Hasil pengukuran dari nilai *Indeks Williamson* ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0< VW< 1. Jika *indeks Williamson* semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil tingkat ketimpangan wilayah dan jika *indeks Wlliamson* semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan wilayah.

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Program/ UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu:

a) *A long and healthy life* (umur panjang dan hidup sehat);
b) *Knowledge* (pengetahuan);
c) *A decent standard of living* (standar hidup layak).

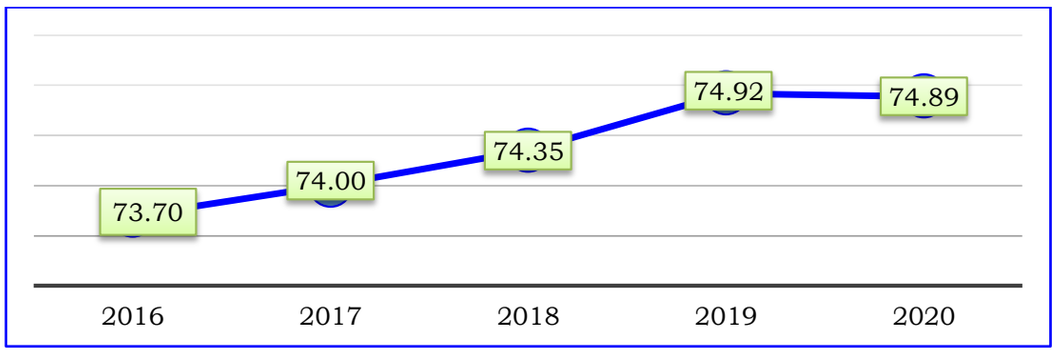
Dalam penghitungan angka IPM masih mengabaikan disparitas gender, padahal kesenjangan gender masih banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu akan menyebabkan kualitas kesehatan dan pendidikan laki-laki dan perempuan tidak sama. Oleh karena itu, UNDP memasukkan aspek gender kedalam konsep pembangunan manusia untuk melengkapi perhitungan IPM.

Terdapat dua indeks yang berkaitan dengan aspek gender, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon masih dihadapkan pada banyak tantangan di berbagai bidang pembangunan. Tantangan di bidang pendidikan terutama disebabkan oleh belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk dengan penghasilan rendah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Cirebon pada tahun 2018 untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi masih relatif rendah. APS kelompok usia 16-18 tahun sebesar 76,91 persen.

Di bidang ekonomi, tantangan yang dihadapi mencakup: struktur ekonomi yang tidak seimbang, transformasi ekonomi yang berjalan lambat, ketimpangan cenderung meningkat, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung melambat.

Gambar 2.30
Perkembangan IPM Kota Cirebon
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas menggambarkan aspek pembangunan manusia di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukan adanya peningkatan, kecuali dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi pelambatan sebesar 0,03 poin. Berdasarkan metode penghitungan baru, pada tahun 2016 IPM Kota Cirebon mencapai 73,70 poin dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,92 poin.

Tabel 2.22
Perkembangan IPM Kota Cirebon Menurut Komponennya
Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Komponen Kesehatan		Komponen Pendidikan				Indeks Pendidikan	Komponen Daya Beli		I P M
		AHH	Indeks	HLS	Indeks	RLS	Indeks		PPP	Indeks	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*		*8*
1.	2015	71,79	79,68	12,94	71,89	9,76	65,07	68,48	10.732,00	72,29	73,34
2.	2016	71,83	79,74	13,07	72,61	9,87	65,80	69,21	10.824,00	72,56	73,70
3.	2017	71,86	79,83	13,08	73,06	9,88	66,40	69,73	11.100,00	72,81	74,00
4.	2018	71,99	-	13,09	-	9,89	-	-	11,397,00	-	74,35
5.	2019	72,13	-	13,11	-	9,90	-	-	11,930,00	-	74,92
6.	2020	72,26	-	13,12	-	9,91	-	-	11,800,00	-	74,89

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.2.1.8 Jumlah dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

A. Jumlah Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi saat ini. Berbagai program pengentasan kemiskinan dirancang dan diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk di Kota Cirebon.

Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan pasca *MDGs* yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari *SDGs* adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung, antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $ 1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran. Dokumentasi ini, salah satu muatannya berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan.

Kota Cirebon sebagai salah satu dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Berdasarkan data BPS, dalam periode tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin Kota Cirebon mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon sebanyak 30,15 ribu jiwa dari total penduduk, tahun 2017 naik menjadi 30,19 ribu jiwa, tahun 2018 kembali turun menjadi 28,03 ribu jiwa dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 26,80 ribu jiwa, namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 30,61 ribu jiwa dari total penduduk Kota Cirebon. Kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 3,81 ribu jiwa sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan pergaulan kehidupan bermasyarakat.

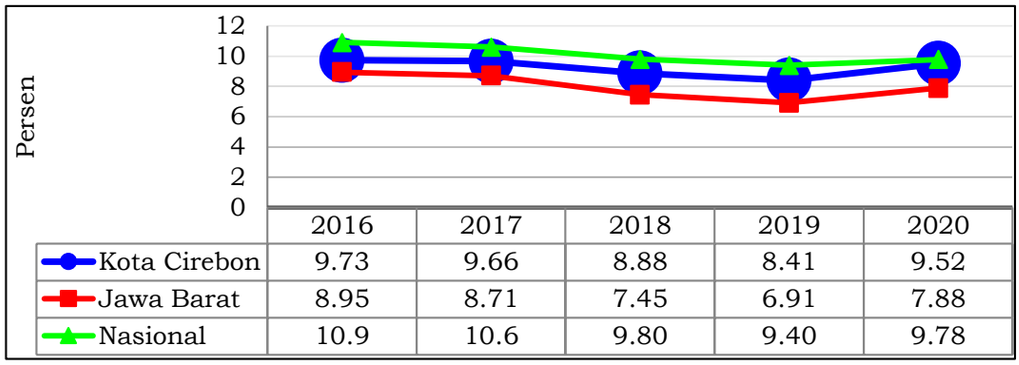
Tabel 2.23
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	30,15	30,19	28,03	26,80	30,61
2.	Persentase Penduduk Miskin	9,73	9,66	8,88	8,41	9,52

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon paling tinggi terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 30,61 ribu jiwa atau 9,52 persen. Kondisi ini sebagai dampak langsung adanya pandemi COVID-19 yang melanda Kota Cirebon sejak awal Maret 2020. Namun dalam periode tahun 2017-2019, angka kemiskinan Kota Cirebon mengalami penurunan dari 30,19 ribu jiwa atau 9,66 persen menjadi 26,80 ribu jiwa atau 8,41 persen. Untuk melihat posisi Kota Cirebon berdasarkan angka kemiskinan terhadap Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.31
Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Cirebon	9.73	9.66	8.88	8.41	9.52
Jawa Barat	8.95	8.71	7.45	6.91	7.88
Nasional	10.9	10.6	9.80	9.40	9.78

Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Jawa Barat, BPS Pusat, 2020

Grafik di atas memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat namun dibawah rata-rata nasional. Dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan berbagai program dan kegiatan dari tahun ke tahun yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam tabel dan grafik di atas yang masih cukup tinggi, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sehingga dapat berjalan secara efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon.

B. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.24
Garis Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Garis Kemiskinan Kota Cirebon	373.866	392.725	426.738	444.574	457.954
2.	Garis Kemiskinan Jawa Barat	324.992	344.427	367.755	386.198	410.988
3.	Garis Kemiskinan Nasional	372.114	400.995	425.770	440.538	454.652

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Dalam periode 2016-2020, garis kemiskinan Kota Cirebon menunjukan peningkatan. Tahun 2016 sebesar Rp373.866 per kapita/bulan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp457.954 per kapita/bulan. Melihat pada tabel diatas, garis kemiskinan Kota Cirebon tahun 2020 berada diatas garis kemiskinan Jawa Barat dan Nasional yang dalam periode yang sama masing-masing sebesar Rp410.988 dan Rp454.652 per kapita/bulan.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan *(Poverty Gap Index-P1)* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Tabel 2.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cirebon, Tahun 2016-2020

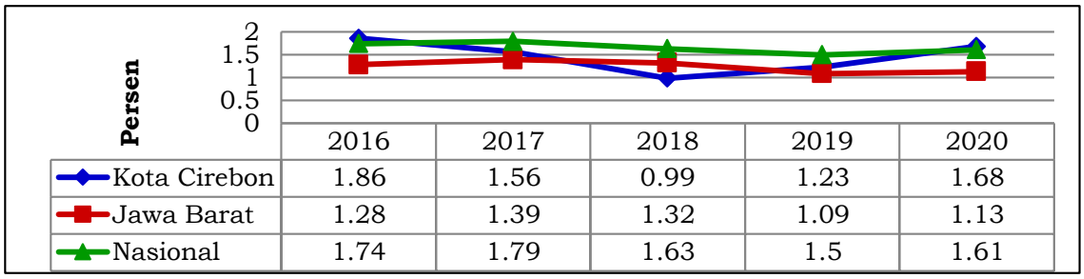
No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Cirebon	1,86	1,56	0,99	1,23	1,68
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat	1,28	1,39	1,32	1,09	1,13
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,74	1,79	1,63	1,50	1,61

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Selama periode 2016-2020 P1 Kota Cirebon mengalami fluktuasi, dimana nilai P1 Kota Cirebon tahun 2016 sebesar 1,86 poin kemudian tahun 2017 turun menjadi 1,56 poin dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 0,99 poin. Namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat masing-masing menjadi 1,23 poin dan 1,68 poin. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P1 di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan masih banyak penduduk miskin di pedesaan yang rata-rata pengeluarannya lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih diprioritaskan di daerah pedesaan untuk membebaskan penduduk dengan

kondisi miskin "terlalu dalam". Berikut adalah grafik yang menggambarkan fluktuasi indeks kedalaman kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional periode 2016-2020.

Gambar 2.32
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Cirebon, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Cirebon	1.86	1.56	0.99	1.23	1.68
Jawa Barat	1.28	1.39	1.32	1.09	1.13
Nasional	1.74	1.79	1.63	1.5	1.61

Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Pusat, yang dikelola dalam SIPD, 2021

D. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon pada tahun 2016 sebesar 0,49 poin dan sampai dengan tahun 2019 terus menunjukan penurunan, namun dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19. Data tahun 2020 menunjukan bahwa indeks keparahan kemiskinan Kota Cirebon lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat dan Nasionl yang dalam periode yang sama masing-masing mencapai 0,23 poin dan 0,38 poin. Peningkatan P2 dalam 1 (satu) tahun terakhir mencerminkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Cirebon semakin membesar.

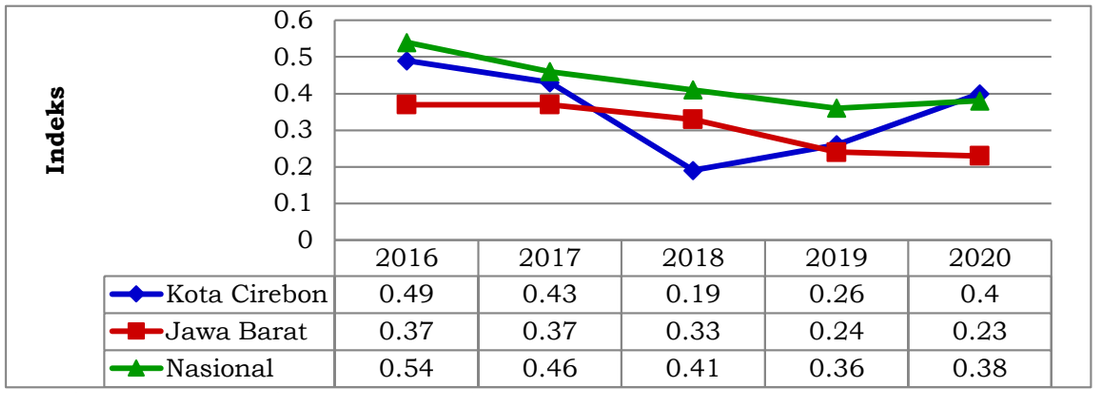
Tabel 2.26
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Cirebon	0,49	0,43	0,19	0,26	0,40
Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Barat	0,37	0,37	0,33	0,24	0,23
Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,54	0,46	0,41	0,36	0,38

Sumber : BPS Kota Cirebon, BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selain tabel diatas, berikut adalah grafik yang menggambarkan fluktuasi yang terjadi pada nilai P2 ditingkat Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.33
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Cirebon	0.49	0.43	0.19	0.26	0.4
Jawa Barat	0.37	0.37	0.33	0.24	0.23
Nasional	0.54	0.46	0.41	0.36	0.38

Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Nasional, 2020

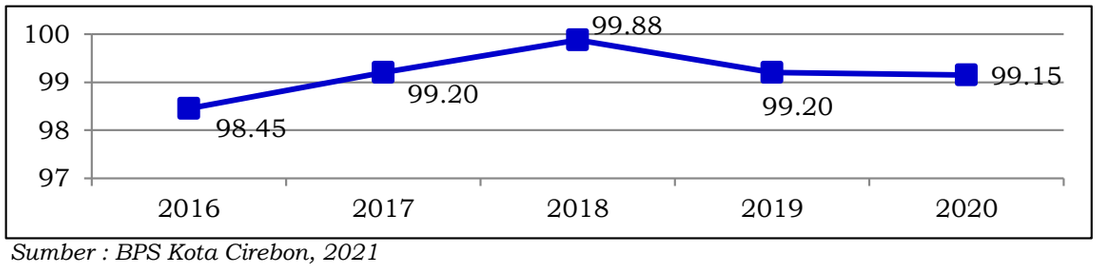
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka pendidikan yang ditamatkan, dan Rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku umumnya diperoleh di lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Melalui pendidikan, individu akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri guna mancapai kehidupan yang lebih baik. Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.34
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Cirebon, 2021

2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS Kota Cirebon dalam periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 EYS Kota Cirebon sebesar 13,07 meningkat menjadi 13,12 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukan bahwa harapan seorang anak di Kota Cirebon untuk bersekolah semakin baik.

Secara umum masyarakat Kota Cirebon sudah sadar akan pentingnya pendidikan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka HLS dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2020 HLS Kota Cirebon berada di atas Jawa Barat (12,50 tahun) dan di atas rata-rata nasional (12,98 tahun). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2020 di Kota Cirebon memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,12 tahun atau setara dengan Diploma II.

Tabel 2.27
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon
Dan Provonsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	HLS Kota Cirebon	13,07	13,08	13,09	13,11	13,12
2.	HLS Jawa Barat	12,30	12,42	12,45	12,48	12,50

Sumber: BPS Kota Cirebon, BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Pada penghitungan IPM metode baru, dimensi pendidikan diukur dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling (MYS)* merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Di Kota Cirebon, tahun 2020 rata-rata seseorang menempuh pendidikan sekitar 9,91 tahun atau tamat SMP dan/atau memasuki jenjang pendidikan SMA kelas 10. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,04 tahun. Dari tabel terlihat, bahwa RLS/MYS Kota Cirebon sudah berada di atas Jawa Barat dan Nasional, yang masing-masing mencapai 8,55 tahun dan 8,48 tahun, sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon sudah semakin baik.

Tabel 2.28
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	RLS Kota Cirebon	9,87	9,88	9,89	9,90	9,91
2.	RLS Jawa Barat	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55

Sumber : BPS Kora Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengidentifikasi partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur, sehingga nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas umur sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak yang bersekolah di jenjang SD/sederajat berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI dan SMP/MTs, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SD/MI dibanding penduduk usia 7-12 tahun atau menunjukkan siswa SMP/MTs dibanding jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Kasar untuk SMA/MA/SMK, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK dibanding penduduk usia 16-18 tahun.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	SD/MI	110,54	111,37	110,47	107,79	106,17
2.	SMP/MTs	119,15	139,93	89,46	84,81	85,64
3.	SMA/SMK/MA	120,88	106,84	74,78	87,40	87,12

Sumber : BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI menunjukan kecenderungan yang menurun dari tahun 2016-2020, sebagaimana terlihat pada tabel di atas APK SD/MI tahun 2016 sebesar 110,54 persen turun menjadi 106,17 persen di tahun 2020. Begitu pula APK SPM/MTs sejak tahun 2017 mengalami penurunan dari 139,93 persen pada tahun 2017 menjadi 85,64 persen pada tahun 2020. APK tertinggi dicapai pada tahun 2017 yang mencapai angka 111,37 persen untuk jenjang SD/MI, 139,93 persen untuk jenjang SMP/MTs sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA APK tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 120,88 persen.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai di atas 100 persen, artinya keterjangkauan pendidikan dasar di Kota Cirebon sudah merata, hal ini dimungkinkan terjadi karena terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun sebagai akibat keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau terdapat siswa SD/MI yang usianya di atas 12 tahun. Namun, pada tahun 2018-2019 APK untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA berada dibawah 100 persen, sehingga penduduk Kota Cirebon kurang dapat menjangkau jenjang pendidikan tersebut.

2.2.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Selain itu APM juga digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100,00 persen.

Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI ataupun SMP/MTs, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-12 yang memperoleh pendidikan di SD/MI atau menunjukkan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs. Angka Partisipasi Murni untuk SMA/MA/SMK, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 16-18 yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	SD/MI	95,53	96,51	98,28	88,76	95,29
2.	SMP/MTs	83,12	82,72	68,92	79,59	70,79
3.	SMA/SMK/MA	78,65	81,01	80,48	88,06	66,75

Sumber: BPS Kora Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Realisasi capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2020 adalah sebesar 95,29 persen dari target 100 persen. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, APM tahun 2020 mengalami peningkatan dari 88,76 persen pada tahun 2019 menjadi 95,29 persen di tahun 2020. Walaupun APM SD/MI menunjukan adanya peningkatan, namun masih terdapat sekitar 4,71 persen anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah di jenjang SD/MI. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya mendorong anak-anak usia 7-12 tahun untuk dapat bersekolah, baik sekolah formal maupun non formal.

Realiasi persentase capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2020 adalah sebesar 70,79 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi capaian angka partisipasi murni SMP/MTs yang sebesar 79,59 persen menunjukkan penurunan sebesar 8,80 persen.

Realisasi capaian persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Tahun 2020 adalah sebesar 66,75 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019 persentase realisasi angka partisipasi murni SMA/MA/SMK sebesar 88,06 persen, sehingga mengalami penurunan sebesar 21,31 persen.

2.2.2.6 Jumlah Kematian Bayi

Dalam kurun waktu 2015-2020 jumlah kematian bayi di Kota Cirebon terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi di Kota Cirebon sebanyak 6 orang menurun dari tahun 2019 yang mencapai 32 orang.

Gambaran jumlah kematian bayi d Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

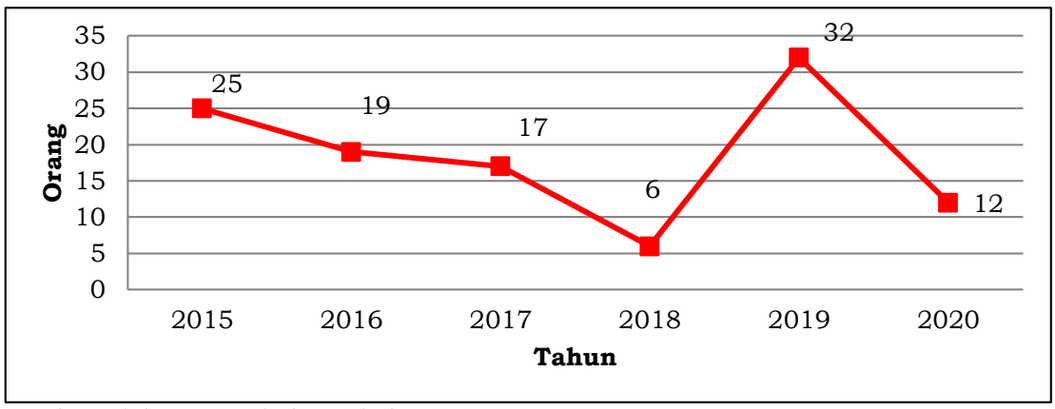
Tabel 2.31
Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Lahir Hidup, dan Angka Kematian Bayi Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Lahir Hidup	Angka Kematian Bayi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	2015	25	5.378	4,6/1000 LH
2.	2016	19	5.536	3,4/1000 LH
3.	2017	17	5.395	3,2/1000 LH
4.	2018	6	5.652	2,2/1000 LH
5.	2019	32	5.491	5,8/1000 LH
6.	2020	12	5.163	2,3/1000 LH

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan pergerakan angka kematian bayi di Kota Cirebon Tahun 2015-2020.

Gambar 2.35
Jumlah Kematian Bayi di Kota Cirebon. Tahun 2015-2020



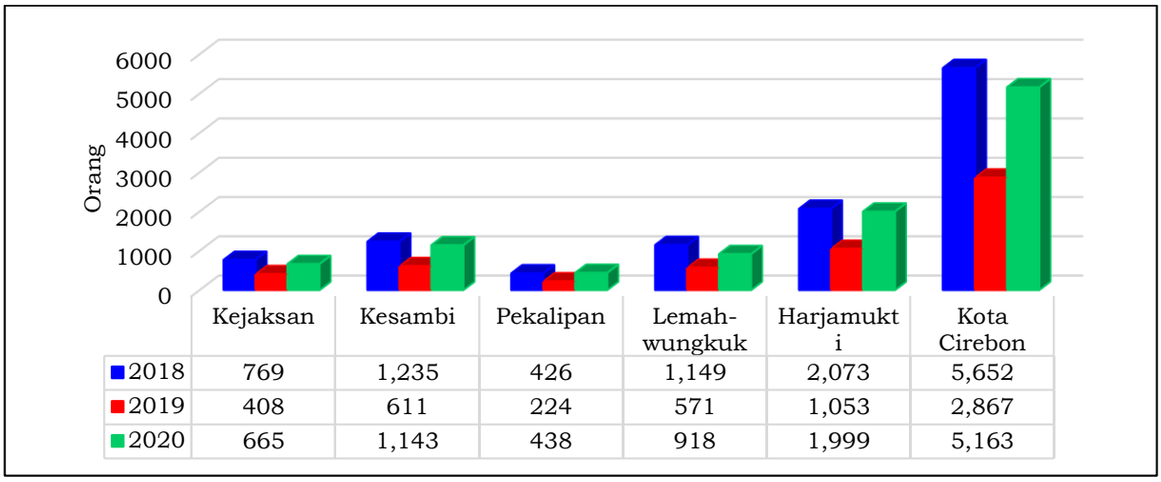
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2021

Gambar di atas menunjukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kematian bayi di Kota Cirebon menunjukan penurunan. Pada tahun 2015 jumlah kematian bayi sebanyak 25 orang turun menjadi 19 orang pada tahun 2016 dan terus menurun sampai pada tahun 2018 menjadi 6 orang bayi. Namun pada tahun 2019, jumlah kematian bayi kembali meningkat menjadi 32 orang dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi 12 orang bayi.

Penurunan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon menunjukan intervensi program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan berhasil dengan baik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu program unggulan dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon adalah *Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM)* sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendekatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Disamping itu, dalam upaya akselerasi penurunan angka kematian bayi di Kota Cirebon telah dilakukan penguatan

Kampung Siaga sebagai penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Keberhasilan menurunkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah Kota Cirebon untuk menempatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis penyakit jantung di Puskesmas sebagai bagian dari Program Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM).

Gambar 2.36
Sebaran Jumlah Bayi Lahir Hidup Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2018-2020



	Kejaksan	Kesambi	Pekalipan	Lemah-wungkuk	Harjamukti	Kota Cirebon
2018	769	1,235	426	1,149	2,073	5,652
2019	408	611	224	571	1,053	2,867
2020	665	1,143	438	918	1,999	5,163

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

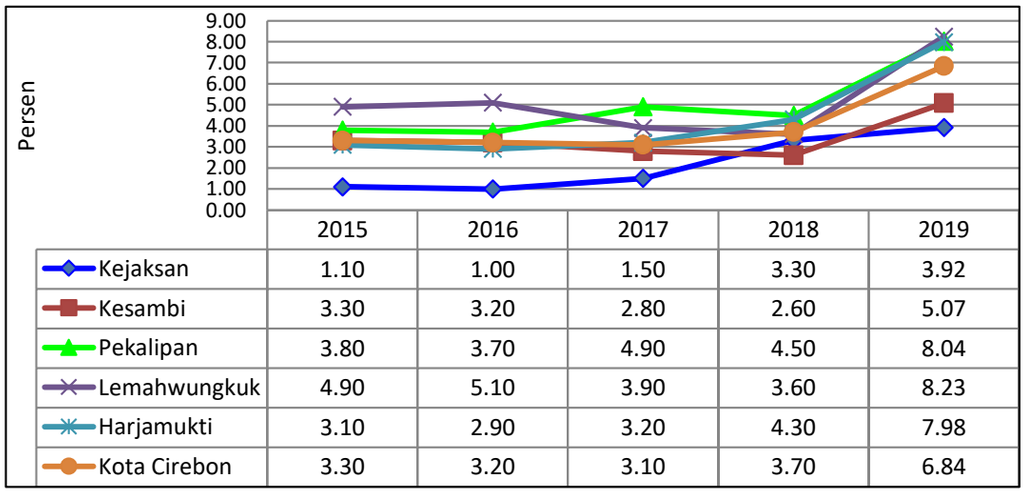
Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2020 kecamatan yang memiliki jumlah bayi lahir hidup terbanyak adalah Kecamatan Harjamukti sebanyak 1.999 bayi, sementara kecamatan yang memiliki jumlah bayi lahir hidup paling sedikit adalah Kecamatan Pekalipan sebanyak 438 bayi.

2.2.2.7 Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokan menjadi tiga. Pertama yakni kelompok bayi kurang bulan (prematur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) <37minggu (<259 hari). Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259-293 hari). Kelompok ke tiga adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42 minggu (>294 hari). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Persentase berat bayi lahir rendah disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.37

Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah Per Kecamatan Di Kota CirebonTahun 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	1.10	1.00	1.50	3.30	3.92
Kesambi	3.30	3.20	2.80	2.60	5.07
Pekalipan	3.80	3.70	4.90	4.50	8.04
Lemahwungkuk	4.90	5.10	3.90	3.60	8.23
Harjamukti	3.10	2.90	3.20	4.30	7.98
Kota Cirebon	3.30	3.20	3.10	3.70	6.84

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2019, prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah Kota Cirebon sebesar 6,80 persen. Prevalensi tertinggi terdapat di Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 8,20 persen dan terendah terdapat di Kecamatan Kejaksan sebesar 3,90 persen.

Tabel 2.32

Jumlah Bayi Lahir Hidup, Jumlah dan Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Cirebon Tahun 2016-2019

Kecamatan	2016			2017			2018			2019		
	Lahir Hidup	BBLR	%	Lahir Hidup	BBLR	%	Lahir Hidup	BBLR	%	Lahir Hidup	BBLR	%
1	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Kejaksan	784	8	1,0	746	11	1,5	769	25	3,3	408	16	3,9
Kesambi	1.283	41	3,2	1.267	35	2,8	1.235	32	2,6	611	31	5,1
Pekalipan	435	16	3,7	430	21	4,9	426	19	4,5	224	18	8,0
Lemah wungkuk	1.036	53	5,1	981	38	3,9	1.149	41	3,6	571	47	8,2
Harjamukti	1.998	58	2,9	1.971	63	3,2	2.073	90	4,3	1.053	84	8,0
Kota Cirebon	5.536	176	3,2	5.395	168	3,1	5.652	207	3,7	2.867	196	6,8

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2020

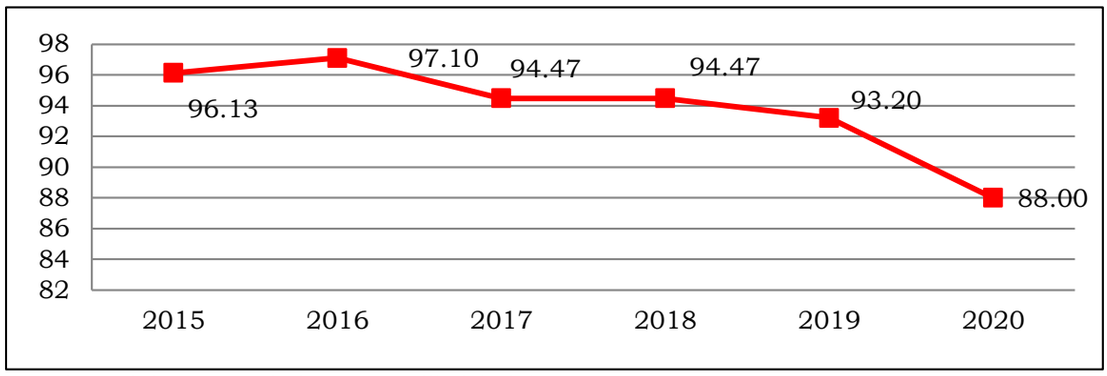
Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Kota Cirebon pada tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Jumlah BBLR tahun 2016 sebanyak 168 orang bayi, namun pada tahun 2019 kasus BBLR bertambah menjadi 196 dari 2.867 bayi lahir hidup.

2.2.2.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Cirebon dalam periode 2015-2020 terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2015 cakupan kunjungan bayi ke sarana layanan kesehatan sebesar 96,13 persen dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 97,10 persen. Namun pada tahun 2017 cakupan pelayanan kesehatan bayi turun menjadi 94,47 persen dan tetap

menurun pada tahun 2020 sebesar 88,00. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.38
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Cirebon Tahun 2015-2020

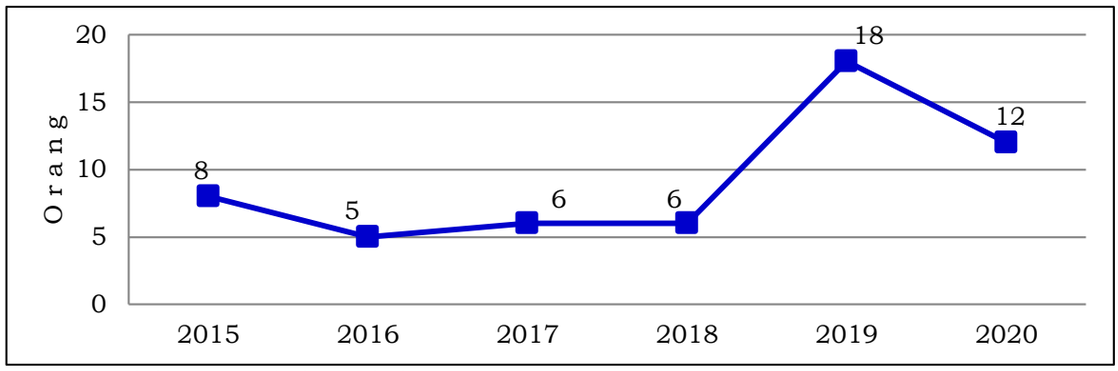


Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikeloladalam SIPD, 2021

2.2.2.9 Kematian Anak Balita

Kematian anak balita di Kota Cirebon dalam periode 2015-2020 mengalami fluktuatif sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.39
Jumlah Kematian Anak Balita di Kota Cirebon Tahun 2015-2020



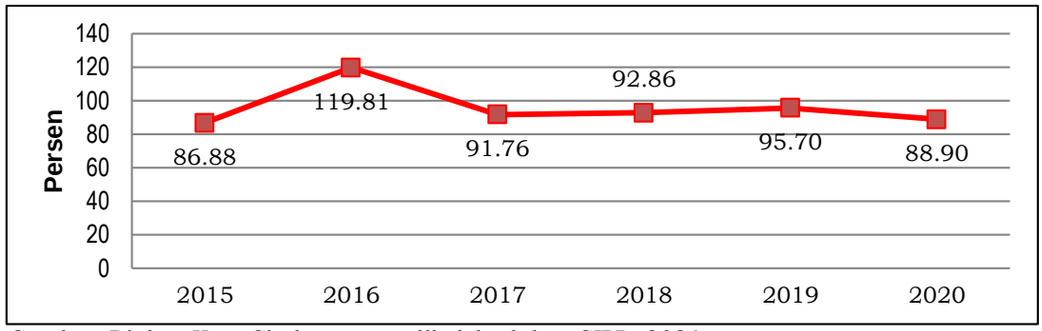
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2021

Kematian anak balita di Kota Cirebon tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 6 orang di tahun 2018 menjadi 18 orang di tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 12 orang.

2.2.2.10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2015 sebesar 86,88 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 119,81 persen. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 91,76 persen. Pada tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan dan tahun 2020 capaian menurun menjadi 88,90 persen.

Gambar 2.40
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Cirebon, Tahun 2015-2020

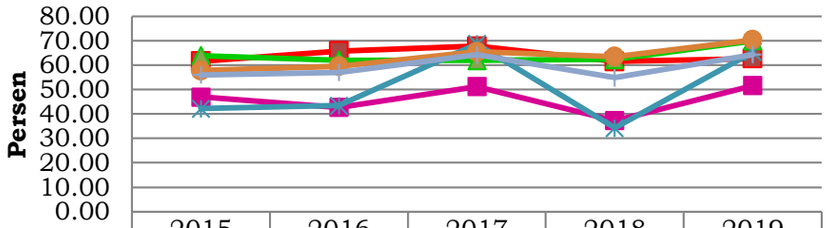


Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.2.2.11 Cakupan Pemberian ASI Ekslusif

Cakupan pemberian ASI Ekslusif dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan dari 56,10 persen tahun 2015 meningkat menjadi 64,26 persen pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 54,94 persen dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 64,40 persen. Hal ini menunjukan bahwa walaupun perilaku pemberian ASI ekslusif terus meningkat, namun masih banyak ibu-ibu yang belum memberikan ASI Ekslusif untuk bayinya, dengan alasan antara lain ibu bekerja, ASI keluarnya sedikit, dan payudara sakit. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama ibu-ibu untuk memberikan ASI Ekslusif sampai bayi berusia 6 bulan.

Gambar 2.41
Cakupan Pemberian ASI Ekslusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	61.70	65.80	67.83	61.57	62.68
Kesambi	64.00	62.10	61.95	62.39	70.00
Pekalipan	47.00	42.70	51.25	37.33	51.70
Lemahwungkuk	42.20	43.50	68.70	34.28	65.40
Harjamukti	57.80	59.60	65.56	63.58	70.44
Kota Cirebon	56.10	57.12	64.26	54.94	64.40

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2020

Grafik di atas memperlihatkan cakupan pemberian ASI Ekslusif di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 4.471 orang bayi di Kota Cirebon dan yang mendapatkan ASI Ekslusif sebanyak 2.554 bayi atau 57,12 persen. Berdasarkan jenis kelamin, bayi laki-laki memperoleh ASI Ekslusif paling tinggi sebanyak 1.307

bayi atau 51,17 persen, sementara bayi perempuan sebanyak 1.247 bayi atau 48,83 persen.

ASI Eklusif selain bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi juga merupakan aspek penting dalam pembangunan/pembentukan kedekatan antara ibu dan bayi. Kedekatan yang dimiliki antara keduanya sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis dan emosi bayi di masa mendatang. Mengingat pentingnya ASI bagi bayi, maka pemerintah daerah dan masyarakat perlu mendorong ibu-ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, karena di Kota Cirebon masih terdapat bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif.

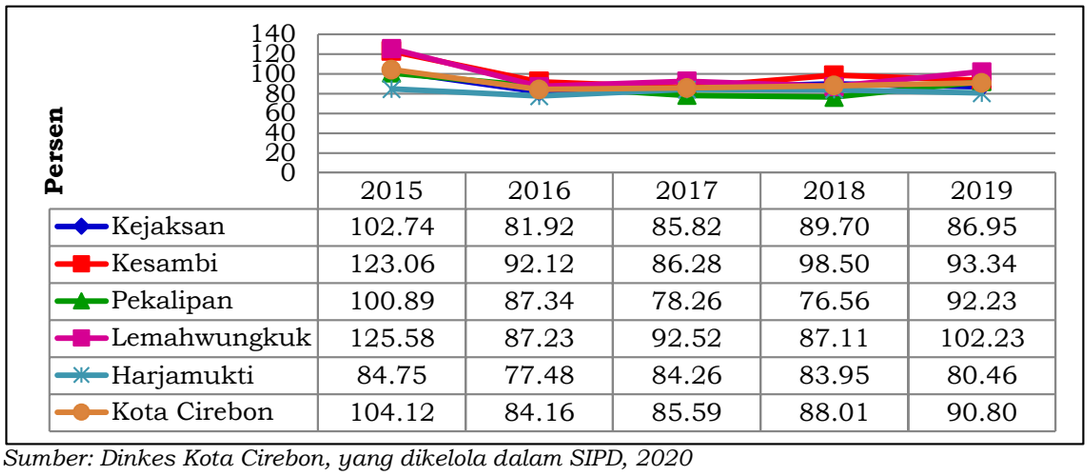
Berdasarkan data pada gambar di atas, pada tahun 2019 Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah dengan persentase cakupan bayi yang mendapat ASI Ekslusif tertinggi yaitu sebanyak 70,44 persen dari 1.283 bayi yang ada di Kecamatan Harjamukti atau 40,36 persen dari keseluruhan bayi yang ada di Kota Cirebon sebanyak 3.179 bayi. Sementara Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan persentase cakupan bayi yang mendapat ASI Eksklusif terendah, yaitu 51,70 persen dari 358 bayi yang ada di Kecamaan Pekalipan atau 11,26 persen dari keseluruhan bayi yang ada di Kota Cirebon.

2.2.2.12 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi

Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikan pada lokasi tertentu atau diteteskan melalui mulut. Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Dari imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai komitmen Indonesia pada global untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90,00 persen secara tinggi dan merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita.

Cakupan imunisasi campak pada bayi di Kota Cirebon tahun 2019 mencapai 90,80 persen. Cakupan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 102,23 persen, kemudian disusul oleh Kecamatan Kesambi 93,34 persen dan Kecamatan Pekalipan 92,23 persen; sementara cakupan terendah di Kecamatan Harjamukti sebesar 80,46 persen. Cakupan imunisasi campak tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan cakupan tahun 2018 sebesar 88,01 persen.

Gambar 2.42
Persentase Cakupan Imunisasi Campak Pada Bayi Menurut Kecamatan Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

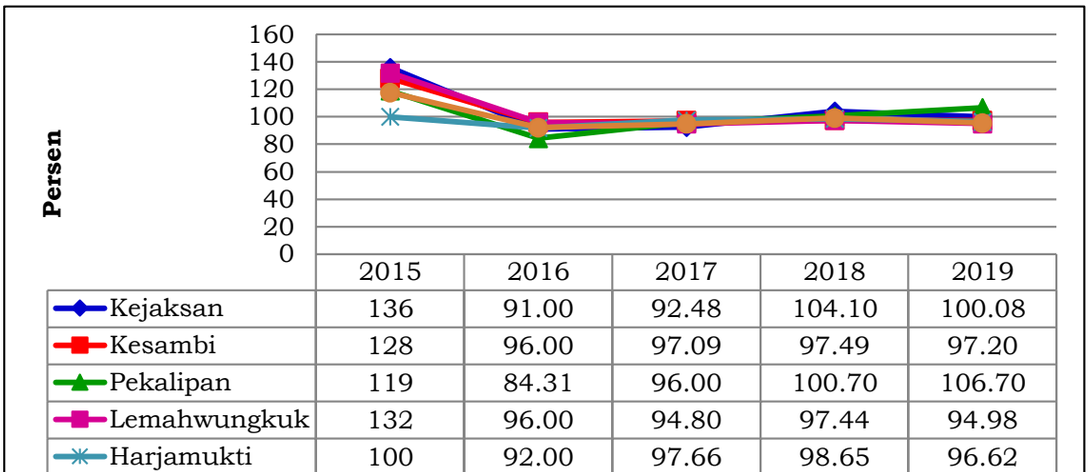


	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	102.74	81.92	85.82	89.70	86.95
Kesambi	123.06	92.12	86.28	98.50	93.34
Pekalipan	100.89	87.34	78.26	76.56	92.23
Lemahwungkuk	125.58	87.23	92.52	87.11	102.23
Harjamukti	84.75	77.48	84.26	83.95	80.46
Kota Cirebon	104.12	84.16	85.59	88.01	90.80

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data pada gambar berikut menunjukan bahwa cakupan imunisasi BCG tahun 2019 di Kota Cirebon sebesar 95,40 persen dan belum mencapai target Renstra sebesar 98,00 persen, artinya masih terdapat sekitar 2,60 persen bayi di Kota Cirebon belum mendapatkan imunisasi BCG. Cakupan tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalipan dan Kecamatan Kejaksan masing-masing sebesar 106,70 persen dan 100,08 persen, sementara yang terendah di Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 94,98 persen. Cakupan imunisasi BCG tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 99,08 persen.

Gambar 2.43
Persentase Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

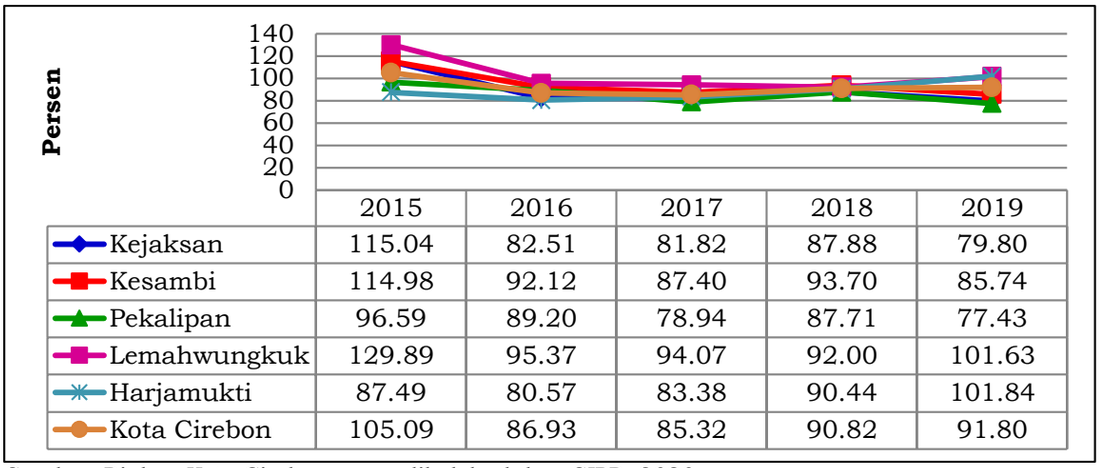


	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	136	91.00	92.48	104.10	100.08
Kesambi	128	96.00	97.09	97.49	97.20
Pekalipan	119	84.31	96.00	100.70	106.70
Lemahwungkuk	132	96.00	94.80	97.44	94.98
Harjamukti	100	92.00	97.66	98.65	96.62
Kota Cirebon	117.72	92.12	94.97	99.08	95.40

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2020

Gambar di atas menunjukan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Cirebon telah mencapai target WHO yaitu dari jumlah bayi yang ada minimal 90 persen harus sudah mendapatkan imunisasi BCG.

Gambar 2.44
Persentase Cakupan Imunisasi Polio Pada Bayi Per Kecamatan Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019



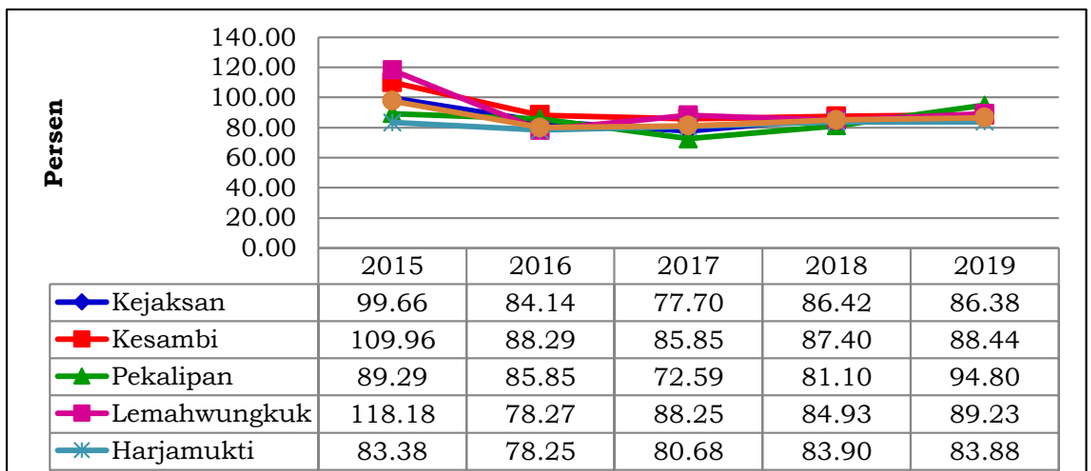
	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	115.04	82.51	81.82	87.88	79.80
Kesambi	114.98	92.12	87.40	93.70	85.74
Pekalipan	96.59	89.20	78.94	87.71	77.43
Lemahwungkuk	129.89	95.37	94.07	92.00	101.63
Harjamukti	87.49	80.57	83.38	90.44	101.84
Kota Cirebon	105.09	86.93	85.32	90.82	91.80

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Cakupan pemberian imunisasi polio berdasarkan gambar di atas menunjukkan tahun 2019 terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki cakupan pemberian imunisasi polio di atas 90,00 persen yaitu Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 101,63 persen dan Kecamatan Harjamukti sebesar 101,84 persen. Imunisasi polio sejak tiga tahun terakhir memperlihatkan persentase yang terus meningkat yaitu di tahun 2017 mencapai 85,32 persen, di tahun 2018 meningkat menjadi 90,82 persen serta meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 91,80 persen.

Begitu pula cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Cirebon mengalami peningkatan sejak tahun 2017 dimana cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 81,19 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 84,99 persen, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 86,60 persen. Semua kecamatan telah mencapai cakupan imunisasi dasar lengkap di atas 80,00 persen.

Gambar 2.45
Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Per Kecamatan di Kota CirebonTahun 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	99.66	84.14	77.70	86.42	86.38
Kesambi	109.96	88.29	85.85	87.40	88.44
Pekalipan	89.29	85.85	72.59	81.10	94.80
Lemahwungkuk	118.18	78.27	88.25	84.93	89.23
Harjamukti	83.38	78.25	80.68	83.90	83.88
Kota Cirebon	97.70	79.96	81.19	84.99	86.60

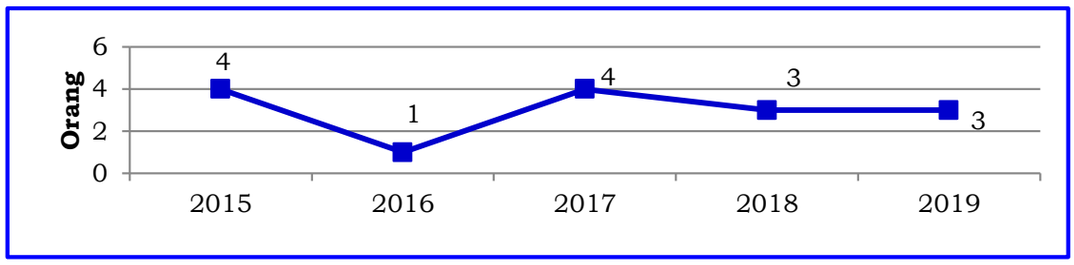
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.2.2.13 Jumlah Kasus Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk menurunkan angka kematian ibu secara global sampai dibawah 70/10.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kematian ibu dan kesakitan ibu hamil sudah lama menjadi masalah kesehatan yang harus segera ditangani. Kematian pada saat melahirkan menjadi faktor utama kematian perempuan pada puncak produktivitasnya.

Kehamilan adalah proses reproduksi yang normal, tetapi perlu perawatan dini yang khusus agar ibu dan janin dalam keadaan sehat, oleh sebab itu kehamilan yang normal tetap mempunyai risiko. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, perlu dilakukan dengan deteksi dini risiko ibu hamil di tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak atau pada masyarakat. Kasus kematian ibu di Kota Cirebon menunjukan angka fluktuasi naik turun sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.46
Jumlah Kematian Ibu di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019



Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 4 orang dan pada tahun 2016 turun menjadi 1 orang, namun pada tahun 2017 kembali naik menjadi 4 orang dan tahun 2018-2019 kematian ibu masing-masing 3 orang. Naik turunnya jumlah kasus kematian ibu di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2019 perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya untuk menekan dan menurunkan kasus kematian ibu. Peran strategis Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan perlu lebih ditingkatkan, begitu pula stakeholders pembangunan kesehatan seperti Posyandu, Kampung Siaga/Kelurahan Siaga Aktif, dan Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM) perlu lebih ditingkatkan perannya.

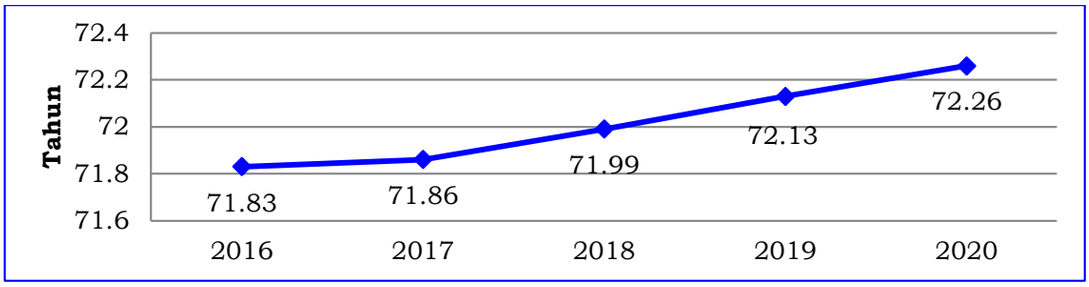
2.2.2.14 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengukur kemampun untuk bertahan hidup lebih lama *(longevity).* Angka Harapan Hidup pada waktu lahir *(life expectacy at birth*), diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak terjadi perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel berikut menjelaskan bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yang artinya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan lebih baik. Pada tahun 2016, Angka

Harapan Hidup Kota Cirebon sebesar 71,83 tahun dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 72,26 tahun atau terjadi peningkatan 0,43 tahun.

Gambar 2.47
Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Cirebon, 2021

2.2.2.15 Kasus Balita Gizi Buruk

Balita merupakan masa *golden age* yang kondisi kesehatannya perlu diperhatikan dengan baik, melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang dalam membantu proses tumbuh kembangnya. Data Dinas Kesehatan Kota Cirebon menunjukkan bahwa jumlah balita di Kota Cirebon pada tahun 2019 sebanyak 21.500 orang yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan pada tahun 2019 ditemukan 43 balita yang memiliki gizi buruk meningkat 6 kasus dari tahun 2018.

Pada tahun 2015 terdapat 45 balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak 26.939 orang. Kondisi ini terus menurun dan pada tahun 2016 terdapat 43 balita gizi buruk dari 23.699 balita yang ada, tahun 2017 terdapat 40 balita gizi buruk dari 22.479 balita, tahun 2018 terdapat 37 balita gizi buruk dari 22.307 balita dan pada tahun 2019 terdapat 43 balita gizi buruk dari 21.500 balita.

Tabel 2.33
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Balita	Gizi Buruk	Balita	Gizi Buruk	Balita	Gizi Buruk	Balita	Gizi Buruk	Balita	Gizi Buruk
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Harjamukti	10.124	14	10.249	14	8.737	10	9.008	12	8.682	8
Lemahwungkuk	5.114	8	4.958	5	4.464	8	4.165	6	3.886	14
Pekalipan	2.352	3	2.309	4	1.818	3	1.790	2	1.716	4
Kesambi	5.612	10	5.488	11	4.449	10	4.388	9	4.385	9
Kejaksan	3.735	10	3.700	9	3.011	9	2.956	8	2.831	8
Jumlah	26.939	45	23.699	43	22.479	40	22.307	37	21.500	43

Sumber: Profil Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2015-2019, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.2.2.16 Persentase Rumah Sehat

Kondisi rumah yang sehat akan meningkatkan aktifitas dan produktifitas bagi penghuninya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cirebon, pada tahun 2019 jumlah rumah yang ada sebanyak 58.578 rumah dan yang memenuhi syarat sebagai rumah sehat sebanyak 41.992 rumah atau 71,70 persen, artinya masih terdapat sekitar 18,30 persen rumah di Kota

Cirebon belum memenuhi syarat kesehatan. Jumlah rumah sehat di Kota Cirebon pada tahun 2019 tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 82,41 persen.

Tabel 2.34
Persentase Rumah Sehat di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Rumah Seluruhnya	Jumlah Rumah Sehat	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	2015	62.533	51.532	82,41
2.	2016	62.963	52.037	82,65
3.	2017	63.476	50.423	79,44
4.	2018	63.476	51.652	81,37
5.	2019	58.578	41.992	71,70

Sumber: Profil Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2016, yang dikelola dalam SIPD, 2019

2.2.2.17 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari tabel berikut diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya terjadi fluktuatif. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon sebesar 10,97 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa 89,03 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (sedang bekerja) sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.35
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Angkatan kerja					
1.	Bekerja	126.821	128.269	146.161	90,94	138.667
2.	Mencari pekerjaan	16.125	16.884	10.653	9,06	13.679
	Jumlah	142.946	145.153	156.814	100,00	152.346
B.	Bukan Angkatan Kerja					
1.	Sekolah	23.598	n.a	n.a	29,74	18.993
2.	Mengurus Rumah Tangga	49.894	n.a	n.a	59,43	61.892
3.	Lainnya	13.400	n.a	n.a	10,83	9.217
	Jumlah	86.892	n.a	n.a	100,00	261.045
	Total A + B	229.838	n.a	n.a	100,00	413.391
Rasio Penduduk yang Bekerja		88,72	n.a	n.a	-	58,36

Sumber: Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2017, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni, budaya dan olahraga di Kota Cirebon dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan olahraga. Secara jelas digambarkan dalam uraian berikut ini:

2.2.3.1 Jumlah Sanggar Seni dan Gedung Kesenian

Jumlah gedung kesenian di Kota Cirebon sampai dengan tahun 2019 berjumlah satu gedung, yaitu Gedung Kesenian Rarasantang yang digunakan untuk mengembangkan kreatifitas seni dan budaya, sehingga seni dan budaya lokal yang ada tetap lestari dan berkembang sesuai kemajuan jaman. Sementara jumlah sanggar seni di Kota Cirebon berkembang secara fluktuatif, dari 148 sanggar seni di tahun 2015 turun menjadi 145 sanggar seni pada tahun 2019.

Tabel 2.36
Jumlah Sanggar Seni dan Gedung Kesenian Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	1	1	1	1	1
Jumlah Sanggar Seni	148	135	137	143	145
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	31	22	21	23	21

Sumber: DKOKP Kota Cirebon, 2020

2.2.3.2 Jumlah Gedung Olahraga dan Klub Olahraga

Klub olahraga merupakan sebuah sarana yang mewadahi orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu kegiatan seperti olahraga, khususnya olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan baik dari segi jasmani dan rohani serta hiburan untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dengan tempat yang mewadahi berbagai macam aktivitas olahraga.

Olahraga baik prestasi maupun rekreasi cukup berkembang di Kota Cirebon. Masyarakat Kota Cirebon cenderung menjadikan olahraga sebagai sebuah rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan dan menjaga kesehatan, karena jenis olahraga ini mudah dan spontan dapat dilakukan oleh semua kelompok umur. Untuk mengetahui fasilitas olahraga dan klub olahraga yang berkembang di masyarakat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.37
Jumlah Gedung Olahraga dan Klub Olahraga Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Gedung Olahraga	14	16	16	2	2
Jumlah klub olahraga	4	23	23	86	151

Sumber: DKOKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang diolah dalam SIPD, 2020

Berdasarkan data Dinas Kepemudaa, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, jumlah gedung olahraga menurun dari 14 gedung olahraga pada tahun 2015 menjadi 2 unit gedung olahraga pada tahun 2019.

Sedangan jumlah klub olahraga semakin berkembang dan meningkat dari tahun 2015 sebanyak 4 klub menjadi 151 klub olahraga pada tahun 2019 yang terbagi kedalam 35 cabang olahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain tingkat partisipasi sekolah, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat pendidikan.

Program wajib belajar 12 tahun melalui gerakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mempersiapkan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan oleh penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih dari itu, pendidikan merupakan salah satu pembangunan watak bangsa *(national character building),* seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan.

Dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan semakin majunya ilmu pengetahuan, maka masyarakat mulai menuntut adanya peningkatan sarana dan mutu pendidikan. Pemerintah beserta pihak swasta harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu beberapa upaya pemerintah telah banyak dilakukan antara lain pengadaan sarana dan peralatan belajar, penyempurnaan kurikulum, penataran guru, dan perbaikan gedung sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya-

upaya penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik. Capaian kinerja bidang pendidikan dalam kurun waktu 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator APS digunakan sebagai ukuran daya serap sistem pendidikan Nasional terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal, akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/SMK/MA. Berikut Angka Partisipasi Sekolah di Kota Cirebon tahun 2015-2019.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia
Tahun 2015-2019

No.	Kelompok Umur	Tahun			
		2015	2017	2018	2019
1	*2*	*4*	*6*	*7*	*8*
1.	7-12 tahun	99,10	99,15	99,64	99,55
2.	13-15 tahun	97,88	92,54	91,54	92,57
3.	16-18 tahun	69,81	69,72	76,91	75,58
4.	19-24 tahun	22,57	18,54	14,64	17,19

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, yang dikelola dalam SIPD, 2020
**) Tahun 2016 tidak tersedia data*

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 penduduk usia 7-15 tahun di Kota Cirebon secara umum sudah dapat menikmati layanan pendidikan secara merata. Kelompok usia 7-12 tahun (jenjang SD) sudah mencapai 99,55 persen dan untuk kelompok usia 13-15 tahun (jenjang SMP) mencapai 92,57 persen. Sementara untuk kelompok usia 16-18 tahun (jenjang SMA) yang memperoleh akses layanan pendidikan mencapai 75,58 persen. Masih relatif rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun, dapat diinterpretasikan bahwa setelah lulus pada jenjang pendidikan SMP/SMA banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk bekerja membantu kehidupan orang tua/keluarga, putus sekolah, dan lain-lain.

B. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Dalam upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun terus berupaya untuk memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai, baik melalui penambahan ruang kelas, rehabilitasi bangunan sekolah/ruang kelas berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tabel berikut menggambarkan rasio ketersediaan gedung/bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon.

Tabel 2.39
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Pendidikan Dasar					
1.	Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	33.583	35.025	36.315	36.511	26.622
	Jumlah bangunan SD/ MI (unit)	183	183	183	181	184
	Rasio	183,51	191,39	202,09	201,71	144,68
2.	Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	18.692	15.750	19.237	n.a.	28.415
	Jumlah bangunan SMP/MTs (unit)	54	54	54	58	58
	Rasio	346,15	291,67	356,24	n.a.	498,91
B.	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)					
1.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	15.504	16.333	30.314	n.a.	15.708
2.	Jumlah bangunan sekolah (unit)	59	58	60	65	58
3.	Rasio	262,78	281,60	338,57	n.a.	207,82

Sumber: Kota Cirebon dalam Angka 2016-2020, BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

C. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Perbandingan jumlah guru dan murid yang mengajar di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kota Cirebon, dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Pendidikan Dasar					
1.	Jumlah Guru SD/MI	2.104	2.087	1.670	2.068	2.333
	Jumlah murid SD/MI	41.670	41.165	41.233	40.307	39.943
	Rasio	19,81	19,72	24,69	19,49	17,12
2.	Jumlah Guru SMP/ MTs	1.314	1.392	1.386	1.297	1.297
	Jumlah murid SMP/ MTs	23.199	23.504	23.314	22.212	22.442
	Rasio	17,66	16,89	16,82	17,12	17,30
B.	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)					
3.	Jumlah Guru SMA/SMK/MA	1.833	1.910	1.926	1.686	1.630

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Jumlah murid SMA/SMK/MA	22.942	24.517	26.273	26.178	26.054
	Rasio	12,52	12,84	13,64	15,52	15,98

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio guru terhadap siswa yang mengajar di Sekolah Dasar pada tahun 2019 adalah sebesar 17,12 yang artinya 1 (satu) guru SD/MI rata-rata mengajar 17 hingga 18 orang siswa. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa 1 (satu) orang guru SD/MI rata-rata mengajar 19 hingga 20 orang. Pada jenjang SMP/MTs, rata-rata 1 (satu) orang guru mengajar siswa SMP pada tahun 2019 antara 17 hingga 18 orang siswa, dan untuk guru SMA/SMK/MA rata-rata 1 (satu) orang guru mengajar 15 hingga 16 orang siswa.

D. Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik, Rusak Berat, Rusak Sedang, dan Rusak Ringan Jenjang SD dan SMP

Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses untuk memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah, diperlukan ketersediaan dan kecukupan ruang kelas untuk proses pembelajaran. Pada tahun 2017, untuk jenjang SD terdapat 1.206 ruang kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi baik sebanyak 252 ruang kelas, kondisi rusak ringan 541 ruang, rusak sedang 67 ruang, rusak berat 46 ruang dan rusak total sebanyak 50 ruang. Sementara untuk jenjang SMP, jumlah keseluruhan ruang kelas sebanyak 630 ruang kelas yang terdiri dari ruang kelas kondisi baik 129 ruang, rusak ringan 466 ruang, rusak sedang 20 ruang, rusak berat 10 ruang dan rusak total 5 ruang kelas. Secara rinci kondisi ruang kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD dan SMP Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2017

No.	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas					Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	
Sekolah Dasar (SD)							
1	Lemahwungkuk	48	114	14	10	6	192
2	Pekalipan	53	160	7	3	0	223
3	Kesambi	48	205	28	26	31	338
4	Kejaksan	94	250	17	5	4	370
5	Harjamukti	9	62	1	2	9	83
Kota Cirebon		252	541	67	46	50	1.256
Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
1.	Lemahwungkuk	18	159	12	7	0	196
2.	Pekalipan	0	3	0	0	3	6
3.	Kesambi	44	90	2	3	0	139
4.	Kejaksan	22	95	5	0	0	122
5.	Harjamukti	45	119	1	0	2	167
Kota Cirebon		129	466	20	10	5	630

Sumber: Disdik Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018

E. Angka Putus Sekolah

Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan formal baik itu pada tingkat SD, SMP, atau SMA untuk belajar dan menerima pelajaran, namun tidak sampai tamat atau lulus kemudian berhenti atau keluar dari sekolah. Tabel berikut menunjukkan angka putus sekolah di Kota Cirebon pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tahun 2013-2018.

Tabel 2.42
Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
SD/MI	0,02	0,06	0,02	0	6
SMP/MTs	0,25	0,05	0,02	3	15
SMA/SMK/MA	0,31	0,11	n.a	n.a	n.a

Sumber: Disdik Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menunjukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kota Cirebon masih terdapat siswa yang putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk mencegah dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya anak putus sekolah. Perlunya komitmen dan intervensi program secara terpadu sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir munculnya masalah sosial baru.

Masih adanya anak yang putus sekolah pada semua jenjang pendidikan, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan pendidikan non formal, baik berupa Paket A, B maupun Paket C. Disamping itu, juga perlu didesain upaya pemanfaatan waktu luang, sehingga anak yang putus sekolah disibukan dengan kegiatan-kegiatan positif dan konstruktif yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

F. Angka Kelulusan

Salah satu *output* dari proses kegiatan belajar mengajar adalah angka kelulusan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Angka kelulusan di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SMA/SMK/MA	100,00	99,83	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

G. Angka Melanjutkan Sekolah

Program wajib belajar 12 tahun melalui gerakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai program pendukung lainnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mempersiapkan SDM yang tangguh dan siap bersaing di era globalisasi. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yaitu: "Warga Kota Cirebon Minimal Berpendidikan 12 Tahun". Visi tersebut apabila diartikan secara harfiah, maka tidak ada satu orangpun warga Kota Cirebon yang putus sekolah baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun pada jenjang SMA/SMK/MA. Oleh karena itu, semua siswa yang telah lulus pada jenjang pendidikan dasar harus dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, begitu pula siswa yang telah lulus pada jenjang pendidikan menengah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan capaian HLS dan RLS Kota Cirebon tahun 2020 masing-masing HLS 13,12 tahun dan RLS 9,91 tahun, maka program wajib belajar 12 tahun di Kota Cirebon belum tuntas.

H. Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Tabel berikut menggambarkan tenaga pendidik di Kota Cirebon yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan strata S1/D-IV. Sampai dengan tahun 2019 guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 72,23 persen menurun dari tahun 2015 yang mencapai 88,55 persen. Artinya masih ada tenaga pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 17,73 persen. Untuk satuan pendidikan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2015 sebesar 92,84 persen, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 66,23 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 33,77 persen guru SMP/MTs yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Dengan demikian, maka untuk periode lima tahun ke depan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus dapat menuntaskannya, sehingga diharapkan dengan memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai tenaga pendidik, kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik akan lebih meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.

Tabel 2.44
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Satuan Pendidikan	T a h u n				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	SD/MI	88,55	90,68	92,74	99,88	72,23
2.	SMP/MTs	92,84	92,55	93,13	95,83	66,23
3.	SMA/SMK/MA	95,93	95,54	-	59,01	-

Sumber: Disdik Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

I. Prosentase Guru Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik

Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon, tenaga pendidik tidak hanya dituntut untuk memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV, tetapi juga harus memiliki sertifikasi sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi belaka, tetapi yang terpenting seorang tenaga pendidik sudah memiliki "kelayakan" untuk mengajar secara profesional yang selalu berupaya meningkatkan penguasaan terhadap berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dinamis.

Tabel 2.45
Persentase Guru Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

No.	Satuan Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	SD/MI	65,98	47,65	48,24	50,91	42,14
2.	SMP/MTs	63,32	45,84	53,41	66,06	49,67
3.	SMA/SMK/MA	51,35	37,71	n.a	n.a	n.a

Sumber: Disdik Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.1.2 Kesehatan

A. Indeks Kesehatan

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah *Human Development Index (HDI)*/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Indeks kesehatan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengukur indikator angka harapan hidup pada saat lahir. Gambaran indeks kesehatan penduduk Kota Cirebon digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Indeks Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2015-2018

No.	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Indeks Kesehatan	79,68	79,74	79,78	79,98

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2019

**) Indeks Kesehatan Tahun 2019-2020 tidak tersedia data.*

Tabel di atas menunjukan perkembangan indeks kesehatan Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2018 yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, indeks kesehatan Kota Cirebon mencapai 79,68 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 79,98 atau terjadi peningkatan 0,30 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di Kota Cirebon.

B. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar, karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Jumlah posyandu pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 331 unit. Keberadaan posyandu umumnya berada pada tingkat RW. Hampir semua RW yang ada di wilayah Kota Cirebon telah memiliki posyandu sebagai ujung tombak unit pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan.

Tabel 2.47
Rasio Posyandu di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Posyandu	330	330	330	331	331
Jumlah Balita	21.321	26.704	26.459	26.224	26.224
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	64,61	80,92	80,19	79,23	79,23

Sumber: Profil Kesehatan, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dengan data ini terlihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan mandiri cukup tinggi, ini terbukti dengan jumlah posyandu aktif sebanyak 267 unit atau 80,91 persen yang tersebar di 22 kelurahan. Kegiatan posyandu dalam membina kesehatan masyarakat berupa pemberian imunisasi, penimbangan bayi, pemberian gizi bayi dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Posyandu juga membina kader-kader kesehatan masyarakat yang akan terus menerus mengawasi kondisi kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Tabel 2.48
Jumlah Posyandu Menurut Strata di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Strata Posyandu	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pratama	4	12	12	0	0
Madya	53	62	51	61	45
Purnama	143	147	168	147	130
Mandiri	130	109	99	123	133
Posyandu Aktif	273	256	267	270	286

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Cirebon Satu data, 2020

Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif yang merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.

Kelurahan Siaga Aktif merupakah upaya strategis dalam rangka percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs).* Selain mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif, untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengembangkan Kampung Siaga Aktif di setiap Rukun Warga (RW) yaitu di 247 RW. Gambaran perkembangan Kampung/RW Siaga Aktif di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Jumlah Kampung/RW Siaga Menurut Strata
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

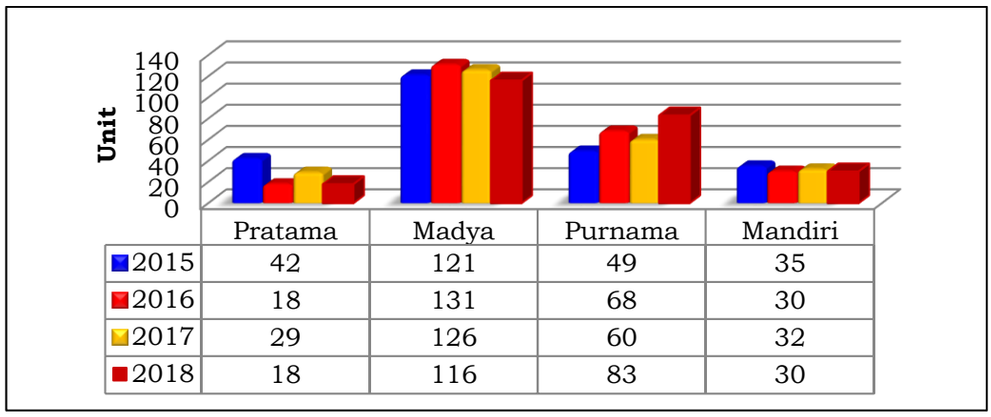
Strata Kelurahan Siaga	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pratama	42	18	29	18	0 Kel
Madya	121	131	126	116	8 Kel
Purnama	49	68	60	83	13 Kel
Mandiri	35	30	32	30	1 Kel
Jumlah	247	247	247	247	22 Kel

Sumber: Dinkes Kota Cirebon,yang dikelola dalam SIPD, Cirebon Satu data 2020

Kota Cirebon telah mengembangkan Kampung/RW Siaga sejak tahun 2007 di 247 Kampung/RW se-Kota Cirebon. Strata Kampung Siaga pada tahun 2018 dirinci kedalam strata Pratama sebanyak 18 RW, strata Madya 116 RW, strata Purnama 83 RW dan strata Mandiri 30 RW. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan strata yang dipengaruhi oleh berbagai indikator. Kondisi demikian perlu dievaluasi lebih lanjut, sehingga dapat dicarikan solusi dalam upaya mengembangkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Pada tahun 2019, Kelurahan Siaga Aktif Kota Cirebon Strata Madya sebanyak 8 kelurahan, Strata Purnama 13 kelurahan dan Strata Mandiri 1 kelurahan. Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, jumlah Kelurahan Siaga Mandiri terus meningkat termasuk strata lainnya.

Gambar 2.48
Kampung Siaga Aktif Menurut Strata di Kota Cirebon
Tahun 2015-2018



	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
2015	42	121	49	35
2016	18	131	68	30
2017	29	126	60	32
2018	18	116	83	30

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang diolah dalam SIPD, 2020

C. Rasio Puskesmas/Puskesling/Pustu Per Satuan Penduduk

Dalam upaya pengembangan kampung siaga, Puskesmas memiliki tugas sebagai fasilitator selain memberikan pelayanan medis dasar dan diharapkan mampu melaksanakan tugas penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk intervensi atau dukungan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan masyarakat. Fasilitasi pengembangan Kampung Siaga oleh Puskesmas harus mampu menerapkan prinsip-prinsip fasilitasi efektif yang mengarah terwujudnya *community development.* Konsep *community development* menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah pembangunan masyarakat, suatu proses usaha atau potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dalam konteks kehidupan berbangsa, dan memberdayakan mereka agar mampu berkontribusi secara penuh untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan ini tidak bisa memecahkan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, tetapi menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai masalah.

Jumlah Puskemas pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 22 unit, begitu pula jumlah Puskesmas Keliling tetap yaitu sebanya 22 Puskesling. Namun jumlah puskesmas keliling mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Puskemas Pembantu (Pustu) yang masih aktif sampai dengan tahun 2019 berjumlah 12 unit, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Rasio Puskesmas/Puskesling/Pustu Per Satuan Penduduk
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Puskesmas/ Pusling/Pustu	37	37	37	37	37
2.	Jumlah Penduduk	307.494	310.486	313.325	316.277	319.312

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.	Rasio Puskesmas/ Pusling/Pustu per satuan penduduk.	8.311	8.391	8.468	8.548	8.630

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018

D. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Data Rumah Sakit di Kota Cirebon tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) Rumah Sakit, terdiri dari 7 (tujuh) unit Rumah sakit Umum (Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Rumah Sakit Tentara Ciremai, Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Budi Luhur, Rumah Sakit Putra Bahagia, Rumah Sakit Budi Asta, dan Rumah Sakit Sumber Kasih) serta 4 (empat) unit Rumah Sakit Bersalin/Rumah Sakit Khusus, yaitu Rumah Sakit Bersalin Panti Abdi Darma, Rumah Sakit Bersalin Muhammadiyah, Rumah Sakit Khusus Bedah Medimas, Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda. Tabel berikut menggambarkan rasio rumah sakit di Kota Cirebon per satuan penduduk.

Tabel 2.51
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Rumah Sakit	11	11	11	11	11
2.	Jumlah Penduduk	307.494	310.486	313.325	316.277	319.312
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk.	27.954	28.226	28.484	28.752	29.028

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata 1 (satu) rumah sakit di Kota Cirebon melayani sebanyak 29.028 orang. Beban rumah sakit dalam menangani penduduk Kota Cirebon meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Cirebon. Jumlah tersebut belum termasuk pasien yang berasal dari luar wilayah Kota Cirebon. Hal ini karena Rumah Sakit Daerah Gunung Jati telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional Wilayah Jawa Barat bagian timur.

E. Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

Indikator penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Indikator yang digunakan antara lain pemanfaatan tempat tidur *(Bed Occupancy Rate/BOR),* rata-rata lama hari perawatan *(Length Of Stay/LOS),* rata-rata tempat tidur dipakai *(Bed Turn Over/BTO),* rata-rata selang waktu pemakaian tempai tidur *(Turn Over Internal/TOI),* persentase pasien keluar yang meninggal dunia *(Gross Death Rate/GDR)* dan persentase pasien keluar yang meninggal dunia ≥48 jam perawatan *(Net Death Rate/NDR).* Berikut

digambarkan capaian kinerja pelayanan Rumah Sakit di Kota Cirebon tahun 2015-2019.

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	B O R (Persen)	57,44	59,9	58,90	62,81	65,54
2.	L O S (Hari)	3,6	3,7	3,4	4,14	4,30
3.	B T O (Kali)	57,44	61,40	37,45	56,35	37,45
4.	T O I (Kali)	2,72	2,39	1,00	2,41	1,10
5.	G D R	4,2	36,1	38,00	68,00	78,18
6.	N D R	2,4	24,3	24,07	43,00	56,84

Sumber: Profil Kesehatan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung salah satunya adalah jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan yang baik merupakan salah satu pendukung percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang baik menjadi modal sosial masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak sedang, dan rusak berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu 2015-2019.

Tabel 2.53
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kondisi jalan baik (km)	78.507	122,38	138,265	151,195	151,195
Kondisi jalan sedang (km)	36.173	16,06	23,805	23,805	23,805
Kondisi jalan rusak sedang (km)	41.072	1,36	9,96	9,96	9,96
Kondisi jalan rusak berat (km)	38.159	3,13	8,95	8,95	8,95
Total panjang jalan (km)	193.911	142,93	180,98	193,91	193,91
Proporsi jalan baik (km)	40,48	85,62	76,40	77,97	77,97

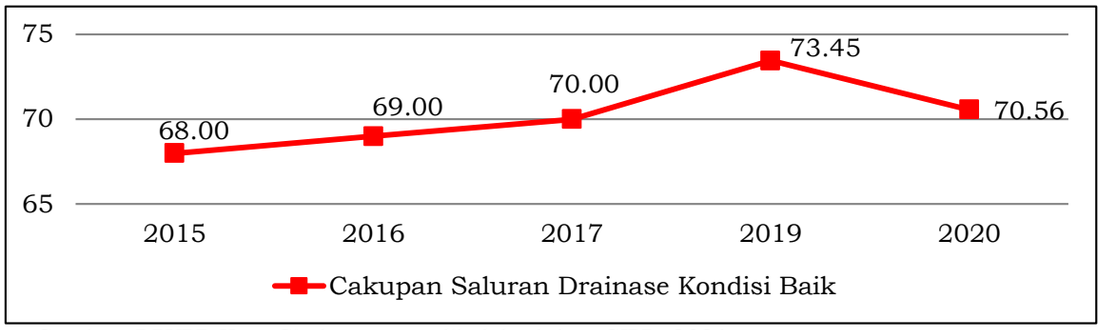
Sumber: BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2019 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai 151,195 km atau sekitar 77,97 persen dari total panjang jalan 193,91 Km. Kondisi tersebut sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang memiliki proporsi jalan baik sebesar 76,40 persen atau 138,265 Km dari total Panjang jalan 180,98 Km. Jika dilihat dari kualitas jalan dengan kondisi rusak sedang ataupun rusak berat tidak mengalami pengurangan dari tahun 2018-2019.

B. Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik

Gambar berikut menjelaskan bahwa walaupun cakupan drainase kondisi baik dalam empat tahun terakhir, namun sampai dengan akhir tahun 2020 masih terdapat sekitar 20,44 persen saluran drainase yang ada di Kota Cirebon menunjukan kondisi yang kurang baik. Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan terutama ketika musim hujan tiba akan menimbulkan genangan air di titik-titik tertentu, sehingga mengganggu kenyamanan warga kota dalam melakukan aktivitasnya.

Gambar 2.49
Cakupan Saluran Drainase Kondisi Baik di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

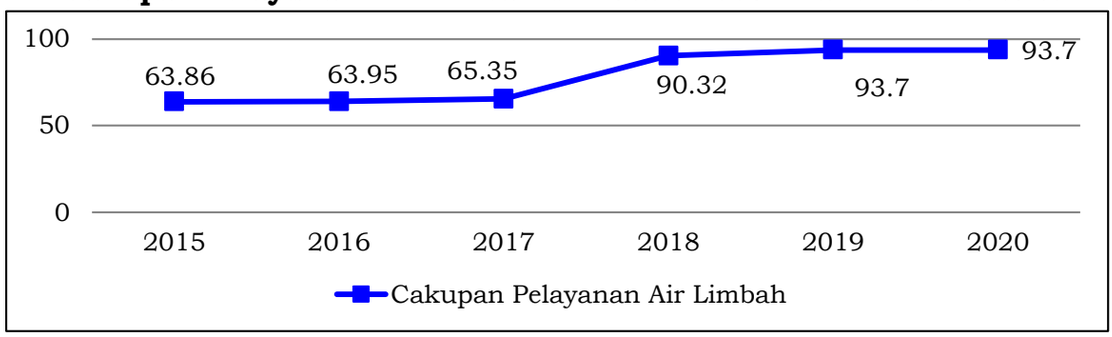


Sumber: DPUPR Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

C. Cakupan Pelayanan Air Limbah

Cakupan pelayanan air limbah domestik dari tahun 2017-2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 mencapai 65,35 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 90,32 persen, dan pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 93,70 persen.

Gambar 2.50
Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Cirebon Tahun 2015-2020



Sumber: DPUPR Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

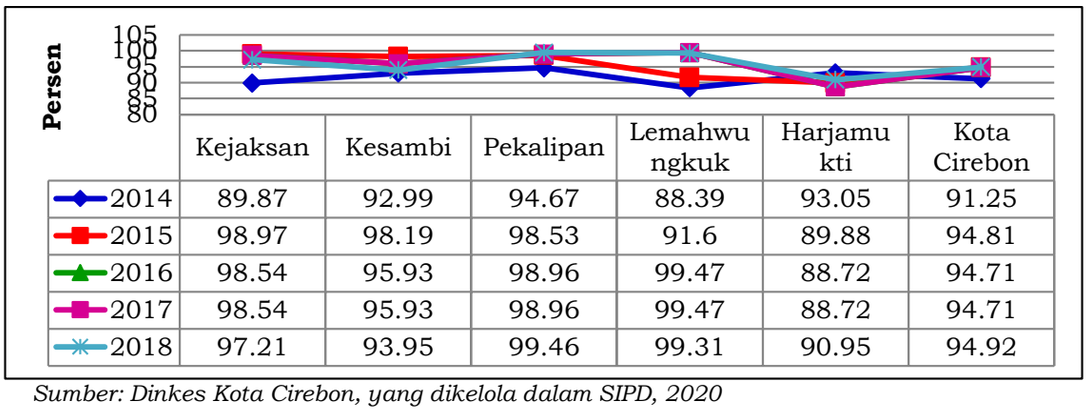
D. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikro biologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikro biologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri E. Coli dan total bakteri *koliform*. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, *chlor*, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif,

kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 *becquerel* per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Alternatif masyarakat untuk mendapatkan sumber air minum di Kota Cirebon cukup bervariasi. Masyarakat perkotaan sebagian besar sudah menggunakan jasa PDAM untuk memenuhi kebutuhan sumber air minum dan masih ada sebagian lagi yang menggunakan sumur gali, sumur pompa, dan mata air. Sumber mata air tersebut ada yang terlindung dan ada yang tidak terlindung. Sumber air PDAM, sumur gali, sumur pompa relatif lebih terlindung dan memenuhi persyaratan kesehatan.

Gambar 2.51
Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas Tahun 2014-2018



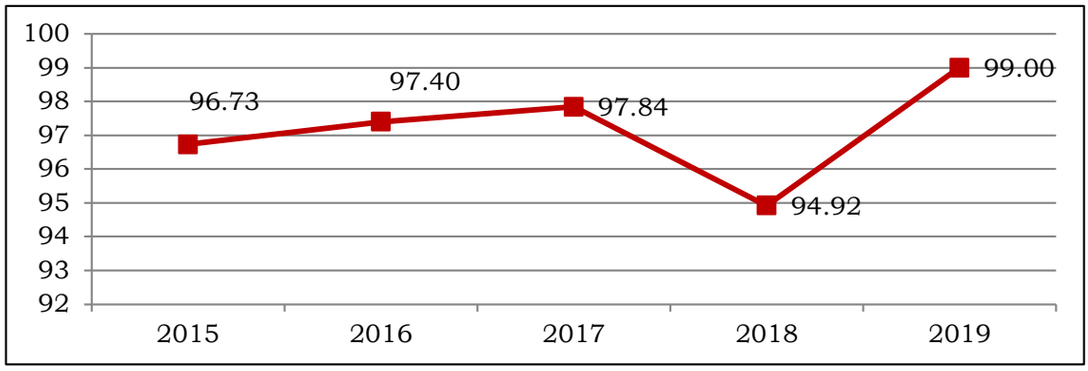
	Kejaksan	Kesambi	Pekalipan	Lemahwungkuk	Harjamukti	Kota Cirebon
2014	89.87	92.99	94.67	88.39	93.05	91.25
2015	98.97	98.19	98.53	91.6	89.88	94.81
2016	98.54	95.93	98.96	99.47	88.72	94.71
2017	98.54	95.93	98.96	99.47	88.72	94.71
2018	97.21	93.95	99.46	99.31	90.95	94.92

Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menunjukan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas (layak) dari tahun 2014 sebesar 91,25 persen naik menjadi 94,92 persen pada tahun 2018. Peningkatan akses air minum layak sebagian besar berasal dari air minum perpipaan/air ledeng yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kota Cirebon meluncurkan program air minum bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat meningkatkan cakupan akses air minum berkelanjutan. Akses air minum berkelanjutan tertinggi pada tahun 2018 terdapat di Kecamatan Pekalipan yang mencapai 99,46 persen dan terendah di Kecamatan Harjamukti sebesar 90,95 persen.

Pengawasan kualitas air bersih agar air yang dikonsumsi masyarakat memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Tujuan dari pengawasan kualitas air bersih adalah agar masyarakat terhindar dari gangguan penyakit bersumber/berperantara air *(Water Born Diseases).* Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air PDAM tahun 2015 menunjukan bahwa 96,73 persen memenuhi syarat kesehatan, naik di tahun 2019 menjadi 99,00 persen, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

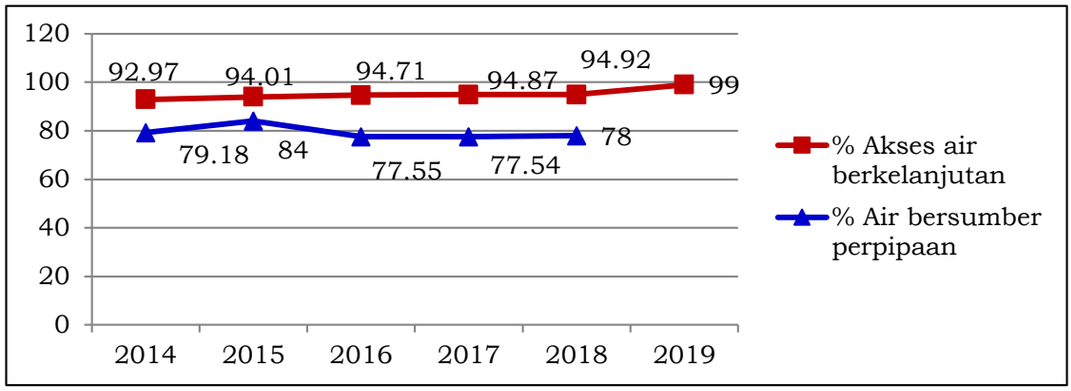
Gambar 2.52
Persentase Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2015-2019



Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah penduduk yang memiliki akses air minum berkelanjutan pada tahun 2016 sebanyak 294.075 jiwa atau 94,71 persen yang bersumber dari PDAM, sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa dan mata air terlindung, meningkat di tahun 2019 menjadi 99,00 persen. Akses air minum terbanyak berasal dari perpipaan sebanyak 240.761 jiwa (78,00 persen).

Gambar 2.53
Akses Air Minum Berkelanjutan di Kota Cirebon, tahun 2014-2019



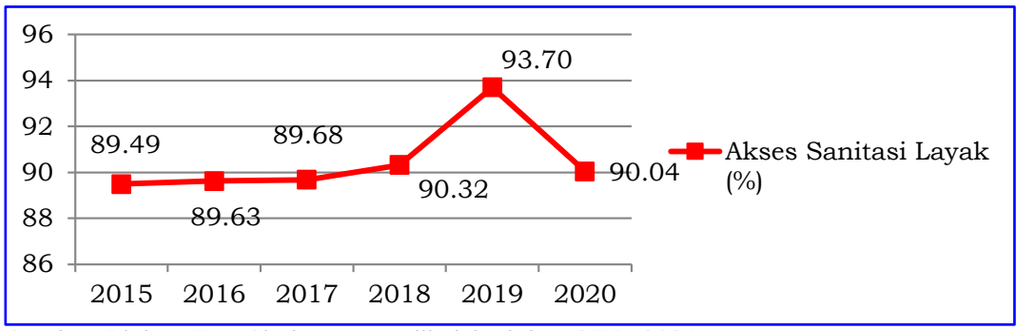
Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

E. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi yang layak (jamban sehat) merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengendalikan kasus diare dan kematian karena diare. Fasilitas sanitasi yang layak dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik *(septic tank*/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), baik yang digunakan sendiri atau bersama, dengan resapan jauh dari sumber air sekitar ≥10 meter.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2016 sebanyak 278.282 jiwa atau 89,63 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 90,04 persen. Kelurahan yang sudah mencapai *0pen Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan) adalah Kelurahan Larangan sebesar 100,00 persen. Cakupan sanitasi layak tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dimana cubluk tidak termasuk lagi dalam kriteria sanitasi layak.

Gambar 2.54
Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020



Sumber: Dinkes Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

F. Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya tanaman dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Kebijakan penetapan RTH di Kota Cirebon sebagaimana yang tertuang pada dokumen RTRW adalah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30,00 persen dari luas wilayah kota.

Peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam penataan ruang wilayah/kawasan, yaitu sebagai penyeimbang kawasan perkotaan.

Tabel 2.54
Luas Tutupan Lahan RTH Kota Cirebon

No.	Tipologi Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kota Cirebon (%)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Taman RT	4,28	0,11
2.	Taman RW	8,72	0,23
3.	Taman Kelurahan	20,52	0,54
4.	Taman Kecamatan	6,24	0,16
5.	Taman Kota	11,79	0,31
6.	Taman Permakaman	71,25	1,87
7.	Jalur Hijau Jalan	3,43	0,09
8.	Sempadan Rel KA	48,15	1,26
9.	Sempadan Pantai	84,58	2,22
10.	Sempadan Sungai	134,50	3,53
11.	Hutan Kota	10,07	0,26
12.	Hutan Mangrove	2,11	0,06
13.	Lapangan Olahraga	18,65	0,49
Jumlah Total Tutupan Lahan		424,29	11,14

Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH Kota Cirebon, 2020

Keberadaan RTH selain dipandang sebagai salah satu komponen pemanfaatan ruang, RTH juga harus terintegrasi dengan penataan ruang, sehingga perlu mengacu kepada azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang Penataan Ruang dan Lingkungan. Berdasarkan tabel di atas, luas tutupan lahan RTH sebanyak 424,29 hektar atau 11,14 persen.

G. Volume Sampah yang Dihasilkan Per Hari

Sampah *(refuse)* adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Tabel 2.55
Volume Sampah Per Hari Per Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan	Volume Sampah (m³)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Harjamukti	538	439	165	31,224	85,87
Lemahwungkuk	198	217	230	57,387	175,81
Pekalipan	284	118	125	76,109	209,30
Kesambi	230	285	303	47,042	129,37
Kejaksan	244	185	197	116,477	320,31
Kota Cirebon	1.494	1.244	1.319	328,829	902,66

Sumber: DLH Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa Kota Cirebon pada tahun 2019 menghasilkan sampah sebanyak 902,66 m³/hari. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan volume sampah pada tahun 2018 yang mencapai 382,829 m³/hari. Daerah yang paling banyak menghasilkan sampah pada tahun 2019 adalah Kecamatan Kejaksan dengan volume sampah sebanyak 302,31 m³/hari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Kejaksan.

H. Cakupan Penanganan Sampah

Tabel berikut menggambarkan volume sampah yang dihasilkan Kota Cirebon pada tahun 2016 volume sampah yang dihasilkan sebanyak 1.244 m³ per hari dan yang diangkut dari TPS ke TPA sebanyak 668 m³ atau 44,18 persen, sehingga sampah yang diolah di tingkat rumah tangga sebanyak 27,82 persen. Pada tahun 2017, volume sampah yang dihasilkan per hari meningkat dari tahun 2016 menjadi 1.319 m³ dan yang mampu diangkut ke TPA sebanyak 748 m³ atau 56,71 persen. Cakupan sampah yang diangkut ke TPA dan yang diolah di tingkat rumah tangga melalui 3R sebanyak 78,00 persen. Pada tahun 2019, volume sampah yang dihasilkan kembali turun jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingan sampah yang dihasilkan pada tahun 2018, secara lengkap volume sampah yang dihasilkan per hari dan yang mampu diangkut dari TPS ke TPA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Cakupan Penangan Sampah Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Volume sampah yang dihasilkan per hari (m^2)	1.494	1.244	1.319	328,829	902,66
2.	Volume sampah yang terangkut ke TPA (m^2)	660	668	748	750	747
3.	Cakupan sampah yang diangkut ke TPA dan terkurangi melalui 3R (%)	72	75	78	80	96,79

Sumber: DLH Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

I. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 adalah sebanyak 23 lokasi. Jumlah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2015-2017 dengan jumlah TPS sebanyak 39 lokasi, sehingga dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi penambahan beban pelayanan masing-masing TPS. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka perlu penambahan TPS agar pelayanan sampah dapat teratasi dengan merata dan tidak menimbulkan masalah lain di Kota Cirebon. Berikut adalah tabel yang menyajikan data jumlah TPS di Kota Cirebon.

Tabel 2.57
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Kota CirebonTahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	39	39	39	23	23
Jumlah Penduduk	307.494	310.486	313.326	316.277	319.312
Rasio TPS Per Satuan Penduduk.	7.885	7.961	8.416	13.751	13.883

Sumber: DLH Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 setiap satu lokasi TPS melayani 7.885 jiwa penduduk Kota Cirebon, namun pada tahun 2019 setiap TPS harus melayani 13.883 jiwa, hal ini terjadi sebagai akibat dari berkurangnya jumlah TPS yang ada. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yaitu dengan menambah jumlah armada dan meningkatkan frekwensi pengangkutan.

J. Penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan

Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.233 ijin. Namun pada tahun 2018 jumlah IMB yang dikeluarkan turun menjadi 818, dan kembali mangalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 1.102 terdiri dari 749 ijin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan 353 ijin untuk selain

tempat tinggal. Peningkatan jumlah tersebut terjadi pada IMB untuk tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Jumlah IMB yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Jenis Bangunan	IMB Diterbitkan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tempat Tinggal	967	n.a	n.a	659	749
2.	Bukan tempat Tinggal	266	n.a	n.a	159	353
J u m l a h		1.233	n.a	n.a	818	1.102

Sumber: DPM-PTSP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

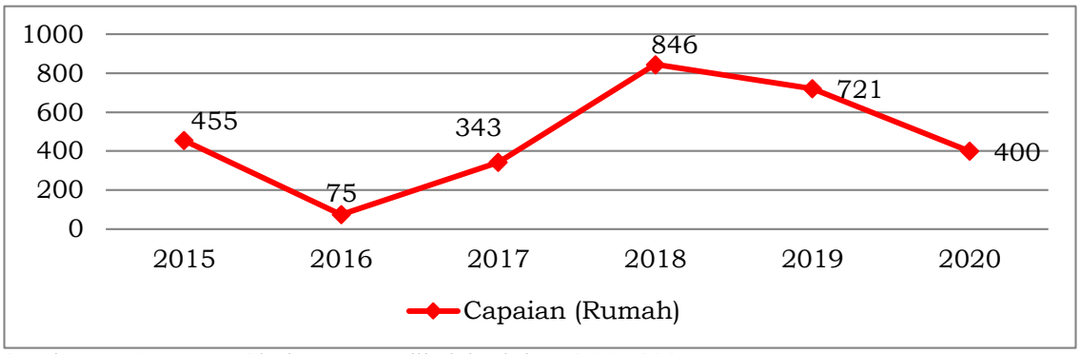
Berdasarkan data diatas ijin yang paling banyak dikeluarkan adalah untuk tempat tinggal. Untuk ijin tempat tinggal ataupun bukan tempat tinggal, keduanya mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kondisi seperti diatas dapat meningkatkan jumlah ijin yang dikeluarkan setiap tahunnya.

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Cakupan Rumah Tidak Layak Huni

Gambar berikut menunjukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2015-2020 jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani secara kumulatif berjumlah 2.840 rumah. Realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebanyak 846 rumahdan yang terendah dicapai pada tahun 2016 sebanyak 75 rumah tidak layak huni sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.55
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Ditangani
di Kota Cirebon Tahun 2015-2020



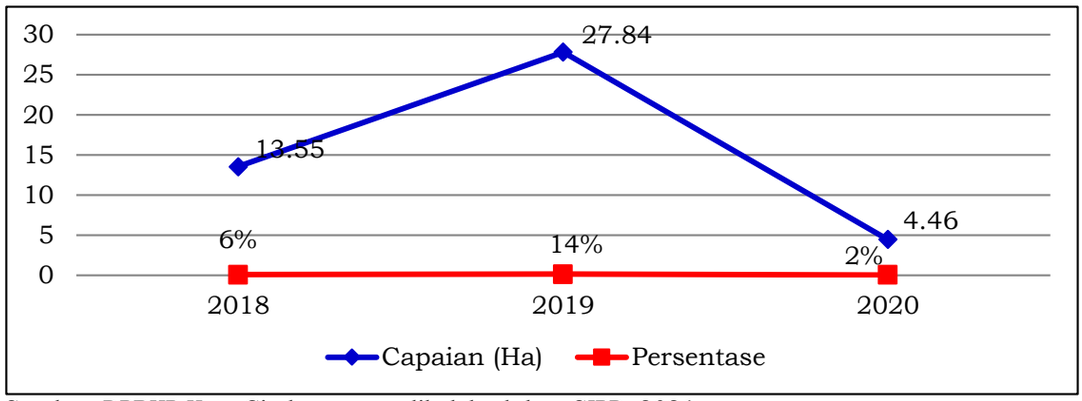
Sumber: DPRKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

B. Jumlah dan Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Ditangani

Tabel berikut menggambarkan kinerja penanganan lingkungan kumuh perkotaan dalam periode tahun 2018-2020. Berdasarakan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.133-DPRKP/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.70-BAPPEDA/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Cirebon, disebutkan bahwa luas kawasan kumuh Kota Cirebon sebanyak 315,91 hektar. Dari luas kawasan kumuh tersebut yang telah dilakukan

penanganan di tahun 2018 seluas 13,55 hektar, tahun 2019 seluas 27,84 hektar, dan di tahun 2020 seluas 4,46 hektar, sehingga di tahun 2020 persentase capaian pengurangan kawasan kumuh adalah 22,00 persen dari total luas kumuh yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota.

Gambar 2.56
Jumlah dan Prosentase Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Ditangani di Kota Cirebon Tahun 2018-2020



Sumber: DPRKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Terkait dengan hal tersebut, berikut gambaran mengenai indikator kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2019:

Tabel 2.59
Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	1	1	2	2	2
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	1	4	1	1	1

Sumber: Kantor Kesbangpoldagri, Cirebon satu data yang dikelola dalam SIPD, 2020

B. Rasio Linmas Per Satuan Penduduk

Rasio petugas Linmas di Kota Cirebon adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat kelurahan dengan tugasnya membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan menggunakan rumus rasio jumlah satuan Linmas per kelurahan adalah jumlah satuan Linmas dalam satu kota dibagi jumlah kelurahan dalam satu kota. Rasio petugas Linmas di Kota Cirebon baru mencapai 2,22 per Kelurahan.

Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada tahun 2019 sebanyak 1.350 orang dengan jumlah penduduk 319.312 jiwa, sehingga rasio jumlah Lintas terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk adalah 42,27 yang artinya sekitar 43 orang Linmas bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban umum masyarakat terhadap 10.000 jiwa penduduk Kota Cirebon. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.60
Rasio Linmas Per Satuan Penduduk Di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Linmas	1.329	1.100	1.240	1.300	1.350
Jumlah Penduduk	307.494	310.486	313.326	316.277	319.312
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	43,22	35,42	39,57	41,10	42,27

Sumber: Satpol PP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

Tabel di atas menjelaskan, jumlah Linmas di Kota Cirebon pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 1.329 orang Linmas pada tahun 2015 menjadi 1.100 orang. Namun mulai tahun 2017-2019 jumlah Linmas kembali mengalami penambahan sebanyak 250 orang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut. Seiring dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sudah seharusnya jumlah linmas terus ditingkatkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, sehingga kondisi lingkungan akan lebih kondusif dan masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas

C. Kriminalitas

Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat yang harus diwujudkan agar seseorang merasa aman untuk bepergian ke luar rumah tanpa dihantui rasa takut adanya ancaman. Dalam empat tahun terakhir, kejahatan yang terjadi lebih didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor, penipuan dan penganiayaan berat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Jumlah Tindak Pidana di Kota Cirebon Tahun 2015-2018

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus			
		2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Pembunuhan	2	4	1	2
2.	Penganiayaan berat	119	132	109	129
3.	Penganiayaan ringan	3	9	11	9
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	16	16	5	12
5.	Perkosaan	4	3	4	0
6.	Pencabulan	4	1	1	-
7.	Penculikan	4	1	2	0
8.	Pemerasan	-	-	16	4
9.	Pencurian dengan kekerasan	46	64	114	52

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus			
		2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10.	Pencurian biasa	53	30	41	49
11.	Pencurian kendaraan bermotor	240	192	324	373
12.	Pencurian dengan pemberatan	124	131	145	114
13.	Pengrusakan/penghancuran barang	6	5	5	7
14.	Pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0
15.	Narkotika dan psikotropika	35	71	72	79
16.	Penipuan	174	184	186	133
17.	Penggelapan	71	70	59	31
18.	Korupsi	1	1	1	2
19.	Penghinaan	-	-	5	4
20.	Perjudian	-	-	30	11
21.	Penyerobotan tanah	-	-	6	2
22.	Pemalsuan surat	-	-	1	8

Sumber: BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 di Kota Cirebon tindak pidana yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 373 kasus. Kasus pencurian kendaraan bermotor adalah kasus tertinggi di setiap tahunnya dan pada tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor tertinggi sepanjang 4 (empat) tahun terakhir.

2.3.1.6 Sosial

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, meliputi: (1) Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil/KAT; (2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; (3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; (4) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; (5) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal; (6) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalah gunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; (7) Pemeliharaan anak-anak terlantar; (8) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; (9) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; (10) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota; dan (11) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional kabupaten/kota.

Tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha dengan indikator: (1) terciptanya aksesabilitas terhadap pelayanan social; (2) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (3) meningkatkan kualitas manejemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Penanganan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sendiri, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat. Pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang peduli terhadap penanganan masalah sosial yang disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pengembangan dan pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah dilakukan di 5 (lima) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan terdapat satu orang TKSK dan dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Penanganan PPKS ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana seperti Panti Jompo, Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lain-lain. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Kelompok sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Cirebon yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa Sosial. Berikut data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cirebon kurun waktu 2015-2019.

A. Penduduk Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial (PPKS)

Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial yang selalu *update* akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran dan keberhasilan dalam penanganannya. Tabel berikut ini menunjukan ketersediaan data PPKS di Kota Cirebon tahun 2015-2019.

Tabel 2.62
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	*2016	*2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Anak jalanan	270	270	240	224	334
2.	Penderita Sakit Jiwa	n.a	n.a	n.a	119	119
3.	Gelandangan dan Pengemis	63	26	63	115	115
4.	Orang dengan HIV-AIDs	314	658	314	319	319
5.	Korban Narkotika/Nafza	159	165	108	172	172
6.	Fakir Miskin	102.702	66.328	27.881	27.881	27.881
7.	Anak Balita/bayi Terlantar	53	n.a	n.a	0	0
8.	Anak Terlantar	53	1.067	2.303	1.582	1.582
9.	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	n.a	n.a	n.a	47	29

No.	Uraian	Tahun				
		2015	*2016	*2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10.	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	n.a	n.a	n.a	15	0
11.	Anak Korban kekerasan Lingkungan Masyarakat	n.a	n.a	n.a	0	0
12.	Anak Korban Kekerasan Seksual	n.a	n.a	n.a	-	0
13.	Lanjut Usia/Jompo	1.803	4.199	1.803	1.894	1.894
14.	Penyandang Tuna Netra	n.a	n.a	n.a	103	25
15.	Penyandang Tuna Rungu	n.a	n.a	n.a	-	55
16.	Penyandang Tuna Wicara	n.a	n.a	n.a	-	3
17.	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	n.a	n.a	n.a	211	77
18.	Penyandang Tuna Daksa (cacat jiwa)	n.a	n.a	n.a	-	525
19.	Penyandang Tuna Grahita (cacat mental)	n.a	n.a	n.a	-	106
20.	Penyandang Cacat jiwa dan mental	n.a	n.a	n.a	526	106
21.	Penyandang buta aksara	n.a	n.a	n.a	-	0
22.	Penyandang cacat fisik	n.a	n.a	n.a	434	105
23.	Penyandang cacat lainnya	n.a	n.a	n.a	43	62
24.	Penyandang Cacat	826	852	1.271	n.a	525
25.	Tuna Susila	39	18	39	38	37
26.	Bekas Narapidana	34	35	34	-	47
27.	Penyandang LGBT	n.a	n.a	n.a	-	0
29.	Korban LGBT	n.a	n.a	n.a	-	0
30.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	n.a	n.a	n.a	34	47
31.	Korban Trafiking	n.a	n.a	n.a	1	0
32.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	4.977	n.a	n.a	4.797	1.781
33.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (RT)	34	n.a	34	34	54
34.	Anak Nakal	24	-	-	n.a	n.a
35.	Rumah Tidak Layak Huni	75	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah		111.426	73.618	34.090	38.859	33.731

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menunjukan perkembangan data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cirebon. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa untuk beberapa jenis PPKS datanya tidak berubah, yang bisa berarti bahwa terhadap PPKS tersebut tidak ada intervensi atau bisa juga tidak adanya *updating* data PPKS. Kondisi ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya kontinuitas pendataan/ *updating data* yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas

pokok dan fungsi dalam penanganan PPKS, sehingga berakibat tidak fokusnya upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial yang ada.

B. PPKS Penerima Bantuan Sosial

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengentaskan permasalahan sosial yang terjadi. Berikut gambaran PPKS yang menerima bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya:

Tabel 2.63
Jumlah PPKS Penerima Bantuan Sosial Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial (orang)	111.426	73.618	n.a	132.757	132.757
2.	Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial (orang)	11.344	11.749	n.a	84.006	85.000
3.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Persen)	10,18	15,96	n.a	64,00	64,00
4.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (lembaga)	27	27	n.a	27	28
5.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	21	21	n.a	n.a	28

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dari data-data di atas terlihat berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi dan terjadi di Kota Cirebon, diantaranya anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, dan lain-lain. Anak-anak tersebut seharusnya menikmati layanan pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya sebagaimana anak pada umumnya, namun karena kondisi lingkungan keluarga yang kurang beruntung, sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya.

Anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat dan layak dari orang tua atau keluarganya dapat terjadi karena ketidakmampuan atau bahkan ketidakmauan dari orang tua maupun keluarga si anak. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami berbagai masalah seperti keterlantaran, putus sekolah, kenakalan, perlakuan salah, eksploitasi, dan *trafficking*. Anak-anak yang keluarganya tidak dapat memberikan pengasuhan kepada anaknya, maka mereka perlu dicarikan solusi berupa pengasuhan

alternatif. Apabila orang tua atau keluarga inti tidak mampu melaksanakan pengasuhan, maka pengasuhan dialihkan pada keluarga lain.

Apabila keluarga lain juga tidak mampu melakukannya, maka pengasuhan anak terlantar atau hilang pengasuhan diarahkan pada LKSA. Berikut ini digambarkan persentase anak yang mendapatkan pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Cirebon.

Tabel 2.64
Data Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Cirebon Tahun 2020

No.	Nama LKSA	Jumlah Anak Asuh		
		Dalam Panti	Luar Panti	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	PSAA Al Hidayah	-	150	150
2.	PSAA Madinatunnajah	15	50	65
3.	LKSA Daarul Hijrah	-	140	140
4.	PSAA Amal Mulya	45	-	45
5.	Panti Asuhan Az Zahra	30	-	30
6.	LKSA El Mubarok	10	20	30
7.	Panti Asuhan Al Hijrah	10	-	10
8.	LKSA Al Mu'thi	-	138	138
9.	PSAA Al Falah	25	-	25
10.	PSAA Muawanah	30	-	30
11.	LKSA Daarun Naim	15	62	77
12.	LKSA Robbani	10	-	10
13.	PSAA Budhi Asih	20	-	20
14.	Daarul Ilmi	20	60	80
15.	Siti Khodijah Al Zahroh	20	10	30
16.	Darul Ulum	10	60	70
17.	LKS Arisan Nasi	10	40	50
18.	LKS Parahita	-	40	40
19.	LKSA Ashabul Kahfi	15	30	45
20.	LKSA Insan Cita Mandiri			
21.	Cirebon Peduli Anak bangsa	-	200	200
22.	LKS Mekar Arum	15	54	69
T o t a l		300	1.054	1.354

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel di atas memperlihatkan jumlah anak yang mendapatkan pengasuhan alternatif melalui LKSA/PKSA (Lembaga Kesejahteran Sosial Anak/Program Kesejahteraan Sosial Anak) di Kota Cirebon. Secara keseluruhan jumlah anak di Kota Cirebon yang mendapat pengasuhan alternatif di LKSA/PKSA mencakup 1.285 anak, yang terdiri dari pengasuhan dalam LKSA sebanyak 285 orang dan diluar LKSA 1.000 orang yang tersebar pada 22 (dua puluh dua) LKSA se-Kota Cirebon.

Keberadaan anak di LKSA/PKSA berarti keterpisahaan anak dengan keluarganya, kondisi ini lebih banyak menimbulkan emosi negatif pada anak, seperti perasaan sedih, diabaikan, kecewa, marah yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keberadaan anak di LKSA/PKSA juga mengindikasikan bahwa orang tua atau keluarganya mengalami masalah yang menghambat kemampuannya untuk memberikan

pengasuhan kepada anaknya, oleh karena itu pemerintah daerah dan masyarakat perlu untuk membantu keluarga dalam memperbaiki fungsi pengasuhannya.

Dukungan pemerintah daerah untuk membantu anak-anak yang tinggal di LKSA atau anak-anak yang dalam kondisi krisis lainnya adalah melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak serta kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat tercapai.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Pasar kerja sebagaimana karakteristik umumnya bersifat dualistik, dimana lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang besar berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang lebih rendah tingkat produktivitasnya dengan upah yang relatif lebih rendah. Kesenjangan antara produktivitas dan upah antara sektor modern dan sektor tradisional mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional.

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi perpindahan ’surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini, selain bertujuan untuk meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada suatu periode tertentu. TPAK Kota Cirebon pada tahun 2020 sebesar 63,75 persen sedikit mengalami peningkatan dari capaian tahun 2019 sebesar 62,71 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor sosial dan perekonomian masyarakat Kota Cirebon. Gambaran Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	n.a	66,45	68,03	62,71	63,75

Sumber: BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data tersebut, menggambarkan kondisi bahwa persentase jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang aktif secara ekonomi di Kota Cirebon mengalami penurunan pada tahun 2020 ini.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk umur kerja yang sedang mencari pekerjaan. TPT dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah Angkatan kerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	na	9,29	9,06	9,04	10,97

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan data diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cirebon pada tahun 2020 mencapai 10,97 persen atau mengalami peningkatan 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,04 persen. Adanya wabah Covid-19 sangat mempengaruhi penduduk untuk beraktivitas secara ekonomi, sehingga berdampak pada penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dampak adanya pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, antara lain adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tidak dapat berproduksi, dan pembatasan aktivitas ekonomi karena adanya pembatasan mobilitas penduduk.

C. Cakupan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Tabel berikut menggambarkan cakupan tenaga kerja yang mendapat pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Data menunjukan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dalam periode tahun 2016-2020, tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebanyak 84,75 persen dan terendah tahun 2017 sebesar 48,84 persen. Selanjutnya, tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan, kinerja tertinggi dicapai tahun 2017 sebesar 75,00 persen. Sementara kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif, tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 84,62 persen dan terendah tahun 2017 sebesar 30,00 persen.

Tabel 2.67
Cakupan Tenaga Kerja yang MendapatkanPelatihan Keterampilan di Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	84,75	48,84	54,99	75,00	67,50
2.	Tenaha kerja mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	0,00	75,00	34,69	60,00	45,00
3.	Kasus ketenagakerjaan diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	84,62	30,00	54,55	60,00	61,00
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	na	66,64	77,86	55,00	78,50

Sumber: Disnaker Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Kepesertaan aktif tenaga dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dalam kurun waktu tahun 2017-2020 menunjukan kecenderungan bertambah setiap tahunnya. Kepesertaan Jamsostek paling tinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 78,50 persen dan terendah tahun 2019 sebesar 55,00 persen.

D. Perkembangan Kenaikan UMK

Setiap orang yang melakukan aktivitas pekerjaan bertujuan untuk mendapatkan upah/jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, melalui perbaikan dan peningkatan Upah Minimum Kota (UMK).

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020, UMK Kota Cirebon terus mengalami peningkatan untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Pada tahun 2015 UMK Kota Cirebon sebesar Rp1.415.000 (Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) meningkat di tahun 2020 menjadi Rp2.219.487,67 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah). Kenaikan UMK setiap tahunnya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga secara bertahap tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Tabel 2.68
Perkembangan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cirebon Tahun 2015-2020

No.	Tahun	U M K	Kenaikan		K H L
			Rupiah	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	2015	1.415.000	188.500	15,37	1.415.698,79
2.	2016	1.608.945	193.945	13,71	n.a
3.	2017	1.741.682,96	132.737,96	8,25	n.a
4.	2018	1.893.383,54	151.700,58	8,71	n.a
5.	2019	2,045,422,24	206.038,70	10,07	n.a
6.	2020	2.219.487,67	174.065,43	n.a	n.a

Sumber: Disnaker Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diperoleh dari hasil survey 60 komponen barang di beberapa pasar tradisional yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka penetapan UMK didasarkan pada rumusan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan variabel besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) nasional, sehingga besaran KHL hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka survey harga di pasar untuk mendapatkan angka KHL baru dilakukan pada tahun 2019.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan tidak hanya memiliki peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak roda pembangunan. Secara internal, kaum perempuan merupakan tiang keluarga yang juga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan tidaklah diragukan. Pada level rumah tangga, perempuan berkontribusi dalam hal manajemen rumah tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga (anak-anak dan orang tua) dan pendidikan anak (UNDP, 1996). Perempuan juga dianggap sebagai alokator pendapatan dan pengambil kebijakan dalam distribusi pengeluaran (Boozer, Ranis, Stewart, & Suri, 2003). Di samping itu, perempuan, khususnya ibu rumah tangga, merupakan penentu utama pemilihan, penyiapan dan alokasi pangan. Budaya konsumsi termasuk nilai-nilai sosial dan kebiasaan terkait dengan pola diet, penyiapan pangan, dan asupan gizi keluarga ada di tangan perempuan (BPS, 2015).

Sebagai penggerak pembangunan, sebesar 46,00 persen perempuan 15 tahun ke atas berkontribusi dalam perekonomian (BPS, 2015). Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia, penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *"Sustainable Development Goals" (SDGs)* untuk menggantikan program sebelumnya *"Millenium Development Goals" (MDGs)* yang telah berakhir. SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030.

Dalam SDGs isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan 5. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, dengan beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya:

1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun;

2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan berbagia jenis eksploitasi;
3) Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan;
4) Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara tepat;
5) Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan public;
6) Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi;
7) Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
8) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan;
9) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundangundangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan (*United Nations*, 25 September 2015).

Tujuan dasar dari pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup panjang, sehat dan kreatif (Alkire, 2010). Pembangunan manusia memiliki arti perbaikan kualitas hidup pada berbagai sisi penting kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari suatu ukuran yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dipakai untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan. Perkembangan IPG Kota Cirebon dari Tahun 2015-2019 menunjukan peningkatan, dengan nilai IPG 93,23 poin pada tahun 2015 meningkat menjadi 94,35 poin pada tahun 2020. Hal ini mengingat kapabilitas dasar perempuan terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Mengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari meningkatnya pencapaian pembangunan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta

penguasaan sumber daya ekonomi Kota Cirebon diikuti pula dengan kenaikan setiap komponen/indikator kompositnya. Pada tahun 2015 IDG Kota Cirebon sebesar 71,97 poin naik menjadi 77,86 poin pada tahun 2019, atau mengalami kenaikan sebesar 5,89 poin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2.69
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cirebon Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,23	93,76	93,94	93,94	94,35	94,35
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,97	74,89	74,23	73,97	77,86	77,86

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2021
**) Data tidak tersedia*

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan direpresentasikan oleh partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Tabel berikut menggambarkan tingkat partisipasi perempuan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2015-2020. Setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural maupun fungsional di lembaga pemerintahan, baik di pisisi Eselon II, III maupun IV. Tabel 2.70 berikut menggambarkan perkembangan partisipasi kaum perempuan di lembaga pemerintahan dalam periode tahun 2015-2020.

Tabel 2.70
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Jumlah Perempuan yang menduduki posisi managerial di Lembaga Pemerintah (orang)	241	244	274	257	263	280
2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	19,75	21,02	24,83	25,00	29,03	31,61

Sumber: BKPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

C. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Penduduk yang bekerja menurut jabatan tahun 2017 di wilayah Kota Cirebon didominasi oleh tenaga usaha jasa sebanyak 55.817 orang atau 43,52 persen, yang terdiri dari laki-laki 29.265 orang atau 36,60 persen dan perempuan 26.552 orang atau 54,97 persen serta tenaga produksi sebanyak 41.141 orang atau 32,07 persen, yang terdiri dari laki-laki 32.610 orang atau 40,78 persen dan perempuan 8.531 orang atau 17,66 persen.

Tabel 2.71
Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan di Kota Cirebon
Tahun 2017

Jabatan Utama dalam Pekerjaan	Penduduk yang Bekerja					
	Jumlah (orang)			Persentase (%)		
	Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin		Total
	L	P		L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
0/1	na	na	4.180	na	na	3,26
2	4.753	5.835	10.588	5,94	12,08	8,25
3	3.742	1.413	5.155	4,68	2,93	4,02
4	5.842	4.828	10.670	7,31	10,00	8,32
5	29.265	26.552	55.817	36,60	54,97	43,52
6	667	51	718	0,83	0,11	0,56
7/8/9	32.610	8.531	41.141	40,78	17,66	32,07
Jumlah	79.969	48.300	128.269	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon, BPS, 2017, yang dikelola dalam SIPD.
Keterangan :
0/1. Tenaga profesional; 2. Tenaga kepemimpinan; 3. Tenaga tata usaha; 4. Tenaga usaha penjualan; 5. Tenaga usaha jasa; 6. Tenaga usaha pertanian; 7/8/9. Tenaga produksi.

Tabel di atas menunjukan, partisipasi penduduk perempuan yang bekerja tertinggi pada jabatan tenaga usaha jasa sebesar 54,97 persen, diikuti pada jabatan tenaga produksi sebesar 17,66 persen dan jabatan kepemimpinan sebesar 12,08 persen. Data tersebut menjelaskan bahwa perempuan cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan keluarga guna pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

2.3.2.3 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus diberikan antara lain terhadap: (1) anak korban bencana; (2) anak yang berhadapan dengan hukum; (3) anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (4) anak korban penyalahgunaan narkoba; (5) anak dengan HIV-AIDs; (6) anak korban kekerasan baik fisik maupunpsikis; (7) anak korban kejahatan seksual; (8) anak penyandang disabilitas; (9) anak korban perlakuan salah/penelantaran; dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Cirebon telah berjalan cukup lama, antara lain dengan berdirinya berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan. Disamping lembaga yang didirikan oleh masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya membentuk Lembaga Perlindungan Anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat

Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, dan Pusat Perlindungan Anak (PPA) Kepolisian Resort Cirebon Kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon mencatat dalam kurun waktu 2015-2020, dimana pada tahun 2015, jumlah kasus kekerasan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kasus (38 kasus diantaranya korbannya anak-anak) dan tahun 2016 naik menjadi 98 (sembilan puluh delapan) kasus kekerasan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) kasus korbannya adalah anak-anak. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlah kekerasan mencapai 54 (lima puluh empat) kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami jenis kekerasan seksual, yang meliputi sodomi, pencabulan, dan pemerkosaan. Pada tahun 2015 korban kekerasan seksual meningkat menjadi 37 (tiga puluh tujuh) kasus atau 75,51 persen. Selanjutnya, pada tahun 2016 kekerasan seksual kembali meningkat menjadi 71 (tujuh puluh satu) kasus atau 72,45 persen, dan sampai dengan triwulan ke satu tahun 2017 kasus kekerasan seksual sudah mencapai 21 (dua puluh satu) kasus atau 72,41 persen.

Tabel 2.72
Situasi Korban Kekerasan di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

No.	Daerah Asal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Kota Cirebon	19	43	53	65	41	54
Total		49	98	73	65	41	54

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, 2021

Tabel di atas menunjukan, pada tahun 2020 korban kekerasan yang ditangani PPT Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon berasal dari Kota Cirebon sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 41 (empat puluh satu) kasus.

Tabel 2.73
Situasi Korban Per Kelompok Usia yang Ditangani PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2015-2020

No.	Kelompok Usia	Tahun					
		*)2015	*)2016	**)2017	**)2018	**)2019	**)2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	0 – 5 tahun	10	10	1	2	1	1
2.	6 – 10 tahun	8	12	11	10	7	15
3.	11 – 15 tahun	11	28	12	20	11	11
4.	16 – 18 tahun	9	29	12	15	10	4
5.	Di atas 18 tahun	11	19	17	18	12	23
Total		49	98	53	65	41	54

Sumber : PPT RSUD Gunung Jati Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
*) Data tahun 2015-2016 berasal dari berbagai wilayah
**) Data tahun 2017-2020, korban berasal dari Kota Cirebon

Berdasarkan kelompok umur, korban kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terbanyak dialami oleh kelompok usia dibawah 18 tahun. Pada tahun 2017 anak usia dibawah 18 tahun yang mengalami kekerasan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang atau 67,92 persen dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus atau 75,00 persen. Kasus kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 65 (enam puluh lima) kasus, dan 47 (empat puluh tujuh) kasus (72,31 persen) diantaranya adalah anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kasus, namun yang menjadi korban anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tetap tinggi, yaitu mencapai 31 (tiga puluh satu) kasus atau 57,41 persen.

Tabel 2.74
Situasi Korban Menurut Jenis Kasus yang Ditangani PPT Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Tahun 2015-2020

No.	Jenis Kekerasan	Tahun					
		*)2015	*)2016	**)2017	**)2018	**)2019	**)2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Kekerasan Seksual	37	71	27	31	28	27
2.	Kekerasan Fisik	10	21	21	27	12	23
3.	Kekerasan Psikis	-	5	3	1	1	4
4.	Eksploitasi Ekonomi	-	-	-	5	-	-
5.	Penelantaran	2	1	2	1	-	-
	Total	49	98	53	65	41	54

Sumber : PPT RSUD Gunung Jati Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021
*) Data tahun 2015-2016 berasal dari berbagai wilayah
**) Data tahun 2017-2020, korban berasal dari Kota Cirebon

Dari berbagai kasus kekerasan yang ditangani dalam periode tahun 2017-2020, kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebanyak 113 (seratus tiga belas) kasus atau 53,05 persen, kekerasan fisik 83 (delapan puluh tiga) kasus (38,97 persen), dan yang paling kecil adalah kasus penelantaran sebesar 1,41 persen.

Tabel 2.75
Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	4 – 6	-	1	-	-	-
2.	7 – 12	3	-	6	6	6
3.	13 – 15	5	9	6	4	27
4.	16 – 18	26	14	20	36	29
	Total	34	24	32	46	62

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berikut adalah tabel yang menguraikan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan penyelesaian kasus tahun 2016-2020.

Tabel 2.76
Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan
Penyelesaian Kasus Tahun 2016-2020

No.	Penyelesaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Putusan Pengadilan	12	8	3	15	2
2.	Diversi/Restorative Justice	15	14	6	9	30
3.	Mediasi	5				
4.	Layanan konseling/layanan kesehatan	2	2	23	22	24
Total		34	24	32	46	56

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat yang berasal dari lingkungan keluarga, tetangga dan sekolah. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi lingkungan yang tidak ramah dan tidak aman bagi anak termasuk lingkungan keluarga. Disamping itu, perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, diskriminasi dan persoalan anak berhadapan dengan hukum penanganannya masih belum optimal.

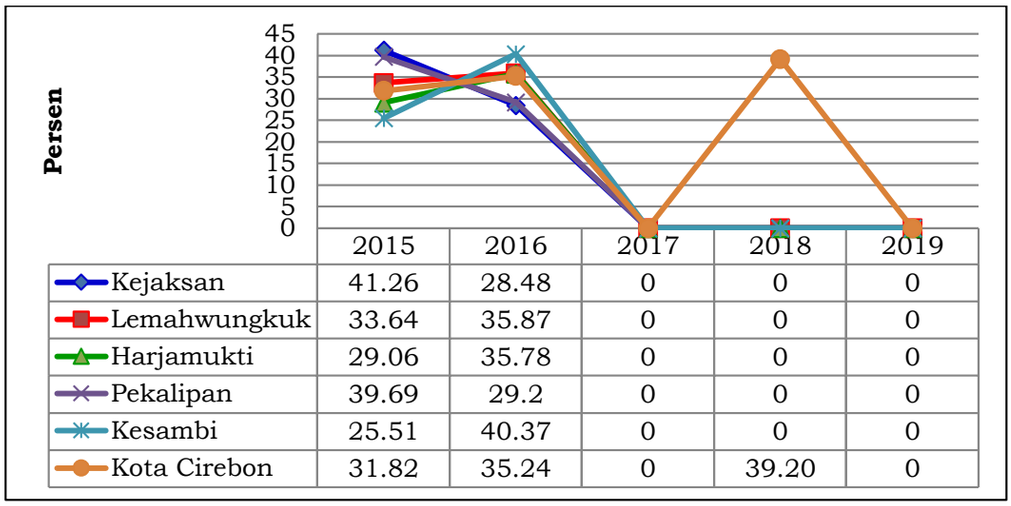
Jumlah perkara anak yang ditindaklanjuti sampai ke pengadilan di Kota Cirebon pada tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) kasus atau 35,29 persen, yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* sebanyak 15 (lima belas) kasus atau 44,12 persen, melalui mediasi sebanyak 5 (lima) kasus atau 14,71 persen, dan yang mendapat layanan psikolog/kesehatan sebanyak 2 (dua) kasus atau 5,88 persen. Penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice* sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Disisi lain masih banyak anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sampai dengan bulan Desember 2016 menunjukkan bahwa kepemilikan akte kelahiran anak di Kota Cirebon yang berusia 0-18 tahun masih rendah, yaitu berjumlah 37.825 anak atau 37,24 persen, meningkat di tahun 2018 menjadi 39,20 persen. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya hak anak terhadap identitasnya dan masih lemahnya sistem pendataan atau registrasi kelahiran. Tidak dimilikinya akte kelahiran menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lainnya.

Jenis yang tidak kalah pentingnya dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah pemenuhan kebutuhan identitas anak. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan identitas anak berupa pemenuhan akta kelahiran secara gratis. Cakupan kepemilikan akta

kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kota Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.57
Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

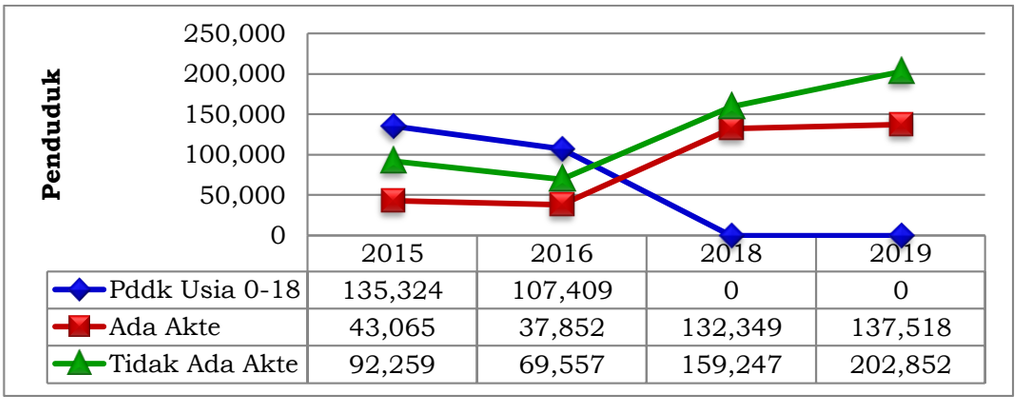


	2015	2016	2017	2018	2019
Kejaksan	41.26	28.48	0	0	0
Lemahwungkuk	33.64	35.87	0	0	0
Harjamukti	29.06	35.78	0	0	0
Pekalipan	39.69	29.2	0	0	0
Kesambi	25.51	40.37	0	0	0
Kota Cirebon	31.82	35.24	0	39.20	0

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Grafik di atas menunjukkan, persentase penduduk usia 0-18 tahun menurut Kecamatan di wilayah Kota Cirebon yang memiliki akta kelahiran. Jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Kesambi sebanyak 40,37 persen disusul penduduk di Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 35,87 persen dan Kecamatan Harjamukti sebanyak 35,78 persen. Kondisi ini menunjukan masih relatif rendahnya pengetahuan dan kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi seorang anak di Kota Cirebon yang tidak semata-mata data administratif, namun memiliki manfaat bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Cakupan kepemilikan akta kelahiran di masing-masing kecamatan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan peran serta pemerintah setempat baik dalam sosialisasi tentang pentingnya akte kelahiran maupun kemudahan dalam pelayanan pengurusan akte kelahiran anak.

Gambar 2.58
Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun di Kota Cirebon Tahun 2015-2019



	2015	2016	2018	2019
Pddk Usia 0-18	135,324	107,409	0	0
Ada Akte	43,065	37,852	132,349	137,518
Tidak Ada Akte	92,259	69,557	159,247	202,852

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2016 sebanyak 107.409 jiwa dan dari jumlah tersebut yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 37.852 jiwa atau 35,24 persen, sehingga masih terdapat 69.557 orang anak di Kota Cirebon atau 64,76 persen yang belum memiliki akta kelahiran. Perkembangan kepemilikan akta kelahiran anak dari tahun 2015-2019 terlihat semakin meningkat namun jumlah kepemilikan akte kelahiran masih dibawah jumlah penduduk yang tidak memiliki akte. Pada tahun 2019 jumlah kepemilikan akte kelahiran sebanyak 137.518 jiwa, namun penduduk yang tidak memiliki akte berjumlah lebih banyak yaitu 202.852 jiwa.

2.3.2.4 Pangan

A. Regulasi Ketahanan Pangan

Indikator regulasi ketahanan pangan ditunjukan oleh ada/ tidaknya regulasi/kebijakan ketahanan pangan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan sebagainya. Berdasarkan data yang ada, Kota Cirebon telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 501.05/Kep.251-DPPKP/2017.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah khususnya di Kota Cirebon. Ketersediaan pangan utama di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Ketersediaan Pangan Utama di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah ketersediaan pangan utama (ton)	153.086,46	241.687,20	n.a	276.972,42	276.973,42
2.	Ketersediaan pangan utama per 1000 jiwa per tahun (ton)	393,686	630,00	n.a	276,973	276.973,42
3.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/ tahun)	393,686	630,00	n.a	820,45	820,45
4.	AKG pangan utama per kapita per tahun (kg)	109	109	n.a	n.a	109
5.	Ketersediaan energi/kalori (Kkal/Kap/hari)	n.a	n.a	n.a	3.598	n.a
6.	Surplus ketersediaan pangan utama per jiwa per tahun (kg/kap/th)	284,686	521,00	n.a	158,33	711,45

Sumber: DPPKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD 2020

C. Skor PPH

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Indikator PPH digunakan sebagai indiktor kinerja bidang ketahanan pangan.

Tabel 2.78
Skor PPH Kemandirian Pangan Kota Cirebon
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,4	77,8	84,0	90,2	90,2

Sumber: DPPKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

A. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian prinsip-prinsip hukum ini mengandung prinsip-prinsip lingkungan (prinsip-prinsip ekologis) atau mengutamakan perlindungan ekosistem.

Esensi dari penegakan hukum lingkungan adalah sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu dilakukan, karena dalam proses pembangunan, dampak berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sulit dihindari.

Penegakan hukum lingkungan bukan satu-satunya cara atau alat penataan *(compliance tool).* Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi, *public pressure* yang efektif, mengumumkan perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan dan yang melakukan pelanggaran, pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, AMDAL dan perizinan. Cara-cara tersebut merupakan strategi penataan yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pendayagunaan sanksi administrasi yang meliputi sanksi yang teringan, seperti teguran tertulis, peringatan, perintah administratif *(administrative orders)* sampai kepada penghentian sementara *(suspension)* atau penghentian seterusnya *(closure)* sebagian atau seluruh kegiatan, merupakan upaya untuk mencapai tingkat ketaatan. Beberapa alasan yang mendasari penegakan hukum lingkungan sebagai hal yang penting yaitu:

1) Efektifitas program. Diterbitkannya kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan, yaitu untuk melindungi setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, serta perlindungan pelestarian daya dukung lingkungan,

akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara taat asas melalui penegakan hokum;

2) Alasan keadilan. Sikap yang konsisten dan tegas terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah, sangat penting untuk mencegah pihak-pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Di sisi lain, pihak-pihak yang tingkat ketaatannya tinggi mengalami kerugian karena perlakuan diskriminatif. Sikap yang tidak konsisten dan tegas terhadap pihak pelanggar mengakibatkan timbulnya ketidakadilan;
3) Alasan Kredibilitas. Kredibilitas instansi pemerintah akan terjaga apabila hukum yang diundangkan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh;
4) Alasan Efisiensi Ekonomi. Penegakan hukum lingkungan yang konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis sangat efisien. Timbulnya pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara potensial menjadi beban ekonomi masyarakat dan juga industri pelanggar yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan terdiri dari tahap pentaatan *(compliance)* dan tahap penindakan *(enforcement)* dan meliputi aspek hukum administrasi, hukum perdata dan aspek hukum pidana, termasuk pula aspek hukum internasional. Penegakan hukum lingkungan pada tahap pemantauan ketaatan *(compliance)* memberikan peranan yang sangat besar bagi pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan staf melalui pelatihan dan pengembangan jaringan data yang memadai. Kota Cirebon tetap berupaya untuk menegakan peraturan yang ada termasuk aturan di bidang lingkungan, namun masih terhambat dengan keterbatasan aparatur yang ada terutama yang telah mengikuti pelatihan terkait pengawasan lingkungan.

B. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Isu global perubahan iklim semakin mengemuka dan banyak dibahas dalam berbagai forum diskusi. Perubahan iklim dapat diartikan sebagai berubahnya iklim yang diakibatkan baik langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aktivitas manusia, sehingga menyebabkan berbagai perubahan komposisi atmosfir secara global yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi.

Untuk menjawab isu global tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 yang merupakan pengesahan *Protokol Kyoto* atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang perubahan iklim yang membawa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terlibat secara aktif dalam mengatasi perubahan iklim. Saat ini terlihat perubahan iklim berjalan begitu cepat, sehingga diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam upaya akselerasi penurunan emisi gas rumah kaca, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Tabel berikut menggambarkan presentase tingkat penurunan gas emisi rumah kaca yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2016-2020.

Tabel 2.79
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Cirebon
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.	na	na	2,38	3,85	3,87

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

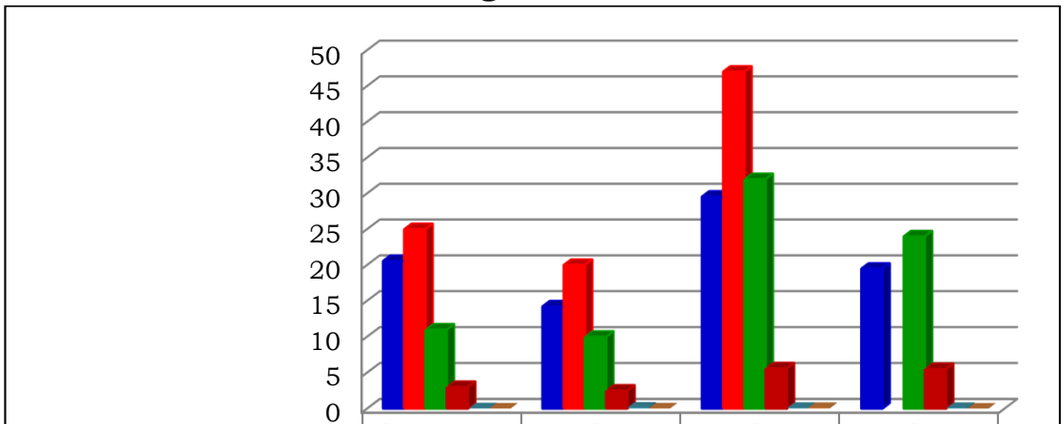
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Cirebon setiap tahunnya menunjukan peningkatan dari 2,38 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,87 persen di tahun 2020.

C. Indeks Pengukuran Kualitas Air

1) Kondisi Sungai

Seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan teknologi, maka perkembangan pusat-pusat industri dan permukiman melaju dengan pesat. Peningkatan kebutuhan air, lahan serta bahan bangunan tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sungai sering dilupakan kelestariannya. Kondisi sungai di Kota Cirebon sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.59
Kondisi Sungai di Kota Cirebon



	S. Kedung Pane	S. Sukalila	S. Kesunean (Kriyan)	S. Kalijaga
Panjang (Km)	20.56	14.21	29.54	19.47
Lebar Permukaan (m)	25	20	47	
Lebar dasar (m)	11	10	32	24
Kedalaman (m)	3	2.5	5.6	5.5
Debit Max (m^3/dtk)	0.05	0.15	0.12	0.1
Debit Min (m^3/dtk)	0.02	0.03	0.1	0

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa sistem sungai paling panjang yang melintasi Kota Cirebon adalah sistem Sungai Kesunean (Kriyan) dengan panjang 29,54 km, lebar permukaan 47 m, lebar dasar 32 m dan kedalaman mencapai 5,6 m. Sedangkan sungai terpendek adalah sistem Sungai Sukalila

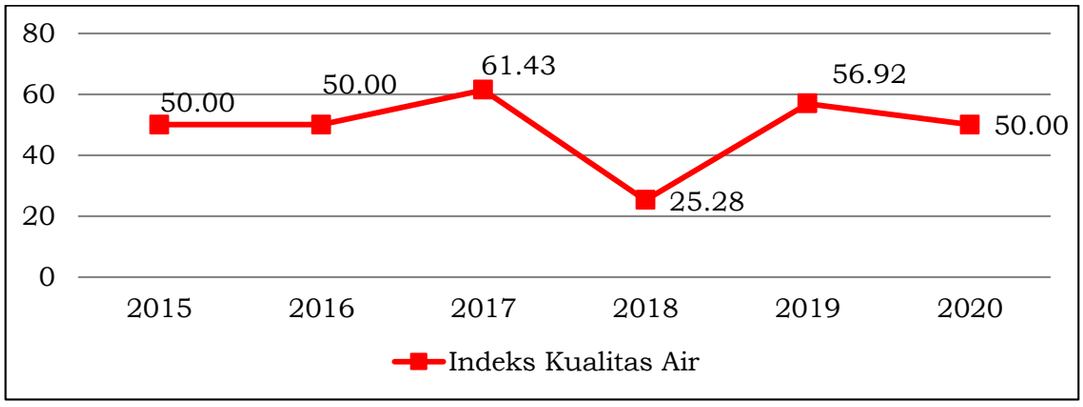
dengan panjang 14,21 km, lebar permukaan 20 m, lebar dasar 10 m, dan kedalaman 2,5 m. Namun demikian Sungai Sukalila memiliki debit maksimum sebesar 0,15 m^3/detik.

2) Kualitas Air Sungai

Hasil analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terkait Indeks Kualitas Air, berdasarkan indikator dan parameter IKLH Nasional, indeks kualitas air Kota Cirebon dihitung dengan menggunakan tujuh parameter, yaitu *Total Suspended Solid (TSS), Dissolved (Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coliform* dan *Total Coliform*. Hasil analisa indeks kualitas air sungai di Kota Cirebon dapat dilihat pada Gambar 2.60.

Dalam periode tahun 2015-2020 indeks kualitas air sungai di Kota Cirebon menunjukan karakteristik yang tetap yaitu sebesar 50,00 poin namun pada tahun 2017 menunjukan peningkatan menjadi 61,43 poin dan tahun 2018 secara grafis menunjukan adanya trend penurunan yang cukup signifikan mencapai nilai 25,28 poin. Pada tahun 2019, indeks kualitas air kembali mengalami peningkatan menjadi 56,92 poin, dan di tahun 2020 kembali turun menjadi 50,00 poin.

Gambar 2.60
Perkembangan Indeks Kualitas Air Kota Cirebon
Tahun 2015-2020



Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

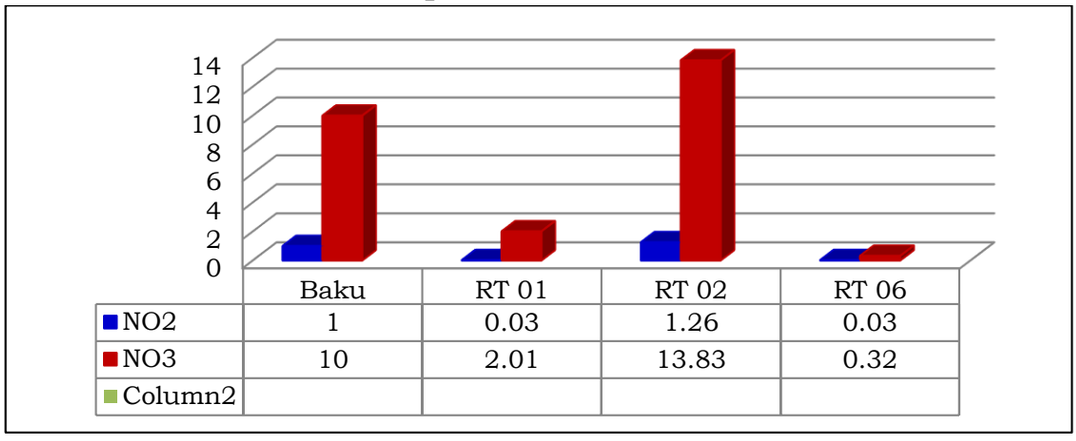
3) Kualitas Air Sumur

Menurut data cakupan air bersih di Kota Cirebon, dari jumlah penduduk 328.239 jiwa, jumlah kebutuhan air bersih berjumlah 9.723.601 m^3 tetapi jumlah KK yang tersambung jaringan pipa PDAM baru mencapai 48.829 KK, sedangkan sisanya menggunakan air bawah tanah (sumur). Hasil analisis kualitas air bawah tanah yang dilakukan di tiga lokasi menunjukan bahwa kualitas air bawah tanah yang berlokasi di RT 01/RW 07 Kelurahan Argasunya diidentifikasi tercemar *Total Coliform* yang sangat tinggi dengan nilai 7.90 per 100 ml air.

Kualitas air secara biologi khususnya secara *mikrobiologi*, ditentukan oleh toksin, misalnya kehadiran mikroba khususnya bakteri pencemar tinja *(coli)* di dalam air, sangat tidak diharapkan, apalagi kalau air tersebut untuk kepentingan kehidupan manusia (rumah tangga). Bakteri *coliform* merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator, dimana

bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan auatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Hasil uji kualitas air di RT 02/RW 08 Kelurahan Argasunya diidentifikasi memiliki nilai parameter *nitrate* (NO3) dan *nitrite* (NO2) yang melebihi nilai baku yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990. Hasil uji laboratorium menunjukan bahwa nilai parameter NO3 sebesar 13,83 mg/ltr (baku mutu NO3 = 10 mg/ltr dan nilai NO2 sebesar 1,26 mg/ltr (baku mutu NO2 = 1 mg/ltr.

Gambar 2.61
Parameter NO3 pada Kualitas Air Bawah Tanah



	Baku	RT 01	RT 02	RT 06
NO2	1	0.03	1.26	0.03
NO3	10	2.01	13.83	0.32
Column2				

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2019

Mengkonsumsi air bawah tanah dengan kadar nitrat tinggi akan menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti gondok, *methemoglobinemia* dan sebagainya. Nitrat yang masuk ke dalam tubuh 6 persen akan direduksi menjadi nitrit yang bersifat *karsinogenik.*

4) Kualitas Air Laut

Kota Cirebon memiliki luas wilayah perairan laut sekitar 51,86 km² atau 58,13 persen dari luas wilayah daratan dan lautan (Sumber: DPPKP Kota Cirebon, 2011). Dari hasil pemantauan dan pengujian kualitas air laut di muara Sungai Kesenden dan Sungai Sukalila telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi bercampurnya/teraduknya substrat lumpur akibat gelombang dan masukan dari sungai yang juga membawa sampah dan sedimen. Sedangkan nilai pH, DO, dan BOD menunjukan nilai yang masih dalam batasan yang disyaratkan. Sementara untuk nilai *phosphate* di perairan laut muara Sungai Kesenden sedikit melebihi baku mutu, hal ini disebabkan karena masukan dari sungai-sungai sekitarnya dan masukan dari aktivitas pelabuhan yang lokasinya cukup dekat. Kelebihan *phosphate* di perairan menyebabkan peristiwa meningkatnya pertumbuhan alga dengan efek samping menurunnya konsentrasi oksigen dalam badan air.

2.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari perkembangan pencatatan administrasi kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK,

Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Rasio kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran maupun Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cirebon mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan administrasi kependudukan di Kota Cirebon Kurun waktu tahun 2015-2019.

Pada tahun 2017 di Kota Cirebon terdapat 104,33 persen akta kematian dari 2.401 peristiwa kematian yang terjadi. Artinya seluruh peristiwa yang meninggal tahun 2017 semua diterbitkan akta kematiannya. Adapun capaian pada tahun tersebut di atas 100,00 persen dikarenakan terdapat penerbitan akta kematian yang belum diterbitkan pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.80
Capaian Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Ketersediaan *data base* kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kepala Keluarga:					
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	82.144	99.378	99.541	102.668	106.129
Persentase keluarga telah memiliki KK (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98
Kartu Tanda Penduduk (KTP):					
Jumlah wajib KTP (orang)	n.a.	287.213	239.042	239.042	241.282
Persentase Penduduk telah memiliki KTP (persen)	68,87	91,09	97,94	100,00	99,46
Akta Lahir:					
Persentase penduduk yang telah memiliki akta lahir (persen)	86,0	83,2	88,3	83,00	n.a
Persentase anak usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran (persen)	72,85	73,16	61,24	78,57	81,60
Persentase penerbitan akta kematian (persen)	73,0	71,45	104,33	15,58	17,22

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa yang terlihat dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata Kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka keswadayaan pembangunan di desa diharapkan semakin meningkat. Tabel 2.81 berikut menjelaskan bahwa kelembagaan PKK di semua tingkatan baik Kelurahan, Kecamatan, maupun tingkat Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2016-2020 aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 2.81
Persentase PKK Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase PKK Aktif (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

B. Persentase Ormas/LSM Aktif

Tabel berikut menggambarkan keberadaan Ormas/LSM aktif di Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 jumlah Ormas/LSM di Kota Cirebon sebanyak 75 lembaga, dan pada tahun 2019 jumlah Ormas/LSM menurun menjadi 20 lembaga, dengan tingkat keaktifan mencapai 100,00 persen.

Tabel 2.82
Persentase Ormas/LSM Aktif di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Ormas/LSM terdaftar	75	75	75	20	20
Jumlah Ormas/LSM Aktif	75	75	20	20	20
Persentase Ormas/LSM Aktif	100	100	26,67	100	100

Sumber: Kantor Kesbangpoldagri Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Pencapaian Peserta KB Baru

Dalam kurun waktu tahun 2015-2020, peserta KB mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ber-KB guna menciptakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Penggunaan KB di Kota Cirebon didominasi oleh penggunaan hormonal. Berikut tabel uraian yang menejelaskan banyaknya peserta KB berdasarkan metodenya.

Tabel 2.83
Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2015-2020

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	IUD	817	963	982	1.032	989	762
2	MOW	658	575	680	790	903	889
3	MOP	8	4	12	4	0	12
4	Kondom	133	61	44	66	45	59
Non Hormonal		**1.616**	**1.603**	**1.718**	**1.892**	**1.937**	**1.722**
5	Implant	475	602	540	492	505	460
6	Suntik	4.336	4.333	4.645	3.648	2.930	2.698
7	PIL	307	285	211	310	182	187

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Hormonal		**5.118**	**5.220**	**5.396**	**4.450**	**3.617**	**3.345**
Total		**6.734**	**6.823**	**7.114**	**6.342**	**5.554**	**5.067**
Jumlah PUS		**6.734**	**6.823**	**7.114**	**6.342**	**5.554**	**5.067**
Capaian (%)		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: DPPKB, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan peserta KB baru dari 6.734 orang di tahun 2017 menjadi 5.067 orang di tahun 2020. Untuk KB non hormonal, metode yang paling banyak digunakan adalah metode IUD/spiral dengan jumlah peserta sebanyak 1.032 (seribu tiga puluh dua) orang di tahun 2018. Sedangkan untuk KB yang bersifat hormonal, metode yang paling banyak digunakan adalah metode suntik dengan jumlah peserta sebanyak 4.645 (empat ribu enam ratus empat puluh lima) orang pada tahun 2017.

B. Pencapaian Peserta KB Baru Pria

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pencapaian peserta KB baru pria menunjukan angka yang fluktuatif. Dari tahun 2015 hingga 2017 menunjukan penurunan dari 141 (seratus empat puluh satu) orang pada tahun 2015 menjadi 56 (lima puluh enam) orang pada tahun 2017. Namun tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukan penurunan dari 70 (tujuh puluh) orang pada tahun 2018 menjadi 45 (empat puluh lima) orang pada tahun 2019. Berikut adalah tabel yang menyajikan data peserta KB baru pria:

Tabel 2.84
Pencapaian Peserta KB Baru Pria Tahun 2015-2020

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	MOP	8	4	12	4	0	12
2	Kondom	133	61	44	66	45	59
Jumlah		**141**	**65**	**56**	**70**	**45**	**71**
3	Jumlah Akseptor KB (orang)	6.734	6.823	7.114	6.342	5.554	5.067
4	Persentase (%)	2,09	0,95	0,79	1,10	0,81	1,40

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

C. Pencapaian Peserta KB Baru Selain Pria

Pencapaian peserta KB baru selain pria pada tahun 2015 sudah mencapai 97,91 persen, tahun 2016-2017 mengalami peningkatan namun pada tahun 2018 turun menjadi 98,90 persen. Adapun dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dari 99,19 persen menjadi 98,60 persen. Dibandingkan dengan pencapaian peserta KB baru pria, menunjukan partisipasi pria dalam ber-KB relatif masih rendah, sehingga perlu upaya lebih keras untuk memotivasi keterlibatan pria dalam ber-KB.

Tabel 2.85
Pencapaian Peserta KB Baru Selain Pria Tahun 2015-2020

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	IUD	817	963	982	1.032	989	762
2	MOW	658	575	680	790	903	889
3	Implant	475	602	540	492	505	460
4	Suntik	4.336	4.333	4.645	3.648	2.930	2.698
5	PIL	307	285	211	310	182	187
Jumlah		**6.593**	**6.758**	**7.058**	**6.272**	**5.509**	**4.996**
7	Jumlah Akseptor KB	6.734	6.823	7.114	6.342	5.554	5.067
8	Persentase (%)	97,91	99,05	99,21	98,90	99,19	98,60

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

D. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Cirebon Tahun 2015-2020

Pencapaian penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dalam kurun waktu 2015-2020 terlihat mengalami peningkatan dari 29,08 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 43,16 persen tahun 2019. Adapun tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 41,90 persen. Kondisi ini harus menjadi motivasi bagi Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PPKB) untuk lebih meningkatkan kesadaran peserta KB dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Tabel 2.86
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2015-2020

Mix Kontrasepsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
MKJP (IUD, MOW, MOP, Implant)	1.958	2.144	2.214	2.318	2.397	2.123
Jumlah Akseptor KB	6.734	6.823	7.114	6.342	5.554	5.067
Persentase (%)	29,08	31,42	31,12	36,55	43,16	41,90

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

E. Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Tabel berikut menjelaskan bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB sudah cukup tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase PUS terhadap jumlah akseptor KB terus mengalami peningkatan dari 60,75 persen pada tahun 2015 menjadi 64,29 persen pada tahun 2020. Pencapaian kinerja ini tetap membutuhkan upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan partisipasi PUS dalam ber-KB, terutama dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.87
Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Jumlah Akseptor KB	28.236	28.554	28.945	26.765	25.948	25.231
2	Jumlah PUS	46.477	46.774	47.512	42.413	40.943	39.248
3	Persentase (%)	60,75	61,05	60,92	63,11	63,38	64,29

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD: 2021

F. Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB Aktif dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pencapaian peserta KB Aktif tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 64,29 persen dan terendah pada tahun 2015 yang mencapai 60,75 persen. Meningkatnya pencapaian peserta KB aktif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin gencar dan efektifnya kegiatan penyuluhan untuk terus memotivasi PUS dalam ber-KB.

Tabel 2.88
Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon Tahun 2015-2020

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	IUD	3.800	3.839	3.881	3.505	3.388	3.276
2	MOW	2.391	2.449	2.522	2.207	2.113	1.970
3	MOP	100	104	109	97	28	28
4	Kondom	473	476	476	437	437	414
Non Hormonal		**6.764**	**6.868**	**6.988**	**6.246**	**5.966**	**5.688**
5	Implant	1.252	1.264	1.286	1.269	1.288	1.336
6	Suntik	16.470	16.661	16.951	16.062	15.721	15.388
7	PIL	3.750	3.761	3.720	3.188	2.973	2.819
Hormonal		**21.472**	**21.686**	**21.957**	**20.519**	**19.982**	**19.543**
Total		**28.236**	**28.554**	**28.945**	**26.765**	**25.948**	**25.231**
Jumlah PUS		**46.477**	**46.774**	**47.512**	**42.413**	**40.943**	**39.248**
Capaian (%)		**60,75**	**61,05**	**60,92**	**63,11**	**63,38**	**64,29**

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

G. Pencapaian *Contaceptive Prevalency Rate*/CPR (PA/PUS)

Contaceptive Prevalency Rate (CPR) adalah tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi dengan cara membandingkan antara jumlah pemakai kontrasepsi terhadap Wanita Usia Subur (WUS) yang berumur antara 15-49 tahun, atau CPR diartikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi dalam kurun waktu tertentu. Tabel berikut menggambarkan bahwa tingkat kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukan kecenderungan menurun sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.89
Pencapaian CPR (PA/PUS) Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Peserta KB Aktif (orang)	28.236	28.554	28.945	42.413	25.948
Pasangan Usia Subur (pasangan)	46.477	46.774	47.512	58.061	55.938
Persentase (%)	60,75	61,05	60,92	73,05	46,39

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

H. Capaian PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*

Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (*unmet need*) merupakan kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan perilaku penggunaan kontrasepsi. Pengertian *unmet need* menurut DHS *(Demographic Health Survey)* adalah proporsi wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dalam jangka waktu minimal 2 (dua) tahun tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

Unmet need layanan kontrasepsi/keluarga berencana berkaitan dengan *demand* keluarga berencana. *Demand* KB adalah niat atau motivasi individu atau pasangan untuk mengontrol fertilitas dimasa yang akan datang. *Demand* KB terbagi dalam 3 kategori yaitu keinginan untuk menunda kelahiran anak pertama, keinginan untuk menjarangkan kehamilan dan keinginan untuk mengakhiri kelahiran. Untuk menunda, mengatur jarak dan membatasi kelahiran ditentukan oleh penilaian ekonomi dan sosial yang memiliki kekuatan untuk motivasi pengendalian kesuburan.

Kelompok *unmet need* mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid *(amenorhoe)* setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi, tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin anak lagi tapi belum tahu kapan juga termasuk dalam kelompok *unmet need*. Wanita yang hamil akibat kegagalan metode kontrasepsi, wanita yang mengalami *infecund* yaitu mereka telah menikah lima tahun atau lebih tetapi tidak pernah melahirkan. Pengguna kontrasepsi tradisonal termasuk ke dalam kelompok *unmet need,* karena metode yang digunakan tidak bisa diandalkan dan tidak sesuai dengan tujuan reproduksi. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya *unmet need* adalah:

1) Akses ke layanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan transportasi;
2) Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi, pemahaman efek samping yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kontrasepsi dan hubungan antara wanita dan penyedia layanan;
3) Hambatan biaya; dan/atau
4) Hambatan sosial, budaya, dan norma agama.

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, faktor lain yang mempengaruhi adanya *unmet need* adalah usia perkawinan yang terlalu muda, pendidikan wanita yang rendah, jarak ke layanan dan diskriminasi gender terhadap pemilihan jenis kelamin anak adalah karakteristik demografi

yang menentukan tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Terdapat perbedaan karakteristik demografi dalam *unmet need* pelayanan keluarga berencana untuk pembatasan dan penjarangan kelahiran. Pembatasan kelahiran lebih tinggi pada wanita dengan usia lebih dari 35 tahun, tidak memiliki pendidikan formal dan paritas lebih dari empat. Sedangkan untuk penjarangan kelahiran lebih tinggi pada wanita usia dibawah 25 tahun, pendidikan menengah atau tinggi dan paritas rendah.

Tabel 2.90
Cakupan *UNMET NEED* Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	7.370	7.272	7.165	5.008	4.770
Ingin Anak Tunda (IAT)	3.766	3.753	3.772	3.523	3.444
Jumlah *Unmet-Need*	**11.136**	**11.025**	**10.937**	**8.531**	**8.214**
PUS	46.477	46.774	47.512	42.413	40.943
Persentase (%)	23,96	23,57	23,02	20,11	20,06

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2020

I. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel berikut menunjukan, rata-rata jumlah anak per keluarga dalam lima tahun terakhir rata-rata dibawah 2 (dua) orang, yaitu berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua) orang per keluarga.

Tabel 2.91
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Keluarga (KK)	82.144	82.294	82.863	102.668	106.129
Jumlah Anak (Jiwa)	133.085	133.309	133.807	138.907	134.443
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,62	1,62	1,61	1,35	1,27

Sumber: Disdukcapil Kota cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

J. Pencapaian Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera

Cakupan peserta KB Aktif menurut kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dalam lima tahun terakhir menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan peserta KB aktif dari Pra KS dan KS 1 sebesar 6,77 persen, meningkat menjadi 15,68 persen pada tahun 2017, dan menurun pada tahun 2020 menjadi 13,06 persen dari total jumlah keluarga di Kota Cirebon. Perkembangan cakupan peserta KB aktif menurut tahapan keluarga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga
di Kota Cirebon tahun 2016-2020

No.	Mix Kontrasepsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	IUD	877	895	965	968	981
2.	MOW	949	980	944	920	867
3.	MOP	40	44	44	18	18
4.	Kondom	109	110	115	134	133
Non Hormonal		**1.975**	**2.029**	**2.068**	**2.040**	**1.999**
5.	Implant	566	570	610	631	693
6.	Suntik	6.851	6.831	7.199	7.219	7.205
7.	Pil	3.600	3.566	1.307	1.232	1.188
Hormonal		**3.600**	**10.967**	**9.116**	**9.082**	**9.086**
Total		5.575	12.996	11.184	11.122	11.085
Jumlah Keluarga		82.294	82.863	83.596	84.292	84.892
Persentase		6,77	15,68	10,90	13,19	13,06

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, yang dikelola dalam SIPD, 2021

K. Wanita Usia Subur (WUS)

Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) di Kota Cirebon tahun 2016 sebanyak 94.026 orang, meningkat di tahun 2020 menjadi 96.243 orang. Jumlah ini didalamnya mencakup baik wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah (belum memiliki pasangan hidup). Jumlah ini merupakan sasaran garapan yang potensial untuk dijadikan target dalam upaya meningkatkan cakupan peserta KB aktif. Upaya-upaya promosi melalui konseling, edukasi melalui Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), maupun melalui pembentukan Kelompok Kesehatan Remaja (KKR).

Tabel 2.93
Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) Kota Cirebon
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Wanita Usia Subur/WUS (Perempuan Usia 15-49 tahun)	94.026	94.744	95.233	95.625	96.243

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

L. Pembinaan PUP/Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah KRR sebanyak 14 (empat belas) kelompok dan meningkat hingga tahun 2017 menjadi 35 (tiga puluh lima) kelompok. Namun pada tahun 2019, jumlah KKR turun menjadi 21 (dua puluh satu) kelompok. Kelompok remaja dapat dijadikan wahana untuk terus memberikan pengertian dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, sehingga sejak dini remaja sudah mendapatkan pemahaman yang benar terkait berbagai hal, diantaranya bahayanya perkawinan usia dini, pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah, dan sebagainya.

Tabel 2.94
Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja, Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PIK R/M Tumbuh	10	19	19	14	14
2	Jumlah PIK R/M Tegak	2	9	9	4	7
3	Jumlah PIK R/M Tegar	2	7	7	0	0
Jumlah		**14**	**35**	**35**	**18**	**21**

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

M. Cakupan Remaja/Mahasiswa Dalam Pusat Informasi dan Konseling

Sampai dengan tahun 2017 di Kota Cirebon telah memiliki 35 Pusat Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja/mahasiswa, sehingga rata-rata per Kecamatan telah memiliki PIK remaja/mahasiswa. Namun pada tahun 2019, jumlah PIK turun menjadi 21 PIK, sehinga rata-rata per kecamatan turun menjadi 4 PIK remaja/mahasiswa. Keberadaan PIK remaja/mahasiswa di setiap kecamatan perlu terus dikembangkan baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PIK di setiap Kecamatan, secara dini remaja dapat memperoleh informasi terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga sejahtera.

Tabel 2.95
Cakupan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PIK R/M	14	35	35	18	21
2	Jumlah kecamatan	5	5	5	5	5
3	Cakupan	2,8	7	7	3,6	4,2

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

N. Pembinaan Ketahanan Keluarga

1. Jumlah Kelompok BKB, BKR dan BKL

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan mulai sejak dini, sejak anak masih berada dalam kandungan ibunya sampai usia lanjut. Kehadiran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di tengah-tengah kehidupan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.96
Jumlah Kelompok BKB, BKR dan BKL di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelompok Kegiatan BKB	55	63	68	63	60
2	Kelompok Kegiatan BKR	22	25	31	27	37
3	Kelompok Kegiatan BKL	26	27	37	40	48

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2. Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti program Keluarga Berencana pada tahun 2015 mencapai 79,13 persen menurun di tahun 2020 menjadi 76,47 persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB (orang)	2.222	2.236	2.425	2.541	2.443	2.366
Jumlah anggota kelompok BKB (orang)	2.808	2.808	3.266	3,307	3,011	3,094
Persentase (%)	79,13	79,63	74,25	76,84	81,13	76,47

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikella dalam SIPD, 2021

3. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Ber-KB

Cakupan anggota BKR yang mengikuti program Keluarga Berencana tertinggi dicapai pada tahun 2016 yang mencapai 76,05 persen dan terendah tahun 2015 sebesar 63,05 persen.

Tabel 2.98
Cakupan Anggota BKR ber-KB di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	918	1.172	1.342	1.520	1.418	1.490
Jumlah anggota kelompok BKR	1.456	1.541	1.871	2.024	1.971	2.176
Prosentase	63,05	76,05	71,73	75,10	71,94	68,47

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber-KB

Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Adapun tujuan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Berikut gambaran anggota BKL yang ber-KB tahun 2015-2020:

Tabel 2.99
Cakupan Anggota BKL ber-KB di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB (orang)	632	735	636	749	834	865
Jumlah anggota kelompok BKL (orang)	1.971	2.045	2.161	2.278	2.476	2.411
Persentase (%)	32,06	35,94	29,43	32,88	33,68	35,88

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

5. Pemberdayaan Ekonomi UPPKS

Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui berbagai usaha, salah satunya adalah melalui Kelompok UPPKS. Oleh karena itu pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga melalui UPPKS diharapkan akan dapat menambah penghasilan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Tabel 2.100
Jumlah Kelompok UPPKS di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kelompok Kegiatan UPPKS	50	56	54	54	54	40

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

6. Cakupan PUS Peserta KB Mandiri Anggota UPPKS

Pada tahun 2015 jumlah anggota kelompok UPPKS yang mengkuti KB Mandiri mencapai 90,92 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 91,25 persen tetapi menurun lagi di tahun 2020 sebesar 84,16 persen, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Cakupan PUS Perserta KB Mandiri Anggota UPPKS
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	551	476	459	571	480	340
Jumlah anggota kelompok UPPKS	606	519	503	616	520	404
Persentase (%)	90,92	91,71	91,25	92,69	92,31	84,16

Sumber: DPPKB Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung, sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

A. Jumlah Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Sebagai daerah yang sedang berkembang dan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat bagian timur, Kota Cirebon telah dilengkapi dengan sarana perhubungan baik darat (terminal, stasiun Kereta Api), Bandara Cakrabhuana Penggung dan pelabuhan laut. Sebagai daerah transit kendaraan bus dari Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah (AKAP) dan bus antar kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon dilengkapi dengan sebuah terminal bus Harjamukti, dimana pada akhir tahun 2019 pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat pula terminal elf yang menghubungkan antara Kota Cirebon dengan kabupaten sekitar. Disamping terminal bus AKAP dan terminal Elf, Kota Cirebon juga memiliki Stasiun Kereta Api (Stasiun Kejaksan dan Stasiun Parujakan) yang menghubungkan Jakarta – Bandung – Cirebon – Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tabel 2.102
Jumlah Terminal, Bandara, dan Pelabuhan
di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Terminal	2	2	2	1	1	1
Jumlah Bandara	1	1	1	1	1	1
Jumlah Pelabuhan laut.	1	1	1	1	1	1
Stasiun Kereta Api	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dishub Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

B. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota

Cakupan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 cakupannya telah mencapai 85,00 persen dan terus meningkat di tahun 2017 menjadi 95,00 persen. Ketersediaan fasilitas transportasi sangat penting dalam upaya menciptakan kawasan tertib berlalu lintas yang harus dipatuhi

oleh setiap pengguna, sehingga diharapkan dapat mengurangi pelanggaran berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Tabel 2.103
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
1	*2*	*3*	*4*
Cakupan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	85,00	90,00	95,00
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	70,00	80,00	90,00

Sumber: Dishub Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2018

C. Jumlah Kendaraan Bermotor

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon dalam periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.104
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan	Banyaknya Kendaraan				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Mobil Penumpang	27.559	29.017	30.595	31.732	32.513
Bus	n.a	n.a	402	411	429
Truk/Mobil Barang	14.030	14.435	14.802	14.016	14.131
Sepeda Motor	139.621	147.861	157.014	142.467	142.362
J u m l a h	181.210	191.313	202.819	188.633	189.435

Sumber: Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Cirebon dalam periode tahun 2015-2017 mengalami peningkatan namun dari tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan. Tahun 2017 jumlah keseluruhan kendaraan bermotor sebanyak 202.819 unit tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan menurun di tahun 2019 menjadi 189.435 unit. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya jumlah kendaraan berupa truk sebanyak 786 unit. Pada tahun 2019 peningkatan terjadi hampir pada semua jenis kendaraan, sehingga tahun tersebut jumlah kendaraan menjadi 189.435 unit. Penambahan tersebut jika tidak diikuti dengan penambahan panjang jalan dan/atau pelebaran jalan, maka akan menimbukan titik-titik kemacaten lalu lintas di Kota Cirebon.

D. Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam upaya mengawasi dan memastikan kelayakan angkutan umum dan angkutan barang laik jalan, maka dilakukan pengujian kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memeriksa emisi gas buang *(smoke tester/ COCHC)* dan kebisingan *(noise tester)* yang merupakan salah satu laik jalan kendaraan bermotor. Data hasil pengujian kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.105
Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor
Tahun 2014-2020

Tahun	Kendaraan Uji (Unit)	Lolos Uji		Tidak Lolos Uji	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2014	24.726	24.645	99,67	81	0,33
2015	22.478	22.402	99,66	76	0,34
2016	21.319	21.268	99,76	51	0,24
2017	16.499	16.303	98,81	196	1,19
2018	16.623	16.361	98,42	262	1,58
2019	16.450	16.069	97,68	381	2,32
2020	15.182	15.182	99,60	61	0,40

Sumber: Dishub Kota Cirebon, 2021

Untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor tersebut, UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor telah dilengkapai dengan berbagai peralatan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.106
Alat Uji Mekanis, Peralatan yang Dimiliki dan Kondisinya
Tahun 2017

No.	Perlengkapan dan Alat Uji	Tahun Pengadaan	Kondisi	
			Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	*Carlift/Pitlift*	-	√	-
2.	*Wheel Suspension Tester*	2014	√	-
3.	*Axle Load Tester*	2013	√	-
4.	*Brake Slip Tester*	2013	√	-
5.	*Side Slip Tester*	2006	√	-
6.	*Speedometer Tester*	2006	√	-
7.	*Head Light Tester*	2006	√	-
8.	*CO/HC Tester*	2012	√	-
9.	*Smoke Tester*	2009	√	-
10.	*Sound Level Tester*	2014	√	-
11.	*Light Meter*	2014	√	-
12.	*Compressor*	2013	√	-
13.	*Generator Set*	2013	√	-

Sumber: UPTD Balai Pengujian kendaraan Bermotor, yang dikelola dalam SIPD, 2018

E. Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan data Satlantas Cirebon Kota tahun 2015 dan 2016, tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Cirebon mengalami penurunan kasus. Pada tahun 2015, kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 279 kasus menurun di tahun 2016 menjadi 185 kasus. Oleh karena itu, dalam upaya menurunkan terjadinya kasus kecelakaan/pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor secara aman dan tertib, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota terus memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang kedisiplinan dan ketertiban berlalu lintas, baik kepada anak sekolah, sopir angkot, sopir bus, dan tukang becak. Tabel 2.107 menggambarkan jumlah kecelakaan lalu lintas di lingkungan Polres Cirebon Kota.

Tabel 2.107
Jumah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Korban Meninggal, Luka Berat, dan Luka Ringan Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Insiden	Korban		
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	2015	279	90	93	96
2.	2016	185	66	72	47
3.	2017	367	96	n.a	437
4.	2018	312	73	n.a	288

Sumber: Polres Cirebon Kota, yang dikelola dalam SIPD, 2019

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan informasi masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi, khususnya yang bersifat terbuka (*public*). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dengan tegas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut, maka pemerintah pusat sampai daerah diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi, dan di setiap Perangkat Daerah ditugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringanin formasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan. Di Kota Cirebon telah dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bentuk pembinaan tersebut berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelola WEB bagi aparatur kelurahan dan kecamatan.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat Kota Cirebon telah memiliki *website* resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

A. Ketersediaan Website Milik Pemerintah Daerah

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi *digital, mobile, virtual* serta personal, dengan demikian kinerja lebih cepat dan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Cirebon selama kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika
di Kota Cirebon Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Website milik Pemerintah Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	40,00	45,00	n.a.	n.a.	n.a.
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	69,66	68,69	80,68	83,64	83,56
Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet	34,84	39,79	51,79	62,25	65,78
Persentase penduduk yang memiliki komputer/laptop pribadi	26,25	28,00	72,67	n.a.	n.a.
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan.	77,37	80,92	78,87	82,65	n.a.

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD-BPS, 2021
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD BPS, 2021

B. Penerapan Kota Cerdas *(Smart City)*

Smart city adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya dan komunitas yang ada, yang diwujudkan dalam strategi penyelesaikan masalah, pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan nyaman. Elemen-elemen *Smart City* terdiri dari *Smart Governance, Smart Branding, Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.*

Dalam upaya menuju Cirebon *Smart City*, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai *Smart City*, antara lain:

1. *Cirebon Wistakon*, aplikasi untuk pengembangan dan pemasaran wisata di Kota Cirebon;
2. *Cirebon Lengko* (layanan elektronik kesehatan *online*);
3. *Cirebon Brojol Aja Klalen* (Akte Langsung Jadi Kalau Lapor Lewat *Online*) dengan konsep *one day service*;
4. *Cirebon Sedulur* (Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan);
5. *Cirebon Sega Jamblang* (Sistem elektronik kepegawaian dan evaluasi kinerja secara gamblang);
6. *Sampean*, sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh ASN Kota Cirebon untuk mengecek dan mengevaluasi kehadiran pegawai melalui android;
7. *Portal Satin Cirebon Pasti Weru/ Cirebon Satu Data (CSD)*, yaitu penyajian informasi Kota Cirebon dalam satu portal;
8. *e-library/ iCirebon,* perpustakaan elektronik yang dapat diakses secara online oleh masyarakat;
9. *e-Presensi siswa*, yaitu sebagai kontrol kehadiran siswa di sekolah melalui sms ke orang tua;
10. *SP2D online*, yaitu pencairan dana secara otomatis ke rekening penyedia;
11. *SMS Blast*, pengumuman otomatis kepada pendatang yang masuk ke wilayah Kota Cirebon;
12. *e-Komoditas/ e-Tuku*, aplikasi yang mendata komoditas-komoditas di Kota Cirebon;
13. *e-Posyandu*, pendataan dan pengawasan balita dan batita di Kota Cirebon;
14. *e-Lowker/ Cirebon Lunga (Luru Lowongan Kerja)*, sebuah informasi dan pendaftaran lowongan pekerjaan secara *online;*
15. *Siduga* (Sistem Informasi Pengaduan Warga), dimana warga bisa membuat dan menyampaikan pengaduan secara online melalui aplikasi android;
16. *Cirebon Siaga 112,* layanan pelaporan dan pengaduan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, atau keadaan darurat lainnya;
17. *Cirebon Mata Hatiku (Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV-ku),* layanan pemantauan wilayah Kota Cirebon di berbagai titik melalui CCTV;
18. *Kantorkula,* layanan perkantoran maya untuk administrasi surat-menyurat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
19. *Siragaya (Sistem Informasi Cagar Budaya)*, layanan untuk informasi dan pendaftaran cagar budaya;
20. *PTSP Online,* layanan perijinan terpadu satu pintu secara online;
21. *Cirebon Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke),* layanan penanganan terpadu kekerasan terhadap anak dan perempuan;
22. *Kontes Curhat Cirebon (Konseling Tentang Segala Hal),* layanan untuk konseling dan atau konsultasi berbagai permasalahan kesehatan,

psikologi, hukum, agama dan sosial yang bisa dilakukan secara daring maupun luring;

23. *Dipandusobat (Digital Pemantauan Pengaduan Masalah Sosial Secara Akurat),* layanan pengaduan bantuan sosial secara daring;
24. *Sedulur (Sistem Elektronik Administrasi Kelurahan),* layanan administrasi terpadu di tingkat kelurahan secara daring;
25. *JDIH,* layanan dokumentasi dan informasi hukum terkait pertarungan perundang-undangan dan kebijakan di Kota Cirebon;
26. *SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi),* layanan untuk memantau dan mengevaluasi administrasi umum urusan pemerintahan di Kota Cirebon;
27. *e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Secara Elektronik),* layanan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Cirebon;
28. *Simasrekaman,* layanan manajemen retribusi pemakaman.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif di Kota Cirebon tahun 2019 sebanyak 247 unit koperasi dengan anggota aktif sebanyak 36.899 orang. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 240 unit koperasi aktif dengan jumlah anggota sebanyak 36.899 orang.

Tabel 2.109
Persentase Koperasi Aktif di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	*2018	*2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Koperasi:						
a. Aktif	Unit	219	236	236	240	247
b. Pasif	Unit	189	189	141	141	138
Jumlah anggota	Orang	25.280	28.341	25.635	36.899	36.899
Jumlah karyawan	Orang	400	408	385	418	418
Jumlah manager	Orang	18	36	21	21	21
Jumlah aset	Milyar	157.415,19	248.065,86	323.457	360.579,52	360.579,52
Jumlah Modal sendiri	Milyar	83.806,62	115.702,49	112.427	138.543,77	138.543,77
Jumlah Modal Luar	Milyar	48.593,37	141.711,44	188.025	194.500,76	194.500,76
Jumlah Volume Usaha	Millar	163.854,09	202.607,45	246.134	292.329,29	292.329,29
Jumlah SHU	Ribu	12.630,06	13.980,13	18.588.107	21.502,66	21.502,66

Sumber: Profil Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018
*Keterangan: *) Sumber: DPK-UKM Kota Cirebon, 2020*

B. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang cukup menggeliat akhir-akhir ini. Dukungan pemerintah pada usaha ini juga cukup besar. Usaha mikro dan menengah (UMKM) merupakan "Kegiatan ekonomi kerakyatan yang berskala kecil, dengan bidang yang mayoritas dalam skala kecil, sehingga perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat". Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok perorangan.

Tabel 2.110
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah UMKM	1.517	1.718	1.701	2.095	2.206

Sumber: DPK-UKM Kota Cirebon, Cirebon Satu Data, 2020

2.3.2.12 Penanaman Modal

Nilai investasi yang masuk di Kota Cirebon dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif, tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikkan, namun dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Cirebon belum stabil.

Pada tahun 2018 jumlah investor (PMDN)/PMA) yang ada di Kota Cirebon melalui pelayanan PMPTSP sebanyak 185 (serratus delapan puluh lima) investor (17 PMA dan 168 PMDN), dan pada tahun 2019 jumlah investor PMDN meningkat menjadi 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) investor.

Seiring dengan berkembangnya jumlah investor akan berbanding lurus dengan peningkatan investasi. Nilai investasi tahun 2017 meningkat menjadi Rp1.810.808.705.039,00 menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.862.100.214.039,00. Nilai investasi pada tahun 2017 merupakan nilai capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.111
Realisasi Investasi di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Investor:					
a. PMA	13	13	n/a	17	0
b. PMDN	6	6	n/a	168	437
Nilai Investasi (Milyar):					
a. PMA	640,248	504,946	7,900	0	0
b. PMDN	1.387,287	1.357,154	1.802,908	1.620,337	422,919
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,83	77,37	80,92	78,87	82,65

Sumber: DPM-PTSP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran kinerja kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah pemuda yang mendapat latihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, jumlah atlit yang dibina per tahun dari 12 cabang olahraga, dan kelompok olahraga yang berkembang di masyarakat.

Tabel 2.112
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Cirebon
Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
1	*2*	*3*	*4*
Jumlah pemuda mendapat pelatihan kepemimpinan	32	182	82
Jumlah pemuda mendapat pelatihan kewirausahaan	80	160	30
Jumlah atlit yang dibina/tahun dari 12 Cabor	96	96	96

Sumber: DKOKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2018

Berdasarkan data diatas, Jumlah terbanyak pemuda yang mendapat pelatihan kepemimpinan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 182 orang, namun pada tahun selanjutnya terjadi penurunan sebanyak 100 orang sehingga jumlah pada tahun 2017 berjumlah 82 orang. Begitu juga pada kategori pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 160 orang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 30 orang. Sedangkan untuk jumlah atlit yang dibina dari tahun 2015-2017 memiliki jumlah yang tetap, yaitu 96 orang.

Pada bidang olahraga, Kota Cirebon memiliki 86 klub olahraga yang terdiri dari 23 cabang olahraga pada tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah cabang olahraga meningkat menjadi 35 sehingga jumlah klub olahraga pun bertambah menjadi 151 klub olahraga. Tabel 2.113 menjelaskan jumlah klub olahraga di Kota Cirebon tahun 2018-2019.

Tabel 2.113
Jumlah Kelompok Olahraga Berdasarkan Cabang Olahraga
Di Kota Cirebon Tahun 2018-2019

No.	Cabang Olahraga	Tahun	
		2018	2019
1	*2*	*3*	*4*
1	Bola Voli	5	6
2	Bola Basket	10	11
3	Sepak Bola	12	15
4	Futsal	1	6
5	Sepak Takraw	1	0
6	Tenis	3	3
7	Tenis Meja	8	8
8	Bulu Tangkis	5	5
9	Billiard	6	6
10	Bowling	1	1

No.	Cabang Olahraga	Tahun	
		2018	2019
1	*2*	*3*	*4*
11	Renang	10	10
12	Tinju/Beladiri	1	1
13	Sepeda	5	8
14	Binaraga	1	1
15	Panahan	5	5
16	Gulat	5	5
17	Soft Ball	1	6
18	Base Ball	1	0
19	Tarung Derajat	1	1
20	Judo	1	1
21	Taekwondo	1	6
22	Pencak Silat	1	20
23	Olahraga Tradisional	1	1
24	Baseball	1	1
25	Aeromodeling	1	1
26	Selam	1	1
27	Atletik	2	2
28	Senam	2	2
29	Catur	6	7
30	Panjat Tebing	1	2
31	Muangthai	1	1
32	IMI	2	1
33	Drumband	5	5
34	Persirosi (Sepatu Roda)	1	1
35	Golf	1	1

Sumber: DKOKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus berupaya mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk tetap hidup dan ditumbuh ditengah arus globalisasi. Upaya yang dilakukan menginventarisir budaya-budaya Cirebon dengan menyelenggarakan event-event budaya Cirebon sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan kebudayaan Cirebon di tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Ajang Promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian, festival budaya, event budaya dan pawai budaya. Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Sektor Seni dan Budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya Tarik wisata terutama di bidang kebudayaan. Berkaitan dengan Kegiatan Kebudayaan di Kota Cirebon terlihat dalam kurun waktu tahun 2015-2019 berjumlah 72 buah benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, seperti yang terlihat pada Tabel 2.114 dibawah ini.

Tabel 2.114
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rasio benda cagar budaya yang direvitalisasi	22,05	23,52	29,41	n.a	n.a
Cakupan gelar seni	100	75	75	n.a	n.a
Jumlah sanggar seni	n/a	135	137	143	145
Tempat pentas seni	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	8 Sarana	8 Sarana
Misi kesenian dalam 1 tahun	3 kali	1 kali	1 kali	n.a	n.a
Jumlah Kota Pusaka	1	1	1	1	1

Sumber: DKOKP Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD: 2018, Cirebon Satu Data, 2020

2.3.2.15 Statistik

Indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat dari ketersediaan data dan informasi pembangunan yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

Tabel 2.115
Ketersediaan Data Kebutuhan Perencanaan Pembangunan di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Buku Kota Cirebon Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Profil Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Statistik Daerah Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku IPM Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Cirebon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Buku Indeks Kebahagiaan Penduduk Kota Cirebon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Data Kemiskinan Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Indikator Makro Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Profil Kesehatan Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Profil Pendidikan Kota Cirebon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Cirebon	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Berbagai Perangkat Daerah Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.2.16 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Dalam upaya mencerdaskan bangsa dan masyarakat Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memiliki 1 (satu) Perpustakaan Daerah sebagai sarana tempat belajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, temasuk bagi Aparatur Sipil Negara.

Tabel 2.116
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum (orang)	43.389	43.824	44.691	65.100	102.975
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Khusus (orang)	n.a	n.a	n.a	241	250
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sekolah (orang)	n.a	n.a	n.a	85.230	91.500
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perguruan Tinggi (orang)	n.a	n.a	n.a	9.180	10.950
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (orang)	43.389	43.824	44.691	159.751	205.675

Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 data pengunjung perpustakaan dibagi kedalam 4 kategori, yaitu pengunjung perpustakaan khusus, pengunjung perpustakaan umum, pengunjung perpustakaan sekolah dan pengunjung perpustakaan perguruan tinggi. Data jumlah pengunjung pada perpustakaan khusus, sekolah, dan perguruang tinggi baru tersedia sejak tahun 2018 di Perangkat Daerah pengampu. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 adalah sebanyak 159.751 orang, dimana jumlah pengunjung terbanyak terdapat di Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 65.100 orang. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada setiap perpustakaan di Kota Cirebon dengan jumlah pengunjung sebanyak 205.675 orang, dimana 102.976 orang merupakan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah. Angka tersebut dapat menggambarkan minat baca masyarakat Kota Cirebon semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Faktor yang turut mendongkrak meningkatnya minat baca masyarakat adalah gencarnya pembentukan kelompok-kelompok "Literasi" di masyarakat, sehingga tebentuk komunitas "*Gelem Maca"* di Kota Cirebon. Bahkan, Wakil Wali Kota Cirebon telah diangkat dan ditetapkan sebagai "Bunda Literasi".

B. Keanggotaan Perpustakaan

Tabel berikut menjelaskan bahwa keanggotaan perpustakaan daerah dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2015 anggota Perpustakaan Daerah sebanyak 4.088 orang meningkat pada tahun 2019 menjadi 11.737 orang atau bertambah sebanyak 7.649 orang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan ini tidak terlepas dari berbagai upaya Perangkat Daerah pengampu dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, seperti diadakannya lomba "berceritra" menggunakan bahasa daerah, diadakannya pelatihan ketrampilan pada hari-

hari tertentu bagi pengunjung perpustakaan, dan penataan ruang baca untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.117
Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Perkembangan jumlah anggota perpustakaan per tahun (orang)	4.088	4.173	6.179	8.353	11.737

Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

C. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Ketersediaan dan ketercukupan koleksi buku perpustakaan sangat berkaitan dengan minat pemustaka untuk berkunjung mencari informasi dan referensi buku yang diperlukan. Semakin lengkap dan banyak koleksi buku di perpustakaan, maka akan semakin menarik minat pemustaka untuk datang ke perpustakaan.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun. Dari tabel dibawah terlihat bahwa penambahan koleksi buku dari tahun 2016 ke tahun 2017 relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan koleksi buku dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang mencapai 1.500 buku, sementara dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya bertambah 651 buku. Namun pada tahun 2018 jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah menurun cukup drastis menjadi 10.504 judul.

Tabel 2.118
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota CirebonTahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	44.843	46.343	46.994	36.490	44.059

Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.2.17 Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengeloaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2) Menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3) Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4) Melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

5) Menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatus istem yang komprehensif dan terpadu;
6) Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7) Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan, dilaksanakan berbagai upaya melalui:

1) Penerbitan buku petunjuk teknis kearsipan yang ditinjau ulang secara berkala;
2) Bimbingan teknis kearsipan bagi Sumber Daya Manusia kearsipan (Arsiparis, Petugas Pengelola Arsip Dinas/Instansi/ Kecamatan/ Kelurahan);
3) Penambahan personil untuk mendukung kinerja penyelenggaraan kearsipan;
4) Pendidikan dan Pelatihan (diklat) pengelolaan kearsipan yang meliputi:
   a) Diklat kearsipan;
   b) Diklat penyetaraan;
   c) Diklat preservasi arsip;
   d) Diklat JIKN;
   e) Diklat Arsip media baru;
   f) Diklat Auditor kearsipan;

Dalam upaya penataan dan pengelolaan arsip secara baku dan profesional, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan hasil sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Di Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	9/52	12/52	15/52	6/31	6/31
Jumlah arsip vital dan arsip statis	872	986	1.184	8.182	10.768

Sumber: Dispusip Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pola pengembangan perikanan di Kota Cirebon adalah perikanan darat dan perikanan laut. Keberadaan Rumah Tangga Perikanan dengan berbagai investasinya di Kota Cirebon merupakan potensi sumberdaya perikanan yang sangat dominan dan sebagai penentu dalam pelaksanaan program

pengembangan usaha produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Pemerintah Daerah Kota Cirebon senantiasa menjaga stabilitas, tekad, gairah dan semangat untuk berusaha, serta ketrampilan penerapan teknologi rumah tangga yang ada dan pengembangannya bagi nelayan dan keluarganya.

Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2016 sebanyak 2.477,41 ton, produksi ini menurun sebesar -58,76 persen dari tahun 2015 sebanyak 4.216,18 ton, sedangkan untuk produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 sebanyak 21.379 ton.

Tabel 2.120
Produksi Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2015-2020

Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
1	*2*	*3*	*4*
2015	4.216,18	0	323,18
2016	2.477,41	0	355,86
2017	5.172,00	0	316,68
2018	3.397	0	162
2019	6.821	0	180,29
2020	6.003,475	0	206

Sumber: DPPKP Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.3.2 Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Sedangkan pariwisata itu sendiri sebagai salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan. Kota Cirebon sebagai kota yang memiliki keanekaragaman budaya mempunyai kesempatan untuk menjual atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Tinggi rendahnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia, termasuk Kota Cirebon memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor perekonomian, termasuk kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data yang ada, dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023 sebanyak 2,1 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2020, terealisasi sebesar 46,57 persen. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini diluar prediksi, mengingat dalam masa pandemi Covid-19 telah diberlakukan pembatasan-pembatasan pergerakan dan mobilitas penduduk untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus Covid-19.

Tabel 2.121
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Di Kota Cirebon Tahun 2015 – 2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Wisatawan Domestik	671.333	831.948	1.022.086	1.070.754	1.315.203	932.599
Jumlah Wisatawan Mancanegara	14.788	9.204	11.558	9.790	190.004	45.465
Total	686.121	841.152	1.033.642	1.080.544	1.505.207	978.064

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2019, BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

B. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dalam lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik pada suatu objek wisata akan meningkatkan pendapatan daerah. Konsumsi wisatawan cenderung akan meningkatkan output barang dan upah di sektor yang menjual barang maupun jasa kepada wisatawan. Konsumsi wisatawan akan menciptakan permintaan baik barang maupun jasa yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi baik barang maupun jasa yang secara otomatis akan memberikan nilai tambah kepada pendapatan regional khususnya Produksi Dometik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah.

Kota Cirebon memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal, terutama dengan adanya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabonan, Situs Gua Sunyaragi, dan lain-lain. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan event-event, promosi wisata, penyediaan sarana dan prasarana wisata, sehingga wisatawan dapat lebih mengenal objek wisata yang ada di Kota Cirebon dan tertarik untuk berkunjung.

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Kota Cirebon seperti yang ditunjukkan kontribusi sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisatawan yang datang ke Kota Cirebon tetap merasa nyaman.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Cirebon direpresentasikan melalui penyediaan akomodasi makan dan minum sebagaimana terlihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	5,14	5,23	5,29	5,36	5,37	5,10

Sumber: PDRB Kota Cirebon 2015-2019, BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.3.3 Pertanian

Rostow dalam Sukirno (1985) mengemukakan pentingnya peranan sektor pertanian dalam pembangunan karena penting dalam kesanggupan penyediaan bahan makanan yang cukup, sehingga terhindar dari bahaya kelaparan dan juga dapat menghindarkan penggunaan devisa impor barang-barang lain sehingga dapat digunakan untuk mengimpor barang lain yang lebih berguna untuk pembangunan serta dapat menunjang perkembangan sektor industri.

Kota Cirebon sebagai salah satu kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, mengalami pertumbuhan ekonomi dan penduduk karena migrasi yang cukup cepat. Pertumbuhan ini mengakibatkan luas lahan produktif pertanian setiap tahunnya menurun. Penurunan ini disebabkan beralih fungsinya lahan sawah menjadi daerah pemukiman dan lahan usaha. Meskipun demikian, adanya teknologi pertanian yang lebih maju seperti dalam bibit unggul dan pupuk menyebabkan produksi pertanian tetap meningkat meskipun luas lahan pertanian berkurang.

Kota Cirebon meskipun telah menjadi kota yang memfokuskan pengembangan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, namun pengembangan di sektor pertanian masih terus dilakukan. Hal ini karena beberapa wilayah di Kota Cirebon masih dimungkinkan untuk dikembangkannya sektor pertanian, disamping itu pula untuk meningkatkan pendapatan petani.

Jenis usaha pertanian yang dilakukan di Kota Cirebon terdiri dari pertanian tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, umbi-umbian, dan usaha perternakan, mulai dari sapi perah sampai itik. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cirebon dari tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan secara fluktuatif. Tahun 2015 kontribusinya sebesar 0,34 persen naik menjadi 0,35 persen pada tahun 2016, kemudian kembali mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 0,34 persen.

Tabel 2.123
Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Terhadap PDRB Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*7*
Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Terhadap PDRB	0,34	0,35	0,33	0,33	0,33	0,34

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2020, BPS Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sebagai sumber penerangan dan energi di sektor rumah tangga, bisnis dan industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Tahun 2019 pelanggan rumah tangga masih mendominasi sebagai pengguna energi listrik terbesar. Persentase penggunaan energi listrik oleh golongan pelanggan sosial, rumah, bisnis, dan industri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Golongan pelanggan lainnya, yaitu gedung pemerintah dan penerangan jalan umum mengalami penurunan persentase penggunaan.

Tabel 2.124

Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	91,46	91,46	93,41	89,42	88,07

Sumber: *BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020*

B. Pelanggan Gas Kota Cirebon

Jumlah pelanggan gas di Kota Cirebon tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rumah tangga pengguna gas alam sebanyak 15.957 pelanggan meningkat di tahun 2020 menjadi 28.968 pelanggan. Pada tahun 2019 Pemerintah telah membangun jaringan gas untuk 3.503 sambungan rumah (SR) di wilayah Kecamatan Harjamukti, yaitu di wilayah Suket Duwur, Surapandan, Kedung Krisik serta penetrasi di Kelurahan Argasunya, Kalijaga dan Harjamukti, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 rumah tangga pelanggan gas sudah mencapai 28.968 rumah tangga. Peningkatan tersebut sejalan dengan program pemerintah meningkatkan penyaluran pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga.

Tabel 2.125

Rumah Tangga Pengguna Gas di Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rumah Tangga Pengguna Gas (Rumah Tangga)	15.957	19.424	19.525	19.506	22.987	28.968

Sumber: *Statistik Daerah Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, BPS 2021*

2.3.3.5 Perdagangan

Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan perlu mendapat perhatian. Dalam teori basis ekonomi *(Economics Bases Theory)* mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Ekspor non migas merupakan penyumbang devisa dan telah membawa dampak kemajuan daerah terutama tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Dinas

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Cirebon, nilai ekspor non migas Kota Cirebon pada tahun 2018 mencapai Rp139.328.550.000,00 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp117.617.868.394,00. Ekspor yang terbanyak ke Negara tujuan Jepang, USA, China dan komoditi masih didominasi Rotan, Kayu dan *handycraft.*

Tabel 2.126
Nilai Ekspor Non Migas Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai Ekspor Non Migas Kota Cirebon	11,907,619.24 (USD)	8,913,110.93 (USD)	10.271.302,60 (USD)	139.328.550.000 (Rp)	117.617.868.394 (Rp)

Sumber: DPK-UKM Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap perekonomian, urusan sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kota Cirebon cukup signifikan. Sektor perdagangan bersama dengan sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kota Cirebon. Meskipun demikian, kontribusi sektor pedagangan terhadap perekonomian Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir kondisinya semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan mencapai 31,84 persen dari total PDRB, namun pada tahun 2020 kontribusinya turun menjadi 29,73 persen.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan, juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 2 (dua) lokasi. Sedangkan pembinaan terhadap pedagang dilakukan kepada pedagang formal dan informal.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; pemantauan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.127
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Cirebon	31,84	31,58	31,61	31,52	31,54	29,73

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2021, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.3.6 Perindustrian

Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan organik secara mekanik atau secara kimia, sehingga menjadi barang hasil baru, termasuk reparasi dan *assembling* (perakitan). Bahan-bahan organik dan anorganik berasal dari produksi primer yang disebut bahan mentah, misalnya karet, kayu, dan besi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator menilai hasil kegiatan pembangunan daerah. Dari hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat perkembangan sektor yang menjadi komponen struktur ekonomi.

Perkembangan industrialisasi di Kota Cirebon didominasi oleh industri pengolahan (makanan olahan dll). Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri Kota Cirebon mulai periode tahun 2015 sampai 2020 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami pelambatan dari 10,55 persen menjadi 10,21 persen di tahun 2020.

Tabel 2.129
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Cirebon
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	10,55	10,49	10,25	10,20	10,08	10,21

Sumber: PDRB Kota Cirebon 2015-2019, BPS , yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3.4 Unsur Pendukung Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat Daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Cirebon didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi manusia, 4) Bagian Administrasi Pembangunan, 5) Bagian Administrasi Perekonomian, 6) Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah, dan 9) Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun nilai AKIP Kota Cirebon pada tahun 2017 sudah mendapatkan nilai BB namun

masih perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.130
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahuan				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai AKIP	53,57 CC	8,71 B	9,89 B	10,25 B	9,57 B
Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari Rancangan Perda dan Rancangan PerWal	37,04	58,62	48,00	84,00	85,00
Persentase Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	0,00	45,00	45,00	80,00	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.5.1 Perencanaan

A. Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memiliki dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Dokumen tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025.

1) Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Untuk menjabarkan dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025, telah ditetapkan RPJMD periode 2018-2023 dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Dalam perjalanannya, RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023 mengalami revisi yang diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, diantaranya RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu, adanya wabah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan, perlu menyesuaikan kembali program-program pembangunan daerah beserta target pencapaiannya.

2) Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Daerah

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon.

Tabel 2.131
Regulasi Dokumen Perencanaan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2015-2020

No.	Jenis Dokumen Perencanaan	Penetapan	
		Peraturan Daerah	Peraturan Wali Kota
1	*2*	*3*	*4*
1.	RPJPD Kota Cirebon	Perda Nomor 9 Tahun 2008	-
2.	RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023	Perda Nomor 5 Tahun 2019	-
3.	RKPD Kota Cirebon:		
	a. RKPD Tahun 2015	-	Perwal Nomor 13 Tahun 2014
	b. RKPD Tahun 2016	-	Perwal Nomor 28 Tahun 2014
	c. RKPD Tahun 2017	-	Perwal Nomor 18 Tahun 2016
	d. RKPD Tahun 2018	-	Perwal Nomor 22 Tahun 2017
	e. RKPD Tahun 2019	-	Perwal Nomor 18 Tahun 2018
	f. RKPD Tahun 2020	-	Perwal Nomor 21 Tahun 2019

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2021

3) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Tabel berikut menggambarkan keselarasan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016-2020.

Tabel 2.132
Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Cirebon Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD (persen)	87,39	78,99	87,39	97,49	97,49

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.5.2 Keuangan

Didalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mengambil beberapa strategi antara lain akuntabilitas dan transparansi di berbagai bidang. Langkah-langkah strategis dan inovasi di dalam mengakselerasi kinerja aparatur pemerintah pada tingkatan paling tinggi sampai tingkatan paling rendah, perlu diupayakan dan dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang benar-benar solid dan dipercaya, sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah khususnya hasil pengawasan fungsional pemerintah serta sasaran pembangunan.

Tabel 2.133
Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Opini B P K	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase peningkatan PAD	7,16	13,5	5,49	-0,98	-2,81
Realisasi PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Persen)	22,79	26,44	31,93	30,95	28,14
Realisasi PAD terhadap Target PAD (Persen)	104,65	98,18	94,56	91,51	85,00
Realisasi Belanja Daerah terhadap Target (Persen)	88,11	87,93	90,00	90,68	91,24
Realisasi Belanja Langsung terhadap Target (Persen)	82,83	85,26	86,38	85,77	86,78
Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Target (%)	95,31	91,80	95,14	96,86	97,69

Sumber: BKD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD Tahun 2020

2.3.5.3 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Cirebon, maka peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan *"merrit system"* semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Cirebon dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik *(public servant).* Indikator kinerja dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha secara professional.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Pim untuk penyesuaian jabatan, menerapkan diklat Pra-Jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional.

Jumlah ASN di Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun 2015 jumlah ASN Kota Cirebon sebanyak 6.205 orang dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 4.812 orang, sehingga dalam 5 tahun terjadi penurunan jumlah ASN sebanyak 1.393 orang yang disebabkan karena memasuki usia pensiun dan/atau meninggal dunia.

Upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi kewajiban pemerintah daerah antara lain pengangkatan ASN, kenaikan pangkat, pembinaan, pemindahan, dan pemberhentian ASN Daerah sesuai Norma, Standar dan Prosedur (NSP) berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Gambaran kondisi dan indikator kinerja kepegawaian ditunjukan dalam Tabel 2.134.

Tabel 2.134
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cirebon
Menurut Golongan Tahun 2015-2019

No.	Golongan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Golongan I	80	80	55	34	27
2.	Golongan II	1.009	989	809	725	718
3.	Golongan III	3.640	3.561	2.910	2.804	2.931
4	Golongan IV	1.476	1.425	1.239	1.229	1.136
Jumlah		6.205	6.055	5.013	4.792	4.812

Sumber: BKPPD, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN dari tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut mengalami penurunan yang disebabkan tidak adanya penerimaan ASN baru, pada tahun 2019 jumlah ASN bertambah untuk kategori ASN Golongan III sebanyak 127 orang.

Selain data di atas, berikut adalah tabel indikator urusan kepegawaian Kota Cirebon yang menjelaskan persentase peserta Pendidikan dan Pelatihan (diklat), kenaikan pangkat, jumlah pensiun, dan persentase pelanggaran disiplin pada ASN di Kota Cirebon.

Tabel 2.135
Indikator Urusan Kepegawaian Kota Cirebon Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Pim II	3,20	2,70	0,50	1,20	2,70
Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	21,50	13,30	1,40	1,90	3,40
Prsentase Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	27,01	33,40	23,8	6,96	5,50
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis (orang	113	146	80	98	163
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional (orang)	25	3	14	23	21
Persentase ASN yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah ASN yang Pensiun (orang)	145	134	208	216	253
Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditangani	30,00	12,00	0,83	0,56	0,46

Sumber: BKPPD Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.3.6 Unsur Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindaklanjuti hasil temuan instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia auditor/tenaga pemeriksa yang memiliki kompetensi dan kapabilitas.

Selain itu, Kota Cirebon kedepan diharapkan mampu mewujudkan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut menindaklanjuti amanat pemerintah yang dituangkan melalui Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Kinerja pengawasan dan pengendalian oleh Inspektorat Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136
Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Perangkat Daerah oleh APIP Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Temuan *Government*	Tindak Lanjut					
		Selesai (S)	%	Dalam Proses (DP)	%	Belum (B)	%
2015	567	307	54,00	260	46,00	0	0,00
2016	736	267	36,00	469	64,00	0	0,00
2017	373	30	8,00	343	92,00	0	0,00
2018	530	107	20,00	423	80,00	0	0,00
2019	44	7	16,00	0	0,00	37	84,00

Sumber: IRDA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah temuan pada Perangkat Daerah oleh APIP di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon terjadi secara fluktuatif, temuan paling sedikit terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah temuan sebanyak 35 temuan. Dari temuan tersebut sebanyak 23 temuan atau 66,00 persen diantaranya telah selesai ditindaklanjuti, dan temuan yang dalam proses tindaklanjut sebanyak 12 temuan atau 34,00 persen. Sementara jumlah temuan terbanyak terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 89 temuan. Dari jumlah tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 temuan atau 17,00 persen dan yang dalam proses tindaklanjut sebanyak 74 temuan atau 83,00 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah temuan sebanyak 39 temuan, yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 18 temuan atau 46,00 persen dan yang dalam proses tindak lanjut sebanyak 21 temuan atau 54,00 persen. Dengan berkurangnya jumlah temuan, menandakan bahwa Perangkat Daerah dalam menjalankan masing-masing fungsi dalam pemerintahan Kota Cirebon sudah semakin tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga menggambarkan kualitas kinerja dari Perangkat Daerah semakin membaik.

Selain dari temuan APIP Kota Cirebon, berikut adalah tabel yang menjelaskan persentase tindak lanjut temuan BPK perwakilan Jawa Barat tahun 2015-2019.

Tabel 2.137
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Perwakilan Jawa Barat
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Temuan Government	Tindak Lanjut					
		Selesai (S)	%	Dalam Proses (DP)	%	Belum (B)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2015	55	16	29,00	16	29,00	23	42,00
2016	89	15	17,00	74	83,00	0	0,00
2017	35	23	66,00	12	34,00	0	0,00
2018	59	39	66,00	19	32,00	1	2,00
2019	39	18	46,00	21	54,00	0	0,00

Sumber: IRDA Kota Cirebon, Cirebon Satu Data yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan Non makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman. Non makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya

Dari data Statistik Daerah Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir rata-rata konsumsi per kapita penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan, yang semula Rp828.197 per kapita di tahun 2015 menjadi Rp1.495.050 pada tahun 2019.

Tabel 2.138
Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Komoditi
Dan Pola Konsumsi Penduduk Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jenis Pengeluaran (Rupiah)		T o t a l
		Makanan	Non makanan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	2015	387.141	441.056	828.197
2.	2016	n.a	n.a	n.a
3.	2017	n.a	n.a	n.a
4.	2018	540.484	631.400	1.171.884
5.	2019	673.891	821.159	1.495.050

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2016 dan 2020, yang dikelola dalam SIPD, BPS 2020

2.4.1.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur akan menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kota Cirebon secara umum sudah hampir merata di setiap wilayah, namun demikian untuk lebih meningkatkan inter-konektivitas antar wilaayah dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat terutama di wilayah selatan (Kecamatan Harjamukti) perlu lebih ditingkatkan lagi.

A. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan di Kota Cirebon digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (15,78km), Jalan Provinsi (10,10km), dan Jalan Kota (155,10km). Pada tahun 2019 kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai 151,195 km atau sekitar 77,97 persen dari total panjang jalan 193,91km.

B. Perhubungan

Kota Cirebon sebagai daerah yang menghubungkan baik antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar wilayah provinsi telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas perhubungan, baik darat, laut, maupun udara. Untuk fasilitas perhubungan darat, terdapat terminal Bus Harjamukti sebagai sarana yang menghubungkan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat maupun antar Provinsi. Selain itu juga tersedia Terminal Elf Dukuh Semar yang mengubungkan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Disamping itu, Kota Cirebon juga telah dilengkapi dengan Bandar Udara Cakrabhuana Penggung dan Pelabuhan Laut.

C. Penataan Ruang Daerah

Kota Cirebon telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 untuk periode tahun 2011-2031, sementara Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) masih dalam proses penetapan. Dokumen tata ruang wilayah ini dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi calon investor untuk berinvestasi di Kota Cirebon.

D. Fasilitas Keuangan

Kota Cirebon memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri dari bank umum yaitu Bank Jabar Banten, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank BCA, Bank CIMB, Bank UOB Buana, Bank Rabobank Internasional, Bank BTPN, Bank OCBC NISP , Bank Artha Graha, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Mega, Bank Ekonomi Raharja, Bank Victoria Syariah, *Bank Commonwealth*, Bank Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Himpunan Saudara 1906, Bank Niaga Syariah, Bank Mayapada, Bank Pundi Indonesia, dan BPR.

E. Air Bersih

Penggunaan air bersih di Kota Cirebon saat ini berasal dari sumber air Cipaniis Kabupaten Kuningan dan air bawah tanah (sumur gali terlindung, sumur bor). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cirebon, pada tahun 2019 Kota Cirebon memiliki 49.796 unit sarana perpipaan yang digunakan oleh 273.174 KK dan jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akses air minum sebanyak 298.717.

F. Asuransi

Perusahaan asuransi di Kota Cirebon berkembang cukup pesat dengan jenis layanan diantaranya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan dana pensiun.

G. Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tata boga atau catering. Sedangkan pengusaha usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Cirebon, saat ini banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan berbagai macam jenis makanan termasuk makanan khas daerah yang berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahaga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon pada tahun 2019 berjumlah 153 restoran dan rumah makan.

H. Akomodasi/Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi di daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan

wisatawan ke daerah tersebut, sehingga perlu diimbangi dan didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel yang memadai. berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahaga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon pada tahun 2019 terdapat 68 hotel.

2.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.2.1 Rasio Ketergantungan

Angka beban tanggungan *(dependency ratio)* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2019 sebesar 42,48 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggunagn sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,48 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun) sebesar 34,19 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (diatas 65 tahun) sebesar 8,26 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kota Cirebon masih dibebani tanggung jawab menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

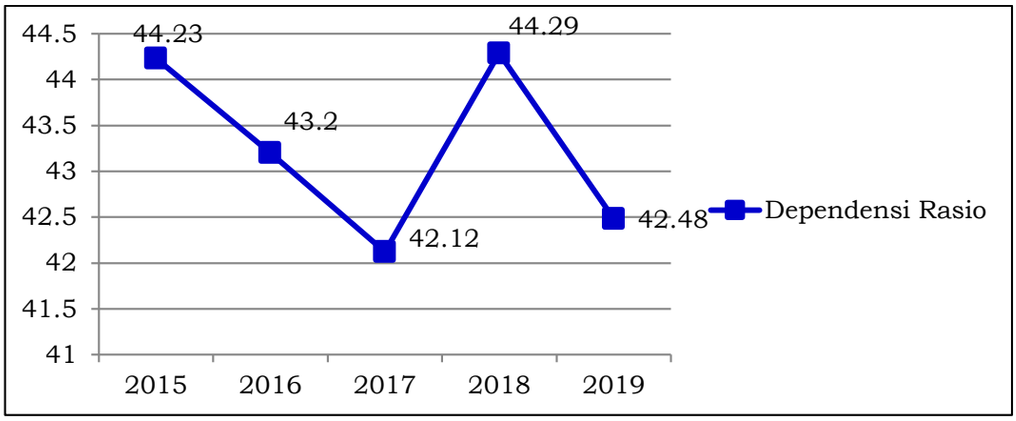
Tabel 2.139
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2019

Kelompok Umur	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
0 – 14	80.051	80.821	75.304	82.306	76.635
15 – 64	213.194	215.237	220.470	219.191	224.157
65 +	14.249	14.428	17.552	14.780	18.520
Angka Beban Ketergantungan	44,23	43,20	42,12	44,29	42,48

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2020

Berdasarkan data diatas berikut digambarkan grafik perkembangan angka beban ketergantungan (*dependency ratio)* Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Gambar 2.62
Dependensi Rasio Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2015-2019



Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka, BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.5 Aspek Pemenuhan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Realisasi capaian aspek pemenuhan pelayanan dasar tahun 2018-2020 disajikan dalam Tabel 2.140.

Tabel 2.140
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berparisipasi dalam PAUD	50,50	57,54	57,42
2.	Prosentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	60,00	65,00	75,00
3.	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi	50,00	50,56	61,06
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	100,00	100,00	101,75
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	85,00	87,00	89,91
6.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,00	0,00	0,00
7.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,00	0,20	0,03
8.	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik.	95,00	96,25	95,79

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
9.	Persentase pendidik pada jenjang SMP yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik.	96,00	97,72	94,04
10.	Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00
11.	Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00	100,00	100,00

Sumber: Disdik Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 2.141
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
	PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
1.	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	99,61	98,41	91,14
2.	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	99,96	97,85	92,85
3.	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	107,01	97,32	98,27
4.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,36	95,75	88,90
5.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,37	97,37	99,35
6.	Setiap warga negara usia 15 s.d. 59 ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	25,46	33,58	17,50
7.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar	62,60	92,59	88,73
8.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,15	57,31	89,07
9.	Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63,53	73,47	100,00
10.	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,59	100,00	100,00
11.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
12.	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	94,00	100,00	100,00
	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			
1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Keluarga Miskin	95,30	100,00	97,42
	PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB			
1.	Cakupan Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 jam	86,49	100,00	100,00
	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN			
1.	Strata mandiri RW Siaga Aktif	101,89	96,27	n.a.

Sumber: Dinkes Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 2.142
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari akses perpipaan dan non perpipaan	94,92	99,00	100,00
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,32	93,70	93,70

Sumber: DPRKP Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 2.143
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persen)	100,00	100,00	100,00
2.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.	100,00	100,00	100,00

Sumber: DPRKP Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 2.144
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2019-2020

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Tahun	
		2019	2020
1	2	4	5
1.	Setiap penyandang Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	n.a.	100,00
2.	Setiap penyandang Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti berhak mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti	n.a.	100,00
3.	Setiap penyandang Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti berhak mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	n.a.	100,00
4.	Setiap penyandang Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti berhak mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	n.a.	100,00
5.	Setiap Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota berhak mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota	n.a.	100,00

Sumber: DSPPPA Kota Cirebon yang dikeloa dalam SIPD, 2021

2.6 Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah dan saat ini Kota Cirebon memiliki 5 (lima) BUMD yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon;
2. Perusahaan Daerah Bank Cirebon;
3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon;
4. Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon; dan
5. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Cirebon.

2.6.1 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotapraja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 tentang Perusahaan Saluran Air Minum. Bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon yaitu penyediaan, pengolahan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan yang berada di Kota Cirebon, serta sebagian wilayah Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Kota Cirebon.

Sumber air yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon saat ini berasal dari Kabupaten Kuningan yaitu berupa Terowongan Paniis dan Sumur Pengumpul Paniis dengan ketersediaan Air Baku sebesar 1.061 liter/detik. Capaian kinerja PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon dalam periode tahun 2015-2019 disajikan dalam Tabel 2.145 dan Tabel 2.146.

Tabel 2.145
Neraca PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Aset**					
1.1	Aset Lancar	16.855.848.500,86	16.666.508.941,80	15.952.898.462,44	18.478.562.316,07	21.569.651.575,75
1.2	Aset Tidal Lancar	50.396.361.882,42	51.691.779.592,05	52.154.306.024,05	50.915.568.705,78	55.382.031.182,22
	Total Aset	**67.252.210.383,28**	**68.358.288.533,85**	**68.107.204.486,49**	**69.394.131.021.85**	**77.251.682.758,64**
2.	**Kewajiban**					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	17.027.935.951,63	14.591.480.933,33	10.637.809.611,93	13.091.272.128,81	12.067.725.684,53
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	19.714.977.752,78	18.424.428.872,78	21.817.758.349,00	20.138.651.096,00	18.416.538.920,00
2.3	Kewajiban Lainnya.	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	**36.742.913.704,41**	**33.015.909.806,11**	**32.455.567.960,93**	**33.229.923.224,81**	**30.484.264.604,00**
3.	**Ekuitas**					
3.1	Modal	2.928.503.758,31	2.928.503.758,31	2.928.502.758,31	2.928.503.758,31	2.928.503.758,31
	Penyertaan Pemerintah Kota Cirebon	43.511.184.940,14	43.511.184.940,14	43.511.184.940,14	22.236.110.872,14	27.236.110.872,14
	Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya			-	975.839.985,00	975.839.985,00
3.2	Cadangan Dana	11.520.447.078,30	11.520.447.078,30	15.875.514.399,26	16.445.651.804,09	16.445.651.804,08
3.3	Laba Ditahan	(30.420.210.169,79)	(29.554.863.801,58)	(31.297.195.069,27)	(11.165.653.084,97)	(7.270.336.085,38)
3.4	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.969.371.071,91	6.937.106.752,57	4.633.628.497,12	4.737.754.462,47	6.451.647.821,08
	JumlahEkuitas	**30.509.296.678,87**	**35.342.378.727,74**	**35.651.636.525,56**	**36.164.207.797,04**	**46.767.418.155,23**
	Total Kewajiban dan Ekuitas	**67.252.210.383,28**	**68.358.288.533,85**	**68.107.204.486,49**	**69,394,131,021.85**	**77.251.682.758,64**

Sumber: PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon yang dikeloa dalam SIPD, 2020

Tabel 2.146
Laba (Rugi) PDAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun (Rp.)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pendapatan (Biaya) Usaha					
1.1	Pendapatan Usaha	71.053.498.845,94	72.457.855.533,00	75.943.847.339,00	77.169.332.001,00	81.656.720.079,00
1.2	Biaya-biaya Usaha	(66.755.940.434,43)	(65.568.159.068,46)	(69.237.180.659,46)	(70.083.132.033,64)	(74.603.394.761,99)
	Laba (Rugi) Usaha	**4.297.558.411,51**	**6.889.696.464,54**	**6.706.666.679,54)**	**7.086.199.967,36**	**7.053.325.317,01**
2.	Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha					
2.1	Pendapatan Diluar Usaha	334.313.409,21	485.593.558,92	254.326.919,82	165.059.419,27	122.804.536,95
2.2	Biaya-biaya Diluar Usaha	(235.524.445,81)	(438.183.270,89)	(546.158.016,82)	(615.421.078,16)	(724.482.032,88)
	Laba (Rugi) Dim Luar Usaha	**98.788.963,40**	**47.410.288,03**	**(291.831.097,00)**	**(450.361.658,89)**	**(6.451.647.821,08)**
	Laba Sebelum Pajak	**4.396.347.374,91)**	**6.937.106.752,57**	**6.414.835.582,54**	**6.635.838.308,47**	**6.451.647.821,08**

Sumber: PDAM Tirta Girinata Kota Cirebon yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.6.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon didirikan pada tahun 1968 dengan nama Bank Pasar dan Desa Praja Cirebon, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tanggal 7 Juli 2014 dirubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon. Ijin Operasional didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.203/DKK/II/8/71 tanggal 13 Agustus 1971.

PD BPR Bank Cirebon merupakan satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Cirebon yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang kekurangan dana (*deficits spending units*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Cirebon merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai usaha simpan pinjam dengan tujuan untuk memberikan pinjaman bagi golongan ekonomi lemah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kegiatan utama yang dilaksanakan PD BPR Bank Cirebon adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan-tabungan (tabungan pasar-pasar, tabungan umum, tabungan debitur, tabungan simpati dan tabungan anak sekolah serta tabunganku) dan deposito berjangka (dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan).
2. Menyalurkan dana melalui kredit yang diberikan (kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif).

Adapun kinerja keuangan PD BPR Bank Cirebon disajikan pada Tabel 2.147 sampai dengan Tabel 2.152.

Tabel 2.147
Kinerja Keuangan PD BPR Bank Cirebon Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Total Aset	172.136.411.921	194.559.376.197	206.424.513.791	225.483.468.733	236.598.597.025
2.	Laba Kotor	4.630.653.339	4.673.784.942	2.792.346.098	2.783.329.689	1.505.602.855
3.	Laba Bersih	3.559.995.562	3.585.458.255	2.143.347.098	2.106.445.082	1.152.534.855
4.	PAD	1.557.907.040	1.779.997.781	1.792.729.128	238.060.285	576.267.428
5.	Modal Disetor	14.000.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000
6.	R O A	2,88%	2,59%	1,40%	0,29%	0,66%
7.	C A R	22,16%	22,16%	21,71%	20,57%	-
8.	L D R	77,50%	71,35%	75,87%	71,76%	-
9.	NPL Bruto	10,49%	11,94%	11,17%	11,91%	10,16%
10.	K A P	9,24%	10,13%	8,03%	8,03%	7,94
11.	PPAP	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
12.	BOPO	85,66%	86,02%	91,92%	98,81%	96,05%
13.	Cash Ratio	10,89%	11,42%	11,98%	6,76%	12,51%

Sumber: PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.148
Neraca PD BPR Bank Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Aset					
1.1	Kas	1.418.845.650	3.531.537.350	1.268.789.650,00	1.000.032.950	1.090.009.350
1.2	Pendapatan bunga yang akan diterima	1.967.647.505	2.065.695.115	2.505.350.970,20	2.538.646.827	2.745.221.330
1.3	Penempatan pada bank lain	48.263.772.328	55.583.974.056	55.631.795.407,59	72.893.063.304	51.433.250.446
1.4	Penyisihan kerugian PBL	(213.469.104)	(269.034.049)	(228.860.855,14)	(314.952.733)	(189.556.746)
1.5	Kredit yang diberikan	124.374.760.089	136.169.154.067	152.591.998.452,00	156.538.549.091	179.122.497.399
	Pendapatan Provisi ditangguhkan			(1.984.718.680,35)		
	Biaya transaksi			130.531.472,00		182.888.563
1.6	Penyisihan kerugian KYD	(5.037.764.603)	(4.195.468.954)	(5.721.929.983,49)	(9.556.126.763)	(12.513.524.440)
1.7	Aset tetap inventaris	2.990.067.453	3.305.000.452	2.595.035.602,50	2.736.956.603	2.804.539.502
1.8	Akumulasi penyusutan ATI	(1.793.995.265)	(1.827.843.260)	(981.724.698,00)	(1.309.977.473)	(1.591.937.102)
1.9	Aset tetap tidak berwujud	72.457.087	149.403.285	106.125.781,00	64.376.815	31.188.008
1.10	Aset lainnya	94.090.782	328.873.592	951.137.081,00	892.900.112	963.828.092
	Total Aset	**172.136.411.921**	**194.841.291.654**	**206.863.530.199**	**225.483.468.733**	**236.598.597.025**
2.	Kewajiban					
2.1	Kewajiban segera	1.442.756.453	1.302.719.571	744.661.281,45	1.976.554.392	1.483.619.298
2.2	Utang bunga	4.917.107.721	4.597.349.002	3.176.930.466,63	2.267.274.910	2.287.475.017
2.3	Utang pajak	860.657.777	1.091.161.000	-	-	-
2.4	Simpanan	143.943.264.646	166.099.754.027	179.132.523.752,82	199.168.800.421	207.654.158.851
	Kewajiban Imbalan Kerja				-	-
2.5	Kewajiban lain-lain	269.993.625	93.133.627	737.068.009,00	144.097.000	353.068.000

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Total Kewajiban	**151.433.780.222**	**173.184.117.227**	**183.791.183.509,90**	**203.556.726.723**	**211.778.321.166**
	Ekuitas	**20.702.631.699**	**21.657.174.427**	**23.072.346.689,41**	**21.926.742.010**	**24.820.275.859**
	Total Kewajiban dan Ekuitas	**172.136.411.921**	**194.841.291.654**	**206.863.530.199,31**	**225.483.468.733**	**236.598.597.025**

Sumber: PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.149
Laba/ (Rugi) PD BPR Bank Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pendapatan (Biaya) Usaha					
1.1	Pendapatan Usaha	18.408.317.237	17.314.796.102	18.050.911.378,26	33.323.109.471	36.306.890.948
1.2	Biaya-biaya Usaha	(13.828.325.137)	(12.807.186.388)	(15.310.816.776,09)	21.048.941.799	19.904.164.161
	Laba (Rugi) Usaha	**4.579.992.100**	**4.507.609.714**	**2.740.094.602,17**	**476.120.569**	**1.152.534.855**
2.	Pendapatan (Biaya) Di Luar Usaha					
2.1	Pendapatan Di Luar Usaha	174.171.214	248.643.686	201.389.291,62	249.558.333	141.259.513
2.2	Biaya-biaya Di Luar Usaha	(123.509.975)	(40.553.000)	(149.137.796,00)	(83.419.473)	(157.800.117)
	Laba (Rugi) Di Luar Usaha	**50.661.239**	**208.090.686**	**52.251.495,62**	**116.138.860**	**16.540.604)**
	Laba Sebelum Pajak	**4.630.653.339**	**4.715.700.400**	**2.792.346.097,79**	**640.681.734**	**1.505.602.855**

Sumber: PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.150
Perkembangan Simpanan Dana Pihak Ketiga Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tabungan Pasar	7.874.100.057	10.516.381.300	11.355.799.892	13.264.423.000	184.885.481.000
2.	Tabungan Umum	6.091.416.209	7.719.862.611	9.940.918.115	11.147.488.000	11.379.524.000
3.	Tabunganku	166.988.380	246.315.116	418.865.746	313.542	425.890.000
4.	Tabungan Anak Sekolah	114.014.260.000	126.065.195.000	129.639.440.000	135.291.847.000	140.044.440.000
5.	Deposito	15.796.500.000	21.552.000.000	27.777.500.000	39.151.500.000	39.660.000.000
	Total D P K	**143.943.264.646**	**166.099.754.027**	**179.132.523.753**	**199.168.800.000**	**207.654.159.000**

Sumber: PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon, yang dikeola dalam SIPD 2020

Tabel 2.151
Perkembangan Kredit Yang Disalurkan PD BPR Bank CirebonTahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Modal Kerja	23.976.263.364	31.179.596.711	36.306.662.034	-	-
2.	Investasi	34.488.793	34.511.727	35.000.000	-	-
3.	Konsumsi	100.364.007.932	104.913.149.734	116.250.336.418	-	-
4.	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Pasar	-	-	-	2.799.428.000	3.111.112.000
	Karyawan	-	-	-	107.223.043.000	121.833.880.000
	Umum	-	-	-	48.460.089.000	69.105.147.000
	Total Baki Debet	**124.374.760.089**	**136.127.258.172**	**152.591.998.452**	**158.482.560.000**	**194.050.136.000**

Sumber: PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.152
Kolektibilitas Kredit Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Lancar	112.982.479.992	121.573.554.445	135.541.131.368
2.	Kurang Lancar	1.647.454.167	4.316.498.133	1.590.953.587
3.	Diragukan	2.649.401.784	1.331.572.377	1.280.268.535
4.	M a c e t	8.938.958.967	10.831.565.931	14.179.644.962
	Total Baki Debet	**126.218.294.910**	**138.053.190.886**	**152.591.998.452**

Sumber: PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

2.6.3 Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon

Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon dibentuk melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kota Pradja Tjirebon tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kota Tjirebon, dengan kegiatan mengelola pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Cirebon.

Gambaran kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.153 dan Tabel 2.154.

Tabel 2.153
Neraca Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Altiva					
1.1	Aktiva Lancar	5.941.074.154,00	5.534.471.199,50	10.959.971.870,00	19.119.546.490,87	16.193.347.286,34
1.2	AktivaTetap (NilaI Baku)	1.874.949.463,00	2.195.405.722,00	68.867.263.538,00	72.472.979.632,69	80.626.625.955,69
1.2	Aktivalainnya	1.539.346.983,00	1.424.692.401,00	1.424.292.401,00	1.424.292.401,00	25.709.113,00
	Total Aktiva	**9.355.370.600,00**	**9.054.569.322,50**	**93.016.618.524,56**	**93.016.818.524,56**	**96.845.682.355,03**
2.	Pasiva					
	Kewajiban					
2.1	Kewajiban Lancar	177.386.865,00	76.100.000,00	154.035.748,00	233.183.845,00	291.787.748,72
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	4.921.984.326,00	4.366.805.563,00	9.244.430.311,00	20.458.535.979,00	23.828.768.951,24
	Jumlah Kewajiban	**5.099.371.191,00**	**4.442.905.563,00**	**9.398.466.059,00**	**20.691.719.824,00**	**24.120.556.699,97**
3.	Modal					
3.1	Modal dasar	74.532.498,00	74.532.498,00	74.532.498,00	74.532.498,00	74.532.498,00
3.2	Cadangan-cadangan	2.242.031.751,00	2.582.767.245,18	2.957.488.273,00	3.378.544.700,73	3.480.904.862,72
3.3	Penyertaan Modal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.4	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	439.435.159,00	454.364.015,32	501.033.979,00		
3.5	Modal Hadiah	-	-	160.340.000,00	160.340.000,00	160.340.000,00
3.6	Modal Donasi	-	-	66.659.667.000,00	66.659.667.000,00	66.659.667.000,00
	Jumlah Modal	**4.255.999.408,00**	**4.611.663.758,50**	**71.853.061.750,00**	**72.325.098.703,56**	**72.725.125.655,06**
	Total Pasiva	**9.355.370.599,00**	**9.054.569.321,50**	**81.251.527.809,00**	**93.016.818.527,56**	**96.845.682.355,03**

Sumber: PD Pasar Berintan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.154
Laba (Rugi) Perusahaan Umum Daerah Pasar BerintanTahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pendapatan/Beban Operasional					
1.1	Pendapatan Operasional	6.129.011.440,00	7.354.135.820,00	7.800.471.840,00	9.091.816.739,00	9.174.895.800,00
1.2	Pendapatan Operasional lainnya	206.500.000,00	256.200.000,00	543.200.000,00	300.700.000,00	1.411.200.000,00
	Jumlah Pendapatan	**6.335.511.440,00**	**7.610.335.820,00**	**8.343.671.840,00**	**9.392.516.739,00**	**10.586.095.800,00**
1.3	Beban Operasional	(5.308.541.313,00)	(6.224.208.731,75)	(7.775.789.549,00	(8.919.501.626,31)	(10.215.276.834,00)
	Laba/(Rugi) Operasional	1.026.970.127,00	1.386.127.088,25	567.882.291,00	473.015.112,69	370.818.966,00
2.	Pendapatan/Beban Non Ops.					
2.1	Pendapatan Non Operasional	324.859.803,00	322.366.401,05	226.887.738,00	382.281.594,97	481.404.593,34
2.2	Beban Non Operasional	(697.974.780,00)	(1.023.252.769,80)	(32.606.029,00)	(7.484.270,10)	(2.542.265,00)
	Laba/Rugi Non Operasional	(373.114.977,00)	(700.886.368,75)	194.281.709,00	374.797.324,87	478.862.328,34
	Laba/(Rugi) SebelumPajak	**653.855.150,00**	**685.240.719,50**	**762.164.000,00**	**847.812.437,56**	**849.681.294,34**

Sumber: PD Pasar Berintan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

2.6.4 Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Farmasi Cirebon Kota Cirebon, yaitu:

1) Unit Apotik Ciremai;
2) Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF);
3) Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
4) Unit Laboratorium Klinik Ciremai (LKC); dan
5) Unit Usaha lain di Bidang Farmasi.

Bisnis bidang farmasi adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sehingga persaingan bisnis inipun sangat ketat, oleh karena itu harus mampu untuk melakukan persaingan secara sehat. Adapun usaha di bidang farmasi yang tetap harus dilakukan oleh Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1) Apotek dan Alat Kesehatan, usaha ini dilakukan melalui:
   a) Penjualan Obat Bebas, penjualan yang dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan obat-obatan bebas, para bidan, UKS (sekolah), dan Puskesmas.
   b) Penjualan obat dengan resep, penjualan yang melayani resep dokter dari dokter praktek di lingkungan Perumda Farmasi Cirebon.
   c) Penjualan Kredit, melayani perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan Perumda Farmasi Ciremai dalam pelayanan apotek dan dokter, termasuk dengan BPJS Kesehatan.
2) Pedagang Besar Farmasi, melayani kebutuhan obat-obatan kepada apotek, klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit.
3) Laboratorium Klinik.
4) Membuka pusat penjualan obat-obat herbal.

Adapun kinerja keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Farmasi Ciremai disajikan dalam Tabel 2.155 dan Tabel 2.156.

Tabel 2.155
Neraca Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Aktiva					
1.1	Aktiva lancar	654.717.262,00	640.265.972,00	563.357.602,00	531.589.944,00	456.264.999
1.2	AktivaTetap (Nilai Buku)	3.659.683.685,00	3.651.501.669,00	3.189.806.304,00	3.357.035.215,00	268.247.594
1.3	Aktiva lainnya	-	-	10.616.880	0,00	-
	Total Aktiva	**4.314.400947,00**	**4.291.767.641,00**	**3.763.780.786,00**	**3.888.625.156,00**	724.512.593
2.	Pasiva					
	Kewajiban:					
2.1	Kewajiban Lancar	253.229.977,00	296.306.954,00	262.454.734,00	1.056.079.879,00	328.170.917
2.2	Kewajiban lainnya	37.839.557,00	59.071.071,00	-	0,00	617.952.045
	Equitas				(2.832.545.277)	398.783.604
	Jumlah Kewajiban	**291.069.534,00**	**355.378.025,00**	**262.454.734,00**	**3.888.625.156**	**726.954.521**
3.	Modal					
3.1	Modal Dasar (Ditempatkan)	5.549.941.839,00	5.549.941.839,00	5.549.941.839,00	5.549.941.839,00	-
3.2	Cadangan-cadangan	761.031.086,00	835.078.466,00	9.169.124	23.906.544,00	-
	Jumlah Modal	**6.310.972.925,00**	**6.385.020.305,00**	**5.559.110.963**	**5.573.848.383,00**	**-**
	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	185.118.451,00	24.124.274,00	38.782.652	67.030.416,00	1.396.941.636
	Akumulasi Kerugian	(2.472.759.963,00)	(2.472.759.963,00)	(2.096.567.563)	(2.808.333.522,00)	-
		(2.287.641.512,00)	**(2.448.630.689,00)**	**3.501.326.052**	**-**	**--**
	Total Pasiva	**4.314.400.947,00**	**4.291.767.641,00**		**3.888.625.156,00**	**-**

Sumber: PD Farmasi Ciremai Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.156
Perhitungan Laba (Rugi) Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai
Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Pendapatan (Biaya) Usaha			
1.1	Pendapatan Usaha	6.165.665.967,00	5.735.706.712,00	5.515.963.646,00
1.2	Potongan Uang R/	141.076.570,00	143.239.796,00	24.087.600,00
	Hpp	4.455.356.261,00	4.228.562.502,00	3.740.833.407,00
	Pendapatan Lain-lain	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	**1.569.233.136,00**	**1.363.904.414,00**	**1.751.042.639,00**
2.	Biaya-biaya			
2.1	Biaya Usaha	22.871.585,00	20.397.500,00	8.400.546,00
2.2	BiayaOperasional	1.059.972.838,00	1.160.340.959,00	1.681.882.831,00
2.3	Biaya Lain-lain	60.575.353,00	159.036.681,00	21.976.581,00
	JumlahBiaya	**1.143.419.776,00**	**1.339.775.140,00**	**1.712.259.958,00**
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**425.813.360,00**	**24.129.274,00**	**38.782.681,00**

Sumber: PD Farmasi Ciremai Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

2.6.5 Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Cirebon

Dalam pelaksanaan kegiatannya Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan, sehingga lebih jelas dan terarah. Adapun kegiatan usaha perusahaan meliputi:

1) Mengadakan sarana dan prasarana perusahaan termasuk pembelian aset perusahaan berupa pembelian kendaraan perusaaan dan pembangunan ruang kerja,
2) Mengupayakan kerja sama dengan pihak ketiga atau investor dibidang property sehingga dapat menunjang Pendapatan Perusahaan,
3) Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berusaha menyelesaikan berbagai masalah pertanahan aset Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang dihadapi dengan para pihak,
4) Menempuh pendaftaran hak atas tanah (sertifikat) agar mudah dalam pendayagunaannya.

Sesuai dengan Perda Pendirian PD. Pembangunan memiliki peluang usaha yaitu:

1) Mengelola tanah-tanah Pemerintah Kota yang dikuasainya dengan kewenangan merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Melakukan usaha perdagangan dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kinerja keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon, disajikan pada Tabel 2.157 dan Tabel 2.158.

Tabel 2.157
Neraca Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Aktiva					
1.1	Aktiva Lancar	14.414.379.975,00	13.455.214.628,00	-	18,304,512,373	19,638,622,002
1.2	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	250.284.692,00	250.289.000,00	-	619,834,227	1,006,927,174
1.3	Aktiva Lain-lain	2.893.310.800,00	3.008.310.800,00	-	1,173,650,000	1,169,950,000
	Total Aktiva	**17.557.975.467,00**	**16.713.814.428,00**	-	**20,097,996,600**	**21,815,499,176**
2.	Pasiva			**-**		
	Kewajiban			-		
2.1	Kewajiban Lancar	1.209.412.173,00	1.329.525.001,00	-	1,685,666,320	**1,585,087,780**
2.2	Kewajiban Lainnya	10.691.933.427,00	9.718.637.918,00	-	5,382,403,983	**6,141,023,419**
	Jumlah Kewajiban	**11.901.345.600,00**	**11.048.162.919,00**	-	**7.068.070.303**	**7.726.111.199**
3.	Modal			**-**		
3.1	Modal Dasar (Ditempatkan)	3.239.534.267,00	3.239.534.267,00	-	-	-
3.2	Cadangan Tujuan	992.761.066,00	1.059.749.773,00	-	-	-
3.3	Cadangan Umum	1.089.390.997,00	1.156.379.704,00	-	-	-
3.4	Laba (Rugi) TahunBerjalan	334.943.537,00	209.987.765,00	-	-	-
	Jumlah Modal	**5.656.629.867,00**	**5.665.651.509,00**	**-**	**-**	**-**
	Total Pasiva	**17.557.975.467,00**	**16.713.814.428,00**	**-**	**27.166.066.903**	**29.541.610.375**

Sumber: PD Pembangunan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Tabel 2.158
Perhitungan Laba/(Rugi) Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pendapatan (Biaya) Usaha					
1.1	Pendapatan Usaha	1.925.599.293,00	1.913.761.593,00	-	-	-
1.2	Biaya-biaya Usaha	(1.639.843.271,00	(1.775.542.262,00)	-	-	-
	Laba (Rugi) Usaha	**285.756.022,00**	**138.219.331,00**	**-**	**5,688,955,534**	**7,911,239,776**
2.	Pendapatan (Biaya) Dim Luar Usaha					
2.1	Pendapatan di Luar Usaha	107.499.790,00	128.355.322,00	-	27,859,928	14,757,570
2.2	Biaya-biaya di Luar Usaha	(58.312.275,00)	(56.586.889,00)	-	(272,113,752)	(263,899,743)
	Laba (Rugi) di Luar Usaha	**49.187.515,00**	**71.768.433,00**	**-**	**(249.142.173)**	**(244.253.824)**
	Laba Sebelum Pajak	**334.943.537,00**	**209.987.764,00**	**-**	**1,806,763,042**	**2,303,642,980**

Sumber: PD Pembangunan Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

2.7 Aspek Kerjasama Daerah

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam periode tahun 2015-2017 telah melakukan berbagai kerjasama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.159.

Tabel 2.159
Kerjasama yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kerjasama Antar Daerah	0	1	5	1	5
Kerjasama dengan Pihak Ketiga	9	8	31	28	33
Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri	0	0	0	0	0

Sumber: Setda Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

Sementara itu, pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai kerja sama, baik kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga sebagai berikut:

A. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Kota Cirebon dengan pihak ke tiga adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Binaan Kota Cirebon Nomor 690/Perj.1-DPUPR/2018 tanggal 4 Januari 2018;
2) Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Cirebon tentang Penerimaan Pajak Daerah. Nomor: 014/crb-psv/2018 dan Nomor 970/NK.2-BKD/2018 tanggal 4 Januari 2018;
3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. WOOLU AKSARAMAYA tentang Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Digital CIREBON, Nomor: 55.4/KB.4-DKIS/2018 dan Nomor 128/MOU-CIREBON/AM/I/2018 tanggal 8 Pebruari 2018;
4) Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Charuban Reka Buana tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Aset Gedung Wanita Kota Cirebon tanggal 9 Pebruari 2018;
5) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk

Rumah Tangga di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, Nomor 540/NK.7-Adm.Perek/2018;

6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Nomor 119/KB.7-Huk.Ham/2018 dan Nomor B-446/O.2.11/63/03/2018 tanggal 6 Maret 2018;
7) Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Nomor: 420/KB.9-BPPPD/2018 dan Nomor: 307/REK/UNTAG/V/2018 tanggal 28 Mei 2018;
8) Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nomor 210/STF/YPIB/V/2018 dan Nomor: 420/KB.10-BPPPD/2018 tanggal 28 Mei 2018;
9) Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Nomor B.035/STIKKU/MoU/V/2018 dan Nomor: 420/KB.11-DINKES/2018 Tanggal 28 Mei 2018.
10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Bentani Permai Hotel tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon. Nomor: 560/KB.12-DISNAKER/2018 dan 001/PGA/BHR/VII/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Arteri Daya Mulia tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon. Nomor 560/KB.13-DISNAKER/2018 dan 001/ARD-VII/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Mulia Putri Lestari (Hotel Aston) tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon. Nomor: 560/KB.14-DISNAKER/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
13) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan *PT. House Of Rattan* tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon, Nomor 560/KB.15-DISNAKER/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
14) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Sumber Kasih tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon, Nomor 560/KB.16-DISNAKER/2018 Tanggal 11 Mei 2018;
15) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Tiaramas Rona Gemilang tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon, Nomor 560/KB.17-DISNAKER/2018 tanggal 11 Mei 2018;
16) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Ifan Margatama tentang Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kompetensi Tenaga Kerja di Kota Cirebon, Nomor 560/KB.18-DISNAKER/2018 Tanggal 11 Mei 2018;

17) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Kepolisian Resor Cirebon Kota tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, Nomor 700/KB.19-IRDA/2018 dan Nomor B.1685/0.2.11/G5.1/07/2018 tanggal Tanggal 17 Juli 2018;
18) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Pelayanan Layad Rawat di Kota Cirebon. Nomor 440/KB.20-DINKES/2018 Tanggal 14 November 2018;
19) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk tentang Penggunaan Instalasi Standar Uji Meter Gas untuk Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang Meter Gas Diafragma, Nomor 542/KB.22-DPKUKM/2018 dan Nomor: 044000.PK/HK.02/BUI/2018 Tanggal 06 Desember 2018;
20) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk tentang Penggunaan Instalasi Standar Uji Meter Gas untuk Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang Meter Gas Diafragma, Nomor 542/PKS.24-DPKUKM/2018 dan Nomor: 045600.PK/HK.02/BUI/2018 Tanggal 18 Desember 2018;
21) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Institut Pertanian Bogor tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri, Nomor 420/KB.25-BPPPPD/2018 Tanggal 20 Desember 2018;
22) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Institut Teknologi Bandung tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri, Nomor 420/KB.26-BPPPPD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
23) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Universitas Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri, Nomor: 420/KB.27-BPPPPD/2018 Tanggal 20 Desember 2018;
24) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran Bandung tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri, Nomor 420/KB.28-BPPPPD/2018 Tanggal 20 Desember 2018;

25) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis dan Agroindustri, Nomor 420/KB.29-BPPPPD/2018 Tanggal 20 Desember 2018.

B. Kerjasama Dengan Daerah Lain

Kerjasama Daerah yang sudah dilaksanakan dan sampai sekarang berjalan dengan baik adalah melalui Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama yang beranggotakan terdiri dari sembilan Kota dan Kabupaten di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah perbatasan antar kota/kabupaten dan antar provinsi melalui perencanaan pembangunan di daerah perbatasan. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2018 telah menyelenggarakan beberapa Kerjasama dengan dengan daerah lain, yaitu:

1) Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon tentang Pembagian Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 973/970/PKS.8-DKIS/2018 Tanggal 6 Maret 2018;
2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat tentang Penyelenggaraan JABAR MASAGI. Nomor 420/KB.21-DISDIK/2018 Tanggal 05 Desember 2018;
3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat tentang Kerjasama Penyelengaraan Perpustakaan, Nomor 040/KB.23-DISPUSIPDA/2018 Tanggal 15 Desember 2018.

2.8 Capaian Kinerja RPJMD Kota Cirebon 2019

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat terlihat dari besarnya ketercapaian target pembangunan. Komponen pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 adalah Indikator Makro, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kemiskinan

Tabel 2.160

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun 2019		Tingkat Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Indikator Makro Pembangunan Kota Cirebon					
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,55	74,92	100,50
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,85	6,29	107,52
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,53	8,41	101,41
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,83	8,98	98,30
5.	Indeks Gini	Poin	0,40	0,43	92,00
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1.	Pendapatan per Kapita	persen	71,47	74,288	103,47
2.	Indeks Daya Beli	poin	73,15	**)	**)
3.	Rata-rata Lama Sekolah /RLS	tahun	10,19	9,90	97,50
4.	Harapan Lama Sekolah/ HLS	tahun	13,43	13,11	97,62
5.	Angka Usia Harapan Hidup/AHH	tahun	71,92	72,13	100,29
6.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	99,01	93,5	94,5
7.	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	poin	75,53	75,53	100,00
8.	Indeks Pembangunan Gender/IPG	poin	94,20	94,35	100,20
9.	Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan	persen	31,86	31,57	99,08
10.	Skor Pola Pangan Harapan/ PPH	poin	79,90	84,00	105,14
11.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	100,00
12.	Konflik Antar Umat Beragama	kasus	0	0	100,00
13.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	persen	71,81	53,69	74,77
14.	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	60,00	71,21	118,33
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH	poin	45,0	51,96	115,47
16.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	persen	2,80	3,85	137,50
17.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	poin	62,00	76,70	123,70

Sumber: LKIP Kota Cirebon Tahun 2019

***) Indeks Daya Beli sudah tidak dihitung oleh BPS dan diganti dengan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan.*

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1.	Pertumbuhan PDRB AdHb	Persen	7,93	8,42	n.a	n.a
2.	Pertumbuhan PDRB AdHk	Persen	5,79	6,01	5,28	5,28
3.	Laju Inflasi	Persen	4,36	2,80	2,00	1,16
4.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	63,26	68,42	73,61	72,72
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM	Poin	74,00	74,35	74,92	74,89
6.	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	30,19	28,03	26,80	30,61
7.	Garis kemiskinan	Rupiah	392.725	407.297	444.574	457.954
8.	Persentase penduduk miskin	Persen	9,66	8,88	8,41	9,52
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,68	0,95	0,96	4,38
10.	Angka Melek Huruf	Persen	97,40	99,81	100,00	100,00
11.	Indeks Gini	Poin	0,411	0,432	0,408	0,421
12.	Rata-rata Lama Sekolah/ RLS	Tahun	9,88	9,89	9,90	9,91
13.	Harapan Lama Sekolah/ HLS	Tahun	13,08	13,09	13,11	13,12
14.	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,385	1,385	1,566	1,642
15.	Angka Harapan Hidup/ AHH	Tahun	71,86	71,99	72,13	72,26
16.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	99,84	100,00
17.	Cakupan kelurahan siaga aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,00	99,00	93,53	97,04
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	Persen	66,45	68,03	62,71	63,75

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,29	9,06	9,04	10,97
21.	Tingkat Kesempatan Kerja/TKK	Persen	n.a	90,94	91,02	89,03
22.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Poin	84,00	n.a	80,00	77,75
23.	Rasio PAD terhadap Penerimaan dan Pendapatan pemerintah	Rasio	29,51	29,51	29,06	27,04
24.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Skor/Nilai	77,80	78,90	90,20	90,20
26.	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ hari	33,42	33,00	33,47	n.a
27.	Penguatan cadangan pangan	Persen	n.a	n.a	27,62	54,85
28.	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
29.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	0,33	0,33	0,33	0,34
30.	Peningkatan produksi pangan asal ternak:					
	• Daging Sapi	Kg	235,731	155.00	435.999	504.414
	• Daging Babi	Kg	91.011	65.000	94.315	98.851
31.	Peningkatan PDRB dari sektor Pariwisata	Persen	5,31	5,47	5,37	5,10
32.	Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	31,74	31,74	31,43	29,73
33.	Peningkatan PDRB dari sektor Industri	Persen	4,52	4,52	10,08	10,21
34.	Pertumbuhan Industri	Persen	4,52	4,73	n.a	n.a
35.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	2	na	2	0
36.	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	50,00	50,00	46,30	61,11
37.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,94	93,94	94,35	94,39
38.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,23	73,97	77,86	77,86
39.	Persentase Obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	69,60	69,60	53,69	60,80
40.	Cakupan RW Siaga Aktif	Persen			96,27	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
41.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Poin	73,90	78,87	79,61	79,61
42.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kependudukan	Poin	77,28	78,00	80,00	77,75
II.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	P e n d i d i k a n.					
43.	Angka Partisipasi Kasar/APK:					
	PAUD	Persen	57,94	65,73	57,54	57,42
	SD/MI	Persen	111,37	130,66	149,94	112,71
	SMP/MTs	Persen	139,93	151,91	81,85	124,78
44.	Angka Partisipasi Murni (APM) :					
	SD/MI/Paket A	Persen	96,53	96,74	130,28	101,75
	SMP/SMPT/MTs/Paket B	Persen	82,72	113,99	59,12	89,91
45.	Angka Putus Sekolah :					
	SD/MI/Paket A	Persen	0,02	0,08	0,00	0,00
	SMP/SMPT/MTs/Paket B	Persen	0,02	0,26	0,20	0,03
46.	Angka Kelulusan :					
	SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
47.	Angka Melanjutkan Sekolah :					
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	118,65	110,21	111,33	108,83
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	118,02	113,73	100,00	100,00
48.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	20,06	40,25	55,10	55,10
49.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	20,48	40,25	28	29

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
50.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia 7-12 tahun (Per 10.000 penduduk)	Rasio	0,28	0,28	0,51	0,51
51.	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas terhadap Penduduk Usia sekolah SD/MI	Rasio	15,00	15,00	3,88	3,43
52.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia 13-15 tahun (Per 10.000 penduduk)	Rasio	13,70	13,70	13,70	13,70
53.	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas terhadap Penduduk Usia Sekolah 13-15 tahun	Rasio	12,00	12,14	12,14	12,14
54.	Persentase penduduk Melek Huruf Usia di atas 15 tahun	Persen	99,93	99,88	100,00	100,00
55.	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,74	94,88	96,25	95,79
56.	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,19	95,83	97,72	94,04
57.	Guru SD/MI yang Memenuhi Sertifikasi tenaga pendidik	Persen	48,42	50,41	48,15	43,03
58.	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Sertifikasi tenaga pendidik	Persen	53,41	66,06	53,38	54,22
59.	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi	Persen	n.a	n.a	50,56	61,06
60.	Prosentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Persen	n.a	n.a	65,00	75,00
61.	Akreditasi Sekolah Jenjang SD/MI :					
	Akreditasi A	Sekolah	26	27	30	95
	Akreditasi B	Sekolah	20	20	31	32
	Akreditasi C	Sekolah	114	114	111	1
62.	Akreditasi Sekolah Jenjang SMP/MTs :					
	Akreditasi A	Sekolah	10	10	19	31
	Akreditasi B	Sekolah	4	4	22	10

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Akreditasi C	Sekolah	30	30	1	1
63.	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Rasio	21,04	20,00	18	18,00
64.	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Rasio	19,63	18,00	18	16,00
65.	Terpenuhinya rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,31	32,31	30	30
66.	Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,77	32,77	36	36
67.	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata Pendidikan dasar	Rasio	22	22	32	32,00
68.	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	Poin	83,00	83,00	83,00	84,50
	K e s e h a t a n					
69.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	99,60	99,61	98,41	91,14
70.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	93,76	99,96	97,85	92,85
71.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99,53	104,86	97,32	98,27
72.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	92,75	92,75	97,75	88,90
73.	Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah	Persen	93,37	9758	97,37	99,35
74.	Pelayanan kesehatan usia subur	Persen	n.a	n.a	33,58	17,50
75.	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Persen	100,00	100,00	92,59	88,73
76.	Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar	Persen	100,00	100,00	57,31	89,07
77.	Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus sesuai srandar	Persen	100,00	100,00	73,47	100,00
78.	Pelayanan kesehatan bagi ODGJ sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
79.	Pelayanan kesehatan bagi penderita TB, HIV-AIDS sesuai standar	Persen	99,40	99,40	100,00	100,00
80.	*Unmet need* pelayanan kesehatan	Persen	8,00	8,00	7,90	7,61

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
81.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	99,00	99,10	94,00	97,04
82.	Strata Mandiri RW Siaga Aktif	RW	247	248	96,27	96,57
83.	Persentase merokok pada penduduk umur di atas 15 tahun	Persen	n.a	33,80	4,08	33,80
84.	Persentase merokok pada penduduk umur di atas 18 tahun	Persen	7,20	5,40	0,00	5,00
85.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	99,84	100,00
86.	Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	Persen	83,78	82,77	81,21	72,95
87.	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif	Persen	50,00	60,15	64,38	72,84
88.	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	Persen	10,24	9,40	10,17	10,16
89.	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	10,70	10,20	12,70	9,50
90.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/ balita	Persen	13,41	10,10	9,60	8,95
91.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/ baduta	Persen	10,56	7,78	8,16	6,47
92.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Persen	4,73	3,32	9,60	8,95
93.	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	Persen	89,68	90,32	90,21	93,70
94.	Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat	Tatanan	5	5	5	5
95.	Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/ air minum memenuhi syarat	Persen	99,40	95,11	98,30	98,10
96.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	95,73	100,00
97.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar	Persen	94,30	94,30	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
98.	*Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	95,50	95,50	100,00	100,00
99.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA	Persen	90,00	90,00	110,00	
100.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	317	425	523	
101.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	90,00	90,00	34,00	
102.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	85,00	90,00	89,20	
103.	Prevalensi HIV-AIDs dari total populasi	Persen	>0,05	>0,05	< 0,05	
104.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDs	Persen	30,00	n.a	n.a	n.a
105.	Cakupan balita pneumonia ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
106.	Angka kejadian malaria	Permil	2	0	1	n.a
107.	Angka kematian akibat malaria	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
109.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
110.	Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00	100,00	n.a	100,00
111.	Deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	Persen	100,00	100,00	n.a	100,00
112.	Angka cacat tingkat 2	Persen	0,00	0,00	14,00	n.a
113.	Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah	Persen	50,00	52,76	n.a	38,00
114.	Cakupan Balita Stunting mendapat pelayanan pemantauan pertumbuhan	Persen	100,00	100,00	n.a	100,00
115.	Tempat-tempat Umum memenuhi syarat kesehatan	Persen	94,34	97,36	93,50	93,50

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
116.	Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	Persen	79,39	87,80	83,59	83,05
117.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	85,77	85,77	87,00	93,50
118.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persen	<0,05	<0,05	< 0,05	< 0,05
119.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00
120.	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% *Case Detection Rate*/ CDR)	Persen	n.a	n.a	179,00	82,00
121.	Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati (*Case Notification Rate*/ CNR) per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	317	425	523	307
122.	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% *Succes Rate*)	Persen	n.a	n.a	89,20	61,61
123.	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	Persen	45,00	45,00	42,00	82,00
124.	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% *Succes Rate*)	Persen	n.a	n.a	49,00	75,00
125.	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	Persen			35,00	47,00
126.	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	Kasus	993	1.364	1670	981
127.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	317	425	523	380
128.	Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional	Persen	0,00	0,00	48,00	88,00
129.	Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua	Persen	45,00	45,00	32,00	28,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
130.	Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB	Persen	86,00	90,00	49,00	100,00
131.	Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang	Persen	15,00	15,00	50,00	35,00
132.	Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
133.	Cakupan penemuan kasus TB anak	Persen	106,00	100,00	121,00	89,00
134.	Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	Persen	0,00	0,00	12,00	9,00
135.	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	Persen	7,60	8,00	12,00	15,00
136.	Peningkatan pembinaan lanjut usia	Persen	60,26	51,44	50,00	n.a
137.	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
138.	Cakupan industri rumah tangga yang dibina	Persen	10,80	n.a		22,00
139.	Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat	Persen	85,00	85,20		90,00
140.	Cakupan pengawasan *post market*	Persen	86,00	2 kali		90,00
141.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	96,00	99,61	100,00	
142.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,05	100,53	112,87	
143.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	93,76	99,96	98,38	
144.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	95,36	99,41	97,25	
145.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	99,53	104,86	112,80	
146.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	94,47	92,86	93,21	
147.	Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen	85,28	87,62	98,92	
148.	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100,00	100,00	100,00	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
149.	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	73,80	74,32	87,00	
150.	Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00	
151.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	15,40	15,40	21,46	15,40
152.	Cakupan pelayanan kesehatan 7 dimensi bagi lansia	Persen	51,44	n.a	n.a	12,52
153.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	100,00	n.a	12,52
154.	Penanganan KLB < 24 jam	Persen	100,00	100,00	99,48	
155.	*Acute Flaccid Paralysis/AFP* (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk ‹ 15 tahun	Kasus	4	4	0	
156.	Proporsi kematian akibat keracunan	Persen	0,00	0,00	0,00	
157.	Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri	Persen	0,00	0,00	0,00	
158.	Angka bebas jentik	Persen	95,00	95,00	-	
159.	B O R (Rumah Sakit Gunung Jati)	Persen	58,90	n.a	65,54	
	L O S	Hari	3,4	4,14	4,30	
	T O I	Kali	1,00	2,41	1,10	
	B T O	Kali	37,45	56,35	37,45	
	G D R	Persen	38,00	68,00	78,18	
	N D R	Permil	24,00	43,00	56,84	
160.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin	Persen	100,00	100,00	85,01	100,00
161.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
162.	Proporsi peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD)	Persen	100,00	100,00	56,00	100,00
163.	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Strata	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
164.	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	Persen	100,00	100,00	99,20	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
165.	Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
166.	Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Persen	9,87	10,00	51,00	40,00
167.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
168.	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Orang	69	48	67	45
169.	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	n.a	30	19	20
170.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Persen	n.a	n.a	1,80	1,77
171.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen	n.a	n.a	0	1,7
172.	Tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	90,61	n.a
173.	B O R (Tingkat Kota/Dinas Kesehatan)	Persen	58,90	58,90	60,6	42,09
	L O S	Hari	3,7	3,4	3,2	2,3
	T O I	Kali	2,5	1,0	2	5,14
	B T O	Kali	60,39	37,45	70,7	10,92
	G D R	Permil	38,07	38,00	35,1	14,84
	N D R	Permil	24,07	24,00	15,8	5,69
174.	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompetensi	Persen	56,00	56,00	25,75	n.a
175.	Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	79,00	82,50	79	100,00
176.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang/Km2	n.a	67	n.a	11,03
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
177.	Persentase drainase kondisi baik	Persen	70,00	70,17	71,00	75,00
178.	Jalan mantap kondisi baik	Persen	87,00	89,00	81,00	92,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
179.	Meningkatnya jalan mantap	Persen	n.a	n.a	81,00	
180.	Trotoar kondisi baik 100% (10,5 km)	Persen	n.a	n.a	81,00	
181.	Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit)	Unit	n.a	n.a	1	
182.	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	Persen	0,20	0,35	0,90	1,1
183.	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	n.a	n.a	100,00	100,00
184.	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	74,00	100,00	1,40	100,00
185.	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	75,00	100,00	100,00	100,00
186.	Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	n.a	n.a	0	0
187.	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	55,00	90,00	100,00	100,00
188.	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	10	8	2	2
189.	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik di tahun 2023).	Titik	22	1	0	0
190.	Persentase rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	92,82	90,00	100,00	90,00
191.	Persentase Cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	89,00	n.a	96,00	n.a
192.	Persentase luasan RTH publik yang bertambah	Persen	2,00	0,35	n.a	n.a
193.	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum/ Fasum	Lokasi	2	n.a	0	3

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
194.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	11,11	11,11	0	12,96
195.	Rasio jumlah rumah layak huni / jumlah penduduk	Rasio	0,1758	0,1758	0,0266	n.a
196.	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	9,00	n.a	8,81	32,62
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
197.	Konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0
198.	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3	Persen	99,00	99,20	100,00	0
199.	Cakupan rasio LINMAS	Persen	100,00	100,00	1 orang Per RT	100,00
200.	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	100,00	100,00	n.a	n.a
201.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
202.	Nol persen kasus SARA dan kasus terorisme	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
203.	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	n.a	150 orang	n.a	60,00
204.	Terlaksananya Koordinasi intelejen daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
205.	Cakupan petugas yang memilki sertifikasi penanganan bencana	Persen	n.a	50,00	98,00	n.a
206.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan	Orang	300	300	500	n.a
207.	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
208.	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulngan bencana	Orang	24	54	41	n.a
209.	Jumlah kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana	Kelurahan	0	0	22	22
210.	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	60,00	60,00	70,00	99,92
211.	Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat	Persen	61,00	61,00	75,00	27,11
212.	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	60,00	60,00	70,00	99,92
213.	Meningkatnya rasio tenaga teknis yang bersertifikat	Persen	61,00	69,45	75,00	27,11
214.	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen	52,00	52,00	52,00	100,00
215.	Rasio masyarakat yang dilatih dibagi jumlah penduduk	Rasio	1:570	1:570	1 : 437	n.a
	S o s i a l					
216.	Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PMKS	MoU	n.a	n.a	2	0,5828
217.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00
218.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
219.	Data Base Keluarga Miskin yang valid	Dokumen	1	0	0	2
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	Tenaga Kerja					
220.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	48,84	54,99	75,00	67,50
221.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	Persen	75,00	34,69	60,00	45,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
222.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	Persen	30,00	54,55	60,00	n/a
223.	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	49,60	47,09	30,00	47,50
224.	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	Kasus	10,08	5,27	8	6
225.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	60,00	56,50	60,00	61,00
226.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Persen	66,64	77,86	55,00	78,50
227.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda).	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
228.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Playanan Terpadu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
229.	Jumlah RW Layak Anak	RW	6	2	4,44	4,44
230.	Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	75,00	112,64	100,00	100,00
231.	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG, kelembagaan perlindungan perempuan.	Satgas PKDRT/ Persen	4; 100,00	4; 100,00	4	4
232.	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	PD/KK/Orang	3 PD; 100 KK; 25 orang PEKA	3 PD; 100 KK; 25 orang PEKA	3	3

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	P a n g a n					
233.	Ketersediaan energy dan protein per kapita	Kkal/kap/hari ; Gr/kap/ hari	E=2748 kkal/kap./ hari; 73,92 gr/kap./hr	3.598 kkal/kap/hr) 97,82 gr/kap/hr)	E= 3,669 kkal/kap/ hari; P= 94.88 gr/kap/hari	E= 3.598 kkal/kap/hr; P= 97,82 gr/kap/hr
234.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
235.	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
236.	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
237.	Penguatan cadangan pangan	Persen	25,00	45,00	27,62	54,85
238.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	80,10	77,80	90,20	90,20
239.	Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	Persen	93,97	94,65		
240.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	85,00	85,00	97,5	96,37
241.	Penurunan konsumsi beras	Kg/kap/hari	95,80	95,80	89,4	95,8
242.	Peningkatan konsumsi pangan hewani	Kr/kap/hari	39,10	39,10	38,3	43,6
243.	Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/kap/hari	125,75	125,75	202,4	231,3
244.	Peningkatan konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/hari	27,00	27,00	27,6	25,9
	P e r t a n a h a n					

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
245.	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	2	0	0	3
	Lingkungan Hidup					
246.	Prosentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	2,00	2,00	8,00	8,00
247.	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen			88,00	71,00
248.	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
249.	Prosentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00
250.	Operasional TPA/ TPST/ SPA di Kota Cirebon (Nilai Adipura TPA)	Skor	70,07	73,16	68,25	68,25
251.	Tersusunnya RPPLH Kota Cirebon	Ada/Tdk ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Ada	Ada
252.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada/tidak ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
253.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tdk ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Ada	Ada
254.	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	48,00	49,00	57,00	55,00
255.	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha dan dampak di daerah Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
256.	Prosentase peningkatan keanekaragaman hayati	Persen	18,75	18,75	31,25	31,25
257.	Prosentase luas lahan Konservasi	Persen	0,42	0,42	0,42	0,42

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
258.	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca/GRK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
259.	Prosentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki Kapasitas Adaptasi, Mitigasi dan Perubahan Iklim	Persen	2,82	3,22	4,00	4,00
260.	Indeks Kualitas Air	Poin	61,33	25,38	56,92	46,92
261.	Indeks Kualitas Udara	Poin	53,04	78,03	68,58	73,13
262.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	32,63	32,63	35,77	37,54
263.	Penetapan hak MHA	Kali	0	0	0	0
264.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	1	10
265.	Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada
266.	Meningkatnya jumlah even pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat	Kali/ tahun	1	1	6	1
267.	Meningkanya jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan	Persen	0,00	0,00	50,00	52,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
268.	Cakupan penerbitan KTP	Persen	95,00	95,00	99,00	99,00
269.	Cakupan penerbitan KK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
270.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	88,00	88,00	83,00	87,88
271.	Cakupan akta kematian	Persen	80,00	80,00	76,53	90,00
272.	Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan	Persen	10,00	10,00	13,00	10,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
273.	Tingkat perkembangan kelurahan Kota Cirebon :					

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kurang berkembang	Kelurahan	0	0	0	0
	Berkembang	Kelurahan	8	8	7	7
	Cepat berkembang	Kelurahan	14	14	15	15
	Kualifikasi Status Kelurahan:					
	Kecamatan Kesambi:					
274.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	1	0
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	1	1
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	3	4
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Pekalipan:					
275.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	2	0
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	2	0
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	4

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Kejaksan:					
276.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	2	4
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	2	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Harjamukti:					
277.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	1	1
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	3	3
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	1	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	1
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kecamatan Lemahwungkuk:					
278.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	1	2
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	2	1
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	1	1
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
279.	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina :					
	Wartek	Unit	22	22	22	22
	Kelompok	Kelompok	28	28	28	28
	Posyandu	Unit	331	331	331	331
280.	Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	RW	248	248	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya
281.	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam bantuan RW	RT	1.369	1.369	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
282.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Terlibat Dalam BSMSS dan BBGRM	LPM	22	22	22	22
283.	Keikutsertaan lomba kelurahan tingkat Provinsi/Nasional	Kelurahan	22	22	22	14
284.	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di Bina	Kelurahan	22	22	22	22
	Kecamatan Kesambi:					
285.	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan, bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah Kecamatan Kesambi.	Persen	98,31	98,31	100,00	100,00
286.	Rasio juara lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	Rasio	Juara III MTQ Kota Cirebon	97,58	5 Cabang 24 Orang	5 Cabang; 24 orang
287.	Cakupan posyandu strata mandiri	Persen	23,00	29,87	13,97	
288.	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Kesambi dan persentase masyarakat di Kec. Kesambi yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi.	Persen	97,18	97,18	100,00	100,00
289.	Jumlah atlet berprestasi/ jumlah prestasi olahraga	Atlet	1	1	1	1
290.	Persentase usulan hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir Musrenbang Kecamatan	Persen	99,27	70,00	100,00	100,00
291.	Rasio RW K3	Rasio	96,41	96,41	100,00	100,00
292.	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan	Poin	84,00	93,66	100,00	100,00
	Kecamatan Pekalipan:					
293.	Meningkatnya kondisi jalan dan saluran drainase	Persen	90,00	99,39	93,75	93,75
294.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
295.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Posyandu	Persen	Juara III Tkt Kota	97,54	90,00	90,00
296.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan se-Kecamatan Pekalipan	Persen	100,00	97,00	85,71	90,71
297.	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Kelurahan se-Kec. Pekalipan	Persen	100,00	99,02	100,00	100,00
298.	Terlaksananya program RW bersih di tingkat Kecamatan Pekalipan	Persen	82,15	81,28	100,00	100,00
299.	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kecamatan Harjamukti:					
300.	Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur	Persen	100,00	99,43	100,00	100,00
301.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
302.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Persen	98,15	98,15	71,91	76,35
303.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	Persen	99,24	99,24	100,00	100,00
304.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	93,35	93,35	82,86	84,00
305.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
306.	Terselenggaranya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kecamatan Kejaksan:					
307.	Meningkatnya kondisi drainase dan jalan perumahan dalam kondisi baik	Persen	98,44	98,81	100,00	100,00
308.	Berkembangnya wirausaha muda	Orang	n.a	n.a	100,00	100,00
309.	Cakupan LKK aktif	Persen	100,00	98,75	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
310.	Rasio RW K3	Rasio	97,34	99,17	100,00	100,00
311.	Lestarinya adat budaya daerah	Persen	85,00	99,87	67,00	70,25
312.	Peringkat MTQ tingkat Kota Cirebon	Peringkat	0	0	100,00	100,00
313.	Meningkatnya hasil Musrenbang Kec. yang diakomodir Musrenbang Kota	Persen	100,00	99,61	100,00	100,00
	Kecamatan Lemahwungkuk:					
314.	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/ bangunan fasilitas umum, dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan Lemahwungkuk.	Persen	100,00	99,00	53,44	53,44
315.	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan Posyandu di RW	Persen	95,00	100,00	83,00	100,00
316.	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk;	Persen	95,00	98,00	98,00	98,76
317.	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
318.	Terpeliharanya seni budaya daerah	TRW	IV	IV	IV	IV
319.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	92,35	95,00	100,00	100,00
320.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	79,00	75,00	95,00
321.	Terselenggaranya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Terselenggaranya pekan olahraga se-Kec. Lemahwungkuk	Persen	100,00	94,00	14,29	21,15
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
323.	Persentase Kampung KB	Persen	22,73	22,73	36,36	109,09

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
324.	*Current Use/* Pasangan Usia Subur	Persen	60,92	63,11	63,38	64,29
325.	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 persen	Persen	3,50	0,25	0,11	0,12
326.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	96,14	105,94	80,29	97,34
327.	Rasio akseptor KB	Rasio	14,97	14,95	13,44	12,08
328.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need*	Persen	23,02	20,11	20,06	18,99
329.	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif	Persen	26,94	26,44	26,27	26,20
330.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	n.a	25,81	27,58	27,58
331.	Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB	Persen	4,53	100,00	100,00	100,00
	P e r h u b u n g a n					
332.	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00
333.	Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
334.	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
335.	Jumlah rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,51	73,00	73,47
336.	Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,78	60,00	60,00
337.	Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,78	86,00	86,16
338.	Meningkatnya pendapatan dari Retribusi Parkir	Persen	73,44	73,44	62,00	46,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
339.	Rasio angkutan kendaraan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	Persen	0,31	0,31	0,31	0,30
340.	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	Rasio	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030
341.	Jumlah Uji Kir	Unit	12.202	12.202	15.638	9.735
342.	Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	Persen	19,00	19,00	0,73	0,73
343.	Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Komunikasi dan Informatika					
344.	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Perangkat Daerah	1	13	13	13
345.	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas	1	20	22	27
346.	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur Bidang Kominfo	Rasio	70,00	75,00	100	100,00
347.	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	70,00	75,00	100,00	98,88
348.	Terwujudnya kerjasama di bidang Kominfo	Persen	70,00	75,00	100,00	96,49
349.	Terpenuhinya infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	70,00	75,00	90,00	99,47
350.	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif, efisien dan murah	Persen	70,00	75,00	100,00	97,59
351.	Tersampaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat	Persen	60,00	65,00	80,00	99,06

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
352.	Tersedianya media komunikasi	Persen	70,00	75,00	100,00	98,53
353.	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	Persen	70,00	75,00	100,00	99,77
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
354.	Peningkatan pasar rakyat ber-SNI	Unit Pasar	0	0	0	n.a
355.	Updating data PKL di 5 Kecamatan	PKL	489	489	200	200
356.	Optimalisasi pelaksanaan PERDA PKL	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
357.	Tingkat pelanggaran PKL menurun	Persen	45,86	n.a	33,13	n.a
358.	Meningkatnya Jumlah PKL yang dibina	PKL	489	489	n.a	n.a
359.	Tercapainya peningkatan modal usaha UMKM	Persen	11,37	13,12	26,37	n.a
360.	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Unit	236	540	243	257
	Penanaman Modal					
361.	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	Jenis Investasi	0	0	1	n.a
362.	Meningkatnya nilai investasi (PMA/ PMDN)	Persen	n.a	n.a	1,00	n.a
363.	Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen	Poin	73,90	78,87	82,65	n.a
364.	Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	Perwal/ Kepwal	1	n.a	2	1
	Kepemudaan dan Olahraga					
365.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	2	2	2	0
366.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	50,00	50,00	46,3	61,11
367.	Sarana olahraga yang representatif	Persen	40,00	50,00	50,00	66,00
368.	Cakupan pembinaan olah raga	Persen	75,00	95,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
369.	Cakupan pelatih olah raga bersertifikasi	Persen	33,00	56,00	56,00	55,00
370.	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	17,00	31,00	31,00	30,00
371.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	3	6	2	18
372.	Jumlah prestasi cabang olahraga	Cabor	2	4	2	11
373.	Rasio organisasi pemuda terhadap penduduk usia pemuda	Rasio	1:1.681	1:1681	1 : 1.422	1 : 1.025
374.	Persentase wira usaha muda	Persen	50,00	50,00	0,00	27,00
	S t a t i s t i k					
375.	Meningkanya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Dokumen	5	5	1 CSD	1 CSD
	P e r s a n d i a n					
376.	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	Persen	50,00	2 dok	50,00	99,52
	K e b u d a y a a n					
377.	MoU kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	MoU	1	3	1	n.a
378.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	69,60	69,60	53,69	n.a
379.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Even	14	15	15	15
380.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	48	62	62	62
381.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	1	1	1	0
382.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Objek	6	10	7	10
	P e r p u s t a k a a n					
383.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,385	1,385	1.516	642

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
384.	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka	134.519	168.274	296.436	214.765
385.	Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun	Orang	24.785	37.483	30.708	n.a
386.	Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Unit	4 unit di RW dan 4 unit di Kelurahan	4 unit di RW dan 4 unit di Kelurahan	60 unit di RW; 1 unit di Kelurahan	n.a
387.	Jumlah pojok baca baru di area publik	Unit	0	0	5	10
	K e a r s i p a n					
388.	Sistem penyimpanan arsip sesuai standar; rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan	Dokumen	2	2	4	n.a
389.	Nilai audit kearsipan tingkat kota	Poin	74,09	77,09	83,18	n.a
390.	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	1.184	3.834	471	550
391.	Arsip yang terpelihara	Berkas	n.a	8.324	15.824	23.324
392.	Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	Persen	70,00	70,00	30,00	70,00
	URUSAN PILIHAN					
	Kelautan dan Perikanan					
393.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3% per tahun	Ton	5.172	3.397	6.821	6.003,475
394.	Meningkatnya produksi perikanan budi daya sebesar 3% per tahun	Ton	316,68	162	180,29	206
395.	Menngkatnya tingkat konsumsi ikan	Kg/kapita/ tahun	33,42	33,00	33,47	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	P a r i w i s a t a					
396.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 80%	Orang	1.033.642	1.080.544	1.505.207	568.571
397.	Meningkatnya lama kunjungan wisata	Hari	1	1	1	2
	P e r t a n i a a n					
398.	Akses pemasaran hasil olahan pertanian dan peternakan	Jenis hasil olahan	1	1	1	1
399.	Peningkatan produktifitas padi	Ton/ Hektar	4,70	5,30	5,9	6
400.	Peningkatan produksi pangan asal ternak :					
	• Daging Sapi	Kg	235.731	155.000	435.999	504.414
	• Daging Babi	Kg	91.011	65.000	94.315	98.851
401.	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan/ ternak	Ekor	500	420	539	530
	P e r d a g a n g a n					
402.	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	58,33	58,33	62,64	n.a
403.	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	67,00	69,00	65,00	100,00
404.	Cakupan wajib tera/ tera ulang dan alat UPTP	Persen	75,00	77,95	80,00	72,00
405.	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	31,74	31,74	31,57	n.a
	P e r i n d u s t r i a n					
406.	Meningkatnya pengenalan penjualan dan pemasaran produk UMKM	IKM	125	160	26	n.a
407.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persen	72,00	72,00	112,5	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
408.	Peningkatan PDRB dari sector perindustrian	Persen	10,29	10,29	10,17	n.a
	PENUNJANG PEMERINTAHAN					
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ SEKRETARIAT DAERAH:					
409.	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	45,00	45,00	80,00	100,00
410.	Persentase peta proses bisnis penyelengaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	0,00	0,00	0,00	32,00
411.	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
412.	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Dokumen	53	81	38	26
413.	Persentase penetapan dan pengundangan PERDA dan PERWAL dari Rancangan Perda dan Rancangan Perwal	Persen	58,62	48,00	84,00	75,00
414.	Aparatur Sipil Negara yang memiliki nilai jabatan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00
415.	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
416.	Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Pilar/titik	7	29	n.a	n.a
417.	Jumah draf rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan (Adm Kesra)	Dokumen	196	228	5	12
418.	Jumlah draf rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan (Adm Ekbang).	Dokumen	78	96	25	18
419.	Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang dan jasa	Persen	100,00	100,00	n.a	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
420.	Pengajian rutin bulanan dan mingguan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kali	204	252	12	n.a
421.	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen	49,00	82,00	75,00	n.a
422.	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/STQ tingkat Provinsi Jawa Barat	Cabang Musabaqoh	3	5	4	n.a
423.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Hari Besar	6	6	6	n.a
424.	Persentase telaahan Staf Ahli yang ditindaklanjuti	Persen	20,00	20,00	25,00	30,00
425.	Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada SBBD dan standar satuan harga barang/jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
426.	Nilai AKIP A pada tahun 2023	Skor	n.a	B	9,57	n.a
427.	Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistimatika berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persen	75,00	50,00	n.a	100,00
428.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Nilai	B	B	B	n.a
	SEKRETARIAT DEWAN:					
429.	Rasio jumlah Perda yang ditetapkan terhadap Raperda	Persen	44,00	55,00	70,00	72,2
430.	Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00
431.	Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	59,70	59,70	42,01	65,00
432.	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda	Dokumen	7	6	86,00%	n.a
433.	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD:	Persen	74,50	74,50	100,00	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Tersusun dan Terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk Melaksankan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD); Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pemebentukan PERDA dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.					
	PENGAWASAN:					
434.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	1	1 (1.75)	3
435.	Peningkatan kompetensi APIP Kota Cirebon	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
436.	Persentase Tindak Lanjut temuan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	93,49	n.a
437.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40,00	42,50	74,46	93,49
438.	Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	PERENCANAAN:					
439.	Konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Persen	87,39	90,00	97,49	97,49
440.	Konsistensi program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	98,26	98,30	95,17	95,17
441.	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (ketersediaan data dalam SIPD)	Persen	68,43	72,30	83,63	83,63

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
442.	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	78,99	80,67	97,49	99,02
443.	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	96,19	98,90	99,19	99,19
444.	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Persen	90,00	92,50	65,00	58,37
	K E U A N G A N:					
445.	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
446.	Rasio PAD terhadap penerimaan dan pendapatan daerah	Persen	29,51	29,51	29,06	27,04
447.	Meneingkatnya PAD	Persen	22,26	- 0,79	-1,41	10,00
448.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
449.	APBD tepat waktu	Tepat waktu/Tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
450.	Persentase penyerapan anggaran	Persen	90,00	90,68	91,24	90,50
	K E P E G A W A I A N:					
451.	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	8,00	8,00	26,08	25,72
452.	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	80,00	80,00	80,35	80,77
453.	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	85,00	85,00	92,72	92,72
454.	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN	Persen	70,30	70,30	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:					
455.	Persentase A S N yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,57	3,00	3,81	1,27
456.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	60,46	60,00	10,79	11,73
457.	Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah	Orang	0	5	3	3
458.	Jumlah Jabatan kosong Administrator pada Perangkat Daerah	Orang	0	20	47	21
459.	Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada PD	Orang	0	68	68	44
	Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah	Orang	0	22	22	267
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:					
460.	Persentase hasil Kelitbangan yang dijadikan dasar Kebijakan Daerah	Persen	0,00	0,00	31,00	70,00
461.	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	Persen	100,00	100,00	90,00	n.a

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon

Tabel 2.161

Capaian IPM dan Komponen IPM Kota Cirebon Tahun 2018-2020

No.	IPM dan Komponen IPM	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,35	74,92	74,89
2	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,99	72,13	72,26
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,09	13,11	13,12
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,89	9,90	9,91
5	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Juta Rupiah)	11.400	11.930	11.800

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 2.162

Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Cirebon
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Satuan	Capaian		
			2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,88	8,41	9,52
2	Garis Kemiskinan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	426.738	444.574	457.954
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,99	1,23	1,68
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,19	0,26	0,40
5	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	28,03	26,80	30,61

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2020

2.9 Pencapaian Sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

Untuk mengukur keberhasilan suatu perencanaan pembangunan dapat dilihat dari pencapaian Visi pembangunan yang dijabarkan melalui misi. Dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Cirebon, yaitu: "**SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah**", yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
3) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
4) Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

Untuk mengetahui capaian kinerja setiap misi, dilakukan evaluasi melalui pengukuran terhadap indikator tujuan dan sasaran beserta target kinerjanya, sehingga diketahui tingkat kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 2.163

Capaian Dampak Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2019

No.	Tujuan	Indikator	Tahun 2019		
			Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon	74,55	74,92	100,49
		b. Indeks Gini	0,40	0,43	92,00
		c. Pendapatan Per Kapita (000.000)	71,47	73,46	100,78
		d. Indeks Daya Beli	73,15	*)	*)
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan.	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	60,00	71,21	118,68
3	Menyediakan pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	45,0	51,96	115,47
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/ GRK (Persen)	2,80	3,85	137,50
4	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	62,00	76,70	123,71

Sumber: LKIP Kota Cirebon Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD

**) Tidak tersedia data di BPS maupun Perangkat Daerah.*

Tabel 2.164

Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2019
Visi : SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan			• Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,19	9,90	97,15	DISDIK
				• Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,43	13,11	97,62	
		1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	• APK PAUD (Persen)	57,94	57,54	99,31	
		1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**Pendidikan SD/MI:**				
				• APK (persen)	100,00	149,44	149,44	
				• APM (persen)	97,00	130,28	134,31	
				• Angka putus sekolah (persen)	0,02	0,003	15,00	
				• Angka mengulang kelas (persen)	0,40	0,40	100,00	
				• Angka kelulusan (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Angka melanjutkan ke SMP/MTs (persen)	118,70	111,33	93,79	
				• Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (persen)	64,50	55,10	85,43	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 7-12 tahun	0,18	0,51	283,33	
				• Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia 7-12 tahun (persen)	15,08	3,88	25,73	
				Pendidikan SMP/ MTs:				Dinas Pendidikan
				• APK (Persen)	100	81,85	81,85	
				• APM (Persen)	82,72	59,12	71,47	
				• Angka Putus Sekolah (Persen)	0,02	0,28	100,00	
				• Angka Mengulang Kelas (Persen)	0,20	0,20	100,00	
				• Angka Kelulusan (Persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA (Persen)	118,02	100,00	84,73	
				• Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (persen)	61,35	28,00	45,64	
				• Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (persen)	13,7	n.a.	0,00	
				• Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) (persen)	12,14	4,00	32,95	
				• Rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan (persen)	32,31	30,00	92,85	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan (persen)	32,77	36,00	109,86	
				• SD dengan Akreditasi A (sekolah)	26	30	115,38	
				• SD dengan Akreditasi B (sekolah)	20	31	155,00	
				• SD dengan Akreditasi C (sekolah)	114	111	97,37	
				• SMP dengan Akreditasi A (sekolah)	10	19	190,00	
				• SMP dengan Akreditasi B (sekolah)	4	22	550,00	
				• SMP dengan Akreditasi C (sekolah)	30	1	100,00	
		1.1.3	Program Pendidikan Non Formal	• Persentase penduduk Melek Huruf usia >15 tahun (persen)	99,94	100,00	100,06	
		1.1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (persen)	93,00	96,25	103,49	
				• Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik (persen)	48,50	48,15	99,28	
				• Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (persen)	93,50	97,72	104,51	
				• Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik (persen)	55,45	53,38	96,27	
				• Rasio Guru/Murid SD/MI (persen)	21,01	18,00	85,67	
				• Rasio Guru/ Murid SMP/MTs (persen)	19,63	18,00	91,69	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (persen)	22,00	22,00	100,00	
		1.1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	• Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan (Poin)	83	83	100,00	
1.2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.			• Rasio perpustakaan per satuan penduduk (Permil)	1.516	1.566	100,00	DISPUSIP
		1.2.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	• Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun (orang)	176.658	296.436	167,80	
				• Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun (orang)	38.357	30.708	80,06	
				• Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan (unit)	30 unit di RW; 1 unit di Kel.	60 unit di RW; 1 unit Kel.	100,00	
				• Jumlah pojok baca baru di area publik (unit)	5	5	100,00	
1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			• Angka Harapan Hidup (tahun)	71,92	72,13	100,29	DINKES
				• Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (persen)	99,01	93,53	94,47	
		1.3.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	• Pelayanan kesehatan ibu hamil (persen)	100,00	82,98	82,98	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Pelayanan kesehatan ibu bersalin (persen)	100,00	97,85	97,85	
				• Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (persen)	100,00	97,32	97,32	
				• Pelayanan kesehatan Balita (persen)	100,00	97,75	97,75	
				• Pelayanan kesehatan usia sekolah (persen)	100,00	97,37	97,37	
				• Pelayanan kesehatan usia subur (persen)	100,00	33,58	33,58	
				• Pelayanan kesehatan usia lanjut (persen)	100,00	92,59	92,59	
				• Pelayanan kesehatan Hipertensi	100,00	57,31	57,31	
				• Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (persen)	100,00	73,47	73,47	
				• Pelayanan kesehatan bagi ODGJ (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Pelayanan kesehatan bagi penderita TB, HIV-AIDs sesuai standar	100,00	100,00	100,00	
				• *Unmet need* pelayanan kesehatan	7,90	7,90	100,00	
				• Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk (Persen)	99,10	93,53	94,38	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.3.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	• RW Siaga Aktif (dirinci menurut Strata) (persen)	100,00	96,27	96,27	
				• Persentase Posyandu aktif (persen)	81,00	106,67	131,69	
				• Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (persen)	5,40	4,08	75,56	
				• Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (persen)	5,40	n.a.	0,00	
		1.3.3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	• Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (persen)	100,00	99,84	99,84	
				• Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan (persen)	65,00	81,21	124,93	
				• Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (persen)	60,00	64,38	107,73	
				• Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	9,00	10,17	87,00	
				• Prevalensi anemia pada ibu hamil	10,00	12,70	73,00	
				• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/balita	12,80	9,60	75,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/baduta	9,80	8,16	83,27	
				• Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	3,70	3,90	105,41	
		1.3.4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	• Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga (persen)	90,50	90,21	99,68	
				• Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat (tatanan)	5	5	100,00	
				• Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/air minum memenuhi syarat (persen)	95,30	98,30	103,15	
				• Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan (persen)	94,50	93,5	98,94	
				• Tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan (persen)	79,60	83,5	104,89	
		1.3.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	• Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen)	100,00	95,73	95,73	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• *Universal Child Immunization* (UCI) (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA (persen)	90,00	110,00	100,00	
				• Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	317	523	100,00	
				• Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (persen)	90,00	34,00	37,78	
				• Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (persen)	85,00	89,20	100,00	
				• Prevalensi HIV-AIDs dari total populasi	>0,05	<0,05	100,00	
				• Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDs (persen)	30,00	n.a.	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Cakupan balita pneumonia yang ditangani (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Angka kejadian malaria (Permil)	1 ‰	1 ‰	100,00	
				• Angka kematian akibat malaria	0,01	0,00	100,00	
				• Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Penderita diare yang ditangani (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil (persen)	100,00	91,70	91,70	
				• Angka cacat tingkat 2	5,00	14,30	34,97	
				• Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (persen)	93,00	87,40	93,98	
				• Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,05	<0,05	100,00	
				• Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) (persen)	90,00	90,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati (kasus)	1.203	1.670	138,82	
				• Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	425	523	123,06	
				• Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional (persen)	65,00	85,00	130,77	
				• Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua (persen)	65,00	66,60	102,46	
				• Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB (persen)	100,00	34,00	34,00	
				• Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang (persen)	70,00	45,00	64,29	
				• Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Cakupan penemuan kasus TB anak (persen)	110,00	117,96	107,24	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Cakupan anak <5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH (persen)	7,00	3,00	42,86	
				• Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (persen)	10,00	9,00	90,00	
		1.3.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	• Peningkatan pembinaan Lanjut Usia (persen)	50,00	50,00	100,00	
		1.3.7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	• Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.3.8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	• Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (persen)	100,00	99,97	99,97	
				• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (persen)	100,00	112,87	112,87	
				• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)	100,00	98,38	98,38	
				• Cakupan pelayanan nifas (persen)	100,00	97,25	97,25	
				• Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen)	100,00	112,8	100,00	
				• Cakupan kunjungan bayi (persen)	100,00	93,21	93,21	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Cakupan anak pra sekolah SDIDTK (persen)	100,00	98,92	98,92	
				• Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Cakupan pelayanan kesehatan remaja (persen)	100,00	87,00	87,00	
				• Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.3.9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	• Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun (persen)	21,80	21,46	21,46	
				• Pelayanan kesehatan pada usia produktif (persen)	100,00	33,58	33,58	
				• Pelayanan kesehatan Lansia (persen)	100,00	71,77	71,77	
				• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (persen)	100,00	57,31	57,31	
				• Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (persen)	100,00	73,47	73,47	
				• Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.3.10		• Penanganan KLB <24 jam (persen)	100,00	99,48	99,48	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pengamatan dan pengendalian masalah kesehatan	• A F P (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk <15 tahun)	2 kasus	0,00	100,00	
				• Proporsi kematian akibat keracunan (persen)	0,00	0,00	100,00	
				• Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri (persen)	0,00	0,00	100,00	
				• Angka Bebas Jentik	95,00	0,00	0,00	
		1.3.11	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	• B O R (Persen)	76,00	65,54	86,24	
				• L O S (Hari)	4,3	4,30	100,00	
				• T O I (Kali)	1,1	1,10	100,00	
				• B T O (Kali)	37,45	37,45	100,00	
				• G D R (Persen)	55,00	78,18	142,15	
				• N D R (Permil)	23,75	56,84	41,78%	
		1.3.12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	• Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (persen)	100,00	97,76	97,76	
		1.3.13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin (persen)	100,00	85,01	85,01	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD) (persen)	100,00	56,12	56,12	
		1.3.14	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Pendidikan	• Akreditasi Rumah Sakit (strata)	Paripurna	Paripurna	100,00	
		1.3.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	• Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional (persen)	100,00	99,20	99,20	
				• Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina (persen)	40,00	51,00	100,00	
				• Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis (orang)	45	67	100,00	
				• Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi (orang)	20	19	95,00	
				• Prevalensi penyalahgunaan narkoba	1,77	1,80	101,69	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir (persen)	1,70	0,00	0,00	
		1.3.16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	• Tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar (persen)	100,00	90,61	90,61	
				• B O R (Persen)	61,00	60,60	99,34	
				• L O S (Hari)	6,2	3,20	100,00	
				• T O I (Kali)	1,2	2,00	100,00	
				• B T O (Kali)	37,45	70,70	100,00	
				• G D R (Persen)	45,00	35,10	100,00	
				• N D R (Permil)	25 ‰	15,80 ‰	100,00	
		1.3.17	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	• Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompetensi (persen)	56,00	25,75	25,75	
				• Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya (persen)	82,50	79,00	95,76	
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk			• Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,67	0,82	81,71	DPPKB
		1.4.1	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	• Persentase Kampung KB (persen)	100,00	36,36	36,36	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.4.2	Program Keluarga Berencana	• *Current Use*/Pasangan Usia Subur (persen)	62,00	63,38	102,23	
				• Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 (persen)	3,45	0,11	100,00	
				• Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (persen)	94,56	80,29	84,91	
				• Rasio akseptor KB (persen)	14,6	13,44	92,05	
				• Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need* (persen)	18,90	20,06	93,86	
				• Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif (persen)	25,98	26,27	98,88	
		1.4.3	Program Pengendalian Penduduk	• Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (persen)	100,00	27,58	27,58	
				• Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk (dokumen)	1	1	100,00	
				• Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data Profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk	100,00	n.a.	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (persen)				
				• Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan pormal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	17 SMP 9 SMA 3 Universitas	n.a.	0,00	
		1.4.4	Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	• Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB (persen)	100,00	100,00	100,00	
1.5	Menurunnya tingkat pengangguran			• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen)	69,03	69,03	100,00	DISNAKER
				• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,83	8,83	100,00	
				• Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (persen)	91,14	91,14	100,00	
		1.5.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	• Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (persen)	75,00	75,00	100,00	
				• Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan (persen)	60,00	60,00	100,00	
				• Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (persen)	60,00	60,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.5.2	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	• Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	30,00	30,00	100,00	
		1.5.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	• Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	10 kasus	8 kasus	80,00	
				• Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (persen)	60,00	60,00	100,00	
				• Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	55,00	55,00	100,00	
				• Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda (persen)	100,00	100,00	100,00	
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda			• Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional (atlet)	2	2	100,00	DKOKP
				• Persentase organisasi pemuda yang aktif (persen)	50,00	46,30	92,60	
		1.6.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	• Sarana olahraga yang representatif (sarana olahraga yang diperbaiki	50,00	50,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				dibagi sarana olahraga yang ada dikali 100%) (persen)				
		1.6.2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	• Cakupan pembinaan olahraga (jumlah cabor yang dibina dibagi jumlah seluruh cabor yang ada dikali 100%) (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (jumlah pelatih bersertifikat dibagi jumlah seluruh pelatih dikali 100%) (persen)	50,00	56,00	112,00	
				• Cakupan pembinaan atlet muda (jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi jumlah seluruh atlit pelajar) (persen)	20,00	31,00	155,00	
				• Jumlah atlet berprestasi (atlet)	10 atlet	2 atlet	20,00	
				• Jumlah prestasi Cabang olahraga (cabor)	10 cabor	2 cabor	20,00	
		1.6.3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	• Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (persen)	50,00	46,30	92,60	
				• Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	1:1.500	1:1.422	84,40	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.6.4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	• Persentase wirausaha muda (jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha dikali 100%) (persen)	50,00	0,00	0,00	
1.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak			• Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,20	94,35	100,16	DSPPPA
				• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,53	77,86	103,08	
		1.7.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	• Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG, Kelembagaan perlindungan perempuan (satgas)	4 satgas PKDRT/ 100%	4	100,00	
		1.7.2	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	• Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	3 PD; 100KK; 25 orang PEKA	3	100,00	
		1.7.3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit pelayanan terpadu (UPt) dan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana KTA dab PPT di rumah sakit	36 kasus; 2 RW; 40 lembaga; 1 dokumen	37 kasus; 2 RW; 40 lembaga; 1 dokumen	100,00	
1.8	Meningkatnya Peran Industri,			• Peningkatan PDRB dari sektor industri (persen)	10,30	9,99	96,99	DPK-UKM

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon							
				• Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan (persen)	31,86	31,54	98,99	
		1.8.1	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	• Meningkatnya pengenalan penjualan dan pemasaran produk IKM (IKM)	25 IKM	26 IKM	104,00	
		1.8.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	• Peningkatan kemampuan teknologi industry (persen)	100,00	112,50	112,50	
		1.8.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	• Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor (persen)	60,33	62,64	103,49	
		1.8.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	• Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang (persen)	69,50	65,00	93,53	
		1.8.5	Program Metrologi Legal	• Cakupan wajib tera/ tera ulang dan alat UPTP (persen)	80,00	80,00	100,00	
		1.8.6	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	• Updating Data PKL di 5 Kecamatan (PKL)	200	200	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Optimalisasi Pelaksanaan Perda PKL (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Tingkat Pelanggaran PKL Menurun (persen)	40,00	33.13	82,83	
				• Meningkatnya Jumlah PKL yang Dibina (PKL)	243	243	100,00	
		1.8.7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	• Tercapainya Peningkatan Modal Usaha UMKM (persen)	25,00	26,37	105,48	
		1.8.8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	• Peningkatan jumlah koperasi aktif (unit)	243	243	100,00	
		1.8.9	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	• Peningkatan pasar rakyat ber SNI (unit)	1	0	0,00	
1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin			• Persentase penduduk miskin (persen)	8,53	8,41	101,43	DSPPPA
		1.9.1	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PPKS	• Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PPKS	2 MoU	2 Kegiatan	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.9.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	• PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	65,00	65,00	100,00	
		1.9.3	Program Satu Data Keluarga Miskin	• Data Base keluarga miskin yang valid (dokumen)	1	n.a.	0,00	
		1.9.4	Program Penanggulangan Korban bencana	• Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100,00	100,00	100,00	
1.10	Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk Mencapai Kedaulatan Pangan			• Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	79,90	84,00	105,13	DPPKP
				• Peningkatan PDRB dari Sektor Pertanian (persen)	0,33	0,33	100,00	
		1.10.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	• Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kapita/hari)	E= 2.400; P= 63	E= ≥3.669 P= ≥94.88	100,00	
				• Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah (persen)	90,00	100,00	111,11	
				• Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (persen)	90,00	100,00	111,11	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Penanganan Daerah Rawan Pangan (persen)	60,00	100,00	166,67	
				• Penguatan Cadangan Pangan (persen)	60,00	27.62	46,04	
		1.10.2	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	• Skor Pola Pangan Harapan/SPPH (Poin)	79,9	84,00	105,13	
				• Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (persen)	85,00	n/a	0,00	
				• Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan (persen)	86,00	97,50	113,37	
				• Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	94,00	89.40	105,15	
				• Peningkatan konsumsi pangan hewani (kg/Kapita/Tahun)	41	38.3	93,41	
				• Peningkatan konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	179	202.4	113,07	
				• Peningkatan konsumsi umbi-umbian (gram/kapita/hari)	28	27.6	98,57	
		1.10.3	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	• Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah (kegiatan)	1	n.a.	0,00%	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Partisipasi Perangkat Daerah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Daerah (persen)	50,00	n.a.	0,00	
				• Jumlah Advokasi (kali/tahun)	2	n.a.	0,00	
		1.10.4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	• Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan (Jenis hasil olahan)	1	1	100,00	
		1.10.5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	• Peningkatan Produktifitas Padi (ton/hektar)	4,7	5.9	125,53	
		1.10.6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	• Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak:				
				√ Daging sapi (kg)	155.000	435.999	281,29	
				√ Daging babi (kg)	65.000	94.315	145,10	
		1.10.7	Program Pencegahan Penyakit Hewan	• Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/ternak (ekor)	500	539	107,80	
		1.10.8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	• Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3% per tahun (ton)	3400	6.821	200,62	
		1.10.9	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	• Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 3% per tahun (ton)	250	180.29	72,11	
		1.10.10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	• Meningkatnya tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	33	33.47	101,42	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.11	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			• Peningkatan PDRB dari sektor Pariwisata (persen)	5,55	7,72	139,10	DKOKP
		1.11.1	Program Pengembangan Kepariwisataan	• Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 80% (orang)	2.000.000	1.505.207	75,26	
				• Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata (hari)	2	1	50,00	
1.12	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama			• Konflik Antar Umat Beragama (kasus)	0	0	100,00	KESBANGPOL
		1.12.1	Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	• Nol persen kasus SARA dan kasus terorisme (persen)	0,00	0,00	100,00	
				• Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi (persen)	50,00	n/a	0,00	
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal			• Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (persen)	69,60	53,69	77,14	DKOKP

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.13.1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	• MoU Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1 MoU	1 MoU	100,00	
		1.13.2	Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	• Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Even)	15	15	100,00	
				• Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang Dilestarikan	62 Cagar budaya	62 Cagar budaya	100,00	
				• Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	1 Karya budaya	1 Karya budaya	100,00	
				• Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	10 Obyek	7 obyek	70,00	
1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan			Tingkat perkembangan kelurahan:				DSPPPPA
				Kota Cirebon:				
				• Kurang berkembang	0	0	100,00	
				• Berkembang	8	7	87,50	
				• Cepat berkembang	13	15	115,38	
				Meningkatnya kualifikasi status kelurahan:				Kecamatan Kesambi
				Kecamatan Kesambi:				
				• Swakarya Mula	0	1	0,00	
				• Swakarya Madya	0	1	0,00	
				• Swakarya Lanjut	0	0	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Swasembada Mula	0	3	0,00	
				• Swasembada Madya	0	0	0,00	
				• Swasembada Lanjut	0	0	0,00	
				Kecamatan Pekalipan				Kecamatan Pekalipan
				• Swakarya Mula	0	2	0,00	
				• Swakarya Madya	0	2	0,00	
				• Swakarya Lanjut	0	0	0,00	
				• Swasembada Mula	0	0	0,00	
				• Swasembada Madya	0	0	0,00	
				• Swasembada lanjut	0	0	0,00	
				Kecamatan Kejaksan				Kecamatan Kejaksan
				• Swakarya Mula	0	0	0,00	
				• Swakarya Madya	0	2	0,00	
				• Swakarya Lanjut	0	2	0,00	
				• Swasembada Mula	0	2	0,00	
				• Swasembada Madya	0	2	0,00	
				• Swasembada Lanjut	0	2	0,00	
				Kecamatan Harjamukti				Kecamatan Harjamukti
				• Swakarya Mula	0	1	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				• Swakarya Madya	0	3	0,00	
				• Swakarya Lanjut	0	1	0,00	
				• Swasembada Mula	0	0	0,00	
				• Swasembada Madya	0	0	0,00	
				• Swasembada Lanjut	0	0	0,00	
				Kecamatan Lemahwungkuk:				Kecamatan Lemah wungkuk
				• Swakarya Mula	0	1	0,00	
				• Swakarya Madya	0	2	0,00	
				• Swakarya Lanjut	0	1	0,00	
				• Swasembada Mula	0	0	0,00	
				• Swasembada Madya	0	0	0,00	
				• Swasembada Lanjut	0	0	0,00	
		1.14.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	• Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina:	2 Wartek, 28 Kelompok, 331 Posyandu, 1 Kegiatan	2 Wartek, 28 Kelompok, 331 Posyandu, 1 Kegiatan	100,00	DSPPPA
				• Wartek (unit)	2	2	100,00	
				• Kelompok (kelompok)	28	28	100,00	
				• Posyandu (unit)	331	331	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.14.2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	• Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	100,00	DSPPPA
				• Meningkatnya swadaya masyarakat dalam bantuan RW	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya	100,00	
				• Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam BSMSS dan BBRGM (LPM)	22	22	100,00	
		1.14.3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	• Keikutsertaan Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi/Nasional (persen)	100,00	100,00	100,00	DSPPPA
		1.14.4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	• Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di bina (persen)	100,00	100,00	100,00	DSPPPA
		1.14.5	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan.	• Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan, bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah Kecamatan Kesambi (persen)	70,00	100,00	142,86	Kecamatan Kesambi

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.14.6	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	• Rasio Juara lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	20 (rasio)	5 Cabang 24 Orang	100,00	
		1.14.7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	• Cakupan posyandu strata mandiri (persen)	35,00	13,97	39,91	
		1.14.8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	• Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Kesambi dan persentase masyarakat di Kec. Kesambi yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi (persen)	57,00	100,00	100,00	
		1.14.9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	• Jumlah atlet berprestasi/jumlah prestasi olahraga (atlet)	1	100,00	100,00	
		1.14.10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Persentase usulan hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir Musrenbang Kecamatan (persen)	70,00	100,00	100,00	
		1.14.11	Program RW Bersih	• Rasio RW K3 (persen)	30,00	100,00	100,00	
		1.14.12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kec	• Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan (persen)	85,00	100,00	100,00	
		1.14.13	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• Meningkatnya kondisi jalan dan saluran drainase (persen)	100,00	93,75	93,75	Kecamatan Pekalipan

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.14.14.	Program Pendaftaran Penduduk	• Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	• Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Posyandu (persen)	100,00	90,00	90,00	
		1.14.16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	• Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan se-Kecamatan Pekalipan (persen)	100,00	85,71	85,71	
		1.14.17	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	• Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Kelurahan se-Kec. Pekalipan (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.18	Program RW bersih	• Terlaksananya program RW bersih di tingkat Kecamatan Pekalipan (persen)	31,00	100,00	100,00	
		1.14.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.20	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur (persen)	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Harjamukti
		1.14.21	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	• Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan (persen)	80,00	100,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.14.22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	• Meningkatnya kapasitas kelembagaan (persen)	80,00	71,91	89,89	
		1.14.23	Program RW Bersih	• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan (persen)	32,00	100,00	100,00	
		1.14.24	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	• Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan (persen)	70,00	83,00	100,00	
		1.14.25	Program Kerukunan Umat Beragama	• Meningkatnya kerukunan umat beragama (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Terselenggaranya pembangunan daerah (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.27	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• Meningkatnya kondisi drainase dan jalan perumahan dalam kondisi baik (persen)	100,00	100,00	100,00	Kec. Kejaksan
		1.14.28	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	• Bertambahnya wirausaha muda (orang)	60	100,00	100,00	
		1.14.29	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	• Cakupan LKK aktif (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.30	Program RW Bersih	• Rasio RW K3 (persen)	75,00	100,00	100,00	
		1.14.31	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	• Lestarinya adat budaya daerah (persen)	95,00	67,00	70,18	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.14.32	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	• Peringkat MTQ tingkat Kota Cirebon (peringkat)	Peringkat III	100,00	100,00	
		1.14.33	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Meningkatnya hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir Musrenbang Kota (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.34	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/bangunan fasilitas umum, dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan Lemahwungkuk (persen)	100,00	53,00	53,44	Kecamatan Lemahwungkuk
		1.14.35	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	• Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatanj Posyandu di RW (persen)	100,00	83,00	83,00	
		1.14.36	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	• Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk (persen)	100,00	98,00	98,00	
		1.14.37	Program RW Bersih	• Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan (persen)	29,00	100,00	100,00	
		1.14.38	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	• Terpeliharanya seni budaya daerah (triwulan)	4	4	100,00	
		1.14.39	Program Peningkatan Kompetensi keagamaan	• Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan (persen)	100,00	100,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		1.14.40	Program kerukunan Umat Beragama	• Meningkatnya kerukunan umat beragama (persen)	100,00	75,00	75,00	
		1.14.41	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Terselenggaranya pembangunan daerah (persen)	100,00	100,00	100,00	
		1.14.42	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	• Terselenggaranya pekan olahraga se-Kecamatan Lemahwungkuk (persen)	100,00	14,00	14,29	

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur			• Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi (persen)	12,40	26,08	210,32	BKPPD
				• Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target (persen)	80,50	80,35	99,81	
				• Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin (persen)	87,00	92,72	106,57	
				• Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN (persen)	80,00	100,00	125,00	
		2.1.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	• Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi (Eselon II) pada Perangkat Daerah (orang)	3 orang	3 orang	100,00	
				• Jumlah Jabatan kosong Administrator (Eselon III) pada Perangkat Daerah (orang)	47 orang	47 orang	100,00	
				• Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada Perangkat Daerah (orang)	68 orang	68 orang	100,00	
				• Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah (orang)	22	22	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.1.2	Program Pendidikan Kedinasan	• Persentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (persen)	3,00	3,81	127,00	
				• Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (persen)	60,00	10,79	17,98	
2.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi			• Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan (persen)	80,00	80,00	100,00	SETDA
				• Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan (persen)	0,00	0,00	0,00	
		2.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	• Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar (persen)	100,00	100,00	100,00	
		2.2.2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	• Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan (naskah)	10	38	380,00	
		2.2.3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	• Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari Rancangan Perda dan Rancangan PerWal (persen)	65,00	84,00	129,23	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.2.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	• PNS yang memiliki nilai jabatan (persen)	100,00	100,00	100,00	
		2.2.5	Program Penataan Kelembagaan	• Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja (persen)	100,00	100,00	100,00	
		2.2.6	Program Pembinaan Pemerintahan	• Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara (titik)	8	14	175,00	
		2.2.7	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan (dokumen)	12 dokumen	5 dokumen	41,67	
		2.2.8	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	• Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	18 dokumen	25 dokumen	138,89	
				• Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap Belanja Pengadaan Barang dan Jasa (persen)	100,00	0,00	0,00	
		2.2.9	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	• Pengajian rutin bulanan dan mingguan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (kali)	12	12	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.2.10	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	• Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan (persen)	85,00	75,00	88,24	
		2.2.11	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	• Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat (cabang musabaqoh)	5	4	80,00	
		2.2.12	Program Kerukunan Umat Beragama	• Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) (hari besar)	6	6	100,00	
		2.2.13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti (persen)	25,00	25,00	100,00	
		2.2.14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	• Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada SBBD dan Standar satuan Harga Barang/Jasa (persen)	100,00	100,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan			• Nilai AKIP A (nilai)	9,90	9,57	96,67	SETDA
		2.3.1	Program Pembinaan Administrasi Umum	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kota Cirebon (skor)	B	B	100,00	
2.4	Meningkatnya Maturitas SPIP			• Tingkat Maturitas SPIP (level)	2	1	33,33	IRDA
		2.4.1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	• Peningkatan Kompetensi APIP Kota Cirebon (persen)	100,00	100,00	100,00	
		2.4.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Persentase Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Terhadap Perangkat Daerah (persen)	100,00	93.49	95,00	
				• Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (persen)	50,00	74,46	100,00	
				• Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (persen)	100,00	100,00	100,00	
2.5	Meningkatnya Pelayanan Publik			• Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan (poin)	75,00	82,65	110, 2	DPMPTSP

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				• Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan (poin)	80,00	76,25	95,31	DISDUKCAPIL
		2.5.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	• Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi (*event*)	1	2	100,00	DPMPTSP
		2.5.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	• Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN)	30 % dari tahun sebelum nya	1,00	3,33	
		2.5.3	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	• Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen (poin)	75,00	82,65	100,00	
				• Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP (perwal/kepwal)	1	2	100,00	
		2.5.4	Program Pendaftaran Penduduk	• Cakupan Penerbitan KTP (persen)	95,00	99,46	100,00	DISDUKCAPIL
				• Cakupan Penerbitan KK (persen)	100,00	100,00	100,00	
		2.5.5	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	• Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (persen)	88,00	83,00	94,32	
				• Cakupan Akta Kematian (persen)	80,00	76,53	95,66	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.5.6	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	• Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan (persen)	18,00	13,00	72,22	
2.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			• Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00	BKD
				• Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah (persen)	30,53	32, 67	107, 01	
		2.6.1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	• Meningkatnya PAD (persen)	23,00	-1,41	-6,13	
		2.6.2	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	• Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	
		2.6.3	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	• Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon (persen)	100,00	100,00	100,00	
		2.6.4	Program peningkatan Kualitas Penganggaran	• APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00	
		2.6.5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	• Persentase Penyerapan Anggaran (persen)	90,00	91,24	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah			• Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota (poin)	80,10	83,18	100,00	DISPUSIP
		2.7.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	• Sistem Penyimpanan sesuai standar; Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan (kebijakan)	4	4	100,00	
		2.7.2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	• Dokumen arsip yang diselamatkan (dokumen)	471	471	100,00	
		2.7.3	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	• Arsip yang terpelihara (dokumen)	15.824	15.824	100,00	
		2.7.4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	• Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas (persen)	60,00	30,00	50,00	
2.8	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD			• Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda (persen)	70,60	70,00	99,91	SETWAN
				• Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran (persen)	100,00	75,0	75,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				• Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan (persen)	60,00	42, 01	70, 02	
		2.8.1	Program Peningkatan Kapasaitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	• Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD; Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (persen)	100,00	100, 00	100, 00	SETWAN

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.8.2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan	• Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda (persen)	100,00	100,00	100, 00	SETWAN
2.9	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam menunjang *Cirebon Smart City*			• Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan (perangkat daerah)	4	13	100,00	DKIS
				• Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (komunitas)	22	22	100,00	
		2.9.1	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	• Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih/ jumlah aparatur bidang kominfo (persen)	75,00	125,00	100,00	
		2.9.2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	• Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang	75,00	120,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				peningkatan kinerja aparatur (persen)				
		2.9.3	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	• Terwujudnya kerjasama bidang Kominfo (persen)	75,00	100,00	100,00	
		2.9.4	Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	• Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan (persen)	75,00	90,00	100,00	
		2.9.5	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan DokumentasI	• Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah (persen)	75,00	100,00	100,00	
		2.9.6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	• Tersampaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat (persen)	65,00	80,00	100,00	
		2.9.7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	• Tersedianya media komunikasi (persen)	75,00	100,00	100,00	
		2.9.8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	• Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat (persen)	75,00	100,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.9.9	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	• Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan (persen)	60,00	100,00	100,00	
		2.9.10	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	• Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon (persen)	55,00	50,00	90,91	
2.10	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			• Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (persen)	100,00	97,49	97,49	BPPPPD
				• Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD (persen)	100,00	95,17	95,17	
		2.10.1	Pengembangan Data/Informasi	• Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD) (persen)	82,00	83,63	100,00	
		2.10.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (persen)	95,00	97,49	100,00	
		2.10.3	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	• Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD (persen)	98,35	99,19	100,00	
		2.10.4	Program Pengendalian dan Evaluasi	• Pencapaian hasil perencanaan pembangunan (persen)	95,00	65,00	68,42	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Perencanaan Pembangunan Daerah					
2.11	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah			• Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah (persen)	40,00	31,00	77,50	
		2.11.1	Program Penelitian dan Pengembangan	• Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan (persen)	100,00	90,00	90,00	

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan			• Tingkat Pelayanan Ruas Jalan (nilai)	C	C	100,00	DISHUB
		3.1.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	• Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (persen)	100,00	100,00	100,00	
		3.1.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan	• Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor (persen)	100,00	100,00	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
		3.1.3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	• Jumlah Rambu yang disediakan dibagi jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) dikali 100% (persen)	83,51	73,00	87,97	
				• Jumlah APILL disediakan dibagi jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) dikali 100% (persen)	83,78	60,00	71,62	
				• Jumlah PJU yang disediakan dibagi jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) dikali 100% (persen)	83,97	86,00	100,00	
		3.1.4	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	• Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir (persen)	73,44	62,00	84,94	
3.2	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase			• Persentase drainase kondisi baik (persen)	72,50	71,00	97,93	DPUPR
		3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pengurangan titik genangan banjir (titik)	2	2	100,00	
		3.2.2	Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman	• Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan (persen)	100,00	100,00	100,00	
3.3	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat			• Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk (rasio)	40,00	0,31	0,77	DISHUB
		3.3.1	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	• Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan / jumlah penduduk (rasio)	0,003	0,003	100,00	
				• Jumlah Uji Kir (unit)	12.2021	15.638	100,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				• Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100% (persen)	19,00	0,73	3,87	
		3.3.2	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	• Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (persen)	100,00	100,00	100,00	
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	45,00	51,96	100,00	DISHUB, DPUPR, DPRKP DAN DLH
		3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	• Jalan mantap kondisi baik (persen)	91,00	81,00	89,01	DPUPR
				• Meningkatnya jalan mantap (persen)	86,00	81,00	94,19	
				• Trotoar Kondisi Baik 100 % (10,5km),	100,00	81,00	81,00	
				• Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit) (unit)	3	1	33,33	
		3.4.2	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	• Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif (persen)	58,80	100,00	100,00	
		3.4.3	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW (persen)	1,40	1,40	100,00	
		3.4.4	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	• Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung) (persen)	80,00	100,00	100,00	
		3.4.5	Program Pengembangan Sistem	• Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki (persen)	15,00	0,00	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan Pengelolaan Persampahan					
		3.4.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	• Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023) (titik)	2	0	0,00	
		3.4.7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	• Jumlah Rumah yang berakses sanitasi baik (persen)	94,26	100,00	100,00	
		3.4.8	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	• Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan (persen)	90,00	0,00	0,00	
		3.4.9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Jumlah Bangunan yang ber-IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se-Kota (persen)	1,00	0,90	90,00	
		3.4.10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	• Persentase luasan RTH publik yang bertambah (persen)	2,00	0,00	0,00	
		3.4.11	Program Pengelolaan Pertanahan	• Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum (lokasi)	2	0	0,00	
		3.4.12	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	• Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (persen)	15,00	0,00	0,00	DPRKP
		3.4.13	Program Penyediaan Perumahan	• Rasio jumlah rumah layak huni per jumlah penduduk (poin)	0,1773	0.0266	15,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.4.14	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	• Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan (persen)	9,18	8,81	95,97	
		3.4.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	• Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R (persen)	20,00	8,00	40,00	DLH
				• Persentase Cakupan Jumlah Sampah yang Tertangani (persen)	76,00	88,00	115,79	
				• Persentase Ijin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang diterbitkan (persen)	0,00	n/a	0,00	
				• Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan (persen)	0,00	n/a	0,00	
				• Operasional TPA/TPST/SPA di Kota Cirebon (Nilai Adipura TPA) (skor)	72,00)	68,25	94,79	
		3.4.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	• Tersusunnya RPPLH Kota Cirebon	Ada	ada (materi teknis RPPLH)	100,00	
				• Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota	Tidak ada	tidak ada	100,00	
				• Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada	ada	100,00	
				• Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan	50,00	57,00	114,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2019	Capaian Target RPJMD 2019	Tingkat Capaian Target RPJMD 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota (persen)				
				• Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerindah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan dampak Didaerah Kota (persen)	100,00	100,00	100,00	
		3.4.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	• Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati (persen)	31,25	31,25	100,00	
				• Prosentase Luas Lahan Konservasi (persen)	0,42	0,42	100,00	
				• Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK (persen)	100,00	100,00	100,00	
				• Persenstase Peningkatan Jumlah Wilayah yang memiliki Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi dan Perubahan Iklim (persen)	4,00	4,00	100,00	
		3.4.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Air	28,48	56,92	197,36	
				• Indeks Kualitas Udara	78,10	68,58	87,81	
				• Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,64	35,77	100,00	
		3.4.19	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	• Penetapan Hak MHA (kali)	1 Kali	n/a	0,00	
				• Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (kali)	1 Kali	1 kali	100,00	
				• Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada	ada	100,00	
				• Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat (kali/tahun)	4 Kali/ Tahun	6 kali setahun	150,00	
				• Meningkatnya Jumlah dan Anggota kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (persen)	50,00	50,00	100,00	

Misi 4: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*13*
4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat			Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (lokasi)	55	n.a.	0,00	SATPOLPP
		4.1.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3 (orang/RT)	1	n.a.	0,00	
		4.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Rasio Linmas (persen)	100,00	n.a.	0,00	
		4.1.3	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS (persen)	100,00	n.a.	0,00	
		4.1.4	Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota (persen)	100,00	100,00	100,00	
4.2	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional			Konflik Kasus Kebangsaan dan Nasionalisme (kasus)	0	0	100,00	KESBANGPOL DAGRI
		4.2.1	Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Nol persen kasus SARA dan kasus terorisme (persen)	0,00	0,00	100,00	
				Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	50,00	n.a.	0,00	

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*13*
		4.2.2	Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Terlaksananya Koordinasi Intelejen Daerah (persen)	100,00	99,00	99,00	
		4.2.3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman Politik di Masyarakat (persen)	50,00	98,00	98,00	
4.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana			Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK	75,00	75,00	100,00	DAMKAR
				Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana (kelurahan)	22	22	100,00	KPBD
		4.3.1	Progam Peningkatan Kesiapsiagan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase layanan penanggulangan kebakaran (persen)	70,00	70,00	100,00	DAMKAR
				Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat (persen)	75,00	75,00	100,00	
		4.3.2	Progam Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran (persen)	52,00	52,00	100,00	
				Rasio masyarakat yang dilatih dibagi jumlah penduduk (Rasio)	1 _ 437	1 : 437	100,00	
		4.3.3	Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan (orang)	300	500	100,00	KPBD

No.	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Capaian Target RPJMD	Tingkat Capaian Target RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019	2019	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*13*
		4.3.4	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana (persen)	100,00	90,00	90,00	
		4.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulngan bencana (orang)	60	41	68,00	

Sumber: BPPPPD, data LKPJ Kota Cirebon Tahun 202

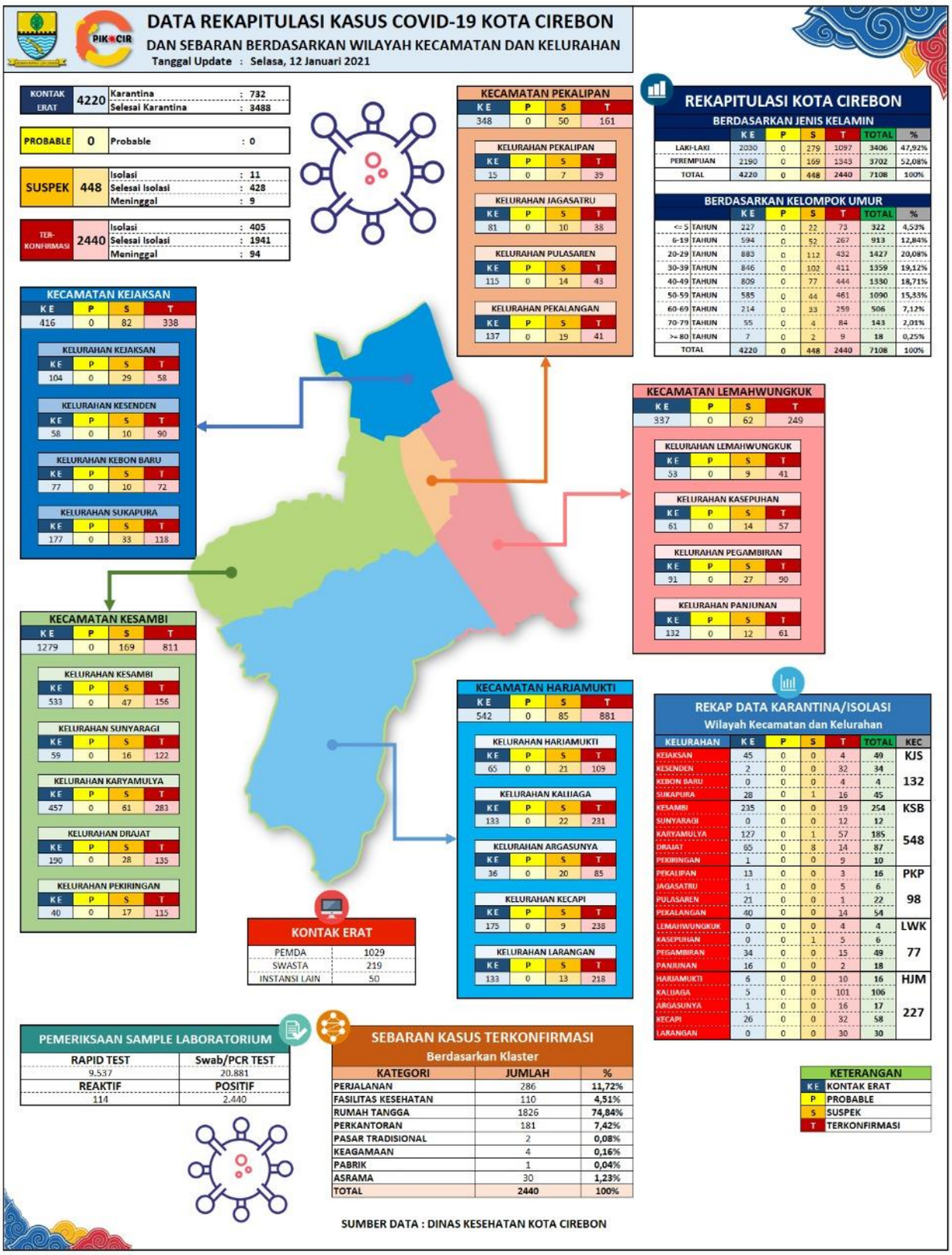
2.10 Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa yang melanda seluruh bagian wilayah yang ada di Indonesia. Kejadian tersebut menyebabkan berlakunya berbagai aturan yang membatasi segala kegiatan masyarakat baik kegiatan ekonomi, sosial dan pada aktivitas pemerintahan untuk menghindari dan meminimalisir penyebaran viorus Covid-19. Termasuk di Cirebon sejak awal tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Data Statistik Covid-19 hingga tanggal 12 Januari 2021, jumlah kontak erat tercatat sebanyak 4220 orang; suspek sebanyak 448 orang dimana 11 orang isolasi, 428 orang selesai isolasi dan 9 orang meninggal; sedangkan yang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 2440 orang dimana 405 orang diantaranya menjalani isolasi, 1941 orang selesai isolasi dan 94 orang meninggal dunia. Dari kategori kontak erat, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Kesambi dengan jumlah 1279 orang. Sedangkan untuk kategori suspek, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Kesambi dengan jumlah 169 orang dan untuk kategori terkonfimasi positif mengidap Covid-19, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Harjamukti dengan jumlah 881 orang. Secara umum, Kecamatan dengan kasus terbanyak adalah Kecamatan Kesambi dengan jumlah kejadian sebanyak 2259 orang.

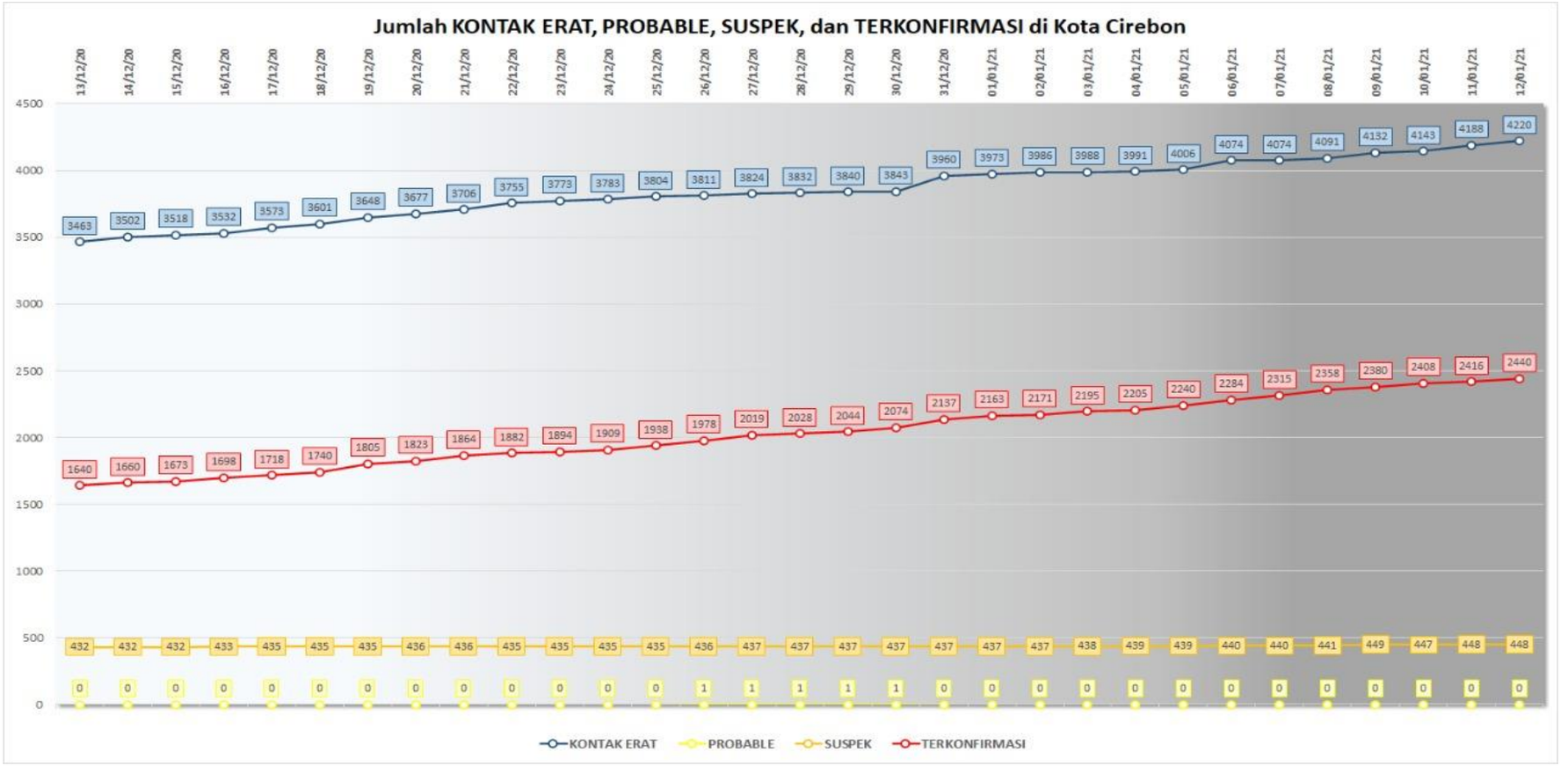
Jika dilihat berdasarkan klister sebaran virus, kasus terbanyak terjadi pada kluster rumah tangga sebanyak 74,84 persen. Kasus terbanyak kedua terjadi pada klaster perjalanan yaitu sebanyak 11,72 pesen. Data rekapitulasi kasus Covid-19 di Kota Cirebon disajikan pada Gambar 2.63.

Gambar 2.63
Data Rekapitulasi Kasus Covid-19 di Kota Cirebon



Sumber: Dinkes Kota Cirebon, Tahun 2021

Gambar 2.64



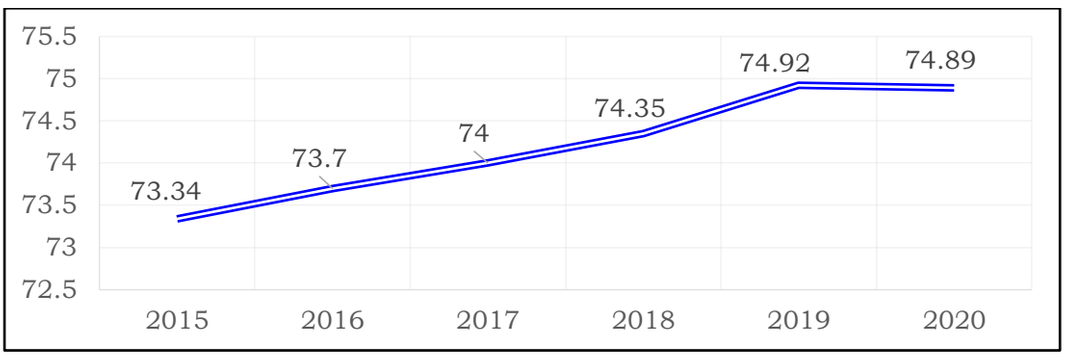
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Tahun 2021.

Berdasarkan grafik diatas, jumlah kasus Covid-19 di Kota Cirebon terus mengalami kenaikan. Hingga tanggal 12 Januari 2021 tercatat total kasus sebanyak 7108 orang, dan sebanyak 5.857 orang dinyatakan sembuh atau selesai isolasi. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan dengan adanya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh duia khususnya di Kota Cirebon. Berikut penjelasan dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan Kota Cirebon.

2.10.1 Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan IPM

Bedasarkan Berita Resmi Staistik (BRS) No. 13/01/3274/Th/XXII yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon pada 5 Januari 2021 dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan IPM di Kota Cirebon. Pada tahun 2019, Kota Cirebon memiliki nilai IPM sebesar 74,92 dan mengalami penurunan 0,03 poin pada tahun 2020 menjadi 74,89 poin. Berikut gambaran pertumbuhan IPM sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 di Kota Cirebon.

Gambar 2.65
Grafik Pertumbuhan IPM Kota Cirebon
Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD Tahun 2021

Data IPM dibentuk berdasarkan komponen-komponennya, berikut penjelasan mengenai perkembangan IPM Kota Cirebon berdasarkan komponen pembentuknya.

Tabel 2.165
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon
Berdasarkan Komponennya Tahun 2012-2020

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	71,70	71,75	71,77	71,79	71,83	71,86	71,99	72,13	72,26
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,50	12,58	12,93	12,94	13,07	13,08	13,09	13,11	13,12
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	9,32	9,33	9,53	9,76	9,87	9,88	9,89	9,90	9,91
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp.000	10.369	10.563	10.606	10.732	10.824	11.100	11.397	11.930	11 800
IPM	-	71,97	72,27	72,93	73,34	73,70	74,00	74,35	74,92	74,89
Pertumbuhan IPM	**%**	0,67	0,42	0,91	0,56	0,49	0,41	0,47	0,77	-0,04

Sumber: BPS Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD, Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, komponen IPM yang mengalami penurunan adalah pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2019, nilai pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp11.930.000,00, namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp11.800.000,00. Selain komponen pengeluaran per kapita, komponen pembentuk IPM mengalami kenaikan di tahun 2020 walaupun tidak signifikan. Pada komponen UHH mengalami kenaikan sebesar 0,13 tahun, HLS dan RLS naik masing-masing 0,01 tahun.

2.10.2 Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Kota Cirebon

Akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan penularan virus Covid-19, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya kualitas tatanan ekonomi di wilayah Kota Cirebon. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Nomor 12/01/3274/Th.XXII yang terbit pada tanggal 4 Januari 2021. Bulan Desember 2020 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 0,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,34. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sebaliknya, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi; satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan empat kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan tidak mengalami perubahan indeks; kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,29 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan indeks harga; kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.

Tabel 2.166
IHK dan Tingkat Inflasi Desember 2020
Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2019	IHK Desember 2019	IHK Desember 2020	Tingkat Infla: Desember 2020*)	Inflasi Tahun Kalender 2020**)	Inflasi Tahun ke Tahun***)	Andil Inflasi Desember 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UMUM	**102,15**	**102,15**	**103,34**	**0,49**	**1,16**	**1,16**	**0,49**
1. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	103,68	103,68	105,96	1,47	2,20	2,20	0,40
2. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	103,04	103,04	103,26	0,07	0,21	0,21	0,00
3. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	100,46	100,46	100,62	0,04	0,16	0,16	0,01
4. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	104,33	104,33	105,95	0,09	1,55	1,55	0,00
5. KESEHATAN	106,30	106,30	111,42	0,00	4,82	4,82	0,00
6. TRANSPORTASI	101,22	101,22	100,40	0,29	-0,81	-0,81	0,03
7. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,25	99,25	98,86	0,00	-0,39	-0,39	0,00
8. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	104,81	104,81	109,33	0,00	4,31	4,31	0,00
9. PENDIDIKAN	102,78	102,78	102,81	0,00	0,03	0,03	0,00
10. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	100,82	100,82	102,11	0,31	1,28	1,28	0,04
11. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	103,23	103,23	107,87	-0,03	4,49	4,49	0,00

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2021
*Keterangan: *) Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK November 2020*
***) Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019*
****) Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019*

2.11 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

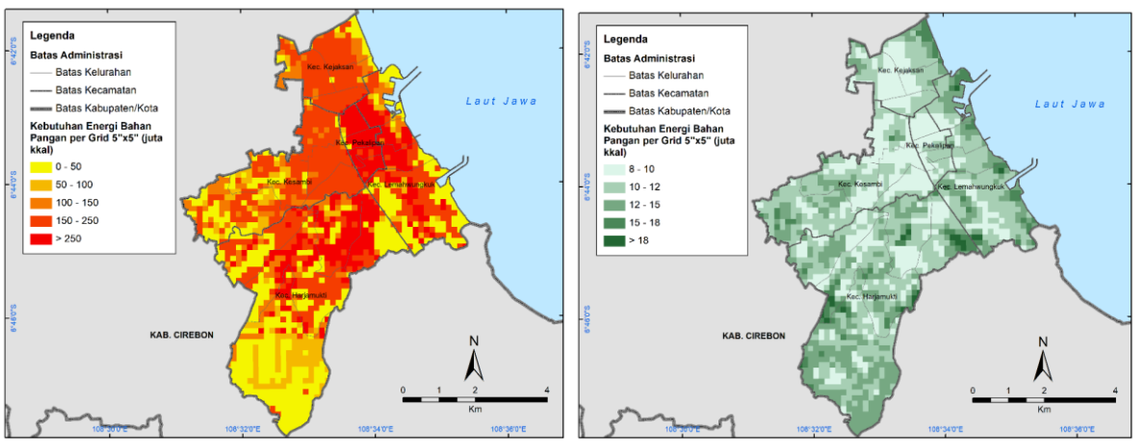
2.11.1 Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Pangan Kota Cirebon

Pangan merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan mendasar yang diperlukan bagi kehidupan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, suatu wilayah memiliki kemampuan penyediaan dengan jumlah yang terbatas. Keterbatasan jumlah pangan yang dapat disediakan oleh suatu wilayah akan menjadi masalah apabila kebutuhan yang perlu dipenuhi lebih tinggi dibandingkan ketersediaan pangan yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pemodelan untuk menganalisis daya dukung dalam penyediaan pangan untuk mengetahui kondisi wilayah sebagai dasar dalam menyusun strategi pemenuhan pangan.

Kebutuhan pangan akan bergantung dengan jumlah penduduk. Pada pemodelan ini, perhitungan dilakukan dalam sistem grid ukuran 5”x5” (150m x 150m). Jadi, untuk mendapatkan nilai kebutuhan pangan perlu diketahui jumlah penduduk di setiap grid dan besarnya kebutuhan energi

bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Hasil pemodelan kebutuhan pangan Kota Cirebon di tahun 2020. Kebutuhan pangan tinggi tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Cirebon, terutama di bagian utara dan tengah (direpresentasikan dengan warna merah), yaitu di Kecamatan Pekalipan dan bagian utara dan timur Kecamatan Harjamukti. Hal ini disebabkan wilayah tersebut didominasi oleh penutup lahan berupa permukiman, yaitu bangunan permukiman dan pekarangan. Kondisi penutup lahan ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga memiliki kebutuhan pangan yang tinggi pula. Berikut merupakan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kota Cirebon tahun 2020 ditunjukkan oleh **Gambar 2.66**.

Gambar 2.66 Peta kebutuhan dan ketersedian energi bahan pangan tahun 2020 di Kota Cirebon dalam sistem grid 5”x5”



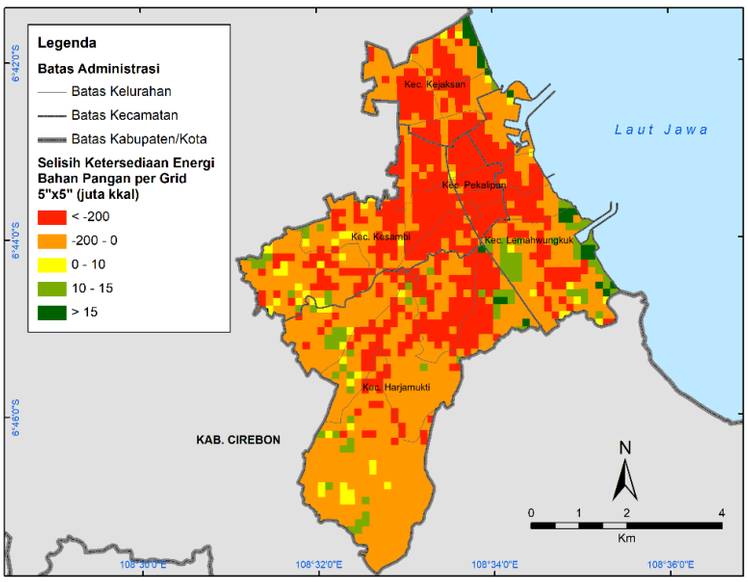
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan suatu wilayah dalam satu tahun, yang meliputi produksi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan perikanan, dengan memperhitungan presentase berat yang dapat dimakan. Produksi pangan ini kemudian dikonversi menjadi satuan energi bahan pangan agar dapat dihitung kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah energi bahan pangan kemudian didistribusikan dalam sistem grid dengan menggunakan nilai indeks jasa ekosistem (IJE) penyedia pangan sebagai bobotnya. Wilayah dengan nilai ketersediaan energi bahan pangan tinggi sebagian besar berada di bagian utara dan selatan Kota Cirebon (direpresentasikan dengan warna hijau tua), seperti di bagian pesisir Kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk, dan bagian timur dan selatan Kecamatan Harjamukti. Wilayah dengan nilai ketersediaan energi bahan pangan yang tinggi ini didominasi oleh penutup lahan penghasil pangan, yaitu berupa tambak, sawah, dan tanaman campuran.

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan, dapat dihitung selisih ketersediaan terhadap kebutuhan bahan pangan untuk melihat wilayah yang memiliki kelebihan dan kekurangan energi bahan pangan. Hasil dari perhitungan selisih ketersediaan bahan pangan terhadap kebutuhan terdapat pada peta **Gambar 2.67**. Sebagian besar Kota Cirebon memiliki

selisih negatif yang menunjukkan bahwa terjadi defisit atau kekurangan bahan pangan, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Kejaksan, bagian utara Kecamatan Kesambi dan Harjamukti. Hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki selisih positif yang berarti mengalami surplus atau kelebihan energi bahan pangan, yang merupakan wilayah dengan penutup lahan berupa tambak, sawah, dan tanaman campuran (direpresentasikan dengan warna kuning dan hijau).

Gambar 2.67 Peta selisih ketersediaan terhadap kebutuhan energi bahan pangan tahun 2020 di Kota Cirebon dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Wilayah yang mengalami defisit atau kekurangan bahan pangan tidak berarti akan terjadi kelaparan disana, namun hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat sepenuhnya bergantung dengan produksi pangan di wilayahnya sendiri dan harus memiliki strategi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, seperti bekerjasama dengan wilayah yang dapat bertindak pemasok bahan pangan.

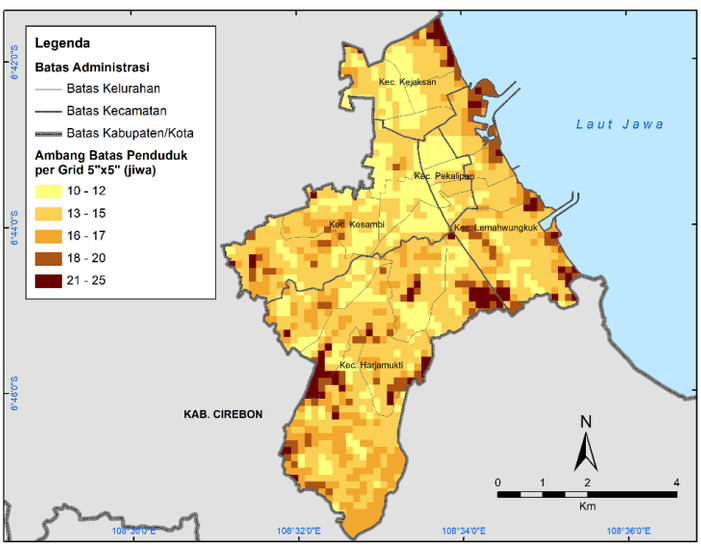
Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya dengan ketersediaan pangan yang ada di wilayah tersebut, maka dilakukan perhitungan ambang batas penduduk. Hasil perhitungan nilai ambang batas penduduk untuk penyediaan pangan di Kota Cirebon tahun 2020 ditunjukkan oleh **Gambar 2.68**. Sebagian besar, setiap grid di Kota Cirebon memiliki nilai ambang batas antara 10 hingga 15 jiwa. Ambang batas tertinggi adalah 25 jiwa, yang secara umum nilai ambang batas penduduk tinggi ini berada di kawasan tambak, dan sebagian kecil kawasan sawah dan tanaman campuran. Grid atau wilayah yang memiliki ketersediaan bahan pangan tinggi dan nilai kebutuhan yang rendah akan cenderung memiliki ambang batas yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Status daya dukung penyediaan pangan ditentukan dengan membandingkan nilai ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk

yang terdapat pada setiap grid. Status daya dukung ini kemudian dikategorikan menjadi dua, yaitu belum melampaui ambang batas atau telah melampaui ambang batas. Status belum melampaui adalah jika jumlah penduduk lebih rendah dari nilai ambang batas, maka lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, status yang telah melampaui adalah jika jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, atau yang disebut dengan melampaui ambang batas, maka lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangannya. Status daya dukung penyedia bahan pangan di Kota Cirebon tahun 2020 ditunjukkan oleh peta pada **Gambar 2.69**.

Sebagian besar Kota Cirebon memiliki wilayah dengan status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui ambang batas (ditunjukkan oleh warna abu gelap). Berdasarkan perhitungan luasannya, hanya 10,99% dari seluruh luasan wilayah yang masih dapat mendukung penyediaan pangan di Kota Cirebon. Secara lebih detail, nilai ketersediaan, kebutuhan, ambang batas, dan luas yang masih mendukung penyediaan pangan untuk setiap kecamatan di Kota Cirebon dapat dilihat pada **Tabel 2.167**.

Gambar 2.68 Peta ambang batas populasi untuk penyediaan pangan tahun 2020 di Kota Cirebon dalam sistem grid 5”x5”



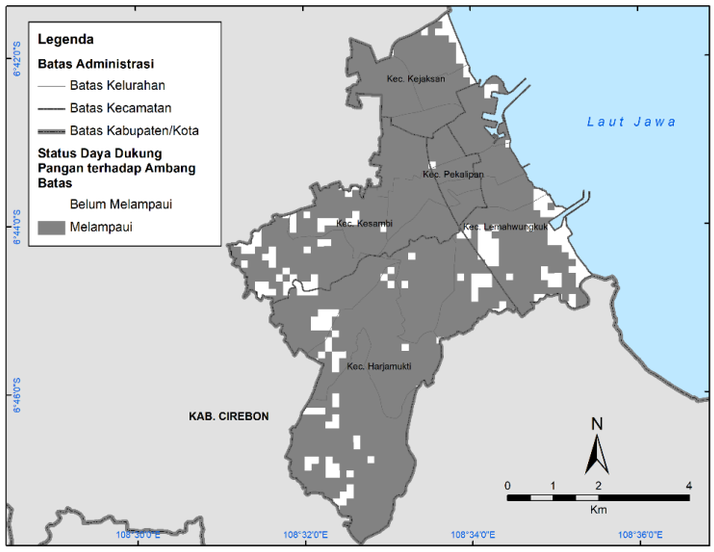
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Tabel 2.167 Ketersediaan, kebutuhan, selisih, ambang batas, dan luas wilayah DDLH pangan setiap kecamatan di Kota Cirebon tahun 2020

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih Ketersediaan	Ambang Batas (jiwa)	Luas Mendukung	
	juta kkal				Ha	%
Kec. Harjamukti	9.509,38	96.585,46	-87.076,08	12.106	153,00	3,88%
Kec. Kejaksan	2.456,53	36.066,33	-33.609,79	3.110	33,99	0,86%
Kec. Kesambi	4.393,53	60.389,65	-55.996,12	5.569	100,81	2,55%
Kec. Lemahwungkuk	4.597,12	45.128,62	-40.531,50	5.844	143,72	3,64%
Kec. Pekalipan	687,70	23.349,45	-22.661,75	865	2,36	0,06%
KOTA CIREBON	**21.644,26**	**261.519,51**	**-239.875,24**	**27.494**	**433,88**	**10,99%**

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

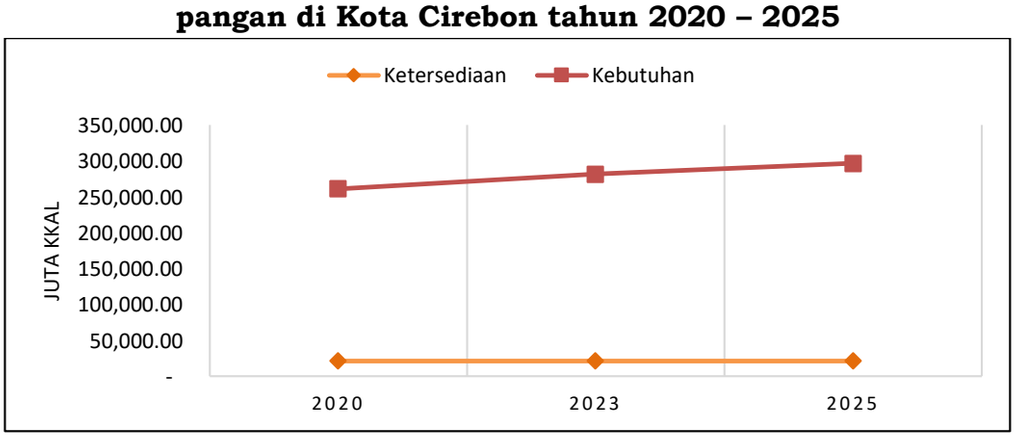
Gambar 2.69 Peta status DDLH penyedia pangan terhadap ambang batas populasi tahun 2020 di Kota Cirebon dalam sistem grid 5”x5”



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Seiring dengan perkembangan Kota Cirebon, jumlah penduduk di Kota Cirebon juga akan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, tentu jumlah kebutuhan pangan juga akan meningkat. Secara umum, peningkatan jumlah penduduk cenderung mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dari penutup lahan non-terbangun, seperti lahan pertanian, menjadi lahan terbangun karena kebutuhan untuk bermukim. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan di Kota Cirebon. Berdasarkan kondisi ini, maka dilakukan pemodelan proyeksi kebutuhan pangan di Kota Cirebon, namun masih dengan asumsi bahwa ketersediaan pangan tetap. Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kota Cirebon ditunjukkan oleh grafik pada **Gambar 2.70**. Berdasarkan pemodelan tahun 2020, hanya 10,99% wilayah Kota Cirebon yang masih dapat mendukung penyediaan pangan di Kota Cirebon. Maka, diperlukan strategi dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini, seperti dengan melakukan kerjasama bersama wilayah lain yang dapat menjadi pemasok bahan pangan bagi Kota Cirebon.

Gambar 2.70 Proyeksi kebutuhan pangan terhadap ketersediaan pangan di Kota Cirebon tahun 2020 – 2025



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Sebagai kota yang merupakan pusat perdagangan di Wilayah III Cirebon dan daerah lintasan Jawa Barat ke Jawa Tengah melalui jalur pantai utara

(pantura), Kota Cirebon cukup diuntungkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan adanya pasokan pangan dari wilayah lain untuk perdagangan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kewaspadaan terhadap adanya konflik, baik di dalam Kota Cirebon atau di wilayah pemasok bahan pangan, karena hal ini akan berpengaruh dengan jumlah pasokan pangan yang masuk di Kota Cirebon.

2.11.2 Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Air Kota Cirebon

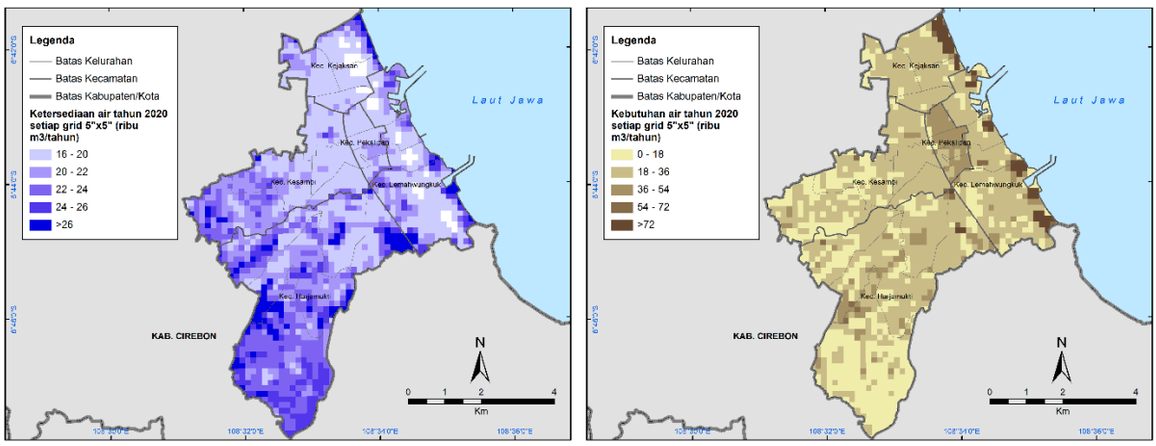
Analisis DDLH air didahului dengan menghitung nilai jumlah ketersediaan dan kebutuhan air. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air yang dinyatakan dalam jumlah penduduk disebut dengan nilai ambang batas. Dari nilai ambang batas ini kemudian dapat diketahui status daya dukung penyedia air.

Ketersediaan air dimodelkan dengan mendistribusikan ketersediaan air per WD atau wilayah distri sungai menjadi ketersediaan air per grid melalui pendekatan jasa lingkungan penyedia air. Kota Cirebon masuk dalam satu jenis WD yaitu WD Cirebon Pantura. Berdasarkan hasil pemodelan, jumlah ketersediaan air di Kota Cirebon mencapai 40,15 juta m3/tahun. Tingkat ketersediaan tinggi sebagian besar tersebar di bagian pesisir Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk yang didominasi oleh tutupan lahan tambak, dan di Kecamatan Harjamukti yang berada pada tutupan lahan pertanian. Sementara tingkat ketersediaan paling rendah sebagian besar tersebar di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Kesambi yang didominasi oleh tutupan lahan permukiman dan bangunan.

Analisis kebutuhan air dalam KLHS ini menggunakan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan air domestik mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yaitu sebesar 43,2 m^3/kapita/tahun (KLHK, 2009). Sementara kebutuhan air lahan yang dimasukkan yaitu kebutuhan air untuk lahan produksi seperti lahan sawah, perkebunan, ladang, tambak, dan industri. Jumlah kebutuhan air di Kota Cirebon berdasarkan pemodelan mencapai 45,18 juta m3/tahun. Sebagian besar kebutuhan berasal dari kebutuhan air domestik dengan persentase sebesar 63,73% atau 28,79 juta m3/tahun. Sedangkan jumlah kebutuhan air untuk lahan sekitar 16,39 juta m3/tahun atau 36,27%. Peta persebaran ketersedian dan kebutuhan air di Kota Cirebon ditunjukkan pada Error! Reference source not found.**71**. Kebutuhan paling besar tersebar di wilayah pesisir dari Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk yang bertutupan lahan tambak. Sementara kebutuhan paling rendah sebagian besar tersebar di Kecamatan Kesambi, Kecamatan Harjamukti, dan bagian barat Kecamatan Lemahwungkuk.

Gambar 2.71 Ketersediaan dan Kebutuhan air tahun 2020

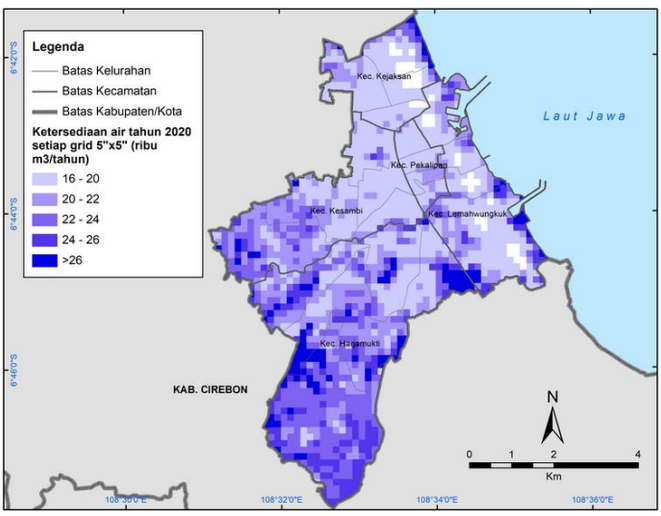
setiap grid 5”x5” di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Berdasarkan nilai ketersediaan dan kebutuhan selanjutnya dapat diketahui nilai selisih ketersediaan air. Perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu memperhitungkan ketersediaan air hanya pada wilayah Kota Cirebon sendiri tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain.Kondisi selisih ketersediaan air secara keseluruhan di Kota Cirebon masih defisit atau nilai kebutuhan air lebih besar dibandingkan ketersediaan air. Peta persebaran selisih ketersediaan air ditunjukkan pada **Gambar 2.72**. Berdasarkan peta tersebut diketahui bahwa selisih ketersediaan tinggi sebagian besar tersebar di Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Lemahwungkuk.

Gambar 2.72 Selisih ketersediaan air tahun 2020 setiap grid 5”x5” di Kota Cirebon



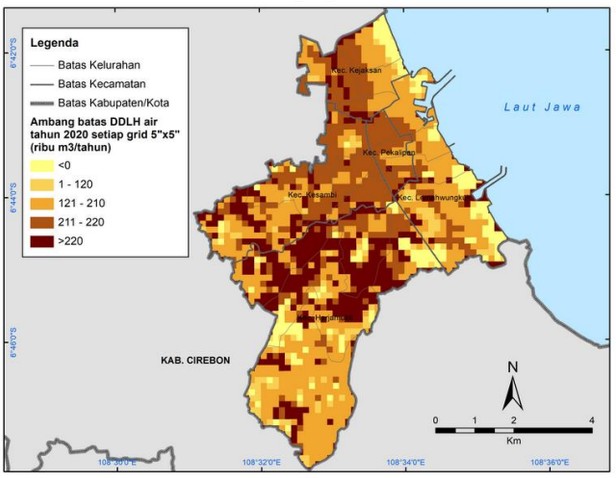
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Nilai jumlah penduduk yang kebutuhan airnya mampu dipenuhi dari ketersediaan air yang ada di Kota Cirebon diketahui melalui analisis ambang batas penduduk. Peta persebaran ambang batas di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar 2.73**. Ambang batas tinggi sebagian besar tersebar di bagian utara Kecamatan Harjamukti dan bagian barat Kecamatan Kesambi. Sedangan ambang batas paling rendah sebagian besar

tersebar di bagian pesisir Kecamatan Kejaksan, bagian timur Kecamatan Lemahwungkuk, dan bagian selatan Kecamatan Harjamukti.

Setelah diperoleh nilai ambang batas maka selanjutnya dapat diketahui kondisi status DDLH penyedia air di Kota Cirebon. Sebagian besar wilayah Kota Cirebon memiliki status DDLH penyedia air yang sudah melampaui. persentase luas wilayah yang belum melampaui hanya 38,20% atau sekitar 1.506,73 ha.

Gambar 2.73 Ambang batas penduduk terhadap DDLH air tahun 2020 setiap grid 5"x5" di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

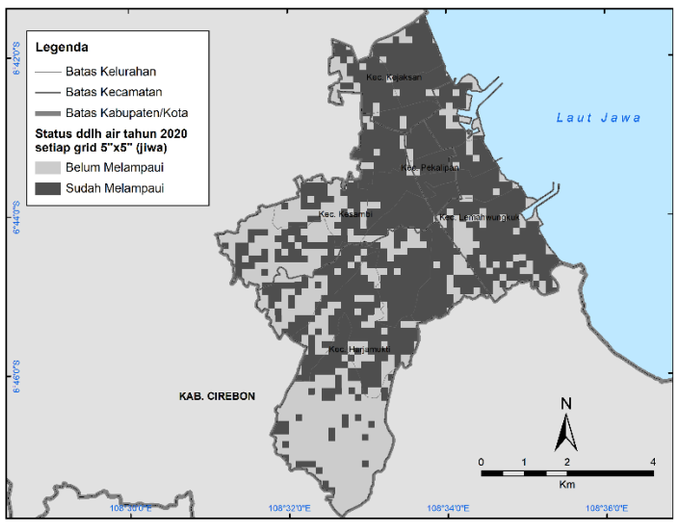
Kecamatan Pekalipan memiliki jumlah luas belum melampaui paling kecil sementara Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah luas belum melampaui paling besar. Persebaran status DDLH penyedia air di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar 2.74**. Status sudah melampaui sebagian besar tersebar di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Kesambi, dan bagian uatara Kecamatan Harjamukti. Wilayah yang sudah melampaui ambang batas bukan berarti mengalami kekeringan, melainkan wilayah tersebut harus bergantung dengan wilayah lain yang belum melampaui. Sehingga wilayah yang belum melampaui harus tetap dipelihara kelangsungan jasa lingkungannya agar tidak terdegradasi ke depannya.

Tabel 2.168 Statistik DDLH penyedia air di Kota Cirebon tahun 2020

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Total (m3/tahun)	Selisih Ketersediaan (m3/tahun)	Ambang Batas (jiwa)	Luas Belum Melampaui	
					(ha)	%
Kec. Harjamukti	18.265.868,59	17.185.224,14	1.080.644,45	135.606	876,10	49,71
Kec. Kejaksan	4.436.954,50	6.828.339,61	-2.391.385,11	18.279	72,04	16,29
Kec. Kesambi	8.351.349,30	7.946.266,42	405.082,88	81.647	351,45	40,79
Kec. Lemahwungkuk	7.777.073,36	10.592.211,48	-2.815.138,12	24.922	197,71	27,55
Kec. Pekalipan	1.317.977,02	2.628.256,11	-1.310.279,09	14.585	9,43	5,88
Total	**40.149.222,76**	**45.180.297,76**	**-5.031.075,00**	**275.039**	**1.506,73**	**38,20**

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

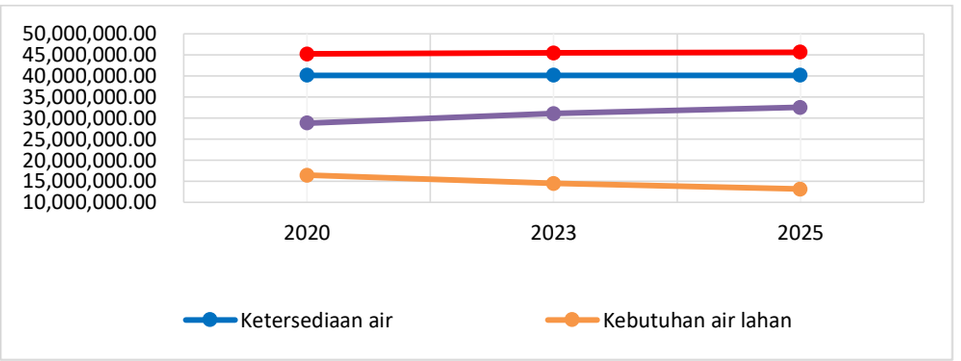
Gambar 2.74 Status DDLH air tahun 2020 setiap grid 5"x5" di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Adanya tekanan penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan tutupan lahan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kondisi ketersediaan dan kebutuhan air. Berdasarkan data proyeksi perubahan lahan dan penduduk dari tekanan, dapat diproyeksikan kondisi ketersediaan ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Cirebon hingga tahun 2025 seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2.75**. Poryeksi ketersediaan air di Kota Cirebon hingga tahun 2025 relatif tetap. Hal ini disebakan nilai IJE penyedia air dari tahun 2019 hingga 2015 juga tidak banyak yang berubah. Seperti diketahui bahwa IJE penyedia air berperan penting dalam proses pemodelan ketersediaan air. Sementara kebutuhan air total dari tahun 2019 hingga 2025 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 45.622.611,24 m^3/tahun dengan persentase kenaikan sekitar 0,98%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan air domestik pada tahun 2025 mencapai 32.511.916,80 m^3/tahun dengan persentase kenaikan sekitar 12,92%. Sementara kebutuhan air lahan justru mengalami penurunan, hingga tahun 2025 jumlah kebutuhan air lahan mencapai 13.110.694,44 m^3/tahun dengan persentase penurunan sebesar 19,99%.

Gambar 2.75 Proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Cirebon tahun 2020 – 2025



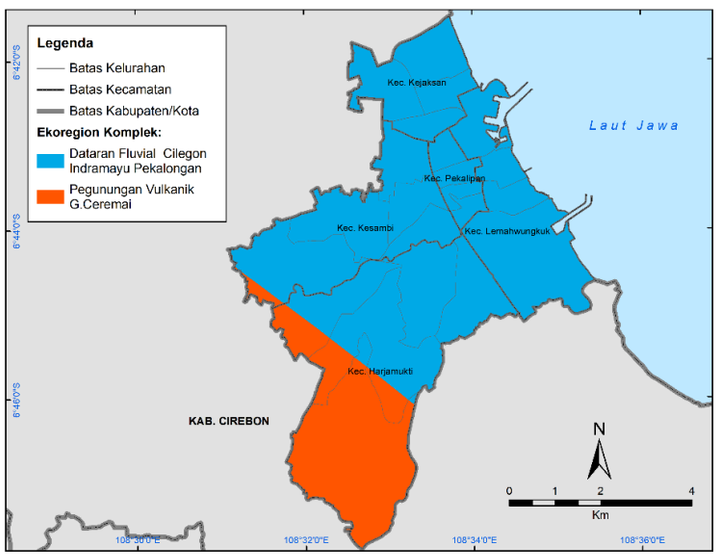
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

2.11.3 Ekoregion di Kota Cirebon

Wilayah Kota Cirebon memiliki dua jenis ekoregion komplek, yaitu: Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan dan Pegunungan Vulkanik G. Ceremai (**Gambar 2.46**). Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan merupakan ekoegion dominan dengan luas mencapai 3.083 Ha (77,5%) yang tersebar di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk, sebagian besar Kecamatan Kesambi, dan bagian utara Kecamatan Harjamukti. Dataran fluvial memiliki geomorfologi datar berombak dan kemiringan ≤ 15%. Secara hidrologis, jenis ekoregion ini memiliki air tanah dan air permukaan yang tersedia dengan cukup dan berkualitas relatif baik. Adapun tipe pemanfaatan lahan jenis ekoregion ini meliputi lahan sawah, ladang, permukiman, dan semak belukar. Kerawanan lingkungan yang mungkin terjadi adalah pencemaran air, banjir dan kekeringan.

Pegunungan Vulkanik G. Ceremai di Kota Cirebon memiliki luas sekitar 897 Ha (22,5%) yang tersebar di sebagian kecil Kecamatan Kesambi dan bagian selatan Kecamatan Harjamukti. Pegunungan vulkanik merupakan daerah yang berupa kerucut vulkanik dengan elevasi > 300 m. Tipe penggunaan lahan yang terbentuk di ekoregion ini beragam, di antaranya yaitu hutan, semak belukar, padang rumput, ladang, dan sebagian kecil permukiman. Jenis ekoregion ini berada di bawah kondisi iklim tropik semi-arid dengan suhu sejuk hingga dingin. Dengan kondisi iklim tersebut, sumber daya air permukaan, air tanah, dan mata air di jenis ekoregion ini cukup melimpah di musim hujan dengan kualitas yang baik, namun agak terbatas di musim kemarau.

Gambar 2.46 Peta ekoregion di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

2.11.4 Kinerja Jasa Lingkungan Ekosistem

Jasa ekosistem atau jasa lingkungan adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jasa lingkungan dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDLTH). Jasa lingkungan terdiri dari empat

kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Setiap kelompok jasa lingkungan memiliki beberapa jenis jasa lingkungan didalamnya. Penjelasan dan jenis dari empat kelompok jasa lingkungan tersebut terdapat pada tabel dibawah ini.

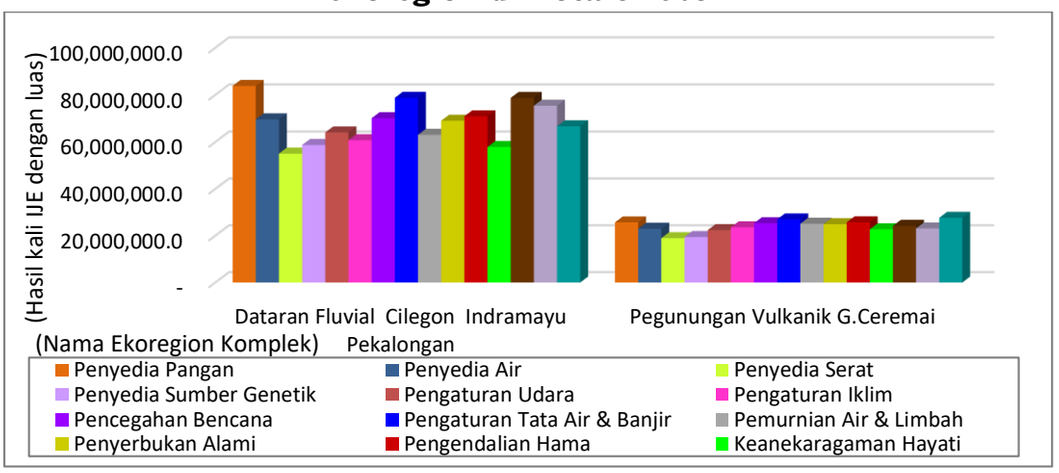
Tabel 2.169 Klasifikasi jasa lingkungan

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (*Provisioning*) (jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (*fiber*)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (*fuel*)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (*Regulating*) (manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (*pollination*)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (*Cultural*) (manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (*Supporting*) (jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll).		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (*nutrient*)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005

Setiap jasa lingkungan memiliki nilai yang disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Dalam satu unit ekoregion akan memiliki beberapa jenis jasa lingkungan dominan yang diperoleh dari nilai jasa lingkungan maksimum. Jasa lingkungan maksimum didapatkan dari hasil perkalian antara luas satu unit ekoregion dengan setiap nilai IJE dalam unit ekoregion tersebut. Proporsi jenis jasa lingkungan pada setiap ekoregion di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar 2.77**. Berdasarkan gambar tersebut, lima besar jasa lingkungan dominan di Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan yaitu: 1) Penyedia Pangan, 2) Pengaturan Tata Air & Banjir, 3) Kesuburan Tanah, 4) Produksi Primer, dan 5) Pengendalian Hama. Sedangkan lima besar jasa lingkungan dominan di Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Ceremai yaitu: 1) Siklus Hara, 2) Pengaturan Tata Air & Banjir, 3) Pengendalian Hama, 4) Penyedia Pangan, dan 5) Pencegahan Bencana.

Gambar 2.77 Proporsi jenis jasa lingkungan di setiap unit ekoregion di Kota Cirebon



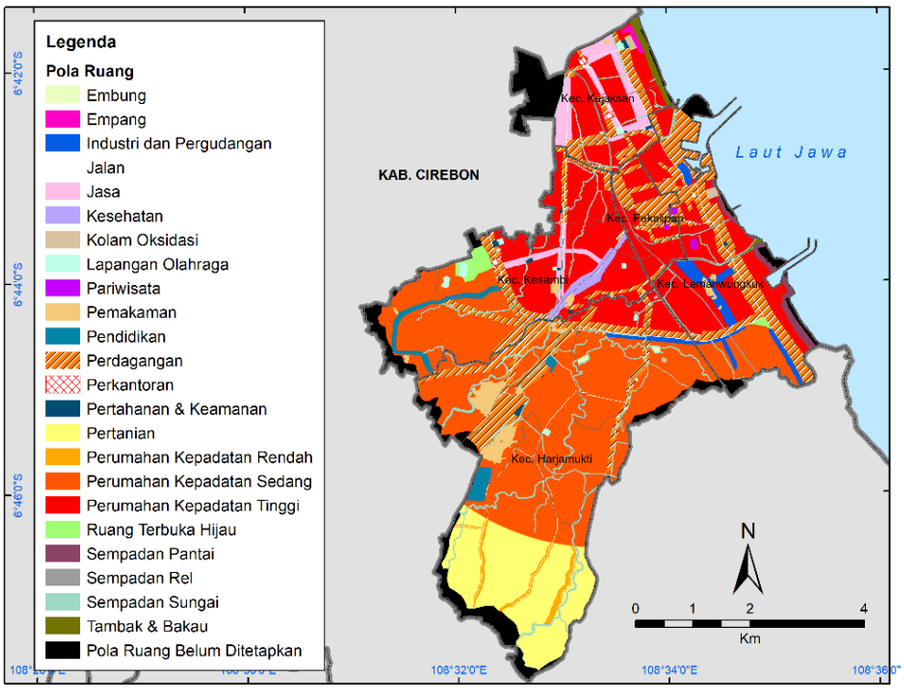
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

2.11.5 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

A. Indikasi Tumpang Tindih atau Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Analisis indikasi tumpang tindih berguna untuk melihat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekologi atau jasa lingkungannya. Tumpang tindih dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketidaksesuaian pemanfaatan dilihat dari tumpang tindih antara kawasan pola ruang (**Gambar 2.78**) dengan tutupan lahan eksisting di Kota Cirebon.

Gambar 2.78 Zona Pola Ruang RTRW Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

Kasus tumpang tindih dalam hal ini contohnya adanya tutupan lahan perumahan dalam kawasan pola ruang pertanian. Hal ini menunjukkan pemanfaatan lahan sebagai bangunan tidak sesuai dengan fungsi ekologi atau jasa lingkungannya sebagai penyedia pangan sehingga dapat menyebabkan kerusakan fungsi ekologi kedepannya.

Besarnya luasan tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan beberapa tutupan lahan eksisting penting seperti bangunan permukiman, bangunan non permukiman, dan lahan pertanian ditunjukkan pada **Tabel 2.170**. Pada tabel tersebut diketahui bahwa terdapat tutupan lahan bangunan permukiman yang berada pada kawasan pola ruang yang tidak sesuai dengan fungsi ekologinya, seperti 1.883 ha di pertanian, 158 ha di ruang terbuka hijau, 513 ha di sempadan pantai, 4.007 ha di sempadan sungai, dan 41 ha di tambak dan bakau. Begitu juga untuk tutupan lahan bangunan non permukiman juga terdapat beberapa wilayah yang berada pada kawasan pola ruang yang tidak sesuai dengan fungsi ekologinya, seperti 1 ha di ruang terbuka hijau, dan 2 ha di sempadan sungai. Adanya bangunan dalam pola ruang pertanian, badan air, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai dapat mengakibatkan menurunnya fungsi ekologi atau jasa lingkungan seperti jasa penyedia pangan, jasa penyedia air, dan jasa pengaturan air dan banjir.

Tabel 2.170 Tumpang tindih pola ruang RTRW dengan tutupan lahan tahun 2020 di Kota Cirebon

Pola Ruang	Luas Tutupan Lahan yang Tumpang Tindih (ha)		
	Bangunan Permukiman	Bangunan Non Permukiman	Lahan Pertanian & Perkebunan
Embung	14	-	1
Empang	16	-	-
Industri dan Pergudangan	1.502	-	9
Jalan	759	-	64
Jasa	2.071	-	23
Kesehatan	918	-	6
Kolam Oksidasi	22	-	3
Lapangan Olahraga	58	2	10
Pariwisata	105	-	3
Pemakaman	363	-	15
Pendidikan	680	-	28
Perdagangan	15.325	4	152
Perkantoran	32	-	1
Pertahanan & Keamanan	104	-	6
Pertanian	1.883	-	64
Perumahan Kepadatan Rendah	632	-	23
Perumahan Kepadatan Sedang	31.017	3	419
Perumahan Kepadatan Tinggi	29.458	-	121
Pola Ruang Belum Ditetapkan	3.088	-	89
Ruang Terbuka Hijau	158	1	7
Sempadan Pantai	513	-	9
Sempadan Rel	413	-	9
Sempadan Sungai	4.007	2	282
Tambak & Bakau	41	-	5

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

B. Potensi Tekanan Penduduk

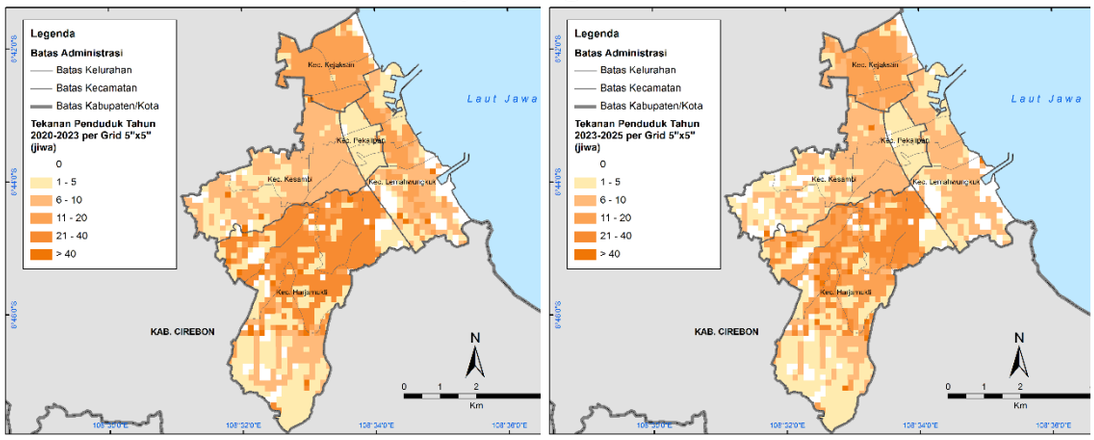
Jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah akan menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Tekanan terhadap lingkungan ini cenderung akan berdampak negatif dan memicu kerusakan lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Salah satu dampak yang timbul dari adanya tekanan penduduk ini adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan terjadi karena tingginya kebutuhan penduduk untuk bermukim dan pemenuhan kebutuhan lainnya, sehingga alih fungsi lahan yang sering terjadi adalah menjadi lahan terbangun, baik untuk bermukim atau industri.

Jumlah penduduk Kota Cirebon juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dalam angka, hasil perhitunagn rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon dari tahun 2015 hingga 2020 adalah sebesar 1,95%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya adalah Kecamatan Harjamukti (4,29%) dan Kecamatan Kejaksan (2,21%).

Tekanan penduduk diperoleh dengan melakukan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk di Kota Cirebon dimodelkan untuk tahun 2020 hingga 2025, lebih tepatnya pemodelan proyeksi penduduk dilakukan untuk tahun 2023 dan 2025 walaupun akhir periode untuk RPJMD adalah hingga tahun 2023. Dari hasil proyeksi, dapat dianalisis tekanan penduduk dengan sebaran yang ditunjukkan oleh peta pada **Gambar 2.79**. Dari hasil pemodelan, diperoleh bahwa tekanan penduduk di Kota Cirebon dari tahun

2020 hingga 2025 cenderung bergerah ke arah selatan, yaitu di Kecamatan Harjamukti.

Gambar 2.79 Peta tekanan penduduk di Kota Cirebon dalam system grid 5"x5"



(a) 2020 - 2023 (b) 2023 - 2025

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

Berdasarkan distribusi penduduk Kota Cirebon tahun 2020 (**Gambar 2.79**), wilayah dengan sebaran penduduk padat sebagian besar terdapat di Kecamatan Pekalipan, bagian utara Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Kejaksan. Hal ini disebabkan jenis tutupan lahan yang mendominasi wilayah tersebut adalah bangunan permukiman dan pekarangan, serta berdasarkan data penutup lahan tahun 2019 pada wilayah ini juga terdapat penutup lahan berupa perdagangan umum. Karena wilayah tersebut telah memiliki kepadatan yang tinggi, maka tekanan penduduk di Kota Cirebon bergerak ke arah selatan, yaitu di Kecamatan Harjamukti. Beberapa jenis penutup lahan yang terdapat di Kecamatan Harjamukti selain bangunan permukiman dan pekarangan adalah sawah dan tanaman campuran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal inilah yang memicu timbulnya alih fungsi lahan. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk bermukim dan pemenuhan kebutuhan lainnya sehingga mendorong kemungkinan adanya ekspansi industri dan lahan yang berpotensi untuk mengalami alih fungsi lahan menjadi terbangun diantaranya adalah kawasan sawah dan tanaman campuran.

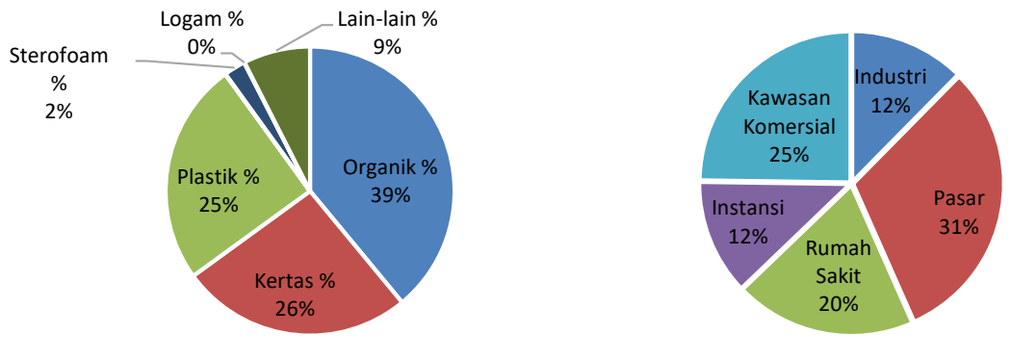
Selain alih fungsi lahan, tekanan penduduk juga akan berdampak pada hal-hal lain yang dapat memicu kerusakan lingkungan. Beberapa diantaranya adalah peningkatan timbulan sampah, peningkatan lumpur tinja, dan peningkatan beban pencemar. Ketiga hal tersebut juga akan diuraikan pada dokumen KLHS ini.

C. Potensi Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja

Timbulan sampah menjadi salah satu permasalahan di perkotaan. Jumlah timbulan sampah di Kota Cirebon pada tahun 2020 adalah 1319 m^3/hari dengan volume sampah terangkut ke TPA adalah 813 m^3/hari dengan dominasi proporsi sampah domestik sebesar 70% dan non-domestik sebesar 30%. Komposisi sampah dan proporsi sampah non-

domestik di Kota Cirebon ditunjukkan oleh **Gambar 2.80**. Persentase penanganan sampah di Kota Cirebon pada tahun 2019 mencapai 88% dengan adanya 23 unit sarana TPS, 1 unit TPST, 1 unit TPA (TPA Kopi Luhur) dengan luas 14,2 Ha, dan 30 unit Bank Sampah. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan bank sampah menjadi 42 unit (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2021).

Gambar 2.80. (a) Komposisi sampah dan (b) proporsi sampah non-domestik di Kota Cirebon

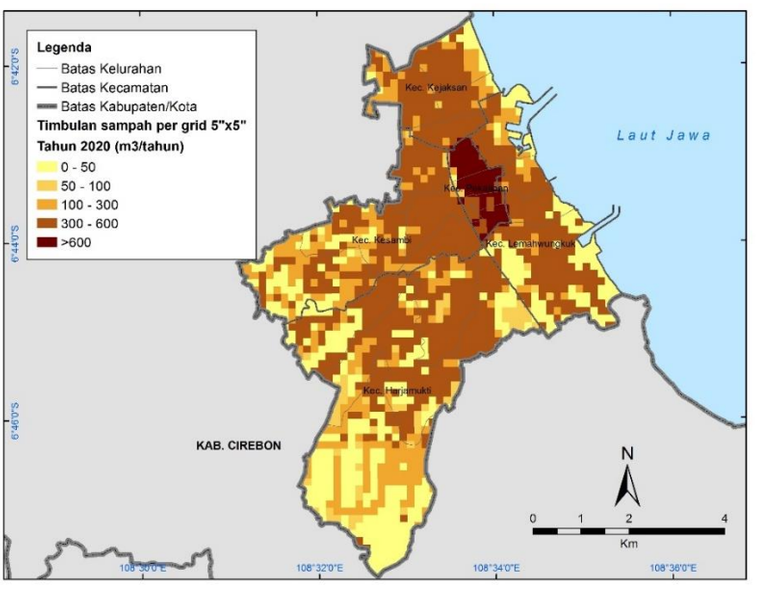


(a) (b)

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

Pemodelan distribusi timbulan sampah Kota Cirebon berdasarkan jumlah populasi dapat dilakukan dengan menggunakan jumlah timbulan sampah perkapita, yaitu 0,00395 m^3/hari (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2021). Hasil pemodelan diperoleh peta persebaran timbulan sampah di Kota Cirebon yang menunjukkan bahwa persebaran timbulan sampah terbanyak berada di wilayah pusat kegiatan dan permukiman terutama pada wilayah Kecamatan Pekalipan (**Gambar 2.81).**

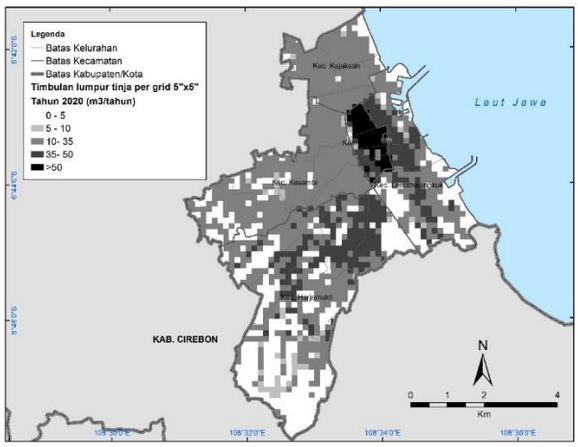
Gambar 2.81 Peta sebaran timbulan sampah di Kota Cirebon Tahun 2020



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

Selain timbulan sampah, timbulan lumpur tinja di Kota Cirebon juga dapat dimodelkan berdasarkan distribusi jumlah penduduk. Pemodelan timbulan lumpur tinja didasarkan pada laju timbulan lumpur tinja sebesar 0,5 liter /orang/hari dan perhitungan debit lumpur tinja menggunakan pendekatan layanan 50-60 % dari jumlah penduduk (Kementerian Pekerjaan Umum, 2017). Berdasarkan referensi tersebut, timbulan lumpur tinja yang dihasilkan sebesar 0,1095 m^3/orang/tahun. Model spasial timbulan lumpur tinja Kota Cirebon tahun 2019 ditunjukkan pada **Gambar 2.82**. Secara umum, pola potensi timbulan lumpur tinja sama dengan timbulan sampah.

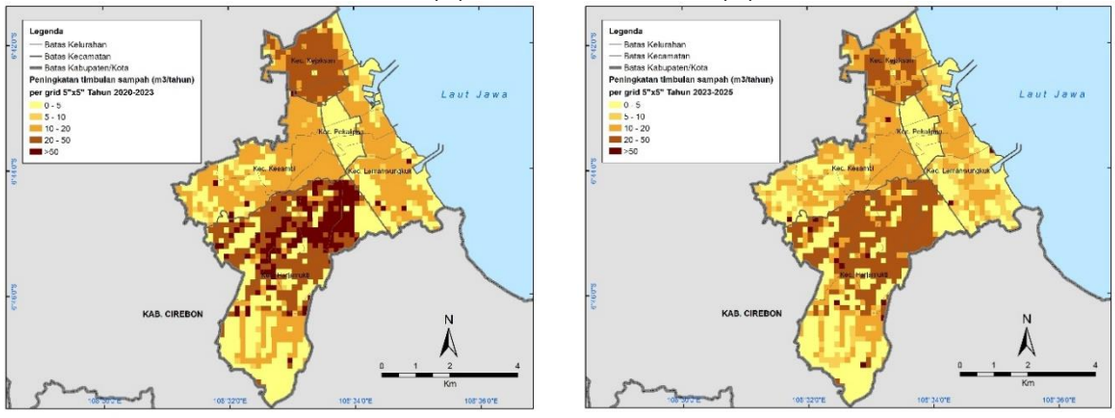
Gambar 2.82 Peta sebaran timbulan lumpur tinja di Kota Cirebon Tahun 2020



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021)

Tekanan populasi tentu akan memberikan dampak pada jumlah potensi timbulan sampah dan lumpur tinja. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah dan lumpur tinja. Hasil proyeksi dan pemodelan peningkatan jumlah timbulan sampah dan lumpur tinja tahun 2020-2023 dan 2023-2025 dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.83** dan **Gambar 2.84** Akumulasi peningkatan jumlah timbulan sampah dan lumpur tinja di setiap kecamatan berturut-turut dapat dilihat pada **Tabel 2.171** dan **Tabel 2.172.**

Gambar 2.83 Peta proyeksi sebaran peningkatan timbulan sampah di Kota Cirebon tahun (a) 2020-2023 dan (b) 2023-2025



(a) (b)

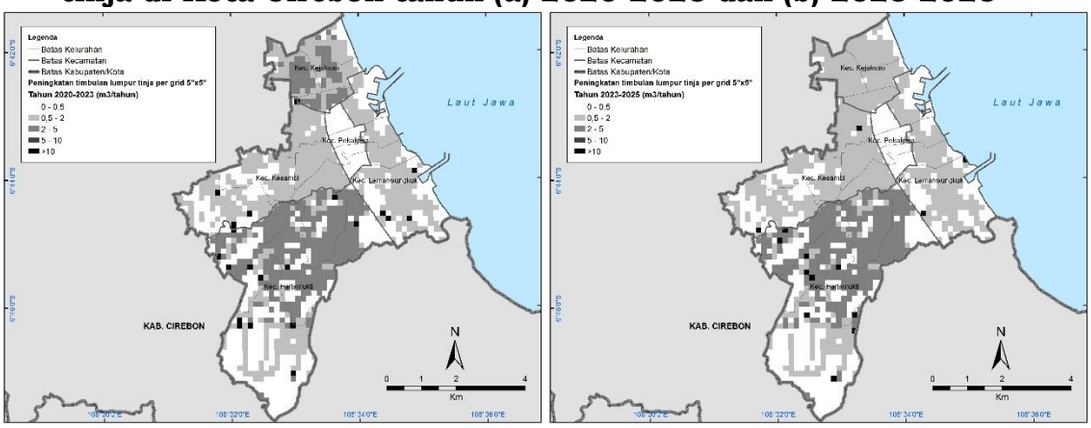
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Tabel 2.171 Potensi jumlah timbulan sampah di Kota Cirebon tahun 2020, 2023, dan 2025

Kecamatan	Potensi Timbulan Sampah (m3/tahun)		
	2020	2023	2025
Harjamukti	177447,71	201033,29	218912,43
Kejaksan	66261,39	70758,20	73912,75
Kesambi	110948,43	116004,64	119601,81
Lemahwungkuk	82910,72	86817,85	89637,92
Pekalipan	42897,83	43086,69	43249,61
Kota Cirebon	**480466,07**	**517700,71**	**545314,54**

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Gambar 2.84 Peta proyeksi sebaran peningkatan timbulan lumpur tinja di Kota Cirebon tahun (a) 2020-2023 dan (b) 2023-2025



(a) (b)

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Tabel 2.172 Potensi jumlah timbulan lumpur tinja di Kota Cirebon tahun 2019, 2021, 2023, dan 2025

Kecamatan	Potensi Timbulan Lumpur Tinja (m3/tahun)		
	2020	2023	2025
Harjamukti	13477,04	15268,35	16626,26
Kejaksan	5032,51	5374,04	5613,63
Kesambi	8426,46	8810,48	9083,68
Lemahwungkuk	6297,02	6593,76	6807,94
Pekalipan	3258,06	3272,41	3284,78
Kota Cirebon	**36491,09**	**39319,04**	**41416,29**

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Hasil proyeksi dan pemodelan timbulan sampah dan lumpur tinja menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume di wilayah selatan Kota Cirebon, terutama di Kecamatan Harjamukti. Selain itu, peningkatan volume sampah dan lumpur tinja terlihat di wilayah barat, terutama di Kecamatan Kejaksan. Hal ini sesuai dengan pola peningkatan persebaran tekanan penduduk di Kota Cirebon, terutama di wilayah permukiman.

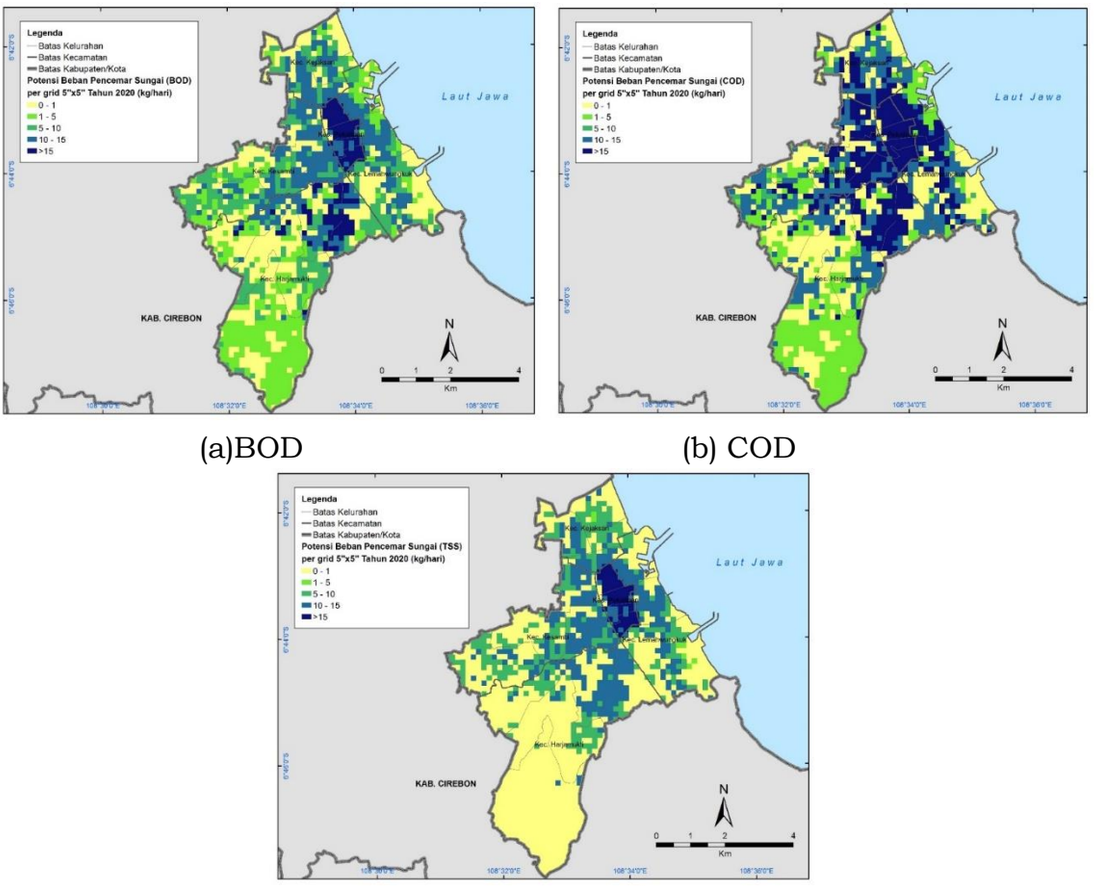
D. Potensi Beban Pencemar

Potensi beban pencemar pada air sungai dapat ditinjau dari kadar jumlah zat BOD (*Biological Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*), dan TSS (*Total Suspended Solid*). Potensi beban pencemar untuk

masing-masing zat tersebut merupakan akumulasi dari pencemaran yang berasal dari kegiatan domestik, pertanian, maupun penggunaan lahan.

Hasil pemodelan akumulasi distribusi potensi beban pencemar sungai untuk zat BOD, COD, dan TSS pada tahun 2020 di Kota Cirebon ditunjukkan masing-masing pada **Gambar 2.85**. Jumlah beban pencemar zat COD memiliki potensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan zat BOD dan TSS. Secara spasial, area dengan kadar zat pencemar sungai yang cukup tinggi terdapat di beberapa wilayah di Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Harjamukti. Namun secara akumulatif, kecamatan dengan beban pencemaran tertinggi untuk zat pencemar sungai berasal dari Kecamatan Harjamukti sebagai wilayah yang paling luas dan paling besar jumlah penduduknya. Detail mengenai akumulasi beban pencemar di setiap kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.173.**

Gambar 2.85 Potensi beban pencemar sungai zat BOD, COD dan TSS di Kota Cirebon tahun 2020



(a)BOD (b) COD

(c) TSS

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Tabel 2.173 Akumulasi beban pencemar sungai setiap kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2020

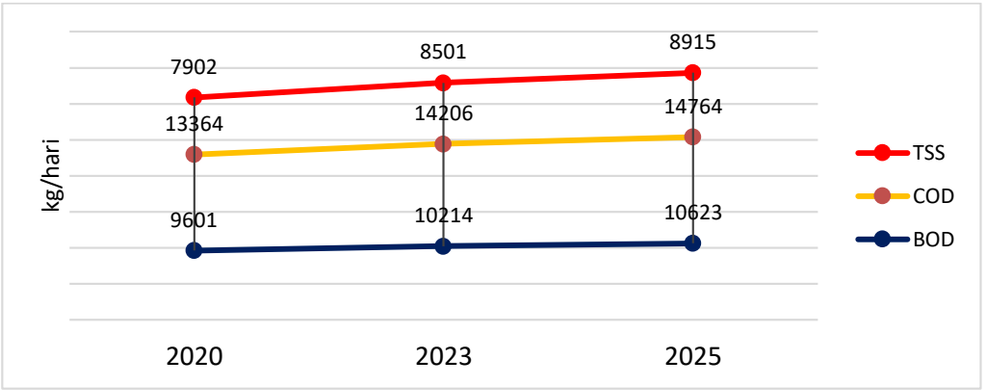
Kecamatan	Potensi Jumlah Beban Pencemar Sungai (kg/hari)		
	BOD	COD	TSS
Harjamukti	3.129,70	4.418,13	2.118,42
Kejaksan	1.147,83	1.580,91	1.071,05
Kesambi	2.432,65	3.367,33	2.143,99

Kecamatan	Potensi Jumlah Beban Pencemar Sungai (kg/hari)		
	BOD	COD	TSS
Lemahwungkuk	1.781,19	2.472,90	1.514,95
Pekalipan	1.109,19	1.525,14	1.053,73
Kota Cirebon	9.600,57	13.364,41	7.902,14

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Sama halnya dengan timbulan sampah dan lumpur tinja, tekanan populasi tentu juga akan memberikan dampak pada jumlah potensi beban pencemar sungai. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah beban pencemar. Hasil proyeksi akumulasi potensi beban pencemar sungai pada tahun 2020, 2023, dan 2025 dapat dilihat pada **Gambar 2.86.**

Gambar 2.86 Total akumulasi proyeksi potensi beban pencemar sungai di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

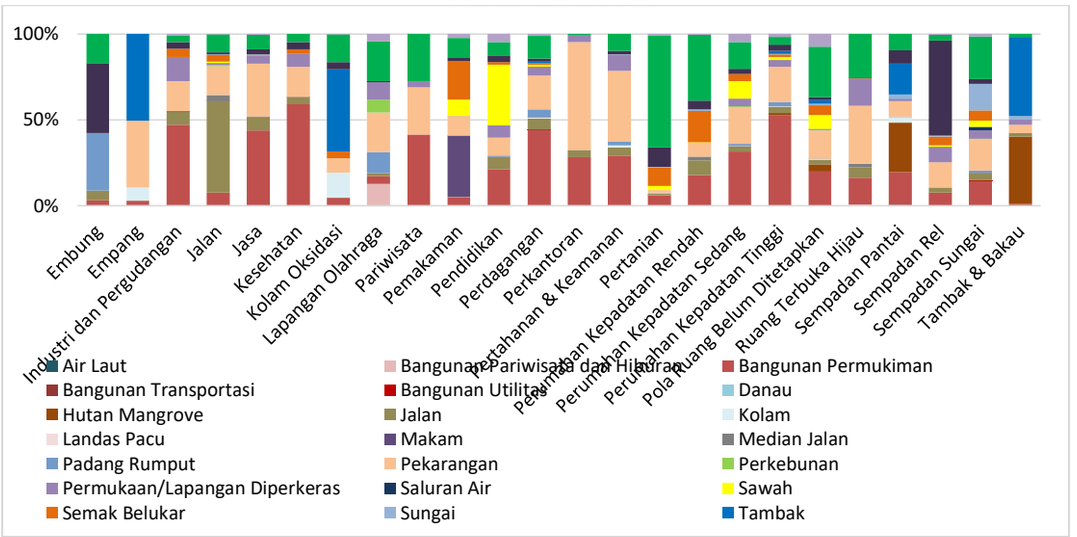
2.11.6 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam berguna untuk menunjukkan seberapa optimal potensi sumber daya alam telah dimanfaatkan. Hal ini dapat dinilai dengan membandingkan antara kondisi pola ruang dengan tutupan lahan faktual (**Gambar 2.87**). Efisiensi diukur berdasarkan IJE faktual dari pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan tutupan lahan eksisting dan nilai IJE maksimum pada setiap pola ruang di Kota Cirebon. IJE maksimum pada setiap pola ruang menunjukkan pemanfaatan optimal sumber dari daya alam yang sesuai dengan rencana pola ruang. Jasa lingkungan yang diperhitungkan dalam analisis efisiensi adalah penyedia pangan, penyedia air, dan pengaturan air dan banjir.

Nilai efisiensi untuk ketiga jasa lingkungan pada setiap pola ruang di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Tabel 2.174**. Pola ruang kolam oksidasi, tambak & bakau, empang, dan sempadan pantai memiliki efisiensi penyedia pangan yang tinggi di Kota Cirebon. Hal ini sesuai dengan Kota Cirebon yang merupakan salah satu daerah penghasil pangan olahan laut, sehingga pola ruang tersebut memiliki efisiensi penyedia pangan yang tinggi lebih tinggi dari efisiensi pola ruang pertanian. Selain itu, adapat pula dianalisis dari tutupan lahan yang terdapat di pola ruang tersebut. Sementara itu, efisiensi penyedia air tertinggi diberikan oleh pola ruang tambak & bakau dan

sempadan sungai. Pola ruang pertanian dan embung memiliki nilai efisiensi pengaturan air dan banjir yang baik. Sementara, pola ruang perkantoran, perumahan, bangunan-bangunan utilitas dan badan jalan menunjukkan nilai efisiensi yang rendah di setiap pemanfaatan sumber daya alam karena terdiri dari tutupan lahan terbangun. Pola ruang yang belum ditetapkan menunjukkan efisiensi penyediaan pangan dan efisiensi pengaturan air dan banjir yang tergolong tinggi sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya menjadikannya pola ruang yang sesuai dengan memaksimalkan potensi tersebut.

Gambar 2.87 Persentase luasan tutupan lahan terhadap pola ruang di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Tabel 2.174 Efisiensi pemanfaatan SDA pada setiap pola ruang di Kota Cirebon

Pola Ruang	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		
	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Air dan Banjir
Embung	59,32%	45,05%	59,28%
Empang	77,45%	50,72%	53,27%
Industri dan Pergudangan	49,52%	41,66%	49,09%
Jalan	49,93%	43,78%	55,08%
Jasa	50,23%	41,32%	48,52%
Kesehatan	48,65%	42,49%	47,40%
Kolam Oksidasi	83,52%	54,89%	55,48%
Lapangan Olahraga	58,96%	46,25%	57,27%
Pariwisata	53,80%	44,90%	51,93%
Pemakaman	56,14%	49,97%	57,42%
Pendidikan	65,51%	54,23%	52,81%
Perdagangan	53,58%	43,22%	50,64%
Perkantoran	47,32%	41,66%	50,28%
Pertahanan & Keamanan	51,48%	42,22%	51,63%
Pertanian	57,84%	51,67%	64,59%
Perumahan Kepadatan Rendah	51,26%	48,97%	60,93%
Perumahan Kepadatan Sedang	56,53%	48,36%	53,23%
Perumahan Kepadatan Tinggi	52,02%	42,69%	48,61%
Pola Ruang Belum Ditetapkan	60,31%	50,62%	57,82%
Ruang Terbuka Hijau	53,58%	45,99%	54,68%
Sempadan Pantai	66,64%	51,44%	57,09%
Sempadan Rel	49,43%	43,23%	53,99%
Sempadan Sungai	61,57%	55,19%	62,44%
Tambak & Bakau	77,58%	58,42%	59,07%

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

A. Efisiensi Penyediaan Pangan

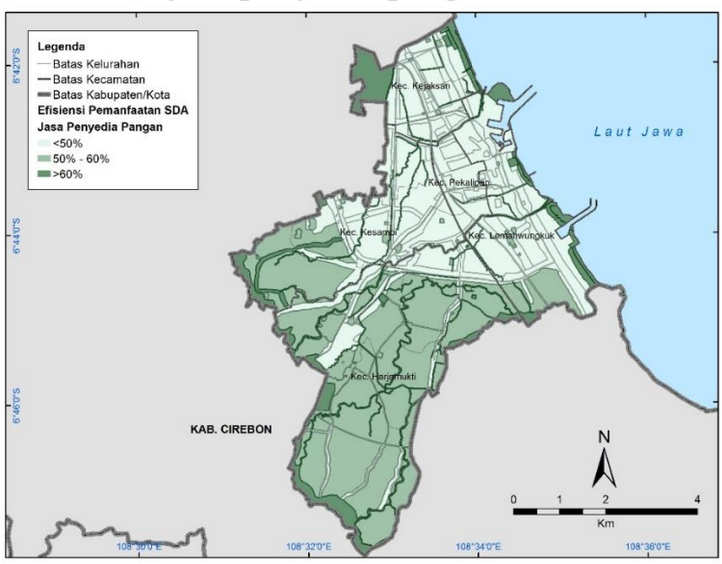
Persebaran efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dari jasa penyedia pangan di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar 2.88**. Sebaran efisiensi beragam dari rendah hingga tinggi. Nilai efisiensi sedang hingga tinggi tersebar di wilayah bagian selatan, terutama di wilayah Kecamatan Harjamukti dan Kesambi serta di bagian pantai utara. Jika di-*overlay*-kan dengan peta pola ruang, efisiensi tinggi ada pada pola ruang kolam oksidasi, tembak & bakau, empang, dan sempadan pantai, dengan nilai efisiensi 70-80%. Sementara, pola ruang pertanian, yang seharusnya memberikan nilai efisiensi tertinggi, memiliki nilai efisiensi 57,84%.

Berdasarkan **Gambar 2.89**, sekitar 22% pola ruang kolam oksidasi memiliki tutupan lahan eksisting didominasi oleh tambak dan tanaman campuran. Proporsi tutupan lahan pada pola ruang menunjukkan dominasi tanaman campuran sebesar 65,25%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil tambak lebih menjanjikan untuk penyediaan pangan di Kota Cirebon. Kondisi ini cukup bagus karena lokasi rencana pola ruang sesuai dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan. Namun perlu menjadi perhatian, karena terdapat tutupan lahan permukiman dalam pola ruang tersebut dengan persentase yang cukup besar.

Pola ruang yang belum ditentukan memberikan efisiensi penyediaan pangan sebesar lebih dari 60% dan proporsi tutupan lahannya didominasi tanaman campuran hampir 30%. Selain itu, terdapat tegalan/ladang dan sawah. Ditinjau dari analisis tersebut, maka pola ruang yang belum ditentukan memiliki potensi yang baik untuk dijadikan pola ruang penyedia pangan pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan di Kota Cirebon.

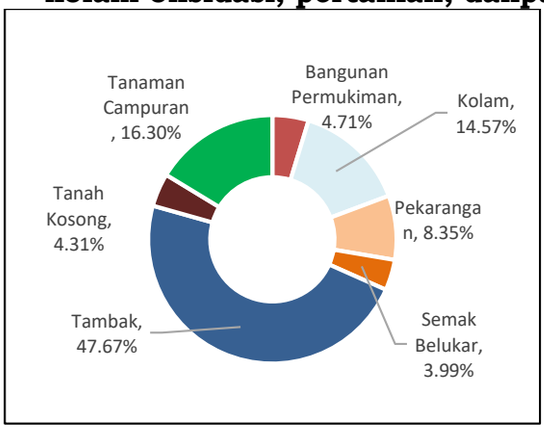
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin tinggi kebutuhan akan tempat tinggal. Sehingga terdapat potensi adanya alih fungsi lahan penyedia pangan menjadi non-pertanian seperti permukiman. Oleh karena itu tutupan lahan penghasil pangan pada pola ruang perikanan (kolam dan tambak) dan pertanian harus dipertahankan agar efisiensi penyedia pangan di Kota Cirebon tetap terjaga.

Gambar 2.88 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan jasa penyedia pangan di Kota Cirebon

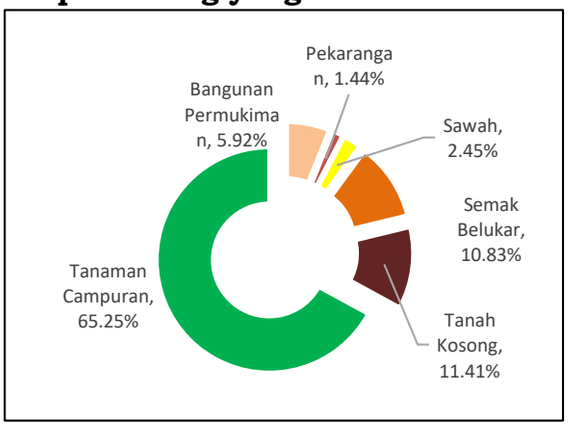


Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

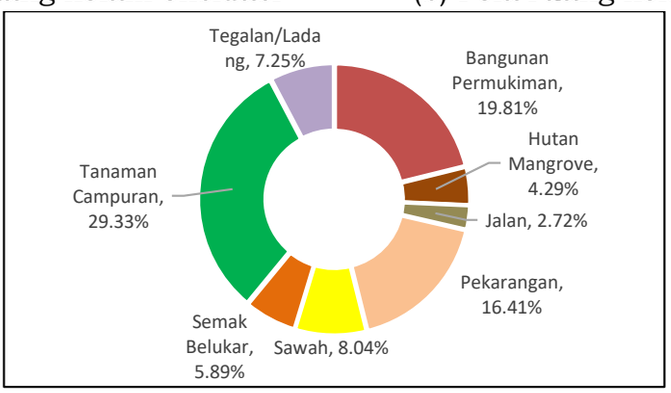
Gambar 2.89 Proporsi tutupan lahan tahun 2020 pada pola ruang kolam oksidasi, pertanian, danpada pola ruang yang belum ditentukan



(a) Pola ruang kolam oksidasi



(b) Pola ruang kolam pertanian



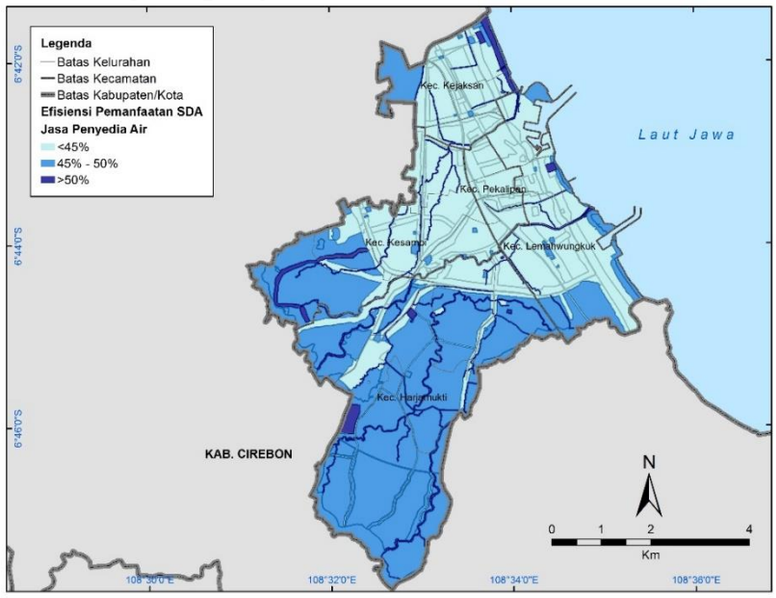
Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

B. Efisiensi Penyediaan Air

Persebaran efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dari jasa penyedia air di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar 2.90**. Sebaran efisiensi bervariasi dari rendah hingga tinggi. Sebagian besar persebaran efisiensi penyedia air termasuk pada kategori sedang dengan persentase antara 40% hingga 50%. Efisiensi paling rendah banyak didapati di wilayah padat pemukiman dan bangunan utilitas di beberapa bagian wilayah di setiap Kecamatan.

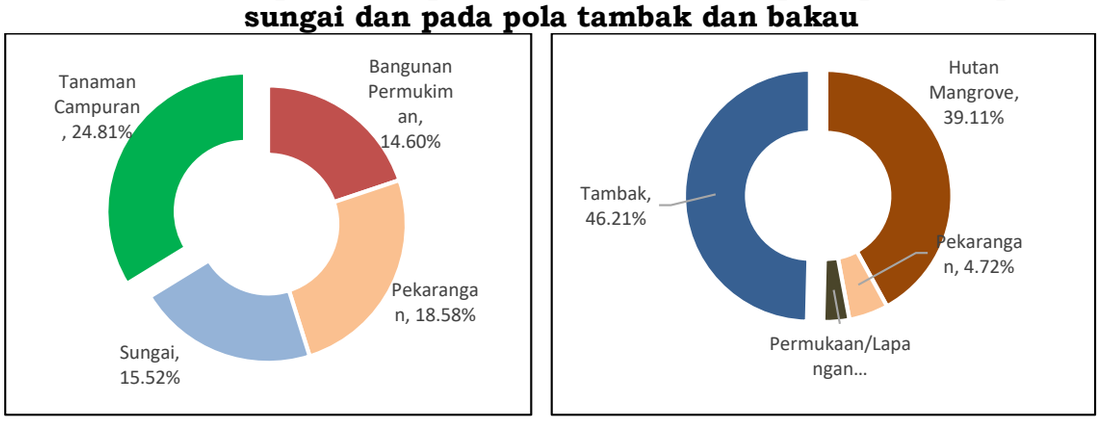
Gambar 2.90 menunjukkan bahwa efisiensi penyedia air yang tinggi mengikuti aliran sungai di Kota Cirebon. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola ruang yang memiliki peranan penting dalam penyedia air adalah sungai/badan air. Efisiensi pola ruang badan air di Kota Cirebon cukup baik yakni 55,19%. Namun perlu menjadi perhatian karena dari keseluruhan pola ruang sempadan sungai masih terdapat lahan eksisting non-sungai lainnya yang memiliki proporsi luasan cukup besar yakni tutupan lahan bangunan pemukiman sebasar 14,60% (**Gambar 2.91a**). Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam dalam hal penyediaan air di Kota Cirebon menjadi kurang optimal. Efisiensi penyediaan air tertinggi ditunjukkan oleh pola ruang tambak dan bakau yakni sebesar 58,42%. Sebagian besar wilayahnya adalah tutupan lahan tambak sebesar 46,21% dan hutan mangrove sebesar 39,11% (Error! Reference source not found.**91b**).

Gambar 2.90 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan jasa penyedia air di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Gambar 2.91 Proporsi tutupan lahan tahun 2020 pada pola sempadan sungai dan pada pola tambak dan bakau



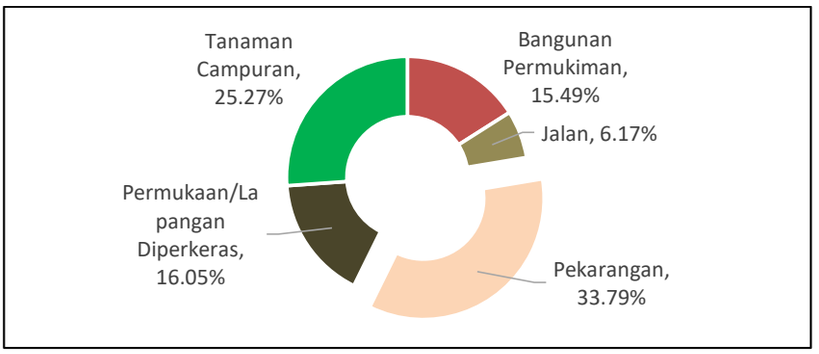
(a)Pola ruang kolam oksidasi (b) Pola ruang kolam pertanian

Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

C. Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

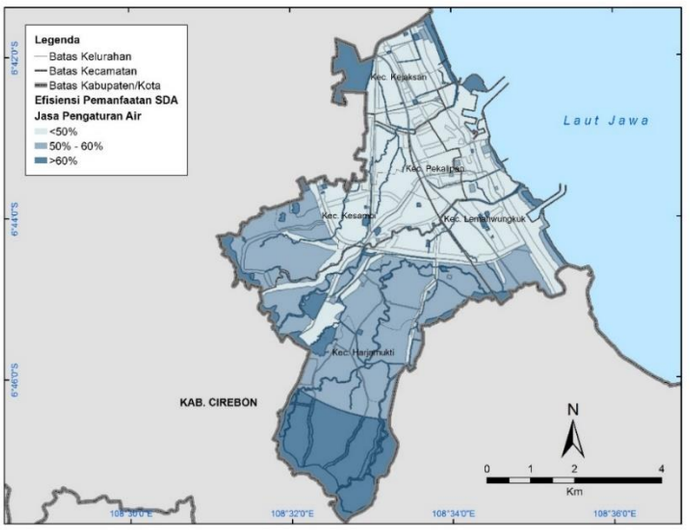
Persebaran efisiensi pemanfaatan sumber daya alam terhadap jasa pengaturan air dan banjir ditunjukkan pada **Gambar 2.92**. Sebaran efisiensi beragam dari rendah hingga tinggi. Sebagian besar efisiensi tinggi terkonsentrasi di wilayah bagian selatan seperti pada Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Harjamukti di Kecamatan Harjamukti. Wilayah dengan efisiensi tinggi didominasi pada pola ruang pertanian yakni sebesar 64,59%. Sementara pola ruang yang memiliki peranan penting terhadap jasa pengaturan air dan banjir di wilayah perkotaan seperti taman/RTH memiliki nilai efisiensi yang tidak tinggi dan tergolong efisiensi sedang yaitu 54.68%. Hampir sebagian besar tutupan lahan eksisting di pola ruang taman/RTH tersebut dimanfaatkan untuk pekarangan dan tanaman campuran (**Gambar 2.93**). Sehingga pemanfaatan sumber daya alam untuk pengaturan air dan banjir di Kota Cirebon menjadi kurang optimal.

Gambar 2.92 Proporsi penutup lahan tahun 2020 pada pola Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Gambar 2.93 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan jasa pengaturan air dan banjir di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

2.11.7 Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan penekatan SK Wali Kota Cirebon Nomor 660/Kep.143-DLH/2017, Kota Cirebon memiliki Taman Kehati dengan luas ± 4,7 Ha yang berada di Jalan Pramuka (Areal Bumi Perkemahan), Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Taman Kehati tersebut termasuk dalam Taman Kehati Kota Tipe A dengan Jenis utama tanamannya terdiri dari 6 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 5 (lima) individu yang berasal dari induk berbeda. Dalam Taman Kehati tersebut terdapat 48 jenis tanaman. Dengan kondisi eksisting saat ini terdapat tanaman Campolay, Srikaya, Jamblang, Gayam dan Kesambi. Jenis tanaman yang terancam punah yaitu Campolay, Jamblang dan Gayam. Tanaman yang berpotensi ekonomi tinggi Mangga gedong gincu, Mangga arumanis, Nangka dan Rosela. Jenis burung meliputi Burung puyuh, Burung Tekukur, Burung Ketilang dan Burung Sogon. Jenis serangga meliputi Belalang besar, Belalang sembah, Semut rangrang, Semut api, dan Semut hitam.

Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di Kota Cirebon, ditemukan terdapat beberapa jenis spesies keanekaragaman hayati flora dan fauna di Kota Cirebon, yaitu:

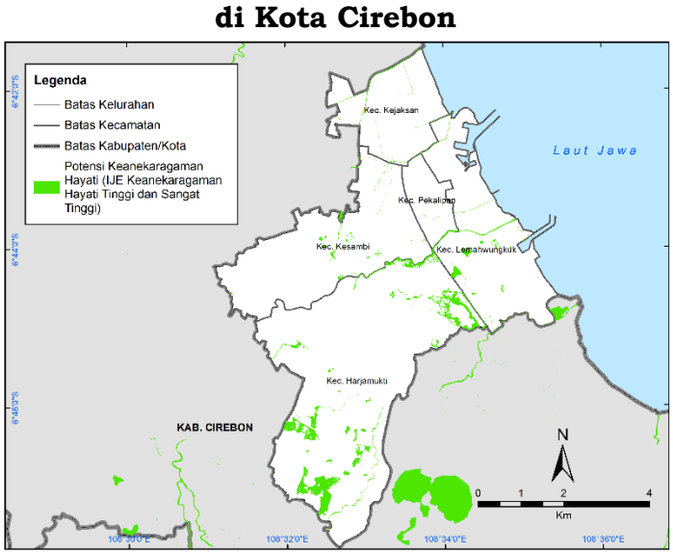
1. Keanekaragaman hayati flora
   a. Tumbuhan liar yang belum mempunyai nilai ekonomi terdapat 16 jenis, 9 spesies berada di darat dan 6 spesies berada di perairan. Semua species yang ada umumnya merupakan species yang diintroduksikan dari luar wilayah Kota Cirebon dan belum dilindungi.
   b. Tumbuhan liar yang mempunyai nilai ekonomi terdapat 18 jenis tanaman liar daratan dan 10 jenis tanaman liar perairan.
   c. Tanaman pangan satu jenis yaitu padi. Tanaman palawija yang ditanam masyarakat di Kota Cirebondiantaranya: jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah.
   d. Jenis tanaman hortikultura yang terdapat di Kota Cirebon meliputi tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Jenis tanaman buah-buahan yang dapat diinventarisasi tercatat sebanyak 33 jenis antara lain nangka, rambutan, kelapa, sirsak, sawo, belimbing, srikaya, jambu air, jambu biji, mangga, pepaya, pisang, delima, sukun, alpukat, jeruk, manggis, melinjo, asem dan sebagainya.
   e. Tanaman sayuran yang ada di Kota Cirebon terdiri dari 13 spesies. Tanaman sayuran yang ada di Kota Cirebon terinventarisir terdiri dari jenis petai, petai cina, kangkung, terong, bayam, cabai besar, kacang panjang, cabai rawit dan ketimun dengan daerah penyebaran umumnya terdapat di Sunyaragi dan Argasunya.
   f. Jenis tanaman hias yang ada di Kota Cirebon yang berhasil diinventarisir tercatat sebanyak 41 jenis yang tersebar di semua kecamatan terutama di lingkungan permukiman dan perkantoran baik tanaman hias jenis daun maupun bunga.
   g. Jenis rumput yang biasa digunakan sebagai pakan ternak yang berhasil diinventarisi yang ada di Kota Cirebon diantaranya rumput gajah, rumput belulang, rumput panikum, rumput-rumputan dan rumput tipa dengan lokasi penyebarannya umumnya terdapat di Argasunya.
   h. Jenis tanaman obat yang berhasil diinventarisir pada saat survey yang terdapat di Kota Cirebon tercatat sebanyak 22 jenis diantaranya Mengkudu, Mahkota dewa, Lidah buaya, Sereh, Lidah mertua, Rosela, Jahe, Laos, kencur, kunyit, lempuyang, temu lawak, temu ireng, kejibeling, dringo, dan sambiloto.
   i. Jenis tanaman kehutanan yang berhasil diinventarisir di Kota Cirebon tercatat sebanyak jenis antara lain manglid, kiarapayung, mahoni, tanjung, jamaica, jati, dadap merah, trembesi, bintaro, angsana, tabebuya, glondongan tiang, glondongan biasa, sonokeling, widoro laut, ketapang, cemara udang, sinyo nakal, pucuk merah, bidara, kecapi, kesambi, dan dewandaru, dengan lokasi penyebarannya di Kalijaga, Harjamukti, Argasunya,

Panjunan, Kesepuhan, Karyamulya, Sunyaragi, Drajat, dan Kesambi.

2. Keanekaragaman hayati fauna
   a. Hewan liar belum mempunyai nilai ekonomi di Kota Cirebon terdiri dari 3 spesies kelas amphibia, 2 spesies kelas arachnida, 10 spesies kelas aves, 13 spesies kelas insecta, 4 spesies kelas mamalia, 3 spesies kelas reptilia, 3 spesies kelas crustacea, 4 spesies kelas Mollusca, 1 kelas reptilia laut, dan 3 spesies kelas pisces.
   b. Jenis hewan liar sudah mempunyai nilai ekonomi di Kota Cirebon terdiri dari 3 (tiga) kelas untuk hewan yang berada di darat dan 4 (empat) kelas untuk hewan yang berada di perairan. Hewan daratan terdiri dari kelas aves 13 spesies, kelas mamalia 1 spesies, kelas reptilia 1 spesies. Sedangkan untuk hewan perairan terdiri dari kelas crustacea 3 spesies, kelas mollusca 1 spesies, kelas pisces 23 spesies dan kelas reptilia 1 spesies.
   c. Hewan budidaya perairan tawar, payau di Kota Cirebon seperti kepiting soka, bandeng, udang vaname, lele, nilai, patin, dan mujair.
   d. Hewan ternak seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, itik manila atau entok, kelinci, angsa, dan burung merpati.
   e. Hewan kesayangan seperti anjing, kucing, dan kelinci.

Secara spasial, potensi keanekaragaman hayati di Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar 2.94**. Peta tersebut diperoleh dari persebaran jasa ekosistem pengaturan habitat dan keanekaragaman hayati pada tingkat tinggi dan sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati sebagian besar tersebar di Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Lemahwungkuk. Dalam menjaga kelangsungan hidup potensi keanekaragaman hayati ini perlu adanya kerjasama dengan wilayah lain disekitar yaitu Kabupaten Cirebon.

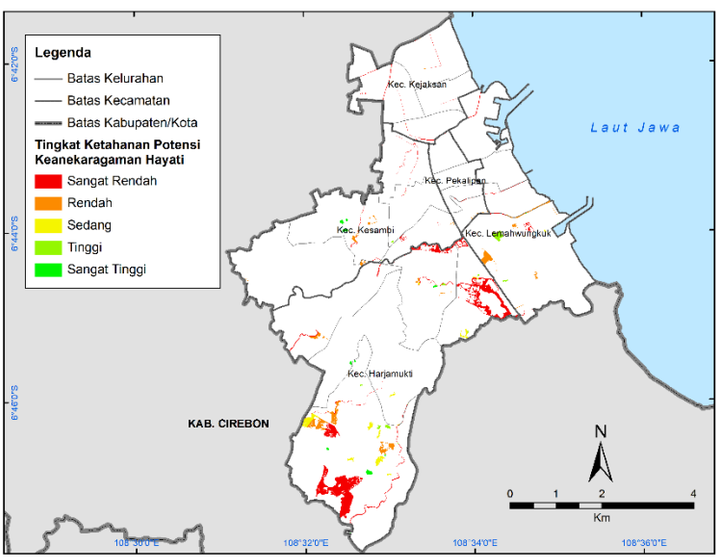
Gambar 2.94 Potensi keanekaragaman hayati tahun 2020 di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

Tingkat ketahanan dari potensi keanekaragaman hayati di Kota Crebon ditunjukkan pada **Gambar 2.95.** Ketahanan keanekaragaman hayati dapat dinilai berdasarkan *shape index*, yaitu ukuran tentang bentuk dari suatu petak (*patch*) ekosistem, yang menunjukkan seberapa efektif petak tersebut dalam mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Secara teoritis, ukuran petak yang sama dapat memberikan efek yang berbeda bagi daya jelajah satwa di dalam suatu ekosistem. Hal tersebut dipengaruhi oleh bentuk petak, bentuk lingkaran memberikan kondisi habitat yang paling baik, sementara petak yang memanjang memberikan ruang yang sempit bagi satwa untuk menjelajah, karena perbandingan keliling dan luas akan menjadi lebih tinggi dan memberikan efek pada keterpaparan satwa dengan ekosistem luar (Csorba & Szilard, 2012). Pada **Gambar 2.95** ditunjukkan bahwa ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Cirebon sebagian besar berada pada tingkat sangat rendah dan rendah dengan bentuk petak ekosistem berupa area dengan bentuk tidak beraturan dan memanjang. Sehingga diperlukan upaya peningkatan keterhubungan antara petak-petak tersebut agar dapat meningkatkan potensi terpeliharanya keanekaragaman hayati di Kota Cirebon.

Gambar 2.95 Tingkat ketahanan potensi ketahanan hayati tahun 2020 di Kota Cirebon



Sumber: KLHS PRPJMD Tahun 2018-2023, 2021

2.11.8 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Bencana

Bencana yang terjadi terkait dengan perubahan iklim diantaranya banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, angin puting beliung. Sementara bencana yang terjadi terkait dengan faktor geologis di antaranya adalah gempa bumi dan letusan gunung api. Berikut di bawah ini penjelasan mengenai kebencanaan di Kota Cirebon meliputi, bahaya, kerentanan, risiko dan kapasitas adaptasi daerah terkait dengan perubahan iklim dan bencana geologis.

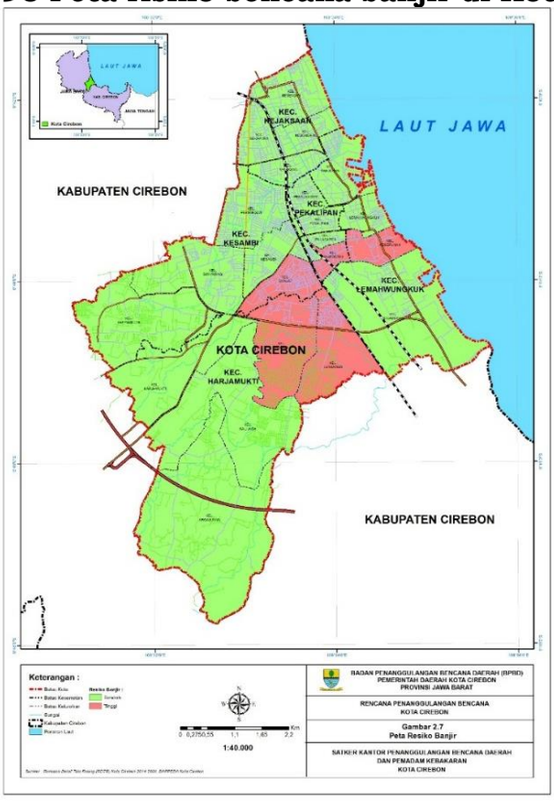
A. Kerentanan Bencana Banjir

Berdasarkan kajian risiko bencana oleh BPBD Kota Cirebon, banjir merupakan jenis ancaman bencana dengan tingkatan yang rendah dan

tinggi. Sekitar 6 persen wilayah Kota Cirebon berada di bawah permukaan air pasang. Ketinggian permukaan tanahnya lebih rendah dari elevasi pasang laut. Wilayah ini disebut sebagai dataran banjir sungai, dan tentu saja sangat rawan dengan banjir. Daerah tersebut biasanya dijadikan sebagai tempat penampungan air banjir sementara (*retarding basin*). Namun dalam perkembangan selanjutnya daerah-daerah ini berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman yang relatif padat penduduk. Beberapa diantaranya adalah Kelurahan Kesepuhan di Kecamatan lemahwungkuk dan Kelurahan Jagasatru di Kecamatan Pekapilan (Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, 2016).

Secara umum, banjir di Kota Cirebon ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya palung-palung sungai yang menyempit akibat sedimentasi; sistem drainase yang tidak dapat mengalirkan air genangan akibat perkembangan pembangunan kota; pintu air sungai yang rendah sehingga menggenangi daerah perumahan dan mengakibatkan sampah yang terbawa banjir sulit untuk dibersihkan; muka air sungai yang meningkat saat air laut pasang; dan dimensi saluran drainase di sisi dan di bawah badan jalan dan trotoar lebih kecil daripada saluran drainase sehingga terjadi fenomena *turtleneck* dan *backwater* ((BBWS Cimancis, 2021)). Peta di bawah menunjukkan bahwa terdapat 5 kelurahan yang memiliki risiko banjir tinggi yakni Kelurahan Larangan, Kecapi, Jagasatru, Drajat, dan Kesepuhan (**Gambar 2.96**).

Gambar 2.96 Peta risiko bencana banjir di Kota Cirebon

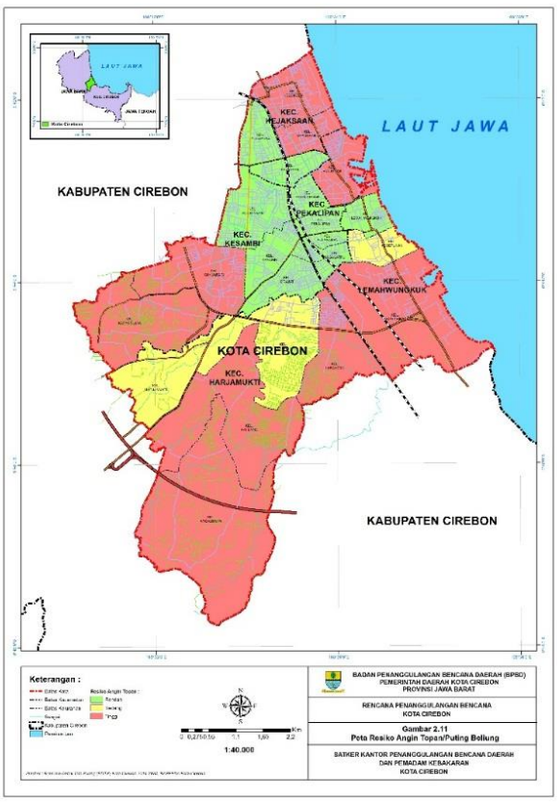


Sumber: KPBD Kota Cirebon, 2016

B. Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim (Angin Topan / Beliung)

Beberapa wilayah Kota Cirebon memiliki tingkat risiko tinggi terhadap cuaca ekstrim (angin puting beliung), terutama di Kelurahan Lemahwungkuk dan Jagasatru (**Gambar 2.97**). Hal ini disebabkan karena wilayah Sebelah Utara Kota Cirebon berbatasan dengan Laut Jawa dengan kondisi topografi sebagian besar daratan adalah hasil dari pengurukan rawa-rawa yang mempunyai ketinggian rata-rata 0 s/d 1 meter diatas permukaan laut terutama ditemukan di sepanjang pantai (Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, 2016).

Gambar 2.97 Peta risiko bencana angin puting beliung di Kota Cirebon

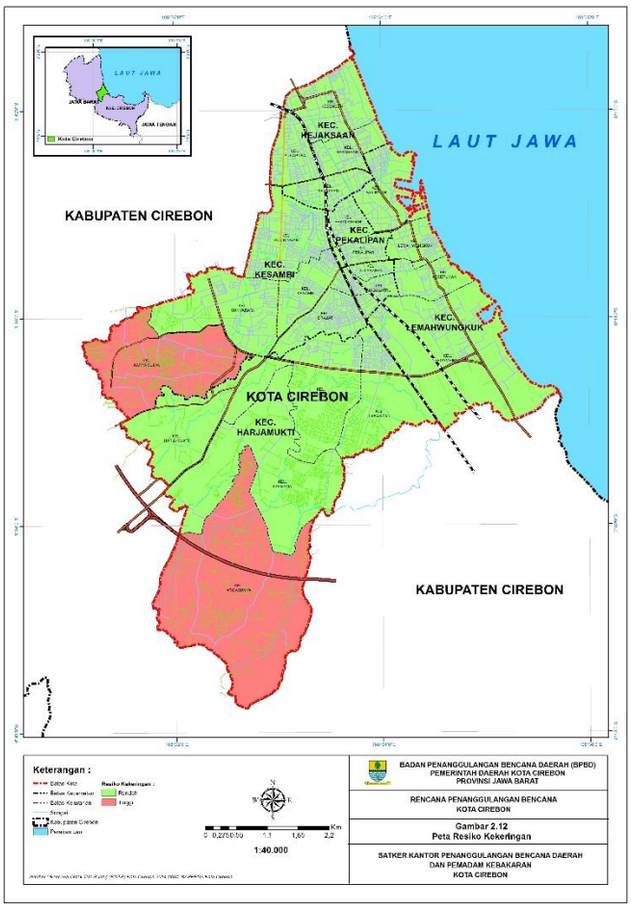


Sumber: KPBD Kota Cirebon, 2016

C. Kerentanan Bencana Kekeringan

Beberapa wilayah Kota Cirebon memiliki tingkat risiko rendah dan tinggi terhadap bencana kekeringan, terutama di Kelurahan Argasunya Kecamatan Hajarmukti dan Kelurahan Karyamulya di Kecamatan Kesambi (**Gambar 2.98**). Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Biasanya kekeringan di wilayah tersebut terjadi pada akhir bulan September dan awal Bulan (Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, 2016).

Gambar 2.98 Risiko bencana kekeringan di Kota Cirebon



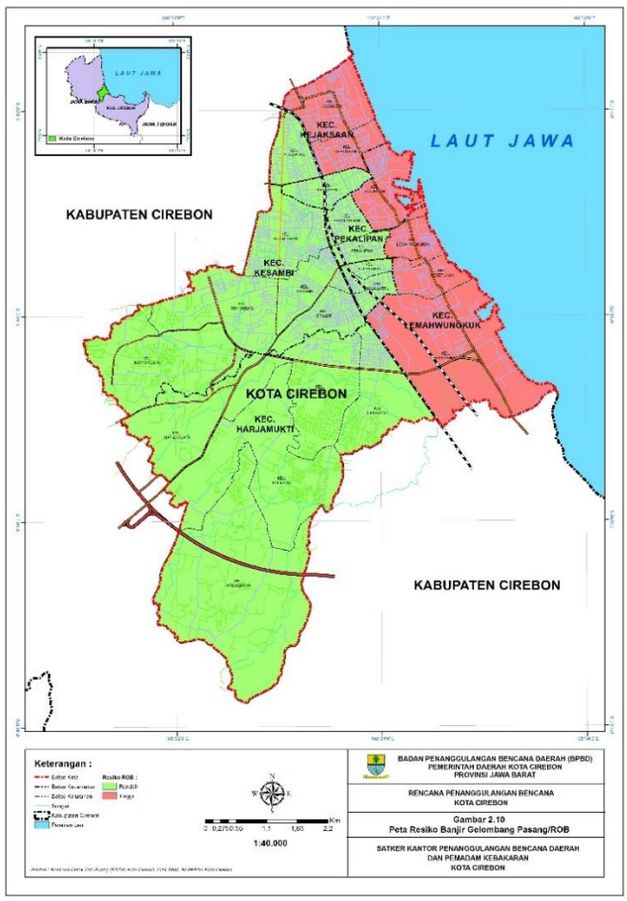
Sumber: KPBD Kota Cirebon, 2016

D. Kerentanan Bencana Gelombang Pasang (ROB)

Kota Cirebon yang merupakan kota pesisir memiliki risiko tinggi terhadap bencana gelombang pasang atau ROB. Bencana gelombang pasang memberikan dampak negatif antara lain penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai, kerusakan hutan bakau, serta hilangnya tempat berkumpul hewan-hewan perairan pantai. Berdasarkan luasan lahan rawan bencana gelombang pasang (ROB) yang ancaman paling tinggi dan harus di waspadai terdapat di Kecamatan Lemahwungkuk Kelurahan Pegambiran yang mencapai 461 Ha (Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, 2016).

Gambar 2.99 menunjukkan bahwa terdapat enam kelurahan yang terletak di pesisir pantai utara dan memiliki risiko tinggi mengalami bencana gelombang pasang, yakni Kelurahan Kesenden dan Kebonbaru di Kecamatan Kejaksaan; Kelurahan Panjunan, Lemahwungkuk, Kesepuhan, dan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk (Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, 2016).

Gambar 2.99 Risiko bencana gelombang pasang (ROB) di Kota Cirebon



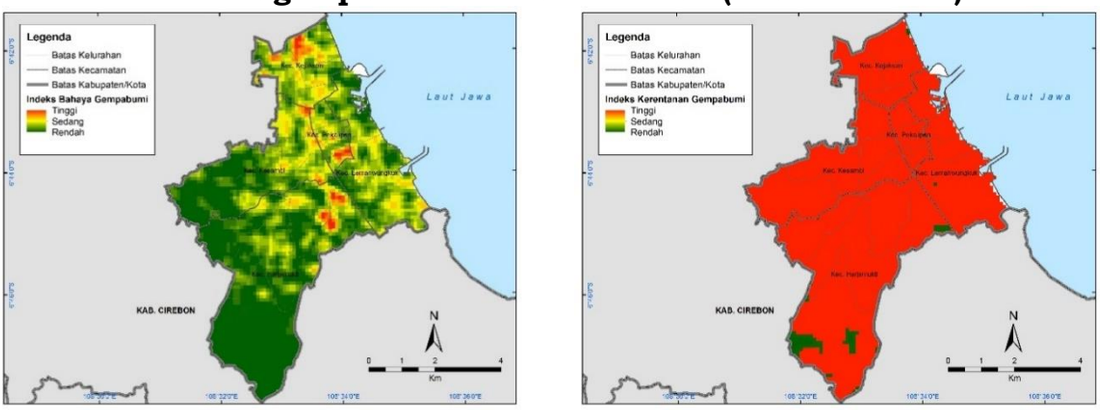
Sumber: KPBD Kota Cirebon, 2016

E. Kerentanan Bencana Gempa Bumi

Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah yang cenderung memiliki bahaya gempa bumi tinggi (**Gambar 2.100**). Hal ini diakibatkan oleh kedekatan wilayahnya dengan patahan atau sesar aktif Baribis yang terletak di Kabupaten Majalengka. Sesar Baribis merupakan sesar naik aktif yang membentang 70 km dari Subang hingga ke perbukitan Baribis di sebelah barat Gunung Ciremai. Sistem Sesar Baribis ini terdiri dari banyak sesar terutama sesar anjak yang berarah relatif barat laut tenggara dan sesar mendatar yang berarah relatif utara-selatan (Hamzah Aminudin, 2013).

Berdasarkan kerentanannya, Kota Cirebon juga memiliki kerentanan yang didominasi kelompok tinggi terhadap bencana gempa bumi (**Gambar 2.100**). Perhitungan kerentanan InaRISK didasarkan pada tiga parameter yakni kerentanan sosial (kepadatan penduduk dan kelompok rentan), kerentanan fisik (rumah, fasilitas umum, fasilitas kritis), kerentanan ekonomi (lahan produktif dan PDRB), dan kerentanan lingkungan yang ditinjau dari tutupan lahannya (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa).

Gambar 2.100 Peta (a) Indeks Bahaya dan (b) Indeks Kerentanan bencana gempa bumi di Kota Cirebon (InaRISK BNPB)



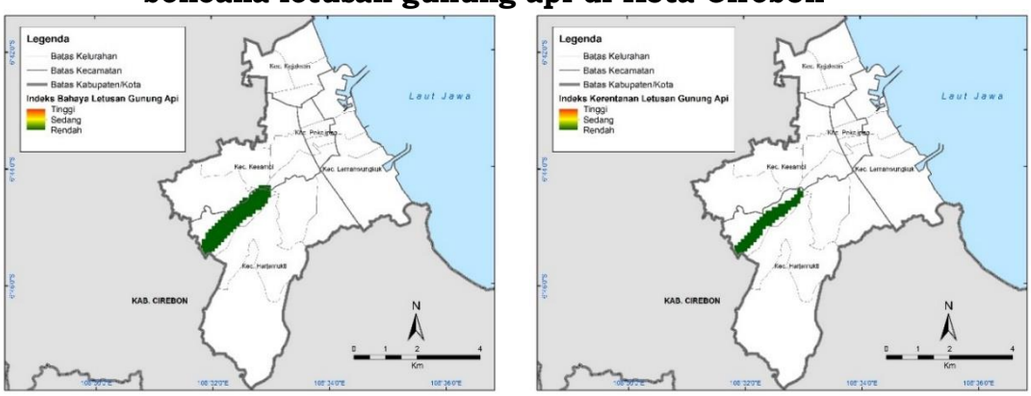
(a) (b)

Sumber: InaRISK BNPB, 2015

F. Kerentanan Bencana Letusan Gunung Api

Indeks bencana letusan gunung api di Kota Cirebon baik untuk bahaya maupun kerentanan dikategorikan ke dalam indeks rendah berdasarkan InaRISK (**Gambar 2.101**). Hanya sebagian wilayah Kota Cirebon yang terpapar ke dalam zona bahaya atau rentan terhadap letusan gunung api, yakni di sebagian kecil wilayah Kecamatan Harjamukti. Wilayah tersebut merupakan zona aliran KRB I (Kawasan Rawan Bencana) dari Gunung Ciremai yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka (BNPB, 2015).

Gambar 2.101 Peta (a) Indeks Bahaya dan (b) Indeks Kerentanan bencana letusan gunung api di Kota Cirebon



(a) (b)

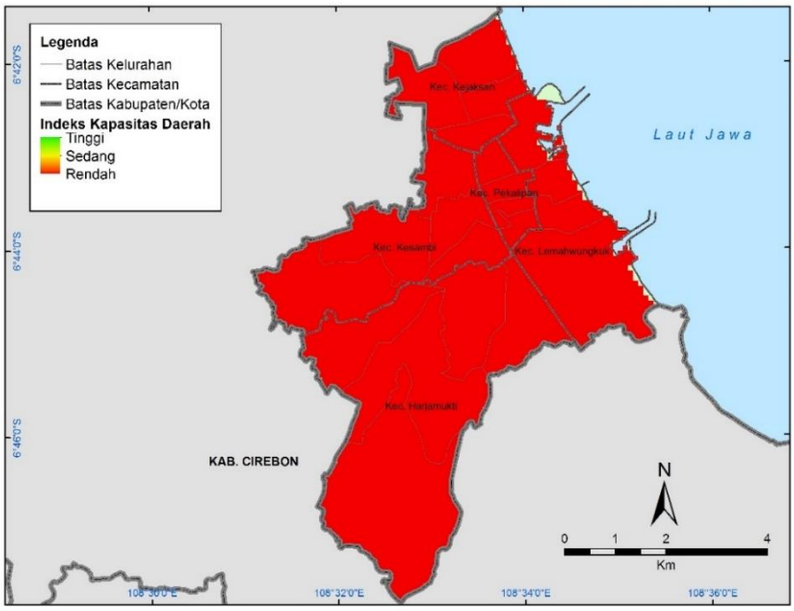
Sumber: InaRISK BNPB, 2015

G. Kapasitas Adaptasi

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Analisis kapasitas adaptasi daerah dihitung menggunakan indikator dalam *Hyogo Framework for Actions*. Berdasarkan perhitungan diperoleh indeks kapasitas daerah Kota Cirebon tergolong rendah. Peta tingkat kapasitas Kota Cirebon ditunjukkan pada **Gambar**

2.102. Diharapkan pada Tahun 2021, kapasitas adaptasi Kota Cirebon telah mengalami peningkatan.

Gambar 2.102 Indeks kapasitas daerah Kota Cirebon



Sumber: InaRISK BNPB, 2015

2.12 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Cirebon Tahun 2016-2017

Tabel 2.175
CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/*SDGs*) KOTA CIREBON
TAHUN 2016-2020

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN										
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
1.	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	B P S	Persen	10,36	9,73	9,66	8,88	8,41	9,52
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
2.	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, bumil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	DINSOS PPPA	Persen	10,06	10,80	63,10	63,58	44,63	47,88

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.	1.3.1a	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan/ DINKES	Pesren	n.a	89,81	99,00	99,00	93,53	97,04
4.	1.3.1b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Jamsostek).	BPJS Ketenagakerjaan/ DISNAKER	Persen/ Orang	30,63% / 19.836	91,07% / 22.620	66,44% / 23.709	14,86% / 22.050	18,38% / 25.482	19,27% / 26.846
5.	1.3.1d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINSOS PPPA	Rumah Tangga	4.291	7.019	6.984	11.533	10.987	9.115
Target 1.4 : Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
6.	1.4.1 (a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES	Persen	na	91,2	97,4	99,96	97,85	99,63
7.	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINKES	Persen	97,7	79,96	81,19	84,99	86,6	n.a
8.	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DPPKB	Persen	60,75	61,05	73,05	46,39	64,29	n.a
9.	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	DPUPR/DINKES	Persen	97,40	97,33	97,53	99,71	99,03	97,10

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
10.	1.4.1 €	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DPUPR/DINKES	Persen	89,49	89,63	89,68	90,32	93,70	90,04
11.	1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DPRKP	Persen	n.a	n.a	n.a	22,30	21,00	20,30
12.	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	B P S	Persen	91,73	95,63	96,51	98,28	88,76	95,29
13.	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	B P S	Persen	81,56	83,12	82,72	71,91	79,59	70,79
14.	1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/MA/sederajat	B P S	Persen	60,72	95,07	n..a	70,24	54,04	66,75
15.	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0 – 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	DISDUKCAPIL	Persen	72,85	73,16	61,24	78,57	81,60	83,06
16.	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik, baik PLN maupun Non PLN	B P S	Persen	99,48	99,51	99,66	100	n.a	n.a
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana										
17.	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah	B P B D	Ada/ tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Ada	Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
Target 1a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi										
18.	1.a (1)	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah secara langsung untuk	BPPPPD/B K D	Persen	n.a	72,04	70,45	69,44	n.a	n.a

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		program pemberantasan kemiskinan.								
19.	1.a (2)	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja daerah	BPPPPD/B K D	Persen	n.a	n.a	29,49	54,92	39,11	43,73
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN										
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun										
20.	2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	DPPKP	Pesren	n.a	n.a	10,24	9,4	10,17	10,16
21.	2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	DINKES	Persen	9,75 (gk) 0,97 (gb)	10,51 (gk) 1,02 (gb)	10,24 (gk) 0,61 (gb)	8,59 (gk) 0,81 (gb)	9,19 (gk) 1,01 (gb)	8,38 (gk) 1,12 (gb)
22.	2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DPPKP	Persen	n.a	n.a	2,74	n.a	n.a	n.a
23.	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1.400 kkal/ kapita/hari	DPPKP	Persen	n.a	n.a	2,74	n.a	n.a	n.a
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
24.	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun (Balita)	DINKES	Persen	12,82	12,43	13,42	10,10	9,60	8,95
25.	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun (Baduta).	DINKES	Persen	n.a	n.a	10,56	7,78	8,16	6,47

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
26.	2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan / tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINKES	Persen	4,72	5,61	4,43	3,32	3,90	3,94
27.	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	Prsen	10,00	11,20	10,70	10,20	12,70	9,50
28.	2.2.2 (b)	Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif	DINKES	Persen	56,10	57,10	64,26	54,94	64,40	72,06
29.	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh : ✓ skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan ✓ tingkat konsumsi ikan.	DPPKP	Skor	n.a	79,40	77,80	84,00	90,20	90,20
				Kg/kapita/ Tahun	n.a	33,30	30,98	n.a	33,47	33,49
Target 2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan										
30.	2.4.1	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPPKP	Lokasi/ Hektar	-	-	-	-	-	3/2,69
TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA. (KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN SEJAHTERA)										
Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup										
31.	3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINKES	Kasus	4	1	4	3	3	2
32.	3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINKES	Persen	93,84	95,31	96,20	101,60	98,40	94,15prevalensi anemia
33.	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINKES	Pesren	91,71	94,46	97,40	99,96	97,85	92,85

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1000										
34.	3.2.1	Angka Kematian Balita (Akaba) per 1000 KH	DINKES	Per 1000 KH	8 kasus	5 kasus	6 kasus	6 kasus	18 kasus	12 kasus
35.	3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 KH	DINKES	Per 1000 KH	5	3	3	3	1	1
36.	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	DINKES	Per 1000 KH	4,7	3,4	3,2	2,2	5,8	2,3
37.	3.2.2 (b)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES	Persen	97,70	79,96	81,19	84,99	86,60	n.a
Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit brsumber air, serta penyakit menular lainnya										
38.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	DINKES	Per 1000 populasi	n.a	53,00	n.a	8	17	22
39.	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	DINKES	Per 1000 orang	n.a	n.a	0,06	<0,05	<0,05	<0,05
40.	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang	DINKES	Per 1000 orang	1.527 kasus	1.444 kasus	1.405 kasus	1.352 kasus	1.670 kasus	1.318 kasus
41.	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	Per 100.000 orang	497	447	425	428	523	409
42.	3.3.3	Kejadian malaria per 1000 orang	DINKES	Per 1000 orang	0	0	0	1	1	1
43.	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	DINKES	Persen	5,53	5,48	0 filariasis, dan 3 kusta	5	5	5
Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
44.	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	DINKES	Persen	21,52	20,87	n.a	n.a	26,78	26,53
45.	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	DINKES	Persen	39,00	7,50	n.a	n.a	n.a	22,29

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
46.	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	DINKES	Persen	5,24	n.a	3,75	15,40	21,46	15,40
47.	3.4.2	Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri.	DINKES	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	3.4.2 (a)	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES	Unit	22	22	22	22	22	22
Target 3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan										
49.	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	DINKES/ RSUD-GJ	Persen	n.a	n.a	7,80	33,00	28,00	16,00
50.	3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	DINKES/ RSUD-GJ	Persen	n.a	n.a	69,00	48,00	67,00	45,00
51.	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	DINKES/ RSUD-GJ	Persen	n.a	n.a	20,00	30,00	19,00	20,00
52.	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	DINSOS PPPA	Orang	n.a	n.a	63	94	100	143
53.	3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	DINSOS PPPA	Unit/ Lembaga	1	1	1	1	1	1
54.	3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DINKES	Liter/ Kapita	n.a	n.a	10,51	n.a	n.a	n.a

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional										
55.	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	DPPKB	Persen	60,75	61,05	60,92	63,11	63,38	64,29
56.	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKB	Persen	60,75	61,05	60,92	63,11	63,38	64,29
57.	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DPPKB	Persen	29,08	31,42	31,12	26,44	26,25	26,20
58.	3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun *(Age Specific Fertility Rate/ ASFR*)	DPPKB	Persen	49,50	n.a	n.a	31,11	38,80	41,50
59.	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	DPPKB	Persen	n.a	n.a	2,09	2,33	2,30	2,30
Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang										
60.	3.8.1 (a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan	DINKES	Persen	n.a	n.a	8,00	8,00	7,91	7,61
61.	3.8.2	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	DINKES	Orang/ 1000 pddk	n.a	n.a	99,00	99,10	94,00	97,04
62.	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	Persen	n.a	89,81	99,00	99,00	93,53	97,04
Target 3 a : Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat										
63.	3.a 1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	DINKES	Persen	n.a	n.a	36,3	33,8	26,78	26,53

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Target 3 b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua										
64.	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINKES	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target 3 c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
65.	3.c (1)	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINKES	Persen	n.a	n.a	18,00	n.a	n.a	11,03
TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA (PENDIDIKAN BERKUALITAS)										
Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
66.	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	DISDIK	Persen	n.a	n.a	28,39 (162 sek)	28,39 (162 sek)	37,42 (163 sek)	37,42 (163 sek)
67.	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	DISDIK	Persen	na	na	31,11 (45 sek)	31,11 (45 sek)	93,47 (46 sek)	89,13 (46 sek)
68.	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	B P S	Persen	106,04	110,54	111,37	110,47	107,79	106,17
69.	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	B P S	Persen	115,28	119,15	139,93	89,46	84,81	85,64
70.	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	B P S	Persen	111,08	120,88	106.84	74,78	87,40	87,12
71.	4.1.1 (g)	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	B P S	Tahun	9,76	9,87	9,88	9,89	9,90	9,91
72.	4.1.1 (h)	Angka Harapan Lama Sekolah	B P S	Tahun	12,94	13,07	13,09	13,10	13,11	13,12
Target 4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
73.	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIK	Persen	54,68	n.a	57,94	65,73	57,54	57,42
Target 4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
74.	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi :								
		Rasio APM SD/MI : • Laki-laki • Perempuan	B P S/ DISDIK	Persen	91,73	95,53	96,51	98,28	88,76	95,29
		Rasio APM SMP/MTs : • Laki-laki • Perempuan	B P S/ DISDIK	Persen	81,56	83,12	82,72	68,92	79,59	70,79
		Rasio APM SMA/SMK/MA : • Laki-laki • Perempuan	B P S/ DISDIK	Persen	60,72	78,65	81,01	80,48	86,06	66,75
Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
75.	4.6.1 (a)	Angka Melek Huruf penduduk umur ≥ 15 tahun	B P S/ DISDIK	Persen	97,40	98,45	99,20	99,88	99,29	99,15
Target 4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
76.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran; (c) komputer untuk tujuan pengajaran; (d) air minum layak; (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin; (f)fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan hiegienes bagi semua (WASH).								
		a. Proporsi sekolah dengan akses ke listrik.	DISDIK	Persen	n.a	98,13	98,13	n.a	n.a	n.a
		b. Proporsi sekolah dengan akses internet untuk tujuan pengajaran		Persen	n.a	68,75	68,75	n.a	n.a	n.a
		c. Proporsi sekolah dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran		Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		d. Proporsi sekolah dengan akses air minum layak		Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		e. Proporsi sekolah dengan akses sanitasi dasar per jenis kelamin		Rasio	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		f. Proporsi sekolah dengan fasilitas cuci tangan		Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Target 4 c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkuaitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
77.	4.c.1	Persentase guru TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik:								
		• Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang PAUD, kepndidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD	DISDIK	Persen	n.a	n.a	n.a	60,00	65,00	75,00

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		• Guru SD/MI bersertifikat tenaga pendidik	DISDIK	Persen	47,65	48,24	48,42	50,41	48,15	43,03
		• Guru SMP/MTs bersertifikat tenaga pendidik	DISDIK	Persen	45,84	53,41	53,41	66,06	53,38	54,22
TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN (KESETARAAN GENDER)										
Target 5.1 : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
78.	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINSOS PPPA	Perda/ Perwal/Kepwal	0	1 Perda, 1 Perwal	1 Perda; 1 Perwal	1 Perwal; 2 Kepwal	1 Perwal; 2 Kepwal	1 Perwal; 2 Kepwal
Target 5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
79.	5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS PPPA	Persen	n.a	n.a	n.a	44,00	34,00	28,00
80.	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DINSOS PPPA	Persen	n.a	n.a	27,00	26,00	22,00	10,00
81.	5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS PPPA	Persen	n.a	n.a	100,00 (dari 22 kasus)	44,00	34,00	28,00

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
82.	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DINSOS PPPA	Persen	n.a	n.a	27,00	44,00	34,00	28,00
Target 5.3 : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
83.	5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINSOS PPPA	Persen	n.a	n.a	2,53	n.a	n.a	n.a
84.	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINSOS PPPA	Tahun	25,97	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
85.	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	DPPKB	Persen	49,5	n.a	n.a	31,11	38,8	41,5
Target 5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
86.	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	SETWAN	Persen	22,86	22,86	22,86	22,86	28,57	28,57
87.	5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Pemerintahan)	BKPPD	Persen	33,36	34,86	38,92	39,78	38,51	40,88
		• Perempuan yang menduduki Eselon II		Persen	10,34	10,34	10,00	11,54	7,14	13,33
		• Perempuan yang menduduki Eselon III		Persen	21,88	23,44	28,57	28,18	33,86	26,00

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		• Perempuan yang menduduki Eselon IV		Persen	37,57	38,86	42,70	43,73	41,29	43,58
Target 5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
88.	5.6.1 (a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DPPKB	Persen	23,96	23,57	23,02	20,11	20,06	n.a
Target 5.b : Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
89.	5 b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	B P S/ DKIS	Persen	69,66	68,69	68,35	68,01	83,64	83,56
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
Target 6.1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
90.	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPU-PR, Dinas Kesehatan	Persen	96,73	97,40	97,84	94,92	99,00	n.a
91.	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINKES/DPUPR	Persen	94,81	94,71	96,16	99,71	n.a	97,10
Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
92.	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINKES/DPUPR	Persen	89,49	89,63	89,68	90,32	93,70	90,04
93.	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINKES	Kelurahan	22	22	22	22	22	22

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
94.	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)/* Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINKES	Kelurahan	1	1	1	1	1	1
95.	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUPR	Persen	n.a	n.a	8,00	13,48	15,30	15,29
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
96.	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUPR	Persen	63,86	63,95	65,35	0	0	0
97.	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik	D L H	Persen	50,00	50,00	61,43	25,38	56,92	50,00
Target 6.4 : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
98.	6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	D L H	Dokumen	n.a	1	1	n.a	n.a	n.a
Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
99.	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUPR	DAS	n.a	n.a	4	4	4	4
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA										
Target 7.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
100.	7.1.1	Rasio elektrifikasi	B P S/ PLN	Persen	91,46	91,6	93,41	89,42	88,42	n.a
101.	7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS/ PLN	Kwh/Kapita	1.533,96	2.116,43	2.110,18	1.776,91	1.072,38	1.533,96
102.	7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	PN GAS/ BPS	RT	15.957	19.424	19.525	19.506	22.987	28.968
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYA UNTUK SEMUA										
Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
103.	8.1.1	Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita	B P S	Persen	n.a	4,80	4,96	4,83	5,14	5,06
104.	8.1.1 (a)	PDRB Per Kapita	B P S	Juta Rupiah	54,32	58,37	63,26	68,40	73,61	72,72
Target 8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
105.	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal	B P S/DISNAKER	Persen	20,66	24,63	27,94	n.a	n.a	46,69
106.	8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah) ke layanan keuangan	O J K/ B P S/ DPKUKM	Persen	1.517 unit	1.718 unit	1.701 unit	2.095 unit	2.206 unit	n.a
Target 8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
107.	8.5.1	Upah Rata-rata per jam pekerja	B P S/DISNAKER	Rupiah	8.844	10.056	10.886	11.834	12..784	13.872
108	8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	B P S/DISNAKER	Persen	11,28	n.a	11,63	9,06	9,04	10,97
		• Laki-laki	B P S	Persen	8,66	11,48	12,36	8,70	n.a	10,82
		• Perempuan	B P S	Persen	2,62	6,14	10,40	9,55	n.a	11,20
Target 8.8 : Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
108.	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	DISNAKER	Perusaha an/Lembaga	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
109.	8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	B P S	Persen	5,14	5,23	5,31	5,36	5,29	5,10
110.	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	DISBUDPAR	Orang.	14.788	9.204	11.558	9.790	63.407	51.687
111.	8.1.9 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	DISBUDPAR	Orang	671.333	831.948	1.022.084	1.070.754	987.588	970.585
Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
112.	8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	B I/ B P S	Unit	n.a	n.a	n.a	36	33	32
113.	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	B I	Persen	n.a	n.a	33,26	n.a	25,95	25,76
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
104.	9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan	DPUPR	Km (persen)	n.a	122,38 (85,62%)	138,265 (76,40%)	(89,00%)	(81,00%)	(92,00%)
105	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	DISHUB	Orang	1.192.915	1.152.402	1.273.488	n.a	n.a	n.a
106.	9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	DISHUB	Unit	1	1	1	1	1	1
107.	9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis	DISHUB	Unit	1	1	1	1	1	1
Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang										
108.	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	B P S	Persen	4,09	4,40	4,53	6,13	5,62	(-0,06)
Target 9.c : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap eknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
109.	9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*	B P S	Persen	n.a	68,35	n.a	n.a	n.a	n.a
110.	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	B P S	Persen	69,66	68,69	68,35	n.a	83,64	83,56
111.	9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	B P S	Persen	n.a	39,79	n.a	n.a	62,25	65,78
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARA NEGARA										
Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
112.	10.1.1	Koefisien Gini	B P S	Poin	0,41	0,40	0,41	0,43	0,408	0,421
Target 10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
113.	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	SETDA	Pengaduan	0	0	0	0	0	0
114.	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	SETDA	Pengaduan	0	0	0	0	0	0
115.	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	SETDA	Perda/ Perwal/ Kep.	0	0	0	0	0	0
Target 10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Target 10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
116.	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan/ DISNAKER	Persen	30,63	91,07	66,44	14,86	18,38	19,27

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN										
Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.										
117.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	DPRKP	Persen	n.a	n.a	653	29% atau 75.223 jiwa	27% atau 70.548 jiwa	24% atau 62.788 jiwa
118.	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DPRKP	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Target 11.3 : Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
119	11.3.2 (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	BPPPPD	Persen	n.a	73,33	80,47	54,92	39,11	43,97
Target 11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
120.	11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DISBUDPAR	Kota Pusaka	1	1	1	1	1	1
Target 11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota										
121.	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	n.a	73,07	78,00	80,00	88,79	75,47
Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
122.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	DPRKP	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
123.	11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DLH	Kota Hijau	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
124.	11.7.2 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POLRES CIKO	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Target 11.b : Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030.										
125.	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Ada/ Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Ada	Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
Target 12.4 ; Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan										
126.	12.4.1 (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DISNAKER	Perusahaan	n.a	n.a	1	2	2	2
127.	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	D L H	Ton	n.a	n.a	131,9	16,013	23,049	20,028
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
128.	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	D L H	Ton/tahun	n.a	n.a	269.280	236.808	26.551	294.216
Target 12.b : Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
Target 13.2 : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										
129.	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	D L H	Ada/ Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	D L H	Persen	n.a	n.a	n.a	2,38	3,85	3,87
TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDRA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
Target 14.4 : Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.										
130.	14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DPPKP							
		a. Jumlah produksi ikan tangkap		Ton	4.216,18	2.477,41	5.172	3.397	6.821	6.003,47
		b. Jumlah produksi ikan budi daya		Ton	323,18	355,86	316,86	162	180,29	206
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEN DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.										
Target 15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										
131.	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DPPKP	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN.										
Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
132.	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES CIKO	Kasus	2	4	1	2	2	n.a
133.	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	POLRES CIKO/ PPT Gunung Jati	Proporsi	0,062	0,072	0,078	n.a	n.a	n.a
134.	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES CIKO	Proporsi	0,045	0,050	0,039	n.a	n.a	n.a
Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
135.	16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINSOS PPPA	Persen	0,027	0,066	0,019	n.a	n.a	n.a
136.	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINSOS PPPA	Kasus	37	71	21	n.a	n.a	n.a
Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
137.	16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B K D	Kategori	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
138.	16.6.1 (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	SETDA	Poin	56,07 (CC)	53,57 (CC)	62,05 (B)	65,48 (B)	67,00 (B)	*)
139.	16.6.1 (c)	• Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	SETDA	Persen	n.a	n.a	29,00	n.a	n.a	n.a
		• Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	SETDA	Persen	-	-	-	-	-	4,00
140.	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik :								
		• Perijinan	DPMPTSP	Poin	79,83	77,37	80,92	78,87	82,65	n.a
		• Kesehatan	DINKES	Poin	77,50	79,22	81,43	75,67	80,66	83,17
		• Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL	Poin	79,83	77,37	80,92	77,28	76,25	77,25
		• Pendidikan	DISDIK	Poin	n.a	n.a	83,00	83,00	83,00	84,5
Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
141.	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persen	22,86	22,86	22,86	22,86	28,57	8,57
142.	16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif .	BKPPD	Persen	19,75	21,02	24,83	25,00	29,03	31,61
		• Eselon II	BKPPD	Persen	10,34	10,34	10,00	11,54	7,14	13,33
		• Eselon III	BKPPD	Persen	21,88	23,44	28,57	28,18	33,86	36,00
Target 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
143.	16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DISDUKCAPIL	Persen	66,91	72,72	n.a	91,5	92,07	90,89
144.	16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Persen	72,85	73,16	61,24	78,57	81,6	83,06
Target 16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
145.	16.10.1 (a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	SETDA	Pengaduan	0	0	0	0	0	0
146.	16.10.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	SETDA	Pengaduan	0	0	0	0	0	0
147.	16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	D K I S	Lembaga	1	1	1	1	1	1
Target 16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
148.	16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	SETDA	PERDA/ PERWAL	0	0	0	0	0	0
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.										
Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Base Line (2015)	Capaian Kinerja				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
149.	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ADHB	B K D	Nilai	n.a	0,131	0,125	0,123	0,125	0,152
Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
150.	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	DISDUKCAPIL	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, data diolah dari berbagai Perangkat Daerah dan diolah dalam SIPD. 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Adapun dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah, maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi keuangan daerah periode sebelumnya baik dari sisi kebijakan yang melandasi pengelolaannya maupun kinerja pencapaiannya. Hasil analisis kinerja keuangan periode tahun 2013-2018 akan menjadi dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mendanai rencana pembangunan periode 2018-2023.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah**.**

APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui gambaran perkembangan APBD Tahun 2016-2020, dibuatlah data perkembangan APBD berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Cirebon tahun 2016-2020. APBD Kota Cirebon selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dari

tahun 2016 sebesar Rp1.373.624.806.723,00 menjadi Rp1.633.922.078.236,00 pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 4,43 persen setiap tahunnya, sedangkan Belanja Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp1.463.440.701.758,00 dan pada tahun 2020 mencapai Rp1.582.881.804.426,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98 persen. Perkembangan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah serta rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Cirebon

No.	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**PENDAPATAN**	**1.373.624.806.723**	**1.390.098.664.933**	**1.422.978.064.983**	**1.543.026.589.244**	**1.633.922.078.236**	**4,43%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**363.117.732.284**	**443.895.006.614**	**440.436.420.967**	**434.208.148.078**	**437.212.356.611**	**4,75%**
1.1.1	Pajak Daerah	138.705.843.662	158.103.135.634	175.790.551.559	187.970.567.869	153.928.723.961	2,64%
1.1.2	Retribusi Daerah	12.447.207.496	11.757.486.063	10.925.787.599	11.082.898.549	9.971.513.081	-5,39%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5.197.948.117	5.425.274.717	5.172.244.408	4.501.629.676	5.158.642.121	-0,19%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.766.733.009	268.609.110.200	248.547.837.401	230.653.051.984	268.153.477.448	6,72%
1.2	**Dana Perimbangan**	**870.837.793.607**	**819.338.166.831**	**814.145.269.518**	**803.587.681.346**	**817.506.344.852**	**-1,57%**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	75.809.242.483	79.625.947.072	71.877.328.085	57.473.349.170	89.440.938.804	4,22%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	588.109.947.000	577.778.746.000	577.778.746.000	593.145.833.000	545.286.189.000	-1,87%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	206.918.604.124	161.933.473.759	164.489.195.433	152.968.499.176	182.779.217.048	-3,05%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**139.669.280.832**	**126.865.491.488**	**168.396.374.498**	**305.230.759.820**	**379.203.376.773**	**28,36%**
1.3.1	Hibah	9.022.000.000	0	38.628.263.816	39.616.922.000	56.567.977.876	58,24%
1.3.2	Dana Darurat	0	0				0,00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.526.744.624	80.823.495.348	89.899.372.419	96.108.159.099	81.172.515.237	2,50%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.661.502.000	0	0	0	0	-100,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.459.034.208	46.041.996.140	22.368.738.263	147.017.117.721	209.992.429.660	72,97%

No.	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.3.7	Dana insentif Daerah	33.661.502.000	0	17.500.000.000	22.488.561.000	31.470.454.000	-1,67%
2	**BELANJA**	**1.463.440.701.758**	**1.409.419.587.356**	**1.426.054.577.183**	**1.587.295.890.992**	**1.582.881.804.426**	**1,98%**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**625.133.287.402**	**613.754.892.386**	**674.059.990.646**	**695.598.341.441**	**702.702.370.510**	**2,97%**
2.1.1	Belanja Pegawai	584.683.895.337	551.124.423.893	625.642.502.316	639.167.453.466	605.343.249.993	0,87%
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0		0	
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0		0	
2.1.4	Belanja Hibah	33.503.335.865	58.846.279.493	45.513.241.002	52.655.887.215	52.243.034.036	11,75%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.218.850.000	3.042.293.000	2.174.148.000	2.970.200.000	3.320.180.000	-14,52%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0		0	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	723.896.000	723.896.000	723.896.000	758.568.800	0	-100,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.310.200	18.000.000	6.203.328	46.231.960	41.795.906.481	960,03%
2.2	**Belanja Langsung**	**838.307.414.356**	**795.664.694.970**	**751.994.586.537**	**891.697.549.551**	**880.179.433.916**	**1,23%**
2.2.1	Belanja Pegawai	78.331.466.670	81.823.333.575	21.337.892.550	21.455.438.216	44.555.923.695	-13,16%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	461.991.575.788	493.619.020.117	554.963.745.116	600.326.303.396	541.273.784.740	4,04%
2.2.3	Belanja Modal	297.984.371.898	220.222.341.278	175.692.948.871	269.915.807.939	294.349.725.481	-0,31%
3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**181.608.461.685**	**98.380.140.785**	**76.827.848.842**	**88.751.336.642**	**-1.422.232.895**	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	191.771.300.684	114.249.666.650	80.344.191.342	233.751.336.642	75.682.334.894	-20,74%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.162.838.999	15.869.525.865	3.516.342.500	145.000.000.000	77.104.567.789	65,96%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021

Pertumbuhan pendapatan daerah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 diperoleh dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,75 persen, Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan negatif 1,57 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,36 persen.

Secara proporsi, tiap tahunnya sektor dana perimbangan masih menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Pusat masih cukup dominan dalam pembiayaan pembangunan, selain itu sektor Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, apalagi pada tahun 2020 kondisi fiskal daerah terkoreksi menurun akibat adanya pandemi Covid-19 yang secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi baik nasional sampai ke tingkat daerah. Adapun pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dilihat dari perkembangan tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat bahwa kontribusi total pendapatan daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kontribusi Masing-Masing Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Jenis Pendapatan Daerah	Tahun (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pendapatan Asli Daerah	26,44	31,93	30,95	28,14	26,76
Dana Perimbangan	63,40	58,94	57,21	52,08	50,03
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10,17	9,13	11,83	19,78	23,21

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2016-2020, data diolah

Besaran transfer oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon masih tinggi. Kontribusi Dana Perimbangan dalam kurun 2016 sampai dengan 2020 dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap total pendapatan menurun dari tahun 2016 sebesar 63,40 persen menjadi sebesar 50,03 persen pada tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih menggantungkan pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Peningkatan Dana Perimbangan juga mengindikasikan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Cirebon semakin baik, mengingat aspek kinerja tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan besaran dana perimbangan khususnya untuk pos Dana Insentif Daerah sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sejalan dengan penurunan kontribusi Dana Perimbangan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan

realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk menuju peningkatan kemandirian daerah. Hanya saja pada tahun 2020 Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dikarenakan terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Belanja Daerah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98 persen. Proporsi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Proporsi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Belanja	Tahun (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Belanja Tidak Langsung	42,72	43,55	47,27	43,82	44,39
2.	Belanja Langsung	57,28	56,45	52,73	56,18	55,61
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Langsung setiap tahunnya lebih besar dari Belanja Tidak langsung. Hal tersebut menunjukkan konsistensi upaya pemerintah Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan alokasi APBD untuk belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat yang tercermin dalam Belanja Langsung yang ada di Perangkat Daerah.

3.1.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah terbagi menjadi 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target serta capaian realisasi pendapatan daerah selama tahun 2016-020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi PAD setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016, realisasi PAD sebesar Rp363.117.732.284,00 sementara pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp437.212.356.611,00 atau tumbuh sebesar 4,75 persen dalam kurun waktu lima tahun. Target dan realisasi PAD Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD Kota Cirebon Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)		Lebih/(Kurang)	Persentase
	Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2016	369.844.281.000	363.117.732.284	-6.726.548.716	98,18

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)		Lebih/(Kurang)	Persentase
	Target	Realisasi		
2017	469.478.144.769	443.895.006.614	-25.583.138.155	94,55
2018	481.290.569.000	440.436.420.967	-40.854.148.033	91,51
2019	510.852.118.450	434.208.148.078	-76.643.970.372	85,00
2020	497.946.224.831	437.212.356.611	-60.733.868.220	87,80

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cirebon mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp870.837.793.607,00 sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar Rp817.506.344.852,00. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan turunnya alokasi DAU dan DAK yang diterima oleh Kota Cirebon. Capaian realisasi dari komponen Dana Perimbangan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.809.242.483	79.625.947.072	71.877.328.085	57.473.349.170	89.440.938.804
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	588.109.947.000	577.778.746.000	164.489.195.433	593.145.833.000	545.286.189.00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	206.918.604.124	161.933.473.759	164.489.195.433	152.968.499.176	182.779.217.048
Jumlah		870.837.793.607	819.338.166.831	814,145,269,518	803.587.681.346	817.506.344.852

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2020, data diolah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017. Penurunan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2017 disebabkan tidak adanya alokasi Dana Hibah dan Dana Insentif Daerah. Adapun jenis kelompok pendapatan terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Insentif Daerah. Capaian dari komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pendapatan Hibah	9.022.000.000	0	38.628.263.816	39.616.922.000	56.567.977.876
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	73.526.744.624	80.823.495.348	89.899.372.419	96.108.159.099	81.172.515.237
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.459.034.208	46.041.996.140	22.368.738.263	147.017.117.721	209.992.429.660
5.	Dana Insentif Daerah	33.661.502.000	0	17.500.000.000	22.488.561.000	31.470.454.000
Jumlah		139.669.280.832	126.865.491.488	168.396.374.498	305.230.759.820	379.203.376.773

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2020, data diolah

3.1.1.2 Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung. Target dan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Daerah (Rupiah)		Persentase
	Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*
2016	1.664.242.380.665,00	1.463.440.701.758,00	87,93
2017	1.565.986.688.707,00	1.409.419.587.356,00	90,00
2018	1.572.686.574.342,00	1.426.054.577.183,00	90,68
2019	1.739.629.471.092,00	1.587.295.890.992,00	91,24
2020	1.689.345.566.970,00	1.582.881.804.426,00	93,70

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2017 baik target maupun realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengakibatkan peralihan anggaran dari beberapa kewenangan kota/kabupaten yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi. Penurunan Belanja Daerah juga disebabkan tidak adanya alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan penghargaan atas program pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Target dan realisasi Belanja Tidak langsung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rupiah)		Persentase
	Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*
2016	680.996.757.703,00	625.133.287.402,00	91,80
2017	645.104.077.809,00	613.754.892.386,00	95,14
2018	695.896.451.658,00	674.059.990.646,00	96,86
2019	712.037.589.955,00	695.598.341.441,00	97,69
2020	720.027.135.577,00	702.702.370.510,00	97,59

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung per jenis belanja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 digambarkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Belanja Pegawai	584.683.895.337	551.124.423.893	625.642.502.316	639.167.453.466	605.343.249.993
2.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah	33.503.335.865	58.846.279.493	45.513.241.002	52.655.887.215	52.241.758.285
5.	Belanja Bantuan Sosial	6.218.850.000	3.042.293.000	2.174.148.000	2.970.200.000	3.320.180.000
6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota	723.896.000	723.896.000	723.896.000	758.268.800	0
8.	Belanja tidak terduga	3.310.200	18.000.000	0	46.231.960	41.962.904.256
9.	Lain-Lain	0	0	0	0	0
	JUMLAH	625.133.287.402	613.754.892.386	674.059.990.646	695.598.041.441	702.868.092.534

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2020, data diolah

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Target, realisasi serta

capaian realisasi belanja langsung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Langsung (Rupiah)		Persentase
	Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*
2016	983.245.622.962,00	838.307.414.356,00	85,26
2017	920.882.610.898,00	795.668.314.422,00	86,40
2018	876.790.122.684,00	751.994.586.537,00	85,77
2019	1.027.591.881.137,00	891.697.549.551,00	86,78
2020	969.318.431.393,00	880.179.433.916,00	90,80

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2020, data diolah

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sebaliknya, apabila terjadi defisit anggaran maka perlu ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pinjaman daerah dan atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Rupiah)		Lebih/(Kurang)	Persentase
	Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2016	191.771.300.684	191.771.300.684	-	0,00
2017	114.249.666.650	114.249.666.650	-	0,00
2018	80.344.191.342	80.344.191.342	-	0,00
2019	73.751.336.642	233.751.336.642	160.000.000.000	216,95
2020	44.482.334.894	75.682.334.894	31.200.000.000	70,14

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016-2020, data diolah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Target, realisasi serta capaian

realisasi pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan		Lebih/ (Kurang)	Persentase
	Target	Realisasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2016	11.972.631.800	10.162.838.999	-1.809.792.801	-15,12
2017	17.467.444.000	15.869.525.865	-1.597.918.135	-9,15
2018	3.585.344.000	3.516.342.500	-69.001.500	98,07
2019	5.069.000.000	145.000.000.000	139.931.000.000	2.760,52
2020	45.973.567.789	77.104.567.789	31.131.000.000	167,71

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tersebut diantaranya digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	13.707.100.000	0	0	0
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	2.000.000.000	3.516.342.500	5.000.000.000	0
3.	Pembayaran Pokok Utang	162.838.999	162.425.865	0	140.000.000.000,00	77.104.567.789
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	Jumlah	10.162.838.999	15.869.525.865	3.516.342.500	145.000.000.000	77.104.567.789

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Pengelompokan neraca dapat dibagi dalam pengelompokan aset menurut tingkat likuiditasnya, pengelompokan kewajiban menurut jatuh temponya dan pengelompokan ekuitas menurut tingkat perubahannya.

Arti penting laporan neraca daerah yaitu memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, juga memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah tentang fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) dan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Cirebon

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	2,10
1.1.1	Kas	16,51
1.1.2	Piutang	17,31
1.1.3	Penyisihan Piutang	(5,03)
1.1.4	Beban dibayar dimuka	10,18
1.1.5	Persediaan	(21,18)
	INVESTASI JANGKA PANJANG	10,00
	Dana Bergulir	0,00
	Cadangan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,00
1.2	ASET TETAP	6,80
1.2.1	Tanah	6,85
1.2.2	Peralatan dan mesin	11,77
1.2.3	Gedung dan bangunan	5,06
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	5,70
1.2.5	Aset tetap lainnya	(27,69)
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	53,08
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	10,73
	DANA CADANGAN	0.00
	Dana Cadangan	0,00
1.3.	ASET LAINNYA	(22,29)
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	19,13
1.3.4	Aset tak berwujud	(4,57)
1.3.5	Aset Lain-Lain	118,07
1.3.6	Akumulasi Amortisasi	(22,29)
1.3.7	Piutang Tak Tertagih	
	JUMLAH ASET DAERAH	5,85
2.	KEWAJIBAN	14,85
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,37
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(23,41)
2.1.3	pendapatan diterima dimuka	67,41
2.1.4	Utang Beban	(39,20)

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	33,02
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00
3.	EKUITAS DANA	5,73
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5,85

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2020

3.1.2.1 Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan dengan membandingkan nilai setiap pos aset dalam neraca guna mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berurutan. Berikut rumus analisis pertumbuhan aset:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Nilai Aset Tahun ke-n} - \text{Nilai Aset Tahun ke n-1}}{\text{Nilai Aset Tahun ke n-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus rasio di atas, berikut perhitungan pertumbuhan aset berdasarkan Laporan Neraca dalam Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2020 dan Laporan Neraca per 31 Desember 2019:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Nilai Aset Neraca 2020} - \text{Nilai Aset Neraca 2019}}{\text{Nilai Aset Neraca 2020}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Rp3.931.989.214.070,75} - \text{Rp3.908.027.656.912,05}}{\text{Rp3.908.027.656.912,05}} \times 100\%$$

$$= 0{,}61\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa persentase perubahan posisi aset Pemerintah Kota Cirebon adalah sebesar 0,61 persen.

3.1.2.2 Analisis Rasio Likuiditas

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh temponya. Berikut rumus analisis rasio lancar (*current ratio*):

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan rasio di atas, berikut perhitungan posisi Laporan Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2020:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Rp147.286.365.342,83}}{\text{Rp39.624.426.894,11}} \times 100\%$$

$$= 371{,}71\%$$

Perhitungan perhitungan rasio lancar menunjukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon per 31 Desember 2020 memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang jatuh tempo sebesar 371,71 persen.

3.1.2.1 Rasio Kas

Rasio kas (*cash ratio*) merupakan perhitungan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan saham/efek yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Berikut rumus rasio kas (*cash ratio*):

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas+Efek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan rasio di atas, berikut perhitungan rasio kas posisi Laporan Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2020 adalah:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Rp147.286.365.342,83}}{\text{Rp39.624.426.894,11}} \times 100\%$$

$$= 371{,}71\%$$

Dari rasio kas tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon per 31 Desember 2020 memiliki kemampuan dalam membayar utang jatuh tempo yang harus dipenuhi denga Kas dan Efek sebesar 371,71 persen.

3.1.2.2 Rasio Cepat

Rasio lancar (*quick ratio*) merupakan perhitungan persediaan sebagai pengurangan. Berikut rumus analisis rasio cepat (*quick ratio*):

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar-Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan rasio di atas, berikut perhitungan rasio cepat posisi Laporan Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2020:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Rp147.286.365.342,83 - Rp27.824.600.970,00}}{\text{Rp39.624.426.894,11}} \times 100\%$$

$$= 301{,}49\%$$

Dari rasio cepat *(quick ratio)* tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon per 31 Desember 2017 memiliki kemampuan dalam membayar utang jatuh tempo yang harus dipenuhi dengan Kas dikurangi persediaannya sebesar 301,49%.

3.1.2.3 Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset

Rasio modal kerja terhadap total aset (*working capital to total asset*) merupakan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja netto. Berikut rumus analisis rasio modal kerja terhadap total aset (*working capital to tatal asset*):

$$\text{Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset} = \frac{\text{Aset Lancar - Utang Lancar}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset (*Working capital to Total Asset*) posisi Laporan Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset} = \frac{\text{Rp147.286.365.342,83 - Rp39.624.426.894,11}}{\text{Rp3.931.989.214.070,75}} \times 100\%$$

$$= 2{,}74\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui rasio modal kerja terhadap total aset (*working capital to total asset*) Pemerintah Daerah Kota Cirebon per 31 Desember 2017 menunjukkan likuiditas modal kerja netto terhadap total aset sebesar 2,74%.

3.1.2.4 Analisis Rasio Solvabilitas

Analisis rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Berikut rumus analisis rasio solvabilitas:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas posisi Laporan Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Rp3.931.989.214.070,75}}{\text{Rp39.624.426.894,11}} \times 100\%$$

$$= 9.923{,}14\%$$

Perhitungan rasio solvabilitas di atas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang sebesar 9.923,14 persen.

3.1.2.5 *Leverage Ratio*: Rasio Utang terhadap Ekuitas

Rasio utang terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*) atau *Leverage Ratio* ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

$$\text{Rasio Utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Rp 39.624.426.894,11}}{\text{Rp 3.892.364.787.176,64}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Utang terhadap Ekuitas} = 1{,}02\%$$

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya mengoptimalkan pengelolaan potensi-potensi yang ada baik itu dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun kebijakan pendapatan daerah di masa lalu antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah, karena semakin besar PAD suatu daerah, maka akan mengurangi ketergantungan daerah tersebut terhadap Pemerintah Pusat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2020 dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah antara lain mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan kontribusi Laba BUMD; serta
5. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Untuk mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efekif sebagai berikut:

1. Sosialisasi aturan perpajakan/retribusi daerah. Sosialisasi perlu dilaksanakan agar dapat memberi pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan baik secara langsung (tatap muka) juga melalui melalui media cetak, elektronik, maupun pemasangan spanduk, baligho dan *vertical banner*.
2. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah. Penataan administrasi tersebut direalisasikan dengan adanya pemutakhiran secara berkala terhadap aplikasi yang terdapat dalam SIMPENDA;
3. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah.Kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak dan menjaring wajib pajak baru, sehingga dapat diketahui potensi sesungguhnya di lapangan, terlebih lagi sejak dibukanya akses Tol Cipali, jumlah kunjungan ke Kota Cirebon tumbuh dengan pesat yang mengakibatkan munculnya wajib-wajib pajak baru antara lain dari objek pajak hotel, restoran, maupun pajak hiburan. Selain itu dibutuhkan pendataan secara berkala untuk memantau potensi-potensi pajak daerah lainnya antara lain pendataan potensi lahan parkir di luar badan jalan, perkantoran dan mini market serta pergantian vendor atau naskah reklame yang seringkali tanpa koordinasi dengan perangkat daerah pengelola perijinan;
4. Peningkatan pengawasan dilapangan melalui monitoring terhadap wajib pajak yang menunggak/melakukan pembayaran yang nilainya kurang

wajar serta pelaksanaan uji petik terhadap wajib pajak untuk mengetahui nilai riil transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 1 hari;

5. Menerapkan pembayaran dan pelaporan pajak (e-STPD) secara online khususnya untuk jenis pajak yang pembayarannya menggunakan sistem *self assesment*;
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, melalui kerjasama dengan Bank BJB dan Kantor Cabang Pembantunya untuk pembayaran pajak daerah, juga dengan memanfaatkan *mobile teller* untuk pembayaran PBB untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana setoran karena wajib pajak langsung menyetor pada bank;
7. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah melalui mekanisme penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan klarifikasi/pemanggilan terhadap wajib pajak, jika dari hasil penelitian terjadi kurang bayar maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
8. Memperkuat basis data pajak daerah (hotel, restoran dan hiburan dan lain-lain) berdasarkan zona wilayah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
9. Menggunakan sistem aplikasi SMS Gateway berupa pesan informasi kepada wajib pajak mengenai besaran setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ke rekening kas daerah guna meningkatkan akunbilitas dan perbaikan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak;
10. Membangun Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk penyimpanan, pengelolaan dan penampilan informasi berbasis geografis khususnya untuk membantu merencanakan dan memantau titik-titik reklame;
11. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit perangkat daerahantara lain terkait penetapan dan penertiban pajak reklame;
12. Penataan dan penertiban reklame diantaranya dengan membongkar reklame yang tidak memiliki ijin atau tidak diporporasi oleh Pemerintah Kota Cirebon;
13. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem administrasi serta kerjasama dengan beberapa pihak terkait diantaranya dengan Kanwil Ditjen Pajak Jabar II, KPP Pratama Cirebon, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris se-wilayah Kota Cirebon serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi perpajakan;
14. Memperkuat basis Pajak Bumi dan Bangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pendaftaran dan pendataan objek PBB P2.
15. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan;
16. Pemantauan dan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB secara intensif;
17. Penerapan Nilai Zona Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB;
18. Mengintegrasikan sistem SIM PBB dengan eBPHTB;
19. Melakukan himbauan kepada Pimpinan SKPD, BPN dan Notaris se-Kota Cirebon serta melakukan pemasangan spanduk di seluruh kelurahan dan kecamatan dan baligo di tiga lokasi (pegambiran, perempatan cipto

dan didepan pertigaan bakorwil) yang berisi himbauan SPPT PBB telah terbit agar masyarakat membayar PBB sebelum jatuh tempo;

20. Menerbitkan Surat Edaran Walikota yang berisi himbauan melampirkan lunas PBB untuk setiap pelayanan di kelurahan, kecamatan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta perijinan, kantor samsat, leasing kendaraan bermotor, biro perjalanan umroh dan haji, pengadilan agama, perbankan, dan lain-lainya;
21. Memberikan *reward* kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan BPHTB, juga untuk objek pajak lainnya di luar PBB P2 dan BPHTB seperti pajak hotel, pajak restoran dan lainnya yang melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu, serta wajib pajak yang membayar pajak reklame tertinggi;
22. Pengkajian jenis pajak/retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
23. Pengkajian jenis pajak/retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
24. Perbaikan manajemen dengan pendampingan dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan lembaga-lembaga professional;
25. Peningkatan peredaran usaha dengan penambahan penyertaan modal;
26. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD;
27. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola dan menyalurkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
28. Mewajibkan membuat NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon bagi pelaku usaha baik pribadi ataupun badan yang melakukan aktivitas/kegiatan usaha di kota Cirebon, sesuai Peraturan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Cirebon;
29. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait dengan tata cara penyaluran serta pelaporan dana-dana yang bersumber dari provinsi;
30. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
31. Mengupayakan penetapan APBD tepat waktu dan meningkatkan pengelolaan keuangan hingga dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel sebagai upaya untuk memperoleh alokasi dana insentif daerah yang merupakan *reward* untuk pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik.

Arah kebijakan umum belanja daerah pada periode tahun 2016-2020 adalah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan pengelolaan belanja daerah menurut urusan pemerintahan penanganannya melalui bagian atau bidang-bidang di Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kota yang

dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut:

a. Belanja tidak langsung; dan
b. Belanja langsung.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenisnya belanja yang terdiri dari:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa; dan
c. Belanja modal.

Belanja langsung dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah kota yang dialokasikan pada belanja SKPD. Kebijakan dalam pengalokasian belanja antara lain:

1. Memperkuat akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2018-2023;
2. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan;
3. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan;
4. Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian dalam rangka peningkatan indeks daya beli;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Hasil Musrenbang kecamatan terutama yang bersifat fisik RKA/DPAnya disusun oleh Kecamatan/kelurahan sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat dan Lurah; dan
7. Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan APBD khususnya dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota.

Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional; dan
b. Secara tugas pokok dan fungsi harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun SKPD dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang

pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Adapun kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Memproyeksikan SILPA tahun sebelumnya;
3. Pembayaran Utang Pokok;
4. Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilukada;
5. Pencairan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilukada; dan
6. Penyertaan Modal kepada BUMD.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Cirebon

No.	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	2016	663.015.362.007	1.473.603.540.757	44,99%
2.	2017	632.947.757.468	1.425.289.113.221	44,41%
3.	2018	646.980.394.866	1.429.570.919.683	45,26%
4	2019	660.622.891.682	1.732.295.890.992	38,14%
5	2020	649.899.173.688	1.659.986.372.215	39,15%

Sumber : LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, karena dalam penganggaran APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terdapat komponen belanja aparatur, maka belanja aparatur diasumsikan sama dengan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Persentase pemenuhan belanja aparatur dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 44,41 persen menjadi 38.14 persen pada tahun 2019. Semakin kecil persentase pemenuhan belanja aparatur maka akan semakin besar alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan belanja langsung terutama yang terkait dengan layanan publik. Hal ini menunjukan upaya pemerintah Kota Cirebon untuk mengalokasikan APBD pada belanja yang manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah, surplus/defisit riil anggaran Kota Cirebon dari tahun 2016-2020 adalah tercantum pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Defisit Riil Anggaran Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Realisasi pendapatan daerah	1.373.624.806.723	1.390.098.664.933	1.422.978.064.983	1.543.026.589.244	1.633.922.078.236
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.463.440.701.758	1.409.419.587.356	1.426.054.577.183	1.587.295.890.992	1.582.881.804.426
	Defisit riil	-89.815.895.035	-19.320.922.423	-3.076.512.200	-44.269.301.748	51.040.273.810

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Dalam struktur APBD, defisit merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja, dan apabila realisasi pendapatan melebihi realisasi belanja maka terjadi surplus. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 terjadi defisit dan pada tahun 2020 terjadi surplus, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang bersumber dari dana transfer antara lain Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi yang dananya sudah masuk ke kas daerah namun pekerjaannya belum semua dilaksanakan.

Pada tahun 2016 desisit riil sebesar Rp89.815.895.035 dan pada tahun 2020 terjadi surplus sebesar Rp51.040.273..810. Kondisi Surplus/Defisit Rill tersebut diseimbangkan/ditutup dengan pembiayaan netto sehingga didapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) seperti yang terlihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Cirebon Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Penerimaan pembiayaan	191.771.300.684	114.249.666.650	80.344.191.342	233.751.336.642	75.682.334.894

No.	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Dikurangi realisasi:					
2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.162.838.999	15.869.525.865	3.516.342.500	145.000.000.000	77.104.567.789
3.	Pembiayaan Netto (1-2)	181.608.461.685	98.380.140.785	76.827.848.842	88.751.336.642	-1.422.232.895
4.	Ditambah realisasi :					
	Surplus / (Defisit)	-89.815.895.035	-19.320.922.423	-3.076.512.200	-44.269.301.748	51.040.273.810
	SILPA	91.792.566.650	79.059.218.362	73.751.336.642	44.482.034.894	49.618.040.915

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Tabel diatas menggambarkan komposisi penutup defisit riil anggaran pemerintah kota Cirebon pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Surplus/defisit riil pada tahun berkenaan ditambah dengan pembiayaan netto yang didapat dari penjumlahan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Komponen-komponen yang membentuk terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan antara lain pelampauan realisasi penerimaan pendapatan baik itu Pendapatan Asli, Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sisa penghematan belanja serta pelampauan penerimaan pembiayaan dan penghematan pembiayaan pengeluaran. Komponen SILPA dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Cirebon

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Jumlah SiLPA	73.751.336.642	100,00%	44.482.334.894	100,00%	49.618.040.915,00	100,00%

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Pelampuan Penerimaan PAD	(40.854.148.033)	-55,39%	(76.643.970.372)	-172,30%	(60.733.868.220)	-122,40%
3	Pelampuan Penerimaan dana perimbangan	(33.140.153.482)	-44,93%	(42.697.041.654)	-95,99%	(19.572.450.541)	-39,45%
4	Pelampuan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah	1.044.639.498	1,42%	(8.579.533.180)	-19,29%	23.391.597.132	47,14%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	146.631.997.159	198,82%	152.333.880.100	342,46%	106.463.762.544	214,57%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan			160.000.000.000	359,69%	31.200.000.000	-159,41%
8	Penghematan Pembiayaan Pengeluaran	69.001.500	0,09%	(139.931.000.000)	-314,58%	(31.131.000.000)	-62,74%

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Pada Tabel 3.18 dapat dilihat kontribusi terbesar yang menyumbang SiLPA setiap tahunnya adalah sisa penghematan belanja daerah. Sisa belanja daerah selain merupakan hasil efisiensi belanja perangkat daerah juga disebabkan karena belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya baik itu dana transfer dari pusat maupun dari provinsi antara lain Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi, dimana dananya sudah disalurkan ke kas daerah namun pekerjaannya belum dapat dilaksanakan karena terkendala beberapa hal.

3.3. Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD.

Setelah menjabarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah dari tahun-tahun sebelumnya maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mendatang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 menyebabkan perlu disesuaikannya proyeksi pendapatan maupun belanja APBD yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam membuat proyeksi APBD tahun 2021-2023 perlu diperhatikan capaian realisasi pendapatan maupun belanja pada periode tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 Kota Cirebon

No.	Uraian	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PENDAPATAN**	**1.422.978.064.983,00**	**1.543.026.589.244,00**	**1.633.922.078.236,00**	**7,16%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**440.436.420.967,00**	**434.208.148.078,00**	**437.212.356.611,00**	**-0,37%**
1.1.1	Pajak Daerah	175.790.551.559,00	187.970.567.869,00	153.928.723.961,00	-6,42%
1.1.2	Retribusi Daerah	10.925.787.599,00	11.082.898.549,00	9.971.513.081,00	-4,47%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5.172.244.408,00	4.501.629.676,00	5.158.642.121,00	-0,13%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	248.547.837.401,00	230.653.051.984,00	268.153.477.448,00	3,87%
1.2	**Dana Perimbangan**	**814.145.269.518,00**	**803.587.681.346,00**	**817.506.344.852,00**	**0,21%**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	71.877.328.085,00	57.473.349.170,00	89.440.938.804,00	11,55%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	577.778.746.000,00	593.145.833.000,00	545.286.189.000,00	-2,85%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	164.489.195.433,00	152.968.499.176,00	182.779.217.048,00	5,41%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**168.396.374.498,00**	**305.230.759.820,00**	**379.203.376.773,00**	**50,06%**
1.3.1	Hibah	38.628.263.816,00	39.616.922.000,00	56.567.977.876,00	21,01%
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.899.372.419,00	96.108.159.099,00	81.172.515.237,00	-4,98%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.368.738.263,00	147.017.117.721,00	209.992.429.660,00	206,39%
1.3.7	Dana insentif Daerah	17.500.000.000,00	22.488.561.000,00	31.470.454.000,00	34,10%
2	**BELANJA**	**1.426.054.577.183,00**	**1.587.295.890.992,00**	**1.582.881.804.426,00**	**5,36%**

No.	Uraian	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**674.059.990.646,00**	**695.598.341.441,00**	**702.702.370.510,00**	**2,10%**
2.1.1	Belanja Pegawai	625.642.502.316,00	639.167.453.466,00	605.343.249.993,00	-1,64%
2.1.2	Belanja Bunga	0,00		0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00		0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	45.513.241.002,00	52.655.887.215,00	52.243.034.036,00	7,14%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.174.148.000,00	2.970.200.000,00	3.320.180.000,00	23,58%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00		0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	723.896.000,00	758.568.800,00	0,00	-100,00%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.203.328,00	46.231.960,00	41.795.906.481,00	8108,32%
2.2	**Belanja Langsung**	**751.994.586.537,00**	**891.697.549.551,00**	**880.179.433.916,00**	**8,19%**
2.2.1	Belanja Pegawai	21.337.892.550,00	21.455.438.216,00	44.555.923.695,00	44,50%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	554.963.745.116,00	600.326.303.396,00	541.273.784.740,00	-1,24%
2.2.3	Belanja Modal	175.692.948.871,00	269.915.807.939,00	294.349.725.481,00	29,44%
3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**76.827.848.842,00**	**88.751.336.642,00**	**-1.422.332.895,00**	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	80.344.191.342,00	233.751.336.642,00	75.682.234.894,00	-2,94%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.516.342.500,00	145.000.000.000,00	77.104.567.789,00	368,27%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021

Dari Tabel 3.19 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan dan belanja pada APBD tahun 2018-2020 sebagai dasar perhitungan proyeksi APBD tahun 2021-2023 yang dapat dilihat pada Tabel 3.20. Adapun dalam menghitung proyeksi selain menggunakan angka rata-rata pertumbuhan yang memperhatikan kecenderungan (*trend*) perkembangan APBD dan memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan

Rata-rata pertumbuhan pendapatan pada periode tahun 2018-2020 mengalami kenaikan sebesar 7,16 persen. Walaupun secara umum mengalami pertumbuhan namun sebagian besar komponen pendapatan mengalami penurunan antara lain pajak dan retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan dana bagi hasil pajak propinsi. Salah satu komponen yang mengalami penurunan secara adalah pajak daerah. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang signifikan pada komponen pajak daerah dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemasangan *tapping box* untuk wajib pajak, sehingga penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 diproyeksikan cukup tinggi dengan memperhatikan potensi yang ada. Namun pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga realisasi pajak daerah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk proyeksi tahun 2021 – 2023 pendapatan asli daerah diproyeksikan naik sebesar 2,31 persen setiap tahunnya dengan pertimbangan pandemi berhasil diatasi pada tahun 2021 sehingga diharapkan perekonomian akan kembali stabil.

2. Belanja

Rata-rata pertumbuhan belanja pada tahun 2018-2020 sebesar 5,36 persen. Untuk proyeksi tahun 2021-2023 belanja diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 2,51 persen setiap tahunnya, belanja diproyeksikan tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi untuk menghindari tidak terbiayainya program kegiatan mengingat proyeksi kenaikan pendapatan hanya 2,31 persen.

Tabel 3.20
Proyeksi Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2021-2023 Kota Cirebon

No	Uraian	Persentase Pertumbuhan	Proyeksi Tahun (Rupiah)		
			Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	**3,04%**	**1.434.738.075.240,00**	**1.478.127.870.469,80**	**1.523.160.822.790,45**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5,00%**	**516.907.457.500,00**	**542.752.830.375,00**	**569.890.471.893,75**
1.1.1	Pajak Daerah	5,00%	192.012.249.000,00	201.612.861.450,00	211.693.504.522,50
1.1.2	Retribusi Daerah	5,00%	15.099.868.000,00	15.854.861.400,00	16.647.604.470,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,00%	8.055.501.000,00	8.458.276.050,00	8.881.189.852,50
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,00%	301.739.839.500,00	316.826.831.475,00	332.668.173.048,75
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2,00%**	**877.221.117.740,00**	**894.765.540.094,80**	**912.660.850.896,70**
1.2.1	Transer Pemerintah Pusat	2,00%	778.042.115.000,00	793.602.957.300,00	809.475.016.446,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	2,00%	99.179.002.740,00	101.162.582.794,80	103.185.834.450,70
1.2.3	**Lain-lain PAD yang Sah**	**0,00%**	**40.609.500.000,00**	**40.609.500.000,00**	**40.609.500.000,00**
1.2.6	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,00%	40.609.500.000,00	40.609.500.000,00	40.609.500.000,00
2	**BELANJA**	**3,10%**	**1.449.838.480.240,00**	**1.458.058.870.469,80**	**1.541.091.822.790,45**
2.1	**Belanja Operasi**	**3,12%**	**1.330.970.444.308,00**	**1.335.856.662.459,84**	**1.415.360.348.540,19**
2.1.1	Belanja Pegawai	1,50%	672.004.788.617,00	682.084.860.446,26	692.316.133.352,95
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,00%	630.772.755.124,00	625.015.043.435,25	664.712.321.437,34
2.1.3	Belanja Hibah	2,00%	28.192.900.567,00	28.756.758.578,34	58.331.893.749,91
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2	**Belanja Modal**	**2,96%**	**114.308.035.932,00**	**117.642.208.009,96**	**121.171.474.250,26**

No	Uraian	Persentase Pertumbuhan	Proyeksi Tahun (Rupiah)		
			Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Tanah	3,00%	231.944.400,00	238.902.732,00	246.069.813,96
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3,00%	54.438.177.793,00	56.071.323.126,79	57.753.462.820,59
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	3,00%	58.888.118.987,00	60.654.762.556,61	62.474.405.433,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,00%	219.644.152,00	226.233.476,56	233.020.480,86
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,00%	437.850.600,00	450.986.118,00	464.515.701,54
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00%**	**4.560.000.000,00**	**4.560.000.000,00**	**4.560.000.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS / DEFISIT		**-15.100.405.000,00**	**20.069.000.000,00**	**-17.931.000.000,00**
3	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**8,88%**	**24.464.669.000,00**	**-**	**29.000.000.000,00**
3.1.1	SiLPA		24.464.669.000,00		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				29.000.000.000,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8,72%**	**9.364.264.000,00**	**20.069.000.000,00**	**11.069.000.000,00**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00%	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-19,66%	9.295.264.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
3,2,3	Pembentukan Dana Cadangan		-	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**8,97%**	**15.100.405.000,00**	**-20.069.000.000,00**	**17.931.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**-**	**(0,00)**	**(0,00)**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021

Pada Tabel 3.20, struktur APBD pada proyeksi APBD Kota Cirebon Tahun 2021-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2021. Adapun anggaran Pendapatan diproyeksikan naik sebesar 3,04 persen dengan rincian kenaikan PAD sebesar 5 persen, kenaikan pendapatan transfer sebesar 2,00 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tetap. Proyeksi anggaran belanja naik sebesar 3,10 persen setiap tahunnya dengan rician belanja operasi naik sebesar 3,12 persen, belanja modal sebesar 2,96 persen dan belanja tidak terduga diproyeksikan tetap. Adapun anggaran penerimaan pembiayaan diproyeksikan naik 8,88 persen dikarenakan pada tahun 2023 direncanakan ada pencairan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan naik sebesar 8,72 persen dikarenakan ada rencana penyertaan modal untuk BUMD serta pembentukan dana cadangan Pilkada.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan hasil proyeksi APBD sesuai dengan Tabel 3.19, didapat Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pendapatan	1.543.026.589.244,00	1.633.922.078.236,00	1.434.738.075.240,00	1.478.127.870.469,80	1.523.160.822.790,45
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	-	-			
3.	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	73.751.336.642,00	44.482.334.894,00	24.464.669.000,00	-	-
	Total penerimaan	1.616.777.925.886,00	1.678.404.413.130,00	1.459.202.744.240,00	1.478.127.870.469,80	1.523.160.822.790,45
	Dikurangi:					
4.	Belanja tidak langsung	695.598.041.441,00	702.702.370.510,00	672.004.788.617,00	682.084.860.446,26	692.316.133.352,95
5.	Pengeluaran pembiayaan	145.000.000.000,00	77.104.567.789,00	9.364.264.000,00	20.069.000.000,00	11.069.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	776.179.884.445,00	898.597.474.831,00	777.833.691.623,00	775.974.010.023,55	819.775.689.437,50

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, hasil analisis

Dari Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota Cirebon secara umum meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap realisasi pendapatan, hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat alokasi dana transfer yang peruntukannya dikhususkan untuk penanganan pandemi Covid-19 antara lain hibah pemulihan ekonomi nasional dari Kementerian Pariwitasa dan Ekonomi Kreatif RI, dana alokasi khusus untuk pemberian insentif tenaga kesehatan dan

bantuan kauangan provinsi untuk penanganan kesehatan. Karena belum adanya kepastian Kota Cirebon akan menerima alokasi dana-dana tersebut pada tahun-tahun berikutnya maka untuk tahun 2021-2023 diasumsikan tidak ada alokasi dana transfer untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari tahun 2020 ke tahun-tahun berikutnya. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel 3.22.

3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas *(money follow program)* dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada Tabel 3.22.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan Prirotas Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk:
    a. Pelaksanaan 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Cirebon tahun 2018-2023, meliputi: 1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan; 3) Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi; 4) Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata; 5) Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan 6) Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
    b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2018-2023.
    c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
    d. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
    e. Pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah.
    f. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD.
    g. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur, yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.22
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi Tahun (Rupiah))				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	776.179.884.445,00	898.597.474.831,00	777.833.691.623,00	775.974.010.023,55	819.775.689.437,50
	PRIORITAS I					
1.	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	1.768.568.000,00	1.768.568.000,00	1.802.971.433,51	1.838.062.935,69	1.873.856.267,92
2.	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	24.646.831.000,00	25.126.016.304,37	25.614.785.314,88	26.113.329.705,57	26.621.844.984,08
3.	Belanja Premi Asuransi	872.028.000,00	888.982.025,55	906.275.131,62	923.914.099,81	941.905.847,36
4.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	3.609.299.000,00	3.679.471.227,82	3.751.046.900,20	3.824.054.086,02	3.898.521.415,56
5.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.272.688.000,00	2.316.873.749,11	2.361.943.213,21	2.407.914.066,60	2.454.804.337,04
6.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	87.740.000,00	89.445.946,83	91.185.810,60	92.960.573,65	94.770.831,95
	PRIORITAS II	565.584.850.845,00	576.605.057.830,42	587.821.586.553,38	599.262.445.850,14	610.932.122.332,84
	PRIORITAS III	177.337.879.600,00	288.123.059.746,90	155.483.897.265,60	141.511.328.706,07	172.957.863.420,75

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, hasil analisis

3.3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pembangunan Kota Cirebon selain bersumber dari APBD Kota Cirebon, juga memperoleh dukungan pendanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL).

Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah (tidak melalui APBD Kota Cirebon), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang masuk dalam struktur APBD Kota Cirebon. Adapun pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa Bantuan Keuangan Provinsi kepada kabupaten/kota.

Tabel 3.23
Perkembangan Pendanaan Bersumber APBN Kota Cirebon Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis APBN				Jumlah
	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama	D A U	D A K	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2016	-	-	588.109.947.000	206.918.604.124	795.028.551.124
2017	-	-	577.778.746.000	161.933.473.759	739.712.219.759
2018	-	-	577.778.746.000	164.489.195.433	742.267.941.433
2019	-	-	593.145.833.000	152.968.499.176	746.114.332.176
2020	-	-	545.286.189.000	182.779.217.048	728.065.406.048

Sumber: LRA Pemerintah Kota Cirebon tahun 2016-2020, data diolah

Pada Tabel 2.32 dapat dilihat pendanaan APBN yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp795.028.551.124,00 menjadi sebesar Rp728.065.406.048,00 pada tahun 2020. Selain dari APBN sumber pendanaan pembangunan lainnya adalah bantuan keuangan provinsi. Perkembangan pendanaan program kegiatan yang berasal dari pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Perkembangan Pendanaan Bantuan Keuangan Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon Tahun 2016-2021

Tahun	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
1	*2*
2016	23.459.034.208
2017	46.041.996.140
2018	22.368.738.263
2019	192.645.880.241
2020	194.023.253.260
2021	156.293.093.500

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021

Bantuan Keuangan adalah dana APBD Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Daerah Provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau untuk tujuan peruntukan lainnya. Bantuan Keuangan Provinsi yang diterima oleh Kota Cirebon dari tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp23.459.037.208,00 menjadi sebesar Rp156.293.093.500,00 pada tahun 2021.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Cirebon 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada Bab II, maka permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi Kota Cirebon adalah:

1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia dan daya saing daerah;
2. Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perkotaan;
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami pelambatan dan berkontraksi akibat wabah pandemi COVID-19;
5. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah;
6. Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
7. Munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor pembangunan.

Permasalahan tersebut dipicu oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat dikelompokkan kedalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu wewenang yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi PAUD, SD, dan SMP sederajat.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelayanan pendidikan di Kota Cirebon adalah:

a. Angka Rata-rata Lama Sekolah dari target 10,19 tahun pada Tahun 2019 hanya terealisasi 9,90 tahun (97,50 persen). Selain itu, peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah per tahun hanya 0,01 tahun. Pada tahun 2017 RLS Kota Cirebon mencapai 9,88 tahun dan pada tahun 2020 sebesar 9,91 tahun, dengan pertumbuhan nilai sekitar 0,2 persen per tahun;

b. Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020 baru mencapai 13,12 tahun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 13,08 tahun. Namun demikian, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan berkisar 0,01-0,02 tahun, peningkatan tersebut belum sesuai harapan. Oleh karena itu, prinsip *education for all* harus segera diimplementasikan. Anak usia sekolah yang berusia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun harus didorong untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun informal;
c. Pada tahun 2019 kualifikasi pendidikan S1/D-IV bagi guru SD mencapai 96,25 persen, SMP 97,72 persen, artinya masih terdapat sekitar 3,75 persen guru SD di Kota Cirebon pendidikannya masih dibawah S1/D-IV. Sementara itu, masih terdapat 2,18 persen guru SMP di Kota Cirebon belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV. Begitu pula dengan sertifikasi guru yang diartikan pemberian sertifikat pendidikan sebagai bukti profesionalisme guru dalam mengajar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sampai dengan tahun 2019, sertifikasi guru SD di Kota Cirebon baru mencapai 48,15 persen dan SMP 53,38 persen;
d. Adanya kelebihan dan kekurangan jumlah guru di tingkat sekolah. Kelebihan guru tersebut ada di tingkat Sekolah Menengah Pertama, untuk di Sekolah Dasar terjadi kekurangan guru terutama pada guru kelas dan mata pelajaran olahraga;
e. Potensi keluarga miskin untuk *drop out* pendidikan masih ada. Hal ini dikarenakan paradigma pentingnya pendidikan masih belum tertanam pada masyarakat kurang mampu;
f. Sebaran sekolah baik TK, SD, dan SMP belum merata di tiap wilayah kecamatan;
g. Rasio siswa-guru untuk masing masing tingkat pendidikan masih belum merata;
h. Masih adanya kondisi gedung sekolah yang kurang memadai.

4.1.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Permasalahan yang masih dihadapi Kota Cirebon dalam pembangunan kesehatan adalah:

a. Penyebaran tenaga kesehatan belum merata;
b. Menurunnya jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dari 58.569 rumah tangga menjadi 41.992 Rumah Tangga yang ber-PHBS;
c. Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah;
d. Belum semua penduduk miskin masuk dalam data kepesertaan program Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI);
e. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan sekitarnya;
f. Masih adanya kasus gizi buruk, walaupun perkembangan lima tahun terakhir menunjukan penurunan jumlah kasus, namun masih adanya kasus gizi buruk tetap memerlukan penanganan yang komprehensif;

g. Masih rendahnya cakupan pemberian ASI Ekslusif, yaitu baru mencapai 69,44 persen;
h. Ada kenaikan jumlah kasus *stunting* dari 2.253 balita (10,1 pesen) pada Tahun 2018 menjadi 2.412 balita (11,2 persen) pada tahun 2019;
i. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum mencapai target (93 persen). Dari jumlah sasaran 5,408 balita terealisasi 4.730 balita (87,46 persen);
j. Peningkatan jumlah kasus TB paru, dari 1.352 kasus pada tahun 2018 menjadi 1.670 kasus pada tahun 2019;
k. Kasus HIV AIDS masih tinggi;
l. Mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga memudahkan dalam penyebaran penyakit;
m. Masih rendahnya angka capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif, yaitu hanya 33,58 persen. Dari 211.545 orang, yang mendapat pelayanan berjumlah 71.047 orang;
n. Kota Cirebon belum mencapai ODF/bebas BABS. Dari 22 kelurahan yang ada, baru 1 kelurahan yang dinyatakan bebas buang air sembarangan, yaitu Kelurahan Larangan;
o. Peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dari 6 kasus pada awal Maret 2020 menjadi 2.385 kasus pada tanggal 14 Januari 2021.

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang terkait dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cirebon adalah:

a. Kondisi jaringan utilitas infrastruktur wilayah belum merata;
b. Masih kurangnya sarana prasarana infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
c. Kondisi jaringan jalan maupun jalan lingkungan beserta utilitasnya serta fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan masih ada yang belum tertata dengan baik;
d. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
e. Masih adanya penggunaan kawasan lindung yang digunakan untuk perumahan oleh masyarakat (sempadan pantai, sempadan sungai);
f. Kawasan/lingkungan dan fasilitas lainnya belum tertata dengan baik;
g. Kondisi drainase dan prasarana lainnya masih ada yang belum selaras dengan tata ruang, sehingga menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;
h. Kurang optimalnya penyusunan perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh seperti kawasan perkotaan;
i. Perlunya peningkatan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas pengaliran yang memadai.

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang terkait dengan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Cirebon adalah:

a. Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan yang memerlukan intervensi;
b. Penataan hunian permukiman yang layak (rumah sehat) dengan akses sanitasi pemukiman yang belum memadai dan terbangun secara optimal;
c. Masih kurangnya ruang terbuka hijau;

4.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Cirebon meliputi:

a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanan peraturan daerah dan peraturan lainnya;
b. Maraknya pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu keindahan dan ketertiban Kota;
c. Mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga memudahkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
d. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana masih rendah karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan masih rendah;
e. Terhambatnya percepatan pelayanan pertolongan dan evakuasi korban bencana karena keterbatasan saran dan prasarana penanggulangan bencana;
f. Masih perlunya pengembangan 4 (empat) pilar Wawasan Kebangsaan;
g. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
h. Masih perlunya pendidikan politik masyarakat.

4.1.1.6 Sosial

Permasalahan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan peran pelaku pembangunan kesejahtraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah:

a. Terbatasnya kuota penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin;
b. Terjadi kenaikan persentase penduduk miskin. Pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kota Cirebon sebanyak 9,52 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 8,41 persen. Demikian juga dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada Tahun 2019, nilai P2 adalah 1,23 sedangkan Tahun 2020 menjadi 1,68, sedangkan nilai P2 Tahun 2019 adalah 0,26 dan menjadi 0,40 pada Tahun 2020;
c. Belum terkoordinasikannya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan belum digunakannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penentuan sasaran program dan kegiatan di perangkat daerah;
d. Belum tersedianya lahan dan anggaran untuk mendirikan/membangun panti rehabilitasi sosial guna penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
e. Secara kelembagaan, instansi sosial belum bisa berdiri sendiri sehingga kewenangan dalam penanganan PPKS hanya dilakukan oleh bidang yang menangani masalah sosial;
f. Belum adanya pembatasan kewenangan yang jelas dalam rangka penanganan pra, pada saat bencana, dan pasca bencana;
g. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, baik pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pembenahan Lingkungan Pondok Sosial (Liposos), Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, maupun rumah singgah untuk penanganan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ).

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dalam SPM terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Dari 11 (sebelas) indikator SPM Bidang Pendidikan, yang masih menjadi permasalahan strategis adalah terkait (1) tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berparisipasi dalam PAUD, (2) persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi, serta (3) persentase pendidik yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik, baik pada jejang SD/MI maupun pada jenjang SMP/MTS;
b. Dari 12 (dua belas) indikator pada SPM Kesehatan, yang memenuhi target capaian SPM Tahun 2020 baru 4 (empat) indikator (33,33 persen), yaitu: (1) setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, (2) setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, (3) setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, serta (4) setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Delapan indikator lain tidak mencapai target. Nilai capaian SPM terendah adalah pada indikator setiap warga negara usia 15 s.d. 59 ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar, yaitu 17,5 persen;
c. Dari 2 (dua) indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, belum satupun yang mencapai target 100 persen. Capaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari akses perpipaan dan non perpipaan adalah 99,00 persen pada tahun 2019. Warga yang belum terpenuhi kebutuhan pokok air minum terutama warga yang berada di wilayah selatan Kota Cirebon. Sedangkan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, baru mencapai 93,70 persen pada tahun 2019;
d. Belum adanya Gedung beserta sarana dan prasarana untuk RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) dan LIPOSOS, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya untuk mendukung capaian SPM Bidang Sosial;
e. Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu (1) jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persen) dan (2) jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan rumah maupun relokasi, maka sampai dengan saat ini tingkat capaian masih 100,00 persen.

4.1.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Kota Cirebon adalah:

a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup besar (8,98 persen), bahkan lebih tinggi dari TPT Jawa Barat (7,99 persen);
b. Masih terbatasnya pegawai fungsional instruktur, baru ada 1 (satu) orang;
c. Masih rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada sektor informal;

d. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal;
e. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan dunia usaha;
f. Masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan Penempatan Pencari Kerja (Wajib Lapor);
g. Pencari kerja yang telah diterima di perusahaan atau instansi tidak melapor kembali ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi;
h. Tingkat serapan tenaga kerja belum sebanding dengan pencari kerja.

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cirebon antara lain:

a. Data terpilah gender belum tersedia secara optimal;
b. Kelembagaan PUG belum optimal;
c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peran P2TP2A belum diketahui oleh masyarakat;
d. Cukup tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.1.2.3 Pangan

Permasalahan ketahanan pangan di Kota Cirebon adalah:

a. Ketersediaan pasokan bahan pangan masih mengandalkan dari Wilayah III Cirebon;
b. Luas lahan pertanian produktif di Kota Cirebon sangat terbatas;
c. Masih rendahnya skor PPH Konsumsi pada kelompok pangan umbi-umbian, sayur dan buah serta kacang-kacangan;
d. Kurangnya promosi dan edukasi tentang menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
e. Belum dimilikinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2P);
f. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi hewan dan kurangnya sarana prasarana untuk pencegahan pengendalian penyakit HMS dan *zoonosis*;
g. Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
h. Tingginya ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, sehingga nilai tawar nelayan rendah;
i. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang olahan ikan yang aman dan berkualitas;
j. Belum tersedianya lahan/tata ruang wilayah untuk kegiatan/proyek penunjang pengembangan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan;
k. Minat masyarakat terutama generasi muda untuk pengembangan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan masih kurang;
l. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan inovasi teknologi;
m. Koordinasi antar lintas instansi/lembaga penelitian masih kurang.

4.1.2.4 Pertanahan

Permasalahan mengenai pertanahan adalah:

a. Belum optimalnya pendataan pertanahan aset daerah;
b. Belum tuntasnya penyelesaian Pilar Batas Utama (PBU) antara Kota dan Kabupaten Cirebon.

4.1.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan lingkungan hidup di Kota Cirebon, diantaranya adalah:

a. Timbulan sampah di bantaran dan dalam aliran sungai Kota Cirebon akibat masih kurangnya kesadaran penduduk sekitar bantaran sungai untuk membuang sampah pada tempatnya;
b. Masih kurangnya jumlah TPS dan kapasitas sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah;
c. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan sampah;
d. Belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang layak dari aspek lingkungan;
e. Menurunnya kualitas lingkungan yang ditandai dengan menurunnya kualitas air, kualitas udara, dan pencemaran lingkungan air limbah domestik;
f. Adanya kecenderungan berkurangnya RTH publik sebagai dampak dari pengembangan iklim investasi di Kota Cirebon;
g. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Cirebon menjadi kendala dalam penanganan pengaduan kasus-kasus pencemaran lingkungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan;
h. Masih terjadinya ancaman banjir, timbulan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah medis, limbah domestik, abrasi pantai, interusi air laut, menurunnya kualitas udara, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, kerusakan hutan mangrove, belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim.

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan kependudukan di Kota Cirebon antara lain:

a. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon diantaranya adalah karena migrasi penduduk;
b. Masih terdapat masyarakat di Kota Cirebon yang belum memiliki dokumen kependudukan mapun pencatatan sipil;
c. Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun belum optimal;
d. Masih adanya masyarakat yang belum memahami dan sadar mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan manfaat dokumen kependukan;
e. Kepadatan penduduk masih belum merata, pada umumnya masih terpusat di kawasan perkotaan;
f. Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi daya tarik terhadap penduduk sekitar di luar wilayah Kota Cirebon, sehingga masyarakat luar Kota Cirebon cenderung secara administratif tercatat sebagai penduduk Kota Cirebon;
g. Data kependudukan belum terintegrasi dengan sistem di luar Kemendagri, sehingga menyulitkan untuk pemakaian bersama;
h. Sistem informasi administrasi kependudukan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga masih mengunakan dokumen secara manual.

4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di Kota Cirebon adalah:

a. Pengawasan dan pengendalian bantuan untuk pembangunan untuk tingkat RW dan RT belum optimal;
b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan kelurahan masih perlu terus ditingkatkan;
c. Masih adanya ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan terbatasnya akses informasi, sarana, modal, pasar, dan pelayanan.

4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi Kota Cirebon dalam pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

a. Masih rendahnya pencapaian peserta baru KB Pria dan MKJP;
b. Besaran jaminan hidup bagi akseptor pos tindakan vasektomi (MOP) masih rendah, sehingga belum menjadi motivasi bagi calon akseptor KB Pria;
c. Terdapat beberapa program lain di lapangan yang kontra produktif dengan program pengendalian penduduk dan KB serta pelayanan kesehatan reproduksi;
d. Belum adanya konsuler khusus yang berlatar belakang pendidikan psikolog;
e. Tidak adanya konselor dengan latar belakang pendidikan psikolog keluarga sebagai narasumber dalam penyampaian dan pembekalan informasi;
f. Hampir sebagian besar kader poktan tribina dan UPPKS berusia lanjut yang sudah tidak maksimal dalam mengelola kegiatan yang ada;
g. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kependudukan dan masalahnya relatif rendah;
h. Pemahaman program KKBPK masih rendah.

4.1.2.9 Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan Kota Cirebon antara lain:

a. Masih adanya kesemrawutan lalu lintas pada ruas-ruas jalan CBD;
b. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
c. Rendahnya disipilin pengguna jalan dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas;
d. Tingginya polusi udara akibat kurangnya pengendalian lalu lintas jalan di perkotaan;
e. Kurangnya lahan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Kota Cirebon;
f. Masih banyak ruas jalan dan persimpangan yang memerlukan pemasangan fasilitas lalu lintas seperti APILL, rambu, marka, *guardrail*, *delineator*, dan/atau cermin tikungan.

4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Cirebon adalah:

a. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang sangat cepat;

b. Masih perlu peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi;
c. Belum maksimalnya pelaksanaan *e-Government* dan integrasi sistem;
d. Penggunaan beberapa aplikasi belum dimanfaatkan secara optimal;
e. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sudah terbentuk tetapi perlu peningkatan perananannya secara lebih maksimal.

4.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan koperasi dan UKM yang masih dihadapi di Kota Cirebon antara lain:

a. Belum optimalnya penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota, yaitu:
   - Masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati tempat yang bukan peruntukannya;
   - PKL belum mentaati peraturan yang diberlakukan.
b. Belum optimalnya tata kelola perkoperasian, yaitu:
   - Masih banyak RW yang belum memiliki koperasi (baru 27,00 persen);
   - Masih banyak koperasi yang belum berbadan hukum.
c. Jumlah UMKM mengalami penurunan;
d. Pola kemitraan antara koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran hasil produksi.

4.1.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan yang masih dihadapi di Kota Cirebon dalam penanaman modal antara lain:

a. Belum Optimalnya sistem informasi pelayanan perijinan dan non perijinan, yang mana perkembangan saat ini informasi sangat diperlukan oleh pelaku usaha;
b. Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi;
c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan (mendirikan bangunan dan atau berusaha sebelum memiliki ijin);
d. Kualitas dan kuantitas SDM terbatas dibandingkan volume layanan perijinan, sehingga janji layanan belum terpenuhi secara maksimal.

4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan terkait pembangunan kepemudaan dan olahraga meliputi:

a. Masih minimnya keaktifan organisasi pemuda;
b. Menurunnya prestasi olah raga pada event olah raga tingkat wilayah, provinsi dan nasional;
c. Rendahnya wirausaha muda;
d. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

4.1.2.14 Statistik

Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Cirebon antara lain:

a. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi dalam SIPD untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah;

b. Belum tersedianya data terpilah berbasis gender dan anak untuk perencanaan pembangunan;
c. Belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan sasaran pembangunan, seperti indeks kebahagiaan penduduk, indeks demokrasi, indeks kepemudaan/pembangunan pemuda, indeks toleransi, dan sebagainya.

4.1.2.15 Kebudayaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan ketahanan dan keberadaan kebudayaan Cirebonan antara lain:

a. Belum terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka yang disebabkan:
   - Masih minimnya apresiasi generasi muda tentang seni budaya tradisional dan bahasa daerah;
   - Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif untuk mendukung pengembangan seni budaya;
   - Minimnya nilai tradisi yang ada di masyarakat.
b. Belum optimalnya pemanfaatan budaya sebagai aset wisata Kota Cirebon yang disebabkan:
   - Masih rendahnya aset budaya Kota Cirebon yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata;
   - Belum optimalnya pengelolaan Obyek Wisata Keraton.

4.1.2.16 Perpustakaan

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan perpustakaan antara lain:

a. Kurangnya minat baca masyarakat;
b. Kurangnya perhatian dan pemanfaatan perpustakaan yang ada di perangkat kerja;
c. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi berjalan lambat;
d. Koleksi berbagai jenis buku perpustakaan masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
e. Pertumbuhan penduduk belum sebanding dengan jumlah koleksi buku;
f. Apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya *(memory of nation)* yang memiliki nilai sangat berharga masih rendah dan sampai saat ini kepemilikan naskah-naskah kuno tersebut sebagian besar masih tersebar di masyarakat baik di dalam maupun luar negeri;
g. Belum terbentuk dan melembaganya budaya baca masyarakat, sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
h. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas;
i. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga belum semua terbitan yang ada di Kota Cirebon terhimpun, terkelola, dan terdayagunakan di Perpustakaan Daerah Kota Cirebon;
j. Diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka;

k. Minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional pustakawan masih kurang;
l. Jumlah anggota maupun jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Cirebon yang ada minat baca masyarakat masih tergolong relatif rendah.

4.1.2.17 Kearsipan

Permasalahan kearsipan yang masih dihadapi, adalah:

a. Belum dimilikinya gedung Depo Arsip berdampak pada tata kelola kearsipan dan pemeliharaan arsip tidak dapat berjalan optimal;
b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Arsip bagi kebutuhan hidup;
c. Pengelolaan arsip Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon belum dapat berjalan optimal sebagai akibat rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
d. Belum optimalnya penggunaaan teknologi informasi dalam pemberian layanan arsip;
e. Belum optimalnya digitalisasi reformating arsip statis;
f. Belum dimilikinya gedung museum sebagai pusat informasi perjalanan sejarah Cirebon (Lampahing Cirebon);
g. Minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional arsiparis masih kurang.

4.1.3 Urusan Pilihan

4.1.3.1. Pertanian

Permasalahan pertanian di Kota Cirebon adalah:

a. Luas lahan pertanian produktif di Kota Cirebon sangat terbatas;
b. Pengembangan tanaman pangan dan holtikultura serta perkebunan yang menjadi unggulan belum optimal;
c. Masih kurangnya pengembangan tanaman pangan organik dan hydroponik;
d. Alih fungsi lahan yang sulit dibendung dan belum optimalnya pemanfaatan tanah/pekarangan kosong untuk budidaya pertanian;
e. Pemanfaatan teknologi tepat guna oleh petani yang masih kurang.
f. Masih rendahnya akses petani terhadap permodalan.

4.1.3.2. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi Kota Cirebon, diantaranya meliputi:

a. Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih relatif rendah;
b. Peningkatan standarisasi budidaya perikanan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada tingkat masyarakat pembudidaya ikan dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) pada tingkat Balai Benih Ikan (BBI) perlu ditingkatkan melalui sertifikasi maupun pengawasan penerapan di lapangan secara konsisten dan berkelanjutan;
c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran hasil kelautan.

4.1.3.3. Perdagangan

Permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan di Kota Cirebon antara lain:

a. Belum tersedianya kawasan khusus kuliner Khas Cirebon;

b. Perlunya revitalisasi pasar-pasar tradisional dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan;
c. Menurunnya minat masyarakat untuk mengunjungi pasar rakyat;
d. Persaingan antara pasar/toko tradisional dengan toko modern;
e. Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cenderung menurun;
f. Kurang stabilnya harga bahan pokok di pasaran Kota Cirebon;
g. Masih perlunya peningkatan upaya hukum perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang dipasarkan, sosialisasi pemberdayaan konsumen cerdas serta penyelesaian sengketa konsumen yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
h. Perlunya peningkatan tertib hukum dalam transaksi perdagangan melalui kemetrologian legal dengan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya).

4.1.3.4. Perindustrian

Permasalahan pembangunan di bidang perindustrian, antara lain meliputi:

a. Belum optimalnya pemasaran hasil industri kreatif;
b. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah seperti industri kayu ukir dan lainnya;
c. Belum terjalin hubungan yang optimal antara Industri Kecil dan Menengah dengan dunia usaha khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan terhadap pemanfaatan hasil-hasil produksi industri kreatif untuk konsumsi wisatawan;
d. Keterbatasan lahan yang tersedia menyebabkan terbatasnya pengembangan.

4.1.3.5. Pariwisata

Permasalahan peningkatan pariwisata yang masih ada di Kota Cirebon adalah:

a. Masih terbatasnya jumlah destinasi di Kota Cirebon, yang disebabkan antara lain belum adanya destinasi baru seperti wisata minat, wisata halal, dan wisata buatan;
b. Integrasi paket wisata dengan Obyek dan Tarik Wisata (ODTW) di sekitar Kota Cirebon belum optimal;
c. Belum optimalnya pengembangan *green tourism* (natural dan ramah lingkungan);
d. Sumber daya manusia kepariwisataan masih rendah.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan

4.1.4.1. Sekretariat Daerah

Permasalahan fungsi penunjang Sekretariat Daerah, antara lain:

a. Tingginya dinamika perubahan kebijakan pemerintah yang harus ditindaklanjuti oleh Daerah;
b. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah masih kurang, terutama dalam dukungan data dan informasi;
c. Adanya perubahan-perubahan kelembagaan dan regulasi.

4.1.4.2. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan penunjang urusan perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
b. Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
c. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang.

4.1.4.3. Keuangan

Permasalahan penunjang urusan keuangan :

a. Pendataan aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
b. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku perlu ditingkatkan;
c. Perkembangan politik yang tidak pasti;
d. Target penerimaan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat.

4.1.4.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan penunjang urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan, yaitu:

a. Belum otimalnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
b. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
c. Kurangnya jumlah pegawai di tiap PD.

4.1.4.5. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Permasalahan penunjang urusan penelitian dan pengembangan adalah:

a. Belum optimalnya hasil kelitbangan daerah;
b. Belum sinergi dan selarasnya hasil kelitbangan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan;
c. Kelembagaan kelitbangan daerah dan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan terbatas;
d. Anggaran untuk penelitian dan pengembangan masih sangat terbatas kurang dari 1 persen dari APBD Kota Cirebon.

4.1.4.6. Pengawasan

Permasalahan penunjang urusan lainnya adalah:

a. Jumlah SDM tenaga fungsional auditor masih belum memadai sedangkan objek pemeriksaan cukup banyak;
b. Penambahan SDM yang diterima di Inspektorat tidak sesuai dengan formasi kebutuhan yang ada;
c. Anggaran untuk pemeriksaan yang masih rendah, belum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462, tanggal 9 Oktober 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mensyaratkan 1 persen dari APBD;
d. Adanya pengawasan dari masyarakat yang kadang bersifat negatif, yang disampaikan kepada eksekutif maupun legislatif;
e. Dampak negatif dari globalisasi, akibat kemudahan transportasi, komunikasi dan penyebarluasan berbagai informasi akan mempengaruhi opini masyarakat terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;

f. Belum optimalnya koordinasi pengawasan.

4.2 Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Isu strategis pembangunan Kota Cirebon dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah. Isu-isu strategis tersebut merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal sesuai dengan dinamika internasional, nasional dan lokal Kota Cirebon. Isu strategis pembangunan Kota Cirebon 5 (lima) tahun ke depan diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) permasalahan pembangunan Kota Cirebon; (2) dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Cirebon; (3) kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Cirebon; (4) kebijakan pembangunan Kota Cirebon yang meliputi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dan RTRW Kota Cirebon 2011-2031; dan (5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD, maka ditetapkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Cirebon 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas daya saing ekonomi secara berkelanjutan;
5. Pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.
6. Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
7. Dampak Pandemi Covid-19.

Secara umum isu strategis tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendidikan, serta kesehatan. Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 berjumlah 319.312 jiwa, dengan pertumbuhan 0,96 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 333.033 jiwa.

Jumlah penduduk tersebut kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beban pembangunan. Oleh karena itu perlu dipacu dan didorong dengan berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga memiliki keunggulan, handal, berkarakter, dan memiliki daya saing global.

Saat ini dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Kota Cirebon masih dihadapkan pada berbagai hambatan, diantaranya:

A. Pendidikan

Masalah pendidikan yang masih menjadi isu strategis di Kota Cirebon adalah:

1) Guru SD/MI dan SMP/MTS yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik masih rendahnya, yaitu 48,15 persen untuk guru SD/MI dan 53,38 persen untuk guru SMP/MTS;
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang baru mencapai 33,34 persen, APM SMP/MTs sebesar 70,79 persen dan APM SMA/SMK/MA sebesar 66,76 persen;
3) Begitu pula Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cirebon yang pada tahun 2019 baru mencapai 9,90 tahun, yang artinya tingkat penduduk penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 rata-rata baru mencapai kelas I SMA;
4) Jumlah sekolah SD yang terakreditasi baru 31 persen;

B. Kesehatan

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, isu pelayanan kesehatan saat ini berkaitan dengan:

1) Rasio rumah sakit per satuan penduduk masih cukup besar, yaitu 29,028 pada Tahun 2019. Hal ini berarti 1 rumah sakit rata-rata melayani 29.028 orang penduduk, sedangkan rasio ini yang ideal adalah 1 rumah sakit melayani 1.000 penduduk.
2) Cakupan pelayanan ibu bersalin, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) capaian kunjungan anak balita, cakupan peserta KB aktif, cakupan pemberian ASI eksklusif belum optimal;
3) Belum optimalnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat;
4) Adanya peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan kurangnya SDM kesehatan untuk penanganan Covid-19.

2. Isu Kemiskinan, Pengangguran dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pada Tahun 2019, persentase penduduk miskin (P_0) di Kota Cirebon mengalami penurunan, dari 8,88 persen pada Tahun 2018 menjadi 8,41 persen pada Tahun 2019. Hanya saja, penurunan angka kemiskinan ini tidak diikuti oleh penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P_2). Pada Tahun 2018, nilai P_1 adalah 0,99 dan sedangkan Tahun 2019, nilai P_1 adalah 1,23. Sedangkan nilai P_2 adalah 0,19 dan pada Tahun 2019 adalah 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak diimbangi dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin, sehingga memerlukan akselerasi melalui intervensi berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran, tepat metode dan cepat dalam penanganannya.

Selain persoalan di atas, keberadaan PPKS yang dirasakan semakin komplek memerlukan intervensi yang tepat. PPKS di Kota Cirebon tidak hanya

berasal dari dalam kota, tetapi juga berasal dari luar kota daerah sekitar bahkan ada yang berasal dari provinsi tetangga, sehingga dalam penanganannya memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah.

Untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Cirebon harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3. Isu Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Cirebon, karena hal ini terkait erat dengan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap pembangunan kotanya. Kesenjangan antar wilayah yang cenderung semakin melebar akan menimbulkan gejolak pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahun 2020, Indeks Gini Kota Cirebon adalah sebesar 0,421 yang menunjukkan Kota Cirebon berada pada tingkat ketimpangan sedang. Keadaan ini dapat berarti kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi tidak miskin, sebagaimana data ditunjukkan pada peningkatan P_1 dan P_2.

Selain persoalan ketimpangan, pelambatan pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor lambatnya pemerataan hasil-hasil pembangunan di semua aspek kehidupan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mencapai 6,29 persen dan tahun 2017 sebesar 5,80 persen, sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, perekonomian Kota Cirebon tumbuh 0,08 persen.

Prinsip pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka tekanan terhadap lingkungan juga akan semakin tinggi sehingga harus dilakukan upaya pembangunan yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan hidup.

Perkembangan Kota Cirebon tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke wilayah perkotaan. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, tentu jumlah kebutuhan kebutuhan oksigen (O_2) juga akan meningkat, begitu pula ketersediaan air bersih dan pangan harus menjadi perhatian untuk pemenuhannya. Di sisi lain, status daya dukung penyedia air Kota Cirebon saat ini umumnya telah melampaui ketersediaannya. Persentase luas wilayah yang belum melampaui ketersediaan air di Kota Cirebon adalah sebesar 38,20%. Sementara itu, hanya 10,99% dari seluruh luasan wilayah yang masih dapat mendukung penyediaan pangan di Kota Cirebon.

Selain itu, jumlah populasi yang bertambah tentu akan menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Masalah lainya adalah pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

Isu peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tentu terkait erat dengan permasalahan layanan infrastruktur yang menunjang aksesibilitas antara wilayah. Masih terdapat permasalahan kondisi jaringan utilitas infrastruktur wilayah belum merata serta masih kurangnya sarana

prasarana infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Hal ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan untuk mempercepat peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Cirebon.

4. Isu Produktivitas Daya Saing Ekonomi Secara Berkelanjutan

Daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Daya saing ekonomi daerah dapat dilihat dari (1) tingkat produktifitas angkatan kerja yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal; (2) kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen kapasitas keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian kota; (3) kinerja BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD; (4) angka kejadian kriminalitas; (5) ketergantungan penduduk, yang menunjukan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif; (6) iklim investasi.

Kinerja daya saing ekonomi daerah memiliki kaitan dengan kinerja kesejahtaraan masyarakat dan pelayanan umum. Daya saing ekonomi daerah dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat seperti standar hidup layak yang digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, dan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya daya saing ekonomi daerah memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat berupa iklim investasi yang diperlukan untuk menggerakan ekonomi daerah.

Indikator daya saing ekonomi daerah lainya yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2020 pengeluaran perkapita disesuaikan Kota Cirebon mencapai Rp11,80 Juta per tahun, dimana mengalami penurunan dibandingkan dengan pengeluaran perkapita disesuaikan tahun 2019 yang mencapai Rp11,93 juta per tahun, hal tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat semua sektor pembangunan khususnya sektor pembangunan ekonomi di Kota Cirebon.

5. Isu Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya sektor pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata serta belum optimalnya pengembangan manajemen pariwisata dan aset pariwisata, Pada bidang kebudayaan terjadi beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Cirebon, hal tersebut disebabkan belum optimalnya pelestarian nilai budaya Cirebon yang memiliki kekayaan warisan budaya keraton, belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset pariwisata Kota Cirebon, dan belum optimalnya pengembangan ragam seni tradisional Cirebon. Sebagai akibat kurangnya pengelolaan kekayaan dan keragaman seni dan budaya tersebut, nampak beberapa kesenian tradisional Cirebon yang hampir punah, seperti Seni Pertunjukan Tarling.

6. Isu Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain, misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

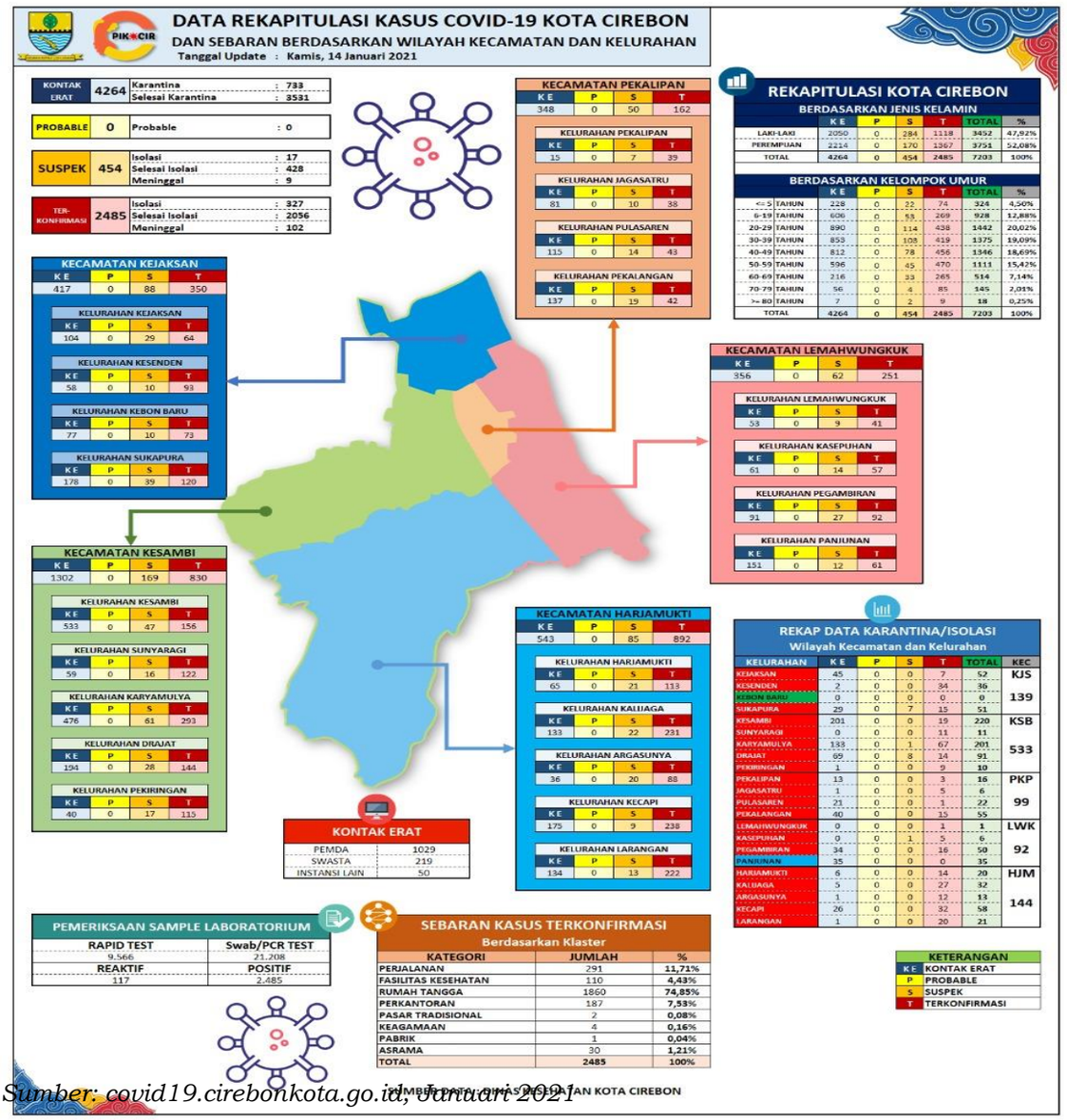
Dalam menjalankan pemerintahan, dikenal konsep *good governance* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu perbaikan mendasar dari berbagai lini mulai dari rekrutmen hingga pengawasan. Oleh karena itu, ketika sebuah daerah ingin menyelenggarakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik, perlu analisis menyeluruh di berbagai lini agar perbaikan yang dilakukan dapat optimal. Kasus-kasus yang saat ini terjadi di Kota Cirebon membuat perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dan perlu perhatian khusus. Selain tindakan penanggulangan seperti monitoring dan pengawasan, perlu juga tindakan pencegahan seperti pembentukan karakter dan integritas aparatur. Selain kualitas aparatur, perlu juga peninjauan terhadap birokrasi yang saat ini berjalan. Melalui peninjauan yang dilakukan, diharapkan dapat dilakukan perbaikan sehingga akan mendukung tata kelola pemerintah yang lebih professional, akuntabel, bersih, dan berwibawa.

7. Isu Munculnya Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut virus ini telah dengan cepat meyebar keseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia tidak terkecuali di Kota Cirebon. Kasus Covid-19 di Kota Cirebon mulai ditemukan pada bulan Maret 2020 yang kemudian terjadi penambahan kasus di bulan Mei 2020 sebanyak 6 (enam) orang warga Kota Cirebon. Sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 tercatat sebanyak 2.485 terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Cirebon (Sumber: covid19.cirebonkota.go.id).

Rincian data masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum pada diagram-diagram berikut:

Gambar 4.1
Daftar Rekapitulasi Kasus Covid-19 Kota Cirebon

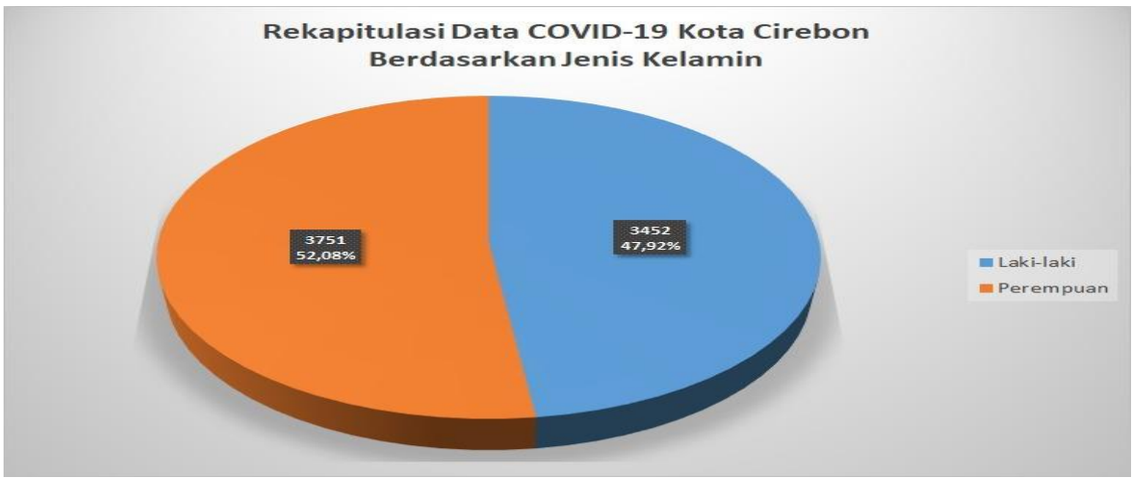


Sumber: covid19.cirebonkota.go.id, Oktober 2021

a. Jumlah Data Covid-19 Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin

Penderita penderita Covid-19 di Kota Cirebon berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Daftar Rekapitulasi Kasus Covid-19 Kota Cirebon
Menurut Jenis Kelamin

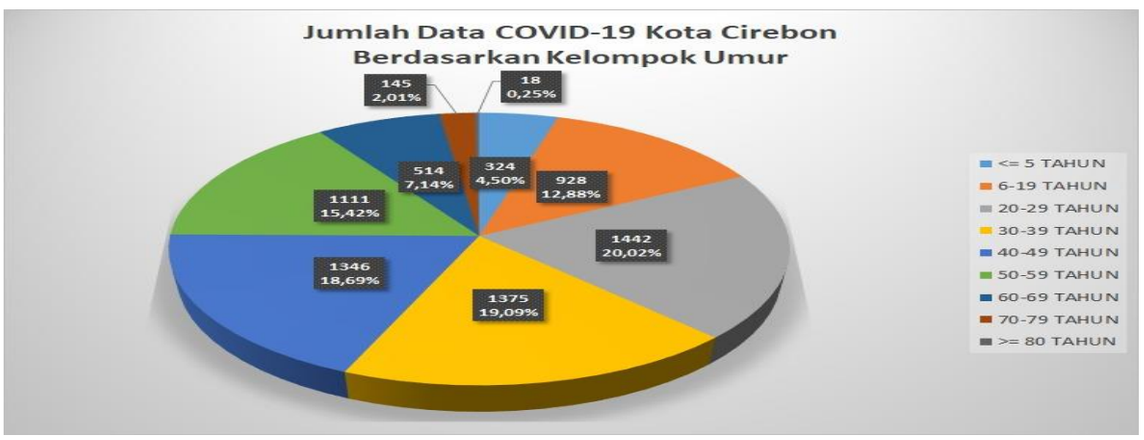


Sumber: covid19.cirebonkota.go.id; data per 14 Januari 2021

b. Jumlah Data Covid-19 Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, panderita COVID-19 lebih dari 50 persen berada pada rentang kelompok umur 20-49 tahun dengan persentase terbesar pada kelompok umur 20-29 tahun, sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3
Daftar Rekapitulasi Kasus Covid-19 Kota Cirebon
Menurut Kelompok Umur

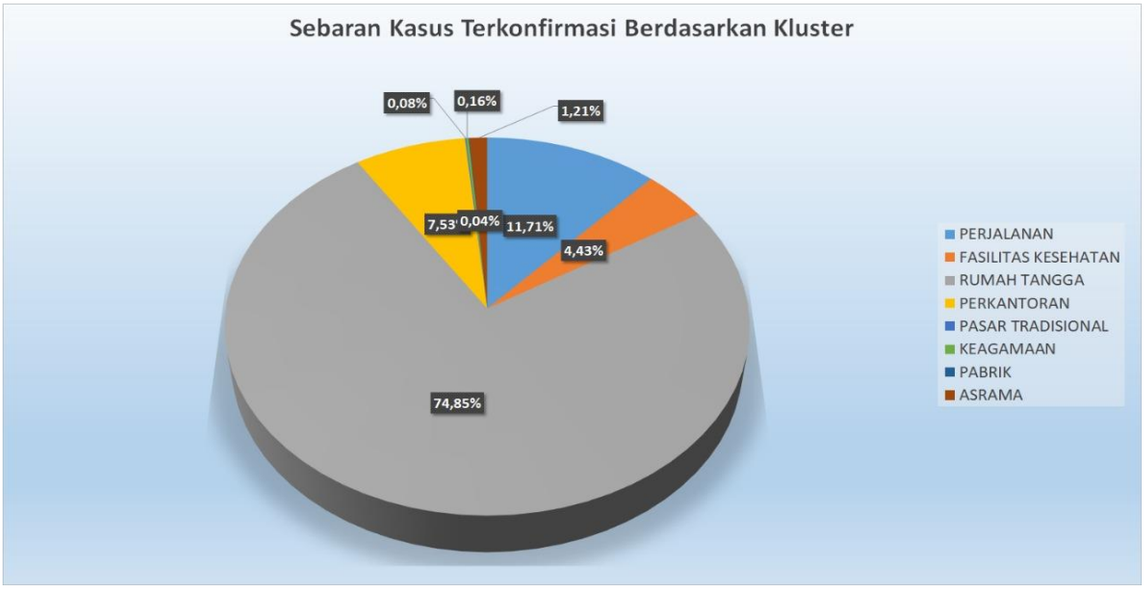


Sumber: covid19.cirebonkota.go.id; data per 14 Januari 2021

c. Sebaran Kasus Terkonfirmasi Berdasarkan Kluster

Berdasarkan klaster penyebaran Covid-19, yang terbanyak adalah pada klaster rumah tangga, sebesar 74,85 persen dan diikuti dengan klaster perjalanan sebesar 11,71 persen, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4
Sebaran Kasus Terkonfirmasi Berdasarkan Kluster



Sumber: covid19.cirebonkota.go.id; data per 14 Januari 2021

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, keterkaitan antara permasalahan pokok pembangunan dengan isu-isu stragtegis pembangunan beserta prioritas pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2023

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah	Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia
2.	Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Isu Kemiskinan, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
3.	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perkotaan.	Isu Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
4.	Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami pelambatan	Isu Produktivitas Daya Saing Ekonomi Secara Berkelanjutan	Peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4
5.	Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah	Isu Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata
6.	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Isu Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Belum optimalnya laju pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor	Isu Munculnya Pandemi Covid-19	Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19
			Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Sumber: Hasil Analisis, BPPPPD

4.3 Penelahaan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

4.3.1. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh alam. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ketergantungan manusia terhadap alam, begitu pula dalam pencapaian tujuan berkelanjutan. Pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang diilustrasikan oleh Gambar 4.4, kondisi alam yang direpresentasikan sebagai kondisi lingkungan hidup dalam biosfer merupakan dasar dari terciptanya kesejahteraan bagi kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tidak hanya dengan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, namun juga disertai dengan daya dukung lingkungan yang baik, maka dapat tercipta kehidupan manusia yang sejahtera, sehat dan bahagia. Kondisi masyarakat yang sehat dan bahagia akan mendukung aktivitas manusia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan hidup manusia yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016, agenda pembangunan dunia Sustainable Development Goals (SDGs) atay Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mulai aktif digaungkan. TPB menjadi komitmen nasional dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Gambar 4.5
Keterkaitan Antara Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Sumber : Folke, dkk, 2016

Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Keterkaitan antara aspek-aspek dari kondisi lingkungan hidup hingga terciptanya kesejahteraan manusia dijadikan sebagai pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pilar utama ini meliputi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar ini diuraikan menjadi 17 TPB, dimana pilar sosial terdiri dari TPB 1, 2, 3, 4, dan 5; pilar ekonomi terdiri dari TPB 7, 8, 9, 10, dan 17; pilar lingkungan terdiri dari TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; serta pilar hukum dan tata kelola kelembagaan terdiri dari TPB 16. Sebagai bentuk integrasi penilaian pencapaian target TPB dalam perumusan K/R/P, dilakukan analisis kesenjangan (*gap*) antara kondisi di Kota Cirebon saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai. TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana, dan program (K/R/P) yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing tujuan pada TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB.

4.3.1.1. Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Analisis capaian TPB dilakukan dengan membandingkan capaian dari setiap indikator TPB terhadap target nasional tahun 2019 yang ditetapkan dalam menurut Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Berdasarkan pembagian kewenangan TPB, terdapat 222 indikator TPB yang termuat pada wilayah kota, begitu pula untuk Kota Cirebon. Capaian TPB digolongkan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu "Telah mencapai target nasional", "Belum mencapai target nasional", "Perlu peningkatan", "Perlu penurunan", serta "Tidak ada data (N/A)". Rangkuman capaian indikator TPB di Kota Cirebon ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rangkuman Capaian TPB Kota Cirebon

TPB		Telah mencapai target nasional	Belum mencapai target nasional	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada data (N/A)	Jumlah indikator
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Tanpa Kemiskinan	8	6	4	1	6	**25**
2	Tanpa Kelaparan	7	1	0	2	1	**11**

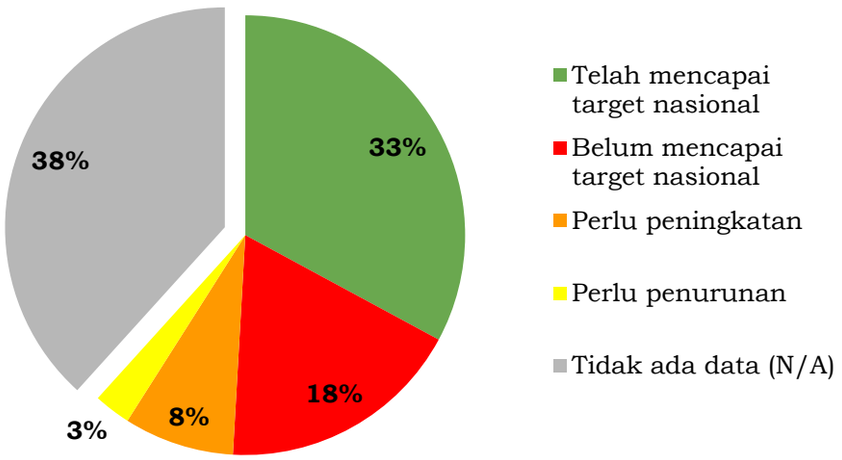
TPB		Telah mencapai target nasional	Belum mencapai target nasional	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada data (N/A)	Jumlah indikator
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	17	9	2	1	5	**34**
4	Pendidikan Berkualitas	5	4	2	0	2	**13**
5	Kesetaraan Gender	4	3	2	1	4	**14**
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	6	0	0	8	**18**
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	0	2	**2**
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	4	1	7	**19**
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	2	0	3	0	8	**13**
10	Berkurangnya Kesenjangan	0	2	0	0	4	**6**
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3	3	0	0	14	**20**
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	0	1	0	3	**5**
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	0	0	0	0	2	**2**
14	Ekosistem Laut	-	-	-	-	-	**-**
15	Ekosistem Darat	0	1	0	0	3	**4**
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	11	2	0	0	8	**21**
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	7	0	0	0	8	**15**
Total		**73**	**40**	**18**	**6**	**85**	**222**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

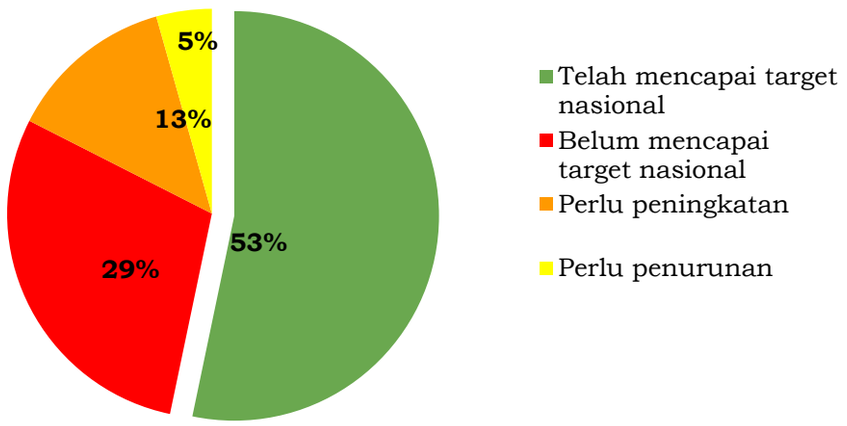
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dari 222 indikator TPB Kota Cirebon, terdapat 137 indikator atau 61,7 % yang diketahui nilai capaiannya. Sementara itu, terdapat 85 indikator yang tidak tersedia datanya sehingga tidak dapat dilakukan dianalisis pada indikator tersebut. Hasil pengolahan nilai capaian TPB terhadap target nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa 32,9% indikator yang telah mencapai target nasional; 18,0% indikator yang belum mencapai target nasional; 8,1% indikator yang perlu peningkatan; 2,7% indikator yang perlu penurunan; dan 38,3% indikator yang tidak tersedia datanya. Sementara itu, jika dilihat dari 137 indikator TPB yang terisi nilai capaiannya, terdapat 53,3% indikator yang telah mencapai target nasional; 29,2% indikator yang belum mencapai target nasional; 13,1% indikator yang perlu peningkatan; dan 4,4% indikator yang perlu penurunan. Persentase

capaian indikator TPB di Kota Cirebon terhadap target nasional terlihat dalam diagram yang ditunjukkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6
Persentase Capaian Indikator TPB di Kota Cirebon
Terhadap Target Nasional



(a) Persentase Terhadap 222 indikator TPB yang menjadi Kewenangan Kota Cirebon

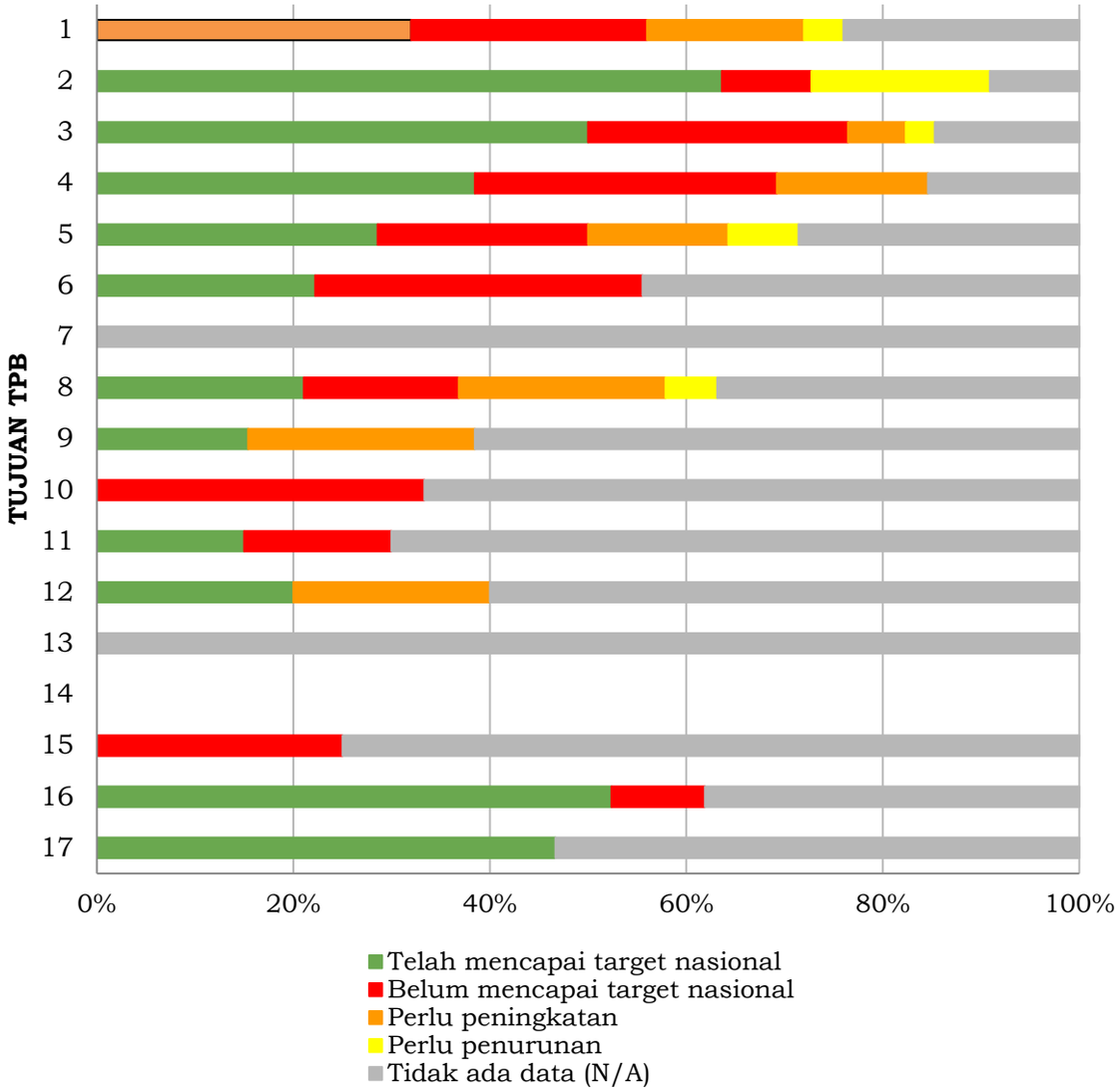


(b) Persentase Terhadap Indikator yang Terisi Capaiannya

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

Apabila dianalisis berdasarkan masing-masing TPB, TPB 2 (Tanpa Kelaparan) merupakan TPB dengan persentase ketersediaan data paling banyak dibandingkan TPB lainnya, yaitu 10 dari 11 indikator yang dinilai. Sementara itu, TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim) adalah TPB yang tidak tersedia data capaiannya. TPB dengan capaian indikator "Telah mencapai target nasional" paling banyak terdapat pada TPB 2 (Tanpa Kelaparan), yaitu 7 dari 11 indikator atau sebesar 63,63%. Secara lebih lengkap, persentase capaian dari setiap TPB ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7
Persentase Capaian Indikator Setiap TPB di Kota Cirebon

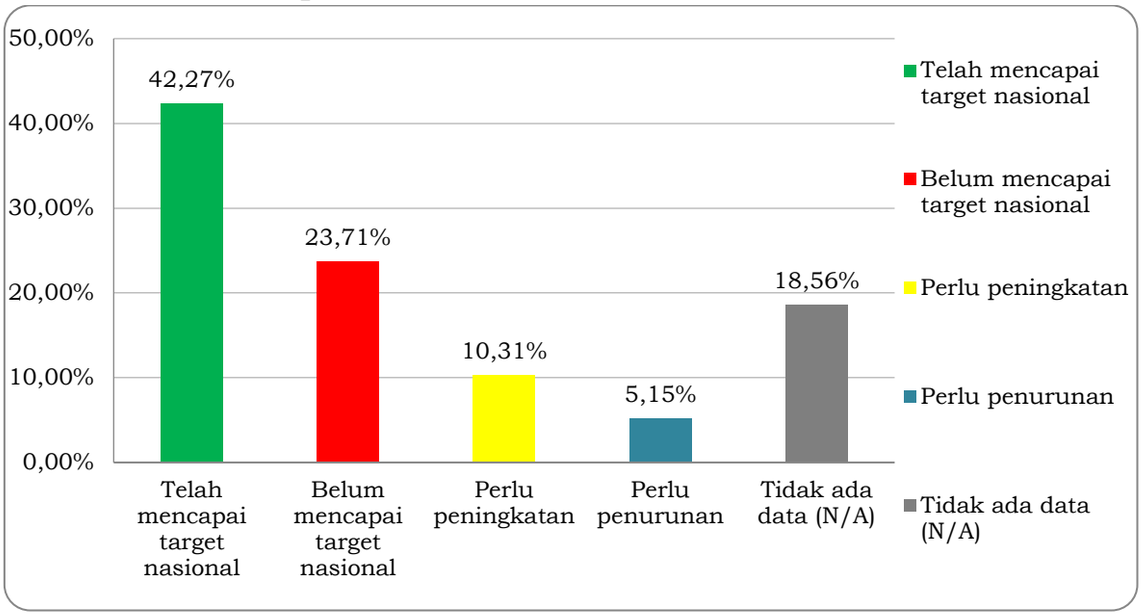


Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

4.3.1.2. Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pilar Sosial

Pilar sosial terdiri dari 5 tujuan yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Terdapat 97 indikator yang tercakup dalam pilar social dalam kewenangan tingkat kota. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar sosial di Kota Cirebon ditunjukkan pada Gambar 4.8. Pada pilar sosial, sebanyak 42,27% indikator telah mencapai target nasional, 23,71% indikator belum mencapai target nasional, 10,31% indikator perlu peningkatan, 5,15% perlu penurunan, dan 18,56% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang belum mencapai target nasional perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan dalam bidang sosial di Kota Cirebon. Selain itu, indikator TPB pilar sosial yang tidak tersedia data capaiannya juga perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar sosial di Kota Cirebon secara utuh.

Gambar 4.8
Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Sosial di Kota Cirebon



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

Adapun capaian tujuan, target dan indikator TPB pada pilar sosial berdasarkan kategorinya secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Capaian Tujuan dan Indikator TPB Pilar Sosial di Kota Cirebon

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
A. Telah Mencapai Target Nasional					
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 1.3.1.(d)	2
		1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a) 1.4.1.(b) 1.4.1.(g) 1.4.1.(j) 1.4.1.(k)	5
		1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	1
2	Menghilangkan Kelaparan,	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi	2.1.1*	3

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a) 2.1.2.(a)	
		2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* 2.2.1.(a) 2.2.2.(a) 2.2.2.(b)	4
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* 3.1.2.(a)	2
		3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1* 3.2.2* 3.2.2.(a)	3
		3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) 3.3.3*	2
		3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b) 3.4.1.(c) 3.4.2* 3.4.2.(a)	4
		3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	1
		3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	1
		3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a) 3.8.2.(a)	2
		3.a	Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	1
		3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular	3.b.1.(a)	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
			yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.		
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b) 4.1.1.(g)	2
		4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	1
		4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) 4.6.1.(b)	2
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* 5.2.1.(a) 5.2.2*	3
		5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	1
B. Belum Mencapai Target Nasional					
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	1
		1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c) 1.4.1.(d) 1.4.1.(e) 1.4.1.(h)	4

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
		1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	1
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	1
		3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b) 3.3.2.(a)	2
		3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	1
		3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	1
		3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.2* 3.7.2.(a)	4
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e)	3
		4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	1
		5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk	5.2.2.(a)	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
			perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		
		5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	1
C. Perlu Peningkatan					
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	1
		1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(f)	1
		1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	1
		1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	1
		3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender,	4.a.1*	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.		
		4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	1
		5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1*	1
D. Perlu Penurunan					
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	1
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	1
		2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	1
E. Tidak Ada Data (N/A)					
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun	1.3.1.(c)	1

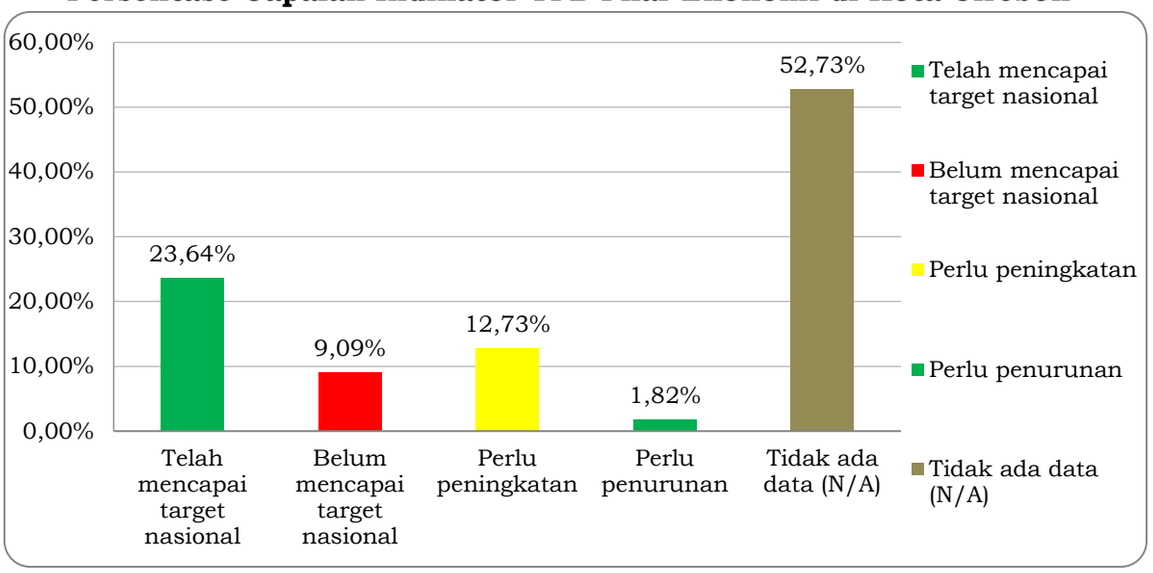
TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	Bentuk Dimanapun		2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		
		1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* 1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.5.1.(d) 1.5.2.(a)	5
2	Menghilangkan Kelaparan. Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik. serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a) 3.3.4.(a) 3.3.5.(a) 3.3.5.(b)	4
		3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	1
		4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* 5.3.1.(a)	2
		5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1* 5.6.1.(b)	2

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

4.3.1.3. Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Terdapat 55 indikator yang tercakup dalam pilar social dalam kewenangan tingkat kota. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar ekonomi di Kota Cirebon ditunjukkan pada Gambar 4.9. Pada pilar ekonomi, sebanyak 23,64% indikator telah mencapai target nasional, 9,09% indikator belum mencapai target nasional, 12,73% indikator perlu peningkatan, 1,82% indikator perlu peningkatan, dan 52,73% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar ekonomi di Kota Cirebon secara utuh.

Gambar 4.9
Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Cirebon



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

Adapun capaian tujuan, target dan indikator TPB pada pilar ekonomi berdasarkan kategorinya secara lebih rinci dijelaskan pada pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Capaian Tujuan dan Indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Cirebon

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
A.Telah Mencapai Target Nasional					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	1
		8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan	8.2.1*	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	yang Layak untuk Semua		inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		
		8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	1
		8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	1
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c)	1
		9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1.(b)	1
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	1
		17.8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	1
		17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender,	17.18.1.(a) 17.18.1.(b)	2

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
			umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		
		17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d)	3
B. Belum Mencapai Target Nasional					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	1
		8.3	Menggalakkan kebijakan pemba--ngunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	1
		8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	1
		10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	1
C. Perlu Peningkatan					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a) 8.9.1.(b)	2
		8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk	8.10.1*	2

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	yang Layak untuk Semua		mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	1
		9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* 9.c.1.(a)	2
D. Perlu Penurunan					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	1
E. Tidak Ada Data (N/A)					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh. serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* 8.3.1.(b)	2
		8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	1
		8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	1
		8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c) 8.9.2*	2

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
		8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	1
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan. serta Mendorong Inovasi	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b) 9.1.1.(c) 9.1.2.(b)	3
		9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1* 9.2.2*	2
		9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* 9.3.2*	2
		9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	1
		10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	1
		10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi,	10.3.1.(a)	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
			kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		
		10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	1
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1* 17.1.2*	2
		17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) 17.6.2.(c)	2
		17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b)	2
		17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c) 17.18.1.(d)	2

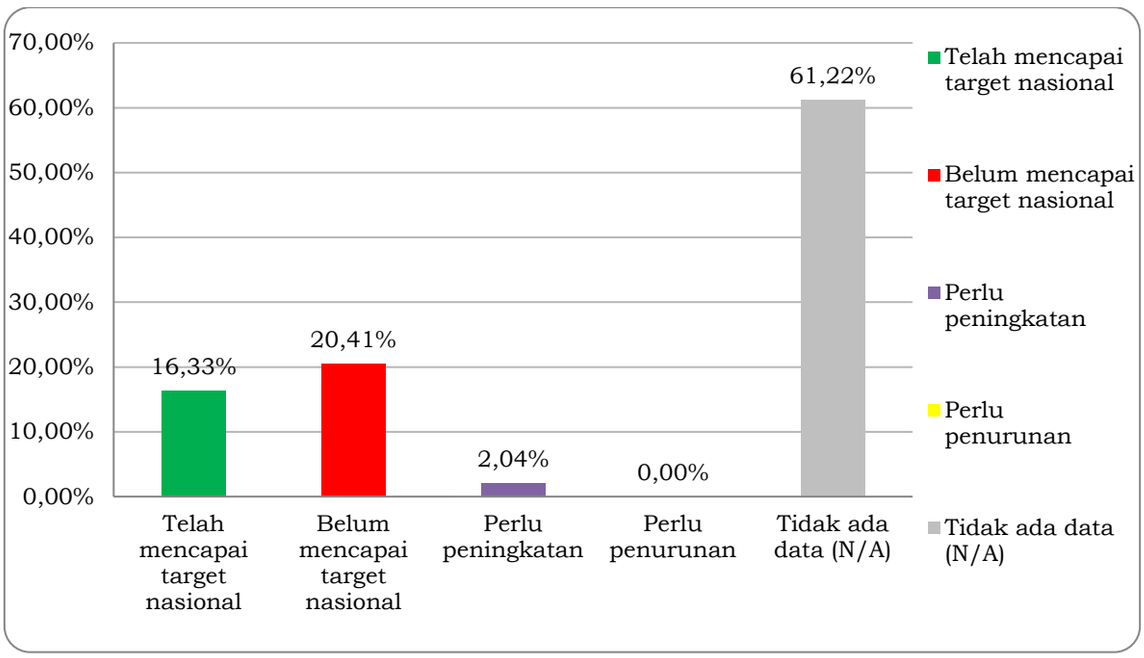
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

4.3.1.4. Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup terdiri dari 5 tujuan TPB yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Terdapat 49 indikator yang tercakup dalam pilar lingkungan hidup dalam kewenangan tingkat kota. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar lingkungan hidup di Kota Cirebon ditunjukkan pada Gambar 4.10. Pada pilar lingkungan hidup, sebanyak 16,33% indikator telah mencapai target nasional, 20,41% indikator

belum mencapai target nasional, 2,04% indikator perlu peningkatan, dan 61,22% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar lingkungan hidup di Kota Cirebon secara utuh.

Gambar 4.10
Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Cirebon



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

Adapun capaian tujuan, target dan indikator TPB pada pilar lingkungan hidup berdasarkan kategorinya secara lebih rinci dijelaskan pada pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Capaian Tujuan dan Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Cirebon

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
A. Telah Mencapai Target Nasional					
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c) 6.2.1.(f)	2
		6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta	6.3.1.(b)	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
			penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		
		6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(a)	1
		11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	1
		11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(b)	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	2
B. Belum Mencapai Target Nasional					
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) 6.1.1.(c)	2
		6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b) 6.2.1.(d) 6.2.1.(e)	3
		6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas	11.3.2.(b)	1

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	Tangguh dan Berkelanjutan		partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.		
		11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	1
		11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.	11.b.2*	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	1
C. Perlu Peningkatan					
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	1
D. Tidak Ada Data (N/A)					

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	1
		6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	1
		6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) 6.3.2.(a)	2
		6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	1
		6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c) 6.5.1.(f) 6.5.1.(g)	3
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a) 11.1.1.(b) 11.1.1.(c)	3
		11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) 11.2.1.(b)	2
		11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang	11.3.1.(a) 11.3.1.(b)	2

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
			berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.		
		11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* 11.5.1.(a) 11.5.1.(c) 11.5.2.(a)	4
		11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	1
		11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	1
		11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimple- mentasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.1*	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	1
		12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	1
		12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	1
13	Mengambil Tindakan Cepat	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya	13.1.1*	2

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	
15	Melindungi. Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Mengelola Hutan secara Lestari. Menghentikan Penggurunan. Memulihkan Degradasi Lahan. serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	1
		15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	1
		15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	1

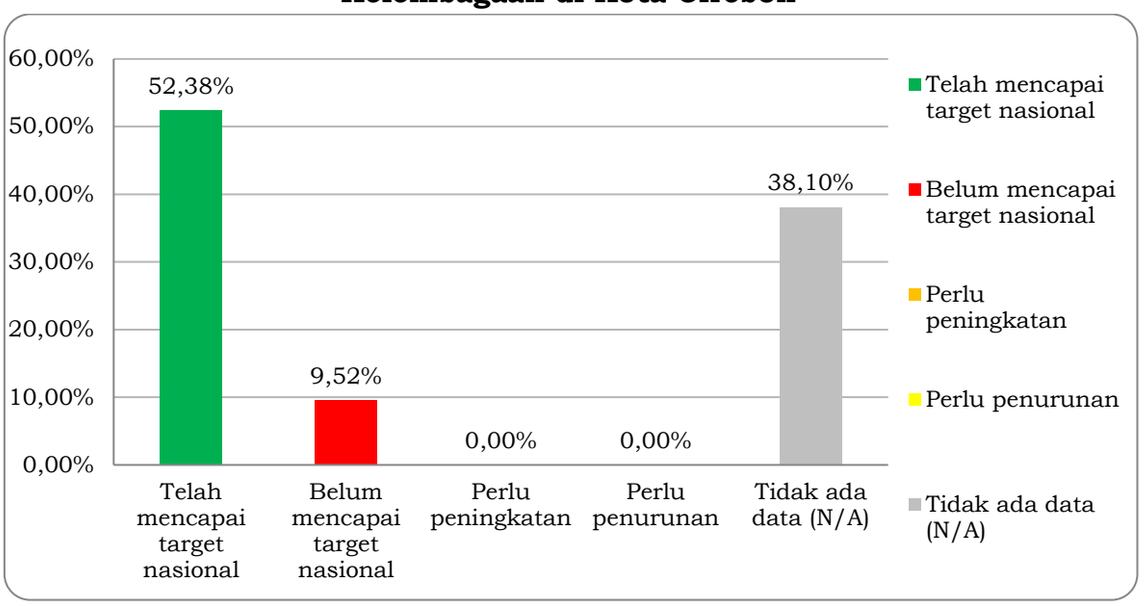
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

4.3.1.5. Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan hanya terdiri dari 1 tujuan TPB yaitu TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Terdapat 21 indikator yang tercakup dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dalam kewenangan tingkat kota. Persentase capaian indikator TPB untuk pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Cirebon ditunjukkan pada

Gambar 4.11 Pada pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, sebanyak 52,38% indikator telah mencapai target nasional, 9,52% indikator belum mencapai target nasional, dan 38,10% indikator tidak tersedia datanya. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu menjadi perhatian karena kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Cirebon secara utuh.

Gambar 4.11
Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan di Kota Cirebon



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

Adapun capaian tujuan, target dan indikator TPB pada pilar hukum dan tata kelola lebih rinci dijelaskan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Capaian Tujuan dan Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Cirebon

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
A. Telah Mencapai Target Nasional					
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel,	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a) 16.1.3.(a)	2
		16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b) 16.2.3.(a)	2
		16.6		16.6.1.(a)	3

TPB		Target		Indikator	Jumlah Indikator
1		*2*		*3*	*4*
	dan Inklusif di Semua Tingkatan		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b) 16.6.1.(d)	
		16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) 16.7.1.(b)	2
		16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1* 16.9.1.(a)	2
B. Belum Mencapai Target Nasional					
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	2
		16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	
C. Tidak Ada Data (N/A)					
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua. Dan Memba- -ngun Kelem- -bagaan yang Efektif. Akuntabel. dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.2.(a) 16.1.4*	2
		16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	1
		16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	1
		16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* 16.6.1.(c) 16.6.2.(a)	3
		16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	1

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, DLH

4.3.2. Penelaahan RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah.

Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam mewujudkan visi RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berkaitan dengan tema pembangunan lima tahunan dan prioritas pembangunan jangka menengah nasional tersebut, maka pemerintah menetapkan target sasaran makro pembangunan tahun 2020-2024 seperti tercantum pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020-2024

No.	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*
1.	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0 persen
2.	Tingkat Inflasi	2,4 persen
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,6 – 4,3 persen
4.	Rasio Gini	0,360 – 0,374

No.	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*
5.	IPM	75,54
6.	Penurunan Emisi GRK	27,3 persen
7.	Pertumbuhan Investasi	6,6 – 7,0 persen
8.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	7,4 persen
9.	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	6,6 – 7,0 persen
10.	Share Industri Pengolahan	21,0 persen
11.	Defisit Transaksi Berjalan	1,7 persen PDB
12.	Rasio Pajak	10,7 – 12,3 persen PDB

Sumber: RPJMN 2020-2024

4.3.3. Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa**, melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif**, melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan**, melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil**, melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;

3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Permasalahan Jawa Barat yang paling besar adalah ketimpangan dalam semua dimensi di Jawa Barat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan harus menyelesaikan ketimpangan dari segi layanan dan peradaban bagi Jawa Barat, khususnya di Jabar Selatan yang menjadi wilayah tertinggal. Selama 5 tahun kedepan ketimpangan wilayah akan diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui akses Pembangunan Bandara Sukabumi, Bandara Nusawiru yang akan dioptimalkan, reaktivasi kereta api, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Kota Cirebon termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning, yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupeten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu, dengan tema WP:“Mendorong Pengembangan Wilayah Gerbang Timur Jawa Barat”, dengan arah pengembangan:

1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL;
2. Mengembangkan infrastruktur strategis;
3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: jasa perdagangan, Ring 2: industri berbasis lokal, Ring 3: penyedia bahan baku);
4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam;
5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di Kawasan pinggiran;
6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak;
7. Pengendalian perikanan tangkap di Kawasan pesisir.

Adapun fokus pengembangan untuk Kota Cirebon dalam periode 2018-2023, yaitu PKN Cirebon dengan sarana prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, simpul utama pelayanan, jasa, perdagangan dan industri di Jawa Barat Bagian Timur, serta wisata budaya dan religi.

4.3.4. Penelaahan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Kota Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Cota Cirebon 2005-2025 adalah:

“**Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera”**

Pernyataan visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Religius, memiiki makna, dalam melakukan berbagai kegiatan harus dilandasi nilai-nilai keagamaan sebagai antisipasi pengaruh negatif, baik yang datang dari dalam maupun dari luar termasuk pengaruh globalisasi di berbagai aspek kehidupan;
2. Perdagangan memiliki makna berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang dengan memanfaatkan komoditas unggulan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun non materiil.
3. Jasa memiliki makna:
   a. Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, transportasi dan komunikasi;
   b. Peningkatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
   c. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah;
   d. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Cirebon.
4. Maju, memiliki makna terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan, baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional;
5. Sejahtera, memiliki makna prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon. Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus bisa menciptakan Kota Cirebon sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara materiil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat yang diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman masyarakat, dan diimbangi pemerataan pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang Kota Cirebon 2005-2025 sebagai berikut:

a. Mewujdukan masyarakat yang religius;
b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
d. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan;
e. Meningkatkan kelestarian lingkungan;
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam upaya semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan jangka menengah pada tahap ke-4 pelaksanaan RPJPD (2018-2023), maka telah ditetapkan tema pembangunan jangka panjang tahap ke-empat, yaitu: “Akselerasi Pembangunan di Segala Bidang”, yang mencakup tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon;
2. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di setiap kecamatan;
3. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan Posyandu yang terkoordinasi dengan baik di setiap RW dan kelurahan;
4. Akselerasi penyediaan dan pemberdyaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan (SD-SMP-SMA) berskala nasional/internasional;
5. Akselerasi penatapan dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan sebagai upaya mempercepat Wajar 12 tahun;
6. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana/ kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan;
7. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan KUKM;
8. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD *(Central Bisnis Distrik);*
9. Akselerasi penatapan dan pembangunan serta pemeliharaan sistem supporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon;, distribusi dan pemasaran produk unggulan Kota Cirebon;
10. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan mekanisme keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran produk unggulan Kota Cirebon;
11. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan system terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial;
12. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau *(bufferzone);*
13. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan ketrampilan bagi para nelayan;
14. Akselerasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan;
15. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata terutama a) wisata bahari/pantai, b) wisata belanja, c) wisata sejarah, d) wisata kuliner;
16. Mantapnya kondisi pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan pedagang secara proporsional;
17. Akselerasi penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu kota dan lintas kota;
18. Akselerasi peningkatan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang;
19. Akselerasi pembangunan dan optimalisasi fasilitas pra sekolah/TK, SD/sederajat, SLTP/sederajat, dan SLTA/sederajat guna mendukung/mengimbangi pertambahan jumlah penduduk;
20. Akselerasi pembangunan dan optimalisasi jembatan penyebrangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas;
21. Akselerasi dan peningkatan kualitas serta kapasitas pelayanan infrastruktur;
22. Akselerasi pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah;

23. Akselerasi dan revitalisasi psar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan;
24. Akselerasi pembangunan, pemberdayaan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

4.3.5. Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut gambaran kebijakan yang tertuang dalam RPJMD daerah sekitar, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No.	Daerah	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	2	3	4
1.	Kabupaten Kuningan	2018-2023	**Visi:** "Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023" **Misi:** 1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu Sajati; 2. Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan; 3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati; 4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat; 5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. **Isu Strategis:** 1. Pengurangan Pengangguran 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan investasi daerah 4. Penerapan E-Government 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Alam 6. Pengembangan Pariwisata berbasis komunitas dan Desa serta Ekonomi Kreatif 7. Peningkatan Ketahanan Pangan

No.	Daerah	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	2	3	4
2.	Kabupaten Indramayu	2018-2023	**Visi:** "Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah" **Misi:** a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal; b. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian c. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal; d. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal; e. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat; f. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat; g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3.	Kabupaten Cirebon	2018-2023	**Visi:** "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman" **Misi**: 1. BERBUDAYA Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. 2. SEJAHTERA Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. 3. AGAMIS Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. MAJU Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. AMAN Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

No.	Daerah	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	2	3	4
			Isu strategis: 1. Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik; 2. Pengangguran dan Kemiskinan; 3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat; 4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi; 5. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; 6. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah; 7. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
	Kabupaten Majalengka	2018-2023	**Visi:** Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA **Misi:** 1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama; 2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat; 3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya; 4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani. 5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan **Isu strategis:** 1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana 5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk 6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR 7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup 8. Kemandirian desa

Sumber: Data diolah, BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Visi Kota Cirebon *SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tertib, dan Inovatif) Kita Wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"* telah selaras dengan Visi Pembangunan Nasional, yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*, Visi Provinsi Jawa Barat *"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi",* visi pembangunan Kabupaten Cirebon

"*Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman",* dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan *"Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023*", dan dengan visi Kabupaten Indramayu *"Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah"*. Visi pembangunan tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan mewujudkan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya baik materiil maupun imateril untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, berkarakter, berbudaya, memiliki keunggulan kompetetitif dan berdaya saing tinggi.

Begitu pula dengan isu-isu strategis yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan, secara umum sejalan dengan isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota lain yang berbatasan maupun berdekatan. Dengan adanya isu-isu strategis yang sejalan, diharapkan dapat terbangun kerjasama dan kolaborasi dengan wilayah yang berdekatan dalam mewujudkan program-program prioritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait isu strategis yang telah ditetapkan.

BAB V
VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan ruh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang akan memberikan gambaran bagaimana pembangunan akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, visi dan misi RPJMD harus memiliki konsistensi dan sinkronisasi dengan visi yang telah ditetapkan pada RPJPD, yakni ***"Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Sejahtera",*** yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, merata dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Periode RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025 dan sesuai dengan periode tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka tahap pembangunan keempat memfokuskan pada akselerasi dan pemantapan pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, dalam upaya semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan, maka pada tahap keempat RPJPD ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial, sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, pemerintahan, politik, hukum dan aspek-aspek lainnya.

Akselerasi dalam bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) maupun Angka Kematian Anak Balita (AKABA) serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.

Akselerasi dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan berjalannya Program Wajib Belajar 12 Tahun, menurunnya angka *drop out,* menurunnya angka buta huruf, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Akselerasi dalam bidang daya beli masyarakat dengan sendirinya akan tumbuh dan berkembang apabila dibangun beriringan dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan/*skill* yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik serta sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, dalam RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 khususnya pada pelaksanaan pembangunan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2023, telah

ditetapkan tahapan pembangunan aspek suprastruktur dan infrastruktur, meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Akselerasi pemantapan dan pembangunan serta pemeliharaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di setiap kecamatan;
3. Akselerasi pemantapan dan pembangunan serta pemeliharaan Posyandu yang terkoordinasi dengan baik di setiap RW dan kelurahan;
4. Akselerasi penyediaan dan pemberdayaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan dasar berskala nasional/internasional;
5. Akselerasi pemantapan dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat Wajib Belajar 12 Tahun;
6. Akselerasi peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan;
7. Akselerasi pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) hingga pembentukan *Central Bisnis Distrik (CBD);*
8. Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pengembangan sistem supporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM sektor produk unggulan Kota Cirebon;
9. Akselerasi pembangunan mekanisme keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi, dan pemasaran produk unggulan daerah;
10. Akselerasi pembangunan dan pemeliharaan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta penanganan permasalahan sosial;
11. Akselerasi pembangunan dan pemberdayaan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau *(bufferzone);*
12. Akselerasi peningkatan pendidikan ketrampilan bagi para nelayan;
13. Akselerasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
14. Akselerasi peningkatan destinasi wisata melalui pengembangan sarana dan prasarana pariwisata meliputi wisata sejarah, wisata bahari/pantai, wisata belanja, dan wisata kuliner;
15. Mantapnya kondisi pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodir kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara proporsional;
16. Akselerasi penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu;
17. Akselerasi peningkatan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang/interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
18. Akselerasi pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah/TK, SD/sederajat dan SMP/sederajat guna mendukung/mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk;
19. Akselerasi pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas;
20. Akselerasi dan peningkatan kualitas serta kapasitas pelayanan infrastruktur;
21. Akselerasi pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah;

22. Akselerasi dan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan;
23. Akselerasi pembangunan, pemberdayaan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan pembangunan/ pengembangan sanitasi pada daerah padat penduduk.

5.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2018-2023

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya pemantapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah daerah pada tahun 2018-2023 harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut, agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berkelanjutan. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah:

"SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"

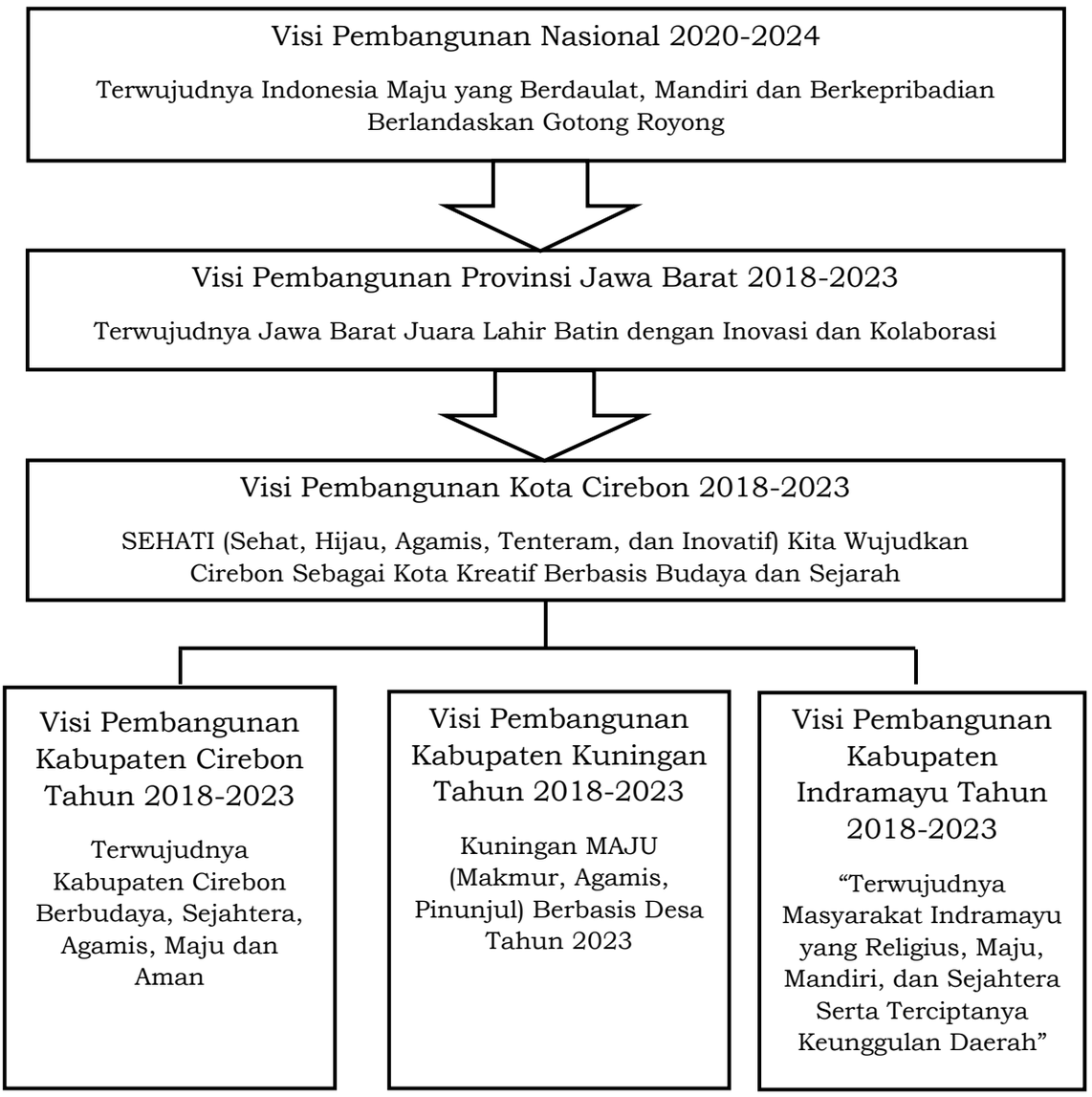
Pernyataan visi Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 memiliki makna sebagai berikut:

1. **SEHATI,** berarti satu hati atau seia sekata, menunjukkan bahwa seluruh komponen (masyarakat dan *stakeholders* pembangunan) harus bahu membahu mewujudkan kemajuan Kota Cirebon. Mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya pada kata sehat secara harfiah fisik semata, tetapi bermakna pula pada masyarakat yang sehat rohani, jasmani dan sosial.
2. **Sehat,** adalah suatu kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung. Kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila semua aspek yang meliputi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan, dengan penekanan tidak cukup hanya pada pelayanan kesehatan, tetapi kepada seluruh aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.
3. **Hijau,** berarti Kota Cirebon menjadi kota hijau, yaitu kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan Kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Panorama pemandangan lingkungan yang segar dan hijau akan menciptakan suasana segar, sejuk menawan, menenteramkan hati, mendorong gairah kerja, dan menarik para wisatawan dan usahawan untuk berlibur dan berinvestasi di Kota Cirebon, dan seluruh warga masyarakatnya merasa betah tinggal di Kota Cirebon.
4. **Agamis**, adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Cirebon yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

5. **Tertib**, adalah suatu keadaan yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan teratur sebagai akibat dari hasil interaksi sosial yang sesuai dengan tindakan, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.
6. **Inovatif,** yaitu pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
7. **Kota Kreatif**, merupakan salah satu strategi dalam perencanaan kota dimana orang-orang dapat berpikir, merencanakan dan bertindak secara kreatif. Kreatifitas diartikan pola pikir *(mental model),* sikap *(character)* dan aksi *(action)* yang merangsang inovasi, komitmen, originalitas dan transformasi untuk membangun diri *(self actualization dan living organization)* secara berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin bermutu, yang bercirikan:
   a. Membangun citra dan identitas lokal;
   b. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
   c. Menciptakan iklim bisnis yang positif;
   d. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan;
   e. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif; dan
   f. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat.
8. **Berbasis Budaya dan Sejarah**, diartikan bahwa kreatifitas melekat dengan pengetahuan *(knowledge)* dan kebudayaan *(culture),* sehingga merupakan integrasi antara tradisi dan modernitas yang meliputi 8 (delapan) aspek kehidupan kota yaitu seni dan budaya, sumber daya manusia, lingkungan, industri dan niaga, pariwisata, teknologi, kebijakan pemerintah, serta program pemerintah *(public service).*

Keterkaitan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon dengan Visi Pembangunan Nasional, Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kota Cirebon, dan Daerah Sekitarnya



Visi Kota Cirebon *SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tertib, dan Inovatif) Kita Wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"* telah selaras dengan Visi Pembangunan Nasional, yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*, Visi Provinsi Jawa Barat *"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi",* visi pembangunan Kabupaten Cirebon "*Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman",* dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan *"Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023*", dan dengan visi Kabupaten Indramayu *"Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah"*. Visi pembangunan tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan mewujudkan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya baik materiil maupun imateril untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, berkarakter, berbudaya, memiliki keunggulan kompetetitif dan berdaya saing tinggi.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada Visi RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005-2025, yaitu: **"*Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera*"** dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Pasal 2 yang menyebutkan "Penataan Ruang Wilayah Kota Cirebon bertujuan mewujudkan Kota sebagai PKN dan pusat pelayanan regional berbasis perdagangan dan jasa yang didukung sektor pariwisata, pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai religius". Berbasis budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya malu, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Cirebon yang dilandasi oleh falsafah adiluhung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam "*Petatah Petitih Sunan Gunung Jati*", yaitu:

1. **Petatah petitih yang berkaitan dengan keyakinan:**
   Ingsun titipna tajug lan fakir miskin (aku-Sunan Gunung Djati) titip tajug dan fakir miskin.
   Yen sembahyang kungsi pucuke panah (jika salat harus khusu' dan tawadhu seperti anak panah yang menancap kuat).
   Yen puasa den kungsi tetaling gundewa (jika puasa harus kuat seperti tali gondewa).
   Ibadah kang tetep (ibadah itu harus terus menerus)
   Wedia ing Allah (takutlah pada Allah).
   Manah den syukur ing Allah (hati harus bersyukur kepada Allah)
   Kudu ngakehaken pertobat (banyak-banyaklah bertobat).

2. **Petatah-Petitih yang berkaitan dengan kedisiplinan:**
   Aja nyindra janji mubarang (jangan mengingkari janji)
   Pemboraban kang ora patut anulungi (yang salah tidak usah ditolong)
   Aja ngaji kejayaan kang ala rautah (jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan)

3. **Petatah-Petitih yang berkaitan dengan kearifan dan kebijakan:**
   Singkirna sifat kanden wanci (jauhi sifat yang tidak baik)
   Duwehna sifat kang wanti (miliki sifat yang baik)
   Amapesa ing bina batan (jangan serakah atau berangasan dalam hidup).
   Angadahna ing perpadu (jauhi pertengkaran).
   Aja ilok ngamad kang durung yakin (jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya).
   Aja ilok gawe bobat (jangan suka berbohong).
   Kenana ing hajate wong (kabulkan keinginan orang).
   Aja dahar yen durung ngeli (jangan makan sebelum lapar)
   Aja nginum yen durung ngelok (jangan minum sebelum haus).
   Aja turu yen durung katekan arif (jangan tidur sebelum ngantuk).
   Yen kaya den luhur (jika kaya harus dermawan).
   Aja ilok ngijek rarohi ing wong (jangan suka menghina orang).
   Den bisa megeng ing nafsu (harus dapat menahan hawa nafsu).
   Angasana diri (harus mawas diri)
   Tepo saliro den adol (tampilkan perilaku yang baik).
   Ngoletena rejeki sing halal (carilah rejeki yang halal)
   Aja akeh kang den pamrih (jangan banyak mengharap pamrih).

Den suka wenan lan suka memberih gelis lipur (jika bersedih jangan diperlihatkan agar cepat hilang).
Gegunem sifat kang pinuji (miliki sifat terpuji)
Aja ilok gawe lara ati ing wong (jangan suka menyakiti hati orang).
Ake lara ati, namung saking duriat (jika sering disakiti orang hadapilah dengan kecintaan tidak dengan aniaya).
Aja ngagungaken ing salira (jangan mengagungkan diri sendiri).
Aja ujub ria suma takabur (jangan sombong dan takabur).
Aja duwe ati ngunek (jangan dendam).

4. **Petatah-Petitih yang berkaitan dengan kesopanan dan tatakrama:**
Den hormat ing wong tua (harus hormat kepada orang tua).
Den hormat ing leluhur (harus hormat pada leluhur).
Hormaten, emanen, mulyaken ing pusaka (hormat, sayangi, dan mulyakan pusaka).
Den welas asih ing sapapada (hendaklah menyanyangi sesama manusia).
Mulyakeun ing tetamu (hormati tamu).

5. **Petatah-Petitih yang berkaitan dengan kehidupan sosial:**
Aja anglakoni lunga haji ing Makkah (jangan berangkat haji ke Mekkah, jika belum mampu secara ekonomis dan kesehatan).
Aja munggah gunung gede utawa manjing ing kawah (jangan mendaki gunung tinggi atau menyelam ke dalam kawah, jika tidak mempunyai persiapan atau ketrampilan).
Aja ngimami atau khotbah ing masjid agung (jangan menjadi imam dan berkhotbah di Mesjid Agung, jika belum dewasa dan mempunyai ilmu ke-Islam-an yang cukup).
Aja dagangan atawa warungan (jangan berdagang, jika hanya dijadikan tempat bergerombol orang).
Aja lunga layaran ing lautan (jangan berlayar ke lautan, jika tidak mempunyai persiapan yang matang).

Falsafah tersebut mengandung nilai-nilai luhur kearifan lokal yang merupakan warisan budaya leluhur, dengan tetap harus bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jiwa pembangunan seperti nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin.

5.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2018-2023

Misi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023, telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 yang mensyaratkan fokus RPJMD periode 2018-2023 adalah akselerasi peningkatan sumber daya manusia dan akselerasi peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya kota perdagangan dan jasa yang dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 yaitu:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam Segala Bidang”, sesuai dengan arahan Misi 1, Misi 2, dan Misi 3 RPJPD yaitu (1) “Mewujudkan Masyarakat yang Religius”; (2) “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat”; dan (3) “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi”. Misi tersebut merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender, yang ditandai dengan:
   a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan dengan IPM minimal 85;
   b. Meningkatnya pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai ajaran Agama dengan memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal Cirebon sebagai bagian integral dari budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan;
   c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukan dengan: (1) meningkatnya Angka Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita; (2) Terbangunnya sarana pengolahan air bersih yang layak dan berkelanjutan serta terpenuhinya sarana sanitasi dasar bagi seluruh masyarakat; dan (3) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit yang dikelola secara profesional dan berorientasi pelanggan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan baik medis maupun administrasi;
   d. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan, yang ditunjukan dengan: (1) Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, menurunnya Angka Putus Sekolah dan meningkatnya Angka Melek Huruf; serta (2) Terbangunnya sarana

dan prasarana pendidikan yang memadai dan dikelola secara profesional untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi;

e. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan umum;
f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;
g. Menurunnya angka kemiskinan;
h. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita masyarakat;
i. Meningkatnya jumlah investor (PMDN dan PMA) yang masuk Kota Cirebon;
j. Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh dengan sektor perdagangan, kelautan dan perikanan menjadi basis utama aktifitas ekonomi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan komoditas berkualitas yang didukung oleh industri pengolahan yang modern serta sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang bermutu;
k. Berkembangnya ekonomi kreatif yang berdaya saing.

2. Misi 2, yaitu ”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”, sesuai dengan arahan Misi 6 RPJPD, yaitu (6) ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”, yang ditandai dengan:
   a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien;
   b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal;
   c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal;
   d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktifitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing.

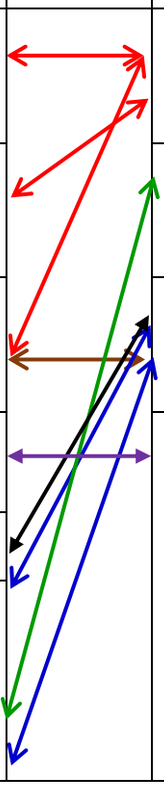
Misi tersebut merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menurunkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3. Misi 3, yaitu **”**Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan”, selaras dengan Misi 5 dan 6 RPJPD, yaitu (5) ”Meningkatkan Kelestarian Lingkungan”; dan (6) “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Misi ini merupakan arahan bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatian kelestarian lingkungan atau pembangunan berwawasan lingkungan, yang ditunjukan dengan:
   a. Mandirinya Kota Cirebon dalam memenuhi pelayanan dasar terutama dalam penyediaan air bersih secara berkelanjutan;

b. Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan berbasis Informasi dan Teknologi untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan;
c. Terbangunnya sarana dan prasarana komunikasi yang canggih seperti telepon dan jaringan internet sampai ke pelosok perkotaan;
d. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi darat, yang ditandai dengan terbangunnya jalan yang mampu menerima tekanan gandar besar dan lebar sampai ke pelosok kota;
e. Optimalnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang lebih baik dan berskala internasional;
f. Terencananya pembangunan dengan penguatan dan berpedoman pada aspek tata ruang;
g. Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
h. Terwujudnya ruang terbuka hijau *(bufferzone)* sebagai upaya mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan sumber daya air bersih;
i. Mengoptimalkan potensi pengelolaan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

4. Misi 4, yaitu **"**Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif", selaras dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: "Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan", yang ditandai dengan:
   a. Menciptakan situasi politik yang kondusif melalui terselenggaranya iklim politik yang sehat.
   b. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
   c. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Cirebon yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
   d. Meningkatnya investasi untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan.

Gambar 5.2
Keterkaitan Misi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Cirebon 2018-2023

Visi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025	Sesuai dengan	Visi RPJMD Kota Cirebon 2018-2023
Misi RPJPD 2005-2025		Misi RPJMD 2018-2023
1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius		1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi		4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan		5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan		
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa		

5.2.1 Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon dengan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Misi pembangunan Kota Cirebon sebagaimana diuraikan di atas telah selaras dengan Misi Pembangunan Jawa Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023. Keterkaitan Misi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang”, telah selaras dengan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat misi ke-1 yaitu “Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa”, melalui peningkatan peran Mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; misi ke-2 yaitu “Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif”, melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dan misi ke-4 “Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil”, melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
2. Misi 2, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”, telah selaras dengan misi ke-5 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”;

3. Misi 3, yaitu ”Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan” telah selaras dengan Misi ke-3 RPJMD Jawa Barat 2018-2023 “Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah” dan Misi ke-4 “Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Usaha Eekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil”;
4. Misi 4, yaitu “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif” telah selaras dengan Misi ke-1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 “Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa” dan misi ke-4 “Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Usaha Eekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil”, melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Keterkaitan antar misi tersebut dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 5.3
Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon dengan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat

Visi RPJMD Kota Cirebon: “SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”	Sesuai dengan	Visi RPJMD Jawa Barat: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”
Misi RPJMD		Misi RPJMD Jawa Barat
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang		1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif		2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan		3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif		4. Meningkatkan Produktifitas dan Daya saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil
		5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif

5.2.2 Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Selain memperhatikan keselarasan dengan misi pembangunan Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka misi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon juga diselaraskan dengan Nawa Cita, yaitu:

1. Misi 1, yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang”, sesuai dengan Prioritas Nasional 1 “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”; Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing"; dan Prioritas Nasional 4 "Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan";

2. Misi 2, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntael, Berwibawa dan Inovatif", sesuai dengan Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"; dan Prioritas Nasional 4 "Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan";
3. Misi 3, yaitu "Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan", sesuai dengan Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan"; Prioritas Nasional 5 "Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar"; dan Prioritas Nasional 6 "Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim";
4. Misi 4, yaitu: "Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif", sesuai dengan Prioritas Nasional 1 "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan"; dan Prioritas Nasional 7 "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik".

Gambar 5.4
Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kota Cirebon dengan Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024

Misi RPJMD 2018-2023	Sesuai dengan	Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang		1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif		2. Mengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan		3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif		4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
		5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
		7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

5.2.3 Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Selain menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang berada datasnya, Misi RPJMD 2018-2023 harus searas dengan program priortas yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Berikut adalah tabel keterkaitan antara 2 hal tersebut.

Gambar 5.5
Keterkaitan Antara Misi RPJMD Kota Cirebon dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Misi RPJMD 2018-2023	Sesuai dengan	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang		1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif		2. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan		3. Peningkatan produktivitas daya saing daerah
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif		4. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata
		5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
		6. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum

5.3 Tujuan dan Sasaran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Cirebon, kebijakan pembangunan jangka menengah Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya tujuan tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2023.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke

dalam sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cirebon merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Cirebon Tahun 2005-2025, sehingga tercipta kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

Rumusan tujuan dan sasaran, dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan, sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, sesuai arahan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, telah disepakati indikator makro pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023, berubah dari 5 menjadi 8 indikator makro pembangunan, yaitu: (1) Indeks Pembangunan Manusia; (2) Rata-rata Lama Sekolah; (3) Harapan Lama Sekolah; (4) Usia Harapan Hidup; (5) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan; (6) Persentase Penduduk Miskin; (7) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan (8) Laju Pertumbuhan Ekonomi. Sementara indikator makro Indeks Gini Rasio dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon tidak digunakan lagi.

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Kinerja				Target RPJMD Tahun 2018-2023			Target RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
					2019		2020								
			2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,00	74,35	74,55	74,92	74,84	74,89	75,14	75,44	75,73	75,44	75,73	75,93	75,93
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,88	9,89	10,19	9,90	10,22	9,91	10,35	10,48	10,61	10,35	10,48	10,61	10,61
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,08	13,09	13,43	13,11	13,57	13,12	13,71	13,85	13,99	13,71	13,85	13,99	13,99
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,86	71,99	72,04	72,13	72,25	72,26	72,38	72,51	72,64	72,38	72,51	72,64	72,64
5.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.100	11.397	11.694	11.930	11.806-11.881	11.800	12.014-12.162	12.307-12.496	12.626-12.857	12.014	12.307	12.626	12.626
6.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,66	8,88	8,53	8,41	8,18	9,52	7,83	7,48	7,13	8,80	8,55	8,35	8,35
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,29	9,06	8,83	9,04	8,60	10,97	8,37	8,14	7,91	9,43	9,00	8,50	8,50
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,81	6,21	5,85	6,29	5,89	-0,99	5,94	5,98	6,05	3,72-4,02	5,17-5,81	5,50-6,15	5,50-6,15

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, data diolah 2021)*

Pada periode tahun 2019-2020, indikator makro pembangunan daerah Kota Cirebon sebanyak 5 (lima) indikator dan dari 5 (lima) indikator makro pembangunan daerah tersebut, realisasi pencapaiannya pada tahun 2019 terlihat sebanyak 3 (tiga) indikator makro mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, target tahun 2019 sebesar 74,35 poin dengan realisasi capaian sebesar 74,92 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 100,50 persen. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,85 persen dan realisasinya sebesar 6,21 persen dengan tingkat capaian sebesar 107,52 persen dan indikator Persentase Penduduk Miskin ditargetkan 8,53 persen di tahun 2019 mencapai realisasi sebesar 8,41 persen dengan tingkat capaian 101,43 persen. Namun pada tahun 2020 indikator Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon meningkat menjadi sebesar 9,52 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai matra kehidupan masyarakat dan pembangunan, terutama pada aspek sosial dan ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tahun 2020 mengalami kontraksi dengan capaian -0,99 persen.

Ditinjau dari aspek ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, dan penurunan *output* di berbagai sektor. Pada aspek sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran. Disamping itu, dalam proses pembelajaran siswa tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tentunya memberikan dampak terhadap kemajuan pembelajaran.

Disamping tiga indikator makro pembangunan yang telah melampauai target yang ditetapkan, pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) indikator lainnya yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan dalam RPJMD sebesar 8,83 persen meningkat menjadi 9,04 persen bahkan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 10,97 persen. Sementara indikator lainnya yaitu indeks gini juga tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dari 8 (delapan) indikator makro pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 di atas, 4 (empat) diantaranya, yaitu: (1) Indeks Pembangunan Manusia; (2) Persentase Penduduk Miskin; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan (4) Laju Pertumbuhan Ekonomi, sudah diarahkan untuk berkontribusi bagi pencapaian indikator makro dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Perbandingan arahan indikator makro dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk Kota Cirebon dengan hasil dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Perbandingan Indikator Makro Pembangunan Kota Cirebon Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Hasil Prediksi Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Indikator Pembangunan	Target Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023			Target Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	71,71-72,10	72,38-72,79	73,14-73,56	75,44	75,73	75,93
2.	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	6,96-6,63	6,39-6,06	5,77-5,42	8,80	8,55	8,35
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	10,40-9,30	9,46-7,81	8,03-6,21	9,43	9,00	8,50
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,33-4,49	5,20-5,20	5.50-5,50	3,72-4,02	5,17-5,81	5,50-6,15

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat dan data hasil Proyeksi BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Dari tabel di atas, terlihat adanya perbedaan target yang diarahkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Perbedaan tarsebut terjadi karena untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon pada tahun 2019 telah mencapai 74,92 poin dan tahun 2020 sebesar 74,89 poin. Indikator persentase penduduk miskin tahun 2019 sebesar 8,41 persen dan naik di tahun 2020 menjadi 9,52 persen. Begitu pula, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, tahun 2019 mencapai angka 9,04 persen dan di tahun 2020 meningkat menjadi 10,97 persen. Kenaikan tersebut terjadi sebagai akibat dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu dalam penetapan target pada Perubahan RPJMD Kota Cirebon perlu melakukan penyesuaian target pencapaian indikator makro pembangunan.

Untuk menentukan hubungan antara isu strategis pada Bab IV dengan Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Cirebon, maka disusun matriks sebagaimana tercantum dalam tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3

Hubungan antara Isu Trategis, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Isu Strategis	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3	4		5	
1	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan
					2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
					3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon
					4	Terkendalinya jumlah penduduk
					5	Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda
					6	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
					7	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama
2	Kemiskinan, pengangguran dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	1	Menurunnya Tingkat Pengangguran
					2	Berkurangnya penduduk miskin

No.	Isu Strategis	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3	4		5	
3	Peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
		Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan	1	Menyediakan pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan
					2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat
					3	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase
					4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim
4	Produktivitas daya saing ekonomi secara berkelanjutan	Misi 1 :Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon		Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan
						Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

No.	Isu Strategis	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3	4		5	
5	Pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis budaya dan sejarah	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal
6	Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan
					2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur
					3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
					4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
					5	Meningkatnya Maturitas SPIP
					6	Meningkatnya pelayanan publik
					7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
					8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah
					9	Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD

No.	Isu Strategis	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	2	3	4		5	
					10	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, handal dan terintegrasi dalam mewujudkan *Cirebon Smart City*
					11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
					12	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Misi 4: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif		Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat
					2	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional
					3	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
7	Dampak Pandemi Covid-19	Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang	1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon
					2	Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, data diolah

Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 yang dijabarkan pada Tujuan dan Sasaran serta indicator maisng-masing tercantum dalam tabel 5.4 di bawah ini:

5.4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VISI: SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH																
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang																
	Tujuan:															
1.	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	a.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	74,00	74,35	74,55	74,92	74,84	74,89	75,14	75,44	75,73	75,44	75,73	75,93	75,93
		b.	Indeks Gini	0,41	0,43	0,40	0,41	0,40	0,42	0,39	0,39	0,38	0,42	0,42	0,42	0,42
		c.	PDRB Per kapita (Juta Rupiah)	63,26	68,40	71,47	73,46	76,41	*)	80,88	85,35	85,82	80,88	80,38	83,84	83,84
		d.	Indeks Daya Beli (Poin)	72,81	n.a.	73,15	n.a.	73,32	n.a.	73,49	73,66	73,83	73,49			
		e.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	11.000	11.397	11.694	11.930	11.806-11.881	11.800	12.014-12.162	12.307-12.496	12.626-12.857	12.014	12.307	12.628	12.628
	Sasaran:															
1.1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	a.	Rata-rata Lama Sekolah	9,88	9,89	10,19	9,90	10,22	9,91	10,35	10,48	10,61	10,35	10,48	10,61	10,61
		b.	Harapan Lama Sekolah	13,08	13,09	13,43	13,11	13,57	13,12	13,71	13,85	13,99	13,71	13,85	13,99	13,99
1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	a.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (Permil)	1,385	1,385	1,516	1,566	1,627	1,642	1,737	1,848	1,958	1,737	1,848	1,958	1,958

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	a.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,89	71,90	72,04	72,13	72,25	72,26	72,38	72,51	72,64	72,38	72,51	72,64	72,64
		b.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	99,00	99,00	99,01	93,53	99,02	97,04	99,03	99,04	99,05	99,03	98,00	99,00	99,00
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,91	0,94	0,87	0,96	0,67	4,38	0,66	0,65	0,65	0,66	0,50	0,47	0,47
1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (Persen)	66,45	68,03	69,03	62,71	69,81	63,75	70,70	71,59	72,48	70,70	65,35	66,15	66,15
		b.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Persen)	9,29	9,06	8,83	9,04	8,60	10,97	8,37	8,14	7,91	9,43	9,00	8,50	8,50
		c.	Tingkat Kesempatan Kerja/TKK (Persen)	90,71	90,94	91,14	91,02	91,34	89,03	91,54	91,74	91,94	91,54	91,74	91,94	91,94
1.6	Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda	a.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	2	n.a.	2	2	4	0	5	6	9	5	6	9	9
		b.	Persentase Organisasi Pemuda Aktif (Persen)	50,00	50,00	50,00	46,30	55,00	61,11	60,00	65,00	70,00	60,00	65,00	70,00	70,00
1.7	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	93,94	93,94	94,20	94,35	94,28	94,35	94,35	94,41	94,46	94,35	94,41	94,46	94,46
		b.	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Poin)	74,23	73,97	75,53	77,86	76,26	*)	77,00	77,73	78,47	77,00	77,73	78,47	78,47
1.8	Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan,	a.	Kontribusi PDRB dari sektor industri (Persen)	10,25	10,20	10,30	10,08	10,31	10,21	10,32	10,33	10,34	10,32	11,15-11,22	11,80-11,87	11,80-11,87

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon	b.	Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (Persen)	31,61	31,51	31,86	31,43	32,11	29,73	32,22	32,34	32,44	32,22	32,48-32,67	34,37-34,58	34,37-34,58
1.9	Berkurangnya penduduk miskin	a.	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	9,66	8,88	8,53	8,41	8,18	9,52	7,83	7,48	7,13	8,80	8,55	8,35	8,35
1.10	Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	a.	Skor Pola Pangan Harapan/PPH (Skor)	77,80	84,00	79,90	90,20	80,90	90,20	82,00	83,10	84,10	82,00	93,50	95,15	95,15
		b.	Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (Persen)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
1.11	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	a.	Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (Persen)	5,29	5,36	5,55	5,37	5,63	5,10	5,71	5,79	5,87	5,71	5,57-5,61	5,90-5,93	5,90-5,93
1.12	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	a.	Konflik Antar Umat Beragama (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	a.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (Persen)	69,60	n.a.	71,81	53,69	74,01	60,80	74,01	76,21	78,41	74,01	76,21	78,41	78,41
1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	a.	Tingkat perkembangan kelurahan di Kota Cirebon (kelurahan):													
		√	Kurang berkembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		√	Berkembang	8	8	8	7	9	7	9	9	9	9			
		√	Cepat berkembang	13	13	13	15	13	15	13	13	13	13			

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase kelurahan cepat berkembang (persen)												59,09	59,09	59,09
		b.	Meningkatnya kualifikasi status kelurahan (kelurahan):													
		Kecamatan Kesambi:														
		√	Swakarya mula	n.a.	n.a.	0	1	0	0	0	0	0	0			
		√	Swakarya madya	n.a.	n.a.	0	1	1	1	0	0	0	0			
		√	Swakarya lanjut	n.a.	n.a.	0	0	0	0	1	0	0	1			
		√	Swasembada mula	n.a.	n.a.	0	3	4	4	4	5	4	4			
		√	Swasembada Madya	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	1	0			
		√	Swasembada lanjut	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Persentase kelurahan berstatus swasembada (Persen)												80,00	100,00	100,00
		Kecamatan Pekalipan:														
		√	Swakarya mula	n.a.	n.a.	0	2	2	0	1	0	0	1			
		√	Swakarya madya	n.a.	n.a.	0	2	1	0	2	2	1	2			
		√	Swakarya lanjut	n.a.	n.a.	0	0	1	0	1	2	2	1			
		√	Swasembada mula	n.a.	n.a.	0	0	0	4	0	0	1	0			
		√	Swasemba madya	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
		√	Swasembada lanjut	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Persentase kelurahan berstatus swasembada (Persen)												25,00	50,00	50,00
		Kecamatan Kejaksan:														
		√	Swakarya mula	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
		√	Swakarya madya	n.a.	n.a.	0	2	2	4	1	0	0	1			

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
				2019		2020								
		2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	√ Swakarya lanjut	n.a.	n.a.	0	2	2	0	3	4	3	3			
	√ Swasembada mula	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	1	0			
	√ Swasembada madya	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	√ Swasembada lanjut	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Persentase kelurahan berstatus swasembada (Persen)											25,00	25,00	25,00
	Kecamatan Harjamukti:													
	√ Swakarya mula	n.a.	n.a.	0	1	1	1	0	0	0	0			
	√ Swakarya madya	n.a.	n.a.	0	3	3	3	3	2	1	3			
	√ Swakarya lanjut	n.a.	n.a.	0	1	1	0	2	3	3	2			
	√ Swasemda mula	n.a.	n.a.	0	0	0	1	0	0	1	0			
	√ Swasembada madya	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	√ Swasemda lanjut	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Persentase kelurahan berstatus swasembada (Persen)											40,00	60,00	60,00
	Kecamatan Lemahwungkuk:													
	√ Swakarya mula	n.a.	n.a.	0	1	1	2	1	0	0	1			
	√ Swakarya madya	n.a.	n.a.	0	2	2	1	1	2	0	1			
	√ Swakarya lanjut	n.a.	n.a.	0	1	1	1	2	2	3	2			
	√ Swasembada mula	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	1	0			
	√ Swasembada madya	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	√ Swasembada lanjut	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Persentase kelurahan berstatus swasembada (Persen)											25,00	50,00	50,00

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif																
	Tujuan:															
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	a.	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	49,95	57,29	60,00	71,00	65,00	76,54	70,00	75,00	80,00	70,00	77,00	80,00	80,00
	Sasaran:															
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	a.	Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan											100,00	100,00	100,00
2.2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	a.	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi (Persen)	0,64	8,00	12,40	26,08	13,70	25,72	15,00	16,00	16,50	15,00	50,00	55,00	55,00
		b.	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target (Persen)	78,50	80,00	80,50	80,35	81,00	80,77	81,50	82,00	82,50	81,50	82,00	82,50	82,50
		c.	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin (Persen)	85,00	86,50	87,00	92,72	89,00	96,94	90,00	91,50	95,00	90,00	97,00	98,00	98,00

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		d.	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN (Persen)	77,94	70,30	80,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	a.	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan (Persen)	45,00	45,00	80,00	80,00	85,00	100,00	90,00	95,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
		b.	Persentase Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Pemerintahan yang Diterapkan (Persen)	n.a.	0,00	0,00	0,00	25,00	32,00	60,00	80,00	100,00	60,00	75,00	100,00	100,00
2.4	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	a.	Nilai AKIP	62,05	n.a.	B	B	B	B	BB	BB	A				
		b.	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam evaluasi atas AKIP	8,71	9,89	10,00	9,98	10,25	9,57	10,50	10,75	11,00	10,50	9,90	10,00	10,00
2.5	Meningkatnya Maturitas SPIP	a.	Tingkat Maturitas SPIP	1	1	2	1,7	3	3	3	3	4	3	3	4	4
2.6	Meningkatnya pelayanan publik	a.	Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan perijinan (Persen)	73,90	78,87	73,90	82,65	74,00	82,76	74,10	74,30	74,40	74,10	83,00	84,00	84,00
		b.	Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan (Persen)	77,28	78,00	80,00	80,00	82,00	77,75	84,00	86,00	88,00	84,00	84,00	85,00	85,00
2.7	Meningkatnya kualitas	a.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pengelolaan keuangan daerah	b.	Rasio PAD terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	31,93	30,95	30,53	32,67	29,06	27,04	33,17	33,67	34,17	33,17	33,17	33,67	33,67
2.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah	a.	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota (Poin)	74,09	77,09	80,10	83,18	83,15	83,18	83,50	86,15	90,01	83,50	84,00	85,00	85,00
2.9	Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD	a.	Rasio Jumlah Perda yang ditetapkan terhadap Raperda (Persen)	44,00	55,00	70,60	70,00	72,20	72,20	73,70	75,00	80,00	73,70	75,00	80,00	80,00
		b.	Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		c.	Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	59,70	60,00	62,50	42,01	65,00	65,00	70,00	75,00	78,33	70,00	75,00	78,33	78,33
2.10	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, handal dan terintegrasi dalam mewujudkan *Cirebon Smart City*	a.	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	1	1	4	13	5	13	6	7	9	6			
		b.	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	22	22	22	22	27	24	25	26	24			
		c.	Indeks Penyelenggaraan											3,1	3,2	3,2

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE (Poin)													
2.11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a.	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD (Persen)	78,99	87,39	100,00	97,49	100,00	97,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		b.	Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD (Persen)	96,19	98,26	100,00	95,17	100,00	95,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	a.	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti untuk menjadi bahan Kebijakan Daerah (Persen)	n.a.	n.a.	40,00	31,00	50,00	41,02	60,00	70,00	80,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan																
	Tujuan:															
3.	Menyediakan pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	n.a.	44,05	45,00	51,96	45,50	55,48	46,00	46,50	47,00	46,00	56,76	56,82	56,82
		b.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	2,38	n.a.	2,80	3,85	3,92	3,87	5,87	7,11	7,72	5,87			

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daya Tampung Lingkungan															
	Sasaran:															
3.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	a.	Tingkat pelayanan ruas jalan	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B			
		b.	Persentase peningkatan *level of servce* ruas jalan (persen)											3,00	3,00	3,00
3.2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	a.	Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk (Persen)	n.a.	n.a.	40,00	0,31	50,00	0,30	60,00	70,00	80,00	60,00			
3.3	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase	a.	Persentase drainase kondisi baik	70,00	n.a.	72,50	71,00	75,00	75,00	75,00	77,50	80,00	75,00	77,50	80,00	80,00
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH (Poin)	n.a.	44,05	45,00	51,96	45,50	51,00	46,00	46,50	47,00	46,00			
		b.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	n.a.	2,38	2,80	3,85	3,92	3,87	5,87	7,11	7,72	5,87	7,11	7,72	7,72
Misi 4: Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif																
	Tujuan:															
4.	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-	a.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	n.a.	n.a.	62,00	62,00	70,00	76,62	75,00	80,00	83,00	75,00	80,00	83,00	83,00

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan															
	Sasaran:															
4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	a.	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lokasi/titik)	65	60	55	52	45	43	35	25	15	35	25	15	15
		b.	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kecamatan (Nilai indeks rata-rata keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan):													
		√	Kecamatan Kejaksan (Poin)					75,00	85,67	77,00	80,00	85,00	77,00	86,00	86,50	86,50
		√	Kecamatan Lemahwungkuk (Poin)					77,00	69,83	80,00	85,00	90,00	80,00	70,00	71,00	71,00
		√	Kecamatan Harjamukti (Poin)					75,00	83,83	80,00	85,00	90,00	80,00	84,00	84,50	84,50
		√	Kecamatan Pekalipan (Poin)					82,50	81,50	85,00	87,50	90,00	85,00	82,00	82,50	82,50
		√	Kecamatan Kesambi (Poin)					60,00	84,17	70,00	75,00	80,00	70,00	84,50	85,00	85,00
4.2	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kawaspadaan nasional	a.	Konflik kasus kebangsaan dan nasionalisme (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Kondisi Awal		Target dan Realisasi				Target Sebelum Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			Kondisi Akhir
						2019		2020								
				2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	a.	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK (Persen)	64,00	70,00	75,00	75,00	80,00	67,00	85,00	95,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00
		b.	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana (Kelurahan)	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22			
		c.	Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif (Persen)											23,00	27,00	27,00

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, data diolah dan hasil prediksi, 2021

5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat pada saat Kampanye Pemilukada merupakan hal-hal strategis yang perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, dilaksanakan melalui: (1) pembangunan gedung sekolah/unit sekolah baru SD dan SMP di Argasunya; (2) relokasi bangunan sekolah SD/SMP; (3) peningkatan status puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap; (4) relokasi Puskesmas Jalan Kembang; (5) relokasi Puskesmas Pekalangan; (6) relokasi Puskesmas Astanagarib; (7) peningkatan status Puskesmas Pamitran menjadi DTP; (8) Kartu Cirebon Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI); (9) Kartu Cirebon Cerdas bagi Siswa Keluarga Miskin; (10) pengembangan literasi; (11) penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari; (12) pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
2. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui: (1) peningkatan upaya realisasi pembangunan CORR; (2) pembangunan jalan dan jembatan; (3) penataan trotoar jalan; (4) penataan saluran drainase; (5) penataan Kawasan kumuh; (6) pembangunan/penyediaan rumah susun; (7) pemugaran rumah tidak layak huni; (8) kontinuitas layanan air bersih; (9) pembangunan sumur artesis; (10) penyediaan rumah singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; (11) pengembangan infrastruktur transportasi; (12) penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan dan peningkatan upaya pengurangan sampah di sumbernya; (13) pemenuhan kebutuhan dan penataan lahan untuk RTH publik; (14) pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah domestik; (15) pembangunan jalur Kereta Api *Elevated Railway*, dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat; (16) pembangunan dan penataan PJU; (17) pembangunan dan penataan taman; (18) penataan Kawasan Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan dan Jalan Pasuketan;
3. Peningkatan produktivitas daya saing daerah, dilaksanakan melalui: (1) pembentukan wirausaha baru; (2) peningkatan daya saing ekonomi kreatif; (3) pembangunan/penataan gedung kreatif; (4) penataan alun-alun kejaksan; (5) pemberdayaan ekonomi kaum perempuan; (6) pembangunan/penyiapan sentra/*cluster* pengembangan industri kreatif;
4. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata.

Prioritas pembangunan keempat dilaksanakan melalui: (1) revitalisasi dan penataan Kawasan Kota Tua; (2) pemanfaatan kawasan ex galian C menjadi lokasi wisata; (3) penataan trotoar (pembangunan *main street* dan *shoping street)*; (4) penataan Kawasan Bima; (5) pembangunan *Sky Walk* Kawasan Sukalila; (6) penataan Pantai Kesenden; (7) penataan keraton dan bangunan cagar budaya; (8) penataan Kampung Benda menjadi lokasi wisata religi; dan (9) pengembangan wisata halal;

5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan melalui: (1) pembangunan *Command Centre*; (2)

penerapan *Smart City* dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik; (3) pembentukan Warung Konsultasi bagi aparatur; (4) pembangunan/rehabilitasi Gedung DPRD; (5) integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;

6. Peningkatan kondusivitas ketentraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui: (1) peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; (2) pengurangan titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya, prioritas pembangunan di Kota Cirebon selain 6 (enam) prioritas pembangunan ditambahkan prioritas pemulihan ekonomi, penanganan, dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19, sehingga prioritas pembangunan menjadi 7 (tujuh) prioritas, dengan tambahan prioritas pembangunan nomor 1 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi, penanganan, dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19, dilaksanakan melalui: (1) percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat; (2) penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*); (3) pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat terdampak Covid-19; (4) pemberian bantuan non-tunai sembako dan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19; (5) bantuan stimulant bagi warga terkena PHK dan pekerja yang dirumahkan; dan (6) bantuan stimulus modal usaha bagi UMKM.

Untuk prioritas pembangunan nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 7 (tujuh) masih sesuai dengan janji kampanye.

Prioritas pembangunan Kota Cirebon tahun 2018-2023 tersebut di atas selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Berikut disajikan keterkaitan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dengan prioritas pembangunan jangka menengah yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Tabel 5.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Kota Cirebon

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon	
1		2	
PP1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PP1+	Pemulihan ekonomi, Penanganan, dan rehabilitasi, dan dampak pandemi Covid-19
		PP1	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
PP2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PP1+	Pemulihan ekonomi, Penanganan, dan rehabilitasi, dan dampak pandemi Covid-19
		PP1	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat		**Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon**	
1		**2**	
		PP3	Peningkatan produktivitas daya saing daerah
PP3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;	PP1	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
		PP3	Peningkatan produktivitas daya saing daerah
PP4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PP1	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
PP5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PP1	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
PP6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PP2	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
		PP6	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum
PP7	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	PP2	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
		PP3	Peningkatan produktivitas daya saing daerah
PP8	Gerakan Membangun Desa	PP2	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
		PP3	Peningkatan produktivitas daya saing daerah
PP9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	PP1	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
		PP6	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum
PP10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PP2	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
PP11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PP4	Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata
		PP3	Peningkatan produktivitas daya saing daerah

Sumber: Bappeda Jawa Barat dan BPPPPD Kota Cirebon, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh informasi mengenai hubungan antara prioritas pembangunan Kota Cirebon dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reformasi sistem kesehatan, yang merupakan Program Prioritas pertama dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Pemulihan ekonomi, Penanganan, dan rehabilitasi, dan dampak pandemi Covid-19 (PP1+) dan Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (PP1).
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, yang merupakan Program Prioritas kedua dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Pemulihan ekonomi, Penanganan, dan rehabilitasi, dan dampak pandemi Covid-19 (PP1+), Peningkatan produktivitas daya saing daerah (PP3) dan Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (PP1).
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, yang merupakan Program Prioritas ketiga dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Peningkatan produktivitas daya saing daerah (PP3) dan Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (PP1).
4. Reformasi sistem perlindungan sosial, yang merupakan Program Prioritas keempat dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (PP1).
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan, yang merupakan Program Prioritas kelima dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (PP1).
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana, yang merupakan Program Prioritas keenam dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan (PP2) dan Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum (PP6).
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, yang merupakan Program Prioritas ketujuh dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan (PP2) dan Peningkatan produktivitas daya saing daerah (PP3)
8. Gerakan membangun desa, yang merupakan Program Prioritas kedelapan dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan (PP2) dan Peningkatan produktivitas daya saing daerah (PP3)

9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara, yang merupakan Program Prioritas kesembilan dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (PP1) dan Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum (PP6).
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan Program Prioritas kesepuluh dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan (PP2).
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, yang merupakan Program Prioritas kesebelas dalam pembangunan Jawa barat telah selaras dengan prioritas pembangunan Kota Cirebon dalam Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata (PP4) dan Peningkatan produktivitas daya saing daerah (PP3)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 9 aspek yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Koa Cirebon telah selaras dengan 11 Prioritas Pembangunan Jawa Barat.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon 2018-2023 yang diejawantahkan melalui 4 (empat) pelaksanaan misi pembangunan daerah dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dibutuhkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terukur. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada rumusan permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat *inherent* dengan satu tema, sehingga satu strategi dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara

bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan agar pilihan-pilihan strategis dapat selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telh dirumuskan pada Bab IV yang dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Bab V, maka dirumuskan startegi , arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan tema/fokus pembangunan selama lima tahun periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan dapat dirumuskan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu serta mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan

jelas. Untuk itu perlu dirumuskan tema/fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran dalam Perubahan RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi, sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam memenuhi atau mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankannya. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon 2018-2023 mencerminkan upaya pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kota Cirebon pada periode 2018-2023.

Tabel 6.1
Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Cirebon 2018-2023

VISI : SEHATI KITA WUJUDKAN CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang				
1.1	Menciptakan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih, dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	▪ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.
				▪ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				▪ Meningkatkan kompetensi, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
		2. Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	▪ Meningkatkan layanan perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat
				▪ Meningkatkan minat baca di masyarakat melalui penyelenggaraan even literasi, pojok baca, taman bacaan, dan gerobak baca di masyarakat.
		3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan dan peran serta masyarakat terhadap upaya kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat
			Peningkatan status Puskesmas	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			menjadi Puskesmas Rawat Inap	terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
		4. Terkendalinya jumlah penduduk	Pengendalian fertilitas dan mortalitas	▪ Menyediakan *Grand Design* Pengendalian Penduduk dalam penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan
				▪ Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk
		5. Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas, peroduktifitas tenaga kerja, lembaga ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan peluang usaha	Meningkatkan kompetensi, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
		6. Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda	Peningkatan pembinaan kepemudaaan dan prestasi olahraga	Meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan dan kualitas olahraga
		7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	▪ Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	▪ Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			▪ Memperkuat peran keluarga dan kesetaraan gender	▪ Meningkatkan ketahanan keluarga serta peranannya dalam perlindungan perempuan dan anak
		8. Meningkatnya peran industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon.	▪ Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah fokus pada dukungan industri kreatif	▪ Membangun klaster industri kreatif, kemitraan dan pemanfaatan teknologi.
			▪ Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	▪ Meningkatkan sistem dan jaringan informasi harga serta ketersediaan stok barang kebutuhan masyarakat dan barang penting lainnya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi peningkatan perdagangan luar negeri (ekspor), pembinaan pengembangan pasar rakyat dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				perlindungan konsumen.
			▪ Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	▪ Meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kapasitas produk UMKM, fasilitasi akses dan bantuan modal usaha (pembiayaan, sarana dan prasarana) dan membuka peluang dan akses pemasaran.
		9. Berkurangnya penduduk miskin.	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu	▪ Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dan atau masyarakat terdampak COVID-19
				▪ Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
				▪ Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
		10. Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan.	Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
				Meningkatkan produktifitas pertanian, kelautan dan perikanan.
		11. Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatkan potensi daya tarik dan promosi pariwisata.	▪ Mengembangkan destinasi wisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif.
				▪ Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital.
		12. Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	▪ Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan
				▪ Meningkatkan peran tokoh agama dalam

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan.
				▪ Peningkatan implementasi pelaksanaan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti dzikir akbar, Cirebon Bershalawat.
		13. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	▪ Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Cirebon	▪ Meningkatkan pelestarian dan legalitas seni dan budaya lokal
			▪ Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan lokal	▪ Perlindungan, pengembangan dan penataan cagar budaya
		14. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan	Memperkuat pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.				
2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam manajemen Pemerintahan.	1. Meningkatnya Dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Meningkatkan Administrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.	▪ Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan ▪ Meningkatkan Managemen Sumber Daya Manusia Aparatur ▪ Meningkatkan Menegemen Keuangan
		2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta penerapan *reward and punishment*.	Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		3. Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan melalui peningkatan koordinasi dan kapabilitas Sekretariat Daerah	▪ Meningkatkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan
				▪ Optimalisasi pengelolaan kebijakan penyelenggaraan urusan melalui peningkatan peran Asisten Daerah dan Bagian di Sekretariat Daerah
		4. Meningkatnya maturitas SPIP	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintahan dan pembangunan yang terpadu dan transparan
		5. Meningkatnya pelayanan publik	▪ Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan perijinan	▪ Meningkatkan pertumbuhan investasi
			▪ Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan kependudukan	▪ Meningkatkan kualitas layanan kependudukan pencatatan sipil.
		6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	▪ Tergalinya Potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal	▪ Meningkatkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
			▪ Meningkatnya tatakelola keuangan dan asset daerah	▪ Meningkatkan keselarasan program dan kegiatan dalam APBD dengan RKPD
				▪ Penyusunan APBD tepat waktu
		7. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah	Meningkatkan tatakelola kearsipan Perangkat Daerah	▪ Menyiapkan kebijakan dan Peraturan Kepala Daerah terkait tatakelola kearsipan.
				▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.
		8. Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD	Meningkatkan peran, fungsi dan kewenangan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Optimalisasi peran DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		9. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, handal dan terintegrasi dalam mewujudkan *Cirebon Smart City*	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	▪ Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis *e-government*.
				▪ Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel berbasis TIK.
		10. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	▪ Melakukan updating data SIPD	▪ Optimalisasi data yang *up to date* dari semua sektor dan Perangkat Daerah
			▪ Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	▪ Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah
			▪ Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	▪ Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
		11. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.	Peningkatan pemahaman atas penelitian, pengkajian dan pengembangan serta peningkatan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan.	Meningkakan kapasitas aparatur terhadap penelitian, pengkajian dan pengembangan serta merintis kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi.
Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan				
3.1	Menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu,	1. Meningkatnya pelayanan kapasitas jalan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan secara merata di seluruh wilayah.	▪ Meningkatkan kemantapan kondisi jalan interkonektivitas pertumbuhan ekonomi ▪ Meningkatkan kemantapan dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.			keselamatan transportasi ▪ Membangun dan mengembangkan prasarana angkutan darat yang menghubungkan wilayah potensial yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru ▪ Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan yang aman, nyaman dan terjangkau. ▪ Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda.
		2. Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase	Meningkatkan kapasitas jaringan drainase	Penataan jaringan drainase secara merata di seluruh ruas jalan dan lingkungan permukiman.
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	▪ Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.	▪ Meningkatkan kualitas dan penyediaan air, serta kualitas udara.
				▪ Meningkatkan tutupan vegetasi
				▪ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
			▪ Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	▪ Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
			▪ Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum
				▪ Penyediaan rumah layak huni
				▪ Rehabilitasi rumah tidak layak huni
				▪ Pengurangan kawasan kumuh kota.
Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.				

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.1	Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.	1. Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Meningkatkan upaya-upaya penegakan peraturan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penertiban dan perlindungan masyarakat	▪ Peningkatan upaya penanganan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
				▪ Penegakan Peraturan Daerah melalui pembentukan kawasan-kawasan ketertiban khusus.
				▪ Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
		2. Meningkatnya rasa nasionalisme dan kewaspadaan nasional	▪ Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan wawasan kebangsaan	▪ Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap paham-paham radikalisme dan komunisme.
			▪ Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	▪ Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.
		3. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Mengurangi resiko bencana	▪ Meningkatkan mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana
				▪ Menyusun Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021.

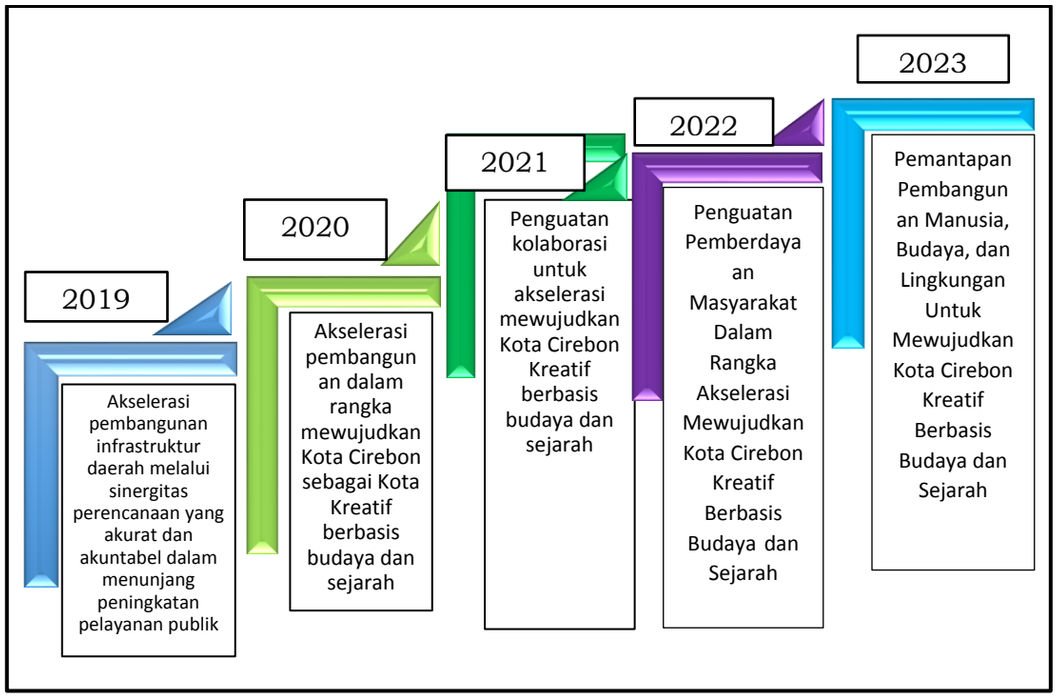
6.3 Tahapan Pembangunan

Setelah dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik dalam periode waktu tertentu. Dengan adanya penentuan kurun waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dijadikan dasar untuk penyusunan RPJMD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

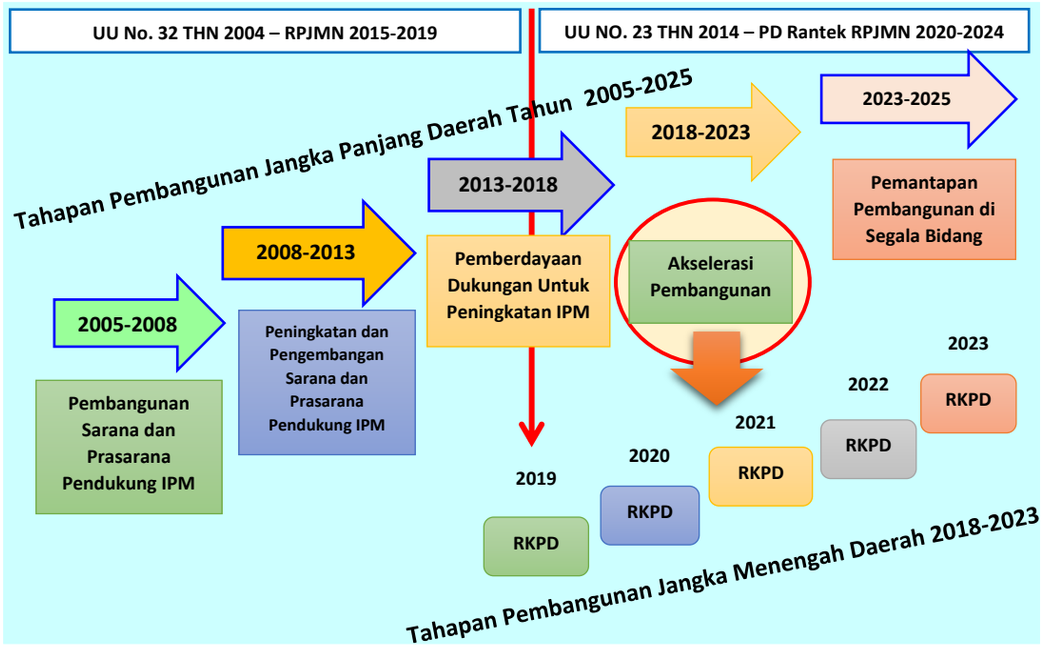
Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam upaya mencapai target pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023. Fokus/tema pembangunan Kota Cirebon mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.

Gambar: 6.1
Tema/Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023



Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Gambar 6.2
Posisi RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 Dalam Kerangka
RPJPD Kota Cirebon 2005-2025



Sumber: BPPPPD Kota Cirebon

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam fokus/tema pembangunan setiap tahun, maka dirumuskan arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi-strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan merupakan penjabaran strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta merupakan rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan sebagai bentuk antisipasi isu strategis daerah.

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah daerah Kota Cirebon dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Fokus/Tema Pembangunan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2019 – 2023

Fokus/Tema Pembangunan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Sinergitas Perencanaan yang Akurat dan Akuntabel dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Publik	Akselerasi Pembangunan Dalam Rangka Mewujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah	Penguatan Kolaborasi Untuk Akselerasi Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Akselerasi Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah	Pemantapan Pembangunan Manusia, Budaya, dan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kota Cirebon Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah
Fokus Prioritas	**Fokus Prioritas**	**Fokus Prioritas**	**Fokus Prioritas**	**Fokus Prioritas**
1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangun an akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisata an yang berkualitas;	1. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;	1. Pemulihan ekonomi, penanganan, dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19	1. Pemulihan ekonomi, penanganan, dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis industri kecil dan menengah;	2. Pengurangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS	2. Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan PMKS secara berkelanjutan.	2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia	2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia
3. Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan PMKS secara berkelanjutan;	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/ kluster	3. Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kreatif;	3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan	3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan
4. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;	4. Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran;	4. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka interkonektivi-tas dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru;	4. Peningkatan produktivitas daya saing daerah	4. Peningkatan produktivitas daya saing daerah

5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi unggulan lokal;	5. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;	5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;	5. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata.	5. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata.
6. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;	6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan;	6. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya lingkungan serta pengurangan resiko bencana;	6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya secara berkelanjutan.	7. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalis aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.	6. Pengembangan tata pemerintah an yang bersih dan baik didukung dengan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik;	7. Peningkatan kondusivitas ketentraman dan ketertiban umum	7. Peningkatan kondusivitas ketentraman dan ketertiban umum
8. Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya dan sejarah;	8. Penataan dan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan sejarah	7. Pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;		
9. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, drainase, serta penataan kawasan permukiman.	9. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.			

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah adalah program prioritas yang merupakan janji-janji politik yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada saat kampanye. untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Penjabaran prioritas pembangunan ke dalam program pembangunan daerah dibuat berdasarkan kebijakan umum, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi COVID-19;
2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.
4. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
5. Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah.
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi, penanganan dan rehabilitasi dampak pandemi Covid-19, dilakukan antara lain melalui (1) percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat; (2) penyediaan jaring pengaman sosial *(social safety net);* (3) pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat terdampak Covid-19; (4) pemberian bantuan non tunai sembako dan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19; (5) bantuan stimulan bagi warga yang terkena PHK dan pekerja yang dirumahkan; (6) bantuan stimulus modal usaha bagi UMKM.
2. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan melalui: (1) pembangunan gedung sekolah/Unit Sekolah Baru SD dan SMP di Argasunya; (2) relokasi bangunan sekolah SD/SMP; (3) peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap; (4) relokasi Puskesmas Jalan Kembang; (5) relokasi Puskesmas Pekalangan; (6) relokasi Puskesmas Astanagarib; (7) Puskesmas DTP Pamitran; (8) Kartu Cirebon Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI); (9) Kartu Cirebon Cerdas bagi siswa keluarga miskin; (10) Pengembangan literasi; (11) penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari; (12) pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).
3. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, dilaksanakan melalui: (1) peningkatan upaya realisasi pembangunan CORR; (2) pembangunan jalan dan jembatan; (3) penataan trotoar jalan; (4) penataan saluran drainase; (5) penataan Kawasan kumuh; (6) pembangunan/penyediaan rumah susun; (7) pemugaran rumah tidak layak huni; (8) kotinuitas layanan air bersih; (9) pembangunan sumur artesis; (10) penyediaan rumah singgah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; (11) pengembangan infrastruktur transportasi; (12) penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan dan peningkatan upaya pengurangan sampah di sumbernya; (13) pemenuhan kebutuhan dan penataan lahan untuk RTH publik; (14) pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah domestik; (15) pembangunan jalur kereta api *elevated railway*, dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat; (16) pembangunan dan penataan PJU; (17) pembangunan dan penataan taman; (18) penataan Kawasan jalan Karanggetas, jalan Pekiringan dan jalan Pasuketan.
4. Peningkatan produktivitas daya saing daerah, dilaksanakan melalui: (1) pembentukan wirausaha baru; (2) peningkatan daya saing ekonomi

kreatif; (3) pembangunan/penataan Gedung kreatif; (4) pentaan alun-alun Kejaksan; (5) pemberdayaan ekonomi kaum perempuan; (6) pembangunan/penyiapan sentra/cluster pengembangan industri kreatif.

5. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata, dilaksanakan melalui (1) revitalisasi dan penataan Kawasan Kota Tua; (2) pemanfaatan Kawasan ex galian C menjadi lokasi wisata; (3) penataan trotoar (pembangunan *main street* dan *shoping street*; (4) penataan Kawasan Bima; (5) pembangunan *sky walk* Kawasan Sukalila; (6) penataan Pantai Kesenden; (7) penataan Keraton dan bangunan cagar budaya; (8) penataan Kampung Benda menjadi lokasi wisata religi; dan (9) pengembangan wisata halal.
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan melalui: (1) pembangunan *command center*; (2) penerapapan *smart city* dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik; (3) pembentukan warung konsultasi bagi aparatur; (4) pembangunan/rehabilitasi Gedung DPRD; (5) integrasi perencanaan, penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.
7. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui: (1) peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; (2) pengurangan titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, menjadi program strategis yang harus diprioritaskan dalam implementasinya. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk mengimplementasikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih periode tahun 2018-2023 dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kota.

Janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT/RW dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Ibu Dapur Ngebul, dengan menciptakan kemandirian ekonomi kaum perempuan.
3. Cirebon “Cerdas”, dengan menghadirkan Kartu “SEHATI” untuk pendidikan.
4. *The Great of Cirebon* (Peningkatan destinasi wisata dan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah).
5. Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon, khususnya keluarga miskin.
6. Penyediaan dokter spesialis di Puskesmas.
7. Peningkatan jumlah akreditasi Puskesmas.
8. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
9. Peningkatan jumlah PONED (pelayanan *obstetri neonatus essensial* dasar).
10. Peningkatan layanan konseling remaja, kasus KDRT, atau penyakit khusus lainnya.

11. Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon, termasuk KK miskin baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta di Kota Cirebon.
12. Peningkatan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Pemerintah.
13. Peningkatan status Rumah Sakit.
14. Akselerasi daftar tunggu/antrian pasien di Rumah Sakit.
15. Kerjasama antar Rumah Sakit.
16. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, meliputi: Warga Siaga, Kampung Siaga, Posyandu, Posbindu, Warga Peduli AIDs, Wadul Bae, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pendamping pengobatan.
17. Peningkatan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum.
18. RW Sehat yang mempunyai Pos Obat RW sebagai peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) mewujudkan RW Sehat dalam melakukan pendampingan pengobatan penyakit endemik/penyakit rakyat.
19. Penyediaan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Cirebon, termasuk KK miskin.
20. Peningkatan cakupan guru yang bersertifikat.
21. Menciptakan sekolah SD dan SMP “Layak Belajar Mengajar dan Merata”.
22. Peningkatan cakupan status Sekolah Sehat dan Sekolah Berwawasan Lingkungan.
23. Peningkatan dan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
24. Pendataan, pendaftaran, penataan dan pembinaan PKL Kota Cirebon.
25. Penyediaan shelter bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
26. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penataan PKL.
27. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat terutama warga yang belum memperoleh pekerjaan, khususnya KK miskin.
28. Penyaluran tenaga magang atau bekerja.
29. Bekerjasama dengan perusahaan/investor yang berinvestasi di Kota Cirebon untuk mempekerjakan warga kota 25 persen jumlah kebutuhan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.
30. Bursa tenaga kerja.
31. Menciptakan even-even dan kalender tahunan wisata Kota Cirebon.
32. *Branding* Kota.
33. Kampung wisata Kota Cirebon.
34. Kerjasama kepariwisataan.
35. Mengoptimalkan wisata religi, Keraton (wisata sejarah) dan wisata kuliner sebagai destinasi wisata.
36. Melakukan penataan wilayah pesisir Kota Cirebon untuk dijadikan “Sentra Wisata Bahari”.
37. Melakukan penataan terhadap Keraton-keraton sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Cirebon.
38. Melakukan penataan terhadap pasar tradisional sebagai pusat belanja yang sehat dan bersih, sehingga menjadi pusat belanja masyarakat.
39. Memberikan penguatan manajemen pada pengelola pasar tradisional.
40. Mengembangkan basis budaya local dalam rangka menumbuhkan industri kreatif lokal.

41. Pembentukan dan pemberdayaan KUKM yang diakselerasikan dengan penetapan dan pembangunan serta pemeliharaannya, sehingga terbentuk "*Central Bisnis Distrik*".
42. Pengembangan nilai-nilai budaya khas Cirebon.
43. Inventarisasi kekayaan dan keragaman budaya.
44. Peningkatan hubungan pemerintah dengan keraton.
45. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya.
46. Memfasilitasi kreator, budayawan dalam mengeksplorasi karya seni tradisi.
47. Menciptakan ruang pertunjukan seni yang sesuai dengan standar kelayakan pertunjukan.
48. Pendataan dan identifikasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
49. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
50. Penyediaan *shelter*/rumah aman.
51. Memfasilitasi proses rehabilitasi masyarakat Cirebon yang berkasus sosial (anak difabel, anak terlantar, jompo, dan lain-lain).
52. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
53. Pelatihan ketrampilan kerja untuk perempuan.
54. Pelibatan perempuan dalam segala bidang.
55. Pelibatan anak-anak dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak.
56. Mengoptimalkan Forum Anak Cirebon.
57. Kepemilikan akte lahir sebagai hak dasar anak termasuk anak yang lahir dari seorang Perempuan Kepala Rumah Tangga dan anak korban perkosaan.
58. Penguatan ekonomi untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
59. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
60. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LKK).
61. RW Ramah Anak.
62. RW melek informasi.
63. RW tertib, aman, dan sadar hukum.
64. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat umum.
65. MTQ Tingkat Kota untuk penyaringan ke MTQ Tingkat Provinsi.
66. RW Melek Qur'an.
67. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan megoptimalkan peran FKUB, pemuda lintas iman, dan lain-lain.
68. Penyederhanaan perijinan.
69. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
70. Penerapan *reward and punishment*.
71. Kerjasama dalam pencegahan korupsi (Inspektorat, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian).
72. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
73. Pendataan pajak dan retribusi.
74. Penyediaan mesin EPOS dan *Tapping Box*.
75. Penegakan hukum pajak dan retribusi.
76. Menjadikan PARKIR sebagai Perusahaan Daerah yang menghasilkan tambahan pendapatan.

77. Penyediaan sarana Kota yang ramah kepada pengguna, pejalan kaki, kaum difabel, ramah lingkungan anak sekolah, dan lain-lain.
78. Kemudahan aksesibilitas dalam dan luar kota.
79. Pencegahan terhadap genangan/banjir.
80. Ketersediaan air minum.
81. Penyediaan sarana angkutan umum massal yang murah dan ramah lingkungan.
82. Revitalisasi tembok rumah-rumah di kawasan kumuh jalan protokol.
83. Pengurangan kawasan kumuh kota.
84. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan.
85. Pelibatan komunitas masyarakat dalam kebersihan kota.
86. Tersedianya bank sampah dari tingkat RW sampai tingkat Kota.
87. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi volume sampah, sampah terpilah TPS 3R.
88. Penyediaan/pembangunan atau pemanfaatan lahan kosong untuk Ruang Terbuka Hijau atau Ruang Terbuka Publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi.
89. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas taman kota, sempadan jalan, sungai dan pantai.
90. Penambahan jumlah pohon/vegetasi kota.
91. Peningkatan operasional penertiban umum.
92. Peningkatan kualitas penegakan ketertiban umum.
93. Peningkatan kualitas penegakan Peraturan Daerah.
94. Penindakan polisional dalam penegakan Peraturan Daerah.
95. Penyediaan layanan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang berkasus hukum.
96. Pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, Siskamling.

Sembilan puluh enam butir janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tersebut di atas, dijabarkan dan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Selanjutnya, penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan dalam program dan kegiatan yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Cirebon, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.3
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD
Kota Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*		*4*
1.	Pendidikan PAUD	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berparisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan
		2.	Prosentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*		*4*
			dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	
		3.	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi	
2.	Pendidikan dasar	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Dinas Pendidikan
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	
		3.	Angka Putus Sekolah SD/MI	
		4.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
		5.	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik.	
		6.	Persentase pendidik pada jenjang SMP yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik.	
		7.	Angka kelulusan SD/MI	
		8.	Angka kelulusan SMP/MTs	
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1.	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	Dinas Kesehatan
		2.	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	
		3.	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	
		4.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
		5.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
		6.	Setiap warga negara usia 15 s.d. 59 ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	
		7.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar	
		8.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
		9.	Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
		10.	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
		11.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*		*4*
		12.	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin	Dinas Kesehatan
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	1.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam	Dinas Kesehatan
4.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	1.	Strata Mandiri RW Siaga Aktif	Dinas Kesehatan
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan	DPU-TR
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.	Persentase akses masyarakat terhadap layanan air limbah domestik	DPU-TR
3.	Penyediaan pelayanan jalan dan sarana prasarana	1.	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	DPU-TR
		2.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	
4.	Penyediaan pelayanan sistem drainase	1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	DPU-TR
		2.	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	DPU-TR
5.	Pelayanan pemanfaatan ruang	1.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	DPU-TR
		2.	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*		*3*	*4*
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persen)	DPRKP
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	1.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.	DPRKP
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1.	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3	Sat Pol PP
		2.	Cakupan rasio LINMAS	Sat Pol PP
		3.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Sat Pol PP
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	1.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan	BPBD
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulangan bencana	BPBD
		2.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
		2.	Meningkatnya rasio tenaga teknis yang bersertifikat	
		1.	Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon

Tabel 6.4
Rencana Proyek Strategis Kota Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD Prov.	APBD Kota	Swasta/ KPBU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Proyek Strategis Nasional						
1.	SPAM Regional Cirebon Raya	V	V	V		2023
Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat						
1.	Penataan alun-alun Kejaksan		V			2019-2023
2.	Penataan Gedung Creative Center (Ex BKPP)		V			2020-2023
3.	*Food Hubs, Kota Cirebon*		V		V	2020-2022
4.	TPPAS Cirebon Raya	V	V	V		2022
5.	Pembangunan Pusat Budaya		V			2021-2023
6.	Reaktivasi Jalur Kereta Api Cirebon-Kadipaten	V	V			2023
7.	Kawasan Sains dan Teknologi Industri Kreatif Jawa Barat di Kota Cirebon		V		V	2021-2023
8.	Pengembangan Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon)				V	2021
Proyek Strategis Kota Cirebon						
1.	Pembangunan Jalan Lingkar Cirebon, 22,3 km (CORR)	V	V			2020-2023
2.	Penataan Stadion Bima	V	V			2020-2023
3.	Penataan Stadion Madya	V	V			2020-2023
4.	Relokasi Gedung/bangunan SMAN 2		V			2020-2023
5.	Pembangunan/ rehabilitasi Gedung DPRD		V			2020-2023
6.	Pembangun Gedung PMI		V			2020-2023
7.	Pembangunan gedung Unit Sekolah		V			2020-2023

No.	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD Prov.	APBD Kota	Swasta/ KPBU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Baru SD/SMP dan SMK					
8.	Relokasi Bangunan Gedung SMPN2		V	V		2020-2023
9.	Relokasi Bangunan Gedung SMPN 13		V	V		2020-2023
10.	Relokasi Puskesmas Jalan Kembang	V		V		2020-2022
11.	Relokasi Puskesmas Astanagarib	V		V		2023
12.	Relokasi Puskesmas Pekalangan	V		V		2022
13.	Peningkatan Puskesmas Pamitran dengan DTP	V	V	V		2021-2022
14.	Pembangunan Gedung Diorama	V		V		2020-2023
15.	Pembangunan Depo Arsip		V	V		2020-2023
16.	Pembangunan Embung		V	V		2020-2023
17.	Pembangunan Rumah Singgah bagi ODGJ		V	V		2020-2023
18.	Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)		V	V		2020-2023
19.	Pembangunan/ penataan jalan, jembatan dan trotoar	V	V	V		2020-2023
20.	Penataan kawasan kumuh	V	V	V		2020-2023
21.	Pembangunan/ penyediaan rumah susun	V	V	V		2020-2023
22.	Kontinuitas layanan air bersih	V	V			2021
23.	Pembangunan sumur artesis			V	V	2020-2023
24.	Pengadaan lahan untuk RTH/Fasos/ Fasum			V	V	2020-2023
25.	Pembangunan jalur kereta api *Elevated Railway*	V				2020-2023
26.	Pembangunan dan penataan PJU		V	V	V	2020-2023
27.	Pembangunan/ penataan taman			V	V	2020-2023

No.	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD Prov.	APBD Kota	Swasta/ KPBU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
28.	Penataan Kawasan Jalan Karanggetas			V		2020-2023
29.	Penataan Kawasan Jalan Pekiringan			V		2020-2023
30.	Penataan Kawasan Jalan Pasuketan			V		2020-2023
31.	Pembangunan *command centre*		V			2020
32.	Implementasi *smart city*			V	V	2020-2023
33.	Pembangunan *main street*		V			2020-2023
34.	Pembangunan *Sky Walk* Kawasan Sukalila		V			2020-2023
35.	Penataan Pantai Kesenden		V	V		2020-2023
36.	Penataan Keraton dan BCB	V	V			2020-2023
37.	Penataan Kampung Benda menjadi destinasi wisata		V	V		2020-2023
38.	Revitalisasi dan penataan kawasan kota tua		V	V		2020-2023
39.	Pemanfaatan kawasan ex galian C menjadi lahan wisata		V	V		2020-2021
40.	Penataan trotoar (pembangunan *mainstreet* dan *shopping street*)		V			2020-2023
41.	Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana air limbah domestik		V			2020-2023
42.	Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan		V			2020
43.	Penyediaan moda transportasi massal		V			2022

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2020

Tabel 6.5

Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Kota dan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2023

No.	Program	Sumber Pendanaan				Target
		APBN	APBD Prov.	APBD Kota	Swasta	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pembangunan Jalan Kolektor (CORR) Jalur Pelandakan-Larangan	V	V	V		2020-2023
2.	Peningkatan Jalan Cibogo-Ciperna Golf (Kab. Cirebon)		V			2020-2023
3.	Peningkatan Jalan Kopiluhur-Kondangsari (Kab. Cirebon)		V			2020-2023
4.	Peningkatan Jalan Argasunya - Jalan Kopiluhur, Jalan Cadasngampar – Jalan Cibogo		V			2020-2023
5.	Beasiswa bagi anak di wilayah perbatasan (Argasunya)		V			2020-2023
6.	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK di wilayah Argasunya		V			200-2023
7.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).		V	V		2020-2023
8.	Penanganan persampahan di wilayah perbatasan		V	V		2020-2023

Sumber: Hasil analisis, 2020

Tabel 6.6
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Cirebon
Tahun 2019 – 2020

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
VISI : SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah														
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Suber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang														
	Tujuan:													
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	74,00	74,35	74,55		74,84		74,92		74,89		Asisten Perkeonomian dan Pembangunan
		Indeks Gini	Poin	0,41	0,43	0,40		0,40		0,41		0,42		
		PDRB per Kapita	Juta Rupiah	63,26	68,40	71,47		76,41		73,46		*)		
		Indeks Daya Beli	Poin	72,81	n.a.	73,15		73,33		n.a.		n.a.		
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.000	11.397	11.694		11.806-11.881		11.930		11.800		
	Sasaran:													
1.1.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,88	9,89	10,19		10,22		9,90		9,91		Kepala Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,08	13,09	13,43		13,57		13,11		13,12		
	Program:													
1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	57,94	65,73	57,94	5.861.200.000	58,81	2.978.600.000	57,54	2.151.908.500	57,42	2.199.547.500	Bid, PNF Disdik

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**Pendidikan SD/MI :**					70.765.382.150		101.503.573.250		61.653.658.204		77.991.143.733	Bidang Dikdas DISDIK
		APK	Persen	111,37	130,66	100,00		100,00		107,79		106,17		
		APM	Persen	95,51	115,27	97,00		97,10		88,76		95,29		
		Angka putus sekolah	Persen	0,02	0,08	0,02		0,08		0,00		0,00		
		Angka mengulang kelas	Persen	0,43	0,40	0,40		0,40		0,40		0,38		
		Angka kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	118,65	110,21	118,70		100,00		111,33		108,83		
		Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	20,48	40,25	64,50		80,65		55,10		55,10		
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 7-12	Rasio	0,28	0,28	0,18		49,00		0,51		0,51		
		Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	15,00	15,00	15,08		15,08		3,88		3,43		
		Pendidikan SMP/ MTs :												
		APK	Persen	139,93	151,91	100,00		100,00		81,85		124,78		
		APM	Persen	82,72	113,99	82,72		83,50		59,12		89,91		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Angka putus sekolah	Persen	0,02	0,26	0,02		0,29		0,28		0,03		
		Angka mengulang kelas	Persen	0,23	0,23	0,20		0,20		0,20		0,53		
		Angka kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA	Persen	118,02	113,73	118,02		100,00		100,00		100,00		
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	20,48	40,25	61,35		80,65		28,00		29,00		
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	Rasio	13,70	13,70	13,70		28,00		n.a.		n.a.		
		Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)	Rasio	12,00	12,14	12,14		12,38		4,00		4,00		
		Terpenuhinya rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,31	32,31	32,31		30,00		30,00		30,00		
		Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,77	32,77	32,77		32,00		36,00		36,00		
		SD dengan Akreditasi A	Sekolah	26	27	26		26		30		95		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		SD dengan Akreditasi B	Sekolah	20	20	20		20		31		32		
		SD dengan Akreditasi C	Sekolah	114	114	114		114		111		1		
		SMP dengan Akreditasi A	Sekolah	10	10	10		21		19		31		
		SMP dengan Akreditasi B	Sekolah	4	4	4		16		22		10		
		SMP dengan Akreditasi C	Sekolah	30	30	30		8		1		1		
1.1.3	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penduduk Melek Huruf usia >15	Persen	99,93	99,88	99,94	7.400.000.000	99,95	4.015.000.000	100,00	4.020.309.665	100,00	2.878.102.331	Bidang PNF DISDIK
1.1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,74	94,88	93,00	4.481.700.000	93,50	5.480.000.000	96,25	829.678.600	95,79	1.163.627.000	
		Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	48,42	50,41	48,50		50,00		48,15		43,03		
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,19	95,83	93,50		93,71		97,72		94,04		
		Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	53,41	66,06	55,45		57,91		53,38		54,22		
		Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	21,04	20,00	21,04		21,04		18,00		18,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Rasio Guru/ Murid SMP/MTs	Rasio	19,63	18,00	19,63		19,63		18,00		16,00		
		Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	Rasio	22,00	22,00	22,00		22,00		32,00		32,00		
1.1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	Poin	83,00	83,00	83,00	5.519.870.000	83,00	2.102.230.000	83,00	1.717.186.300	84,50	1.748.403.600	Sekretariat DISDIK
1.2	**Sasaran:**													
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,385	1,385	1,516		1,627		1566		1,642		Kepala DISPUSIPDA
	Program:													
1.2.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka	134.519	168.274	176.658	1.750.000.000	185.522	1.822.680.000	296.436	902.489.284	214.765	506.790.000	Bidang Perpustakaan DISPUSIPDA
		Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun	Orang	24.785	37.483	38.357		-		30.708		-		
			Anggota	-	-	-		41.325		-		41.325		
		Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Unit	4 unit di RW; 4 unit di Kelurahan	4 unit di RW; 4 unit di Kelurahan	30 unit di RW; 1 unit di Kelurahan		-		60 unit di RW; 1 unit di Kelurahan		-		
			Perpustakaan RW dan Perpustakaan Kelurahan	-	-	-		30; 1		-		30; 1		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah pojok baca baru di area publik	Pojok baca	0	0	5		10		5		10		
	Sasaran:													
1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,89	71,90	72,04		72,25		72,13		72,26		Kepala Dinas Kesehatan
		Cakupan jaminan kesehatan nasional	Persen	99,00	99,00	99,01		99,02		93,53		97,04		
	Program:													
1.3.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	99,60	99,61	100,00	47.003.430.800		48.872.041.825	82,98	44.339.953.127		31.740.299.278	Bid Kesmas, Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	93,76	99,96	100,00				97,85				
		Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99,53	104,86	100,00				97,32				
		Pelayanan kesehatan Balita	Persen	n.a.	92,75	100,00				97,75				
		Pelayanan kesehatan usia sekolah	Persen	93,37	97,58	100,00				97,37				
		Pelayanan kesehatan usia subur	Persen	n.a.	n.a	100,00				33,58				
		Pelayanan kesehatan usia lanjut	Persen	62,60	n.a.	100,00				92,59				
		Pelayanan kesehatan Hipertensi	Persen	50,15	50,50	100,00				57,31				
		Pelayanan kesehatan	Persen	63,53	63,57	100,00				73,47				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Diabetes Melitus												
		Pelayanan kesehatan bagi ODGJ	Persen	69,41	70,88	100,00				100,00				
		Pelayanan kesehatan bagi penderita TB, HIV-AID sesuai standar	Persen	99,40	99,40	100,00				100,00				
		Cakupan pelayanan kesehatan perorangan	Persen					92,20				92,39		
		Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen					92,20				100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat	Persen					55,00				55,00		
		Unmet need pelayanan kesehatan	Persen	8,00	8,00	7,90		7,80		7,90		7,61		
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	99,00	99,10	99,10		99,02		94,00		97,04		
1.3.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RW Siaga Aktif (dirinci menurut Strata)	RW	247	248	100,00	2.310.000.000		147.800.620	96,27	261.823.340		40.229.400	Bid Kesmas, Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		UKBM yang dilaksanakan puskesmas	UKBM					3				3		
		Cakupan PHBS yang dipantau	Persen					79,00				100,00		
		Persentase Posyandu aktif	Persen	n.a.	79,00	81,00				106,67				
		Strata posyandu purnama mandiri (Posyandu Aktif)	Persen					82,00				86,00		
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	n.a.	33,80	5,40		33,80		4,08		33,80		
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persen	7,20	5,40	5,40		5,00		0,00		5,00		
1.3.3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	2.497.500.000	100,00	2.064.738.750	99,84	1.892.425.000	100,00	1.873.446.880	Bid Kesmas, Dinas Kesehatan
		Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	Persen	83,78	82,77	65,00		70,00		81,21		72,95		
		Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif	Persen	50,00	60,15	60,00		60,00		64,38		72,84		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan remaja putri mendapatkan tablet tambahan darah	Persen					55,00				38,00		
		Cakupan balita stunting mendapat pelayanan pemantauan pertembuhan	Persen					100,00				100,00		
		Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	Persen	10,24	9,40	9,00		8,50		10,17		10,16		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	10,70	10,20	10,00		9,50		12,70		9,50		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/ balita	Persen	13,41	10,10	12,80		12,50		9,60		8,95		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/ baduta	Persen	10,56	7,78	9,80		9,50		8,16		6,47		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak	Persen	4,73	3,32	3,70		3,50		3,90		3,94		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe												
1.3.4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	Persen	89,68	90,32	90,50	3.678.640.000	90,70	863.982.900	90,21	1.109.759.650	93,70	216.544.000	Bid Kesmas, Dinas Kesehatan
		Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat	Tatanan	5	5	5		6		5		5		
		Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/ air minum memenuhi syarat	Persen	94,40	95,11	95,30		95,50		98,30		98,10		
		Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	Persen	n.a.	94,34	94,50		94,70		93,50		93,50		
		Tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan	Persen	n.a.	79,39	79,60		79,80		83,59		83,05		
1.3.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	2.548.130.000		18.375.737.220	95,73	963.128.665		6.824.021.115	Bid P2P, Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		sesuai standar												
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar	Persen	94,30	94,30	100,00				100,00				
		Universal Child Immunization (UCI)	Persen	95,50	95,50	100,00				100,00				
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA	Persen	90,00	90,00	90,00				110,00				
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	317	425	317				523				
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis	Persen	90,00	90,00	90,00				34,00				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		yang terdeteksi dalam program DOTS												
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	85,00	90,00	85,00				89,20				
		Prevalensi HIV-AIDs dari total populasi	Persen	>0,05	>0,05	>0,05				< 0,05				
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDs	Persen	30,00	n.a.	30,00				n.a.				
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka kejadian malaria	Permil	2	0	1				1				
		Cakupan Angka Kejadian Malaria	Permil					1				1		
		Cakupan Angka Bebas Jentik	Persen					95,50				95,50		
		Angka kematian akibat malaria	Persen	0,00	0,00	0,01				0,00				
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang	Persen	100,00	0,00	100,00				100,00				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		tepat												
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
		Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen					100,00				100,00		
		Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Persen	100,00	100,00	100,00				91,70				
		Cakupan Deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil	Persen					100,00				100,00		
		Angka cacat tingkat 2	Persen	0,00	0,00	5,00				14,00				
		Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Persen					85,00				85,00		
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	85,77	85,77	93,00		93,50		87,00		93,50		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persen	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	Persen	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
		Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	Kasus	993	1.364	1.203		1.203		1.670		1.203		
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	317	425	425		380		523		380		
		Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional	Persen	0,00	0,00	65,00		75,00		85,00		75,00		
		Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua	Persen	45,00	45,00	65,00		75,00		66,60		75,00		
		Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB	Persen	86,00	90,00	100,00		100,00		34,00		100,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang	Persen	15,00	15,00	70,00		80,00		45,00		80,00		
		Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan penemuan kasus TB anak	Persen	106,00	100,00	110,00		110,00		118,00		110,00		
		Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	Persen	0,00	0,00	7,00		9,00		3,00		9,00		
		Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	Persen	7,60	8,00	10,00		10,00		9,00		10,00		
1.3.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan pembinaan Lanjut Usia	Persen	60,26	51,44	50,00	75.000.000		0	50,00	21.631.000		0	Bid Kesmas, Dinas Kesehatan
1.3.7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100.000.000		75.000.000	100,00	44.813.000		21.543.400	Bid Yan SDK, Dinas Kesehatan
		Cakupan industri rumah tangga yang	Persen					22,00				22,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		dibina												
		Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat	Persen					90,00				90,00		
		Cakupan Pengawasan *Post Market*	Persen					90,00				90,00		
1.3.8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	96,00	99,61	100,00	699.329.000		0	100,00	911.855.000		0	Bid Kesmas Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,05	100,53	100,00				112,87				
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	93,76	99,96	100,00				98,38				
		Cakupan pelayanan nifas	Persen	95,36	99,41	100,00				97,25				
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	99,53	104,86	100,00				112,80				
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	94,47	92,86	100,00				93,21				
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen	85,28	87,62	100,00				98,92				
		Puskesmas melaksanakan pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		kesehatan remaja												
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	73,80	74,32	100,00				87,00				
		Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
1.3.9	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen				0	100,00	1.074.124.000		0	91,40	653.493.200	Bid Kesmas Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen					100,00				94,15		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen					100,00				94,15		
		Cakupan pelayanan nifas	Persen					100,00				94,55		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen					100,00				98,81		
		Cakupan kunjungan bayi	Persen					100,00				85,40		
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen					100,00				73,60		
		Puskesmas melaksanakan pelayanan	Persen					100,00				100,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		kesehatan remaja												
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen					100,00				54,18		
		Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia	Persen					100,00				81,12		
1.3.10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	15,40	15,40	21,80	822.500.000	15,40	790.000.000	21,46	3.948.321.540	15,40	66.475.500	Bidang P2P Dinas Kesehatan
		Prevelensi Tekanan Darah Tinggi	Persen					22,80				22,90		
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	100,00	100,00				34,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen					100,00				12,52		
		Pelayanan kesehatan Lansia	Persen	100,00	100,00	100,00				71,77				
		Cakupan Pelayanan kesehatan Lansia	Persen					100,00				12,52		
		Pelayanan kesehatan penderita	Persen	100,00	100,00	100,00				57,31				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		hipertensi												
		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen					100,00				74,74		
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persen	100,00	100,00	100,00				73,47				
		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen					100,00				98,00		
1.3.11	Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan	Penanganan KLB <24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00	2.057.600.000		605.272.400	99,48	403.772.900		740.031.700	Bid P2P, Dinas Kesehatan
		Cakupan desa/kelurahan yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemologi (PE) < 24 jam	Persen					100,00				100,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		A F P (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk <15 tahun	Per 100.000 Kasus	4	4	2				0				
		Cakupan penemuan kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP)	Per 100.000 Kasus					2				n.a.		
		Proporsi kematian akibat keracunan	Persen	n.a.	n.a.	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri	Persen	n.a.	n.a.	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Angka Bebas Jentik	Persen	95,00	n.a.	95,00				0,00				
1.3.12	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	B O R	Persen	58,90	62,81	76,00	426.880.027.939		0	65,54	316.209.577.924		0	RSD GunungJati
		L O S	Hari	3,40	4,14	4,30				4,30				
		T O I	Kali	1,00	2,41	1,10				1,10				
		B T O	Kali	37,45	56,35	37,45				37,45				
		G D R	Persen	38,00	68,00	55,00				78,18				
		N D R	Per mil	24,00	43,00	23,75				56,84				
		Pelayanan Gawat Darurat	Persen				0	100,00	354.500.000.000		0	95,80	183.585.800.200	Dinas Kesehatan/Wadir Yan Med.RSD Gunung Jati
		Pelayanan Rawat Jalan	Persen					75,00				94,50		
		Pelayanan Rawat Inap	Persen					100,00				86,50		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Pelayanan Bedah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Persalinan dan Perinatalogi	Persen					100,00				73,00		
		Pelayanan Intensif	Persen					100,00				82,00		
		Pelayanan Radiologi	Persen					65,00				64,00		
		Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	Persen					95,00				93,00		
		Pelayanan Rehabilitasi Medik	Persen					85,00				93,00		
		Pelayanan Farmasi	Persen					70,00				93,30		
		Pelayanan Gizi	Persen					85,00				93,30		
		Pelayanan Transfusi Darah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Keluarga Miskin	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Rekam Medis	Persen					70,00				74,50		
		Pengolahan Limbah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Ambulans / Kereta Jenazah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Laundry	Persen					85,00				99,90		
		Pencegahan Pengendalian Infeksi	Persen					80,00				95,50		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Administrasi dan Manajemen	Persen					55,00				66,70		
		Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Persen					85,00				76,00		
1.3.13	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100,00	100,00	100,00	28.065.374.000		0	97,76	27.436.543.375		0	RSD Gunung Jati
1.3.14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin	Persen	100,00	100,00	100,00	26.489.031.186	100,00	20.744.712.000	85,01	14.916.734.000	100,00	21.849.353.500	Dinas Kesehatan/ RSD Gunung Jati
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD)	Persen	60,00	60,00	100,00		100,00		56,00		100,00		
1.3.15	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung	Akreditasi Rumah Sakit	Strata	Paripurna	Paripurna	Paripurna	1.000.000.000	Paripurna	1.200.000.000	n.a.	0	n.a.	0	Dinas Kesehatan/ RSD Gunung

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Jati sebagai Rumah Sakit Pendidikan													Jati
1.3.16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	Persen	n.a.	100,00	100,00	5.365.000.000		2.645.000.000	99,20	23.169.855.616		3.229.934.650	Bid Yankes, Dinas Kesehatan
		Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus)	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan sarana yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	Persen					84,00				85,00		
		Cakupan sarana kefarmasian yang dibina	Persen					92,00				92,00		
		Puskesmas yang melaksanakan GemaCermat	Unit					20				18		
		Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Persen	n.a.	10,00	40,00		40,00		51,00		40,00		
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Orang	69	48	45		45		67		45		
		Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	n.a.	30	20		20		19		20		
		Prevalensi penyalahguna an narkoba	Persen	n.a.	n.a.	1,77		1,77		1,80		1,77		
		Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen	n.a.	n.a.	1,70		1,70		0,00		1,70		
1.3.17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	15.623.540.000		15.335.000.000	90,61	5.177.125.695		13.191.021.860	Bid Yankes, Dinas Kesehatan
		· B O R	Persen	58,90	58,90	61,00		63,00		60,6		42,09		
		· L O S	Hari	3,7	3,4	6,2		6,4		3,2		2,3		
		· T O I	Kali	2,50	1,00	1,20		1,40		2,00		5,14		
		· B T O	Kali	60,39	37,45	37,45		37,45		70,70		10,92		
		· G D R	Per mil	38,07	38,00	45,00		46,00		35,10		14,84		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		· N D R	Per mil	24,07	24,00	25,00		25,00		15,8		5,69		
		Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi utama	Unit					2				3		
		Jumlah Layanan BLUD	Unit					1 RS; 22 Puskesmas				1 RS; 0 Puskesmas		
1.3.18	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompetensi	Persen	n.a.	56,00	56,00	1.152.725.300		1.152.725.300	25,75	96.089.500		83.695.000	Bid Yankes, Dinas Kesehatan
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang/10 0.000 penduduk					8,91				11,03		
		Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	n.a.	80,00	82,50		82,50		79,00		100,00		
	Sasaran:													
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,91	0,94	0,67		0,67		0,96		1,34		Kepala Dinas DALDUK & KB
	Program:													
1.4.1	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kampung KB	Persen	22.73	22,73	100,00	728.864.000	50,00	375.000.000	36,36	246.819.000	109,09	128.817.496	Bidang Kesej. dan Ketahanan Keluarga DALDUK-KB
1.4.2	Program Keluarga Berencana	*Current Use* / Pasangan Usia Subur	Persen	60,92	63,11	62,00	5.130.000.000	61,81	3.522.000.000	63,38	1.975.807.456	64,29	2.444.188.236	Bidang Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 persen	Persen	3,50	0,25	3,45		3,40		0,11		0,12		DALDUK-KB
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	96,14	105,94	94,56		92,71		80,29		97,34		
		Rasio akseptor KB	Rasio	14,97	14,95	14,60		14,72		13,44		12,08		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need*	Persen	23,02	20,11	18,90		18,53		20,06		18,99		
		Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif	Persen	26,94	26,44	25,98		25,99		26,27		26,20		
1.4.3	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaat-kan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	n.a.	25,81	100,00	3.550.000.000		360.000.000	27,58	85.929.000		102.417.488	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DISDALDUK-KB
		Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk	Peragkat Daerah					19				29		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	n.a.	0	1				n.a.				
		Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data Profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Persen	n.a.	0,00	100,00				n.a.				
		Jumlah Kerjasama Penyelenggara-an pendidikan pormal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	SMP	n.a.	n.a.	17				n.a.				
			SMA	n.a.	n.a.	9				n.a.				
			Universitas	n.a.	n.a.	3				n.a.				
1.4.4	Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB	Persen	4,53	100,00	100,00	500.000.000	68,28	460.000.000	100,00	100.956.000	100,00	31.461.750	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak an DISDALDUK-KB
	Sasaran:													

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.5	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,45	68,03	69,03		69,81		62,71		63,75		Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,29	9,06	8,83		8,60		9,04		10,97		
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	90,71	90,94	91,14		91,34		91,02		89,03		
	Program:													
1.5.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	48,84	54,99	75,00	1.280.000.000	67,50	1.070.000.000	75,00	268.200.500	67,50	266.380.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; UPT Latihan Tenaga Kerja DISNAKER
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	Persen	75,00	34,69	60,00		45,00		60,00		45,00		
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	Persen	30,00	54,55	60,00				60,00				
1.5.2	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	49,60	47,09	30,00	775.000.000	47,50	565.000.000	30,00	307.079.460	47,50	190.701.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja DISNAKER
1.5.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per	Kasus	10,08	5,27	10	400.000.000	6	308.000.000	8	155.000.000	6	58.256.800	Bidang Hubungan Industrial DISNAKER

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Ketenagakerjaan	Tahun												
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	60,00	56,50	60,00		61,00		60,00		61,00		
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	66,64	77,86	55,00		78,50		55,00		78,50		
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	Persen	0,00	0,00	100,00		0,00		100,00		0,00		
	Sasaran:													
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	2	na	2		4		2		0		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	50,00	50,00	50,00		55,00		46,30		61,11		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Program:													
1.6.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana olahraga yang representatif	Persen	40,00	50,00	50,00	600.000.000	50,00	250.000.000	50,00	199.166.000	66,00	532.433.760	UPT PPOR pada DKOKP
1.6.2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	75,00	95,00	100,00	3.380.000.000	100,00	3.557.000.000	100,00	1.293.291.550	100,00	67.722.500	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, DKOKP
		Cakupan pelatih olahraga bersertifikasi	Persen	33,00	56,00	50,00		55,00		56,00		55,00		
		Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	17,00	31,00	20,00		30,00		31,00		30,00		
		Jumlah atlet berprestasi	Atlet	3	6	10		12		2		18		
		Jumlah prestasi Cabang olahraga	Cabor	2	4	10		11		2		11		
1.6.3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	50,00	50,00	50,00	1.000.000.000	-	1.300.000.000	46,30	449.186.960	-	533.839.750	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, DKOKP
		Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1.681	1:1.681	1:1.500		1:1.500		1:1.422		1:1.025		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.6.4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda	Persen	50 wirausaha muda	50,00	50,00	150.000.000	50,00	175.000.000	0,00	0	27,00	85.619.000	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, DKOKP
	Sasaran:													
1.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,94	93,94	94,20		94,28		94,35		*)		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,23	73,97	75,53		76,26		77,86		*)		
	Program:													
1.7.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG, Kelembagaan perlindungan perempuan	Satgas PKDRT	4	4	4	400.000.000			4	97.851.000			Bidang PP dan Bidang PA DINSOSPP-PA
			Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
1.7.2	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	Perangkat Daerah	3	3	3	650.000.000			3	56.459.800			Bidang PP dan Bidang PA DINSOSPP-PA
			KK	100	100	100				100				
			Orang PEKKA	25	25	25				25				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.7.3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit pelayanan terpadu (UPT)	Persen	100,00	100,00	100,00	950.000.000	100,00	926.607.960	100,00	403.014.950	n.a.	290.834.500	Bidang PP dan Bidang PA DINSOS PP-PA
		Penguatan Kelembagaan PUG	Pokja PUG					1				1		
		Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Satgas PKDRT					4				4		
		Meningkatnya impelmentasi PUG pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					3				3		
		Cakupan RW layak anak	Persen					4,44				6,43		
		Cakupan Penaganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen					100,00				100,00		
	Sasaran:													
1.8	Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian	Kontribusi PDRB dari sektor industri	Persen	10,25	10,20	10,30		10,31		10,08		10,21		Dinas Perdagangan dan KUKM
		Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	Persen	31,61	31,51	31,86		32,11		31,43		29,73		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Kota Cirebon													
	Program:													
1.8.1	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Meningkatnya pengenalan penjualan dan pemasaran produk IKM	IKM	125	160	25	250.000.000	174	1.800.000.000	26	165.973.000	-	12.493.200	Bid Perindustrian, DPK-UKM
1.8.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persen	72	72	100	500.000.000	80	250.000.000	112,5	51.077.000	-	0	Bid Perindustrian DPK-UKM
1.8.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembang-nya Produk Ekspor	Persen	58,33	58,33	60,33	750.000.000	62,33	375.000.000	62,64	247.283.272	-	0	DPK-UKM (Eselon III)
1.8.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	67	69	69,5	1.160.000.000	72	725.000.000	65	211.065.000	100	137.411.000	DPK-UKM (Eselon III)
1.8.5	Program Metrologi Legal	Cakupan wajib tera/ tera ulang dan alat UPTP	Persen	75	77,95	80	3.039.800.000	82	450.000.000	80	2.580.000	72	151.331.900	DPK-UKM
1.8.6	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Updating Data PKL di 5 Kecamatan	PKL	489 PKL	48	200	450.000.000	200	450.000.000	200	777.663.000	200	156.000.000	Bidang Koperasi dan UMKM, DPKUKM
		Optimalisasi Pelaksanaan Perda PKL	Persen	100	100	100		-		100		-		
		Tingkat Pelanggaran PKL Menurun	Persen	45,86	n.a.	40		-		33,13		-		
		Meningkatnya Jumlah PKL yang Dibina	PKL	489	489	200		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.8.7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Peningkatan Modal Usaha UMKM	Persen	11,37	13,12	25	400.000.000	200	750.000.000	26,37	81.523.000	-	0	Bidang Koperasi dan UMKM, DPKUKM
1.8.8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Unit	236	540	243	4.490.500.000	250	1.150.000.000	243	449.144.000	257	423.397.000	Bidang Koperasi dan UMKM, DPKUKM
1.8.9	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	Peningkatan pasar rakyat ber SNI	Unit Pasar	0	0	1	75.000.000	-	0	0	0	-	0	Bidang Bina Perdagangan, DPKUKM
	Sasaran:													
1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Perentase penduduk miskin	Persen	9,66	8,88	8,53		8,18		8,41		9,52		Kepala Diinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program:													
1.9.1	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PMKS	Persen	n.a.	n.a.	2 MoU	400.000.000	65,00	1.885.000.000	2 MoU	121.137.935	58,28	33.500.000	Bidang Sosial, Dinsos PPPA
1.9.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	65,00	65,00	65,00	4.310.000.000	58,28	400.000.000	65,00	398.655.000	65,00	466.963.500	Bidang Sosial, Dinsos PPPA
1.9.3	Program Satu Data Keluarga	Data Base keluarga	Dokumen	1	0	1	300.000.000	2	600.000.000	n.a.	0	2	291.360.100	Bidang Sosial, Dinsos PPPA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Miskin	miskin yang valid												
1.9.4	Program Penanggulangan Korban bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	800.000.000	100,00	400.000.000	100,00	154.485.000	100,00	1.353.129.800	Bidang Sosial, Dinsos PPPA
	Sasaran:													
1.10	Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	77,80	84,00	79,90		80,90		84,00		90,20		Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian.	Persen	0,33	0,33	0,33		0,33		0,33		0,34		
	Program:													
1.10.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/ kapita/ hari;	E=2.748	E=3.598	E=2.400	302.688.000	E=≥2.400	675.414.300	E=3.669	245.953.000	E=3.598	1.171.766.600	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, DPPKP
			kkal/ kapita/ hari	P=73,92	P=97,82	P=63		P=≥63		P= 94.88		P = 97,82		
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	Persen	100,00	100,00	90,00		90,00		100,00		100,00		
		Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	Persen	100,00	100,00	90,00		90,00		100,00		100,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100,00	100,00	60,00		-		100,00		100,00		
		Penguatan Cadangan Pangan	Persen	25,00	45,00	60,00		-		27.62		54,85		
1.10.2	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Konsumsi	Poin	80,1	77,8	79,9	414.655.000	-	1.318.088.400	n.a.	287.825.000	n.a	382.255.600	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, DPPKP
		Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	93,97	94,65	85,00		-		n.a		n.a		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	85,00	n.a.	86,00		87,00		97,50		96,37		
		Penurunan konsumsi beras	kg/kap/hr	95,80	95,80	94,00		93,00		89.40		95,80		
		Peningkatan konsumsi pangan hewani	kg/kap/hari	39,10	39,10	41,00		43,00		38.30		43,60		
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah	gr/kap/hari	125,75	125,75	179,00		181,00		202.40		231,30		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Peningkatan konsumsi umbi-umbian	gr/kap/hr	27,00	27,00	28,00		30,00		27.60		25,90		
1.10.3	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Kegiatan	n.a.	n.a.	1	78.240.000			n.a.	81.890.000			Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, DPPKP
		Partisipasi Perangkat Daerah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Persen	n.a.	n.a.	50,00				n.a.				
		Jumlah Advokasi	Kali/tahun	n.a.	n.a.	2				n.a.				
		Meningkatnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Persen	n.a.	n.a.	100,00				100,00				
1.10.4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	Jenis hasil olahan	1	1	1	110.000.000	1	121.000.000	1	108.954.000	1	3.446.000	Bidang Pertanian dan Peternakan, DPPKP
1.10.5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktifitas Padi	Ton/hektar	4,7	5,3	4,7	1.585.328.100	4,75	3.735.208.430	5,9	1.557.685.767	6	600.130.000	Bidang Pertanian dan Peternakan, DPPKP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.10.6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak :					1.027.872.400		2.130.659.640		971.202.950		1.001.453.500	Bidang Pertanian dan Peternakan
		· Daging sapi	Kg	235.731	155.000	155.000		162.000		435.999		504.414		
		· Daging babi	Kg	91.011	65.000	65.000		66.000		94.315		98.851		
1.10.7	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/ ternak	Ekor	500	420	500	249.200.000	525	274.120.000	539	243.796.900	50530	159.721.000	Bidang Pertanian dan Peternakan, DPPKP
1.10.8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3% pertahun	Ton	5.172	3.397	3.400	106.064.000	3.450	116.670.400	6.821	105.664.000	6.003,475	75.569.600	Bidang Kelautan dan Perikanan, DPPKP
1.10.9	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 3% pertahun	Ton	316,68	162	250	854.710.000	257	1.164.220.550	180,29	835.655.500	206	925.005.000	Bidang Kelautan dan Perikanan, DPPKP
1.10.10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	kg/kapita / tahun	33,42	33,00	33,00	61.087.000	33,10	64.141.350	33,47	59.971.000	n.a.	0	Bidang Kelautan dan Perikanan, DPPKP
	Sasaran:													
1.11	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Persen	5,29	5,36	5,55		5,63		5,37		5,10		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program:													
1.11.1	Program Pengembangan	Meningkatnya Jumlah	Orang	1.033.642	1.080.544	2.000.000	6.400.000.000	2.100.000	3.500.000.000	1.505.207	1.724.417.380	568.571	4.080.204.000	Bidang Kepariwisataan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Kepariwisataan	Kunjungan Wisatawan 80%												, DKOKP
		Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	Hari	1	1	2		2		1		2		
	Sasaran:													
1.12	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0		0		0		0		Kantor Kesbang Pol Dagri
	Program:													
1.12.1	Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Nol Persen kasus SARA dan kasus terorisme	Persen	100	100	100	566.850.000	-	240.000.000	100	158.443.500	-	500.000	Kesbang Pol Dagri.
		Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	n.a.	150 orang	50		60		-		60		
	Sasaran:													
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	69,60	n.a.	71,81		74,01		53,69		60,80		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program:													

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.13.1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	MoU Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	MoU	1	3	1	500.000.000	3	600.000.000	1	277.536.000	-	0	Bidang Kebudayaan, DKOKP
1.13.2	Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Even	14	15	15	3.632.500.000	15	4.459.950.000	15	1.573.661.000	15	956.187.800	Bidang Kebudayaan, DKOKP
		Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar budaya	48	62	62		62		62		62		
		Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	Karya budaya	1	1	1		1		1		0		
		Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Obyek	6	10	10		10		7		10		
	Sasaran:													
1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	Tingkat perkembangan kelurahan :												Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kota Cirebon:												
		Kurang berkembang	Kelurahan	0	0	0		0		0		0		
		Berkembang	Kelurahan	8	8	8		9		7		7		
		Cepat berkembang	Kelurahan	13	13	13		13		15		15		
		Meningkatnya kualifikasi status kelurahan :												
		Kec. Kesambi:												Kecamatan Kesambi
		Swakarya Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		1		0		
		Swakarya Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		1		1		
		Swakarya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Lanjut												
		Swasembada Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		4		3		4		
		Swasembada Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Kec. Pekalipan												Kecamatan Pekalipan
		Swakarya Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		2		2		0		
		Swakarya Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		2		0		
		Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		0		0		
		Swasembada Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		4		
		Swasembada Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Kec. Kejaksan												Kecamatan Kejaksan
		Swakarya Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swakarya Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		2		2		4		
		Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		2		2		0		
		Swasembada Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
										0				
		Kec. Harjamukti												Kecamatan Harjamukti
		Swakarya Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		1		1		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Swakarya Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		3		3		3		
		Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		1		0		
		Swasembada Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		1		
		Swasembada Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Kecamatan Lemahwungkuk												Kecamatan Lemahwungkuk
		Swakarya Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		1		2		
		Swakarya Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		2		2		1		
		Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		1		1		1		
		Swasembada Mula	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Madya	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
		Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a.	n.a.	0		0		0		0		
	Program:													
1.14.1	Program Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/ LPM	Kelompok					2	1.705.000.000			n.a.	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinsos PPPA.
		Persentase LPM Berprestasi	Persen					13,60				n.a.		
		Persentase Posyandu aktif	Persen					85,00				n.a.		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen					14,00				n.a.		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen					40,00				n.a.		
		Persentase PKK aktif	Persen					100,00				n.a.		
1.14.2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina:					215.951.000				233.891.000			Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinsos PPPA.
		· Wartek	Unit	22	22	2				2				
		· Kelompok	Kelompok	28	28	28				28				
		· Posyandu	Unit	331	331	331				331				
1.14.3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	RW	248	248	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	768.382.000			Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	611.865.780			Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinsos PPPA.
		Meningkatnya swadaya masyarakat dalam bantuan RW	RT	1.369	1.369	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya				Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya				
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam BSMSS dan BBRGM	LPM	22	22	22				22				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.14.4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Keikutsertaan Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi/ Nasional	Persen	22 Kelurahan	22 Kelurahan	100,00	625.000.000			100,00	237.088.200			Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinsos PPPA.
1.14.5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di bina	Persen	100,00	100,00	100,00	456.618.000			100,00	1.790.437.000			Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinsos PPPA.
1.14.6	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan, bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah Kecamatan Kesambi	Persen	n.a.	98,31	70,00	2.689.747.500			100,00	2.397.144.400			Kecamatan Kesambi
1.14.7	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Rasio Juara lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	Rasio	Juara III MTQ Kota Cirebon	97,58	20,00	392.727.500			5 Cabang 24 Orang	416.044.500			Kecamatan Kesambi
1.14.8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan posyandu strata mandiri	Persen	23,00	99,87	35,00	182.500.000			13,97	250.277.200			Kecamatan Kesambi
1.14.9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Kesambi dan persentase	Persen	n.a.	97,18	57,00	1.723.278.271			100,00	1.790.437.000			Kecamatan Kesambi

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		masyarakat di Kec. Kesambi yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi												
1.14.10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi/jumlah prestasi olahraga	Atlet	n.a.	n.a.	1	309.000.000			1	73.961.000			Kecamatan Kesambi
1.14.11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir Musrenbang Kecamatan	Persen	99,27	70,00	70,00	110.000.000			100,00	119.873.000			Kecamatan Kesambi
1.14.12	Program RW Bersih	Rasio RW K3	Rasio	n.a.	96,41	30,00	112.200.000			100,00	79.561.600			Kecamatan Kesambi
1.14.13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kec	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan	Poin	84,00	93,66	85,00	64.000.000			100,00	237.088.200			Kecamatan Kesambi
1.14.14	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kesambi	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan					0	8.079.600.000			0	5.353.582.100	Kecamatan Kesambi
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					1				1		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					4				4		
		Kelurahan Swasembada	Kelurahan					0				0		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Madya												
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
1.14.15	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan dan saluran drainase	Persen	90,00	99,39	100,00	1.322.000.000			93,75	1.161.869.000			Kecamatan Pekalipan
1.14.16	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	20.678.600			100,00	16.975.000			Kecamatan Pekalipan
1.14.17	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Posyandu	Persen	Juara III Tingkat Kota	97,54	100,00	197.033.000			90,00	166.286.000			Kecamatan Pekalipan
1.14.18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan se-Kecamatan Pekalipan	Persen	100,00	97,00	100,00	1.813.000.000			85,71	1.806.924.800			Kecamatan Pekalipan
1.14.19	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Kelurahan se-Kec. Pekalipan	Persen	100,00	99,02	100,00	276.604.000			100,00	314.703.000			Kecamatan Pekalipan
1.14.20	Program RW bersih	Terlaksananya program RW bersih di tingkat Kecamatan Pekalipan	Persen	n.a.	81,28	31,00	181.870.000			100,00	178.920.000			Kecamatan Pekalipan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.14.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodir-nya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	120.677.000	-	0	100,00	142.884.000	-	0	Kecamatan Pekalipan
1.14.22	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Pekalipan	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan					1	4.082.000.000			0	4.395.197.300	Kecamatan Pekalipan
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					2				0		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					1				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				4		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
1.14.23	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur	Persen	100,00	99,43	100,00	3.752.497.100			100,00	2.691.352.500			Kecamatan Harjamukti
1.14.24	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100,00	100,00	80,00	184.239.000			100,00	151.924.000			Kecamatan Harjamukti
1.14.25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Persen	98,15	98,15	80,00	1.854.756.500			71,91	2.371.882.000			Kecamatan Harjamukti

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.14.26	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	Persen	99,24	99,24	32,00	282.639.500			100,00	197.597.000			Kecamatan Harjamukti
1.14.27	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	93,35	93,35	70,00	370.686.500			82,86	202.260.000			Kecamatan Harjamukti
1.14.28	Program Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	100,00	100,00	30.937.500			100,00	23.500.000			Kecamatan Harjamukti
1.14.29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggara-nya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	141.988.000			100,00	183.915.000			Kecamatan Harjamukti
1.14.30	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Harjamukti	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan					0	5.972.100.000			1	6.994.816.431	Kecamatan Harjamukti
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					4				3		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					1				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				1		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
1.14.31	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi drainase dan jalan perumahan dalam kondisi baik	Persen	98,44	98,81	100,00	1.430.000.000			100,00	1.243.629.000			Kecamatan Kejaksan
1.14.32	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Bertambahnya wirausaha muda	Orang	n.a.	n.a.	60	380.500.000			100,00	197.362.627			Kecamatan Kejaksan
1.14.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan LKK aktif	Persen	100,00	98,75	100,00	172.000.000			100,00	1.646.490.300			Kecamatan Kejaksan
1.14.34	Program RW Bersih	Rasio RW K3	Rasio	97,34	99,17	75,00	166.000.000			100,00	181.873.000			Kecamatan Kejaksan
1.14.35	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Lestarinya adat budaya daerah	Persen	85,00	99,87	95,00	59.400.000			67,00	40.009.000			Kecamatan Kejaksan
1.14.36	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Peringkat MTQ tingkat Kota Cirebon	Peringkat	n.a.	n.a.	III	322.700.000			III	371.253.732			Kecamatan Kejaksan
1.14.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir Musrenbang Kota	Persen	100,00	99,61	100,00	122.000.000			100,00	117.320.000			Kecamatan Kejaksan
1.14.38	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan					0	4.408.737.750			0	4.252.133.700	Kecamatan Kejaksan
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					2				4		
		Kelurahan Swakarya	Kelurahan					2				0		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Kecamatan Kejaksan	Lanjut												
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
1.14.39	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/bangunan fasilitas umum, dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan Lemahwungkuk	Persen	100,00	99,00	100,00	1.946.000.000			53,44	1.654.927.500			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.40	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan Posyandu di RW	Persen	95,00	100,00	100,00	185.478.477			83,00	88.615.000			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.41	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk;	Persen	95,00	98,00	100,00	1.917.652.652			98,00	205.876.670			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.42	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan	Persen	n.a.	100,00	29,00	100.175.175			100,00	74.800.000			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.43	Program	Terpeliharanya	Triwulan	n.a.	94,00	4	180.000.000			4	104.564.600			Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Pengelolaan Keragaman Budaya	seni budaya daerah			persen									Lemahwungkuk
1.14.44	Program Peningkatan Kompetensi keagamaan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	n.a.	95,00	100,00	186.285.285			100,00	221.867.000			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.45	Program kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	79,00	100,00	150.840.000			75,00	5.670.000			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.46	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggara-nya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	79.330.330			100,00	78.905.000			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.47	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terselenggara-nya pekan olahraga se-Kec. Lemahwungkuk	Persen	100,00	94,00	100,00	90.000.000			14,29	885.000			Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.47	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan					0	4.408.737.750			2	6.118.051.500	Kecamatan Lemahwungkuk
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					2				1		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					2				1		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Barsih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif														
	Tujuan:													

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan Inovasi dalam manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	49,95	57,29	60,00		65,00		71,00		76,54		Asisten Administrasi Umum
2.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	0,64	8,00	12,40		13,70		26,08		25,72		BKPPD
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	78,50	80,00	80,50		81,00		80,35		80,77		
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	85,00	86,50	87,00		89,00		92,72		92,72		
		Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	77,94	70,30	80,00		90,00		100,00		100,00		
	Program:													
2.1.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi (Eselon	Orang	0	5	3	5.650.000.000	3	4.225.000.000	3	1.465.809.057	3	1.674.759.128	Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		II) pada Perangkat Daerah												Negara; UPT Fasilitasi Kelembagaan KORPRI BKPPD
		Jumlah Jabatan kosong Administrator (Eselon III) pada Perangkat Daerah	Orang	0	20	47		21		47		21		
		Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada PD	Orang	0	68	68		44		68		44		
		Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah	Orang	0	22	22		267		22		267		
2.1.2	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,57	3,00	3,00	8.633.800.000	3,50	6.950.000.000	3,81	4.427.737.600	1,27	1.023.647.400	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir BKPPD
		Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	60,46	80,00	60,00		62,00		10,79		11,73		
	Sasaran:													
2.2	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	45,00	45,00	80,00		85,00		80,00		100		Asisten Administrasi Umum

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	na	0,00	0,00		25,00		0,00		32,00		
	Program:													
2.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	3.540.000.000	100,00	4.440.000.000	100,00	2.420.150.860	100	1.555.947.000	Bagian Umum SETDA
2.2.2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Dokumen	53	81	10	1.100.000.000	10	880.000.000	38	266.087.883	26	35.140.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA
2.2.3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari Rancangan Perda dan Rancangan PerWal	Persen	58,62	48,00	65,00	1.958.500.000	50,00	1.125.000.000	84,00	589.248.000	75	277.272.000	Bagian Hukum dan HAM SETDA
2.2.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PNS yang memiliki nilai jabatan	Persen	0,00	0,00	100,00	900.000.000	100,00	310.000.000	100,00	170.182.000	100	130.200.000	Bagian ORPAD SETDA
2.2.5	Program Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan	Persen	100,00	100,00	100,00	1.700.000.000	100,00	770.000.000	100,00	383.235.500	100	221.258.000	Bagian ORPAD SETDA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		mekanisme kerja												
2.2.6	Program Pembinaan Pemerintahan	Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Pilar	7	29	-	220.000.000	-	150.000.000	-	14.312.000	-	6.540.000	
			Titik	-	-	8		-		14		-		
		Persentase kelurahan yang memiliki peta wilayah	Persen	-	-	-		100,00		-		-		Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA
		Persentase pilar batas yang dibangun/dipelihara	Persen	-	-	-		38,00 (36 pilar dari 93 titik)		-		15		
2.2.7	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Dokumen	196	228	12	2.685.000.000	12	855.000.000	5	340.060.300	12	269.136.000	Bagian Administrsi Pemerintahan Umum; Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan Bagian Hukum dan HAM SETDA
2.2.8	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Dokumen	78	96	18	5.680.000.000	18	2.900.000.000	25	980.425.647	18	724.290.200	Bagian Administrasi Barang dan Jasa; Bagian Administrasi Pembangunan;
		Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap Belanja Pengadaan Barang dan	Persen	n.a.	100,00	100,00		100,00		-		-		Bagian Administrasi Perekonomian SETDA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Jasa												
2.2.9	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Pengajian rutin bulanan dan mingguan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kali	204	252	12	935.000.000	-	0	12	231.628.500	-	0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
2.2.10	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen	49,00	82,00	85,00	330.000.000	-	0	75,00	33.125.500	-	0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
2.2.11	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Cabang Musaba-qoh	3	5	5	3.155.000.000	-	0	4	535.805.500	-	0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen	-	-	-	0	85,00	2.550.000.000	-	-	85	180.560.500	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
		Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	-	-	-		18,00		-		14		
		Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba STQ Tingkat	Peringkat	-	-	-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Provinsi Jawa Barat												
2.2.12	Program Kerukunan Umat Beragama	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Hari Besar	6	6	6	935.000.000	-	0	6	182.681.500	-	0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
2.2.13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti	Persen	20,00	20,00	25,00	750.000.000	30,00	750.000.000	25,00	312.094.010	30	127.241.000	Bagian Umum SETDA
2.2.14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada SBBD dan Standar satuan Harga Barang/Jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	930.000.000	-	0	100,00	398.814.000	-	0	Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Administrasi Pembangunan SETDA
		Standar biaya belanja daerah SBBD dan Standar satuan harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA dan DPA	Dokumen	-	-	-	0	2	700.000.000	-		2	174.645.000	
	Sasaran:													
2.3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai AKIP A	Nilai	62,05	n.a	B		B		B		B		Asisten Administrasi Umum
		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam	Nilai	8,71	9,89	10,00		10,25		9,98		9,57		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Evaluasi atas AKIP												
	Program:													
2.3.1	Program Pembinaan Administrasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kota Cirebon	Skor	B	B	B	1.840.000.000	-	0	B	165.249.000	-	0	Bagian ORPAD; Bagian Umum; Bagian Keuangan dan Perlengkapan SETDA
		Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persen	-	-	-	0	85,00	790.000.000	-	0	100	119.973.600	
	Sasaran:													
2.4	Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	1	2		3		1 ,7		3		Inspektur Daerah
	Program:													
2.4.1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kompetensi APIP Kota Cirebon	Persen	100	100	100	473.850.000	-	0	100	458.288.000	-	0	Inspektorat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
2.4.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Terhadap Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	618.534.000	-	908.640.000	93,49	312.094.010	-	796.729.843	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40	42,5	50		60		74,46		93,49		
		Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		100		
	Sasaran:													
2.5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Poin	73,90	78,87	73,00		74,00		82,85		82,76		DPMPTSP
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Poin	77,28	78,00	80,00		82,00		80,00		77,75		Disduk Capil
	Program:													
2.5.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi	Jenis Investasi	0	0	1	560.000.000	-	395.000.000	1	79.768.000	-	58.968.000	DPMPTSP
			Even	-	-	-		1		-		1		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
2.5.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN)	Persen	n.a.	n.a.	30 % dari tahun sebelum nya	340.000.000	-	53.103.750	1,00	33.334.600	-	103.823.400	DPMPTSP
			Perusa-haan	-	-	-		216		-		216		
2.5.3	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen	Poin	73,9	78,87	75	830.000.000	-	742.924.350	82,65	459.863.000	-	325.586.600	DPMPTSP
		Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	Perwal/ Kepwal	1	n.a.	1		1		2		1		
2.5.4	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	95,00	95,00	95,00	1.130.000.000	96,00	1.365.000.000	99,00	1.069.401.407	99,00	1.246.157.545	Disduk Capil
		Cakupan Penerbitan KK	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.5.5	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	88,00	88,00	88,00	150.000.000	96,00	95.000.000	83,00	54.883.800	87,88	137.890.000	Disduk Capil
		Cakupan Akta Kematian	Persen	80,00	80,00	80,00		81,00		76,53		90,00		
2.5.6	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	10,00	10,00	18,00	343.170.000	9,00	205.000.000	13,00	162.728.000	10,00	196.569.200	Disduk Capil
	Sasaaran:													
2.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Keuangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Persen	31,93	30,95	30,53		29,06		32,67		27,04		
	Program:													
2.6.1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	Persen	22,26	-0,79	23	3.750.000.000	10	5.092.876.400	-1,41	4.806.571.654	10	2.271.980.759	Bid PAD I pada BKD
2.6.2	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	3.195.000.000	-	0	WTP	1.484.493.791	-	0	Bid Akuntansi BKD
2.6.3	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	Persen	100	100	100	430.000.000	-	2.647.168.100	-	376.547.000	-	2.443.742.153	Bidang Penganggaran dan Bidang Aset Daerah BKD
		Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu/ tdk tepat waktu	-	-	-	0	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat Waktu		
2.6.4	Program peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	Tepat waktu/ tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	2.921.900.500	Tepat waktu	2.042.593.550	Tepat waktu	1.066.203.650	Tepat Waktu	1.012.614.020	Bidang Penganggaran BKD
2.6.5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	90	90,68	90	1.341.356.000	90,5	1.317.311.520	91,24	887.465.400	90,5	672.967.620	Bidang Perbendaharaan + Bidang PAD II BKD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Sasaran:													
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Poin	74,09	77,09	80,10		83,15		83,18		83,18		Kepala DISPUSIPDA
	Program:													
2.7.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Sistem Penyimpanan sesuai standar; Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan	Dokumen	2	2	4	280.000.000	-	199.481.000	4	95.110.000	-	121.918.000	Bidang Kearsipan Dispusipda
		Sistem Penyimpanan sesuai standar	Perangkat Daerah	-	-	-		6		-		6		
		Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan (Perkada/ Perwal)	Dokumen	-	-	-		5		-		-		
2.7.2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen.a.rsip Daerah	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	1.184	3.834	471	975.000.000	550	227.047.000	471	194.993.000	550	162.909.000	Bidang Kearsipan Dispusipda
2.7.3	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Arsip yang terpelihara	Berkas	n.a.	8.324	15.824	100.000.000	23.324	63.510.000	15.824	53.962.900	23.324	48.940.000	Bidang Kearsipan Dispusipda
		Jenis sarana dan prasarana kearsipan yang	Jenis	-	-	-		8		-		8		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		terpelihara												
2.7.4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	Persen	70,00	70,00	60,00	960.000.000	70,00	150.000.000	30,00	146.649.250	70,00	38.805.000	Bidang Kearsipan Dispusipda
	Sasaran:													
2.8	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda	Persen	44,00	55,00	70,60		72,20		70,00		72,20		Sekretaris DPRD
		Rasio jumlah Keputusan/ Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100	100	100		100		75,00		100,00		
		Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	59,70	60,00	62,50		65,00		42,01		65,00		
	Program:													
2.8.1	Program Peningkatan Kapasaitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD;	Persen	74,5	n.a.	100	8.213.580.735	-	7.813.900		4.395.833.015	-	3.990.868.500	Setwan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Tahunan (RKPD);												
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.												
		Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran.	Persen	-	-	-		100		-		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Terwujudnya dokumen Kajian dalam menunjang usulan Perda Inisiatif Dewan	Persen	-	-	-		100		-		100		
2.8.2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda	Naskah Akademik	7	6	100,00	389.515.000	-	0	-	356.782.500	-	0	Setwan
	Sasaran:													
2.9	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam mewujudkan *Cirebon Smart City*	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Perangkat Daerah	1	1	4		5		13		13		DKIS
		Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komuni-tas	1	22	22		22		22		27		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Program:													
2.9.1	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	Rasio	70,00	75,00	75,00	390.000.000	80,00	430.000.000	100,00	324.379.450	100,00	92.430.000	Bid Layanan e-government, DKIS
2.9.2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	70,00	75,00	75,00	1.400.000.000	80,00	1.615.500.000	100,00	1.452.783.000	98,88	1.010.393.373	Bid Teknologi Informasi dan Komunikasi, DKIS
2.9.3	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kerjasama bidang Kominfo	Persen	70,00	75,00	75,00	215.000.000	80,00	450.000.000	100,00	203.324.605	96,49	158.928.500	Bidang TIK dan Bidang Layanan e-government, DKIS
2.9.4	Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	70,00	75,00	75,00	1.315.000.000	80,00	2.525.000.000	90,00	1.363.508.500	99,47	2.091.202.991	Bidang TIK pada DKIS
2.9.5	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif	Persen	70,00	75,00	75,00	165.000.000	80,00	200.000.000	100,00	144.522.000	97,59	191.198.000	Bidang Pengelolaan Informasi Publik, DKIS

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		efisien dan murah												
2.9.6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersampaikan-nya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat	Persen	60,00	65,00	65,00	605.000.000	70,00	1.195.000.000	80,00	574.887.500	99,06	455.597.500	Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan Bid Pengelolaan Komunikasi Publik, DKIS
2.9.7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi	Persen	70,00	75,00	75,00	760.000.000	80,00	925.000.000	100,00	734.606.482	98,53	731.628.677	
2.9.8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terwujudnya penyebarluas-an informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	Persen	70,00	75,00	75,00	1.285.000.000	80,00	1.410.000.000	100,00	1.271.950.000	99,77	1.018.230.000	Bidang pengelolaan Komunikasi Publik, DKIS
2.9.9	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Persen	n.a.	n.a.	60,00	295.000.000	75,00	345.000.000	100,00	212.460.500	99,79	164.225.000	Bidang Statistik, DKIS
2.9.10	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat	Persen	50,00	n.a.	55,00	70.000.000	60,00	130.000.000	50,00	56.290.000	99,52	103.025.500	Bidang Statistik, DKIS

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		Kota Cirebon												
	Sasaran:													
2.10	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	78,99	87,39	100,00		100,00		97,49		97,49		BPPPPD
		Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	96,19	98,26	100,00		100,00		95,17		95,17		
	Program:													
2.10.1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	Persen	68,43	72,3	82	351.032.000	78	375.945.460	83,63	212.945.500	83,63	155.832.500	BidangPP, BidangPPMM, BidangSosbudek & SDA, dan BidangInfrastruktur & PW BPPPPD
2.10.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	78,99	80,67	95,00	1.030.900.000	87,60	663.000.000	97,49	700.075.400	99,02	428.035.000	BidangPP, BidangPPMM, BidangSosbudek & SDA, dan BidangInfrastruktur & PW BPPPPD
2.10.3	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	96,19	98,90	98,35	125.000.000	98,45	159.000.000	99,19	56.545.000	99,19	59.985.000	BidangPerenc. Pemerintahan BPPPPD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
2.10.4	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Persen	90,00	91,5	95,00	413.026.000	92,00	282.590.000	65,00	174.183.000	58,37	156.532.500	BidangPPMM, BidangSosbudek & SDA, dan BidangInfrastruktur & PW BPPPPD
	Sasaran:													
2,11	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah	Persen	n.a	n.a	40,00		50,00		31,00		41,02		BPPPPD
	Program:													
2.11.1	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	Persen	100	100	100	1.075.000.000	-	0	90	804.258.500	-	0	Litbang BPPPPD
2.11.2	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen	-	-	-	0	3	530.000.000	-	0	3	227.746.000	Litbang BPPPPD
2.11.3	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	Dokumen	-	-	-	0	2	371.000.000	-	0	2	134.170.000	Litbang BPPPPD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		sosial dan kemasyarakat-an												
2.11.4	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan daerah	Dokumen	-	-	-	0	2	350.000.000	-	0	2	80.729.000	Litbang BPPPPD
2.11.5	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan ke-iptek-an	Dokumen	-	-	-	0	1	250.000.000	-	0	1	110.138.000	Litbang BPPPPD
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan														
	Tujuan:													
3	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n.a.	44,05	45,00		45,50		51,96		55,48		DLH, DISHUB PUPR DPRKP
		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,38	n.a.	2,80		3,92		3,85		3,87		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
	Sasaran:													
3.1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Nilai	C	C	C		C		C		C		DISHUB
	Program :													
3.1.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan	Persen	100,00	100,00	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	48.270.000	n.a.	15.410.000	Bidang Lalu Lintas Dishub
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
3.1.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	100.000.000	100,00	200.000.000	100,00	94.125.000	100,00	24.730.000	UPTD Pengujian Kendaraan bermotor DISHUB
3.1.3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100 %	Persen	80,00	83,51	83,51	4.900.000.000	85,00	3.827.000.000	73,00	1.745.988.750	73,47	1.407.089.000	Bidang Lalu Lintas, Bid Keselamatan dan Tehnik Sarana, UPT PJU pada DISHUB
		Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yang	Persen	80,00	83,78	83,78		85,00		60,00		60,00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	9	10	13	14	15
		dibutuhkan (standar) x 100 %												
		Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) x 100 %	Persen	80,00	83,78	83,97		85,00		86,00		86,16		
3.1.4	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	Persen	73,44	73,44	73,44	525.000.000	77,00	600.000.000	62,00	184.968.750	46,00	294.425.975	UPTD Parkir Dishub.
	Sasaran:													
3,2	Meningkatnya layanan sarana angkutan umum masyarakat	Rasio Kendaraan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penduduk	Persen	n.a	n.a	40,00		50,00		0,31		0,30		DISHUB
	Program:													
3.2.1	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan/ jumlah penduduk	Rasio	0,0030	0,0030	0,0030	1.550.000.000	0,0031	1.980.000.000	0,0030	750.260.500	0,0030	370.876.400	Bidang Angkutan dan Multimoda DISHUB
		Jumlah Uji Kir	Unit	12.202	12.202	12.202		12.568		15.638		9.735		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	Persen	19,00	19,00	19,00		20,00		0,73		0,73		
3.2.2	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	1.125.000.000	100,00	1.130.000.000	100,00	883.168.875	100,00	598.611.879	UPTD Parkir Dishub
	Sasaran:													
3,3	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase	Persentase drainase kondisi baik	Persen	70,00	n.a.	72,50		75,00		71,00		75,00		DPUPR
	Program:													
3.3.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	10	8	2	13.750.000.000	2	18.750.000.000	2	8.256.648.050	2	6.336.397.400	Bidang Sumber Daya Air DPUPR
3.3.2	Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman	Terselenggara-nya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	55,00	90,00	100,00	34.100.000.000	100,00	29.100.000.000	100,00	27.401.129.500	100,00	9.076.448.000	Bidang Cipta Karya DPUPR
	Sasaran:													
3,4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n.a.	44,05	45		45,5		51,96		51		DISHUB, DPUPR, DPRKP, DLH

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Dampak Perubahan Iklim	Tingkat penurunan Emisi gas Rumah Kaca	Persen	n.a.	2,38	2,80		3,92		3,85		3,87		
	Program:													
3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan mantap kondisi baik	Persen	87,00	89,00	91,00	131.600.000.000	92,00	45.600.000.000	81,00	15.810.508.995	92,00	14.567.994.600	Bidang Bina Marga DPUPR
		Meningkatnya jalan mantap	Persen	n.a.	n.a.	86,00				81,00				
		Trotoar Kondisi Baik 100 % (10,5km),	Persen	n.a.	n.a.	100,00				81,00				
		Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit)	Unit	50	n.a.	3				1				
3.4.2	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	Total Jasa Konstruksi = 716; bersertifikat 69 jasa konstruksi	n.a.	58,80	500.000.000	69,00	550.000.000	100 ,00	50.000.000	100,00	66.520.000	Bidang Bina Marga DPUPR
3.4.3	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	74,00	100,00	1,40	20.000.000.000	1,40	28.500.000.000	1,40	12.870.053.500	100,00	1.903.250.000	Bidang Cipta Karya DPUPR
3.4.4	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	75,00	100,00	80,00	100.500.000.000	85,00	50.500.000.000	100,00	46.977.065.080	100,00	19.087.086.670	Bidang Cipta Karya DPUPR

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
3.4.5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	n.a.	n.a.	15,00	2.200.000.000	30,00	2.200.000.000	n.a.	0	n.a.	0	Bidang Cipta Karya DPUPR
3.4.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023)	Titik	22	1	2	52.000.000.000	2	52.000.000.000	n.a.	0	n.a.	0	Bidang Sumber Daya Air DPUPR
3.4.7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	92,82	90,00	94,26	4.500.000.000	95,68	4.550.000.000	100,00	2.987.846.000	90,00	1.190.953.848	Bidang Sumber Daya Air DPUPR
3.4.8	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	89,00	n.a.	90,00	1.250.000.000	92,00	1.250.000.000	0,00	2.542.617.400	n.a.	0	Bidang Cipta Karya, DPUPR
3.4.9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se-Kota	Persen	0,20	n.a.	1,00	2.900.000.000	1,00	2.900.000.000	0,90	49.800.000	1,10	82.395.000	Bidang Penataan Ruang, DPUPR

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
3.4.10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luasan RTH publik yang bertambah	Persen	2,00	0,35	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	n.a	0	n.a	0	Bidang Penataan Ruang DPUPR
3.4.11	Program Pengelolaan Pertanahan	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	2	n.a.	2	20.400.000.000	4	20.400.000.000	n.a.	0	3	318.651.500	Bidang Penataan Ruang DPUPR
3.4.12	Program Penyelenggaraan Prasarana sarana umum Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	11,11	n.a.	15,00	1.003.185.000	18,89	1.103.503.500	0,00	725.340.000	12,96	1.207.841.250	Bidang Perumahan DPRKP
3.4.13	Program Penyediaan Perumahan	Rasio jumlah rumah layak huni per jumlah penduduk	Poin	0,1758	n.a.	0,1773	390.652.000			0,0266	196.809.500			Bidang Perumahan DPRKP
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen					88,64	429.717.200			93,96	292.151.500	
3.4.14	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	9,00	n.a.	9,18	620.000.000	9,67	1.002.500.000	8,81	784.925.500	32,62	1.905.871.000	Bidang Permukiman DPRKP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
3.4.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	Persen	2,00	2,00	20,00	8.217.958.000	22,00	13.040.000.000	8,00	8.697.708.200	8,00	12.188.415.761	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Cakupan Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	78,00	80,00	76,00		75,00		88,00		71,00		
		Persentase Ijin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang diterbitkan	Persen	n.a.	n.a.									
		Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen					100,00				100,00		
		Operasional TPA/TPST/SPA di Kota Cirebon (Nilai Adipura TPA)	Skor	70,07	73,16	72		74		68,25		n.a		
3.4.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kota Cirebon	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	905.923.000	Ada	2.792.000.000	Ada	691.336.000	Ada	491.563.800	Dinas Lingkungan Hidup
		Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak Ada		Tidak ada		Tidak Ada		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Terselenggarayan KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	48,00	49,00	50,00		55,00		57,00		55,00		
		Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerindah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan dampak Didaerah Kota	Persen	100,00	100.00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Indeks Kualitas Air	Poin	n.a.	n.a.			29,93				46,92		
		Indeks Kualitas Udara	Poin	n.a.	n.a.			78,2				73,13		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	n.a.	n.a.			32,65				37,54		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
3.4.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Keanekaragam-an Hayati	Persen	18,75	18,75	31,25	1.207.911.000	58,33	1.157.200.000	31,25	954.621.400	n.a.	418.542.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Luas Lahan Konservasi	Persen	0,42	0,42	0,42		0,45		0,42		0,42		
		Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Peningkatan Jumlah Wilayah yang memiliki Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi dan Perubahan Iklim	Persen	2,82	3,22	4,00		5,26		4,00		4,00		
3.4.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	61,33	25,38	28,48	100.000.000			56,92	95.340.000			Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Poin	53,04	78,03	78,10				68,58				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	32,63	32,63	32,64				35,77				
3.4.19	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Penetapan Hak MHA	Kali	0	n.a.	1	539.840.000	1	605.000.000	0	507.361.000	0	453.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Kali	0	n.a.	1		1		1		10		
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat	Kali/ Tahun	1	1	4		4		6		1		
		Meningkatnya Jumlah dan Anggota kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	Persen	0,00	n.a.	50,00		52,00		50,00		52,00		
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif														
	Tujuan:													
4	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	n.a.	n.a.	62,00		70,00		62,00		76,62		Sat Pol PP
	Sasaran:													

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
4.1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Lokasi	65	60	55	-	45		52		43		Sat Pol PP
		Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat kecamatan :												
		Kejaksan	Poin	n.a	n.a	na		75		na		na		Kecamatan Kejaksan
		Lemahwungkuk	Poin	n.a	n.a	na		77		na		na		Kecamatan Lemahwungkuk
		Harjamukti	Poin	n.a	n.a	na		75		na		na		Kecamatan Harjamukti
		Pekalipan	Poin	n.a	n.a	na		82,5		na		na		Kecamatan Pekalipan
		Kesambi	Poin	n.a	n.a	na		60		na		na		Kecamatan kesambi
	Program:													
4.1.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3	Persen	n.a.	99,20	1 orang per RT	418.643.000	100,00	952.556.000	1 Orang Per RT	748.380.000	n.a.	0	Sat Pol. PP
4.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Rasio Linmas	Persen	100,00	100,00	100,00	1.505.998.450	100,00	1.844.578.450	100,00	2.132.718.700	100,00	801.712.700	Sat Pol PP
4.1.3	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	100,00	100,00	100,00	381.463.500			n.a	0			Sat Pol PP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
4.1.4	Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	324.219.500			100,00	538.593.500			Sat Pol PP
		Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran	Persen	100,00	99,20			100,00	787.556.000			100,00	363.473.950	
	Sasaran:													
4.2	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional	Konflik Kasus Kebangsaan dan Nasionalisme	Kasus	0	0	0	-	0		0		0		Kantor Kesbang Pol Dagri
	Program:													
4.2.1	Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup	Nol persen kasus SARA dan kasus terorisme	Persen	100,00	100,00	100,00	566.850.000		240.000.000	100,00	158.443.500		500.000	KesbangPol Dagri

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	n.a.	150 orang	50,00		60,00		n.a.		60,00		
4.2.2	Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	100,00	4500 orang	100,00	1.890.811.000	50,00	2.035.000.000	100,00	1.474.402.900	50,00	1.279.194.400	Kesbangpol Dagri.
4.2.3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan petugas yang memiliki sertifikasi penanganan bencana.	Persen	n.a.	50 orang	50,00	50.000.000			98,00	33.417.500			Kesbangpol. Dagri
		Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat	Persen	n.a.	n.a.			60,00	218.000.000			60,00	12.355.701	
	Sasaran:													
4.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah	Persen	64,00	70,00	75,00		80,00		75,00		67,00		DAMKAR

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
	Bencana	Layanan WMK												
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana	Kelurahan	0	0	22		22		22		22		KPBD
	Program:													
4.3.1	Progam Peningkatan Kesiapsiagan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	60,00	60,00	70,00	6.133.141.000	75,00	6.670.000.000	70,00	5.357.695.900	99,92	5.062.909.250	Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran DAMKAR
		Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat	Persen	61,00	61,00	75,00		82,00		75,00		27,11		
4.3.2	Progam Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	Rasio masyarakat yang dilatih dibagi jumlah penduduk	Rasio	1 : 570	1 : 570	1 : 437	837.622.000	-	950.000.000	1 : 437	791.463.300	-	56.188.800	Bidang Pemberda yaan Masyarakat dan sarana Prasarana Kebakaran DAMKAR
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen	52,00	52,00	52,00		61,00		52,00		100,00		
4.3.3	Program Pendataan dan penyebarluasan Informasi Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan	Orang	300	300	300	135.000.000			500	84.940.000			KPBD
		Jumlah dokumen data informasi/ dokumen	Dokumen					1	100.000.000			1	10.000.000	KPBD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*	*12*	*9*	*10*	*13*	*14*	*15*
		penanggulangan bencana												
4.3.4	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	825.000.000			100,00	628.038.400			KPBD
4.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulngan bencana	Orang	24	54	60	110.000.000			41	101.661.000			KPBD
4.3.6	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikasi	Orang					56	975.000.000			26	569.195.045	KPBD
4.3.7	Program Penyelamatan/ Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana	Cakupan korban bencana yang mendapatkan penanganan	Persen					100,00	150.000.000			100,00	69.103.200	KPBD

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Cirebon Tahun 2021

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
VISI : SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah						
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Suber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang						
Tujuan: 1. Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.						
		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	75,44		Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Indeks Gini	Poin	0,42		
		Pendapatan Per kapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	-		
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	76,92		
		Indeks Daya Beli (Poin)	Poin	-		
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12.014		
Sasaran: 1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan						
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,35		Kepala Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,71		
	Program:					
1.01.01	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka kelulusan	Persen	100,00	127.976.961.348	Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar DISDIK
1.01.02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94,00	2.208.215.720	Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan DISDIK
Sasaran: 2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat						
		Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,737		Kepala DISPUSIPDA
	Program:					
1.02.01	Program Pembinaan Perpustakaan	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka (Orang)	194,798	595.555.390	Bidang Pembinaan Perpustakaan DISPUSIP
1.02.02	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Perpustakaan RW dan Perpustakaan Kelurahan	30; 1	201.884.400	Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno DISPUSIP
Sasaran: 3.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
		Angka Harapan Hidup	Tahun	72,38		Kepala Dinas Kesehatan
		Cakupan jaminan kesehatan nasional	Persen	99,03		
	Program:					

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.03.01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan perorangan	Persen	92,3	71.793.611.470	Sekretariat; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, UPT Laboratorium Daerah; UPT Farmasi; UPT Kesehatan Khusus (PSC 119); UPT Puskesmas (22); UPT RSD Gunung Jati DINKES
1.03.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	85,00	2.282.960.780	Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES
1.03.03	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan industri rumah tangga yang dibina	Persen	25,00	152.740.700	Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES
1.03.04	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS yang dipantau	Persen	81,00	2.295.070.530	Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES
Sasaran: 4. Terkendalinya jumlah penduduk						
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,66		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program:					
1.04.01	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah perangkat daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Peragkat Daerah	24	171.381.334	Bidang Pengendalian Penduduk DP3AP2KB
1.04.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	*Current User* / Pasangan Usia Subur	Persen	62,18	3.226.610.350	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB
1.04.03	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung KB	Persen	63,64	379.330.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB
Sasaran: 5. Menurunnya tingkat pengangguran						
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,70		Kepala Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,43		
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,54		
	Program:					
1.05.01	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang menda patkan pelatihan kewira usahaan	Persen	50,00	0	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
1.05.02	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	70,00	557.030.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; UPT Latihan Tenaga Kerja DISNAKER

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.05.03	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	48,00	311.979.500	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja DISNAKER
1.05.04	Program Hubungan Industrial	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Persen	79,00	271.406.700	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
Sasaran: 6. Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda						
		Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	5		Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,
		Peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi	-	-		
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	60,00		
	Program:					
1.06.01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1450	989.629.000	Bidang Kepemudaan, DISPORA
1.06.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00	4.994.998.000	UPT PPOR; Bidang Olahraga DISPORA
1.06.03	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase wirausaha muda	Persen	60,00	500.000.000	Bidang Kepemudaan, DISPORA
Sasaran: 7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak						
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	94,35		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	77,00		
	Program:					
1.07.01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya impelmentasi PUG pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	3	95.318.150	Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
1.07.02	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Satgas PKDRT	4	69.897.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
1.07.03	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Pokja PUG	1	198.647.800	Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
1.07.04	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan RW layak anak	Persen	5,65	179.461.950	Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB
1.07.05	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan penanganan anak korban kekerasan	Persen	100,00	185.008.500	Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB
Sasaran: 8. Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian Kota Cirebon						
		Peningkatan PDRB dari sektor industri	Persen	10,32		Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	32,22		
	Program :					

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.08. 01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	Persen	17,59	0	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08. 02	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	100	42.625.275	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08. 03	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase koperasi aktif menjadi Sehat	Persen	62,45	96.204.675	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08. 04	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	63,48	409.819.200	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08. 05	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	Persen	64,1	61.795.650	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08. 06	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	95,31	275.740.500	Bidang Koperasi dan UKM
1.08. 07	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	Persen	30,49	741.445.425	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08. 08	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	Persen	100	7.199.640	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08. 09	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelola Pasar Yang sesuai Standar	Persen	10	0	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08. 10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	persen	74,5	123.716.250	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08. 11	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	persen	64,33	300.000.000	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08. 12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	persen	84,00	285.577.163	Bidang Kemetrologian; UPT Kemetrologian Lokal DKUKMPP
1.08. 13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk dalam negeri	Persen	30,00	0	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08. 14	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah	IKM	198	337.008.714	Bidang Perindustrian DKUKMPP
1.08. 15	Program Pengendalian dan Izin Usaha Industri	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Izin Usaha	5	0	Bidang Perindustrian DKUKMPP
1.08. 16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasionl	Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan SIINas	Persen	100,00	0	Bidang Perindustrian DKUKMPP
Sasaran : 9. Berkurangnya Penduduk Miskin						
		Perentase penduduk miskin	Persen	8,80		Kepala Dinas Sosial
	Program :					
1.09. 01	Program Pemberdayaan Sosial	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (persen)	Persen	66,00	24.538.000	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial DINSOS

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.09.02	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan PPKS	Persen	66,00	220.323.250	Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOS
1.09.03	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data Base keluarga miskin	Dokumen	0	556.544.100	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial DINSOS
		Data Base PMKS	Dokumen	0		
1.09.03	Program Penanganan Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	2.137.413.000	Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOS
1.09.04	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan PSKS yang yang melaksanakan penanganan PMKS	Persen	58,29	44.650.000	UPT TMP dan Nilai-Nilai Kepahlawanan DINSOS
Sasaran: 10. Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk Mencapai Kedaulatan Pangan						
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	82,00		Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Peningkatan PDRB dari Sektor Pertanian.	Persen	0,33		
	Program:					
1.10.01	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Kkal/kapita/ hari;	E≥2400	3.612.578.950	Bidang Ketahanan Pangan DKPPP
			Gr/kapita/hari	P≥63		
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	Persen	90,00		
		Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	Persen	90,00		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	88,00		
		Penurunan konsumsi beras	Kg/kap/hari	92		
		Peningkatan konsumsi pangan hewani	Kg/kap/hari	45		
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/kap/hari	183		
		Peningkatan konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/hari	32		
1.10.02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3500	146.917.000	Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP
1.10.03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	265	1.231.966.602	Bidang Kelautan dan Perikanan; UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, DKPPP
1.10.04	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	7.600	151.488.500	Bidang Kelautan dan Perikanan, DKPPP
1.10.05	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	persen	70,00	285.207.900	Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						DKPPP
1.10.06	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	persen	88,00	272.101.450	Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan DKPPP
1.10.07	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	jenis	2	1.229.745.125	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT RPH; UPT Balai Pengembangan ternak Potong; UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura DKPPP
1.10.08	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak :			294.940.797	Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP
		· Daging Sapi	Kg	170000		
		· Daging Babi	Kg	67000		
1.10.09	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	ekor hewan/ ternak	550	668.804.560	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT Pelayanan Veteriner; UPT RPH DKPPP
1.10.10	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produksi Padi	ton/ha	4,80	102.646.080	Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP
Sasaran : 11. Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif						
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	5,71		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program :					
1.11.01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	Persen	70,00	104.945.400	Bidang Kepariwisataan
1.11.02	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1	525.267.750	Bidang Kepariwisataan
1.11.03	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	11,00	524.515.000	Bidang Kepariwisataan
Sasaran: 12. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama						
		Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0		Kepala BAKESBANGPOL
	Program:					
1.12.01	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	65,00	244.472.200	Bidang ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya BAKESBANGPOL
Sasaran: 13. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal						
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	74,01		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program :					
1.13.01	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	Karya budaya	1	462.795.000	Bidang Kebudayaan DKP
1.13.02	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	16	740.360.000	Bidang Kebudayaan DKP
1.13.03	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	10	495.739.534	Bidang Kebudayaan DKP

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Sasaran: 14. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan						
		Tingkat Perkembangan Kelurahan di Kota Cirebon yang kurang berkembang	Kelurahan	0		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA
		Tingkat Perkembangan Kelurahan di Kota Cirebon yang berkembang	Kelurahan	9		
		Tingkat Perkembangan Kelurahan di Kota Cirebon yang cepat berkembang	Kelurahan	13		
		Meningkatnya Kelurahan :	**Kualifikasi**	**Status**		
		Kec. Kesamb				
		Swakarya Mula	Kel.	0		
		Swakarya Madya	Kel.	0		
		Swakarya Lanjut	Kel.	1		
		Swasembada Mula	Kel.	4		
		Swasembada Madya	Kel.	0		
		Swasembada Lanjut	Kel.	0		
		Kec. Pekalipan:				
		Swakarya Mula	Kel.	1		
		Swakarya Madya	Kel.	2		
		Swakarya Lanjut	Kel.	1		
		Swaembada Mula	Kel.	0		
		Swa embada Madya	Kel.	0		
		Swasembada Lanjut	Kel.	0		
		Kec. Kejaksan:				
		Swakarya Mula	Kel.	0		
		Swakarya Madya	Kel.	1		
		Swakarya Lanjut	Kel.	3		
		Swasembada Mula	Kel.	0		
		Swasembada Madya	Kel.	0		
		Swasembada Lanjut	Kel.	0		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Kec. Harjamukti:				
		Swakarya Mula	Kel	0		
		Swakarya Madya	Kel	3		
		Swakarya Lanjut	Kel	2		
		Swasembada Mula	Kel.	0		
		Swasembada Madya	Kel.	0		
		Swasembada Lanjut	Kel.	0		
		Kecamatan Lemahwungkuk:				
		Swakarya Mula	Kel	1		
		Swakarya Madya	Kel	1		
		Swakarya Lanjut	Kel	2		
		Swasembada Mula	Kel.	0		
		Swasembada Madya	Kel.	0		
		Swasembada Lanjut	Kel.	0		
	Program:					
1.14.01	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	18,00	193.491.250	Bagian Pemerintahan SETDA; Kecamatan Kesambi; Kecamatan Pekalipan; Kecamatan Harjamukti; Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.02	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM berprestasi	Persen	13,60	1.271.697.850	Bagian Pemerintahan SETDA Kecamatan Kesambi; Kecamatan Pekalipan; Kecamatan Harjamukti; Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	80,00	6.339.869.794	Kecamatan Kesambi
1.14.04	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	3.936.559.320	Kecamatan Pekalipan
1.14.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	295.812.600	Kecamatan Harjamukti
1.14.06	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	50,00	6.455.254.660	Kecamatan Harjamukti

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.14.07	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	4.485.376.183	Kecamatan Kejaksan
1.14.08	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	6.017.328.638	Kecamatan Lemahwungkuk
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Barsih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif						
Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan Inovasi dalam manajemen Pemerintahan						
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,00		Asisten Administrasi Umum
Sasaran: 1. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan						
		Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	Persen	100,00		32 Perangkat Daerah
	Program:					
2.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Persen	100,00	268,560,202,020	32 PD
		Persentase LKIP Perangkat daerah yang sesuai dengan sistematika berdasarkan peraturan perundang undangan	Persen	90,00	459.807.500	Bagian Organisasi SETDA
Sasaran: 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur						
		Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	15,00		
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	81,50		
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	89,00		
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN	Persen	100,00		
	Program:					
2.02.01	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	3	2.641.204.950	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi; UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM
2.02.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	64,00	3.479.052.200	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM
Sasaran: 3. Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi						

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	90,00		Asisten Administrasi Umum SETDA
		Persentase peta proses bisnis penyelenggara-an pemerinta han	Persen	60,00		
	Program:					
2.03. 01	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal	Persen	51,00	4.278.332.532	Bagian Hukum; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Pemerintahan SETDA
2.03. 02	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah (SBBD) dan Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA/DPA	Dokumen	2	1.108.902.503	Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA
Sasaran: 4. Meningkatnya Maturitas SPIP						
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3		Inspektur Daerah
	Program:					
2.04. 01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	70,00	618.728.000	IRBAN Wilayah I IRDA
2.04. 02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	1.195.038.950	IRBAN Wilayah II; IRBAN Wilayah III IRDA
Sasaran: 5. Meningkatnya Pelayanan Publik						
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Persen	74,10		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Persen	84,00		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program:					
2.05. 01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	80	172.192.298	Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal DPMPTSP
2.05. 02	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.800	115.204.000	Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP
2.05. 03	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Presepsi Waktu Penyelesaian Perijinan	Poin	3	528.529.050	Bidang Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP
2.05. 04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga Kerja	Persen	15	218.843.100	Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP
2.05. 05	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan nilai realisasi PMDN	Persen	70	130.143.825	Bidang promosi Penanaman Modal DPMPTSP
2.05. 06	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	96,50	1.195.809.400	Bidang Dafduk DISDUKCAPIL

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.05.07	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,50	266.611.000	Bidang Pelayanan Capil DISDUKCAPIL
2.05.08	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependuduk- an	Persen	8,50	229.076.000	Bidang PIAK DISDUKCAPIL
2.05.09	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	8,50	10.008.000	Bidang PIAK DISDUKCAPIL
Sasaran: 6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Peringkat	WTP		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Persen	32,67		
	Program:					
2.06.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	7.779.747.885	Bidang Pengaggaran; Bidang Perbendaharaan Daerah ; Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKPD
2.06.02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah	Persen	100	1.897.254.023	Bidang Barang Milik Daerah BPKPD
2.06.03	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10	3.561.210.346	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD
Sasaran: 7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah						
		Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Poin	83,50		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program:					
2.07.01	Program Pengelolaan Arsip	Sistem Penyimpanan sesuai standar	Perangkat Daerah	6	418.581.440	Bidang Pengelolaan Arsip DISPUSIP
2.07.02	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	600	58.005.700	Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip DISPUSIP
Sasaran: 8. Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD						
		Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda	Persen	73,7		Sekretaris DPRD
		Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100		
		Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	70		
	Program:					
2.08.01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi	Persen	100	88.970.694.000	Bagian Perundang-undangan; Bagian Persidangan SETWAN

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		pembentukan Perda dan fungsi anggaran				
Sasaran: 9. Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam mewujudkan Cirebon Smart City						
		Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Perangkat Daerah	6		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas	24		
	Program:					
2.09.01	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah	Persen	85,00	2.344.559.650	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, DKIS
2.09.02	Program Aplikasi Informatika	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	85,00	2.717.539.584	Bidang Layanan e-government; Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DKIS
2.09.03	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Persen	75,00	384.999.670	Bidang Statistik Sektoral, DKIS
2.09.04	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	Persen	65,00	424.983.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, DKIS
Sasaran: 10. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						
		Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	100,00		
	Program:					
2.10.01	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	98,55	507.141.500	Bidang Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA
2.10.02	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	87,70	1.049.743.904	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA
Sasaran: 11. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah						

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Kebijakan Daerah	Persen	60		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program:					
2.11.01	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen	3	1.803.871.772	Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDA
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan						
Tujuan: 1. Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	46,00		Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,87		
Sasaran: 1. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan						
		Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Nilai	B		Kepala Dinas Perhubungan
3.01.01	Program :					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100,00	4.935.195.990	Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Multimoda, Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT. Parkir, UPT. Penerangan Jalan Umum DISHUB
Sasaran: 2. Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase						
		Persentase drainase kondisi baik	Persen	75,00		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program:					
3.02.01	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	2	1.876.128.370	Bidang Bina Marga DPUTR
3.02.02	Program Pengembangan Permukiman	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	100,00	18.705.745.341	Bidang Cipta Karya DPUTR
Sasaran: 3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	46,00		Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program:					

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.03. 01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023	Titik	2	5.671.984.709	Bidang Sumber Daya Air DPUTR
3.03. 02	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	93,00	399.983.004	Bidang Sumber Daya Air DPUTR
3.3.0 3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	97,13	1.849.815.867	Bidang Sumber Daya Air, UPT. Pengelolaan Air Limbah DPUTR
3.03. 04	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	90,00	14.016.558.119	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03. 05	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,40	12.909.181.431	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03. 06	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan mantap kondisi baik	Persen	93,00	10.545.688.055	Bidang Bina Marga DPUTR
3.03. 07	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100,00	199.995.370	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03. 8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	45,00	1.519.545.500	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03. 09	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	Persen	1,00	527.929.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR
3.03. 10	Program Penatagunaan Tanah	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	1	315.000.066	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR
3.03. 11	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	89,40	1.185.948.390	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas DPRKP
3.03. 12	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	10,16	1.172.413.080	Bidang Kawasan Permukiman DPRKP
3.03. 13	Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	22,78	3.812.955.910	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas, UPT. Pertamanan dan Pemakaman DPRKP
3.03. 14	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	89,40	108.723.500	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas DPRKP
3.03. 15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada/Tidak	Ada	576.332.592	Bidang Tata Lingkungan DLH

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		kota;				
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak	Ada		
		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada		
3.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air;	poin	31,49	808.446.349	Bidang Tata Lingkungan; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH
		Indeks kualitas tutupan lahan;	poin	32,67		
		Indeks kualitas udara;	poin	78,30		
		Persentase luas lahan konservasi;	persen	0,48		
		Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim	persen	6,07		
		Terwujudnya penyelenggaraan investigasi GRK	persen	100,00		
3.03.17	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	persen	50,00	195.726.000	Bidang Tata Lingkungan DLH
3.03.18	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00	379.010.900	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH
3.03.19	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH	Persen	60,00	78.217.550	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.20	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Penetapan Hak MHA	kali	1	44.546.167	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.21	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	kali	1	77.608.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.22	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat;	kali/tahun	4	303.188.550	Bidang Tata Lingkungan DLH
		Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	ada		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.03.23	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	Persen	100,00	40.916.667	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.24	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	24,00	26.690.340.166	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; UPT Pengelolaan Sampah; UPT TPA DLH
		Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen	74,00		
		Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Skor	75		
		Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00		
		Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	100,00		
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif						
Tujuan: 1. Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan						
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	75,00		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran: 1. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat						
		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Lokasi/ Titik	35		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarakat kecamatan :				
		Kejaksan	Poin	77		Kec. Kejaksan
		Lemahwungkuk	Poin	80		Kec. Lemahwungkuk
		Harjamukti	Poin	80		Kec. Harjamukti
		Pekalipan	Poin	85		Kec. Pekalipan
		Kesambi	Poin	70		Kec Kesambi
	Program:					
4.01.01	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran K3/ ketertiban umum, ketentraman, dan Keindahan	Persen	100,00	3.992.737.400	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil SATPOLPP
		Cakupan Linmas per RT	Persen	100,00		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	100,00		
		Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran	Persen	100,00		
Sasaran: 2. Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional						
		Konflik Kasus Kebangsaan dan Nasionalisme	Kasus	0		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program:					
4.02.01	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	55,00	65.754.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya BAKESBANGPOL
4.02.02	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat	Persen	65,00	1.285.640.513	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL
4.02.03	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	65,00	967.858.000	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL
4.02.04	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	65,00	1.289.403.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik BAKESBANGPOL
Sasaran: 3. Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana						
4.03		Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK	Persen	85,00		Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Forum Siaga Bencana	Kelurahan	22		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program:					
4.03.01	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikasi	Orang	66	822.382.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi BPBD
4.03.02	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	80,00	6.465.499.300	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan dan Bidang Pengendalian, Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran

Tabel 6.8
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Cirebon
Tahun 2022-2023

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
VISI : SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah								
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang								
	Tujuan:							
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	75,73		75,93		Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Indeks Gini	Poin	0.42		0.42		
		PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	80,38		83,84		
		Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	12.307		12.628		
	Sasaran:							
1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,48		10,61		Kepala Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,85		13,99		
	Program:							
1.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	57,43	8.292.372.134	57,44	8.706.990.740	Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Keseteraan; Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar DISDIK

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
		APM SD/MI	Persen	98,10	67.072.245.566	98,50	70.425.857.844	
		APM SMP/MTs	Persen	84,00	53.392.510.960	84,50	56.062.136.508	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen	85,00	5.837.307.263	85,00	6.129.172.626	
1.1.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru satuan pendidikan dasar, PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	47,25	2.100.000.000	47,25	2.205.000.000	Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan DISDIK
1.2	**Sasaran:**							
	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,848		1,958		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program:							
1.2.1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	5,00	625.333.160	5,00	656.599.817	Bidang Pembinaan Perpustakaan DISPUSIP
1.2.2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persen	38,46	211.978.620	38,46	222.577.551	Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno DISPUSIP
	Sasaran:							

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup Kota Cirebon	Tahun	72,51		72,64		Kepala Dinas Kesehatan
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,00		99,00		
	Program:							
1.3.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	Persen	100,00	355.639.759.777	100,00	373.421.747.765	Bidang Yankes dan Bidang P2P Dinas Kesehatan
1.3.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	87,50	2.397.108.819	90,00	2.516.964.260	Bidang SDK Dinas Kesehatan
1.3.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sarana kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	85,00	74.830.035	90,00	78.571.537	Bidang SDK Dinas Kesehatan
		Cakupan sarana produksi industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	Persen	80,00	85.547.700	85,00	89.825.085	
1.3.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Strata Mandiri RW Siaga Aktif	Persen	15,00	723.484.177	17,00	759.658.386	Bidang SDK Dinas Kesehatan
		Cakupan PHBS yang dipantau	Persen	83,00	198.126.338	85,00	208.032.654	
	Sasaran:							
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,50		0,47		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program:							

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
1.4.1	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil	Sektor	10	258.000.000	10	270.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.4.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Current User / Pasangan Usia Subur	Persen	62,54	3.186.075.500	62,92	3.211.075.500	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.4.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70,00	385.000.000	100,00	420.000.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Sasaran:							
1.5	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,35		66,15		Kepala Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,00		8,50		
		Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,74		91,94		
	Program:							
1.5.1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	25,00	150.000.000	30,00	157.500.000	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
1.5.2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	30,00	660.000.000	35,00	693.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; UPT Latihan Tenaga Kerja DISNAKER
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	35.00	50,000,000	40.00	52,500,000	
1.5.3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	30,00	375.000.000	32,00	393.750.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja DISNAKER
1.5.4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	1,00	70.000.000	1,00	73.500.000	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	63,00	170.000.000	64,00	178.500.000	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Sasaran:							
1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	6		9		Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	65,00		70,00		
	Program:							
1.6.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1500	1.000.742.450	1:1575	1.015.850.000	Bidang Kepemudaan DISPORA
1.6.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sarana dan Prasarana olahraga yang sesuai standar	Persen	40,00	3.683.339.900	50,00	4.373.006.026	UPT.PPOR; Bidang Olahraga DISPORA
		Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	40,00	610.328.700	50,00	666.581.000	
		Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	Cabor	10	139.407.600	10	146.377.980	
		Cakupan pembinaan olah raga	Persen	100,00	271.671.700	100,00	274.675.000	
1.6.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Mencetak Pramuka Garuda	Persen	40,00	513.568.000	45,00	571.746.400	Bidang Kepemudaan DISPORA
	Sasaran:							
1.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	94,41		94,46		kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	77,73		78,47		
	Program:							
1.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan	Persen	40,00	100.084.058	50,00	105.088.260	Bidang Pemberdayaan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
		PUG						Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.7.2	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan	Persen	100,00	73.391.850	100,00	77.061.443	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.7.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.	Persen	100,00	208.580.190	100,00	219.009.200	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.7.4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak	Persen	12,00	50.000.000	16,00	52.500.000	Bidang Perlindungan Anak Dinas

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.7.5	Program Pemenuhan Hak Anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Tingkat	Madya	163.435.048	Madya	171.606.800	Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1..7.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Penanganan anak korban kekerasan	Persen	100,00	169.258.925	100,00	177.721.871	Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sasaran:							
1.8	Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Stabilitas Perekonomian Kota	Kontribusi PDRB dari sektor industri	Persen	11,15-11,22		11,80-11,87		Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Cirebon	Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	Persen	32,48-32,67		34,37-34,58		Perindustrian
	Program:							
1.8.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	Persen	19,70	200.000.000	21,81	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	100,00	50.595.500	100,00	51.576.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif menjadi Sehat	Persen	63,42	97.000.000	64,39	116.407.700	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	64,09	450.801.200	64,70	495.881.300	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	Persen	64,70	61.795.000	65,30	74.772.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	95,91	298.420.000	96,51	330.646.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.7	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	Persen	35,87	721.445.000	41,25	897.148.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	Persen	100,00	307.199.000	100,00	400.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
1.8.9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelola Pasar Yang sesuai Standar	Persen	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	77,00	308.716.000	80,00	860.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.11	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	66,00	204.268.000	68,00	363.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Persen	86,00	295.577.000	88,00	345.548.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk dalam negeri	Persen	40,00	200.000.000	50,00	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.14	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah	IKM	222	338.257.000	246	389.245.100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.15	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Izin Usaha	5	50.000.000	5	100.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
1.8.16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan SIINas	Persen	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	Sasaran :							
1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Perentase penduduk miskin	Persen	8,55	-	8,35	-	Kepala Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Program:							
1.9.1	Program Pemberdayaan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	100,00	25.764.900	100,00	27.053.145	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial DINSOS
1.9.2	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	66,00	231.339.413	66,00	242.906.383	Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOS
1.9.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data base keluarga miskin dan data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1	584.371.305	1	613.589.871	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial DINSOS
1.9.4	Program Penanganan Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	2.173.542.559	100,00	2.282.219.686	Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOS
1.9.5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Standarisasi pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN	Lokasi	1	75.250.000	1	79.012.500	UPT TMP dan Nilai-Nilai Kepahlawanan DINSOS
	Sasaran :							
1.10	Meningkatnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	87,50		88,50		Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian.	Persen	0,33		0,33		
	Program:							
1.10.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan dan harga serta pangan lainnya	Persen	90,00	99.300.000	90,00	104.265.000	Bidang Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
		Penguatan cadangan pangan daerah	Persen	25,00	2.173.645.000	30,00	2.277.542.000	DKPPP
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/Kapita/ Hari	185	972.800.000	187	1.021.440.000	
1.10.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	75,00	299.700.000	80,00	314.685.000	Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan DKPPP
1.10.3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	89,00	285.750.000	90,00	300.025.000	Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan DKPPP
1.10. 4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (komoditas daging dan tanaman pangan)	Persen	3,00 – 5,00	1.391.135.000	3,00 – 5,00	1.460.153.000	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT RPH; UPT Balai Pengembangan ternak Potong; UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura DKPPP
1.10.5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dipelihara	Persen	50,00	609.688.000	50,00	640.100.000	Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP
1.10.6	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	Persen dari populasi	30,00	727.199.000	35,00	763.504.000	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT Pelayanan Veteriner; UPT RPH DKPPP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
1.10.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan nilai kualitas kelembagaan penyuluhan	Persen	10,00	107.750.000	10,00	113.225.000	Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP
1.10.8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4000	154.260.000	4200	161.975.000	Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP
1.10.9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	265	1.232.730.000	272	1.294.353.000	Bidang Kelautan dan Perikanan; UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, DKPPP
1.10.10	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	7800	159.050.000	8000	167.000.000	Bidang Kelautan dan Perikanan, DKPPP
	Sasaran :							
1.11	Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	Persen	5,57-5,61		5,90-5,93		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program:							
1.11.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	Persen	75,00	115.440.000	80,00	126.984.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.11.2	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1	577.794.000	1	455.573.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.11.3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	14,00	576.966.000	17,00	634.663.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Sasaran:							

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
1.12	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0		0		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program:							
1.12.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Persen	70,00	84.307.200	75,00	84.307.200	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya BAKESBANGPOL
		Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan	Persen	100,00	160.165.000	100,00	160.165.000	
	Sasaran:							
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	76,21		78,41		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program:							
1.13.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	Karya budaya	1	552.662.000	1	559.982.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.13.2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	16	1.227.396.000	16	795.835.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.13.3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	10	545.313.000	10	649.844.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Sasaran:							Asisten Pemerintahan dan
1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	**Tingkat perkembangan kelurahan**						

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
		Kota Cirebon:						Kesejahteraan Rakyat SETDA
		Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	59,09		59,09		
		Meningkatnya kualifikasi status kelurahan :						
		Kec. Kesambi:						Camat Kesambi
		Persentae Kelurahan Berstatus Swasembada	Persen	80,00		100,00		
		Kec. Pekalipan:						Camat Pekalipan
		Persentae Kelurahan Berstatus Swasembada	Persen	25,00		50,00		
		Kec. Kejaksan:						Camat Kejaksan
		Persentae Kelurahan Berstatus Swasembada	Persen	25,00		25,00		
		Kec. Harjamukti:						Camat Harjamukti
		Persentae Kelurahan Berstatus Swasembada	Persen	40,00		60,00		
		Kecamatan Lemahwungkuk:						Camat Lemahwungkuk
		Persentae Kelurahan Berstatus Swasembada	Persen	25,00		50,00		
	Program:							
1.14.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	22,00	219.069.662	40,00	230.023.670	Bagian Pemerintahan SETDA; Kecamatan Kesambi; Kecamatan Pekalipan; Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Harjamukti; Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ LPM	Kelompok	3	99.473.850	3	108.947.550	Sekretariat Daerah
		Persentase LPM Berprestasi	Persen	13,60	93.588.600	13,60	98.268.030	Bagian Pemerintahan SETDA; Kecamatan Kesambi; Kecamatan Pekalipan; Kecamatan Harjamukti; Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk
		Persentase Posyandu aktif	Persen	87,00	201.913.950	87,00	212.009.648	
		Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	20,00	547.016.399	20,00	574.367.219	
		Persentase PKK aktif	Persen	100,00	525.000.000	100,00	551.250.000	
1.14.3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	30.000.000	100,00	31.500.000	Kecamatan Kesambi
1.14.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	80,00	6.611.863.284	80,00	6.942.456.448	Kecamatan Kesambi
1.14.5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	139.927.000	100,00	146.923.350	Kecamatan Pekalipan
1.14.6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	5.079.060.000	50,00	5.333.013.000	Kecamatan Pekalipan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
1.14.7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	125.000.000	100,00	131.250.000	Kecamatan Harjamukti
1.14.8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	50,00	7.419.845.000	50,00	7.790.837.250	Kecamatan Harjamukti
1.14.9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.000.000	100,00	15.750.000	Kecamatan Kejaksan
1.14.10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	4.731.205.933	25,00	4.967.766.230	Kecamatan Kejaksan
1.14.11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	84.834.857	100,00	89.076.600	Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	6.427.258.404	25,00	6.732.871.324	Kecamatan Lemahwungkuk
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Barsih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif								
	Tujuan:							
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan Inovasi dalam manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,00		80,00		Sekretariat Daerah
	Sasaran:							
2.1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan	Persentase penyelenggaraan layanan administrasi Pemerintahan	Persen	100,00		100,00		32 Perangkat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Program:							
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100,00	654.858.607.492	100,00	686.740.194.862	32 Perangkat Daerah
		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	128.334.225.695	100,00	135.363.735.716	
		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100,00	6.709.800.345	100,00	7.342.081.568	
		Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan Sistimatika Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	471.500.000	100,00	495.075.000	
	Sasaran:							
2.2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	50,00		55,00		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	82,00		82,50		
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	97,00		98,00		
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN	Persen	100,00		100,00		
	Program:							
2.2.1	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah SK Purna Tugas PNS	SK	287	1.719.115.482	276	1.805.071.256	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pemangku jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Administator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV) yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	50	543.161.275	46	570.319.339	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	290	519.391.075	295	545.360.629	
		Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,33	455.647.805	0,30	478.430.195	
2.2.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	16,00	3.469.919.195	17,00	3.643.415.155	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sasaran:							
2.3	Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00		100,00		Asisten Administrasi Umum SETDA
		Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan.	Persen	75,00		100,00		
	Program:							
2.3.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal	Persen	52,00	4.426.000.000	53,00	4.647.300.000	Sekretariat Daerah
2.3.2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan (jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan dibagi jumlah draf rumusan kebijakan yang dihasilkan dikali 100%)	Persen	75,00	1.210.000.000	80,00	1.270.500.000	Sekretariat Daerah
	Sasaran:							
2.4	Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3		4		Inspektur Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Program:							
2.4.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persen	80,00	762.558.000	90,00	798.032.700	IRBAN Wilayah I IRDA
2.4.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Laporan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Laporan	4	1.245.849.450	4	1.317.530.500	IRBAN Wilayah II; IRBAN Wilayah III IRDA
	Sasaran:							
2.5	Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan	Persen	83,00		84,00		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan	Persen	84,00		85,00		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program:							
2.5.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	80	208.352.100	80	229.187.310	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.5.2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1900	139.396.400	2000	153.336.040	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.5.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Persepsi Waktu Penyelesaian Perizinan	Poin	3,10	639.519.100	3,20	703.471.010	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
2.5.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga Kerja	Persen	16,00	264.799.700	17,00	291.279.670	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.5.5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan nilai realisasi PMDN	Persen	75,00	157.473.800	80,00	173.221.180	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.5.6	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	97,00	1.255.100.000	97,50	1.317.855.000	Bidang Dafduk DISDUKCAPIL
2.5.7	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta kelahiran	Persen	88,00	279.900.000	88,50	293.895.000	Bidang Pelayanan Capil DISDUKCAPIL
2.5.8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	8,00	239.400.000	7,50	251.370.000	Bidang PIAK DISDUKCAPIL
2.5.9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat pemenuhan informasi kependudukan	Persen	100,00	10.500.000	100,00	11.025.000	Bidang PIAK DISDUKCAPIL
	Sasaran:							
2.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Peringkat	WTP		WTP		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Persen	33,17		33,67		
	Program:							
2.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.504.521.738	Tepat Waktu	4.729.747.825	Bidang Pengaggaran; Bidang Perbendaharaan Daerah; Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Keuangan BPKPD
2.6.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	2.092.116.000	100,00	2.196.721.800	Bidang Barang Milik Daerah BPKPD
2.6.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,00	3.739.270.000	5,00	3.925.978.350	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD
	Sasaran:							
2.7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Poin	84,00		85,00		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program:							
2.7.1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai standar nasional	Persen	80,00	439.510.512	90,00	461.486.038	Bidang Pengelolaan Arsip DISPUSIP
2.7.2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Dokumen arsip yang terselamatkan	Persen	90,00	60.905.985	90,00	63.951.284	Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip DISPUSIP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
	Sasaran:							
2.8	Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD	Rasio Jumlah Perda yang Ditetapkan terhadap Raperda	Persen	75,00		80,00		Sekretariat DPRD
		Rasio jumlah Keputusan/ Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100,00		100,00		
		Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	75,00		78,33		
	Program:							
2.8.1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran	Persen	100,00	10.467.173.500	100,00	10.990.532.175	Sekretariat DPRD
	Sasaran:							
2.9	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang professional, handal dan terintegrasi dalam Mewujudkan *Cirebon Smart City*	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,1		3,2		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program:							
2.9.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Informasi	400	2.461.787.633	420	2.584.877.015	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKIS
2.9.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	75,00	1.666.348.320	80,00	1.749.665.736	Bidang Layanan e-government; Bidang Infrastruktur Teknologi

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
		Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	100,00	1.187.068.243	100,00	1.246.421.655	Informasi dan Komunikasi DKIS
2.9.3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi	Persen	75,00	604.249.654	80,00	634.462.137	Bidang Statistik Sektoral DKIS
2.9.4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Publik informasi	Persen	70,00	446.232.150	73,00	468.543.758	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKIS
	Sasaran:							
2.10	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00		100,00		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	100,00		100,00		
	Program:							
2.10.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran konsisteni program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	462.810.075	100,00	485.950.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA
		Rasio realisasi program dan kegiatan terhadap rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	98,65	34.337.000	98,75	36.054.000	
2.10.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	98,00	1.082.586.404	100,00	782.101.000	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA
	Sasaran:							
2.10.4	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti untuk menjadi bahan Kebijakan Daerah	Persen	70,00		80,00		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program:							
2.10.5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Persen	100,00	1.891.209.087	100,00	2.104.005.994	Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDA
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan								
	Tujuan:							
3	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,76		56,82		Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sasaran:							

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
3,1	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Persentase Peningkatan *Level of Service* Ruas jalan	Persen	3,00		3,00		Dinas Perhubungan
	Program :							
3.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase rambu lalu lintas yang terpasang	Persen	10,00	1.850.024.000	10,00	1.942.524.000	Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Multimoda, Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT. Parkir, UPT. Penerangan Jalan Umum DISHUB
		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	80,00	105.000.000	100,00	110.250.000	
		Persentase pelayanan parkir kendaraan	Persen	93,00	249.125.000	100,00	261.581.000	
		Persentase Uji Berkala kendaraan bermotor	Persen	78,00	694.009.000	85,00	728.726.000	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persen	100,00	979.205.000	100,00	1.028.194.000	
		Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	100,00	160.771.000	100,00	168.809.000	
		Persentase layanan angkutan darat	Persen	1,53	643.819.000	1,53	676.010.000	
	Sasaran:							
3.2	Meningkatnya kapasitas pelayanan drainase	Persentase drainase kondisi baik	Persen	77,50		80,00		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program:							
3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah titik genangan air yang tertangani	Titik	5	2.269.934.789	6	2.418.431.528	Bidang Bina Marga DPUTR
3.2.2	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	Persen	100,00	18.973.424.777	100,00	20.412.383.588	Bidang Cipta Karya DPUTR
	Sasaran:							
3.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,11		7,72		Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program:							
3.3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase sungai dalam kondisi baik	Persen	75,00	5.956.040.233	78,00	6.274.343.042	Bidang Sumber Daya Air DPUTR
3.3.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan non PDAM	Persen	93,00	450.000.000	93,00	500.000.000	Bidang Sumber Daya Air DPUTR
3.3.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi baik	Persen	86,16	2.382.306.973	86,83	2.750.000.000	Bidang Sumber Daya Air, UPT. Pengelolaan Air Limbah DPUTR
3.3.4	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio gedung pemerintah kondisi baik	Persen	90,00	14.517.395.836	90,00	14.815.458.324	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.3.5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan BAPERKAM dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,40	13.550.000.000	1,40	13.700.000.000	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.3.6	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	Persen	94,00	11.072.972.458	95,00	11.329.428.601	Bidang Bina Marga DPUTR
3.3.7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100,00	215.502.048	100,00	221.277.150	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.3.8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang	Persen	36,50	375.000.000	38,00	547.750.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
3.3.9	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase izin lokasi yang diterbitkan terhadap permohonan ijin lokasi	Persen	85,00	150.000.000	100,00	157.500.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR
3.3.10	Program Penatagunaan tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	Persen	50,00	300.000.000	80,00	307.500.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR
3.3.11	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90,16	1.245.245.810	90,92	1.307.508.100	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas DPRKP
3.3.12	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	10,65	1.231.033.734	11,14	1.292.585.421	Bidang Kawasan Permukiman DPRKP
3.3.13	Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	16,67	4.003.603.706	18,52	4.203.783.891	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas, UPT. Pertamanan dan Pemakaman DPRKP
3.3.14	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio tenaga ahli yang tersertifikasi	Persen	2,00	114.159.673	2,00	119.867.657	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas DPRKP
3.3.15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	Ada/Tidak ada	Ada	310.831.355	Ada	87.072.694	Bidang Tata Lingkungan DLH
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak ada	Ada	385.293.395	Ada	548.333.989	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
3.3.16	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air kualitas tutupan lahan, dan kualitas udara.	poin	50,10; 37,80; 73,20	485.873.691	50,20; 37,80; 73,25	510.167.376	Bidang Tata Lingkungan; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH
		Persentase inventarisasi GRK	persen	100,00	131.597.130	100,00	138.176.987	
3.3.17	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	persen	100,00	205.512.300	100,00	215.787.915	Bidang Tata Lingkungan DLH
3.3.18	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ijin pengelolaan limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00	397.961.445	100,00	417.859.517	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH
3.3.19	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.	Persen	65,00	182.128.428	70,00	86.234.849	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.3.20	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Penetapan Hak MHA	kali	1	46.773.475	1	49.112.149	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.3.21	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	kali	1	81.488.400	1	85.562.820	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Lingkungan Hidup DLH
3.3.22	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	318.347.978	Ada	334.265.376	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.3.23	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	Persen	100,00	42.962.500	100,00	45.110.625	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.3.24	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen	73,00	27.176.155299	72,00	28.534963.064	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; UPT Pengelolaan Sampah; UPT TPA DLH
		Persentase cakupan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	26,00	848.701.875	27,00	891.136.969	
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif								
	Tujuan:							
4	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80,00		83,00		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan Kesambi; Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
								Pekalipan; Kecamatan Harjamukti; Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk
	Sasaran:							
4.1.	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lokasi/ Titik	25		15		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Program:							
4.1.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	0,00	0	100,00	393.159.659	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil SATPOLPP
		Cakupan Rasio Linmas per RT	Persen	100,00	3.007.956.420	100,00	2.765.194.583	
		Penyelesaian Jumlah Kasus Pelanggaran K3	Persen	100,00	1.184.417.850	100,00	1.243.638.743	
4.1.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	30.000.000	100,00	31.500.000	Kecamatan Kesambi
4.1.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	15.000.000	0	15.750.000	Kecamatan Kesambi
4.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	80.000.000	100,00	84.000.000	Kecamatan Pekalipan
4.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	45.000.000	0	47.250.000	Kecamatan Pekalipan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
4.16	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	90.000.000	100,00	94.500.000	Kecamatan Harjamukti
4.1.7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	90.000.000	0	94.500.000	Kecamatan Harjamukti
4.1.8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	15.000.000	100,00	15.750.000	Kecamatan Kejaksan
4.1.9	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	10.000.000	0	10.500.000	Kecamatan Kejaksan
4.1.10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	30.000.000	100,00	31.500.000	Kecamatan Lemahwungkuk
4.1.11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	45.000.000	0	63.000.000	Kecamatan Lemahwungkuk
	Sasaran:							
4.2	Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional	Konflik Kasus Kebangsaan dan Nasionalisme	Kasus	0		0		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program:							
4.2.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Persen	65,00	65.754.000	70,00	65.754.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya BAKESBANGPOL
4.2.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat pemahaman Politik di masyarakat	Persen	70,00	1.285.640.513	75,00	1.285.640.513	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL
4.2.3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Oganisasi Kemasyarakatan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Ormas, LSM dan OKP tentang 4 (empat) pilar.	Persen	70,00	967.858.000	75,00	967.858.000	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		
				K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*11*
4.2.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik	Persen	80,00	1.289.403.000	90,00	1.289.403.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik BAKESBANGPOL
	Sasaran:							
4.3	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK	Persen	85,00		85,00		Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif	Persen	23,00		27,00		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program:							
4.3.1	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikat	Orang	70	1.147.930.000	80	1.205.326.500	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi BPBD
4.3.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	85,00	6.491.155.508	90,00	6.835.582.727	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan dan Bidang Pengendalian, Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran DAMKAR

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 terdiri atas rencana program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, dan Unsur Kewilayahan.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun belanda daerah 5 (lima) tahun ke depan, dialokasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, yang meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan ASN.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa proritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk:
    a. Pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Cirebon tahun 2018-2023, meliputi: 1+) Pemulihan ekonomi dan rehabilitasi masyarakat terdampak Covid-19; 1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan; 3) Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi; 4) Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata; 5) Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; serta 6) Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum;

b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2019-2023;
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan pemerintah Kota;
d. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
e. Pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah;
f. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD;
g. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur, yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran pada Prioritas III diperuntukan untuk mendanai program-program Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, namun tidak menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2018-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

   Adapun kerangka pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon disajikan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sedangkan program-program pembangunan daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif per Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon disajikan pada Tabel 7.3, Tabel 7.4, dan Tabel 7.5.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas rill keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun ke depan (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD pada tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Namun dalam proses penyusunan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021, selain menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan tersebut menjadi salah satu alasan utama Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, selain adanya pandemi Covid-19.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Target Sebelum Perubahan RPJMD		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**BELANJA**	**1.568.558.770.250,00**	**1.618.231.698.778,44**	**1.587.295.890.992,00**	**1.582.881.804.426,00**
1.1	**Belanja Tidak Langsung**	**727.323.257.900,00**	**760.640.830.437,50**	**695.598.341.441,00**	**702.702.370.510,00**
1.1.1	Belanja Pegawai	666.351.450.750,00	699.669.023.287,50	639.167.453.466,00	605.343.249.993,00
1.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Belanja Hibah	54.772.411.150,00	54.772.411.150,00	52.655.887.215,00	52.243.034.036,00
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.475.500.000,00	3.475.500.000,00	2.970.200.000	3.320.180.000,00
1.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	723.896.000,00	723.896.000,00	758.568.800,00	0,00
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	46.231.960,00	41.795.906.481,00
1.2	**Belanja Langsung**	**841.235.512.350,00**	**857.590.868.340,94**	**891.697.549.551,00**	**880.179.433.916,00**
1.2.1	Belanja Pegawai	23.467.712.803,00	23.467.712.803,00	21.455.438.216,00	44.555.923.695,00
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	619.778.645.418,00	632.174.218.326,36	600.326.303.396	541.273.784.740,00
1.2.3	Belanja Modal	197.989.154.129,00	201.948.937.211,58	269.915.807.939,00	294.349.725.481,00

Sumber: BKD Kota Cirebon, 2021

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021-2023

Kode Akun	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5.	**B E L A N J A**	**1.449.838.480.240,00**	**1.458.058.870.469,80**	**1.541.091.822.790,45**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.330.970.444.308,00**	**1.335.856.662.459,84**	**1.415.360.348.540,19**
5.1.01	Belanja Pegawai	672.004.788.617,00	682.084.860.446,26	692.316.133.352,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.772.755.124,00	625.015.043.435,25	664.712.321.437,34
5.1.05	Belanja Hibah	28.192.900.567,00	28.756.758.578,34	58.331.893.749,91
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	58.331.893.749,91
5.2	**Belanja Modal**	**114.308.035.932,00**	**117.642.208.009,96**	**121.171.474.250,26**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	231.944.400,00	238.902.732,00	246.069.813,96
5.2.02	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	54.438.177.793,00	56.071.323.126,79	57.753.462.820,59
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.888.118.987,00	60.654.762.556,61	62.474.405.433,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	219.644.152,00	226.233.476,56	233.020.480,86
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	437.850.600,00	450.986.118,00	464.515.701,54
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.560.000.000**	**4.560.000.000**	**4.560.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.560.000.000	4.560.000.000	4.560.000.000
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

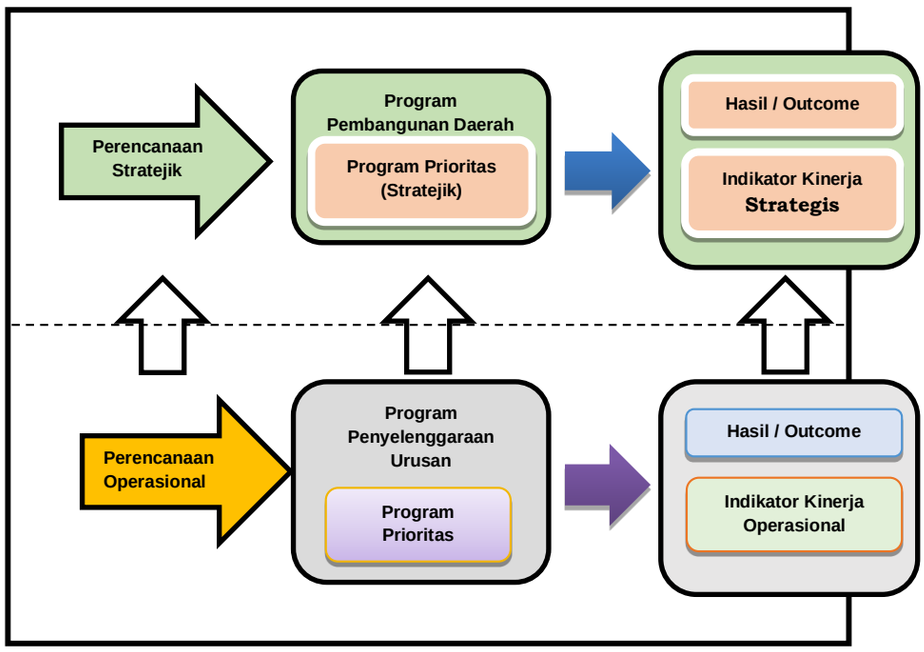
Sumber: BKD Kota Cirebon, 2021

7.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana Gambar 7.1.

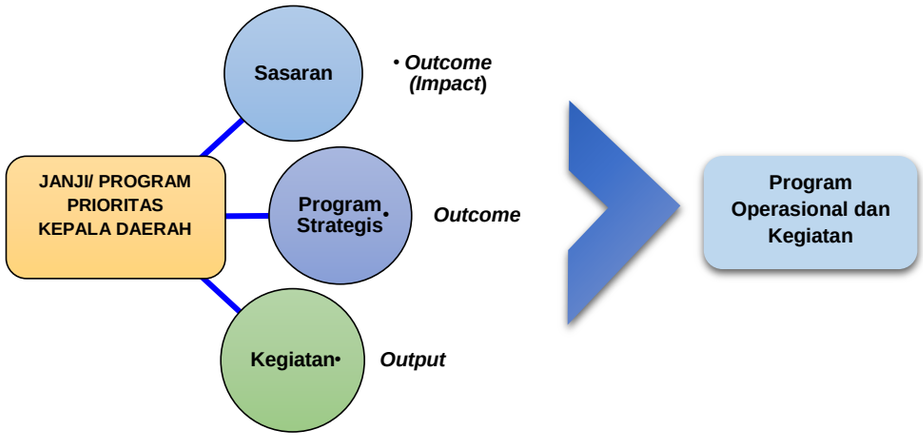
Gambar 7.1
Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah



Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan *urgent.* Program strategis selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik Kepala Daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas Kepala Daerah terpilih diimplementasikan dalam tataran sasaran, program, dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*), atau kegiatan (*output*) yang

dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi pada Gambar 7.2.

Gambar 7.2
Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah



Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial adalah sebagai berikut:

- Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan.a.tau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

7.3 Program Perangkat Daerah

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang bersifat operasional, begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgen untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi

program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib, pilihan, dan penunjang).

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)/TPB;
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas layanan publik dan daya saing daerah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan pelestarian, pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis sejarah;
7. Upaya-upaya pemulihan ekonomi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Tabel 7.3
Realisasi Capaian Program Perangkat Daerah yang Diserta Kebutuhan Pendanaan Kota Cirebon Tahun 2019-2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar**													
1.1	**Pendidikan**													
1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	57,94	65,73	57,94	5.861.200.000	58,81	2.978.600.000	57,54	2.151.908.500	57,42	2.199.547.500	Bidang PNF DISDIK
1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**Pendidikan SD/MI:**					70.765.382.150		101.503.573.250		61.653.658.204		77.991.143.733	Bidang Dikdas DISDIK
		APK	Persen	111,37	130,66	100,00		100,00		107,79		106,17		
		APM	Persen	95,51	115,27	97,00		97,10		88,76		95,29		
		Angka putus sekolah	Persen	0,02	0,08	0,02		0,08		0,00		0,00		
		Angka mengulang kelas	Persen	0,43	0,40	0,40		0,40		0,40		0,38		
		Angka kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	118,65	110,21	118,70		100,00		111,33		108,83		
		Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	20,48	40,25	64,50		80,65		55,10		55,10		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 7-12	Rasio	0,28	0,28	0,18		49		0,51		0,51		
		Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	15,00	15,00	15,08		15,08		3,88		3,43		
		Pendidikan SMP/MTs:												
		APK	Persen	139,93	151,91	100,00		100,00		81,85		124,78		
		APM	Persen	82,72	113,99	82,72		83,50		59,12		89,91		
		Angka putus sekolah	Persen	0,02	0,26	0,02		0,29		0,28		0,03		
		Angka mengulang kelas	Persen	0,23	0,23	0,20		0,20		0,20		0,53		
		Angka kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA	Persen	118,02	113,73	118,02		100,00		100,00		100,00		
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	20,48	40,25	61,35		80,65		28,00		29,00		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	13,70	13,70	13,70		28,00		n.a.		n.a.		
		Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)	Rasio	12,00	12,14	12,14		12,38		4,00		4,00		
		Terpenuhinya rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,31	32,31	32,31		30,00		30,00		30,00		
		Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,77	32,77	32,77		32,00		36,00		36,00		
		SD dengan Akreditasi A	Sekolah	26	27	26		26		30		95		
		SD dengan Akreditasi B	Sekolah	20	20	20		20		31		32		
		SD dengan Akreditasi C	Sekolah	114	114	114		114		111		1		
		SMP dengan Akreditasi A	Sekolah	10	10	10		21		19		31		
		SMP dengan Akreditasi B	Sekolah	4	4	4		16		22		10		
		SMP dengan Akreditasi C	Sekolah	30	30	30		8		1		1		
1.1.3	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penduduk Melek Huruf usia >15 tahun	Persen	99,93	99,88	99,94	7.400.000.000	99,95	4.015.000.000	100,00	4.020.309.665	100,00	2.878.102.331	Bidang PNF DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,74	94,88	93,00	4.481.700.000	93,50	5.480.000.000	96,25	829.678.600	95,79	1.163.627.000	Bidang Pembinaan Ketenagaan DISDIK
		Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	48,42	50,41	48,5		50,00		48,15		43,03		
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,19	95,83	93,50		93,71		97,72		94,04		
		Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	53,41	66,06	55,45		57,91		53,38		54,22		
		Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	21,04	20,00	21,04		21,04		18,00		18,00		
		Rasio Guru/ Murid SMP/MTs	Rasio	19,63	18,00	19,63		19,63		18,00		16,00		
		Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	Rasio	22,00	22,00	22,00		22,00		32,00		32,00		
1.1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	Poin	83,00	83,00	83,00	5.519.870.000	83,00	2.102.230.000	83,00	1.717.186.300	84,50	1.748.403.600	Sekretariat DISDIK
1.2	**Kesehatan**													
1.2.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	99,60	99,61	100,00	47.003.430.800		48.872.041.825	82,98	44.339.953.127		31.740.299.278	Sekretariat; Bidang Kesmas; Bidang Pelayanan SDK; UPT Labkesda; UPT Puskesmas (22) DINKES
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	93,76	99,96	100,00				97,85				
		Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99,53	104,86	100,00				97,32				
		Pelayanan kesehatan Balita	Persen	n.a.	92,75	100,00				97,75				
		Pelayanan kesehatan usia sekolah	Persen	93,37	97,58	100,00				97,37				
		Pelayanan kesehatan usia subur	Persen	n.a.	n.a.	100,00				33,58				
		Pelayanan kesehatan usia lanjut	Persen	62,60	n.a.	100,00				92,59				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Pelayanan kesehatan Hipertensi	Persen	50,15	50,50	100,00				57,31				
		Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus	Persen	63,53	63,57	100,00				73,47				
		Pelayanan kesehatan bagi ODGJ	Persen	69,41	70,88	100,00				100,00				
		Pelayanan kesehatan bagi penderita TB, HIV-AIDs sesuai standar	Persen	99,40	99,40	100,00				100,00				
		Cakupan pelayanan kesehatan perorangan	Persen					92,20				92,39		
		Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen					92,20				100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat	Persen					55,00				55,00		
		Unmet need pelayanan kesehatan	Persen	8,00	8,00	7,90		7,80		7,90		7,61		
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	99,00	99,10	99,10		99,02		94,00		97,04		
1.2.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RW Siaga Aktif (dirinci menurut Strata)	RW	247	248	100,00 %	2.310.000.000		147.800.620	96,27	261.823.340		40.229.400	Bidang Kesmas DINKES
		UKBM yang dilaksanakan puskesmas	UKBM					3				3		
		Cakupan PHBS yang dipantau	Persen					79,00				100,00		
		Persentase Posyandu aktif	Persen	n.a.	79,00	81,00				106,67				
		Strata posyandu purnama mandiri (Posyandu Aktif)	Persen					82,00				86,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	n.a.	33,80	5,40		33,80		4,08		33,80		
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persen	7,20	5,40	5,40		5,00		0,00		5,00		
1.2.3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	2.497.500.000	100,00	2.064.738.750	99,84	1.892.425.000	100,00	1.873.446.880	Bidang Kesmas DINKES
		Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	Persen	83,78	82,77	65,00		70,00		81,21		72,95		
		Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif	Persen	50,00	60,15	60,00		60,00		64,38		72,84		
		Cakupan remaja putri mendapatkan tablet tambahan darah	Persen					55,00				38,00		
		Cakupan balita stunting mendapat pelayanan pemantauan pertembuhan	Persen					100,00				100,00		
		Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	Persen	10,24	9,40	9,00		8,50		10,17		10,16		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	10,70	10,20	10,00		9,50		12,70		9,50		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/ balita	Persen	13,41	10,10	12,80		12,50		9,60		8,95		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/ baduta	Persen	10,56	7,78	9,80		9,50		8,16		6,47		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Persen	4,73	3,32	3,70		3,50		3,90		3,94		
1.2.4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	Persen	89,68	90,32	90,50	3.678.640.000	90,70	863.982.900	90,21	1.109.759.650	93,70	216.544.000	Bidang Kesmas DINKES
		Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat	Tatanan	5	5	5		6		5		5		
		Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/ air minum memenuhi syarat	Persen	94,40	95,11	95,30		95,50		98,30		98,10		
		Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	Persen	n.a.	94,34	94,50		94,70		93,50		93,50		
		Tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan	Persen	n.a.	79,39	79,60		79,80		83,59		83,05		
1.2.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	2.548.130.000		18.375.737.220	95,73	963.128.665		6.824.021.115	Bidang P2P DINKES
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar	Persen	94,30	94,30	100,00				100,00				
		Universal Child Immunization (UCI)	Persen	95,50	95,50	100,00				100,00				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA	Persen	90,00	90,00	90,00				110,00				
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	317	425	317				523				
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	90,00	90,00	90,00				34,00				
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	85,00	90,00	85,00				89,20				
		Prevalensi HIV-AIDs dari total populasi	Persen	>0,05	>0,05	>0,05				< 0,05				
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDs	Persen	30,00	n.a.	30,00				n.a.				
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Angka kejadian malaria	Permil	2	0	1				1				
		Cakupan Angka Kejadian Malaria	Permil					1				1		
		Cakupan Angka Bebas Jentik	Persen					95,50				95,50		
		Angka kematian akibat malaria	Persen	0,00	0,00	0,01				0,00				
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100,00	0,00	100,00				100,00				
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
		Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen					100,00				100,00		
		Deteksi dini hepatitis pada ibu hamil	Persen	100,00	100,00	100,00				91,70				
		Cakupan Deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil	Persen					100,00				100,00		
		Angka cacat tingkat 2	Persen	0,00	0,00	5,00				14,00				
		Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Persen					85,00				85,00		
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	85,77	85,77	93,00		93,50		87,00		93,50		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persen	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05		<0,05		<0,05		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persen	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
		Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	Kasus	993	1.364	1.203		1.203		1.670		1.203		
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	317	425	425		380		523		380		
		Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional	Persen	0,00	0,00	65,00		75,00		85,00		75,00		
		Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua	Persen	45,00	45,00	65,00		75,00		66,60		75,00		
		Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB	Persen	86,00	90,00	100,00		100,00		34,00		100,00		
		Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang	Persen	15,00	15,00	70,00		80,00		45,00		80,00		
		Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan penemuan kasus TB anak	Persen	106,00	100,00	110,00		110,00		118,00		110,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	Persen	0,00	0,00	7,00		9,00		3,00		9,00		
		Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	Persen	7,60	8,00	10,00		10,00		9,00		10,00		
1.2.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan pembinaan Lanjut Usia	Persen	60,26	51,44	50,00	75.000.000		0	50,00	21.631.000		0	Bidang Kesmas DINKES
1.2.7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100.000.000		75.000.000	100,00	44.813.000		21.543.400	Bidang Pelayanan SDK DINKES
		Cakupan industri rumah tangga yang dibina	Persen					22,00				22,00		
		Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat	Persen					90,00				90,00		
		Cakupan Pengawasan *Post Market*	Persen					90,00				90,00		
1.2.8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	96,00	99,61	100,00	699.329.000		0	100,00	911.855.000		0	Bid Kesmas DINKES
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,05	100,53	100,00				112,87				
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	93,76	99,96	100,00				98,38				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan pelayanan nifas	Persen	95,36	99,41	100,00				97,25				
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	99,53	104,86	100,00				112,80				
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	94,47	92,86	100,00				93,21				
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen	85,28	87,62	100,00				98,92				
		Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	73,80	74,32	100,00				87,00				
		Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
1.2.9	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen				0	100,00	1.074.124.000		0	91,40	653.493.200	Bid Kesmas DINKES
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen					100,00				94,15		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen					100,00				94,15		
		Cakupan pelayanan nifas	Persen					100,00				94,55		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen					100,00				98,81		
		Cakupan kunjungan bayi	Persen					100,00				85,40		
		Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen					100,00				73,60		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen					100,00				54,18		
		Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia	Persen					100,00				81,12		
1.2.10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	15,40	15,40	21,80	822.500.000	15,40	790.000.000	21,46	3.948.321.540	15,40	66.475.500	Bidang P2P DINKES
		Prevelensi Tekanan Darah Tinggi	Persen					22,80				22,90		
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	100,00	100,00				34,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen					100,00				12,52		
		Pelayanan kesehatan Lansia	Persen	100,00	100,00	100,00				71,77				
		Cakupan Pelayanan kesehatan Lansia	Persen					100,00				12,52		
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	100,00	100,00	100,00				57,31				
		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen					100,00				74,74		
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persen	100,00	100,00	100,00				73,47				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen					100,00				98,00		
1.2.11	Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan	Penanganan KLB <24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00	2.057.600.000		605.272.400	99,48	403.772.900		740.031.700	Bidang P2P; UPT Kesehatan Khusus PSC 119 DINKES
		Cakupan desa/kelurahan yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemologi (PE) < 24 jam	Persen					100,00				100,00		
		A F P (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk <15 tahun	Per 100.000 Kasus	4	4	2				0				
		Cakupan penemuan kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP)	Per 100.000 Kasus					2				n.a.		
		Proporsi kematian akibat keracunan	Persen	n.a.	n.a.	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri	Persen	n.a.	n.a.	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Angka Bebas Jentik	Persen	95,00	n.a.	95,00				0,00				
1.2.12	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	B O R	Persen	58,9	62,81	76,00	426.880.027.939		0	65,54	316.209.577.924		0	UPT RSD GunungJati DINKES
		L O S	Hari	3,40	4,14	4,30				4,30				
		T O I	Kali	1,00	2,41	1,10				1,10				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		B T O	Kali	37,45	56,35	37,45				37,45				
		G D R	Persen	38,00	68,00	55,00				78,18				
		N D R	Per mil	24,00	43,00	23,75				56,84				
		Pelayanan Gawat Darurat	Persen				0	100,00	354.500.000.000		0	95,80	183.585.800.200	UPT RSD GunungJati DINKES
		Pelayanan Rawat Jalan	Persen					75,00				94,50		
		Pelayanan Rawat Inap	Persen					100,00				86,50		
		Pelayanan Bedah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Persalinan dan Perinatalogi	Persen					100,00				73,00		
		Pelayanan Intensif	Persen					100,00				82,00		
		Pelayanan Radiologi	Persen					65,00				64,00		
		Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	Persen					95,00				93,00		
		Pelayanan Rehabilitasi Medik	Persen					85,00				93,00		
		Pelayanan Farmasi	Persen					70,00				93,30		
		Pelayanan Gizi	Persen					85,00				93,30		
		Pelayanan Transfusi Darah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Keluarga Miskin	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Rekam Medis	Persen					70,00				74,50		
		Pengolahan Limbah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah	Persen					100,00				100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Persen					100,00				100,00		
		Pelayanan Laundry	Persen					85,00				99,90		
		Pencegahan Pengendalian Infeksi	Persen					80,00				95,50		
		Administrasi dan Manajemen	Persen					55,00				66,70		
		Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Persen					85,00				76,00		
1.2.13	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100,00	100,00	100,00	28.065.374.000		0	97,76	27.436.543.375		0	UPT RSD Gunung Jati DINKES
1.2.14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin	Persen	100,00	100,00	100,00	26.489.031.186	100,00	20.744.712.000	85,01	14.916.734.000	100,00	21.849.353.500	Bidang Pelayanan SDK DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD)	Persen	60,00	60,00	100,00		100,00		56,00		100,00		
1.2.15	Program Peningkatan Mutu RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Akreditasi Rumah Sakit	Strata	Paripurna	Paripurna	Paripurna	1.000.000.000	Paripurna	1.200.000.000	n.a.	0	n.a.	0	UPT RSD Gunung Jati DINKES
1.2.16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	Persen	n.a.	100,00	100,00	5.365.000.000		2.645.000.000	99,20	23.169.855.616		3.229.934.650	Bidang Pelayanan SDK; UPT Farmasi DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus)	Persen					100,00				100,00		
		Cakupan sarana yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	Persen					84,00				85,00		
		Cakupan sarana kefarmasian yang dibina	Persen					92,00				92,00		
		Puskesmas yang melaksanakan Gema Cermat	Unit					20				18		
		Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Persen	n.a.	10,00	40,00		40,00		51,00		40,00		
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Orang	69	48	45		45		67		45		
		Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	n.a.	30	20		20		19		20		
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Persen	n.a.	n.a.	1,77		1,77		1,80		1,77		
		Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen	n.a.	n.a.	1,70		1,70		0,00		1,70		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.2.17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	15.623.540.000		15.335.000.000	90,61	5.177.125.695		13.191.021.860	Sekretariat; Bidang Pelayanan SDK
		· B O R	Persen	58,90	58,90	61,00		63,00		60,60		42,09		DINKES
		· L O S	Hari	3,7	3,4	6,2		6,4		3,2		2,3		
		· T O I	Kali	2,5	1,00	1,20		1,40		2,00		5,14		
		· B T O	Kali	60,39	37,45	37,45		37,45		70,70		10,92		
		· G D R	Per mil	38,07	38,00	45,00		46,00		35,10		14,84		
		· N D R	Per mil	24,07	24,00	25,00		25,00		15,80		5,69		
		Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi utama	Unit					2				3		
		Jumlah Layanan BLUD	Unit					1 RS; 22 Puskesmas				1 RS; 0 Puskesmas		
1.2.18	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompetensi	Persen	n.a.	56,00	56,00	1.152.725.300		1.152.725.300	25,75	96.089.500		83.695.000	Bidang Pelayanan SDK DINKES
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang/ 100.000 penduduk					8,91				11,03		
		Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	n.a.	80,00	82,50		82,50		79,00		100,00		
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**													
1.3.1	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan mantap kondisi baik	Persen	87,00	89,00	91,00	131.600.000.000	92,00	45.600.000.000	81 ,00	15.810.508.995	92,00	14.567.994.600	Bidang Bina Marga DPUPR
		Meningkatnya jalan mantap	Persen	n.a.	n.a.	86,00				81,00				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Trotoar Kondisi Baik 100 % (10,5km),	Persen	n.a.	n.a.	100,00				81,00				
		Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit)	Unit	50	n.a.	3				1				
1.3.2	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	Total Jasa Konstruksi = 716; bersertifikat 69 jasa konstruksi	n.a.	58,8	500.000.000	69,00	550.000.000	100,00	50.000.000	100,00	66.520.000	Bidang Bina Marga DPUPR
1.3.3	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	74,00	100,00	1,40	20.000.000.000	1,40	28.500.000.000	1,40	12.870.053.500	100,00	1.903.250.000	Bidang Cipta Karya DPUPR
1.3.4	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	75,00	100,00	80,00	100.500.000.000	85,00	50.500.000.000	100 ,00	46.977.065.080	100,00	19.087.086.670	Bidang Cipta Karya DPUPR
1.3.5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	n.a.	n.a.	15,00	2.200.000.000	30,00	2.200.000.000	n.a.	0	n.a.	0	Bidang Cipta Karya DPUPR
1.3.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023)	Titik	22	1	2	52.000.000.000	2	52.000.000.000	n.a.	0	n.a.	0	Bidang Sumber Daya Air DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	92,82	90,00	94,26	4.500.000.000	95,68	4.550.000.000	100,00	2.987.846.000	90,00	1.190.953.848	Bidang Sumber Daya Air DPUPR
1.3.8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	10	8	2	13.750.000.000	2	18.750.000.000	2	8.256.648.050	2	6.336.397.400	Bidang Sumber Daya Air DPUPR
1.3.9	Program Penyelengaraan Infrastruktur Permukiman	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	55,00	90,00	100,00	34.100.000.000	100,00	29.100.000.000	100,00	27.401.129.500	100,00	9.076.448.000	Bidang Cipta Karya DPUPR
1.3.10	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	89,00	n.a.	90,00	1.250.000.000	92,00	1.250.000.000	96,00	2.542.617.400	n.a.	0	Bidang Cipta Karya DPUPR
1.3.11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	Persen	0,20	n.a.	1,00	2.900.000.000	1,00	2.900.000.000	0,90	49.800.000	1,10	82.395.000	Bidang Penataan Ruang DPUPR
1.3.12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luasan RTH publik yang bertambah	Persen	2,00	0,35	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	n.a.	0	n.a.	0	Bidang Penataan Ruang DPUPR
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**													
1.4.1	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Umum Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	11,11	n.a.	15,00	1.003.185.000	18,89	1.103.503.500	12,96	725.340.000	12,96	1.207.841.250	Bidang Perumahan DPRKP
1.4.2	Program Penyediaan Perumahan	Rasio jumlah rumah layak huni per jumlah penduduk	Poin	0,1758	n.a.	0,1773	390.652.000			0,0266	196.809.500			Bidang Perumahan DPRKP
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen					88,64	429.717.200			93,96	292.151.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.4.3	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	9,00	n.a.	9,18	620.000.000	9,67	1.002.500.000	8,81	784.925.500	32,62	1.905.871.000	Bidang Permukiman DPRKP
1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**													
1.5.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3	Persen	n.a.	99,20	1 orang per RT	418.643.000	100,00	952.556.000	1 orang per RT	748.380.000	n.a.	0	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP
1.5.2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Rasio Linmas	Persen	100,00	100,00	100,00	1.505.998.450	100,00	1.844.578.450	100,00	2.132.718.700	100,00	801.712.700	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat SATPOL PP
1.5.3	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	100,00	100,00	100,00	381.463.500			n.a.	0			Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat SATPOL PP
1.5.4	Program Penegakan Peraturan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	324.219.500			100,00	538.593.500			Bidang Penegakan dan Perundang-undangan Daerah SATPOL PP
		Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran	Persen	100,00	99,20			100,00	787.556.000			100,00	363.473.950	
1.5.5	Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Nol persen kasus SARA dan kasus terorisme	Persen	100,00	100,00	100,00	566.850.000		240.000.000	100,00	158.443.500		500.000	Seksi Kesmas KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	n.a.	150 orang	50,00		60,00		n.a		60,00		
1.5.6	Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	100,00	4500 orang	100,00	1.890.811.000	50,00	2.035.000.000		1.474.402.900	50,00	1.279.194.400	Seksi Wasbang/ Wasdanas KESBANGPOL
1.5.7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan petugas yang memiliki sertifikasi penanganan bencana.	Persen	n.a.	50 orang	50,00	50.000.000			98,00	33.417.500			Seksi Binpol KESBANGPOL
		Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat	Persen	n.a.	n.a.			60,00	218.000.000			60,00	12.355.701	
1.5.8	Program Pendataan dan Penyebarluasan Informasi Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan	Orang	300	300	300	135.000.000			500	84.940.000			Seksi Pendataan dan Pengembangan Potensi Bencana KPBPK
		Jumlah dokumen data informasi/ dokumen penanggulangan bencana	Dokumen					1	100.000.000			1	10.000.000	
1.5.9	Program Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	825.000.000			100,00	628.038.400			Seksi Penanggulangan Bencana KPBPK
1.5.10	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulngan bencana	Orang	24	54	60	110.000.000			41	101.661.000			Seksi Penanggulangan Bencana KPBPK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.5.11	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikasi	Orang					56	975.000.000			26	569.195.045	Seksi Penanggulangan Bencana KPBPK
1.5.12	Program Penyelamatan/Evakuasi dan Penanganan Pasca Bencana	Cakupan korban bencana yang mendapatkan penanganan	Persen					100,00	150.000.000			100,00	69.103.200	Seksi Penanggulangan Bencana KPBPK
1.5.13	Progam Peningkatan Kesiapsiagan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	60,00	60,00	70,00	6.133.141.000	75,00	6.670.000.000	70,00	5.357.695.900	99,92	5.062.909.250	Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran DAMKAR
		Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat	Persen	61,00	61,00	75,00		82,00		75,00		27,11		
1.5.14	Progam Pemberdayaan Masyarakat Sarana dan Prasarana Kebakaran	Rasio masyarakat yang dilatih dibagi jumlah penduduk	Rasio	1 : 570	1 : 570	1 : 437	837.622.000		950.000.000	1 : 437	791.463.300		56.188.800	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran DAMKAR
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen	52,00	52,00	52,00		61,00		52,00		100,00		
1.6	**Sosial**													
1.6.1	Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PMKS	Persen	n.a.	n.a.	2 MoU	400.000.000	65,00	1.885.000.000	2 MoU	121.137.935	58,28	33.500.000	Bidang Sosial DSPPPA
1.6.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	65,00	65,00	65,00	4.310.000.000	58,28	400.000.000	65,00	398.655.000	65,00	466.963.500	Bidang Sosial DSPPPA
1.6.3	Program Satu Data Keluarga Miskin	Data Base keluarga miskin yang valid	Dokumen	1	0	1	300.000.000	2	600.000.000	n.a.	0	2	291.360.100	Bidang Sosial DSPPPA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.6.4	Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	800.000.000	100,00	400.000.000	100,00	154.485.000	100,00	1.353.129.800	Bidang Sosial DSPPPA
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**													
2.1	**Tenaga Kerja**													
2.1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	48,84	54,99	75,00	1.280.000.000	67,50	1.070.000.000	75,00	268.200.500	67,50	266.380.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; UPT Latihan Tenaga Kerja DISNAKER
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	Persen	75,00	34,69	60,00		45,00		60,00		45,00		
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	Persen	30,00	54,55	60,00				60,00				
2.1.2	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	49,60	47,09	30,00	775.000.000	47,50	565.000.000	30,00	307.079.460	47,50	190.701.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja DISNAKER
2.1.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Kasus	10,08	5,27	10	400.000.000	6	308.000.000	8	155.000.000	6	58.256.800	Bidang Hubungan Industrial DISNAKER
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	60,00	56,50	60,00		61,00		60,00		61,00		
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	66,64	77,86	55,00		78,50		55,00		78,50		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	Persen	n.a.	n.a.	100,00		0,00		100,00		0,00		
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**													
2.2.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG, Kelembagaan perlindungan perempuan	Satgas PKDRT	4	4	4	400.000.000		0	4	97.851.000		0	Bidang PP; Bidang PA DSPPPA
			Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
2.2.2	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	Perangkat Daerah;	3	3	3	650.000.000		0	3	56.459.800		0	Bidang PP; Bidang PA DSPPPA
			KK	100	100	100				100				
			Orang PEKKA	25	25	25				25				
2.2.3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit pelayanan terpadu (UPt)	Persen	100,00	100,00	100,00	950.000.000	100,00	926.607.960	100,00	403.014.950	n.a.	290.834.500	Bidang PP; Bidang PA DSPPPA
		Penguatan kelembagaan PUG	Pokja PUG					1				1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Satgas PKDRT					4				4		
		Meningkatnya impelmentasi PUG pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					3				3		
		Cakupan RW layak anak	Persen					4,44				6,43		
		Cakupan Penaganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen					100,00				100,00		
2.3	**Pangan**													
2.3.1	Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Kegiatan	n.a.	n.a.	1	78.240.000		0	n.a.	81.890.000		0	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DPPKP
		Partisipasi Perangkat Daerah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Persen	n.a.	n.a.	50,00				n.a.				
		Jumlah Advokasi	Kali/ tahun	n.a.	n.a.	2				n.a.				
		Meningkatnya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Persen	n.a.	n.a.	100,00				100,00				
2.3.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/ kapita/ hari	E= 2.748	E= 3.598	E = 2.400	302.688.000	E=≥ 2.400	675.414.300	E= 3.669	245.953.000	E= 3.598	1.171.766.600	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPPKP
			kkal/ kapita/ hari	P= 73,92	P= 97,82	P = 63		P=≥63		P= 94.88		P= 97,82		
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	Persen	100,00	100,00	90,00		90,00		100,00		100,00		
		Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	Persen	100,00	100,00	90,00		90,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100,00	100,00	60,00		-		100,00		100,00		
		Penguatan Cadangan Pangan	Persen	25,00	45,00	60,00		-		27.62		54,85		
2.3.3	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	80,1	77,8	79,9	414.655.000	-	1.318.088.400	n.a.	287.825.000	n.a.	382.255.600	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DPPKP
		Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	93,97	94,65	85,00		-		n.a.		n.a.		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	85,00	n.a.	86,00		87,00		97,50		96,37		
		Penurunan konsumsi beras	kg/kap/ hr	95,80	95,80	94,00		93,00		89,40		95,80		
		Peningkatan konsumsi pangan hewani	kg/kap/ hari	39,10	39,10	41,00		43,00		38,30		43,60		
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah	gr/kap/ hari	125,75	125,75	179,00		181,00		202,40		231,30		
		Peningkatan konsumsi umbi-umbian	gr/kap/ hr	27,00	27,00	28,00		30,00		27,60		25,90		
2.4	**Pertanahan**													
2.4.1	Program Pengelolaan Pertanahan	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	2	n.a.	2	20.400.000.000	4	20.400.000.000	n.a.	0	3	318.651.500	Bidang Penataan Ruang DPUPR
2.5	**Lingkungan Hidup**													
2.5.1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	61,33	25,38	28,48	100.000.000		0	56,92	95.340.000		0	Bidang Tata Lingkungan DLH
		Indeks Kualitas Udara	Poin	53,04	78,03	78,10				68,58				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	32,63	32,63	32,64				35,77				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	Persen	2,00	2,00	20,00	8.217.958.000	22,00	13.040.000.000	8,00	8.697.708.200	8,00	12.188.415.761	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; UPT Pengelolalaan Sampah; UPT Tempat Pemrosesan Akhir DLH
		Persentase Cakupan Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	78,00	80,00	76,00		75,00		88,00		71,00		
		Persentase Ijin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang diterbitkan	Persen	n.a.	n.a.									
		Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen					100,00				100,00		
		Operasional TPA/TPST/SPA di Kota Cirebon (Nilai Adipura TPA)	Skor	70,07	73,16	72,00		74,00		68,25		n.a.		
2.5.3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kota Cirebon	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	905.923.000	Ada	2.792.000.000	Ada	691.336.000	Ada	491.563.800	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Bidang Tata Lingkungan; Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
		Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Tidak Ada		Tidak ada		Tidak Ada		
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/ Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	48,00	49,00	50,00		55,00		57,00		55,00		Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH
		Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerindah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan dampak Didaerah Kota	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
		Indeks Kualitas Air	Poin	n.a.	n.a.			29,93				46,92		
		Indeks Kualitas Udara	Poin	n.a.	n.a.			78,20				73,13		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	n.a.	n.a.			32,65				37,54		
2.5.4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	Persen	18,75	18,75	31,25	1.207.911.000	58,33	1.157.200.000	31,25	954.621.400	n.a.	418.542.750	Bidang Tata Lingkungan; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH
		Persentase Luas Lahan Konservasi	Persen	0,42	0,42	0,42		0,45		0,42		0,42		
		Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Prosenstase Peningkatan Jumlah Wilayah yang memiliki Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi dan Perubahan Iklim	Persen	2,82	3,22	4,00		5,26		4,00		4,00		
2.5.5	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Penetapan Hak MHA	Kali	0	n.a.	1	539.840.000	1	605.000.000	0	507.361.000	0	453.900.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; Bidang Tata Lingkungan DLH
		Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Kali	0	n.a.	1		1		1		10		
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		
		Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat	Kali/ Tahun	1	1	4		4		6		1		
		Meningkatnya Jumlah dan Anggota kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	Persen	0,00	n.a.	50,00		52,00		50,00		52,00		
2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil**													
2.6.1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	95,00	95,00	95,00	1.130.000.000	96,00	1.365.000.000	99,00	1.069.401.407	99,00	1.246.157.545	Bidang Pendaftaran Penduduk DISDUKCAPIL
		Cakupan Penerbitan KK	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.6.2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	88,00	88,00	88,00	150.000.000	96,00	95.000.000	83,00	54.883.800	87,88	137.890.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL
		Cakupan Akta Kematian	Persen	80,00	80,00	80,00		81,00		76,53		90,00		
2.6.3	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	10,00	10,00	18,00	343.170.000	9,00	205.000.000	13,00	162.728.000	10,00	196.569.200	Bidang PIAK DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
2.7.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina:					215.951.000		0		233.891.000		0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat DSPPPA
		· Wartek	Unit	22	22	2				2				
		· Kelompok	Kelompok	28	28	28				28				
		· Posyandu	Unit	331	331	331				331				
2.7.2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	RW	248	248	Minimum 20% dari Tahun Sebelumnya	768.382.000		0	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	611.865.780		0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat DSPPPA
		Meningkatnya swadaya masyarakat dalam bantuan RW	RT	1.369	1.369	Minimum 30% dari Tahun Sebelumnya				Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya				
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam BSMSS dan BBRGM	LPM	22	22	22				22				
2.7.3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di bina	Persen	100,00	100,00	100,00	456.618.000		0	100,00	1.790.437.000		0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat DSPPPA
2.7.4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan	Keikutsertaan Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi/Nasional	Persen	22 kelurahan	22 kelurahan	100,00	625.000.000		0	100,00	237.088.200		0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat DSPPPA
2.7.5	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM	Kelompok				0	2	1.705.000.000		0	n.a.	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat DSPPPA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase LPM Berprestasi	Persen					13,60				n.a.		
		Persentase Posyandu aktif	Persen					85,00				n.a.		
		Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen					14,00				n.a.		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen					40,00				n.a.		
		Persentase PKK aktif	Persen					100,00				n.a.		
	Kecamatan Kesambi:													
2.7.6	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan, bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah Kecamatan Kesambi	Persen	n.a.	98,31	70,00	2.689.747.500		0	100,00	2.397.144.400		0	Kecamatan Kesambi
2.7.7	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Rasio Juara lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	Rasio	Juara III MTQ Kota Cirebon	97,58	20,00	392.727.500		0	5 Cabang 24 Orang	416.044.500		0	Kecamatan Kesambi
2.7.8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan posyandu strata mandiri	Persen	23,00	99,87	35,00	182.500.000		0	13,97	250.277.200		0	Kecamatan Kesambi
2.7.9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Kesambi dan persentase masyarakat di Kec. Kesambi yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi.	Persen	n.a.	97,18	57,00	1.723.278.271		0	100,00	1.790.437.000		0	Kecamatan Kesambi
2.7.10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi/jumlah prestasi olahraga	Atlet	n.a.	n.a.	1	309.000.000		0	1	73.961.000		0	Kecamatan Kesambi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.7.11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir Musrenbang Kecamatan	Persen	99,27	70,00	70,00	110.000.000		0	100,00	119.873.000		0	Kecamatan Kesambi
2.7.12	Program RW Bersih	Rasio RW K3	Rasio	n.a.	96,41	30,00	112.200.000		0	100,00	79.561.600		0	Kecamatan Kesambi
2.7.13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan	Poin	84,00	93,66	85,00	64.000.000		0	100,00	237.088.200		0	Kecamatan Kesambi
2.7.14	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kesambi	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan				0	0	8.079.600.000		0	0	5.353.582.100	Kecamatan Kesambi
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					1				1		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					4				4		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
	Kecamatan Pekalipan:													
2.7.15	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan dan saluran drainase	Persen	90,00	99,39	100,00	1.322.000.000		0	93,75	1.161.869.000		0	Kecamatan Pekalipan
2.7.16	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	20.678.600		0	100,00	16.975.000		0	Kecamatan Pekalipan
2.7.17	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Posyandu	Persen	Juara III Tingkat Kota	97,54	100,00	197.033.000		0	90,00	166.286.000		0	Kecamatan Pekalipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.7.18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan se-Kecamatan Pekalipan	Persen	100,00	97,00	100,00	1.813.000.000		0	85,71	1.806.924.800		0	Kecamatan Pekalipan
2.7.19	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Pekalipan	Persen	100,00	99,02	100,00	276.604.000		0	100,00	314.703.000		0	Kecamatan Pekalipan
2.7.20	Program RW bersih	Terlaksananya program RW bersih di tingkat Kecamatan Pekalipan	Persen	n.a.	81,28	31,00	181.870.000		0	100,00	178.920.000		0	Kecamatan Pekalipan
2.7.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	120.677.000		0	100,00	142.884.000		0	Kecamatan Pekalipan
2.7.22	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Pekalipan	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan				0	1	4.082.000.000		0	0	4.395.197.300	Kecamatan Pekalipan
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					2				0		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					1				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				4		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
	Kecamatan Harjamukti:													
2.7.23	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur	Persen	100,00	99,43	100,00	3.752.497.100		0	100,00	2.691.352.500		0	Kecamatan Harjamukti
2.7.24	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100,00	100,00	80,00	184.239.000		0	100,00	151.924.000		0	Kecamatan Harjamukti

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.7.25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Persen	98,15	98,15	80,00	1.854.756.500		0	71,91	2.371.882.000		0	Kecamatan Harjamukti
2.7.26	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	Persen	99,24	99,24	32,00	282.639.500		0	100,00	197.597.000		0	Kecamatan Harjamukti
2.7.27	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	93,35	93,35	70,00	370.686.500		0	82,86	202.260.000		0	Kecamatan Harjamukti
2.7.28	Program Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	100,00	100,00	30.937.500		0	100,00	23.500.000		0	Kecamatan Harjamukti
2.7.29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	141.988.000		0	100,00	183.915.000		0	Kecamatan Harjamukti
2.7.30	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Harjamukti	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan				0	0	5.972.100.000		-	1	6.994.816.431	Kecamatan Harjamukti
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					4				3		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					1				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				1		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
	Kecamatan Kejaksan:													
2.7.31	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi drainase dan jalan perumahan dalam kondisi baik	Persen	98,44	98,81	100,00	1.430.000.000		0	100,00	1.243.629.000		0	Kecamatan Kejaksan
2.7.32	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Bertambahnya wirausaha muda	Orang	n.a.	n.a.	60	380.500.000		0	100,00	197.362.627		0	Kecamatan Kejaksan
2.7.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan LKK aktif	Persen	100,00	98,75	100,00	172.000.000		0	100,00	1.646.490.300		0	Kecamatan Kejaksan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.7.34	Program RW Bersih	Rasio RW K3	Rasio	97,34	99,17	75,00	166.000.000		0	100,00	181.873.000		0	Kecamatan Kejaksan
2.7.35	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Lestarinya adat budaya daerah	Persen	85,00	99,87	95,00	59.400.000		0	67,00	40.009.000		0	Kecamatan Kejaksan
2.7.36	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Peringkat MTQ tingkat Kota Cirebon	Peringkat	n.a.	n.a.	III	322.700.000		0	100,00	371.253.732		0	Kecamatan Kejaksan
2.7.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir Musrenbang Kota	Persen	100,00	99,61	100,00	122.000.000		0	100,00	117.320.000		0	Kecamatan Kejaksan
2.7.38	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kejaksan	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan				0	0	4.408.737.750		0	0	4.252.133.700	Kecamatan Kejaksan
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan					2				4		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan					2				0		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan					0				0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan					0				0		
	Kecamatan Lemahwungkuk:													
2.7.39	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/bangunan fasilitas umum, dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan Lemahwungkuk.	Persen	100,00	99,00	100,00	1.946.000.000		0	53,44	1.654.927.500		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.40	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatanj Posyandu di RW	Persen	95,00	100,00	100,00	185.478.477		0	83,00	88.615.000		0	Kecamatan Lemahwungkuk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.7.41	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk	Persen	95,00	98,00	100,00	1.917.652.652		0	98,00	205.876.670		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.42	Program RW Bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan	Persen	n.a.	100,00	29,00	100.175.175		0	100,00	74.800.000		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.43	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya seni budaya daerah	Triwulan	n.a.	94,00 persen	4	180.000.000		0	4	104.564.600		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.44	Program Peningkatan Kompetensi keagamaan	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	n.a.	95,00	100,00	186.285.285		0	100,00	221.867.000		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.45	Program kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	79,00	100,00	150.840.000		0	75,00	5.670.000		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.46	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	79.330.330		0	100,00	78.905.000		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.47	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terselenggaranya pekan olahraga se-Kec. Lemahwungkuk	Persen	100,00	94,00	100,00	90.000.000		0	14,29	885.000		0	Kecamatan Lemahwungkuk
2.7.48	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Lemahwungkuk	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan				0	0	4.408.737.750		0	2	6.118.051.500	Kecamatan Lemahwungkuk
		Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan				0	2			0	1		
		Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan				0	2			0	1		
		Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan				0	0			0	0		
		Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan				0	0			0	0		
		Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan				0	0			0	0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**													
2.8.1	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kampung KB	Persen	22.73	22,73	100,00	728.864.000	50,00	375.000.000	36,36	246.819.000	109,09	128.817.496	Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga DPPKB
2.8.2	Program Keluarga Berencana	*Current Use* / Pasangan Usia Subur	Persen	60,92	63,11	62,00	5.130.000.000	61,81	3.522.000.000	63,38	1.975.807.456	64,29	2.444.188.236	Bidang Keluarga Berencana DPPKB
		Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 persen	Persen	3,50	0,25	3,45		3,40		0,11		0,12		
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	96,14	105,94	94,56		92,71		80,29		97,34		
		Rasio akseptor KB	Rasio	14,97	14,95	14,60		14,72		13,44		12,08		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need*	Persen	23,02	20,11	18,90		18,53		20,06		18,99		
		Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif	Persen	26,94	26,44	25,98		25,99		26,27		26,20		
2.8.3	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaat- kan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	n.a.	25,81	100,00	3.550.000.000		360.000.000	27,58	85.929.000		102.417.488	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB
		Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk	Peragkat Daerah					19				29		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	n.a.	0	1				n.a.				
		Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data Profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Persen	n.a.	0,00	100,00				n.a.				
		Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan pormal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	SMP SMA Universitas	n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a. n.a.	17 9 3				n.a. n.a. n.a.				
2.8.4	Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk	Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB	Persen	4,53	100,00	100,00	500.000.000	68,28	460.000.000	100,00	100.956.000	100,00	31.461.750	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB
2.9	**Perhubungan**													
2.9.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pedoman arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan	Persen	100,00	100,00	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	48.270.000	n.a	15.410.000	Bidang Lalu Lintas DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.9.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	100.000.000	100,00	200.000.000	100,00	94.125.000	100,00	24.730.000	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor DISHUB
2.9.3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,51	83,51	4.900.000.000	85,00	3.827.000.000	73,00	1.745.988.750	73,47	1.407.089.000	Bidang Lalu Lintas; Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana; UPT PJU DISHUB
		Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,78	83,78		85,00		60,00		60,00		
		Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,78	83,97		85,00		86,00		86,16		
2.9.4	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	Persen	73,44	73,44	73,44	525.000.000	77,00	600.000.000	62,00	184.968.750	46,00	294.425.975	UPT Parkir DISHUB
2.9.5	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan/jumlah penduduk	Rasio	0,0030	0,0030	0,0030	1.550.000.000	0,0031	1.980.000.000	0,0030	750.260.500	0,0030	370.876.400	Bidang Angkutan dan Multimoda DISHUB
		Jumlah Uji Kir	Unit	12.202	12.202	12.202		12.568		15.638		9.735		
		Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	Persen	19,00	19,00	19,00		20,00		0,73		0,73		
2.9.6	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	1.125.000.000	100,00	1.130.000.000	100,00	883.168.875	100,00	598.611.879	UPTD Parkir DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.10	**Komunikasi dan Informatika**													
2.10.1	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	Rasio	70,00	75,00	75,00	390.000.000	80,00	430.000.000	100,00	324.379.450	100,00	92.430.000	Bidang Layanan *e-Government* DKIS
2.10.2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	70,00	75,00	75,00	1.400.000.000	80,00	1.615.500.000	100,00	1.452.783.000	98,88	1.010.393.373	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi DKIS
2.10.3	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kerjasama bidang Kominfo	Persen	70,00	75,00	75,00	215.000.000	80,00	450.000.000	100,00	203.324.605	96,49	158.928.500	Bidang TIK; Bidang Layanan *e-Government* DKIS
2.10.4	Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	70,00	75,00	75,00	1.315.000.000	80,00	2.525.000.000	90,00	1.363.508.500	99,47	2.091.202.991	Bidang TIK DKIS
2.10.5	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah	Persen	70,00	75,00	75,00	165.000.000	80,00	200.000.000	100,00	144.522.000	97,59	191.198.000	Bidang Pengelolaan Informasi Publik DKIS
2.10.6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersampaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat	Persen	60,00	65,00	65,00	605.000.000	70,00	1.195.000.000	80,00	574.887.500	99,06	455.597.500	Bidang Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik DKIS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.10.7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya media komunikasi	Persen	70,00	75,00	75,00	760.000.000	80,00	925.000.000	100,00	734.606.482	98,53	731.628.677	Bidang Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik DKIS
2.10.8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	Persen	70,00	75,00	75,00	1.285.000.000	80,00	1.410.000.000	100,00	1.271.950.000	99,77	1.018.230.000	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik DKIS
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**													
2.11.1	Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat	Peningkatan pasar rakyat ber SNI	Unit Pasar	0	0	1	75.000.000		0	n.a.	0		0	Bidang Bina Perdagangan DPKUKM
2.11.2	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Updating Data PKL di 5 Kecamatan	PKL	489	48	200	450.000.000		450.000.000	200	777.663.000		156.000.000	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM
		Optimalisasi Pelaksanaan Perda PKL	Persen	100,00	100,00	100,00				100,00				
		Tingkat Pelanggaran PKL Menurun	Persen	45,86	n.a.	40,00				33,13				
		Meningkatnya Jumlah PKL yang Dibina	PKL	489	489	200		200		n.a.		200		
2.11.3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tercapainya Peningkatan Modal Usaha UMKM	Persen	11,37	13,12	25,00	400.000.000	25,00	750.000.000	26,37	81.523.000	n.a.	0	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM
		Berkembangnya kewirausahaan UMKM yang dibina	UMKM	n.a.	440			200				200		
2.11.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Unit	236	540	243	4.490.500.000	250	1.150.000.000	243	449.144.000	257	423.397.000	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.12	**Penanaman Modal**													
2.12.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi	Jenis Investasi	0	0	1	560.000.000		395.000.000	1	79.768.000		58.968.000	Bidang PM DPMPTSP
			Event					1				1		
2.12.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN)	Persen	n.a.	n.a.	30 % dari tahun sebelu m nya	340.000.000		53.103.750	1,00	33.334.600		103.823.400	Bidang PM; Bidang Datin DPMPTSP
			Perusah aan					216				216		
2.12.3	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen	Poin	73,90	78,87	75,00	830.000.000		742.924.350	82,65	459.863.000		325.586.600	Bidang Pelayanan A; Bidang Pelayanan B DPMPTSP
		Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	Perwal/ Kepwal	1	n.a.	1		1		2		1		
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**													
2.13.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana olahraga yang representatif	Persen	40,00	50,00	50,00	600.000.000	50,00	250.000.000	50,00	199.166.000	66,00	532.433.760	UPT PPOR DKOKP
2.13.2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	75,00	95,00	100,00	3.380.000.000	100,00	3.557.000.000	100,00	1.293.291.550	100,00	67.722.500	Bidang Kepemudaan dan Olahraga DKOKP
		Cakupan pelatih olahraga bersertifikasi	Persen	33,00	56,00	50,00		55,00		56,00		55,00		
		Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	17,00	31,00	20,00		30,00		31,00		30,00		
		Jumlah atlet berprestasi	Atlet	3	6	10		12		2		18		
		Jumlah prestasi Cabang olahraga	Cabor	2	4	10		11		2		11		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.13.3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	50,00	50,00	50,00	1.000.000.000		1.300.000.000	46,30	449.186.960		533.839.750	Bidang Kepemudaan dan Olahraga DKOKP
		Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1.681	1:1.681	1:1.500		1:1.500		1:1.422		1:1.025		
2.13.4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda	Persen	50 wirausaha muda	50,00	50,00	150.000.000	50,00	175.000.000	n.a.	-	27,00	85.619.000	Bidang Kepemudaan dan Olahraga DKOKP
2.14	**Statistik**													
2.14.1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Persen	n.a.	n.a.	60,00	295.000.000	75,00	345.000.000	100,00	212.460.500	99,79	212.460.500	Bidang Statistik DKIS
2.15	**Persandian**													
2.15.1	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	Persen	50,00	n.a.	55,00	70.000.000	60,00	30.000.000	50,00	56.290.000	99,52	103.025.500	Bidang Statistik DKIS
2.16	**Kebudayaan**													
2.16.1	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	MoU Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	MoU	1	3	1	500.000.000	3	600.000.000	1	277.536.000	0	0	Bidang Kebudayaan DKOKP
2.16.2	Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	14	15	15	3.632.500.000	15	4.459.950.000	15	1.573.661.000	15	956.187.800	Bidang Kebudayaan DKOKP
		Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar budaya	48	62	62		62		62		62		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya budaya	1	1	1		1		1		0		
		Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Obyek	6	10	10		10		7		10		
2.17	**Perpustakaan**													
2.17.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka	134.519	168.274	176.658	1.750.000.000	185.522	1.822.680.000	296.436	902.489.284	214.765	506.790.000	Bidang Perpustakaan DISPUSIPDA
		Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun	Orang	24.785	37.483	38.357				30.708				
			Anggota					41.325				41.325		
		Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Unit di RW; Unit di kelurahan	4; 4	4; 4	30; 1				60; 1				
			Perpustakaan RW dan Perpustakaan Kelurahan					30; 1				30; 1		
		Jumlah pojok baca baru di area publik	Pojok baca	0	0	5		10		5		10		
2.18	**Kearsipan**													
2.18.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Sistem Penyimpanan sesuai standar; Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan	Dokumen	2	2	4	280.000.000		199.481.000	4	95.110.000		121.918.000	Bidang Kearsipan DISPUSIPDA
		Sistem Penyimpanan sesuai standar	Perangkat Daerah					6				6		
		Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan (Perkada/Perwal)	Dokumen					5				n.a.		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.18.2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	1.184	3.834	471	975.000.000	550	227.047.000	471	194.993.000	550	162.909.000	Bidang Kearsipan DISPUSIPDA
2.18.3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Arsip yang terpelihara	Berkas	n.a.	8.324	15.824	100.000.000	23.324	63.510.000	15.824	53.962.900	23.324	48.940.000	Bidang Kearsipan DISPUSIPDA
		Jenis sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Jenis					8				8		
2.18.4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	Persen	70,00	70,00	60,00	960.000.000	70,00	150.000.000	30,00	146.649.250	70,00	38.805.000	Bidang Kearsipan DISPUSIPDA
3	**Urusan Pilihan**													
3.1	**Kelautan dan Perikanan**													
3.1.1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3% pertahun	Ton	5.172	3.397	3.400	106.064.000	3.450	116.670.400	6.821	105.664.000	6.003,475	75.569.600	Bidang Kelautan dan Perikanan DPPKP
3.1.2	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 3% pertahun	Ton	316,68	162	250	854.710.000	257	1.164.220.550	180,29	835.655.500	206	925.005.000	Bidang Kelautan dan Perikanan DPPKP
3.1.3	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	kg/kapita/ tahun	33,42	33,00	33,00	61.087.000	33,10	64.141.350	33,47	59.971.000	n.a.	0	Bidang Kelautan dan Perikanan DPPKP
3.2	**Pariwisata**													
3.2.1	Program Pengembangan Kepariwisataan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 80%	Orang	1.033.642	1.080.544	2.000.000	6.400.000.000	2.100.000	3.500.000.000	1.505.207	1.724.417.380	568.571	4.080.204.000	Bidang Kepariwisataan DKOKP
		Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	Hari	1	1	2		2		1		2		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3.3	**Pertanian**													
3.3.1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	Jenis hasil olahan	1	1	1	110.000.000	1	121.000.000	1	108.954.000	1	3.446.000	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT RPH; UPT BPTP; UPT BPBTPH DPPKP
3.3.2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas Padi	Ton/ hektar	4,70	5,30	4,70	1.585.328.100	4,75	3.735.208.430	5,90	1.557.685.767	6,00	600.130.000	Bidang Pertanian dan Peternakan DPPKP
3.3.3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak:					1.027.872.400		2.130.659.640		971.202.950		1.001.453.500	Bidang Pertanian dan Peternakan DPPKP
		· Daging sapi	Kg	235.731	155.000	155.000		162.000		435.999		504.414		
		· Daging babi	Kg	91.011	65.000	65.000		66.000		94.315		98.851		
3.3.4	Program Pencegahan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/ ternak	Ekor	500	420	500	249.200.000	525	274.120.000	539	243.796.900	50.530	159.721.000	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT Pelayanan Veteriner; UPT RPH DPPKP
3.4	**Perdagangan**													
3.4.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	58,33	58,33	60,33	750.000.000	62,33	375.000.000	62,64	247.283.272	n.a.	-	Bidang Bina Perdagangan DPKUKM
3.4.2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	67,00	69,00	69,50	1.160.000.000	72,00	725.000.000	65,00	211.065.000	100,00	137.411.000	Bidang Bina Perdagangan DPKUKM
3.4.3	Program Metrologi Legal	Cakupan wajib tera/ tera ulang dan alat UPTP	Persen	75,00	77,95	80,00	3.039.800.000	82,00	450.000.000	80,00	788.459.736	72,00	151.331.900	Bidang Kemetrologian; UPT Kemetrologian Legal DPKUKM
3.5	**Perindustrian**													
3.5.1	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	Meningkatnya pengenalan penjualan dan	IKM	125	160	25	250.000.000	174	1.800.000.000	26	165.973.000	n.a.	12.493.200	Bidang Perindustrian DPKUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		pemasaran produk IKM												
3.5.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persen	72,00	72,00	100,00	500.000.000	80,00	250.000.000	112,50	51.077.000	n.a.	-	Bidang Perindustrian DPKUKM
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**													
4.1	**Administrasi Pemerintahan**													
4.1.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	3.540.000.000	100,00	4.440.000.000	100,00	2.420.150.860	100,00	1.555.947.000	Bagian Umum SETDA
4.1.2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Dokumen	53	81	10	1.100.000.000	10	880.000.000	38	266.087.883	26	35.140.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA
4.1.3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari Rancangan Perda dan Rancangan PerWal	Persen	58,62	48,00	65,00	1.958.500.000	50,00	1.125.000.000	84,00	589.248.000	75,00	277.272.000	Bagian Hukum dan HAM SETDA
4.1.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PNS yang memiliki nilai jabatan	Persen	0,00	0,00	100,00	900.000.000	100,00	310.000.000	100,00	170.182.000	100,00	130.200.000	Bagian ORPAD SETDA
4.1.5	Program Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	1.700.000.000	100,00	770.000.000	100,00	383.235.500	100,00	221.258.000	Bagian ORPAD; Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA
4.1.6	Program Pembinaan Pemerintahan	Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Pilar	7	29		220.000.000		150.000.000		14.312.000		6.540.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			Titik			8				14				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Persentase kelurahan yang memiliki peta wilayah	Persen					100,00						SETDA
		Persentase pilar batas yang dibangun/dipelihara	Persen					38,00 (36 pilar dari 93 titik)				15		
4.1.7	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Dokumen	196	228	12	2.685.000.000	12	855.000.000	5	340.060.300	12	269.136.000	Bagian Administrsi Pemerintahan Umum; Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan Bagian Hukum dan HAM SETDA
4.1.8	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Dokumen	78	96	18	5.680.000.000	18	2.900.000.000	25	980.425.647	18	724.290.200	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Administrasi Perekonomian SETDA
		Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	n.a.	100,00	100,00		100,00		n.a.		n.a.		
4.1.9	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Pengajian rutin bulanan dan mingguan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kali	204	252	12	935.000.000		0	12	231.628.500		0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
4.1.10	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen	49,00	82,00	85,00	330.000.000		0	75,00	33.125.500		0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4.1.11	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/ STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Cabang Musabaqoh	3	5	5	3.155.000.000		0	4	535.805.500		0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
4.1.12	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Keagamaan	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen				0	85,00	2.550.000.000		0	85,00	180.560.500	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
		Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat					18				14		
		Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat											
4.1.13	Program Kerukunan Umat Beragama	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Hari Besar	6	6	6	935.000.000		0	6	182.681.500		0	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat SETDA
4.1.14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti	Persen	20,00	20,00	25,00	750.000.000	30,00	750.000.000	25,00	312.094.010	30	127.241.000	Bagian Umum SETDA
4.1.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada SBBD dan Standar satuan Harga Barang/Jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	930.000.000		700.000.000	100,00	398.814.000		174.645.000	Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Administrasi Pembangunan SETDA
		Standar biaya belanja daerah SBBD dan Standar satuan harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA dan DPA	Dokumen					2				2		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4.1.16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Posedur Pengawasan	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda	Persen	7 Naskah Akademik	6 Naskah Akademik	100,00	389.515.000		0	86,00	356.782.500		0	Bagian Perundang-undangan SETWAN
4.1.17	Program Pembinaan Administrasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kota Cirebon	Skor	B	B	B	1.840.000.000		790.000.000	B	165.249.000		119.973.600	Bagian ORPAD; Bagian Umum; Bagian Keuangan dan Perlengkapan SETDA
		Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persen					85,00				100,00		
4.1.18	Program Peningkatan Kapasaitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD	Persen	74,50	n.a.	100,00	8.213.580.735		7.813.900.000	n.a.	4.395.833.015		3.990.868.500	Bagian Persidangan SETWAN
		Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD												
		Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran	Persen					100,00				100,00		
		Terwujudnya dokumen Kajian dalam menunjang usulan Perda Inisiatif Dewan	Persen					100,00				100,00		
4.2	**Pengawasan**													
2.4.1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kompetensi APIP Kota Cirebon	Persen	100,00	100,00	100,00	473.850.000		0	100,00	458.288.000		0	Sekretariat IRDA
2.4.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Terhadap Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	618.534.000		908.640.000	93,49	312.094.010		796.729.843	Irban Wilayah 2 IRDA
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40	42,5	50		60		74,46		93,49		
		Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4.3	**Perencanaan**													
4.3.1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	Persen	68,43	72,3	82,00	351.032.000	78,00	375.945.460	83,63	212.945.500	83,63	155.832.500	Bidang PP; Bidang PPMM, Bidang SosbudekSDA; Bidang PIPW BPPPPD
4.3.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	78,99	80,67	95,00	1.030.900.000	87,60	663.000.000	97,49	700.075.400	99,02	428.035.000	Bidang PP; Bidang PPMM, Bidang SosbudekSDA; Bidang PIPW BPPPPD
4.3.3	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	96,19	98,90	98,35	125.000.000	98,45	159.000.000	99,19	56.545.000	99,19	59.985.000	Bidang PP BPPPPD
4.3.4	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Persen	90,00	91,50	95,00	413.026.000	92,00	282.590.000	65,00	174.183.000	58,37	156.532.500	Bidang PP; Bidang PPMM, Bidang SosbudekSDA; Bidang PIPW BPPPPD
4.4	**Keuangan**													
4.4.1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	Persen	22,26	-0,79	23,00	3.750.000.000	10,00	5.092.876.400	-1,41	4.806.571.654	0,69	2.271.980.759	Bidang PAD I BKD
4.4.2	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	3.195.000.000		0	WTP	1.484.493.791		0	Bidang Akuntansi BKD
4.4.3	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	Persen	100,00	100,00	100,00	430.000.000		2.647.168.100		376.547.000		2.443.742.153	Bidang Penganggaran dan Bidang Aset Daerah BKD
		Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu					Tepat waktu				Tepat Waktu		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4.4.4	Program peningkatan Kualitas Penganggaran	APBD Tepat Waktu	Tepat waktu/tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	2.921.900.500	Tepat waktu	2.042.593.550	Tepat waktu	1.066.203.650	Tepat Waktu	1.012.614.020	Bidang Penganggaran BKD
4.4.5	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Realisasi APBD	Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	90,00	90,68	90,00	1.341.356.000	90,50	1.317.311.520	91,24	887.465.400	90,50	672.967.620	Bidang Perbendaharaan; Bidang PAD II BKD
4.5	**Kepegawaian**													
4.5.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi (Eselon II) pada Perangkat Daerah	Orang	0	5	3	5.650.000.000	3	4.225.000.000	3	1.465.809.057	3	1.674.759.128	Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara; UPT Fasilitasi Kelembagaan KORPRI BKPPD
		Jumlah Jabatan kosong Administrator (Eselon III) pada Perangkat Daerah	Orang	0	20	47		21		47		21		
		Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada PD	Orang	0	68	68		44		68		44		
		Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah	Orang	0	22	22		267		22		267		
4.6	**Pendidikan dan Pelatihan**													
4.6.1	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,57	3,00	3,00	8.633.800.000	3,50	6.950.000.000	3,81	4.427.737.600	1,27	1.023.647.400	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir BKPPD
		Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	60,46	80,00	60,00		62,00		10,79		11,73		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2019		2020		
				2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4.7	**Penelitian dan Pengembangan**													
4.7.1	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	1.075.000.000		0	90,00	804.258.500		0	Bidang Litbang PK; Bidang Litbang PID BPPPPD
4.7.2	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen					3	530.000.000		0	3	227.746.000	Bidang Litbang PK PBPPPPD
4.7.3	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan sosial dan kemasyarakatan	Dokumen					2	371.000.000		0	2	134.170.000	Bidang Litbang PK BPPPPD
4.7.4	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan daerah	Dokumen					2	350.000.000		0	2	80.729.000	Bidang Litbang PID BPPPPD
4.7.5	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan ke-iptek-an	Dokumen					1	250.000.000		0	1	110.138.000	Bidang Litbang PID BPPPPD

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cirebon Tahun 2021

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**UUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
1.01.01	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka kelulusan	Persen	100	127.976.961.348	Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar DISDIK
1.01.02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94	2.208.215.720	Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan DISDIK
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					
1.03.01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan perorangan	Persen	92,3	71.793.611.470	Sekretariat; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, UPT Laboratorium Daerah; UPT Farmasi; UPT Kesehatan Khusus (PSC 119); UPT Puskesmas (22); UPT RSD Gunung Jati DINKES
1.03.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	85	2.282.960.780	Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES
1.03.03	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan industri rumah tangga yang dibina	Persen	25	152.740.700	Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES
1.03.04	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS yang dipantau	Persen	81	2.295.070.530	Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
3.03.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023	Titik	2	5.671.984.709	Bidang Sumber Daya Air DPUTR
3.03.02	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	93	399.983.004	Bidang Sumber Daya Air DPUTR

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.3.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	97,13	1.849.815.867	Bidang Sumber Daya Air, UPT. Pengelolaan Air Limbah DPUTR
3.03.04	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	90	14.016.558.119	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03.05	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,4	12.909.181.431	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03.07	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan mantap kondisi baik	Persen	93	10.545.688.055	Bidang Bina Marga DPUTR
3.03.08	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100	199.995.370	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03.09	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	45	1.519.545.500	Bidang Cipta Karya DPUTR
3.03.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	Persen	1	527.929.000	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR
3.02.01	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	2	1.876.128.370	Bidang Bina Marga DPUTR
3.02.02	Program Pengembangan Permukiman	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	100	18.705.745.341	Bidang Cipta Karya DPUTR
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
3.03.12	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	89,4	1.185.948.390	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas DPRKP
3.03.13	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	10,16	1.172.413.080	Bidang Kawasan Permukiman DPRKP
3.03.14	Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	22,78	3.812.955.910	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas, UPT. Pertamanan dan Pemakaman DPRKP

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.03.15	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	89,4	108.723.500	Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas DPRKP
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
4.01.01	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran K3/ ketertiban umum, ketentraman, dan Keindahan	Persen	100	3.992.737.400	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil SATPOLPP
		Cakupan Linmas per RT	Persen	100		
		Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	100		
		Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran	Persen	100		
4.3.1	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikasi	Orang	66	822.382.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi BPBD
4.3.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	80	6.465.499.300	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan dan Bidang Pengendalian, Pemadaman dan penyelamatan Kebakaran DAMKAR
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
1.09.01	Program Pemberdayaan Sosial	PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (persen)	Persen	66	24.538.000	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial DINSOS
1.09.02	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan PPKS	Persen	66	220.323.250	Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOS
1.09.03	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data Base keluarga miskin	Dokumen	0	556.544.100	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial DINSOS
		Data Base PPKS	Dokumen	0		
1.09.03	Program Penanganan Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	2.137.413.000	Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOS
1.09.04	Program Pengelolaan	Cakupan PSKS yang yang	Persen	58,29	44.650.000	UPT TMP dan Nilai-Nilai

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Taman Makam Pahlawan	melaksanakan penanganan PPKS				Kepahlawanan DINSOS
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
1.05.01	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	50	0	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
1.05.02	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	70	557.030.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; UPT Latihan Tenaga Kerja DISNAKER
1.05.03	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	48	311.979.500	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja DISNAKER
1.05.04	Program Hubungan Industrial	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Persen	79	271.406.700	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNKER
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1.07.01	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya impelmentasi PUG pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	3	95.318.150	Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
1.07.02	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Satgas PKDRT	4	69.897.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
1.07.03	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Pokja PUG	1	198.647.800	Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
1.07.04	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan RW layak anak	Persen	5,65	179.461.950	Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB
1.07.05	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan penanganan anak korban kekerasan	Persen	100	185.008.500	Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
1.10.01	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Kkal/kapita/ hari;	E≥2400	3.612.578.950	Bidang Ketahanan Pangan DKPPP
			Gr/kapita/ hari	P≥63		
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	Persen	90		
		Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	Persen	90		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan	Persen	88		

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		pangan segar asal tumbuhan				
		Penurunan konsumsi beras	Kg/kap/ hari	92		
		Peningkatan konsumsi pangan hewani	Kg/kap/ hari	45		
		Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/kap/ hari	183		
		Peningkatan konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/ hari	32		
1.10.05	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	persen	70	285.207.900	Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan DKPPP
1.10.06	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	persen	88	272.101.450	Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan DKPPP
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
3.03.11	Program Penatagunaan Tanah	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	1	315.000.066	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUTR
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
3.03.16	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota;	Ada/Tidak	Ada	576.332.592	Bidang Tata Lingkungan DLH
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak	Ada		
		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada		
3.03.17	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air;	poin	31,49	808.446.349	Bidang Tata Lingkungan; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH
		Indeks kualitas tutupan lahan;	poin	32,67		
		Indeks kualitas udara;	poin	78,3		
		Persentase luas lahan konservasi;	persen	0,48		
		Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim	persen	6,07		
		Terwujudnya penyelenggaraan investigasi GRK	persen	100		
3.03.18	Program Pengelolaan	Persentase Peningkatan	persen	50	195.726.000	Bidang Tata Lingkungan DLH

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Keanekaragaman Hayati				
3.03.19	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100	379.010.900	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH
3.03.20	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH	Persen	60	78.217.550	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Penetapan Hak MHA	kali	1	44.546.167	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	kali	1	77.608.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat;	kali/tahun	4	303.188.550	Bidang Tata Lingkungan DLH
		Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	ada		
3.03.24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	Persen	100	40.916.667	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH
3.03.25	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	24	26.690.340.166	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; UPT

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen	74		Pengelolaan Sampah; UPT TPA DLH
		Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Skor	75		
		Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100		
		Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	100		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
2.05.06	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	96,5	1.195.809.400	Bidang Dafduk DISDUKCAPIL
2.05.07	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,5	266.611.000	Bidang Pelayanan Capil DISDUKCAPIL
2.05.08	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependuduk- an	Persen	8,5	229.076.000	Bidang PIAK DISDUKCAPIL
2.05.09	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	8,5	10.008.000	Bidang PIAK DISDUKCAPIL
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
1.14.01	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	18	193.491.250	Bagian Pemerintahan SETDA Kecamatan Kesambi Kecamatan Pekalipan Kecamatan Harjamukti Kecamatan Kejaksan Kecamatan Lemahwungkuk
1.14.02	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM Berprestasi	Persen	13,60	1.271.697.850	Bagian Pemerintahan SETDA Kecamatan Kesambi Kecamatan Pekalipan Kecamatan Harjamukti Kecamatan Kejaksan Kecamatan Lemahwungkuk
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1.04.01	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah perangkat daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan rancangan	Peragkat Daerah	24	171.381.334	Bidang Pengendalian Penduduk DP3AP2KB

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		induk pengendalian penduduk				
1.04.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	*Current User* / Pasangan Usia Subur	Persen	62,18	3.226.610.350	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB
1.04.03	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung KB	Persen	63,64	379.330.000	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP3AP2KB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
3.01.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100	4.935.195.990	Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Multimoda, Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT. Parkir, UPT. Penerangan Jalan Umum DISHUB
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
2.09.01	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah	Persen	85	2.344.559.650	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, DKIS
2.09.02	Program Aplikasi Informatika	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	85	2.717.539.584	Bidang Layanan e-government; Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DKIS
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					
1.08.01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	Persen	17,59	0	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08.02	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	100	42.625.275	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08.03	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase koperasi aktif menjadi Sehat	Persen	62,45	96.204.675	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08.04	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	63,48	409.819.200	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08.05	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	Persen	64,1	61.795.650	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.08.06	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	95,31	275.740.500	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
1.08.07	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	Persen	30,49	741.445.425	Bidang Koperasi dan UKM DKUKMPP
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					
2.05.01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	80	172.192.298	Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal DPMPTSP
2.05.02	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.800	115.204.000	Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP
2.05.03	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Presepsi Waktu Penyelesaian Perijinan	Poin	3	528.529.050	Bidang Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP
2.05.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga Kerja	Persen	15	218.843.100	Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP
2.05.05	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan nilai realisasi PMDN	Persen	70	130.143.825	Bidang promosi Penanaman Modal DPMPTSP
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1.06.01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1,0486111	989.629.000	Bidang Kepemudaan, DISPORA
1.06.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	4.994.998.000	UPT PPOR; Bidang Olahraga DISPORA
1.06.03	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase wirausaha muda	Persen	60	500.000.000	Bidang Kepemudaan, DISPORA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
2.09.03	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Persen	75	384.999.670	Bidang Statistik Sektoral, DKIS
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
2.09.04	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	Persen	65	424.983.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, DKIS
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
1.13.01	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya Budaya yang di	Karya budaya	1	462.795.000	Bidang Kebudayaan DKP

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Revitalisasi dan di Inventarisasi				
1.13.02	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	16	740.360.000	Bidang Kebudayaan DKP
1.13.03	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	10	495.739.534	Bidang Kebudayaan DKP
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					
1.02.01	Program Pembinaan Perpustakaan	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka (Orang)	194,798	595.555.390	Bidang Pembinaan Perpustakaan DISPUSIP
1.02.02	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Perpustakaan RW dan Perpustakaan Kelurahan	30; 1	201.884.400	Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno DISPUSIP
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					
2.07.01	Program Pengelolaan Arsip	Sistem Penyimpanan sesuai standar	Perangkat Daerah	6	418.581.440	Bidang Pengelolaan Arsip DISPUSIP
2.07.02	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	600	58.005.700	Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip DISPUSIP
3	**URUSAN PILIHAN**					
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1.10.02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3500	146.917.000	Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP
1.10.03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	265	1.231.966.602	Bidang Kelautan dan Perikanan; UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, DKPPP
1.10.04	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	7.600	151.488.500	Bidang Kelautan dan Perikanan, DKPPP
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					
1.11.01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	Persen	70	104.945.400	Bidang Kepariwisataan DKP
1.11.02	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1	525.267.750	Bidang Kepariwisataan DKP
1.11.03	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	11	524.515.000	Bidang Kepariwisataan DKP
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					
1.10.07	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	jenis	2	1.229.745.125	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT RPH; UPT Balai Pengembangan ternak Potong; UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Pangan dan Holtikultura DKPPP
1.10.08	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak :			294.940.797	Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP
		· Daging Sapi	Kg	170000		
		· Daging Babi	Kg	67000		
1.10.09	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	ekor hewan/ ternak	550	668.804.560	Bidang Pertanian dan Peternakan; UPT Pelayanan Veteriner; UPT RPH DKPPP
1.10.10	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produksi Padi	ton/ha	4,8	102.646.080	Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
1.08.08	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	Persen	100	7.199.640	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08.09	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelola Pasar Yang sesuai Standar	Persen	10	0	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08.10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	persen	74,5	123.716.250	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08.11	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	persen	64,33	300.000.000	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
1.08.12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	persen	84	285.577.163	Bidang Kemetrologian; UPT Kemetrologian Lokal DKUKMPP
1.08.13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk dalam negeri	Persen	30	0	Bidang Bina Perdagangan DKUKMPP
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					
1.08.14	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah	IKM	198	337.008.714	Bidang Perindustrian DKUKMPP
1.08.15	Program Pengendalian dan Izin Usaha Industri	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Izin Usaha	5	0	Bidang Perindustrian DKUKMPP
1.08.16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan SIINas	Persen	100	0	Bidang Perindustrian DKUKMPP

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	**UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					
2.03.01	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal	Persen	51	4.278.332.532	Bagian Hukum; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Pemerintahan SETDA
2.03.02	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah (SBBD) dan Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA/DPA	Dokumen	2	1.108.902.503	Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					
2.08.01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran	Persen	100	88.970.694.000	Bagian Perundang-undangan; Bagian Persidangan SETWAN
5	**UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN**					
5.01	**PERENCANAAN**					
2.10.01	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan terhadap rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	98,55	507.141.500	Bidang Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA
2.10.02	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	87,7	1.049.743.904	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPELITBANGDA
5.02	**KEUANGAN**					
2.06.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	7.779.747.885	Bidang Pengaggaran; Bidang Perbendaharan Daerah; Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKPD
2.06.02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap	Persen	100	1.897.254.023	Bidang Barang Milik Daerah BPKPD

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		perencanaan Barang Milik Daerah				
2.06.03	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	10	3.561.210.346	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD
5.03	**KEPEGAWAIAN**					
	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	3	2.641.204.950	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi; UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
2.02.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	64	3.479.052.200	Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
2.11.01	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen	3	1.803.871.772	Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPELITBANGDA
6	**UNSUR PENGAWAS**					
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					
2.04.01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	70	618.728.000	IRBAN Wilayah I IRDA
2.04.02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	1.195.038.950	IRBAN Wilayah II; IRBAN Wilayah III IRDA
7	**UNSUR KEWILYAHAN**					
7.01	**KECAMATAN**					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100	295.812.600	Kecamatan Harjamukti

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	80	6.339.869.794	Kecamatan Kesambi
		Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25	3.936.559.320	Kecamatan Pekalipan
		Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	50	6.455.254.660	Kecamatan Harjamukti
		Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25	4.485.376.183	Kecamatan Kejaksan
		Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25	6.017.328.638	Kecamatan Lemahwungkuk
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
4.02.01	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	55	65.754.000	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya BAKESBANGPOL
4.02.02	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat	Persen	65	1.285.640.513	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL
4.02.03	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	65	967.858.000	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan BAKESBANGPOL
1.12.01	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik antar umat beragama serta fasilitasi P4GN dari penguatan bagi pelaku budaya	Persen	65	244.472.200	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya BAKESBANGPOL
4.02.04	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	65	1.289.403.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik BAKESBANGPOL

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Perubahan RPJMD 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Penanganan Konflik Sosial					
9	**NON URUSAN**					
2.1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Persen	100,00		32 PD
		Persentase LKIP Perangkat daerah yang sesuai dengan sistematika berdasarkan peraturan perundang undangan	Persen	90,00	459.807.500	Bagian Organisasi SETDA

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Tabel 7.5
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Cirebon Tahun 2022-2023

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	57,43	8.292.372.134	57,44	8.706.990.740	57,44	8.706.990.740	Dinas Pendidikan
		APM SD/MI	Persen	98,10	67.072.245.566	98,50	70.425.857.844	98,50	70.425.857.844	Dinas Pendidikan
		APM SMP/MTs	Persen	84,00	53.392.510.960	84,50	56.062.136.508	84,50	56.062.136.508	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	85,00	5.837.307.263	85,00	6.129.172.626	85,00	6.129.172.626	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru satuan pendidikan dasar, PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	47,25	2.100.000.000	47,25	2.205.000.000	47,25	2.205.000.000	Dinas Pendidikan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	Persen	100,00	355.639.759.777	100,00	373.421.747.765	100,00	373.421.747.765	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	87,50	2.397.108.819	90,00	2.516.964.260	90,00	2.516.964.260	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan sarana kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	85,00	74.830.035	90,00	78.571.537	90,00	78.571.537	Dinas Kesehatan

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cakupan sarana produksi industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	Persen	80,00	85.547.700	85,00	89.825.085	85,00	89.825.085	Dinas Kesehatan
	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Strata Mandiri RW Siaga Aktif	Persen	15,00	723.484.177	17,00	759.658.386	17,00	759.658.386	Dinas Kesehatan
			Cakupan PHBS yang dipantau	Persen	83,00	198.126.338	85,00	208.032.654	85,00	208.032.654	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										
	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sungai dalam kondisi baik	Persen	75,00	5.956.040.233	78,00	6.274.343.042	78,00	6.274.343.042	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan non PDAM	Persen	93,00	450.000.000	93,00	500.000.000	93,00	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi baik	Persen	86,16	2.382.306.973	86,83	2.750.000.000	86,83	2.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah titik genangan air yang tertangani	Titik	5	2.269.934.789	6	2.418.431.528	6	2.418.431.528	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	Persen	100,00	18.973.424.777	100,00	20.412.383.588	100,00	20.412.383.588	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio gedung pemerintah kondisi baik	Persen	90,00	14.517.395.836	90,00	14.815.458.324	90,00	14.815.458.324	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan BAPERKAM dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,40	13.550.000.000	1,40	13.700.000.000	1,40	13.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	Persen	94,00	11.072.972.458	95,00	11.329.428.601	95,00	11.329.428.601	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100,00	215.502.048	100,00	221.277.150	100,00	221.277.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang	Persen	36,50	375.000.000	38,00	547.750.000	38,00	547.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										
	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90,16	1.245.245.810	90,92	1.307.508.100	90,92	1.307.508.100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	10,65	1.231.033.734	11,14	1.292.585.421	11,14	1.292.585.421	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	16,67	4.003.603.706	18,52	4.203.783.891	18,52	4.203.783.891	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rasio tenaga ahli yang tersertifikasi	Persen	2,00	114.159.673	2,00	119.867.657	2,00	119.867.657	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										
	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	0,00	0	100,00	393.159.659	100,00	393.159.659	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan Rasio Linmas per RT	Persen	100,00	3.007.956.120	100,00	2.765.194.283	100,00	2.765.194.283	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyelesaian Jumlah Kasus Pelanggaran K3	Persen	100,00	1.184.417.850	100,00	1.243.638.743	100,00	1.243.638.743	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikat	Orang	70	1.147.930.000	80	1.205.326.500	80	1.205.326.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	85,00	6.491.155.508	90,00	6.835.582.727	90,00	6.835.582.727	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	100,00	25.764.900	100,00	27.053.145	100,00	27.053.145	Dinas Sosial
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	66,00	231.339.413	66,00	242.906.383	66,00	242.906.383	Dinas Sosial
	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Data base keluarga miskin dan data base Pemerlu	Dokumen	1	584.371.305	1	613.589.871	1	613.589.871	Dinas Sosial

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Pelayanan Kesejahteraan Sosial								
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	2.173.542.559	100,00	2.282.219.686	100,00	2.282.219.686	Dinas Sosial
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Standarisasi pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN	Lokasi	1	75.250.000	1	79.012.500	1	79.012.500	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										
		2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	25,00	150.000.000	30,00	157.500.000	30,00	157.500.000	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	30,00	660.000.000	35,00	693.000.000	35,00	693.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; UPT Latihan Tenaga Kerja DISNAKER
				Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	persen	35,00	50.000.000	40,00	52.500.000	40,00	52.500.000	
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	30,00	375.000.000	32,00	393.750.000	32,00	393.750.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja DISNAKER

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Persen	1,00	70.000.000	1,00	73.500.000	1,00	73.500.000	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial DISNAKER
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	63,00	170.000.000	64,00	178.500.000	64,00	178.500.000	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										
	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan PUG	Persen	40,00	100.084.058	50,00	105.088.260	50,00	105.088.260	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan	Persen	100,00	73.391.850	100,00	77.061.443	100,00	77.061.443	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Keluarga Berencana
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.	Persen	100,00	208.580.190	100,00	219.009.200	100,00	219.009.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak	Persen	12,00	50.000.000	16,00	52.500.000	16,00	52.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Tingkat	Madya	163.435.048	Madya	171.606.800	Madya	171.606.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Penanganan anak korban kekerasan	Persen	100,00	169.258.925	100,00	177.721.871	100,00	177.721.871	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										
	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan dan harga serta pangan lainnya	Persen	90,00	99.300.000	90,00	104.265.000	90,00	104.265.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Penguatan cadangan pangan daerah	Persen	25,00	2.173.645.000	30,00	2.277.542.000	30,00	2.277.542.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/Kapita/ Hari	185	972.800.000	187	1.021.440.000	187	1.021.440.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	75,00	299.700.000	80,00	314.685.000	80,00	314.685.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	89,00	285.750.000	90,00	300.025.000	90,00	300.025.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase izin lokasi terhadap permohonan ijin lokasi	Persen	85,00	150.000.000	100,00	157.500.000	100,00	157.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	Persen	50,00	300.000.000	80,00	307.500.000	80,00	307.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	Ada/Tidak ada	Ada	310.831.355	Ada	87.072.694	Ada	87.072.694	Dinas Lingkungan Hidup
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak ada	Ada	385.293.395	Ada	548.333.989	Ada	548.333.989	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air kualitas tutupan lahan, dan kualitas udara.	poin	50,10; 37,80; 73,20	485.873.691	50,20; 37,80; 73,25	510.167.376	50,20; 37,80; 73,25	510.167.376	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase inventarisasi GRK	Persen	100,00	131.597.130	100,00	138.176.987	100,00	138.176.987	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	100,00	205.512.300	100,00	215.787.915	100,00	215.787.915	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah	Persentase ijin pengelolaan limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00	397.961.445	100,00	417.859.517	100,00	417.859.517	Dinas Lingkungan Hidup

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)									
		2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	Persen	65,00	182.128.428	70,00	86.234.849	70,00	86.234.849	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Penetapan Hak MHA	kali	1	46.773.475	1	49.112.149	1	49.112.149	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	kali	1	81.488.400	1	85.562.820	1	85.562.820	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	318.347.978	Ada	334.265.376	Ada	334.265.376	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	Persen	100,00	42.962.500	100,00	45.110.625	100,00	45.110.625	Dinas Lingkungan Hidup

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen	73,00	27.176.155.299	72,00	28.534.963.064	72,00	28.534.963.064	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase cakupan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	26,00	848.701.875	27,00	891.136.969	27,00	891.136.969	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	97,00	1.255.100.000	97,50	1.317.855.000	97,50	1.317.855.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta kelahiran	Persen	88,00	279.900.000	88,50	293.895.000	88,50	293.895.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	8,00	239.400.000	7,50	251.370.000	7,50	251.370.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat pemenuhan informasi kependudukan	Persen	100,00	10.500.000	100,00	11.025.000	100,00	11.025.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	22,00	219.069.662	40,00	230.023.670	40,00	230.023.670	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; Kecamatan Kesambi; Kecamatan Pekalipan; Kecamata Harjamukti; Kecamatan lemahwungkuk; Kecamatan Kejaksan
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ LPM	Kelompok	3	99.473.850	3	108.947.550	3	108.947.550	Sekretariat Daerah
		Persentase LPM Berprestasi	Persen	13,60	93.588.600	13,60	98.268.030	13,60	98.268.030	Bagian Pemerintahan SETDA; Kecamatan Kesambi; Kecamatan Pekalipan; Kecamatan Harjamukti; Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk
		Persentase Posyandu aktif	Persen	87,00	201.913.950	87,00	212.009.648	87,00	212.009.648	
		Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	20,00	547.016.399	20,00	574.367.219	20,00	574.367.219	
		Persentase PKK aktif	Persen	100,00	525.000.000	100,00	551.250.000	100,00	551.250.000	

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil	Sektor	10	258.000.000	10	270.000.000	10	270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Current User / Pasangan Usia Subur	Persen	62,54	3.186.075.500	62,92	3.211.075.500	62,92	3.211.075.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70,00	385.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase rambu lalu lintas yang terpasang	Persen	10,00	1.850.024.000	10,00	1.942.524.000	10,00	1.942.524.000	Dinas Perhubungan

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	80,00	105.000.000	100,00	110.250.000	100	110.250.000	
				Persentase pelayanan parkir kendaraan	Persen	93,00	249.125.000	100,00	261.581.000	100	261.581.000	
				Persentase Uji Berkala kendaraan bermotor	Persen	78,00	694.009.000	85,00	728.726.000	85	728.726.000	
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persen	100,00	979.205.000	100,00	1.028.194.000	100	1.028.194.000	
				Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	100,00	160.771.000	100,00	168.809.000	100	168.809.000	
				Persentase layanan angkutan darat	Persen	1,53	643.819.000	1,53	676.010.000	1,53	676.010.000	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										
		2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Informasi	400	2.461.787.633	420	2.584.877.015	420	2.584.877.015	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	75,00	1.666.348.320	80,00	1.749.665.736	80,00	1.749.665.736	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	100,00	1.187.068.243	100	1.246.421.655	100,00s	1.246.421.655	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										
	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	Persen	19,70	20.000.000	21,81	200.000.000	21,81	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	100,00	50.595.500	100,00	51.576.000	100,00	51.576.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif menjadi Sehat	Persen	63,42	97.000.000	64,39	116.407.700	64,39	116.407.700	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Persen	64,09	450.801.200	64,70	495.881.300	64,70	495.881.300	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	Persen	64,70	61.795.000	65,30	74.772.000	65,30	74.772.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	95,91	298.420.000	96,51	330.646.000	96,51	330.646.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	Persen	35,87	721.445.000	41,25	897.148.000	41,25	897.148.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**										
	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	80	208.352.100	80	229.187.310	80	229.187.310	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1900	139.396.400	2000	153.336.040	2000	133.060.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Presepsi Waktu Penyelesaian Perijinan	Poin	3,10	639.519.100	3,20	703.471.010	3,20	387.627.240	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga Kerja	Persen	16,00	264.799.700	17,00	291.279.670	17,00	188.306.053progr a	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Terpadu Satu Pintu
		2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan nilai realisasi PMDN	Persen	75,00	157.473.800	80,00	173.221.180	80,00	150.315.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1500	1.000.742.450	1:1575	1.015.850.000	1:1575	1.015.850.000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sarana dan Prasarana olahraga yang sesuai standar	Persen	40,00	3.683.339.900	50,00	4.373.006.026	50,00	4.373.006.026	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	40,00	610.328.700	50,00	666.581.000	50,00	666.581.000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	Cabor	10	139.407.600	10	146.377.980	10	146.377.980	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Cakupan pembinaan olah raga	Persen	100,00	271.671.700	100,00	274.675.000	100,00	274.675.000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Mencetak Pramuka Garuda	Persen	40,00	513.568.000	45,00	571.746.400	45,00	571.746.400	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**										

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi	Persen	75,00	604.249.654	80,00	634.462.137	80,00	634.462.137	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**										
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Publik Informasi	Persen	70,00	446.232.150	73,00	468.543.758	73,00	468.543.758	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										
	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	Karya budaya	1	552.662.000	1	559.982.000	1	559.982.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	16	1.227.396.000	16	795.835.000	16	795.835.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	10	545.313.000	10	649.844.000	10	649.844.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**										
	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	5,00	625.333.160	5,00	656.599.817	5,00	656.599.817	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persen	38,46	211.978.620	38,46	222.577.551	38,46	222.577.551	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai standar nasional	Persen	80,00	439.510.512	90,00	461.486.038	90,00	461.486.038	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Dokumen arsip yang terselamatkan	Persen	90,00	60.905.985	90,00	63.951.284	90,00	63.951.284	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4000	154.260.000	4200	161.975.000	4200	161.975.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	265	1.232.730.000	272	1.294.353.000	272	1.294.353.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	7800	159.050.000	8000	167.000.000	8000	167.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										
		3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	Persen	75,00	115.440.000	80,00	121.984.000	80,00	121.984.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1	577.794.000	1	455.573.000	1	455.573.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PAD sektor pariwisata	Persen	14,00	576.966.000	17,00	634.663.000	17,00	634.663.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										
	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (komoditas daging dan tanaman pangan)	Persen	3,00 – 5,00	1.391.135.000	3,00 – 5,00	1.460.153.000	3,00 – 5,00	1.460.153.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dipelihara	Persen	50,00	609.688.000	50,00	640.100.000	50,00	640.100.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	Persen dari populasi	30,00	727.199.000	35,00	763.504.000	35,00	763.504.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan nilai kualitas kelembagaan penyuluhan (Nilai skoring kelas Balai Penyuluhan Pertanian tahun n ditambah 10% dari nilai skoring BPP tahun n)	Persen	10,00	107.750.000	10,00	113.225.000	10,00	113.225.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										
	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	Persen	100,00	307.199.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
												dan Perindustrian
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelola Pasar Yang sesuai Standar	Persen	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	77,00	308.716.000	80,00	860.000.000	80,00	860.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	66,00	204.268.000	68,00	363.000.000	68,00	363.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Persen	86,00	295.577.000	88,00	345.548.000	88,00	345.548.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk dalam negeri	Persen	40,00	200.000.000	50,00	200.000.000	50,00	200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
		3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah	IKM	222	338.257.000	246	389.245.100	246	389.245.100	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Izin Usaha	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan SIINas	Persen	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**									
		4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal	Persen	52,00	4.426.000.000	53,00	4.647.300.000	53,00	4.647.300.000	Sekretariat Daerah
		4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan (jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan dibagi jumlah draf rumusan kebijakan yang dihasilkan dikali 100%)	Persen	75,00	1.210.000.000	80,00	1.270.500.000	80,00	1.270.500.000	Sekretariat Daerah

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**									
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran	Persen	100,00	10.467.173.500	100,00	10.990.532.175	100,00	10.990.532.175	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	5.01	**PERENCANAAN**									
		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran konsisteni program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	462.810.075	100,00	485.950.000	100,00	485.950.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Rasio realisasi program dan kegiatan terhadap rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	98,65	34.337.000	98,75	36.054.000	98,75	36.054.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	98,00	1.082.586.404	100,00	782.101.000	100,00	782.101.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.02	**KEUANGAN**										
	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.504.521.738	Tepat Waktu	4.729.747.825	Tepat Waktu	4.729.747.825	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	2.092.116.000	100,00	2.196.721.800	100,00	2.196.721.800	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,00	3.739.027.000	5,00	3.925.978.350	5,00	3.925.978.350	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**										
	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah SK Purna Tugas PNS	SK	287	1.719.115.482	276	1.805.072.256	276	1.805.071.256	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah pemangku jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Administator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV) yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	50	543.161.275	46	570.319.339	46	570.319.339	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
				Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	290	519.397.075	295	545.360.629	295	545.360.629	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,33	455.647.805	0,30	478.430.195	0,30	478.430.195	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										
		5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	16,00	3.469.919.195	17,00	3.643.415.155	17,00	3.643.415.155	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
		5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Persen	100,00	1.891.209.087	100,00	2.104.005.994	100,00	2.104.005.994	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**UNSUR PENGAWASAN**											
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**										
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persen	80,00	762.558.000	90,00	798.032.700	90,00	798.032.700	Inspektorat Daerah

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Laporan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Laporan	4	1.245.849.450	4	1.317.530.500	4	1.317.530.500	Inspektorat Daerah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
	7.01	**KECAMATAN**										
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	30.000.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	Kecamatan Kesambi
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	139.927.000	100,00	146.923.350	100,00	146.923.350	Kecamatan Pekalipan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	125.000.000	100,00	131.250.000	100,00	131.250.000	Kecamatan Harjamukti
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	15.000.000	100,00	15.750.000	100,00	15.750.000	Kecamatan Kejaksan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	84.834.857	100,00	89.076.600	100,00	89.076.600	Kecamatan Lemahwungkuk
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	80,00	6.611.863.284	80,00	6.942.456.448	80,00	6.942.456.448	Kecamatan Kesambi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	5.079.060.000	50,00	5.333.013.000	50,00	5.333.013.000	Kecamatan Pekalipan

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	50,00	7.419.845.000	50,00	7.790.837.250	50,00	7.790.837.250	Kecamatan Harjamukti
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	4.731.205.933	25,00	4.967.766.230	25,00	4.967.766.230	Kecamatan Kejaksan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	6.427.258.404	25,00	6.732.871.324	25,00	6.732.871.324	Kecamatan Lemahwungkuk
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	30.000.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	Kecamatan Kesambi
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	80.000.000	100,00	84.000.000	100,00	84.000.000	Kecamatan Pekalipan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	90.000.000	100,00	94.500.000	100,00	94.500.000	Kecamatan Harjamukti
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	15.000.000	100,00	15.750.000	100,00	15.750.000	Kecamatan Kejaksan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	30.000.000	100,00	31.500.000	100,00	31.500.000	Kecamatan Lemahwungkuk
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	15.000.000	0	15.750.000	0	15.750.000	Kecamatan Kesambi
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	45.000.000	0	47.250.000	0	47.250.000	Kecamatan Pekalipan

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	90.000.000	0	94.500.000	0	94.500.000	Kecamatan Harjamukti
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	10.000.000	0	10.500.000	0	10.500.000	Kecamatan Kejaksan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	45.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	Kecamatan Lemahwungkuk
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**											
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Persen	65,00	65.754.000	70,00	65.754.000	70,00	65.754.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat pemahaman Politik di masyarakat	Persen	70,00	1.285.640.513	75,00	1.285.640.513	75,00	1.285.640.513	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Ormas, LSM dan OKP tentang 4 (empat) pilar	Persen	70,00	967.858.000	75,00	967.858.000	75,00	967.858.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Persen	70,00	84.307.200	75	84.307.200	75	84.307.200	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
				Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan	Persen	100,00	160.165.000	100	160.165.000	100	160.165.000	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

No.			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan pendanaan				Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik	Persen	80,00	1.289.403.000	90,00	1.289.403.000	90,00	1.289.403.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	**NON URUSAN**											
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100,00	654.858.607.492	100,00	686.740.194.862	100,00	686.740.194.862	32 Perangkat Daerah
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	128.334.225.695	100,00	135.363.735.716	100,00	135.363.735.716	
				Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100,00	6.709.800.345	100,00	7.342.081.568	100,00	7.342.081.568	
				Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan Sistimatika Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	471.500.000	100,00	495.075.000	100,00	495.075.000	

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun menurut setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penyajian tabel pada Bab VIII Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020 disajikan pada tebel 8.1, Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel 8.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 8.3 dan 8.4, sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disajikan pada tabel 8.5 dan 8.6.

Disamping itu, penyajian indikator kinerja pada Bab VIII juga diintegrasikan dengan indikator pencapaian standar pelayanan mnimal, indikator capaian SDGs, dan indikator lainnya yang memberian kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Tabel 8.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 – 2020

No.	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD		Capaian Kinerja RPJMD	
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,00	74,35	74,92	74,89
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,81	6,21	6,29	-0,99
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,66	8,88	8,41	9,52
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,29	9,06	9,04	10,97
5.	Indeks Gini	Poin	0,41	0,43	0,41	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD 2021

Tabel 8.2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Kinerja		Proyeksi Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,92	74,89	75,44	75,73	75,93	75,93
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,90	9,91	10,35	10,48	10,61	10,61
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,11	13,12	13,71	13,85	13,99	13,99
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,13	72,26	72,38	72,51	72,64	72,64
5.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	11.930	11.800	12.014	12.307	12.626	12.626
6.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,41	9,52	8,80	8,55	8,35	8,35
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,04	10,97	9,43	9,00	8,50	8,50
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,29	-0,99	3,72-4,02	5,17-5,81	5,50-6,15	5,50-6,15

Sumber: BPPPPD, data proyeksi yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 8.3
Capaian Indikator Kenerja Utama (IKU) Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
Tahun 2019 – 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal RPJMD		Capaian Kinerja RPJMD	
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	63,26	68,40	73,61	72,72
2.	Indeks Daya Beli	Poin	72,81	n.a		
3.	Rata-rata Lama Sekolah /RLS	Tahun	9,88	9,89	9,90	9,91
4.	Harapan Lama Sekolah/ HLS	Tahun	13,08	13,09	13,11	13,12
5.	Angka Usia Harapan Hidup/AHH	Tahun	71,86	71,99	72,13	72,26
6.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,00	99,00	93,53	97,04
7.	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	Poin	74,23	73,97	73,86	73,86
8.	Indeks Pembangunan Gender/IPG	Poin	93,94	93,94	94,35	94,39
9.	Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	31,61	31,52	31,43	29,73
10.	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	Persen	5,31	n.a	5,37	5,10
11.	Skor Pola Pangan Harapan/ PPH	Poin	77,80	84,00	90,20	90,20
12.	Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0	0
13.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Poin	49,95	57,29	71,00	76,54
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH	Poin	n/a	44,05	51,96	55,48
16.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	n/a	2,38	3,85	3,87
17.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	n/a	n/a	62,00	76,62

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, data diolah, yang dikelola dalam SIPD : 2021.
**) Indikator Indeks Daya Beli, diganti menjadi Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan.*

Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kenerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PDRB per Kapita.	Juta Rupiah	73,61	72,72	80,88	80,38	83,84	83,84
2.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rupiah)	11.930	11.800	12.014	12.307	12.628	12.628
3.	Rata-rata Lama Sekolah /RLS	Tahun	9,90	9,91	10,35	10,48	10,61	10,61
4.	Harapan Lama Sekolah/ HLS	Tahun	13,11	13,12	13,71	13,85	13,99	13,99
5.	Angka Usia Harapan Hidup/AHH	Tahun	72,13	72,26	72,38	72,51	72,64	72,64
6.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	93,53	97,04	99,03	98,00	99,00	99,00
7.	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	Poin	77,86	*)77,86	77,00	77,73	78,47	78,47
8.	Indeks Pembangunan Gender/IPG	Poin	94,35	94,39	94,35	94,41	94,46	94,46
9.	Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	31,43	29,73	32,22	32,48-32,67	34,37-34,58	34,37-34,58
10.	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	Persen	5,37	5,10	5,71	5,57-5,61	5,90-5,93	5,90-5,93

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Skor Pola Pangan Harapan/ PPH	Skor	90,20	90,20	82,00	87.50	88.50	95,15
12.	Persentase Obyek pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	53,69	60,80	74,01	76,21	78,41	78,41
13.	Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0	0	0	0
14.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,00	76,54	70,00	77,00	80,00	80,00
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH	Poin	51,96	55,48	46,00	56,76	56,82	56,82
17.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	3,85	3,87	5,87	7,11	7,72	7,72
18.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	62,00	76,62	75,00	80,00	83,00	83,00

Sumber : BPPPPD Kota Cirebon., yang dikelola dalam SIPD : 2021

**) data capaian 2019, data capaian 2020 belum tersedia.*

Tabel 8.5
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Aspek dan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2019-2020

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1.	Pertumbuhan PDRB AdHb	Persen	7,93	8,42	n.a	n.a
2.	Pertumbuhan PDRB AdHk	Persen	5,79	6,01	5,28	5,28
3.	Laju Inflasi	Persen	4,36	2,80	2,00	1,16
4.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	63,26	68,42	73,61	72,72
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM	Poin	74,00	74,35	74,92	74,89
6.	Jumlah penduduk miskin	Ribu jiwa	30,19	28,03	26,80	30,61
7.	Garis kemiskinan	Rupiah	392.725	407.297	444.574	457.954
8.	Persentase penduduk miskin	Persen	9,66	8,88	8,41	9,52
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,68	0,95	0,96	4,38
10.	Angka Melek Huruf	Persen	97,40	99,81	100,00	100,00
11.	Indeks Gini	Poin	0,411	0,432	0,408	0,421
12.	Rata-rata Lama Sekolah/ RLS	Tahun	9,88	9,89	9,90	9,91
13.	Harapan Lama Sekolah/ HLS	Tahun	13,08	13,09	13,11	13,12
14.	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,385	1,385	1,566	1,642
15.	Angka Harapan Hidup/ AHH	Tahun	71,86	71,99	72,13	72,26
16.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	99,84	100,00
17.	Cakupan kelurahan siaga aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,00	99,00	93,53	97,04

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	Persen	66,45	68,03	62,71	63,75
20.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,29	9,06	9,04	10,97
21.	Tingkat Kesempatan Kerja/TKK	Persen	n.a	90,94	91,02	89,03
22.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Poin	84,00	n.a	80,00	77,75
23.	Rasio PAD terhadap Penerimaan dan Pendapatan pemerintah	Rasio	29,51	29,51	29,06	27,04
24.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Skor/Nilai	77,80	78,90	90,20	90,20
26.	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ hari	33,42	33,00	33,47	n.a
27.	Penguatan cadangan pangan	Persen	n.a	n.a	27,62	54,85
28.	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
29.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	0,33	0,33	0,33	0,34
30.	Peningkatan produksi pangan asal ternak:					
	• Daging Sapi	Kg	235,731	155.00	435.999	504.414
	• Daging Babi	Kg	91.011	65.000	94.315	98.851
31.	Peningkatan PDRB dari sektor Pariwisata	Persen	5,31	5,47	5,37	5,10
32.	Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	31,74	31,74	31,43	29,73
33.	Peningkatan PDRB dari sektor Industri	Persen	4,52	4,52	10,08	10,21
34.	Pertumbuhan Industri	Persen	4,52	4,73	n.a	n.a
35.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	2	na	2	0
36.	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	50,00	50,00	46,30	61,11
37.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,94	93,94	94,35	94,39
38.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,23	73,97	77,86	77,86
39.	Persentase Obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	69,60	69,60	53,69	60,80
40.	Cakupan RW Siaga Aktif	Persen			96,27	
41.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Poin	73,90	78,87	79,61	79,61

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
42.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kependudukan	Poin	77,28	78,00	80,00	77,75
II.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	P e n d i d i k a n.					
43.	Angka Partisipasi Kasar/APK:					
	PAUD	Persen	57,94	65,73	57,54	57,42
	SD/MI	Persen	111,37	130,66	149,94	112,71
	SMP/MTs	Persen	139,93	151,91	81,85	124,78
44.	Angka Partisipasi Murni (APM) :					
	SD/MI/Paket A	Persen	96,53	96,74	130,28	101,75
	SMP/SMPT/MTs/Paket B	Persen	82,72	113,99	59,12	89,91
45.	Angka Putus Sekolah :					
	SD/MI/Paket A	Persen	0,02	0,08	0,00	0,00
	SMP/SMPT/MTs/Paket B	Persen	0,02	0,26	0,20	0,03
46.	Angka Kelulusan :					
	SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
47.	Angka Melanjutkan Sekolah :					
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	118,65	110,21	111,33	108,83
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	118,02	113,73	100,00	100,00
48.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	20,06	40,25	55,10	55,10
49.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	20,48	40,25	28	29
50.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia 7-12 tahun (Per 10.000 penduduk)	Rasio	0,28	0,28	0,51	0,51

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
51.	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas terhadap Penduduk Usia sekolah SD/MI	Rasio	15,00	15,00	3,88	3,43
52.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia 13-15 tahun (Per 10.000 penduduk)	Rasio	13,70	13,70	13,70	13,70
53.	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas terhadap Penduduk Usia Sekolah 13-15 tahun	Rasio	12,00	12,14	12,14	12,14
54.	Persentase penduduk Melek Huruf Usia di atas 15 tahun	Persen	99,93	99,88	100,00	100,00
55.	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,74	94,88	96,25	95,79
56.	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,19	95,83	97,72	94,04
57.	Guru SD/MI yang Memenuhi Sertifikasi tenaga pendidik	Persen	48,42	50,41	48,15	43,03
58.	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Sertifikasi tenaga pendidik	Persen	53,41	66,06	53,38	54,22
59.	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi	Persen	n.a	n.a	50,56	61,06
60.	Prosentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Persen	n.a	n.a	65,00	75,00
61.	Akreditasi Sekolah Jenjang SD/MI :					
	Akreditasi A	Sekolah	26	27	30	95
	Akreditasi B	Sekolah	20	20	31	32
	Akreditasi C	Sekolah	114	114	111	1
62.	Akreditasi Sekolah Jenjang SMP/MTs :					
	Akreditasi A	Sekolah	10	10	19	31
	Akreditasi B	Sekolah	4	4	22	10
	Akreditasi C	Sekolah	30	30	1	1
63.	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Rasio	21,04	20,00	18	18,00
64.	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Rasio	19,63	18,00	18	16,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
65.	Terpenuhinya rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,31	32,31	30	30
66.	Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,77	32,77	36	36
67.	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata Pendidikan dasar	Rasio	22	22	32	32,00
68.	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	Poin	83,00	83,00	83,00	84,50
	K e s e h a t a n					
69.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	99,60	99,61	98,41	91,14
70.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	93,76	99,96	97,85	92,85
71.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99,53	104,86	97,32	98,27
72.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	92,75	92,75	97,75	88,90
73.	Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah	Persen	93,37	9758	97,37	99,35
74.	Pelayanan kesehatan usia subur	Persen	n.a	n.a	33,58	17,50
75.	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Persen	100,00	100,00	92,59	88,73
76.	Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar	Persen	100,00	100,00	57,31	89,07
77.	Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus sesuai srandar	Persen	100,00	100,00	73,47	100,00
78.	Pelayanan kesehatan bagi ODGJ sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
79.	Pelayanan kesehatan bagi penderita TB, HIV-AIDS sesuai standar	Persen	99,40	99,40	100,00	100,00
80.	*Unmet need* pelayanan kesehatan	Persen	8,00	8,00	7,90	7,61
81.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	99,00	99,10	94,00	97,04
82.	Strata Mandiri RW Siaga Aktif	RW	247	248	96,27	96,57
83.	Persentase merokok pada penduduk umur di atas 15 tahun	Persen	n.a	33,80	4,08	33,80
84.	Persentase merokok pada penduduk umur di atas 18 tahun	Persen	7,20	5,40	0,00	5,00
85.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	99,84	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
86.	Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	Persen	83,78	82,77	81,21	72,95
87.	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif	Persen	50,00	60,15	64,38	72,84
88.	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	Persen	10,24	9,40	10,17	10,16
89.	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	10,70	10,20	12,70	9,50
90.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/ balita	Persen	13,41	10,10	9,60	8,95
91.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/ baduta	Persen	10,56	7,78	8,16	6,47
92.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Persen	4,73	3,32	9,60	8,95
93.	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	Persen	89,68	90,32	90,21	93,70
94.	Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat	Tatanan	5	5	5	5
95.	Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/ air minum memenuhi syarat	Persen	99,40	95,11	98,30	98,10
96.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	95,73	100,00
97.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar	Persen	94,30	94,30	100,00	100,00
98.	*Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	95,50	95,50	100,00	100,00
99.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC-BTA	Persen	90,00	90,00	110,00	
100.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	317	425	523	
101.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	90,00	90,00	34,00	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
102.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	85,00	90,00	89,20	
103.	Prevalensi HIV-AIDs dari total populasi	Persen	>0,05	>0,05	< 0,05	
104.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDs	Persen	30,00	n.a	n.a	n.a
105.	Cakupan balita pneumonia ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
106.	Angka kejadian malaria	Permil	2	0	1	n.a
107.	Angka kematian akibat malaria	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
109.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
110.	Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00	100,00	n.a	100,00
111.	Deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	Persen	100,00	100,00	n.a	100,00
112.	Angka cacat tingkat 2	Persen	0,00	0,00	14,00	n.a
113.	Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah	Persen	50,00	52,76	n.a	38,00
114.	Cakupan Balita Stunting mendapat pelayanan pemantauan pertumbuhan	Persen	100,00	100,00	n.a	100,00
115.	Tempat-tempat Umum memenuhi syarat kesehatan	Persen	94,34	97,36	93,50	93,50
116.	Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	Persen	79,39	87,80	83,59	83,05
117.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	85,77	85,77	87,00	93,50
118.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persen	<0,05	<0,05	< 0,05	< 0,05
119.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00
120.	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% *Case Detection Rate*/ CDR)	Persen	n.a	n.a	179,00	82,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
121.	Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati (*Case Notification Rate*/ CNR) per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	317	425	523	307
122.	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% *Succes Rate*)	Persen	n.a	n.a	89,20	61,61
123.	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	Persen	45,00	45,00	42,00	82,00
124.	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% *Succes Rate*)	Persen	n.a	n.a	49,00	75,00
125.	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	Persen			35,00	47,00
126.	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	Kasus	993	1.364	1670	981
127.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	317	425	523	380
128.	Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional	Persen	0,00	0,00	48,00	88,00
129.	Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua	Persen	45,00	45,00	32,00	28,00
130.	Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB	Persen	86,00	90,00	49,00	100,00
131.	Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang	Persen	15,00	15,00	50,00	35,00
132.	Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
133.	Cakupan penemuan kasus TB anak	Persen	106,00	100,00	121,00	89,00
134.	Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	Persen	0,00	0,00	12,00	9,00
135.	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	Persen	7,60	8,00	12,00	15,00
136.	Peningkatan pembinaan lanjut usia	Persen	60,26	51,44	50,00	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
137.	Tercapainya upaya pengamanan dan penyehatan makanan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
138.	Cakupan industri rumah tangga yang dibina	Persen	10,80	n.a		22,00
139.	Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat	Persen	85,00	85,20		90,00
140.	Cakupan pengawasan *post market*	Persen	86,00	2 kali		90,00
141.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	96,00	99,61	100,00	
142.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,05	100,53	112,87	
143.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	93,76	99,96	98,38	
144.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	95,36	99,41	97,25	
145.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	99,53	104,86	112,80	
146.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	94,47	92,86	93,21	
147.	Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen	85,28	87,62	98,92	
148.	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100,00	100,00	100,00	
149.	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	73,80	74,32	87,00	
150.	Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00	
151.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	15,40	15,40	21,46	15,40
152.	Cakupan pelayanan kesehatan 7 dimensi bagi lansia	Persen	51,44	n.a	n.a	12,52
153.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	100,00	n.a	12,52
154.	Penanganan KLB < 24 jam	Persen	100,00	100,00	99,48	
155.	*Acute Flaccid Paralysis/AFP* (jumlah kasus per 100.000 X jumlah penduduk ‹ 15 tahun	Kasus	4	4	0	
156.	Proporsi kematian akibat keracunan	Persen	0,00	0,00	0,00	
157.	Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri	Persen	0,00	0,00	0,00	
158.	Angka bebas jentik	Persen	95,00	95,00	-	
159.	B O R (Rumah Sakit Gunung Jati)	Persen	58,90	n.a	65,54	
	L O S	Hari	3,4	4,14	4,30	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	T O I	Kali	1,00	2,41	1,10	
	B T O	Kali	37,45	56,35	37,45	
	G D R	Persen	38,00	68,00	78,18	
	N D R	Permil	24,00	43,00	56,84	
160.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin	Persen	100,00	100,00	85,01	100,00
161.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
162.	Proporsi peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD)	Persen	100,00	100,00	56,00	100,00
163.	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Strata	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
164.	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu sesuai penggunaan obat rasional	Persen	100,00	100,00	99,20	100,00
165.	Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
166.	Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Persen	9,87	10,00	51,00	40,00
167.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
168.	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Orang	69	48	67	45
169.	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	n.a	30	19	20
170.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Persen	n.a	n.a	1,80	1,77
171.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen	n.a	n.a	0	1,7
172.	Tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	90,61	n.a
173.	B O R (Tingkat Kota/Dinas Kesehatan)	Persen	58,90	58,90	60,6	42,09
	L O S	Hari	3,7	3,4	3,2	2,3
	T O I	Kali	2,5	1,0	2	5,14
	B T O	Kali	60,39	37,45	70,7	10,92
	G D R	Permil	38,07	38,00	35,1	14,84

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	N D R	Permil	24,07	24,00	15,8	5,69
174.	Terpenuhinya pencapaian standar tenaga kesehatan yang berkompetensi	Persen	56,00	56,00	25,75	n.a
175.	Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	79,00	82,50	79	100,00
176.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang/Km2	n.a	67	n.a	11,03
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
177.	Persentase drainase kondisi baik	Persen	70,00	70,17	71,00	75,00
178.	Jalan mantap kondisi baik	Persen	87,00	89,00	81,00	92,00
179.	Meningkatnya jalan mantap	Persen	n.a	n.a	81,00	
180.	Trotoar kondisi baik 100% (10,5 km)	Persen	n.a	n.a	81,00	
181.	Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik 53 unit (naik 3 unit dari 50 unit)	Unit	n.a	n.a	1	
182.	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	Persen	0,20	0,35	0,90	1,1
183.	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	n.a	n.a	100,00	100,00
184.	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	74,00	100,00	1,40	100,00
185.	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	75,00	100,00	100,00	100,00
186.	Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	n.a	n.a	0	0
187.	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	55,00	90,00	100,00	100,00
188.	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	10	8	2	2

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
189.	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik di tahun 2023).	Titik	22	1	0	0
190.	Persentase rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	92,82	90,00	100,00	90,00
191.	Persentase Cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	89,00	n.a	96,00	n.a
192.	Persentase luasan RTH publik yang bertambah	Persen	2,00	0,35	n.a	n.a
193.	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum/ Fasum	Lokasi	2	n.a	0	3
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
194.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	11,11	11,11	0	12,96
195.	Rasio jumlah rumah layak huni / jumlah penduduk	Rasio	0,1758	0,1758	0,0266	n.a
196.	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	9,00	n.a	8,81	32,62
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
197.	Konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0
198.	Cakupan penyelesaian pelanggaran K3	Persen	99,00	99,20	100,00	0
199.	Cakupan rasio LINMAS	Persen	100,00	100,00	1 orang Per RT	100,00
200.	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	100,00	100,00	n.a	n.a
201.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
202.	Nol persen kasus SARA dan kasus terorisme	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
203.	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	n.a	150 orang	n.a	60,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
204.	Terlaksananya Koordinasi intelejen daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
205.	Cakupan petugas yang memilki sertifikasi penanganan bencana	Persen	n.a	50,00	98,00	n.a
206.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kebencanaan	Orang	300	300	500	n.a
207.	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
208.	Meningkatnya keahlian petugas dan relawan penanggulngan bencana	Orang	24	54	41	n.a
209.	Jumlah kelurahan yang memiliki Forum Siaga Bencana	Kelurahan	0	0	22	22
210.	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	60,00	60,00	70,00	99,92
211.	Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat	Persen	61,00	61,00	75,00	27,11
212.	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	60,00	60,00	70,00	99,92
213.	Meningkatnya rasio tenaga teknis yang bersertifikat	Persen	61,00	69,45	75,00	27,11
214.	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen	52,00	52,00	52,00	100,00
215.	Rasio masyarakat yang dilatih dibagi jumlah penduduk	Rasio	1:570	1:570	1 : 437	n.a
	S o s i a l					
216.	Terlaksananya kegiatan kemitraan dalam penanganan PMKS	MoU	n.a	n.a	2	0,5828
217.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00
218.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
219.	Data Base Keluarga Miskin yang valid	Dokumen	1	0	0	2
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	Tenaga Kerja					

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
220.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	48,84	54,99	75,00	67,50
221.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	Persen	75,00	34,69	60,00	45,00
222.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	Persen	30,00	54,55	60,00	n/a
223.	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	49,60	47,09	30,00	47,50
224.	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	Kasus	10,08	5,27	8	6
225.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	60,00	56,50	60,00	61,00
226.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Persen	66,64	77,86	55,00	78,50
227.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda).	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
228.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Playanan Terpadu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
229.	Jumlah RW Layak Anak	RW	6	2	4,44	4,44
230.	Cakupan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	75,00	112,64	100,00	100,00
231.	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG, kelembagaan perlindungan perempuan.	Satgas PKDRT/ Persen	4; 100,00	4; 100,00	4	4

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
232.	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah dan terbinanya KK di lokasi P2WKSS	PD/KK/Orang	3 PD; 100 KK; 25 orang PEKA	3 PD; 100 KK; 25 orang PEKA	3	3
	P a n g a n					
233.	Ketersediaan energy dan protein per kapita	Kkal/kap/hari ; Gr/kap/ hari	E=2748 kkal/kap./ hari; 73,92 gr/kap./hr	3.598 kkal/kap/hr) 97,82 gr/kap/hr)	E= 3,669 kkal/kap/ hari; P= 94.88 gr/kap/hari	E= 3.598 kkal/kap/hr; P= 97,82 gr/kap/hr
234.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
235.	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
236.	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
237.	Penguatan cadangan pangan	Persen	25,00	45,00	27,62	54,85
238.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	80,10	77,80	90,20	90,20
239.	Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	Persen	93,97	94,65		
240.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	85,00	85,00	97,5	96,37
241.	Penurunan konsumsi beras	Kg/kap/hari	95,80	95,80	89,4	95,8
242.	Peningkatan konsumsi pangan hewani	Kr/kap/hari	39,10	39,10	38,3	43,6
243.	Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/kap/hari	125,75	125,75	202,4	231,3
244.	Peningkatan konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/hari	27,00	27,00	27,6	25,9
	P e r t a n a h a n					
245.	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	2	0	0	3

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Lingkungan Hidup					
246.	Prosentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	2,00	2,00	8,00	8,00
247.	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen			88,00	71,00
248.	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
249.	Prosentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00
250.	Operasional TPA/ TPST/ SPA di Kota Cirebon (Nilai Adipura TPA)	Skor	70,07	73,16	68,25	68,25
251.	Tersusunnya RPPLH Kota Cirebon	Ada/Tdk ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Ada	Ada
252.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada/tidak ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
253.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tdk ada	Tdk Ada	Tdk Ada	Ada	Ada
254.	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	48,00	49,00	57,00	55,00
255.	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha dan dampak di daerah Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
256.	Prosentase peningkatan keanekaragaman hayati	Persen	18,75	18,75	31,25	31,25
257.	Prosentase luas lahan Konservasi	Persen	0,42	0,42	0,42	0,42
258.	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca/GRK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
259.	Prosentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki Kapasitas Adaptasi, Mitigasi dan Perubahan Iklim	Persen	2,82	3,22	4,00	4,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
260.	Indeks Kualitas Air	Poin	61,33	25,38	56,92	46,92
261.	Indeks Kualitas Udara	Poin	53,04	78,03	68,58	73,13
262.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	32,63	32,63	35,77	37,54
263.	Penetapan hak MHA	Kali	0	0	0	0
264.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	1	10
265.	Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Ada
266.	Meningkatnya jumlah even pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat	Kali/ tahun	1	1	6	1
267.	Meningkanya jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan	Persen	0,00	0,00	50,00	52,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
268.	Cakupan penerbitan KTP	Persen	95,00	95,00	99,00	99,00
269.	Cakupan penerbitan KK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
270.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	88,00	88,00	83,00	87,88
271.	Cakupan akta kematian	Persen	80,00	80,00	76,53	90,00
272.	Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan	Persen	10,00	10,00	13,00	10,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
273.	Tingkat perkembangan kelurahan Kota Cirebon :					
	Kurang berkembang	Kelurahan	0	0	0	0
	Berkembang	Kelurahan	8	8	7	7
	Cepat berkembang	Kelurahan	14	14	15	15
	Kualifikasi Status Kelurahan:					

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kecamatan Kesambi:					
274.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	1	0
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	1	1
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	3	4
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Pekalipan:					
275.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	2	0
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	2	0
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	4
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Kejaksan:					
276.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	2	4
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	2	0

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Harjamukti:					
277.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	1	1
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	3	3
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	1	0
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	1
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Kecamatan Lemahwungkuk:					
278.	Swakarya Mula	Kelurahan	n.a	n.a	1	2
	Swakarya Madya	Kelurahan	n.a	n.a	2	1
	Swakarya Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	1	1
	Swasembada Mula	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Madya	Kelurahan	n.a	n.a	0	0
	Swasembada Lanjut	Kelurahan	n.a	n.a	0	0

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
279.	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang dibina :					
	Wartek	Unit	22	22	22	22
	Kelompok	Kelompok	28	28	28	28
	Posyandu	Unit	331	331	331	331
280.	Meningkatnya cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	RW	248	248	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya	Minimum 20% dari Tahun Sebelum nya
281.	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam bantuan RW	RT	1.369	1.369	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya	Minimum 30% dari Tahun Sebelum nya
282.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Terlibat Dalam BSMSS dan BBGRM	LPM	22	22	22	22
283.	Keikutsertaan lomba kelurahan tingkat Provinsi/Nasional	Kelurahan	22	22	22	14
284.	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang di Bina	Kelurahan	22	22	22	22
	Kecamatan Kesambi:					
285.	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan, bangunan fasilitas umum dan penerangan jalan umum) di wilayah Kecamatan Kesambi.	Persen	98,31	98,31	100,00	100,00
286.	Rasio juara lomba MTQ tingkat Kota Cirebon	Rasio	Juara III MTQ Kota Cirebon	97,58	5 Cabang 24 Orang	5 Cabang; 24 orang
287.	Cakupan posyandu strata mandiri	Persen	23,00	29,87	13,97	
288.	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Kesambi dan persentase masyarakat di Kec. Kesambi yang memiliki sertifikat keahlian berbasis kompetensi.	Persen	97,18	97,18	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
289.	Jumlah atlet berprestasi/ jumlah prestasi olahraga	Atlet	1	1	1	1
290.	Persentase usulan hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir Musrenbang Kecamatan	Persen	99,27	70,00	100,00	100,00
291.	Rasio RW K3	Rasio	96,41	96,41	100,00	100,00
292.	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan	Poin	84,00	93,66	100,00	100,00
	Kecamatan Pekalipan:					
293.	Meningkatnya kondisi jalan dan saluran drainase	Persen	90,00	99,39	93,75	93,75
294.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
295.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Posyandu	Persen	Juara III Tkt Kota	97,54	90,00	90,00
296.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan se-Kecamatan Pekalipan	Persen	100,00	97,00	85,71	90,71
297.	Meningkatnya kualitas keagamaan masyarakat Kelurahan se-Kec. Pekalipan	Persen	100,00	99,02	100,00	100,00
298.	Terlaksananya program RW bersih di tingkat Kecamatan Pekalipan	Persen	82,15	81,28	100,00	100,00
299.	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kecamatan Harjamukti:					
300.	Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur	Persen	100,00	99,43	100,00	100,00
301.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
302.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Persen	98,15	98,15	71,91	76,35
303.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	Persen	99,24	99,24	100,00	100,00
304.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	93,35	93,35	82,86	84,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
305.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
306.	Terselenggaranya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kecamatan Kejaksan:					
307.	Meningkatnya kondisi drainase dan jalan perumahan dalam kondisi baik	Persen	98,44	98,81	100,00	100,00
308.	Berkembangnya wirausaha muda	Orang	n.a	n.a	100,00	100,00
309.	Cakupan LKK aktif	Persen	100,00	98,75	100,00	100,00
310.	Rasio RW K3	Rasio	97,34	99,17	100,00	100,00
311.	Lestarinya adat budaya daerah	Persen	85,00	99,87	67,00	70,25
312.	Peringkat MTQ tingkat Kota Cirebon	Peringkat	0	0	100,00	100,00
313.	Meningkatnya hasil Musrenbang Kec. yang diakomodir Musrenbang Kota	Persen	100,00	99,61	100,00	100,00
	Kecamatan Lemahwungkuk:					
314.	Meningkatnya kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air, lahan/ bangunan fasilitas umum, dan penerangan jalan umum) di wilayah kecamatan Lemahwungkuk.	Persen	100,00	99,00	53,44	53,44
315.	Peningkatan partisipasi kader dan masyarakat dalam kegiatan Posyandu di RW	Persen	95,00	100,00	83,00	100,00
316.	Meningkatnya kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk;	Persen	95,00	98,00	98,00	98,76
317.	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
318.	Terpeliharanya seni budaya daerah	TRW	IV	IV	IV	IV
319.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Persen	92,35	95,00	100,00	100,00
320.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persen	100,00	79,00	75,00	95,00
321.	Terselenggaranya pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
322.	Terselenggaranya pekan olahraga se-Kec. Lemahwungkuk	Persen	100,00	94,00	14,29	21,15
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
323.	Persentase Kampung KB	Persen	22,73	22,73	36,36	109,09
324.	*Current Use/* Pasangan Usia Subur	Persen	60,92	63,11	63,38	64,29
325.	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 persen	Persen	3,50	0,25	0,11	0,12
326.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	96,14	105,94	80,29	97,34
327.	Rasio akseptor KB	Rasio	14,97	14,95	13,44	12,08
328.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need*	Persen	23,02	20,11	20,06	18,99
329.	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif	Persen	26,94	26,44	26,27	26,20
330.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	n.a	25,81	27,58	27,58
331.	Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB	Persen	4,53	100,00	100,00	100,00
	P e r h u b u n g a n					
332.	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00
333.	Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
334.	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
335.	Jumlah rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,51	73,00	73,47
336.	Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,78	60,00	60,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
337.	Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) x 100%	Persen	80,00	83,78	86,00	86,16
338.	Meningkatnya pendapatan dari Retribusi Parkir	Persen	73,44	73,44	62,00	46,00
339.	Rasio angkutan kendaraan angkutan umum terhadap jumlah penduduk	Persen	0,31	0,31	0,31	0,30
340.	Jumlah Ijin Trayek yg dikeluarkan / jumlah penduduk	Rasio	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030
341.	Jumlah Uji Kir	Unit	12.202	12.202	15.638	9.735
342.	Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	Persen	19,00	19,00	0,73	0,73
343.	Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Komunikasi dan Informatika					
344.	Perangkat Daerah yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pemerintahan	Perangkat Daerah	1	13	13	13
345.	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunitas	1	20	22	27
346.	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur Bidang Kominfo	Rasio	70,00	75,00	100	100,00
347.	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	70,00	75,00	100,00	98,88
348.	Terwujudnya kerjasama di bidang Kominfo	Persen	70,00	75,00	100,00	96,49
349.	Terpenuhinya infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	70,00	75,00	90,00	99,47
350.	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif, efisien dan murah	Persen	70,00	75,00	100,00	97,59

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
351.	Tersampaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat	Persen	60,00	65,00	80,00	99,06
352.	Tersedianya media komunikasi	Persen	70,00	75,00	100,00	98,53
353.	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	Persen	70,00	75,00	100,00	99,77
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
354.	Peningkatan pasar rakyat ber-SNI	Unit Pasar	0	0	0	n.a
355.	Updating data PKL di 5 Kecamatan	PKL	489	489	200	200
356.	Optimalisasi pelaksanaan PERDA PKL	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
357.	Tingkat pelanggaran PKL menurun	Persen	45,86	n.a	33,13	n.a
358.	Meningkatnya Jumlah PKL yang dibina	PKL	489	489	n.a	n.a
359.	Tercapainya peningkatan modal usaha UMKM	Persen	11,37	13,12	26,37	n.a
360.	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Unit	236	540	243	257
	Penanaman Modal					
361.	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	Jenis Investasi	0	0	1	n.a
362.	Meningkatnya nilai investasi (PMA/ PMDN)	Persen	n.a	n.a	1,00	n.a
363.	Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen	Poin	73,90	78,87	82,65	n.a
364.	Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	Perwal/ Kepwal	1	n.a	2	1
	Kepemudaan dan Olahraga					
365.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	2	2	2	0
366.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	50,00	50,00	46,3	61,11
367.	Sarana olahraga yang representatif	Persen	40,00	50,00	50,00	66,00
368.	Cakupan pembinaan olah raga	Persen	75,00	95,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
369.	Cakupan pelatih olah raga bersertifikasi	Persen	33,00	56,00	56,00	55,00
370.	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	17,00	31,00	31,00	30,00
371.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	3	6	2	18
372.	Jumlah prestasi cabang olahraga	Cabor	2	4	2	11
373.	Rasio organisasi pemuda terhadap penduduk usia pemuda	Rasio	1:1.681	1:1681	1 : 1.422	1 : 1.025
374.	Persentase wira usaha muda	Persen	50,00	50,00	0,00	27,00
	S t a t i s t i k					
375.	Meningkanya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Dokumen	5	5	1 CSD	1 CSD
	P e r s a n d i a n					
376.	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	Persen	50,00	2 dok	50,00	99,52
	K e b u d a y a a n					
377.	MoU kerja sama pengelolaan kekayaan budaya	MoU	1	3	1	n.a
378.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	69,60	69,60	53,69	n.a
379.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Even	14	15	15	15
380.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	48	62	62	62
381.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	1	1	1	0
382.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Objek	6	10	7	10
	P e r p u s t a k a a n					
383.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Permil	1,385	1,385	1.516	642
384.	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka	134.519	168.274	296.436	214.765
385.	Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun	Orang	24.785	37.483	30.708	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
386.	Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Unit	4 unit di RW dan 4 unit di Kelurahan	4 unit di RW dan 4 unit di Kelurahan	60 unit di RW; 1 unit di Kelurahan	n.a
387.	Jumlah pojok baca baru di area publik	Unit	0	0	5	10
	K e a r s i p a n					
388.	Sistem penyimpanan arsip sesuai standar; rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan	Dokumen	2	2	4	n.a
389.	Nilai audit kearsipan tingkat kota	Poin	74,09	77,09	83,18	n.a
390.	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	1.184	3.834	471	550
391.	Arsip yang terpelihara	Berkas	n.a	8.324	15.824	23.324
392.	Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	Persen	70,00	70,00	30,00	70,00
	URUSAN PILIHAN					
	Kelautan dan Perikanan					
393.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3% per tahun	Ton	5.172	3.397	6.821	6.003,475
394.	Meningkatnya produksi perikanan budi daya sebesar 3% per tahun	Ton	316,68	162	180,29	206
395.	Menngkatnya tingkat konsumsi ikan	Kg/kapita/ tahun	33,42	33,00	33,47	n.a
	P a r i w i s a t a					
396.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 80%	Orang	1.033.642	1.080.544	1.505.207	568.571
397.	Meningkatnya lama kunjungan wisata	Hari	1	1	1	2
	P e r t a n i a a n					

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
398.	Akses pemasaran hasil olahan pertanian dan peternakan	Jenis hasil olahan	1	1	1	1
399.	Peningkatan produktifitas padi	Ton/ Hektar	4,70	5,30	5,9	6
400.	Peningkatan produksi pangan asal ternak :					
	• Daging Sapi	Kg	235.731	155.000	435.999	504.414
	• Daging Babi	Kg	91.011	65.000	94.315	98.851
401.	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan/ ternak	Ekor	500	420	539	530
	P e r d a g a n g a n					
402.	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	58,33	58,33	62,64	n.a
403.	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	67,00	69,00	65,00	100,00
404.	Cakupan wajib tera/ tera ulang dan alat UPTP	Persen	75,00	77,95	80,00	72,00
405.	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	31,74	31,74	31,57	n.a
	P e r i n d u s t r i a n					
406.	Meningkatnya pengenalan penjualan dan pemasaran produk UMKM	IKM	125	160	26	n.a
407.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Persen	72,00	72,00	112,5	n.a
408.	Peningkatan PDRB dari sector perindustrian	Persen	10,29	10,29	10,17	n.a
	PENUNJANG PEMERINTAHAN					
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ SEKRETARIAT DAERAH:					
409.	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	45,00	45,00	80,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
410.	Persentase peta proses bisnis penyelengaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	0,00	0,00	0,00	32,00
411.	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
412.	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Dokumen	53	81	38	26
413.	Persentase penetapan dan pengundangan PERDA dan PERWAL dari Rancangan Perda dan Rancangan Perwal	Persen	58,62	48,00	84,00	75,00
414.	Aparatur Sipil Negara yang memiliki nilai jabatan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00
415.	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
416.	Pilar Batas Utama (PBU) yang dipelihara	Pilar/titik	7	29	n.a	n.a
417.	Jumah draf rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan (Adm Kesra)	Dokumen	196	228	5	12
418.	Jumlah draf rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan (Adm Ekbang).	Dokumen	78	96	25	18
419.	Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang dan jasa	Persen	100,00	100,00	n.a	n.a
420.	Pengajian rutin bulanan dan mingguan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Kali	204	252	12	n.a
421.	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen	49,00	82,00	75,00	n.a
422.	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ/STQ tingkat Provinsi Jawa Barat	Cabang Musabaqoh	3	5	4	n.a
423.	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Hari Besar	6	6	6	n.a
424.	Persentase telaahan Staf Ahli yang ditindaklanjuti	Persen	20,00	20,00	25,00	30,00
425.	Persentase Perangkat Daerah yang patuh pada SBBD dan standar satuan harga barang/jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
426.	Nilai AKIP A pada tahun 2023	Skor	n.a	B	9,57	n.a
427.	Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistimatika berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persen	75,00	50,00	n.a	100,00
428.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon	Nilai	B	B	B	n.a
	SEKRETARIAT DEWAN:					
429.	Rasio jumlah Perda yang ditetapkan terhadap Raperda	Persen	44,00	55,00	70,00	72,2
430.	Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100,00	100,00	75,00	100,00
431.	Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	59,70	59,70	42,01	65,00
432.	Penyusunan Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai landasan penyusunan Raperda	Dokumen	7	6	86,00%	n.a
433.	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD: Tersusun dan Terintegrasinya Progam-Program Kerja DPRD untuk Melaksankan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD); Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pemebentukan PERDA dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Persen	74,50	74,50	100,00	n.a
	PENGAWASAN:					
434.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	1	1 (1.75)	3

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
435.	Peningkatan kompetensi APIP Kota Cirebon	Persen	100,00	100,00	100,00	n.a
436.	Persentase Tindak Lanjut temuan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	93,49	n.a
437.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40,00	42,50	74,46	93,49
438.	Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	PERENCANAAN:					
439.	Konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Persen	87,39	90,00	97,49	97,49
440.	Konsistensi program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	98,26	98,30	95,17	95,17
441.	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (ketersediaan data dalam SIPD)	Persen	68,43	72,30	83,63	83,63
442.	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	78,99	80,67	97,49	99,02
443.	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	96,19	98,90	99,19	99,19
444.	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Persen	90,00	92,50	65,00	58,37
	K E U A N G A N:					
445.	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
446.	Rasio PAD terhadap penerimaan dan pendapatan daerah	Persen	29,51	29,51	29,06	27,04
447.	Meneingkatnya PAD	Persen	22,26	- 0,79	-1,41	10,00
448.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
449.	APBD tepat waktu	Tepat waktu/Tdk tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
450.	Persentase penyerapan anggaran	Persen	90,00	90,68	91,24	90,50

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Data Awal		Capaian Kinerja	
			2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	K E P E G A W A I A N:					
451.	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	8,00	8,00	26,08	25,72
452.	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	80,00	80,00	80,35	80,77
453.	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	85,00	85,00	92,72	92,72
454.	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi penyampaian LHKPN	Persen	70,30	70,30	100,00	100,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:					
455.	Persentase A S N yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,57	3,00	3,81	1,27
456.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	60,46	60,00	10,79	11,73
457.	Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah	Orang	0	5	3	3
458.	Jumlah Jabatan kosong Administrator pada Perangkat Daerah	Orang	0	20	47	21
459.	Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada PD	Orang	0	68	68	44
	Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah	Orang	0	22	22	267
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:					
460.	Persentase hasil Kelitbangan yang dijadikan dasar Kebijakan Daerah	Persen	0,00	0,00	31,00	70,00
461.	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	Persen	100,00	100,00	90,00	n.a

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon

Tabel 8.6
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Aspek dan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2021

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1.	PDRB Per Kapita AdHb	Juta Rupih	80,88
2.	PDRB Per Kapita AdHk	Juta Rupiah	54,35
3.	Laju Inflasi	Persen	2,92-4,07
4.	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	Persen	5,69
5.	Indeks Pembangunan Manusia/ IPM	Poin	75,44
6.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	12.014
7.	Persentase penduduk miskin	Persen	8,8
8.	Garis Kemiskinan	Rupiah	451.011
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk/ LPP	Persen	0,67
10.	Angka Melek Huruf	Persen	100,00
11.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,35
12.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,71
13.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,38
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00
15.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,03
16.	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	Persen	100,00
17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	Persen	70,70
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,43
19.	Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Penduduk Usia Kerja	Rasio	65,08
20.	Tingkat Kesempatan Kerja/TKK	Persen	91,54
21.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Poin	74,00
22.	Indeks Kepuasanan masyarakat terhadap layanan kependudukan	Poin	84,00
23.	Rasio PAD terhadap penerimaan dan Pendapatan Daerah	Rasio	33,17
24.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
25.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor/nilai	82
26.	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/ hari	33,20
27.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	0,32
28.	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak :		
	• Daging sapi	Kg	170.000
	• Daging Babi	Kg	67.000
29.	Peningkatan PDRB dari sektor Pariwisata	Persen	3,71
30.	Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	32,22

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
31.	Peningkatan PDRB dari sektor Industri	Persen	10,32
32.	Pertumbuhan industri	Persen	5,37
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		
	Pendidikan		
33.	APK PAUD	Persen	59,68
34.	APK SD/MI	Persen	100,00
35.	APK SMP/MTs	Persen	100,00
36	APM SD/MI	Persen	97,50
37.	APM SMP/MTs	Persen	0,28
38.	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0,07
39.	Angka putus sekolah SMP/MTs	Persen	0,15
40.	Angka mengulang kelas SD/MI	Persen	0,37
41.	Angka mengulang kelas SMP/MTs	Persen	0,15
42.	Angka kelulusan SD/MI	Persen	100,00
43.	Angka kelulusan SMP/MTs	Persen	100,00
44.	Angka melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	100,00
45.	Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00
46.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	100,00
47.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	100,00
48.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 7-12	Rasio	49,00
49.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah 13-15	Rasio	28,00
50.	Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	15,22
51.	Rasio ketersediaan ruang kelas per penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)	Rasio	12,62
52.	Terpenuhinya rasio jumlah murid SD per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	30,00
53.	Terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan	Rasio	32,00
54.	SD dengan Akreditasi A	Sekolah	60
55.	SD dengan Akreditasi B	Sekolah	21
56.	SD dengan Akreditasi C	Sekolah	79
57	SMP dengan Akreditasi A	Sekolah	27
58.	SMP dengan Akreditasi B	Sekolah	17
59.	SMP dengan Akreditasi C	Sekolah	0
60.	Persentase penduduk Melek Huruf usia >15 tahun	Persen	21,04
61.	Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	19,63
62.	Rasio Guru/ Murid SMP/MTs	Rasio	22
63.	Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	Rasio	99,96
64.	Indeks Kepuasan Layanan Pendidikan	Poin	84,00
65.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94
66.	Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	62,52
67.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94,29

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
68.	Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	Persen	62,41
	Kesehatan		
69.	Cakupan pelayanan kesehatan perorangan	Persen	92,30
70.	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen	92,30
71.	Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	60,00
72.	*Unmet need* pelayanan kesehatan	Persen	7,70
73.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	99,03
74.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00
75.	Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	Persen	75,00
76.	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif	Persen	65,00
77.	Cakupan remaja putri mendapatkan tablet tambahan darah	Persen	55,00
78.	Cakupan balita stunting mendapat pelayanan pemantauan pertumbuhan	Persen	100,00
79.	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	Persen	8,00
80.	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	9,00
81.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/ balita	Persen	12,00
82.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/ baduta	Persen	9,00
83.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Persen	3,30
84.	Penduduk memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	Persen	90,90
85.	Jumlah tatanan Kota Cirebon Sehat	Tatanan	6
86.	Penduduk memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih/ air minum memenuhi syarat	Persen	95,7
87.	Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	Persen	94,9
88.	Tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan	Persen	81,00
89.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	100,00
90.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	94,00
91.	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen	100,00
92.	Cakupan pelayanan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen	100,00
93.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persen	<0,05
94.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100,00
95.	Cakupan Angka Kejadian Malaria	Permil	1
96.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00
97.	Cakupan Angka Bebas Jentik	Persen	96,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
98.	Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00
99.	Cakupan Deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil	Persen	100,00
100.	Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Persen	85,00
101.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persen	90,00
102.	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	Kasus	1.203
103.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kasus	380
104.	Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler atau metode konvensional	Persen	85,00
105.	Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua	Persen	85,00
106.	Persentase pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB	Persen	100,00
107.	Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang	Persen	90,00
108.	Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	Persen	100,00
109.	Cakupan penemuan kasus TB anak	Persen	110,00
110.	Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	Persen	11,00
111.	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	Persen	10,00
112.	B O R	Persen	64,00
113.	L O S	Hari	6,60
114.	T O I	Kali	1,60
115.	B T O	Kali	37,45
116.	G D R	Per mil	45,00
117.	N D R	Per mil	25,00
118.	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi utama	Unit	2
119.	Jumlah Layanan BLUD	Unit	1 RS; 22 Puskesmas
120.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00
121.	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD)	Persen	100,00
122.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	100,00
123.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,00
124.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00
125.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100,00
126.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100,00
127.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00
128.	Cakupan anak pra sekolah SDIDTK	Persen	100,00
129.	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100,00
130.	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
131.	Puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah	Persen	100,00
132.	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia	Persen	100,00
133.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	15,40
134.	Prevelensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	22,40
135.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00
136.	Cakupan Pelayanan kesehatan Lansia	Persen	100,00
137.	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	100,00
138.	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persen	100,00
139.	Cakupan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	100,00
140.	Cakupan desa/kelurahan yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemologi (PE) < 24 jam	Persen	100,00
141.	Cakupan penemuan kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP)	Per 100.000 Kasus	2,00
142.	Proporsi kematian akibat keracunan	Persen	0,00
143.	Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri	Persen	0,00
144.	Pelayanan Gawat Darurat	Persen	100,00
145.	Pelayanan Rawat Jalan	Persen	80,00
146.	Pelayanan Rawat Inap	Persen	100,00
147.	Pelayanan Bedah	Persen	100,00
148.	Pelayanan Persalinan dan Perinatalogi	Persen	100,00
149.	Pelayanan Intensif	Persen	100,00
150.	Pelayanan Radiologi	Persen	80,00
151.	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	Persen	90,00
152.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Persen	90,00
153.	Pelayanan Farmasi	Persen	80,00
154.	Pelayanan Gizi	Persen	90,00
155.	Pelayanan Transfusi Darah	Persen	100,00
156.	Pelayanan Keluarga Miskin	Persen	100,00
157.	Pelayanan Rekam Medis	Persen	80,00
158.	Pengolahan Limbah	Persen	100,00
159.	Pelayanan Ambulans / Kereta Jenazah	Persen	100,00
160.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Persen	100,00
161.	Pelayanan Laundry	Persen	90,00
162.	Pencegahan Pengendalian Infeksi	Persen	85,00
163.	Administrasi dan Manajemen	Persen	70,00
164.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Persen	90,00
165.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang/100.000 penduduk	9,14
166.	Cakupan Nakes yang teregistrasi sesuai kompetensinya	Persen	85,00
167.	Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT Puskesmas dan UPT Kesus)	Persen	100,00
168.	Cakupan sarana yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	Persen	86,00
169.	Cakupan sarana kefarmasian yang dibina	Persen	94,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
170.	Puskesmas yang melaksanakan GemaCermat	Unit	22
171.	Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Persen	50,00
172.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00
173.	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Orang	45
174.	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Orang	20
175.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Persen	1,77
176.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Persen	1,70
177.	Cakupan industri rumah tangga yang dibina	Persen	25,00
178.	Cakupan pemeriksaan sampel makanan yang memenuhi syarat	Persen	95,00
179.	Cakupan Pengawasan *Post Market*	Persen	93,00
180.	UKBM yang dilaksanakan puskesmas	UKBM	3
181.	Cakupan PHBS yang dipantau	Persen	81,00
182.	Strata posyandu purnama mandiri (Posyandu Aktif)	Persen	83,00
183.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	33,80
184.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persen	4,60
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
185.	Mempertahankan cadangan air tanah dengan penambahan jumlah titik sumur resapan (dari 173 menjadi 183 titik ditahun 2023)	Titik	2
186.	Persentase cakupan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	93,00
187.	Meningkatnya rasio sarana pengurangan sampah (TPS 3R) dibandingkan dengan jumlah total TPS yang dimiliki	Persen	45,00
188.	Persentase Rumah yang berakses sanitasi baik	Persen	97,13
189.	Pengurangan titik genangan banjir	Titik	2
190.	Terselenggaranya penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman di 22 kelurahan	Persen	100,00
191.	Meningkatnya rasio gedung pemerintah kondisi baik (dari 49 gedung menjadi 56 gedung)	Persen	90,00
192.	Tercapainya ketersediaan Baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,4
193.	Jalan mantap kondisi baik	Persen	93,00
194.	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	79,47
195.	Jumlah Bangunan yang ber IMB dibandingkan dengan jumlah total bangunan se Kota	Persen	1,00
196.	Persentase luasan RTH publik yang bertambah	Persen	2,00
	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
197.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	89,40

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
198.	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	10,16
199.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	22,78
200.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	89,40
	Ketentraman dan Ketertiban Umam Serta Perlindungan Masyarakat		
201.	Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran K3/ ketertiban umum, ketentraman, dan Keindahan	Persen	100,00
202.	Cakupan Linmas per RT	Persen	100,00
203.	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS	Persen	0
204.	Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran	Persen	100,00
205.	Jumlah dokumen data informasi/dokumen penanggulangan bencana	Dokumen	1
206.	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikasi	Orang	66
207.	Cakupan korban bencana yang mendapatkan penanganan	Persen	100,00
208.	Persentase layanan penanggulangan kebakaran	Persen	80,00
209.	Meningkatnya Rasio Tenaga Teknis yang Bersertifikat	Persen	88,00
210.	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persen	70,00
	Sosial		
211.	Cakupan PSKS yang yang melaksanakan penanganan PMKS (DO=PSKS yang menangani PMKS 134 dibagi seluruh PSKS 230 X 100%)	Persen	66,00
212.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (persen)	Persen	66,00
213.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00
214.	Jumlah Tugu dan TMP yang dipelihara	Lokasi	1
215.	Data Base keluarga miskin	Dokumen	0
216.	Data Base PMKS	Dokumen	0
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		
	Tenaga Kerja		
217.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	Persen	50,00
218.	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persen	70,00
219.	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	48,00
220.	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	6,00
221.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Kasus	62

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
222.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	79,00
223.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	Persen	0,00
	Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak		
224.	Meningkatnya impelmentasi PUG pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	3
225.	Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Satgas PKDRT	4
226.	Meningkatnya penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Satgas PKDRT	4
227.	Cakupan RW layak anak	Persen	5,65
228.	Cakupan Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00
	Pangan		
229.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Kkal/kapita/ hari;	E=≥2400
		Gr/kapita/ hari	P=≥63
230.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah	Persen	90,00
231.	Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	Persen	90,00
232.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen-	88,00
233.	Penurunan konsumsi beras	Kg/kap/ hari	92
234.	Peningkatan konsumsi pangan hewani	Kg/kap/ hari	45
235.	Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/kap/ hari	183
236.	Peningkatan konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/ hari	32
237.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	persen	88,00
238.	Penanganan daerah rawan pangan	persen	70,00
	Pertanahan		
239.	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	Lokasi	1
	Lingkungan Hidup		
240.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota; ;	Ada/Tidak ada	Ada
241.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak ada	Ada
242.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak ada	Ada

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
243.	Indeks kualitas air;	poin	47,5
244.	Indeks kualitas tutupan lahan;	poin	37,6
245.	Indeks kualitas udara;	poin	73,4
246.	Persentase luas lahan konservasi;	persen	0,48
247.	Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim	persen	6,07
248.	Terwujudnya penyelenggaraan investigasi GRK	persen	100,00
249.	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	persen	50,00
250.	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00
251.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH	Persen	60,00
252.	Penetapan Hak MHA	kali	1
253.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	kali	1
254.	Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat;	kali/thn	4
255.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak ada	ada
256.	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	persen	100,00
257.	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	24,00
258.	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen	74,00
259.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Skor	75
260.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00
261.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
262.	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	96,50
263.	Cakupan Penerbitan KK	Persen	100,00
264.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,50
265.	Cakupan Akta Kematian	Persen	81,50
266.	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependuduk an	Persen	8,50
267.	Menurunnya Tingkat Selisih Data Dasar Kependuduk an	Persen	8,50
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
268.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM	Kelompok	2,5

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
269.	Persentase LPM Berprestasi	Persen	13,60
270.	Persentase Posyandu aktif	Persen	86,00
271.	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	16,00
272.	Rata-rata jumlah kelopmpok binaan PKK	Persen	41,00
273.	Persentase PKK aktif	Persen	100,00
274.	Persentase kelurahan swasembada	Persen	18,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
275.	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk	Peragkat Daerah	24
276.	*Current Use* / Pasangan Usia Subur	Persen	62,18
277.	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebanyak 3,50 persen	Persen	3,35
278.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	90,58
279.	Rasio akseptor KB	Rasio	14,89
280.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need*	Persen	18,16
281.	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif	Persen	26,00
282.	Persentase advokasi KIE pada tenaga penyuluh KB	Persen	77,70
283.	Persentase Kampung KB	Persen	63,64
	Perhubungan		
284.	Tersedianya pedoman/arahan untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan	Persen	100,00
285.	Rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	100,00
286.	Tercapainya standarisasi alat uji kendaraan bermotor	Persen	100,00
287.	Jumlah Rambu yang disediakan / jumlah rambu yang dibutuhkan (standar) x 100 %	Persen	87,00
288.	Jumlah APILL disediakan / jumlah APILL yang dibutuhkan (standar) x 100 %	Persen	87,00
289.	Jumlah PJU yang disediakan / jumlah PJU yang dibutuhkan (standar) x 100 %	Persen	87,00
290.	Meningkatnya Pendapatan dari Retribusi Parkir	Persen	80,97
291.	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan/jumlah penduduk	Rasio	0,0032
292.	Jumlah Uji Kir	Unit	12.945
293.	Jumlah Angkutan Darat/ Jumlah penumpang angk. Darat x 100 %	Persen	20,00
294.	Terpenuhinya kebutuhan operasional UPT PJU dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
295.	Terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah	Persen	85,00
296.	Tersampaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat	Persen	75,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
297.	Tersedianya media komunikasi	Persen	85,00
298.	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangu nan dan pemerintah an kepada masyarakat	Persen	85,00
299.	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	Rasio	85,00
300.	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	Persen	85,00
301.	Terwujudnya kerjasama bidang Kominfo	Persen	85,00
302.	Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	85,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
303.	Peningkatan jumlah koperasi aktif	unit	257
304.	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Unit	257
305.	Berkembangnya Kewirausahaan UMKM yang dibina	UMKM	200
306.	Berkembangnya Kewirausahaan UMKM yang dibina	UMKM	200
307.	Meningkatnya Jumlah PKL yang Dibina	PKL	200
308.	Meningkatnya Jumlah PKL yang Dibina	PKL	200
	Penanaman Modal		
309.	Peningkatan nilai indeks kepuasan konsumen	poin	74,3
310.	Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP;	perwal/ kepwal	0
311.	Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP	dokumen	1
312.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Unggulan Investasi	jenis investasi; even	0; 1
313.	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN); Meningkatnya Permohonan Ijin Berusaha	% dari tahun sebelum nya; perusaha an	0; 240
	Kepemudaan dan Olahraga		
314.	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1.450
315.	Sarana olahraga yang representatif	Persen	50,00
316.	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00
317.	Cakupan pelatih olahraga bersertifikasi	Persen	60,00
318.	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	35,00
319.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	14
320.	Jumlah prestasi Cabang olahraga	Cabor	12
321.	Persentase wirausaha muda	Persen	60,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
322.	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	Persen	75,00
	Persandian		

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
323.	Terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon	Persen	65,00
	Kebudayaan		
324.	MoU Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya; Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	MoU; even; karya budaya	5; 15; 1
325.	MoU Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	MoU; even	1; 15
326.	Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang Dilestarikan; Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	cagar budaya; obyek	62; 10
	Perpustakaan		
327	Kenaikan jumlah pemustaka 5% per tahun	Pemustaka	194.798
328.	Kenaikan jumlah anggota perpustakaan 5% per tahun	Anggota	43.391
329.	Jumlah Perpustakaan di lingkungan RW dan Kelurahan	Perpustakaan RW dan Perpustakaan Kelurahan	30; 1
330.	Jumlah pojok baca baru di area publik	Pojok baca	15
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsiapan		
331.	Sistem Penyimpanan sesuai standar	Perangkat Daerah	6
332.	Rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan (Perkada/Perwal)	Dokumen	5
333.	Arsip yang terpelihara	Berkas	30.824
334.	Jenis sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Jenis	10
335.	Meningkatnya layanan informasi kearsipan yang berkualitas	Persen	80,00
336.	Dokumen arsip yang diselamatkan	Berkas	600
	Urusan Pemerintahan Pilihan		
	Kelautan dan Perikanan		
337.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3% pertahun	ton	3500
338.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 3% pertahun	Ton	265
339.	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	ton	7600
	Pariwisata		
340.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 80%	orang	2505000
341.	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	hari	2

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
	Pertanian		
342.	Akses Pemasaran Hasil Olahan Pertanian dan Peternakan	jenis	2
343.	Peningkatan Produksi Padi	ton/ha	4,80
344.	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak :		
	· Daging Sapi	Kg	170.000
	· Daging Babi	Kg	67.000
345.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	ekor hewan/ ternak	550
	Perdagangan		
346.	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	64,33
347.	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	74,50
348.	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	64,33
349.	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Persen	84,00
	Perindustrian		
350.	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah	IKM	198
	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan		
	Sekretariat Daerah		
351.	Jumlah draft rumusan kebijakan urusan yang dihasilkan	Dokumen	12
352.	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Dokumen	10
353.	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	0
354.	Partisipasi Kota Cirebon dalam lomba STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	13
355.	Persentase kelurahan yang memiliki peta wilayah	Persen	100,00
356.	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari Rancangan Perda dan Rancangan PerWal	Persen	51,00
357.	Persentase pilar batas yang dibangun/dipelihara	Persen	58,00 (54 pilar 93 titik)
358.	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan	Persen	85,00
359.	Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah sesuai standar	Persen	100,00
360.	Perangkat Daerah yang memiliki kebijakan kelembagaan dan kebijakan mekanisme kerja	Persen	100,00
361.	PNS yang memiliki nilai jabatan	Persen	100,00
362.	Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persen	90,00
363.	Persentase telaahan staf ahli yang ditindaklanjuti	Persen	35,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
364.	Standar biaya belanja daerah SBBD dan Standar satuan harga Barang/Jasa sebagai acuan penyusunan RKA dan DPA	Dokumen	2
365.	Jumlah naskah perjanjian kerjasama yang dihasilkan	Dokumen	18
366.	Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100,00
	Sekretariat DPRD		
367.	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran	Persen	100,00
368.	Terwujudnya dokumen kajian dalam menunjang usulan Perda Inisiatif Dewan	Persen	100,00
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Perencanaan		
369.	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	Persen	80,00
370.	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	87,70
371.	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	Persen	98,55
372.	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Persen	93,00
373.	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD	Persen	80,00
374.	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	Persen	93,00
	Keuangan		
375.	APBD Tepat Waktu; Prosentase Penyerapan Angaran; Ketepatan waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	tepat waktu; %; tepat waktu; WTP	1; 91; 1; 1
376.	Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tepat Waktu	1
377.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
378.	Meningkatnya PAD	Persen	10,00
	Kepegawaian		
379.	Jumlah jabatan kosong Pimpinan Tinggi (Eselon II) pada Perangkat Daerah	Orang	3
380.	Jumlah Jabatan kosong Administrator (Eselon III) pada Perangkat Daerah	Orang	9
381.	Jumlah Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada PD	Orang	38
382.	Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah	Orang	300
	Pendidikan dan Pelatihan		
383.	Prosentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	4,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
384.	Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	64,00
	Penelitian dan Pengembangan		
385.	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen	3
386.	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan sosial dan kemasyarakatan	Dokumen	2
387.	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan daerah	Dokumen	2
389.	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan ke-iptek-an	Dokumen	1
	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		
	Inspektorat Daerah		
390.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Terhadap Perangkat Daerah	Persen	100,00
391.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40,00
392.	Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
	Urusan Kewilayahan		
	Kecamatan		
393.	Kecamatan Kesambi		
	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan	0
	Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan	1
	Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan	4
	Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan	0
394.	Kecamatan Pekalipan		
	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan	1
	Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan	2
	Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan	1
	Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan	0
395.	Kecamatan Harjamukti		
	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan	1
	Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan	3
	Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan	0
396.	Kecamatan Kejaksan		
	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan	1
	Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan	3
	Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan	0

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021
1	*2*	*3*	*4*
	Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan	0
397.	Kecamatan Lemahwungkuk		
	Kelurahan Swakarya Mula	Kelurahan	1
	Kelurahan Swakarya Madya	Kelurahan	1
	Kelurahan Swakarya Lanjut	Kelurahan	2
	Kelurahan Swasembada Mula	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Madya	Kelurahan	0
	Kelurahan Swasembada Lanjut	Kelurahan	0
	Unsur Pemerintahan Umum		
	Kesatuan Bangsa dan Politik		
398.	Persentase kemitraan dengan Ormas dan masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi	Persen	65,00
399.	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	55,00
400.	Persentase kemitraan dengan ormas dan masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi	Persen	65,00
401.	Meningkatnya pemahaman ideologi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Persen	65,00
402	Meningkatnya pemahaman politik di masyarakat	Persen	65,00

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Tabel 8.7
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Aspek dan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2022 – 2023

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**				
1	PDRB Per Kapita AdHb	Juta Rupiah	80,38	83,84	83,84
2	PDRB Per Kapita AdHk 2010	Juta Rupiah	54,16	55,42	55,42
3	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita	Persen	6,76	6,98	6,98
4	I n f l a s i	Persen	2,92 - 4,07	2,92 - 4,07	2,92 - 4,07
5	Indeks Pebangunan Manusia (IPM)	Poin	75,73	75,93	75,93
6	Jumlah penduduk miskin	Ribu Jiwa	23,19	21,79	21,79
7	Garis kemiskinan	Rupiah	465.583	480.154	480.154
8	Persentase penduduk miskin	Persen	8,55	8,35	8,35
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,50	0,47	0,47
10	Angka Melek Huruf	Persen	100,00	100,00	100,00
11	Indeks Gini	Poin	0,42	0,42	0.42
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,17 – 5,81	5,50 – 6,15	5,50 – 6,15
13	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,48	10,61	10,61
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	13,99	13,99
15	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,51	72,64	72,64
16	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	12.307	12.628	12.628
17	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00
19	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,00	99,00	99,00
20	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	1,848	1,958	1,958

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,35	66,15	66,15
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,00	8,50	8,50
23	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,74	91,94	91,94
24	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,41	94,46	94,46
25	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	77,73	78,47	78,47
26	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan	Persen	86,00	88,00	88,00
27	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	Persen	87,50	89,00	89,00
28	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Persen	83,00	84,00	84,00
29	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kependudukan	Persen	84,00	85,00	85,00
30	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80,00	83,00	83,00
31	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00
32	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00
33	Rasio PAD terhadap penerimaan dan Pendapatan Daerah	Rasio	33,17	33,67	33,67
34	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Nilai Audit Kearsipan Tingkat Kota	Poin	84,00	85,00	85,00
36	Rasio Jumlah Perda yang ditetapkan terhadap Raperda	Persen	75,00	80,00	80,00
37	Rasio Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Eektronik (SPBE)	Poin	3,1	3,2	3,2
38	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor/nilai	93,50	95,15	95,15
39	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kapita/ hari	33,30	33,40	33,40
40	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Persen	25,00	30,00	30,00
41	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	75,00	80,00	80,00
42	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	0,32	0,32	0,32
43	Peningkatan produksi pangan asal ternak:				

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	• Daging sapi (kg)	Kg	178	186	186
	• Daging babi (kg)	Kg	68	69	69
44	Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Persen	5,57 – 5,61	5,90 – 5,93	5,90 – 5,93
45	Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	32,48 – 32,67	34,37 – 34,58	34,37 – 34,58
46	Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Persen	11,15 – 11,22	11,80 – 11,87	11,80 – 11,87
47	Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0
48	Pertumbuhan industri	Persen	5,59	5,81	5,81
49	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	6	9	9
50	Persentase Oranisasi Pemuda Aktif	Persen	65,00	70,00	70,00
51	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	76,21	78,41	78,41
52	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	59,09	59,09	59,09
53	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,00	80,00	80,00
54	Persentase layanan administrasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,0
55	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,76	56,82	56,82
56	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,11	7,72	7,72
57	Persentase Peningkatan Level of Service Ruas jalan	Persen	3,00	3,00	3,00
II.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	P E N D I D I K A N				
59	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Angka Partisipasi Sekolah PAUD)	Persen	58,00	60,00	60,00
60	Prosentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Persen	80,00	85,00	85,00
61	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Terakreditasi	Persen	62,00	65,00	65,00
62	Angka partisipasi Kasar/APK				

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
63	a. PAUD/sederajat	Persen	57,43	57,44	57,44
64	b. SD/MI/sederajat	Persen	100,00	100,00	100,00
	c. SMP/MTs/sederajat	Persen	100,00	100,00	100,00
	d. SMA/SMK/MA/sederajat	Persen	89,00	91,50	91,50
65	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
	a. SD/MI/Paket A	Persen	98,10	98,50	98,50
	b. SMP/SMPT/MTs/Paket B	Persen	84,00	85,50	84,50
	c. APM SMA/SMK/MA/sederajat	Persen	70,00	75,00	75,00
66	Angka Putus Sekolah:				
	a. SD/MI	Persen	0,06	0,05	0,05
	b. SMP/MTs	Persen	0,27	0,26	0,26
67	Angka Kelulusan :				
	SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00
	SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00
68	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Angka Partisipasi Sekolah SD/MI)	Persen	99,60	99,65	99,65
69	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs)	Persen	92,67	92,73	92,73
70	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen	85,00	85,00	85,00
71	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik.	Persen	47,25	47,25	47,25
72	Persentase penduduk Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 tahun	Persen	99,97	99,97	99,97

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
73	Persentase pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik	Persen	94,50	95,00	95,00
74	Persentase Guru satuan pendidikan dasar, PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik.	Persen	47,25	47,25	47,25
75	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan	Persen	86,00	88,00	88,00
76	Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	19,00	19,00	19,00
77	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio	17,15	17,15	17,15
78	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persen	65,00	75,00	75,00
79	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persen	75,00	80,00	80,00
80	Rata-rata Lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Tahun	10,48	10,61	10,61
81	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,85	13,85	13,85
82	Angka Melek Huruf penduduk umur ≥ 15 tahun	Persen	100,00	100,00	100,00
83	Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran; (c) komputer untuk tujuan pengajaran; (d) air minum layak; (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin; (f)fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan hiegienes bagi semua (WASH).				
	a. Proporsi sekolah dengan akses ke listrik	Persen	100,00	100,00	100,00
	b. Proporsi sekolah dengan akses internet	Persen	70,00	75,00	75,00
	c. Proporsi sekolah dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran	Persen	60,00	65,00	65,00
	d. Proporsi sekolah dengan akses air minum layak	Persen	90,00	92,50	92,50
	e. Proporsi sekolah dengan akses sanitasi dasar per jenis kelamin :				
	√ Laki-laki	Rasio	1 : 40	1 : 40	1 : 40
	√ Perempuan	Rasio	1 : 25	1 : 25	1 : 25
	f. Proporsi sekolah dengan fasilitas cuci tangan	Persen	60,00	65,00	65,00
	K E S E H A T A N				

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
84	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenal sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
85	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
86	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
87	Setiap Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
88	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
89	Setiap warga negara usia 15 s.d 59 tahun ke atas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
90	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
91	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
92	Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
93	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
94	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
95	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, Waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
96	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin	Persen	100,00	100,00	100,00
97	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00
98	Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar	Persen	87,50	90,00	90,00
99	Cakupan sarana kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	85,00	90,00	90,00
100	Cakupan sarana produksi industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	Persen	80,00	85,00	85,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
101	Persentase Strata mandiri RW Siaga Aktif	Persen	15,00	17,00	17,00
102	Cakupan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dipantau	Persen	83,00	85,00	85,00
103	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	99,04	99,05	99,05
104	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	95,40	97,00	97,00
105	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	94,50	95,00	95,00
106	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	99,15	99,40	99,40
107	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	91,45	92,20	92,20
108	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita	Persen	7,50	7,00	7,00
109	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun (Balita)	Persen	11,50	11,00	11,00
110	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun (Baduta).	Persen	8,70	8,50	8,50
111	Prevalensi malnutrisi (berat badan / tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persen	3,10	3,00	3,00
112	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	12,00	12,00	12,00
113	Prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif	Persen	65,00	70,00	70,00
114	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	3	3	3
115	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	100,00	100,00	100,00
116	Angka Kematian Balita (Akaba) per 1000 KH	Kasus/Per 1000 KH	12	10	10
117	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 KH	Kasus/Per 1000 KH	3	2	2
118	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Kasus/Per 1000 KH	2,4	2,4	2,4

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
119	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persen	100,00	100,00	100,00
120	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Per 1000 Orang	22	20	20
121	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Per 1000 Orang	<0,05	<0,05	<0,05
122	Kejadian TB per 1000 orang	Per 1000 orang	1.317	1.317	1.317
123	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Orang	380	380	380
124	Kejadian malaria per 1000 orang	Per 1000 Orang	1	1	1
125	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persen	90,00	90,00	90,00
126	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Persen	4,60	4,60	4,60
127	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persen	22,40	22,40	22,40
128	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Persen	15,40	15,20	15,20
129	Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri.	Persen	0,00	0,00	0,00
130	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Puskesmas	22	22	22
131	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Persen	16,20	16,20	16,20
132	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Orang	45	45	45
133	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Orang	20	20	20
134	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Liter/Kapita	1,7	1,7	1,7
135	*Unmet need* pelayanan kesehatan	Persen	7,60	7,50	7,50
136	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Persen	99,04	99,05	99,05

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
137	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Persen	33,80	33,80	33,80
138	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00
139	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Orang/100.000 pddk	9,14	9,14	9,14
140	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kelurahan	22	22	22
141	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kelurahan	1	2	2
142	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% *Case Detection Rate*/ CDR)	Persen	110,00	110,00	110,00
143	Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati (*Case Notification Rate*/ CNR) per 100.000 penduduk	Angka	380	380	380
144	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% *Succes Rate*)	Persen	90,00	90,00	90,00
145	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)	Persen	90,00	100,00	100,00
146	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% *Succes Rate*)	Persen	90,00	90,00	90,00
147	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	Persen	90,00	100,00	100,00
148	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	Kasus	1.203	1.203	1.203
149	Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler/metode konvensional (%)	Persen	100,00	100,00	100,00
150	Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua (%)	Persen	100,00	100,00	100,00
151	Persentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB (%)	Persen	100,00	100,00	100,00
152	Persentase laboratorium mikros-kopik yang mengikuti uji silang (%)	Persen	90,00	90,00	90,00
153	Persentase laboratorium mikros-kopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik (%)	Persen	100,00	100,00	100,00
154	Cakupan penemuan kasus TB anak (%)	Persen	110,00	110,00	110,00
155	Cakupan anak < 5 tahun yang mendapatkan pengobatan pencegahan INH	Persen	12,00	12,00	12,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
156	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	Persen	10,00	10,00	10,00
157	Cakupan obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan (UPT.Puskesmas dan UPT. Kesus)	Persen	100,00	100,00	100,00
158	Cakupan sarana penyehat tradisional yang dibina	Persen	60,00	70,00	70,00
159	B O R	Persen	65,00	66,00	66,00
160	L O S	Hari	6,8	7,00	7,00
161	T O I	Kali	1,8	1,9	1,9
162	B T O	Kali	37,45	37,45	37,45
163	G D R	Permil	45,00	25,00	25,00
164	N D R	Permil	25,00	25,00	25,00
165	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100,00	100,00
166	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Khusus Gakin PBI APBD)	Persen	100,00	100,00	100,00
167	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	100,00	100,00	100,00
168	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00
169	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	100,00	100,00
170	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100,00	100,00	100,00
171	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00
172	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00	100,00	100,00
173	Cakupan anka pra sekolah SDIDTK	Persen	100,00	100,00	100,00
174	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	100,00	100,00	100,00
175	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	100,00	100,00
176	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	21,90	21,14	21,14
177	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	21,80	21,80	21,80

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
178	Cakupan penemuan Kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP)	Per 100.000 Kasus	2	2	2
179	Proporsi kematian akibat keracunan.	Persen	0,00	0,00	0,00
180	Angka kematian *(insidens rate)* akibat bunuh diri.	Persen	0,00	0,00	0,00
181	Cakupan Nakes yang Teregistrasi Sesuai Kompetensinya	Persen	87,50	90,00	90,00
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
182	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persen	93,00	93,00	93,00
183	Persentase akses masyarakat terhadap layanan air limbah domestik	Persen	86,16	86,83	86,83
184	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	Persen	77,50	80,00	80,00
185	Persentase sungai dalam kondisi baik	Persen	75,00	78,00	78,00
186	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan non PDAM	Perseh	93,00	93,00	93,00
187	Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi baik	Persen	86,16	86,83	86,83
188	Rasio gedung pemerintah kondisi baik	Persen	90,00	90,00	90,00
189	Persentase ketersediaan BAPERKAM dan sarana prasarana lingkungan RW	Persen	1,40	1,40	1,40
190	Tingkat kemantapan jalan	Persen	94,00	95,00	95,00
191	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100,00	100,00	100,00
192	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang	Persen	36,50	38,00	38,00
193	Persentase izin lokasi terhadap permohonan ijin lokasi	Persen	85,00	100,00	100,00
194	Persentase drainase kondisi baik	Persen	77,50	80,00	80,00
195	Jumlah titik genangan air yang tertangani	Titik	5	6	6
196	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	Persen	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
197	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DAS	4	4	4
198	Rasio elektrifikasi	Persen	90,20	90,50	90,50
199	Konsumsi listrik per Kapia	Kwh/Kapita	1.450	1.500	1.500
200	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Rumah Tangga	28.968	30.235	30.235
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
201	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	16,67	18,52	18,52
202	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	90,16	90,92	90,92
203	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	Persen	10,65	11,14	11,14
204	Rasio tenaga ahli yang tersertifikasi	Persen	2,00	2,00	2,00
205	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	19,87	19,60	19,60
206	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Persen	23,40	22,75	22,75
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Satuan Polisi Pamong Praja.				
207	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80,00	83,00	83,00
208	Jumlah daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Lokasi/Titik	25	15	15
209	Cakupan kelancaran penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada pada TPS	Persen	0,00	100,00	100,00
210	Cakupan Rasio LINMAS per RT	Persen	100,00	100,00	100,00
211	Penyelesaian jumlah kasus Pelanggaran K3	Persen	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
212	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	Persen	100,00	100,00	100,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
213	Persentase Forum Siaga Bencana Kelurahan Aktif	Persen	23,00	27,00	27,00
214	Jumlah Personil penanggulangan bencana yang bersertifikat	Orang	70	80	80
215	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat daerah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
	Dinas Pemadam Kebakaran				
216	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* daerah layanan WMK	Persen	85,00	85,00	85,00
217	Persentase Layanan Penyelamatandan evakuasi korban kebakaran	Persen	85,00	90,00	
218	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
219	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti	Persen	100,00	100,00	100,00
220	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00	100,00	100,00
221	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, bumil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persen	50,00	52,50	52,50
222	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Persen	8.950	8.626	8.626

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
223	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik, baik PLN maupun Non PLN	Persen	100,00	100,00	100,00
224	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Orang	143	143	143
225	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Lembaga	1	1	1
226	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	100,00	100,00	100,00
227	Data base keluarga miskin dan data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1	1	1
228	Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	66,00	66,00	66,00
229	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00
230	Standarisasi pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN	Lokasi	1	1	1
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				
231	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,35	66,15	66,15
232	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Laki-laki dan Perempuan)	Persen	9,00	8,50	8,50
	a. TPT Laki-laki	Persen	na	na	na
	b. TPT Perempuan	Persen	n.a	n.a	n.a
233	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,74	91,94	91,94
234	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	25,00	30,00	30,00
235	Persentse tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	30,00	35,00	35,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
236	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	30,00	32,00	32,00
237	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	1,00	1,00	1,00
238	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	63,00	64,00	64,00
239	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Jamsostek).	Persen	20,16	21,05	21,05
240	Persentase tenaga kerja formal	Persen	na	na	na
241	Upah rata-rata per jam pekerja	Rupiah	15.000	15.625	15.625
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
242	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	94,41	94,46	94,46
243	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	77,73	78,47	78,47
244	Cakupan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan PUG	Persen	40,00	50,00	50,00
245	Cakupan layanan perlindungan perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00
246	Cakupan keluarga yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.	Persen	100,00	100,00	100,00
247	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak	Persen	12,00	16,00	16,00
248	Cakupan Penanganan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00
249	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Tingkat	Madya	Madya	Madya
250	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.				
	a. Peraturan Daerah	Perda	0	0	0
	b. Peraturan Wali Kota	PerWal	1	1	1

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	c. Keputusan Wali Kota	SK	2	2	2
251	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	28,00	26,50	26,50
252	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Persen	10,00	8,50	8,50
253	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	23,65	22,15	22,15
254	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	23,65	22,15	22,15
255	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	2,53	2,53	2,53
256	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tahun	25,97	25,97	25,97
257	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.				
	a. Laki-laki	Persen	71,43	71,43	71,43
	b. Perempuan	Persen	28,57	28,57	28,57
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
258	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	87,50	88,50	88,50
259	Ketersediaan Informasi data distribusi, pasokan dan harga serta pangan lainnya	Persen	90,00	90,00	90,00
260	Penguatan cadangan pangan daerah	Persen	25,00	30,00	30,00
261	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	75,00	80,00	80,00
262	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	89,00	90,00	90,00
263	Peningkatan konsumsi sayur dan buah	Gr/kap/hari	185,00	187,00	187,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
264	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Persen	10,02	9,78	9,78
265	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
266	Persentase tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	Persen	50,00	80,00	80,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
267	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,76	56,82	56,82
268	Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	7,11	7,72	7,72
269	Indeks Kualitas Air	Poin	50,10	50,20	50,20
270	Indeks Kualitas Udara	Poin	73,20	73,25	73,25
271	Indeks Kualitas Tutupan lahan	Poin	37,80	37,80	37,80
272	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
273	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
274	Persentase inventarisasi GRK	Persen	100,00	100,00	100,00
275	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	100,00	100,00	100,00
276	Persentase ijin pengelolaan limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00
277	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota	Persen	65,00	70,00	70,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
278	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerindah Daerah kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan dampak di Daerah Kota	Persen	100,00	100,00	100,00
279	Penetapan Hak MHA	Kali	1	1	1
280	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Kali	1	1	1
281	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tdk ada	Ada	Ada	Ada
282	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	Persen	100,00	100,00	100,00
283	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Persen	73,00	72,00	72,00
284	Persentase cakupan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Prsen	26,00	27,00	20,00
285	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik	Persen	52,00	54,05	54,05
286	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Perusahaan	2	2	2
287	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	20,028	20,028	20,028
288	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun	294.216	294.216	294.216
289	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
290	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas layanan kependudukan	Poin	84,00	85,00	85,00
291	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	97,00	97,50	97,50
292	Kepemilikan Akta kelahiran	Persen	88,00	88,50	88,50
293	Tingkat Selisih Data Dasar Kependudukan	Persen	8,00	7,50	7,50
294	Tingkat pemenuhan informasi kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
295	Persentase penduduk umur 0 – 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persen	85,00	87,00	87,00
296	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	90,89	91,25	91,25
297	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*). Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
298	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	59,09	59,09	59,09
299	Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	22,00	40,00	40,00
300	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/ LPM	Kelompok	3	3	3
301	Persentase LPM Berprestasi	Persen	13,60	13,60	13,60
302	Persentase Posyandu aktif	Persen	87,00	87,00	87,00
303	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	20,00	20,00	20,00
304	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	100,00	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA				
305	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	10	10	10
306	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persen	64,29	64,36	64,36
307	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Persen	64,29	65,62	65,62

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
308	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	64,29	65,62	65,62
309	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Persen	26,00	26,00	26,00
310	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun *(Age Specific Fertility Rate/ ASFR*)	Persen	41,62	41,25	41,25
311	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,3	2,3	2,3
312	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	20,19	18,35	18,35
313	*Current User/* Pasangan Usia Subur	Persen	62,54	62,92	62,92
314	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70,00	100,00	100,00
315	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	88,14	85,43	85,43
316	Rasio akseptor KB	Rasio	15,09	15,34	15,34
317	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ *unmeet need*	Persen	17,79	17,42	17,42
318	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB aktif	Persen	26,01	26,02	26,02
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
319	Persentase Peningkatan *Level of Service* Ruas jalan	Persen	3,00	3,00	3,00
320	Persentase Rambu rambu lalu lintas yang terpasang	Persen	10,00	10,00	10,00
321	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	80,00	100,00	100,00
322	Persentase pelayanan parkir kendaraan	Persen	93,00	100,00	100,00
323	Persentase Uji Berkala kendaraan bermotor.	Persen	78,00	85,00	85,00
324	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00
325	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
326	Persentase layanan angkutan darat.	Persen	1,53	1,53	1,53
327	Jumlah Bandar Udara	Buah	1	1	1
328	Jumlah Pelabuhan Strategis	Buah	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
329	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,1	3,2	3,2
330	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Informasi	400	420	420
331	Persentase layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	Persen	75,00	80,00	80,00
332	Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	100,00	100,00	100,00
333	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	84,00	84,50	84,50
334	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	69,31	73,09	73,09
335	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Lembaga	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
336	Prosentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	Persen	19,70	21,81	21,81
337	Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	100,00	100,00	100,00
338	Persentase koperasi aktif menjadi Sehat	Persen	63,42	64,39	63,39
339	Persentase koperasi aktif	Persen	64,09	64,70	64,70
340	Prosentase Koperasi yang dibina	Persen	64,70	65,30	65,30
341	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	95,91	96,51	96,51

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
342	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	Persen	35,87	41,25	41,25
343	Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah) ke layanan keuangan	Unit	2.210	2.245	2.245
344	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	26,20	26,65	26,65
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
345	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan	Persen	84,00	85,00	84,00
346	Jumlah investor berskala Nasional	Investor	80	80	80
347	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1900	2000	2000
348	Nilai persepsi waktu penyelesaian perijinan	Poin	3,10	3,20	3,20
349	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	16,00	17,00	17,00
350	Cakupan nilai realisasi PMDN	Persen	75,00	80,00	80,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
351	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	6	9	9
352	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	65,00	70,00	70,00
353	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	1:1500	1:1575	1:1575
354	Sarana dan Prasarana olahraga yang sesuai standar	Persen	40,00	50,00	50,00
355	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	40,00	50,00	50,00
356	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	Cabor	10 Cabor	10 Cabor	10 Cabor
357	Cakupan pembinaan olah raga	Persen	100,00	100,00	100,00
358	Mencetak Pramuka Garuda	Persen	40,00	45,00	45,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
359	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.	Persen	75,00	80,00	80,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
360	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Pesen	76,01	78,41	78,41
361	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	1	1	1
362	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	16	16	16
363	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Cagar Budaya	10	10	10
364	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kota Pusaka	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
365	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (Permil)	Permil	1,848	1,958	1,958
366	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	5,00	5,00	5,00
367	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persen	38,46	38,46	38,46
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
368	Nilai audit kearsipan tingkat Kota	Poin	84,00	85,00	85,00
369	Persentase arsip yang dikelola sesuai standar nasional	Persen	80,00	90,00	90,00
370	Persentase Dokumen arsip yang terselamatkan	Persen	90,00	90,00	90,00
	URUSAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
371	Produksi perikanan tangkap	Ton	4000	4200	4200
372	Produksi perikanan budidaya	Ton	265	272	272

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
373	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	33,30	33,40	33,40
374	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	7800	8000	8000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
375	Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Persen	5,57 – 5,61	5,90 – 5,93	5,90 – 5,93
376	Kunjungan Wisatawan	Persen	75,00	80,00	80,00
377	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1	1	1
378	PAD dari sektor pariwisata	Persen	14,00	17,00	17,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
379	Kontribusi PDRB dari sektor pertanian	Persen	0,33	0,33	0,33
380	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (komoditas daging dan tanaman pangan)	Persen	3,00 – 5,00	3,00 – 5,00	3,00 – 5,00
381	Persentase prasarana pertanian yang dipelihara	Persen	50,00	50,00	50,00
382	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	Persen dari populasi	30,00	35,00	35,00
383	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lokasi/ Hektar	3 lokasi/2,69 Ha	3 lokasi/2,69 Ha	3 lokasi/2,69 Ha
384	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak (Hewan) :				
	• Daging Sapi	Kilogram	178	186	186
	• Daging Babi	Kilogram	68	69	69
385	Persentase peningkatan nilai kualitas kelembagaan penyuluhan (Nilai skoring kelas Balai Penyuluhan Pertanian tahun n ditambah 10% dari nilai skoring BPP tahun n)	Persen	10,00	10,00	10,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
386	Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Persen	32,48 – 32,67	34,37 – 34,58	34,37 – 34,58
387	Cakupan pelayanan perizinan klaster perdagangan	Persen	100,00	100,00	100,00
388	Prosentasi Pengelola Pasar yang sesuai Standar	Persen	10,00	10,00	10,00
389	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	Persen	77,00	80,00	80,00
390	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	Persen	66,00	68,00	68,00
391	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Persen	86,00	88,00	88,00
392	Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk dalam negeri	Persen	40,00	50,00	50,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
393	Kontribusi PDRB dari sektor industri	Persen	11,15 – 11,22	11,80 – 11,87	11,80 – 11,87
394	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	222	246	246
395	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Izin Usaha	5	5	5
396	Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan SIINas	Persen	100,00	100,00	100,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
397	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00
398	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100,00	100,00	100,00
399	Cakupan layana administrasi kepegawaian	Persen	100,00	100,00	100,00
400	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,00	80,00	80,00
401	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	100,00	100,00	100,00
402	Persentase Peta proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	Persen	75,00	100,00	100,00
403	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam evaluasi atas AKIP	Nilai	9,90	10,00	10,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
404	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwal	Persen	52,00	53,00	53,00
405	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan (	Persen	75,00	80,00	80,00
406	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Pengaduan	0	0	0
407	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Pengaduan	0	0	0
408	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Perda/Perwal	0	0	0
409	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai	71,00 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
410	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	6,50	7,50	7,50
	SEKRETARIAT DPRD				
411	Rasio jumlah PERDA yang ditetapkan terhadap RAPERDA	Persen	75,00	80,00	80,00
412	Rasio jumlah Keputusan/Berita Acara pelaksanaan fungsi anggaran	Persen	100,00	100,00	100,00
413	Rasio jumlah difasilitasinya pelaksanaan fungsi pengawasan	Persen	75,00	78,33	78,33
414	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran	Persen	100,00	100,00	100,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	P E R E N C A N A A N				
415	Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	100,00	100,00
416	Konsistensi Program dalam APBD terhadap RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00
417	Penjabaran Konsisteni Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00
418	Rasio Realisasi Program dan Kegiatan terhadap Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD	Persen	98,65	98,75	98,75

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
419	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	98,00	100,00	00,00
420	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Persen	80,00	80,00	80,00
	K E U A N G A N				
421	Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Persen	33,17	33,67	33,67
422	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Peringkat	WTP	WTP	WTP
423	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
424	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00
425	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,00	5,00	5,00
426	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja daerah				
	a. Pendidikan	Persen	20,00	20,00	20,00
	b. Kesehatan	Persen	10,00	10,00	10,00
427	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB AdHb	Nilai	0,156	0,163	0,163
	KEPEGAWAIAN				
428	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	50,00	55,00	55,00
429	Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	82,00	82,50	82,50
430	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	97,00	98,00	98,00
431	Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	100,00	100,00	100,00
432	Jumlah SK Purna Tugas PNS	SK	287	276	276

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
433	Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV) yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	50	46	46
434	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Yang kosong pada Perangkat Daerah	Orang	290	295	295
435	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,33	0,30	0,30
436	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Pemerintahan) :				
	a. Perempuan yang menduduki Eselon II	Persen	13,33	13,33	13,33
	b. Perempuan yang menduduki Eselon III	Persen	36,72	36,72	36,72
	c. Perempuan yang menduduki Eselon IV	Persen	42,94	42,94	42,94
	Pendidikan dan Pelatihan				
437	Prosentase ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	2,00	2,50	2,50
438	Persentase pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	16,00	17,00	17,00
	Penelitian dan Pengembangan				
439	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti untuk menjadi bahan Kebijakan Daerah	Persen	70,00	80,00	80,00
440	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
441	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	4	4
442	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persen	80,00	90,00	90,00
443	Laporan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Laporan	4	4	4

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN KESAMBI				
444	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada	Persen	80,00	100,00	100,00
445	Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarkat kecamatan :	Poin	84,50	85,00	85,00
446	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00
447	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	80,00	80,00	80,00
448	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00
449	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	0	0
	KECAMATAN PEKALIPAN				
450	Persentase kelurahan berstatus Swasembada	Persen	25,00	50,00	50,00
451	Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarkat kecamatan :	Poin	82,00	82,50	82,50
452	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah	Persen	100,00	100,00	100,00
453	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	50,00	50,00
454	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00
455	Jumlah kasus konflik SARA	Persen	0	0	0
	KECAMATAN KEJAKSAN				
456	Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	25,00	25,00	25,00
457	Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarkat kecamatan :	Poin	86,00	86,50	86,50
458	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00
459	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	25,00	25,00
450	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00
451	Jumlah kasus konflik SARA	Persen	0	0	0

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	KECAMATAN HARJAMUKTI				
452	Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	40,00	60,00	60,00
453	Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarkat kecamatan :	Poin	84,00	84,50	84,50
454	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00
455	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	50,00	50,00	50,00
456	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00
457	Jumlah kasus konflik SARA	Persen	0	0	0
	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK				
458	Persentase kelurahan berstatus swasembada	Persen	25,00	50,00	50,00
459	Indeks keamanan dan ketertiban umum masyarkat kecamatan :	Poin	70,00	71,00	71,00
460	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00
461	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	Persen	25,00	25,00	25,00
462	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00	100,00
463	Jumlah kasus konflik SARA	Persen	0	0	0
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
464	Konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0
465	Konflik Kasus Kebangsaan dan Nasionalisme	Kasus	0	0	0
466	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Persen	70,00	75,00	75,00
467	Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
468	Tingkat pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Persen	65,00	70,00	70,00
469	Tingkat pemahaman Politik di masyarakat	Persen	70,00	75,00	75,00
470	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Ormas, LSM dan OKP tentang 4 (empat) pilar.	Persen	70,00	75,00	75,00
471	Persentase cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik	Persen	80,00	90,00	90,00

Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

BAB IX
P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMN. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 disajikan pada subbab di bawah.

9.1 Pedoman Transisi

Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 yaitu penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pandemi COVID-19. Dampak dari kedua hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat outcome tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021. Pada RKPD Kota Cirebon Tahun 2021 memuat program dan kegiatan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019, sedangkan pada dokumen APBD 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka PerubahanRPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019 dan Tahun 2020; rencana tahun 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022 dan 2023 yang Indikator dan targetnya disesuaikan dengan Kondisi saat ini.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampi akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan

peraturan pelaksananya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 ini.

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2019- 2020, rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022 dan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2023.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Prioritas pembangunan Daerah Kota Cirebon dilaksanakan setiap tahun, mulai tahun 2021 terdapat 7 Prioritas Pembangunan di Kota Cirebon. Untuk prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 yang dilaksanakan hanya sampai tahun 2023. Hal ini dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksananya yang diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.
4. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Walikota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
9. Walikota dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.
10. Pada tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 1, 2, dan 3 dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksananya yang akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018– 2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kota Cirebon mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah.

WALI KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS